



PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017-2022

JAKARTA 2022





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017-2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana mana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);

26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017 – 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
12. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

23. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
25. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
26. Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang selanjutnya disingkat RJPP adalah rencana strategis perusahaan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan analisa teknis, akurat dan tepat bagaimana perusahaan akan di arahkan dan bagaimana semua sumberdaya yang di miliki dapat dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dan di sesuaikan dengan kondisi faktor politik maupun ekonomi secara global.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari RJPP/ BUMD.

BAB II

RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RPJMD meliputi :
 - a. Visi, Misi, dan Program Gubernur;
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi,
 - c. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Program Perangkat Daerah, dan;
 - e. Rencana Kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dengan sistematika terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. Bab V Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
 - f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;

- g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Bab IX Kegiatan Strategis Daerah;
- j. Bab X Pengembangan BUMD;
- k. Bab XI Penutup.

Pasal 3

RPJMD berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta sebagai pedoman BUMD dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) BUMD melaksanakan RPJMD melalui penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam rangka mencapai tujuan pendirian dan pengembangan BUMD dan/atau mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh Bappeda secara berkala.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
 - b. kegiatan pembangunan Daerah;
 - c. Indikator Kinerja Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah; dan
 - d. target Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD yang diterjemahkan dalam Renstra Perangkat Daerah, RKPD, RJPP dan RKAP.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menjamin bahwa:
 - a. dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah telah berpedoman pada Program Perangkat Daerah/Program Pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah, telah dijabarkan kedalam rencana Program, RJPP, RKAP dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Program Perangkat Daerah/Program pembangunan dan indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD dan RKAP.

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap RPJMD mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, hasil evaluasi RKPD dan RKAP BUMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2022, maka penyusunan perubahan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada :
 - a. RPJMD 2017-2022;
 - b. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025;
 - c. RPJMN 2020-2024;
 - d. Program prioritas nasional dalam RKP 2022;
 - e. Program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - f. memperhatikan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.
- (2) Dalam hal dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2022 dan/atau dokumen RPJMD 2017 – 2022 berakhir, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada :
 - a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025;
 - b. RPJMN 2020-2024;
 - c. Program prioritas nasional dalam RKP 2023;
 - d. Program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - e. memperhatikan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.
- (3) Struktur Program pada RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyusunan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD Perubahan Tahun 2022 dan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 201

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

BAB 1	PENDAHULUAN	5
1.1	Latar Belakang	28
1.2	Maksud dan Tujuan	30
1.3	Dasar Hukum Penyusunan	31
1.4	Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	34
1.5	Sistematika Penulisan	36
BAB 2	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	38
2.1	Sejarah Kota Jakarta	40
2.2	Otonomi Daerah di Provinsi DKI Jakarta	41
2.3	Aspek Geografi dan Demografi	43
2.3.1	Karakteristik Wilayah	43
2.3.1.1	Luas dan Batas Wilayah Administrasi	43
2.3.1.2	Letak dan Kondisi Geografis	44
2.3.1.3	Topografi dan Kemiringan Lereng	45
2.3.1.4	Geologi	45
2.3.1.5	Hidrologi	48
2.3.1.6	Klimatologi	50
2.3.1.7	Penggunaan Lahan	52
2.3.2	Potensi Pengembangan Wilayah	53
2.3.3	Wilayah Rawan Bencana	53
2.3.4	Demografi	57
2.4	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	59
2.4.1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	59
2.4.1.1	Pertumbuhan PDRB	59
2.4.1.2	Laju Inflasi	61
2.4.1.3	PDRB per Kapita	62
2.4.1.4	Indeks Gini	62
2.4.1.5	Tingkat Kemiskinan	63
2.4.1.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64
2.4.1.7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	65
2.4.1.8	Angka Melek Huruf	65
2.4.1.9	Angka Usia Harapan Hidup	66
2.4.1.10	Persentase Balita Gizi Buruk	66
2.4.1.11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68
2.4.1.12	Persentase PAD terhadap Pendapatan	69
2.4.1.13	Opini BPK atas Laporan Keuangan	70
2.4.2	Aspek Pelayanan Umum	71
2.4.2.1	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	71
2.4.2.2	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar	95
2.4.2.3	Fokus Urusan Pelerintahan Pilihan	128
2.4.2.4	Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	136
2.4.3	Aspek Daya Saing Daerah	139
2.4.3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	139
2.4.3.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	141
2.4.3.3	Fokus Iklim Berinvestasi	143
2.4.3.4	Fokus Sumber Daya Manusia	145

BAB 3	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	170
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	172
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	172
3.1.2	Neraca Daerah	182
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	188
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	189
3.2.2	Analisis Pembiayaan	189
3.3	Kerangka Pendanaan	193
3.3.1	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	193
3.3.2	Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2022	195
3.3.2.1	Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022	195
3.3.2.2	Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018-2022	201
3.3.2.3	Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2018 2022	203
3.3.2.4	Perhitungan Kerangka Pendanaan	205
BAB 4	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	210
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	212
4.2	Penelaahan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025	219
4.3	Penelaahan RPJMN 2015-2019	223
4.4	Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya	225
4.5	Penelaahan Isu Global/Agenda Pembangunan Internasional	227
4.5.1	Masyarakat Ekonomi ASEAN	227
4.5.2	Sustainable Development Goals (SDGs)	228
4.6	Isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	232
4.7	Isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022	232
BAB 5	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	254
5.1	Visi	256
5.2	Misi	257
5.3	Janji Kerja	260
5.4	Keselaran Visi, Misi RPJMD Provinsi DKI Tahun 2017-2022 dengan Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005-2025	264
5.5	Keselaran Visi, Misi RPJMD Provinsi DKI Tahun 2018-2022 dengan Visi, Misi RPJMN Tahun 2015-2019	266
5.6	Tujuan dan Sasaran	269
BAB 6	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	280
6.1	Strategi Pembangunan	282
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan	294
6.2.1	Arah Kebijakan Provinsi	294
6.2.2	Arah Kebijakan Kewilayahan	297
6.3	Program Pembangunan Daerah	328
BAB 7	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	386
7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan	388
7.1.1	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	390
7.1.2	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	394
7.1.3	Obligasi daerah	397
7.1.4	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/Corporate Social Responsibility (CSR)	398
7.1.5	Pendanaan Terkait Pemanfaatan Ruang	399
7.1.6	Kelembagaan Pembiayaan Pembangunan	401
7.2	Program Perangkat Daerah	401

BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	450
8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	452
8.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	452
8.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	452
8.2.2 Aspek Pelayanan Umum	453
8.3 Aspek Daya Saing Daerah	453
BAB 9 KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	484
9.1 Pembangunan Manusia	487
9.1.1 Pengentasan Kemiskinan	488
9.1.2 Pendidikan	489
9.1.3 Kesehatan	496
9.1.4 Permuliaan Perempuan, Perlindungan Anak & Disabilitas	498
9.1.5 Kepemudaan dan Olahraga	499
9.2 Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur	500
9.2.1 Pembangunan Ekonomi	500
9.2.2 Infrastruktur	514
9.3 Pengembangan Integritas Aparatur	565
9.3.1 Peningkatan Tata Kelola Bidang Regulasi/Hukum, Integrasi Aparatur dan Akuntabilitas Pemerintahan	566
9.4 Kota Lestari	578
9.4.1 Penataan Kawasan Permukiman	579
9.4.2 Penyediaan RTH	580
9.5 Simpul Kemajuan	582
9.5.1 Pengembangan Keanekaragaman Budaya	583
9.5.2 Pengembangan Kepariwisata	585
9.5.3 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu	585
BAB 10 PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	598
10.1 Kinerja BUMD DKI Jakarta	601
10.1.1 Aspek Legal	607
10.1.2 Aspek Kepemilikan	609
10.1.3 Aspek Manfaat dan Produk	611
10.1.4 Aspek Daya Saing BUMD	615
10.1.5 Aspek Peran BUMD	616
10.2 Kerangka Keuangan BUMD	618
10.2.1 Kebijakan Kinerja Korporasi	620
10.2.2 Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	621
10.2.3 Proyeksi Keuangan BUMD	623
10.2.4 Proyeksi Penanaman Modal Daerah (PMD)	624
10.3 Analisa Isu Strategis BUMD	624
10.3.1 Permasalahan	624
10.3.2 Isu Strategis Utama	625
10.4 Strategi dan Rencana Pengembangan BUMD	628
10.4.1 Strategi Umum	628
10.4.2 Strategi Sektor	633
10.4.3 Rencana Pengembangan BUMD	636
BAB 11 PENUTUP	648

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta	44
Tabel 2.2	Panjang dan Luas Sungai di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	50
Tabel 2.3	Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2016	51
Tabel 2.4	Suhu Udara Jakarta Menurut Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2016	51
Tabel 2.5	Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	51
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	59
Tabel 2.7	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017	59
Tabel 2.8	Indeks Gini &Tingkat Ketimpangan Provinsi DKI Jakarta 2012-2017	63
Tabel 2.9	Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2011-2015	65
Tabel 2.10	Persentase Balita Gizi Buruk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	66
Tabel 2.11	Persentase Balita Stunting Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	67
Tabel 2.12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta 2012-2016	68
Tabel 2.13	Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017	69
Tabel 2.14	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	69
Tabel 2.15	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	70
Tabel 2.16	Angka Partisipasi Sekolah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	71
Tabel 2.17	Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/ SMK/MA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	74
Tabel 2.18	Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	75
Tabel 2.19	Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	75
Tabel 2.20	Persentase Guru yang Kompeten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	76
Tabel 2.21	Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/ MTs; dan SMA/SMK/MA Terakreditasi A Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016	77
Tabel 2.22	Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016	77
Tabel 2.23	Tabel Jumlah Penerima Kartu Jakarta Pintar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2016	78
Tabel 2.24	Jumlah Sekolah Yang Menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	78
Tabel 2.25	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017	79
Tabel 2.26	Persentase Capaian SPM kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016	80
Tabel 2.27	Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	82
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016	83
Tabel 2.29	Data pembangunan gedung pemda oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta 2013-2016	83
Tabel 2.30	Rasio TPS per Satuan Penduduk Tahun 2012-2016	84
Tabel 2.31	Cakupan Pelayanan Air Bersih Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	84
Tabel 2.32	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	85
Tabel 2.33	Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk berdasarkan Indeks Pencemaran	86
Tabel 2.34	Data Status Mutu Air Limbah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	87
Tabel 2.35	Status Mutu Pemantauan Air Sungai berdasarkan Indeks Pencemaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	87
Tabel 2.36	Status Mutu Pemantauan Air Tanah Berdasarkan Indeks Pencemaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	87
Tabel 2.37	Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015	88

Tabel 2.38	Status Mutu Pemantauan Muara Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015	88
Tabel 2.39	Luas Permukiman yang Tertata Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	89
Tabel 2.40	Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Rumah Tangga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015	89
Tabel 2.41	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	90
Tabel 2.42	Cakupan Polisi Pamong Praja dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	90
Tabel 2.43	Jumlah Kejadian Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	92
Tabel 2.44	Penanganan PMKS di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	93
Tabel 2.45	Jumlah Keluarga Miskin yang mandiri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	93
Tabel 2.46	Jumlah Pencari Kerja Yang Berhasil Ditempatkan dan Berwirausaha Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	95
Tabel 2.47	Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	96
Tabel 2.48	Kasus Hubungan Industrial Yang Masuk Ke Tingkat Perjanjian Bersama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	96
Tabel 2.49	KDRT di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	97
Tabel 2.50	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	97
Tabel 2.51	Ketersediaan Pangan Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	98
Tabel 2.52	Persentase Pangan Bebas Bahan Berbahaya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	100
Tabel 2.53	Jumlah Kelurahan dan Bidang Tanah yang Telah Didata di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003-2016	100
Tabel 2.54	Jumlah Kegiatan yang Diawasi dalam rangka Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017	105
Tabel 2.55	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2016	106
Tabel 2.56	Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	107
Tabel 2.57	Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	109
Tabel 2.58	Cakupan Peserta KB Aktif Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	111
Tabel 2.59	Rasio Akseptor KB Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	111
Tabel 2.60	Arus Kedatangan dan Arus Keberangkatan Angkutan Umum di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	113
Tabel 2.61	Akumulasi Arus Orang dan Barang di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	114
Tabel 2.62	Rasio Ijin Trayek di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	115
Tabel 2.63	Jumlah Pelabuhan Laut, Udara, serta Terminal Bis Penumpang dan Barang Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	115
Tabel 2.64	Persentase Angkutan Darat di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	116
Tabel 2.65	Perkembangan Indikator Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	116
Tabel 2.66	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	117
Tabel 2.67	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	118
Tabel 2.68	Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	119
Tabel 2.69	Persentase Koperasi Aktif di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	121
Tabel 2.70	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	122
Tabel 2.71	Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	124
Tabel 2.72	Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	125
Tabel 2.73	Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	126

Tabel 2.74	Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	126
Tabel 2.75	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	128
Tabel 2.76	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	129
Tabel 2.77	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	130
Tabel 2.78	Pembebasan Lahan RTH Hutan, RTH Taman, RTH Makam Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	130
Tabel 2.79	Persentase Penambahan Rasio RTH Hutan, RTH Taman, dan RTH Makam Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	131
Tabel 2.80	Pembangunan RTH Taman dan RTH Makam Tahun 2012 - 2016	131
Tabel 2.81	Luas RTH Hutan, RTH Taman, dan RTH Makam yang Dipelihara Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	131
Tabel 2.82	Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	132
Tabel 2.83	Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	133
Tabel 2.84	Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	134
Tabel 2.85	Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	136
Tabel 2.86	Indikator Kinerja Fokus Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	137
Tabel 2.87	Opini BPK Atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	137
Tabel 2.88	Data Rekapitulasi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2015	138
Tabel 2.89	Rasio Nilai Tukar Petani di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	140
Tabel 2.90	Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	141
Tabel 2.91	Penggunaan Telepon Rumah dan Seluler di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	142
Tabel 2.92	Ketersediaan dan Penggunaan Listrik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	142
Tabel 2.93	Jumlah Usaha Restoran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	142
Tabel 2.94	Fasilitas Perdagangan dan Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015	143
Tabel 2.95	Angka Kriminalitas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2014	144
Tabel 2.96	Lama Proses Perijinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016	144
Tabel 2.97	Rasio Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2012-2017	145
Tabel 2.98	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	147
Tabel 3.1	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017	173
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017	175
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode 2012-2017	179
Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017	180
Tabel 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017	183
Tabel 3.6	Hasil Perhitungan Neraca Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	187
Tabel 3.7	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017	189
Tabel 3.8	Defisit Riil Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017	190
Tabel 3.9	Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017	190
Tabel 3.10	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017	191
Tabel 3.11	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017	192
Tabel 3.12	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015	192
Tabel 3.13	Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017	193

Tabel 3.14	Proyeksi Asumsi Makroekonomi DKI Jakarta Tahun 2018-2022	195
Tabel 3.15	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022	201
Tabel 3.16	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022	203
Tabel 3.17	Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022	204
Tabel 3.18	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022	207
Tabel 3.19	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022	208
Tabel 3.20	Rencana Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022	209
Tabel 4.1	Permasalahan Pembangunan	215
Tabel 4.2	Kegiatan Strategis Nasional Provinsi DKI Jakarta Dalam RPJMN 2015-2019	223
Tabel 4.3	Identifikasi RPJMD Daerah Lain	225
Tabel 4.4	Isu-isu Strategis Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2017-2022	233
Tabel 5.1	Hubungan Antara Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dengan Misi dan Agenda Prioritas RPJMN 2015-2019	268
Tabel 5.2	Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	273
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi DKI Jakarta 2017-2022	285
Tabel 6.2		335
Tabel 7.1	Porsi Pembiayaan Kegiatan Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 Fase 1	394
Tabel 7.2		403
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022	453
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	457
Tabel 9.1	Target Pewirausaha Baru	506
Tabel 9.2	Target Lapangan Kerja Baru	507
Tabel 9.3	Rencana Dukungan Pendanaan DP Nol Rupiah Dalam 5 Tahun	520
Tabel 9.4	Rencana Penarikan Selama Lima Tahun on-lending dan on-granting	526
Tabel 9.5	Layanan PT. Transportasi Jakarta	529
Tabel 9.6	Gambaran Umum Transportasi Jakarta	540
Tabel 9.7	Data Jalan di Provinsi DKI Jakarta	546
Tabel 9.8	Rencana Waktu Pelaksanaan Pembangunan Simpang Susun Tahun 2018 – 2022	547
Tabel 9.9	Proyeksi Target Pencapaian Pembangunan Trotoar	549
Tabel 9.10	Rencana Waktu Pelaksanaan Penataan Trotoar Tahun 2018 – 2022	550
Tabel 9.11	Rencana Pelaksanaan Pembangunan Jalan Orang Tak Sebidang (JPO/TPO/Skywalk) Tahun 2018 – 2022	551
Tabel 9.12	Rencana Pelaksanaan Pembangunan dan Pelebaran Jalan Tahun 2018 – 2022	552
Tabel 9.13	Rencana Pengembangan Integrasi Sistem Pembayaran Moda Transportasi Jabodetabek	554
Tabel 9.14	Pemrakarsa dan Panjang Tanggul	555
Tabel 9.15	Jumlah Kelurahan, Jumlah RW, RT dan RW Kumuh yang Didata menurut Kabupaten/ Kota di DKI Jakarta, 2017	579
Tabel 9.16	Rencana Penataan Kawasan Permukiman tahun 2018-2022	580
Tabel 9.17	Rencana Pembangunan dan Penataan Taman Maju Bersama dan Taman Pintar Tahun 2018-2022	582
Tabel 10.1	Pendapatan Usaha dan Laba Bersih BUMD 2011-2016	616
Tabel 10.2	Kinerja Keuangan BUMD DKI Jakarta Periode 2011 – 2016	619
Tabel 10.3	Pembagian Dividen Berdasarkan Klaster Usaha BUMD tahun 2011-2016	619
Tabel 10.4	BUMD DKI Jakarta yang menerima Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada periode 2011 – 2017	622
Tabel 10.5	Proyeksi Dividen seluruh BUMD 2017 - 2022 dari seluruh sektor pembangunan daerah	623
Tabel 10.6	Proyeksi kinerja keuangan seluruh BUMD 2017 - 2022	623
Tabel 10.7	Proyeksi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMD) 2017 – 2022	624
Tabel 10.8	Roadmap Umum Pengembangan BUMD 2018-2022	638

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	35
Gambar 2.1	Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta	43
Gambar 2.2	Komposisi Pembagian Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi	44
Gambar 2.3	Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur	45
Gambar 2.4	Potongan Melintang Selatan – Utara	47
Gambar 2.5	Peta Tematik Sungai di Provinsi DKI Jakarta	49
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan di Provinsi DKI Jakarta	53
Gambar 2.7	Peta Penurunan Muka Tanah di Provinsi DKI Jakarta	54
Gambar 2.8	Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi DKI Jakarta	55
Gambar 2.9	Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016	58
Gambar 2.10	Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017	60
Gambar 2.11	Persentase Kontribusi Sektor terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta (ADHK tahun dasar2010) Tahun 2012-2017	61
Gambar 2.12	Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2012-2017	61
Gambar 2.13	PDRB per Kapita Provinsi DKI Jakarta dan Nasional (Ribuan Rupiah/jiwa) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Periode 2012-2017	62
Gambar 2.14	Indeks Gini DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Nasional 2012-2017	62
Gambar 2.15	Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta, Pulau Jawa, dan Nasional Tahun 2012-2017	63
Gambar 2.16	Perbandingan IPM Provinsi dan Nasional Dengan Menggunakan Metode Baru Tahun 2012-2017	64
Gambar 2.17	Angka Melek Huruf DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2012-2016	65
Gambar 2.18	Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2012-2016	66
Gambar 2.19	Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Tahun 2012-2016	72
Gambar 2.20	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2012-2016	73
Gambar 2.21	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di DKI Jakarta Tahun 2013-2017	73
Gambar 2.22	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di DKI Jakarta	81
Gambar 2.23	Jumlah Personel Pemadam Kebakaran dan Jumlah Hidran Kebakaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	91
Gambar 2.24	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	94
Gambar 2.25	Perkembangan Jumlah Sarana Sosial di DKI Jakarta	94
Gambar 2.26	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 2013-2016	98
Gambar 2.27	Komposisi Sampah di Sumber Sampah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	101
Gambar 2.28	Komposisi Sampah di TPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	101
Gambar 2.29	Persentase Penanganan Sampah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	102
Gambar 2.30	Pengurangan Sampah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	103
Gambar 2.31	Age Specific Fertility Rate Kelompok umur 15-19 tahun Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	110
Gambar 2.32	Unmet Need Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	112
Gambar 2.33	Jumlah Volume Usaha Koperasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	121
Gambar 2.34	Jumlah Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Tahun 2013-2017	122
Gambar 2.35	Jumlah Alat Ukur Yang Ditera dan Ditera Ulang, Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	123
Gambar 2.36	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	123
Gambar 2.37	Kunjungan Wisata Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	128
Gambar 2.38	Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	137

Gambar 2.39 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2015	138
Gambar 2.40 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	139
Gambar 2.41 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga non Makanan per Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016	140
Gambar 2.42 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017	145
Gambar 3.1 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017	176
Gambar 3.2 Proporsi Realisasi Komponen Pembentuk PAD Provinsi DKI Jakarta	177
Gambar 3.3 Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Provinsi DKI Jakarta	178
Gambar 3.4 Proporsi Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja	180
Gambar 3.5 Gambaran Proyeksi Pendapatan dan Proyeksi Belanja versi World Bank dan TAPD	206
Gambar 4.1 Komponen Pembentuk Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta	212
Gambar 4.2 Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)	230
Gambar 4.3 Perumusan Isu-isu strategis Pembangunan DKI Jakarta tahun 2017-2022	233
Gambar 5.1 Penjabaran Visi Misi RPJMD 2017-2022	263
Gambar 5.2 Keterkaitan Visi RPJPD dengan Visi dan Misi RPJMD	265
Gambar 5.3 Keterkaitan Misi RPJPD dengan Visi dan Misi RPJMD	265
Gambar 5.4 Keterkaitan Visi RPJPN, RPJMN dan RPJMD DKI Jakarta	266
Gambar 5.5 Keterkaitan Misi RPJPN, RPJMN dan RPJMD DKI Jakarta	267
Gambar 6.1 Arah kebijakan pembangunan (Milestone) tahun 2017-2022	296
Gambar 6.2 Penataan Kawasan Johar Baru	298
Gambar 6.3 Pengembangan Kawasan Senen	300
Gambar 6.4 Penataan Kawasan Pasar Baru	302
Gambar 6.5 Penataan Kawasan Tanah Abang	304
Gambar 6.6 Rencana Peruntukan Kawasan Marunda (Rumah si Pitung dan Masjid Al-Alam)	305
Gambar 6.7 Rencana Pengembangan Rumah si Pitung	306
Gambar 6.8 Rencana Pengembangan Masjid Al-Alam	306
Gambar 6.9 Rencana Pengembangan Kalibaru	308
Gambar 6.10 Konsep Pengembangan Danau Sunter Selatan	309
Gambar 6.11 Ilustrasi Sentra Primer Baru Barat (SPBB)	310
Gambar 6.12 Ilustrasi Kawasan Sentra Flona Semanan	311
Gambar 6.13 Ilustrasi Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH) Slipi	312
Gambar 6.14 Ilustrasi Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya	312
Gambar 6.15 Gambar Lokasi Rencana Penataan Kawasan Lenteng Agung	313
Gambar 6.16 Gambar Lokasi Rencana Penataan Kawasan Tebet	314
Gambar 6.17 Rencana Tata Massa Bangunan Kawasan Jatinegara	315
Gambar 6.18 Kawasan 1000 Danau	316
Gambar 6.19 Kawasan Sekolah Kreatif Kecamatan Cipayung	317
Gambar 6.20 Layout Kawasan Sekolah Kreatif Kecamatan Cipayung	318
Gambar 6.21 Kawasan Kawasan Eco Wisata Cipayung	320
Gambar 6.22 Kawasan Religi Pangeran Jayakarta	321
Gambar 6.23 Basic Site Plan Kawasan Cakung Barat	322
Gambar 6.24 Pulau Pramuka	323
Gambar 6.25 Rencana Pengembangan Pulau Pramuka	324
Gambar 6.26 Pulau Panggang	325
Gambar 6.27 Pulau Tidung Besar	326
Gambar 6.28 Rencana Pembangunan floating deck sisi barat	328
Gambar 6.29 Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta	328
Gambar 7.1 Kerangka Pendanaan yang Dapat Diimplementasikan pada Kurun 2017-2022	390
Gambar 9.1 Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta	486
Gambar 9.2 Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Pembangunan Manusia	487
Gambar 9.3 Tingkat Kemiskinan Tahun 2008 s.d. 2017	488
Gambar 9.4 Skema OK O-Care	497

Gambar 9.5	Desain Stadion Olahraga Bertaraf Internasional	499
Gambar 9.6	Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Ekonomi	500
Gambar 9.7	Penyelenggaraan OK OCE	503
Gambar 9.8	Kerjasama Pemenuhan Pasokan Pangan Jakarta	509
Gambar 9.9	Peran Pemerintah dalam mengoptimalkan BUMD Pangan untuk pengendalian harga pangan	510
Gambar 9.10	Roadmap Pengendalian Inflasi DKI Jakarta	511
Gambar 9.11	Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Infrastruktur	515
Gambar 9.12	Data kepemilikan Properti Penduduk DKI Jakarta	516
Gambar 9.13	Dukungan Pemerintah Dalam Memenuhi Kebutuhan Perumahan	517
Gambar 9.14	Mekanisme housing career penyelenggaraan rumah DP Nol Rupiah	520
Gambar 9.15	Prinsip OK Otrip	520
Gambar 9.16	Skema OK Otrip	521
Gambar 9.17	MRT Jakarta Koridor North – South & East – West	523
Gambar 9.18	Koridor MRT North – South Fase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI)	523
Gambar 9.19	Ilustrasi Gambar Stasiun Layang MRT Jakarta	524
Gambar 9.20	Ilustrasi Gambar Stasiun Bawah Tanah MRT	524
Gambar 9.21	Peta Rencana 7 Koridor LRT dan Koridor Prioritas	527
Gambar 9.22	Rute Kereta Api Lintas Jabodetabek (Elevated Loopline/ Circular Line)	531
Gambar 9.23	Konsep Pengembangan TOD	533
Gambar 9.24	TOD Lebak Bulus	534
Gambar 9.25	TOD Dukuh Atas	535
Gambar 9.26	Konsep Pengembangan TOD MRT Jakarta Koridor North – South Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan)	536
Gambar 9.27	Ilustrasi Rencana Pengembangan TOD Kampung Bandan	537
Gambar 9.28	Ilustrasi Rencana Pengembangan TOD Depo LRT Jakarta Fase 1	538
Gambar 9.29	Rencana Alignment LRT Jakarta Fase 2 Koridor Rawamangun – Dukuh Atas – Tanah Abang	539
Gambar 9.30	ERP Koridor Blok M – Kota dan Koridor Kuningan – HOS Cokroaminoto	541
Gambar 9.31	ERP Koridor Mampang – Ragunan	542
Gambar 9.32	ERP Koridor Cawang – Grogol	542
Gambar 9.33	Konsep Kantung Parkir	543
Gambar 9.34	Area Traffic Control System (ATCS)	545
Gambar 9.35	Penataan Trotoar Jl. Jatinegara Timur Jakarta Timur (2017)	549
Gambar 9.36	Rencana Penataan Trotoar Jl. Sudirman – MH. Thamrin	550
Gambar 9.37	Ilustrasi Desain JPO (2017)	551
Gambar 9.38	Pemeliharaan Jalan (2017)	552
Gambar 9.39	lokasi dan trase pembangunan tanggul muara	556
Gambar 9.40	Jalur indikatif pipa transmisi di dalam Kota Jakarta bagi SPAM Jatiluhur I	559
Gambar 9.41	Peta Lokasi Pembangunan SPALT Jakarta Sewerage System (JSS)	561
Gambar 9.42	Pemulung di TPST Bantar Gebang dan Antrian di TPST Bantar Gebang	563
Gambar 9.43	Pembongkaran sampah dan penggunaan Excavator dan Peta TPST Bantar Gebang	564
Gambar 9.44	Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Integritas Aparatur	565
Gambar 9.45	Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Kota Lestari	578
Gambar 9.46	Ilustrasi Rencana Pengembangan Taman dengan Konsep Taman Pintar dan Taman Maju Bersama	581
Gambar 9.47	Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Simpul Kemajuan	583
Gambar 9.48	Kondisi Pulau Sebir dan Penataan Dermaga Pulau Sebir	592
Gambar 9.49	Pulau Sebaru Kecil dan Penataan Dermaga Pulau Sebaru Kecil	593
Gambar 9.50	Perancangan Pengembangan Pulau Harapan dan Penataan Dermaga Pulau Harapan	593
Gambar 9.51	Pulau Bira Besar dan Masterplan Pulau Bira Besar	594
Gambar 9.52	Pulau Tidung dan Penataan Dermaga Pulau Tidung	595
Gambar 10.1	Distribusi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	611
Gambar 10.2	Pembagian BUMD/PT Patungan dalam kuadran berdasarkan misi BUMD	617



BAB I

PENDAHULUAN



Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengetasan kemiskinan.

BAB PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengetasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Provinsi DKI Jakarta dalam lingkup kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki peran strategis sebagai Ibukota NKRI. Implikasi dari peran sebagai Ibukota NKRI tersebut, pembangunan DKI Jakarta ditempatkan pada posisi yang lebih khusus dibandingkan daerah lainnya. Pembangunan di wilayah DKI Jakarta mempunyai tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain disamping menyimpan potensi yang sangat besar.

Adapun peran Provinsi DKI Jakarta di antaranya :

1. Ibukota NKRI berdasarkan undang-undang yang ditetapkan sehingga menjadi pusat pemerintahan;
2. Pusat kegiatan ekonomi regional, nasional dan internasional, dimana hampir 80 persen kegiatan ekonomi global yang ada di Indonesia berada di Jakarta;
3. Pusat kegiatan politik ASEAN dan salah satu sentra politik Asia-Pasifik tempat beradanya Kedutaan Besar negara sahabat;
4. Pusat kegiatan budaya;
5. Pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan intelektual; dan
6. Pintu gerbang utama menuju dunia Internasional.

Pada tahun 2017, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi DKI Jakarta diselenggarakan untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengetasan kemiskinan.

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2017-2022.

Dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RPJMD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RPJMD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh kabupaten/kota, mengarah pada percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD meliputi: penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, penyusunan Rancangan Awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD, dan penetapan RPJMD.

Sebagai catatan, periodisasi RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 ditetapkan sesuai dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih terhitung sejak dilantik pada tanggal 16 Oktober 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini merupakan tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor 050/9710/BANGDA tanggal 18 Desember 2017 tentang Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2017-2022;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2017-2022;
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan program Gubernur terpilih;
5. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan prioritas pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tujuan RPJMD periode 2017-2022 adalah memantapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode 2013-2017 dengan fokus pada pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan dengan terus memantapkan daya saing global. Selain itu tujuan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih

Tujuan RPJMD periode 2017-2022 adalah memantapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode 2013-2017 dengan fokus pada pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki

lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;

3. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
4. Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
5. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
6. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan;
7. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
8. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
9. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD periode 2017-2022 tercantum dalam:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana mana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);

25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

A. RPJM Nasional

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 . Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Provinsi DKI Jakarta.

B. RPJPD 2005-2025

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025. RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan tahap keempat dari perencanaan pembangunan Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD.

C. RTRW 2030

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2030 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang provinsi.

D. RKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPJMD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

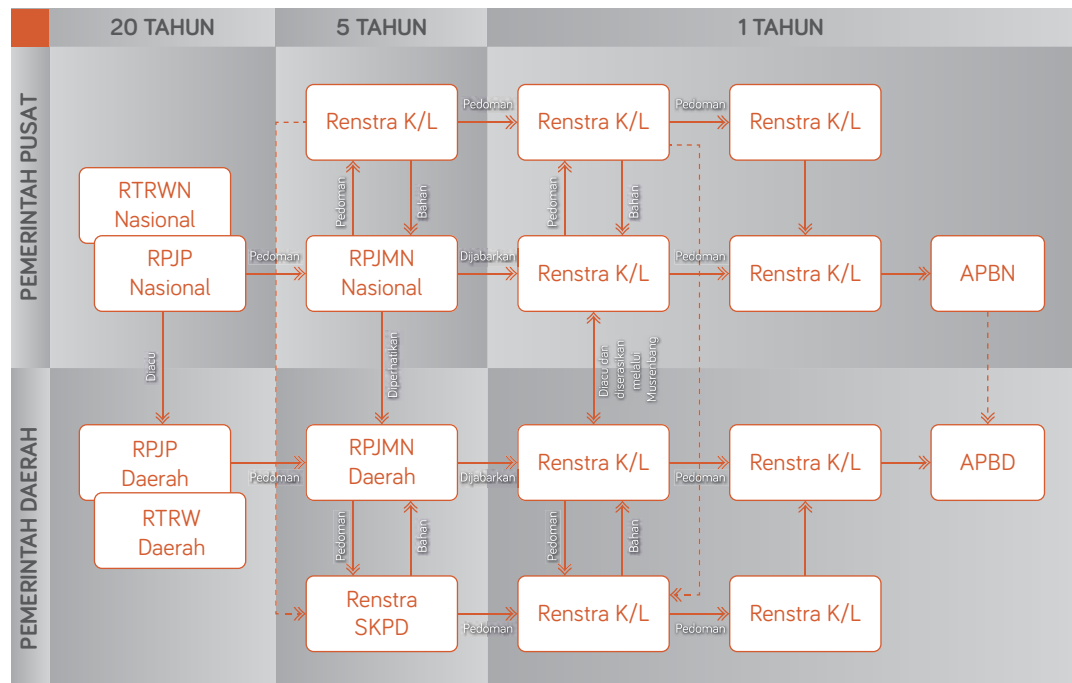
E. Renstra SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Renstra Adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD pelaksana pembangunan.

Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 terdiri dari 11 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan posisi dan peran Provinsi DKI Jakarta serta gambaran umum penyusunan RPJMD yang terdiri dari dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2017-2022.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan

pelaksanaannya. Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, rumusan arah kebijakan dibuat pertahun sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tiap tahunnya.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan dan kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

BAB IX KEGIATAN STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menguraikan gambaran tentang kegiatan strategis daerah yang diantaranya merupakan bagian dari kegiatan strategis nasional maupun yang mendukung pencapaian janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB X PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Bagian ini menguraikan gambaran umum, evaluasi kinerja dan beberapa aspek tentang Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada bab ini juga ditekankan tentang kinerja BUMD yang mendukung kinerja pelayanan publik.

BAB XI PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dan juga berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

BAB

II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 SEJARAH KOTA JAKARTA

Sejarah Kota Jakarta bermula dari sejarah berdirinya kerajaan yang terletak di daerah Jawa Barat dekat Kota Bogor sekarang, bernama Padjadjaran yang diperintah oleh Sri Baduga Maharaja. Sisi utara Kerajaan Padjadjaran berbatasan dengan Muara Kali Ciliwung yang menjadi letak sebuah bandar bernama Sunda Kelapa yang berfungsi sebagai kota perdagangan. Sebagian besar perdagangan di semenanjung Malaka pada masa itu dikuasai oleh bangsa Portugis, yang selalu berusaha mengembangkan kegiatannya di Asia Tenggara.

Pada awal abad 16, Falatehan yang kemudian lebih dikenal dengan nama Fatahillah, segera menunjuk pembantunya untuk memerintah kota dan mengganti nama Bandar Sunda Kelapa dengan *Fathan Mubina* atau Jayakarta, yang berarti “Kemenangan Akhir”. Pada tanggal 22 Juni 1527 dinyatakan sebagai tanggal dikuasainya oleh Falatehan yang pada akhirnya Jayakarta disingkat menjadi “Jakarta”.

Pada tanggal 1 April 1905 Stad Batavia berubah dan berkembang menjadi *Gemeente Batavia* dan diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri sebagai bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. *Gemeente Batavia* merupakan Pemerintah Daerah yang pertama kali dibentuk di Hindia Belanda. Luas wilayah *Gemeente Batavia* kurang lebih 125 km², tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta (Kepulauan Seribu).

Pada tahun 1908 wilayah Afdeling Batavia dibagi menjadi 2 distrik, yakni Distrik Batavia dan Weltevreden yang dibagi lagi menjadi 6 sub Distrik (*Onderdistrik*). Distrik Batavia terdiri dari sub Distrik Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priuk sedangkan Distrik Weltevreden terdiri dari sub Distrik Gambir, Senen, dan Tanah Abang.

Pada tanggal 5 Maret 1942 Kota Batavia jatuh ke tangan bala tentara Jepang dan pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pemerintah Jepang menerbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Pulau Jawa dibagi menjadi satuan-satuan daerah yang disebut Pemerintahan Keresidenan (*Syuu*). Dimana Keresidenan (*Syuu*) dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten (*Ken*) dan Kota (*Shi*).

Pada masa pendudukan Jepang, Jakarta adalah satu-satunya pemerintahan kota khusus (*Tokubetsu Shi*) di Indonesia selama pemerintahan militer Jepang. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 setelah kemerdekaan, kedudukan kota Djakarta ditetapkan

sebagai daerah Swatantra yang disebut “Kotapradja Djakarta Raya” dengan Walikotanya adalah Soewiryo (1945-1951), Syamsuridjal (1951-1953), dan Soediro (1953-1960).

Kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang berpangkat Gubernur pada tanggal 15 Januari 1960. Pada periode Gubernur Soemarno (1960-1964) terbit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan “Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya”. Sejak itu disebut Pemerintah DCI Djakarta Raya. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) terbit Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama “Djakarta”. Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta.

Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966-1977). Adapun gubernur selanjutnya berturut-turut yaitu Tjokropranolo (1977-1982), Soeprpto (1982-1987), Wiyogo Atmodarminto (1987-1992), Soerjadi Soerdirdja (1992-1997), Sutiyoso (1997-2007), Fauzi Bowo (2007-2012), Joko Widodo (2012-2014), Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017), dan Djarot Saiful Hidayat (2017).

Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sampai dengan periode Gubernur Surjadi Soedirdja (1992-1997). Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997-2007) terbit Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dan pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak itu sebutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya pada periode Gubernur Fauzi Bowo (2007-2012), implementasi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pembentukan deputi selaku pejabat yang membantu gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 OTONOMI DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Dengan otonomi Provinsi DKI Jakarta yang diletakkan pada tingkat provinsi maka penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta harus mengikuti dan menuruti asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tersebut juga disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Sebagai konsekuensi kedua peran di atas, maka dalam hal perencanaan pembangunan juga mempunyai metode pendekatan tersendiri dan berbeda dengan provinsi lainnya. Dalam hal ini proses ini dimulai dari tingkat Rukun Warga sampai tingkat provinsi dan diatur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah kota dan kabupaten hanya bersifat kota administrasi. Kemudian DPRD hanya ada pada tingkat provinsi, tidak ada pada tingkat kota dan kabupaten administrasi.

Selain sebagai ibukota negara kesatuan republik Indonesia, Jakarta mempunyai peran yang penting dan multifungsi. Secara ekonomi Jakarta merupakan kota yang berkontribusi paling tinggi bagi perekonomian nasional, yaitu sekitar 17 persen dari total produk domestik bruto nasional. Selain itu, Jakarta juga merupakan pusat kegiatan keuangan di tingkat nasional. Jakarta juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Dengan demikian maka Jakarta akan sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan untuk aspek luar negeri.

Sebagai kota internasional tempat komunikasi antar berbagai suku bangsa, maka penting bagi Jakarta dalam melakukan dialog budaya. Jadi secara umum budaya Jakarta dapat dikatakan sebagai pusat akulturasi antara budaya asing dan budaya domestik. Fungsi lainnya adalah bahwa Provinsi DKI Jakarta juga sebagai daerah otonom. Fungsi ini mendorong Pemerintahan provinsi DKI Jakarta harus mempunyai pemerintahan yang solid, kompeten, berwibawa, tanggap, bersih dan profesional. Sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan puas.

Dengan dasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom. Dengan fungsi tersebut ini maka Jakarta mempunyai karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.

2.3 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.3.1 Karakteristik Wilayah

2.3.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

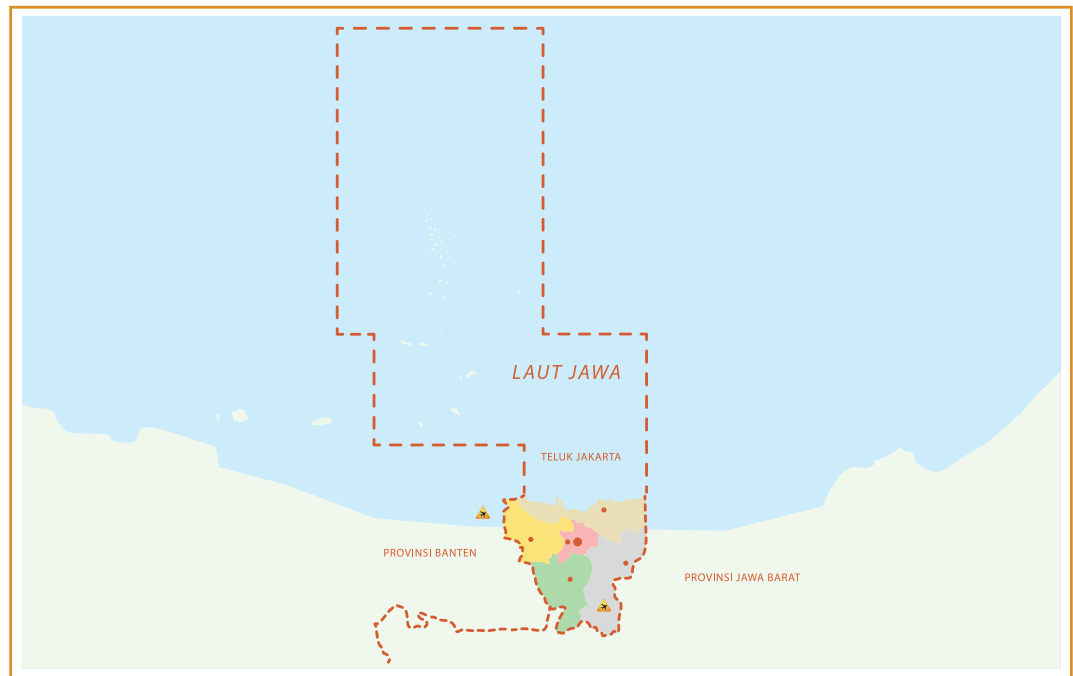
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah sluas 7.660 km², dengan luas daratan sebesar 662 km² (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan sebesar 6.998 km².

Batas sebelah utara Jakarta terbentang pantai sepanjang 32 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan 2 *flood way*. Sebagian besar karakteristik wilayah Provinsi DKI Jakarta berada di bawah permukaan air laut pasang. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian wilayah di Provinsi DKI Jakarta rawan genangan, baik karena curah hujan yang tinggi maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob). Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di atas bahwa batas wilayah sebelah barat Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi Banten, serta di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara rinci, batas administrasi Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1

Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030



2.3.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang terletak pada posisi 5°19'12" Lintang Selatan - 6°23' 54" Lintang Selatan dan 106°22' 42" Bujur Timur - 106°58' 18" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata ±7 meter di atas permukaan laut.

Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Wilayah kecamatan terbagi menjadi 44 kecamatan, dan kelurahan menjadi 267 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Provinsi
DKI Jakarta

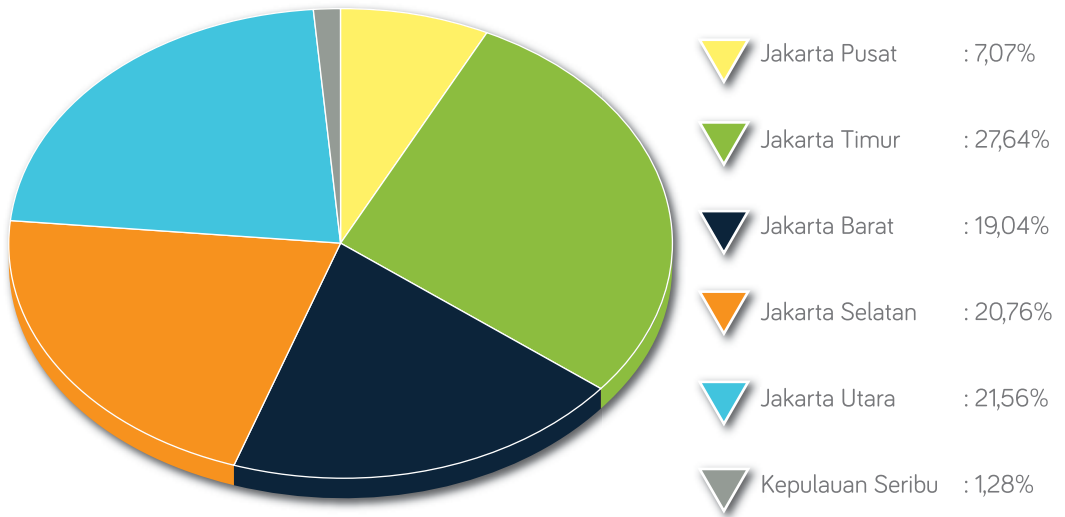
Sumber: Biro Tata
Pemerintahan Setda Provinsi
DKI Jakarta, 2018

No.	Kota/Kabupaten Administrasi	Luas Area (km²)	Jumlah			
			Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1.	Jakarta Pusat	48,13	8	44	389	4.572
2.	Jakarta Utara	146,66	6	31	449	5.223
3.	Jakarta Barat	129,54	8	56	586	6.481
4.	Jakarta Selatan	141,27	10	65	576	6.088
5.	Jakarta Timur	188,03	10	65	707	7.926
6.	Kepulauan Seribu	8,70	2	6	24	127
Jumlah		662,33	44	267	2.731	30.417

Wilayah Provinsi DKI Jakarta terluas adalah Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu 27,65 persen dari luas Provinsi DKI Jakarta, sedangkan wilayah terkecil adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 1,28 persen, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2
Komposisi Pembagian
Wilayah Kota dan Kabupaten
Administrasi

Sumber: Keputusan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor
171 tahun 2007



2.3.1.3 Topografi dan Kemiringan Lereng

Topografi Provinsi DKI Jakarta dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut. Sedangkan, sekitar 40 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang.

Sekitar 0-3 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu memiliki kecenderungan datar, sementara daerah hulu dimana sungai-sungai yang bermuara di Provinsi DKI Jakarta memiliki ketinggian yang cukup tinggi yaitu sekitar 8-15 persen di wilayah Bogor dan Cibinong, sedangkan daerah Ciawi-Puncak memiliki ketinggian lebih dari 15 persen.

Fenomena banjir yang terjadi di Jakarta tidak lepas dari kemiringan lerengnya. Hal ini disebabkan karena beberapa lokasi kota Jakarta masih tergolong dalam tingkat kemiringan lereng 0-3 persen atau berada pada kemiringan lereng relatif landai. Kemiringan lereng pada kota Tangerang dan Bekasi memiliki karakteristik yang sama, sehingga dapat dinyatakan bahwa sebagian besar kawasan Jabodetabek berada pada kemiringan lereng relatif landai.

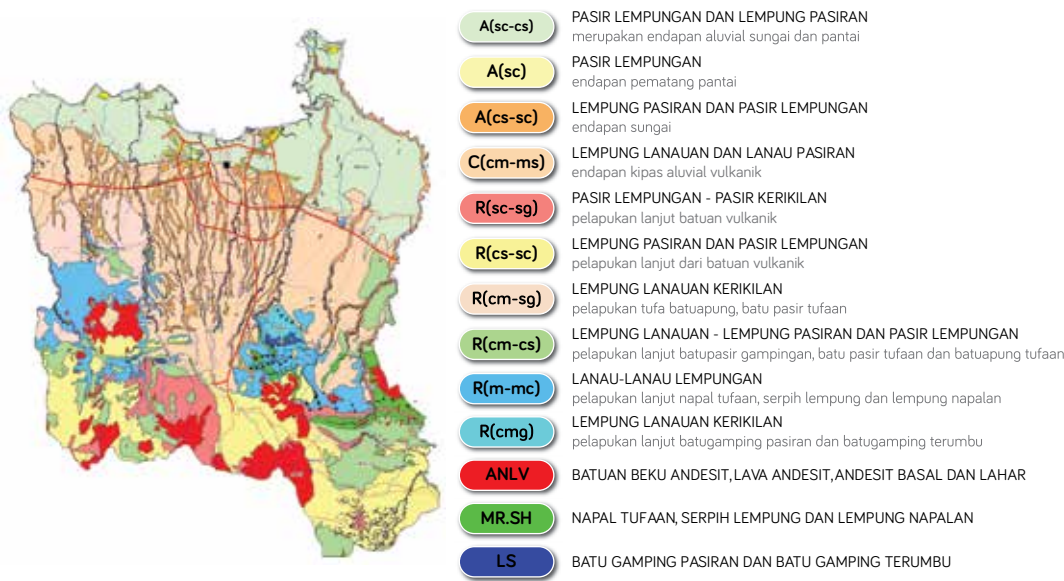
Dengan kondisi kemiringan lahan yang demikian, ditambah dengan 13 sungai yang mengalir di wilayah Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kecenderungan semakin rentannya wilayah Jakarta untuk tergenang air dan banjir pada musim hujan. Terlebih jika memperhatikan tingginya tingkat perkembangan wilayah di sekitar Jakarta, menyebabkan semakin rendahnya resapan air kedalam tanah dan menyebabkan *run off* air semakin tinggi, yang pada gilirannya akan memperbesar ancaman banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

2.3.1.4 Geologi

Secara geologis, geologi teknik Kawasan Jabodetabekpunjur dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar 2.3
Peta Geologi Teknik Kawasan
Jabodetabekpunjur

Sumber : MasterPlan
dan Kajian Akademis
Persampahan Provinsi
DKIJakarta 2012-2032



Struktur seluruh daerah di Jakarta terdiri dari endapan *Pleistocene* yang terdapat ± 50 meter di bawah permukaan tanah. Di sisi utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10-25 meter, semakin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8-15 meter, pada sebagian wilayah, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 meter. Sedangkan struktur di sisi selatan terdiri atas lapisan alluvial. Pada dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 Kilometer. Di bawah terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena timbunan seluruhnya oleh endapan alluvium.

Secara umum, karakteristik keteknikan tanah dan batuan di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa terdapat 4 karakteristik utama, yaitu:

- a. Pasir lempungan dan lempung pasir, merupakan endapan aluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasir dan lempung pasir. Semakin ke arah utara mendekati pantai di permukaan berupa lanau pasir dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapan antara perselang-seling lapisannya bekisar antara 3-12 meter, namun ketebalan secara keseluruhan endapan tersebut diperkirakan mencapai 300 meter. Lanau lempungan tersebar secara dominan di permukaan, abu-abu kehitaman sampai abu-abu kecoklatan, setempat mengandung material organik, lunak-teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lanau pasir, kuning keabuan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lempung pasir, abu-abu kecoklatan, tegus, plastisitas sedang-tinggi. Pada beberapa tempat nilai penetrometer saku (q_u) untuk lanau lempungan antara lanau pasir antara 2-3 kg/cm^2 dan lempung pasir antara 1,5-3 kg/cm^2 , tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lanau lempungan antara 1,5-5 meter, lanau pasir antara 0,5-3 meter dan lempung pasir antara 1-4 meter dan kisaran nilai tekanan konus lanau lempungan antara 2-20 kg/m^2 , lanau pasir antara 15-25 kg/m^2 dan lempung pasir antara 10-40 kg/m^2 .
- b. Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari perselang-seling lanau pasir dan pasir lempungan. Tebal endapan antara 4,5-13 meter. Di permukaan didominasi oleh pasir lempungan, dengan warna coklat muda dan mudah terurai. Pasir berbutir halus-sedang, mengandung lempung, setempat kerikil dan pecahan cangkang kerang. Lanau pasir berwarna kelabu kecoklatan, lunak, plastisitas sedang.

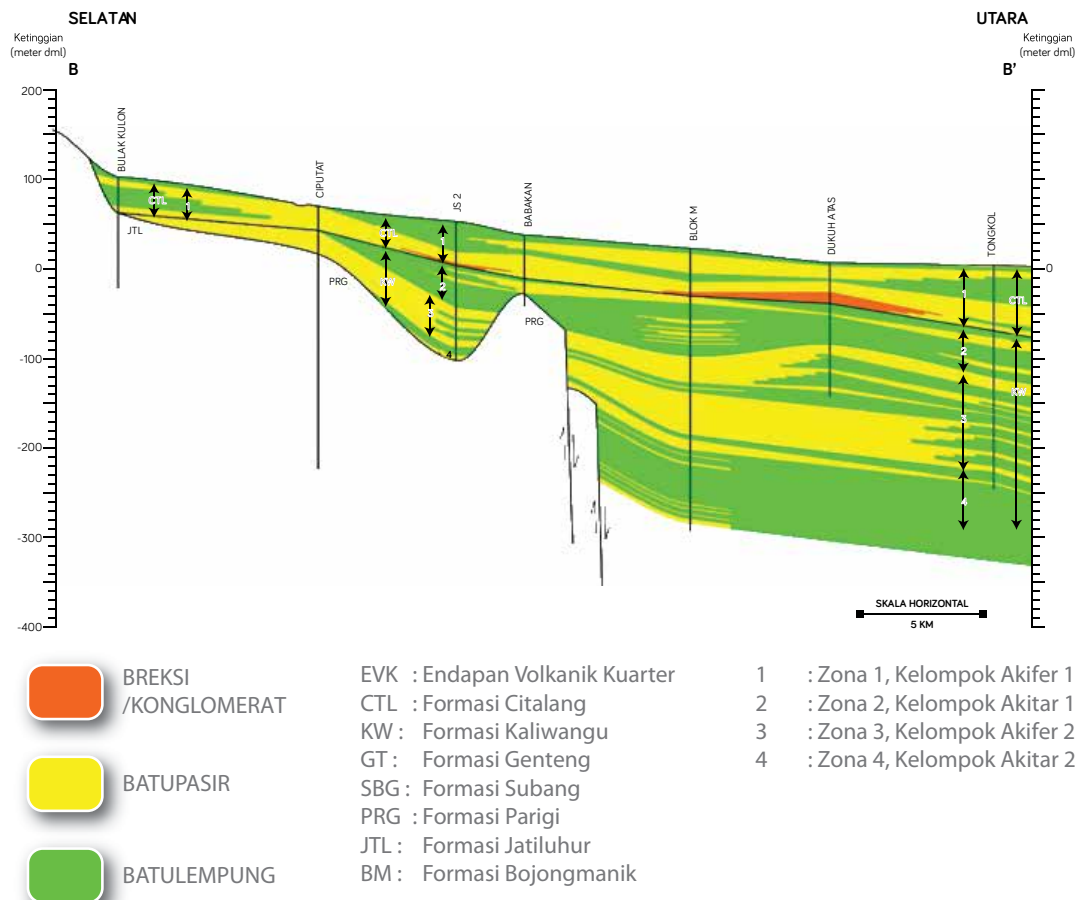
Di beberapa tempat nilai penetrometer saku (q_u) untuk pasir lempungan antara 0,75-2 kg/cm^2 dan lanau pasir antara 1,5-3 kg/cm^2 , tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) pasir lempungan antara 3-10 m dan lanau pasir antara 1,5-3 meter dan kisaran nilai tekanan konus pasir lempungan antara 10-25 kg/m^2 dan lanau pasir antara 2-10 kg/m^2 .

- c. Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limpah banjir sungai. Satuan tersebut tersusun beselang-selang antara lempung pasiran dan pasir lempungan. Lempung pasiran umumnya berwarna abu-abu kecoklatan, coklat, dengan plastisitas sedang, konsistensi lunak-teguh. Pasir lempungan berwarna abu-abu, angka lepas, berukuran pasir halus-kasar, merupakan endapan alur sungai dengan ketebalan 1,5-17 meter.
- d. Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik (tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal palisan antara 3-13,5 meter. Lempung lanauan tersebar secara dominan di permukaan, coklat kemerahan hingga coklat kehitaman, lunak-teguh, plastisitas tinggi. Lanau pasiran, merah-kecoklatan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Di beberapa tempat nilai penetrometer saku untuk lempung antara 0,8-2,85 kg/cm² dan lanau lempungan antara 2,3-3,15 kg/cm², tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lempung antara 1,5-6 meter dan lanau lempungan antara 1,5-7,5 meter. Kisaran nilai tekanan konus lempung antara 2-50 kg/m² dan lanau lempungan antara 18-75 kg/m². Tufa dan konglomerat melapuk menengah-tinggi, putih kecoklatan, berbutir pasir halus-kasar, agak padu dan rapuh.

Gambar 2.4

Potongan Melintang
Selatan – Utara

*Sumber : MasterPlan
dan Kajian Akademis
Persampahan Provinsi DKI
Jakarta 2012-2032*



Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan endapan vulkanik kuarter yang terdiri dari 3 (tiga) formasi yaitu: Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 meter. Formasi Citalang didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dengan bagian atasnya merupakan batu lempung, sedangkan di beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat terutama pada bagian Blok M dan Dukuh Atas. Formasi Kaliwangu didominasi oleh batu lempung diselingi oleh batu pasir yang memiliki kedalaman sangat bervariasi, dengan kedalaman bagian utaranya lebih dari 300 meter dan di sekitar Babakan, formasi Parigi mendesak keatas hingga kedalaman 80 meter.

Dengan kondisi geografis demikian, disadari bahwa Jakarta termasuk wilayah rawan banjir. Dalam siklus 5-6 tahunan Jakarta memiliki potensi banjir cukup tinggi, terbukti pada tahun 2002, 2007 dan tahun 2013, 2014 terjadi banjir besar dengan kerugian yang besar pula.

Mengingat Jakarta merupakan kota yang terbentuk secara alami, sehingga penataan kota tidak dapat dilakukan secara optimal khususnya dalam sistem tata air/drainase dan jalan. Sebagian besar tanah di Jakarta sudah menjadi hak milik atau dikuasai perorangan sehingga menyulitkan dalam penataan kota, karena memerlukan dana yang besar untuk pembebasan lahan milik warga.

2.3.1.5 Hidrologi

Potensi air bawah tanah di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar terletak dalam cekungan air bawah tanah yang tidak mengenal batas administrasi pemerintahan dan bersifat lintas kabupaten/kota yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, yang secara teknis diatur dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 716 K/40/MEM/2003 tentang Batas Horizontal Cekungan Air Tanah Di Pulau Jawa dan Pulau Madura, berikut Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Menurut keputusan tersebut, Provinsi DKI Jakarta berada pada Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang merupakan cekungan air tanah lintas Provinsi, yang berada di antara Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1.439 km². Sebarannya mencakup sebagian Kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Tangerang, seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagian Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Bekasi.

Litologi akuifer utama dari cekungan air tanah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta merupakan: endapan sungai pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah; endapan kipas gunung api; pasir, kerikil, dan kerakal; endapan pematang pantai; pasir halus-kasar mengandung cangkang moluska; tuf Banten; tuf, tuf batu apung; dan batu pasir tufan. Jumlah air tanah bebas 803 juta m³/tahun, sedangkan jumlah air tanah tertekan 40 juta m³/tahun.

Sistem akuifernya bersifat *multi layers* yang dibentuk oleh endapan kuarter dengan ketebalan mencapai 250 meter. Ketebalan akuifer tunggal antara 1-5 meter, terutama berupa lanau sampai pasir halus. Kelulusan horizontal antara 0,1-40 meter/hari, sementara kelulusan

vertikalnya berdasarkan hasil simulasi aliran air tanah CAT Jakarta sekitar 250 m²/hari air tanah pada endapan kuarter mengalir pada system akuifer ruang antar bulir. Di daerah pantai umumnya didominasi oleh air tanah payau/asin yang berada di atas air tanah tawar kecuali di daerah yang disusun oleh endapan sungai lama dan pematang pantai. Akuifer produktif umumnya dijumpai sekitar kedalaman 40 mbmt dan mencapai kedalaman maksimum 150 mbmt.

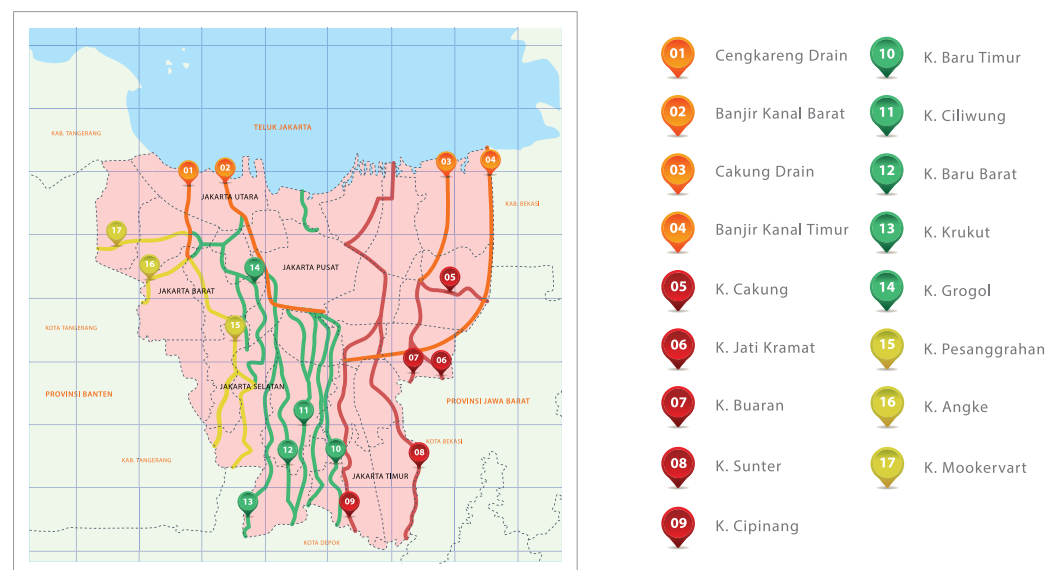
Pembagian system akuifer di CAT Jakarta adalah sebagai berikut:

- o Sistem akuifer tidak tertekan yang berada pada kedalaman 0-40 mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer I.
- o Sistem akuifer tertekan atas yang berada pada kedalaman 40-140 mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer II.
- o Sistem akuifer tertekan bawah yang berada pada kedalaman 140 – 250 mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer III.

Pembagian akuifer di CAT Jakarta tersebut didasarkan atas dijumpainya lempung berfaies laut yang memisahkan sistem akuifer yang satu dengan lainnya. Mengatasi sistem akuifer di daerah pemantauan adalah endapan tersier yang bersifat relatif sangat kedap air. Berdasarkan letaknya, Kota Jakarta termasuk kota delta (*delta city*) yaitu kota yang berada pada muara sungai yang umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Meskipun demikian, keberadaan sungai dan laut menyebabkan sebuah *delta city* memiliki keunggulan strategis, terutama dalam hal transportasi perairan. Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Adapun Peta Aliran Sungai, Kanal dan *flood way* yang melalui Wilayah DKI Jakarta, dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut:

Gambar 2.5

Peta Tematik Sungai di
Provinsi DKI Jakarta



Panjang dan luas dari masing-masing sungai tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Panjang dan Luas Sungai di
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2017

*Sumber: Dinas Sumber Daya
Air Provinsi DKI Jakarta, 2018*

No.	Sungai/Kanal	Panjang (meter)	Lebar (meter)	Luas (meter ²)
1.	Cengkareng Drain	7.600	50	147.500
2.	Cakung Drain	11.200	60	672.000
3.	Banjir Kanal Barat	12.850	60	771.000
4.	Banjir Kanal Timur	23.000	60	1.380.000
5.	Kali Mookervart	7.300	32	233.600
6.	Kali Angke	12.810	42	538.020
7.	Kali Pesanggrahan	27.300	13	354.900
8.	Kali Grogol	23.600	7	165.200
9.	Kali Krukut	28.750	6	172.500
10.	Kali Ciliwung	46.200	25	1.155.000
11.	Kalibaru Timur	39.200	13	392.600
12.	Cipinang	27.350	17	464.950
13.	Sunter	37.250	29	1.080.250
14.	Buaran	7.900	20	158.000
15.	Jati Kramat	3.800	5	19.000
16.	Cakung	20.700	20	414.000
17.	Kalibaru Barat	17.700	10	177.000

Selain sungai, Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 buah situ dan 15 tempat parkir air (*retention basin*). Fungsi utama tempat parkir ini adalah sebagai wadah "*retention*" atau tempat menahan sementara luapan air sungai pada saat muka air sungai meningkat.

2.3.1.6 Klimatologi

Dalam hal musim, wilayah Indonesia pada umumnya dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Untuk wilayah Jakarta yang termasuk dalam wilayah iklim tropis memiliki karakteristik musim penghujan rata-rata pada bulan Oktober hingga Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Puncak musim penghujan di DKI Jakarta terjadi pada bulan November hingga Januari dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan hari hujan tertinggi selama 26 hari terjadi pada bulan Januari tahun 2014, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018

No.	Bulan	2014		2015		2016	
		Curah Hujan (mm ²)	Banyaknya Hari Hujan	Curah Hujan (mm ²)	Banyaknya Hari Hujan	Curah Hujan (mm ²)	Banyaknya Hari Hujan
1.	Januari	1.075	26	412	23	136,60	17
2.	Februari	689	22	639	20	451,75	22
3.	Maret	174	20	221	19	293,50	23
4.	April	168	16	111	17	192,25	12
5.	Mei	47	10	79	6	112,25	18
6.	Juni	174	12	48	5	186,40	11
7.	Juli	214	16	1	1	188,60	16
8.	Agustus	39	4	12	4	217,45	19
9.	September	0	1	5	1	220,50	14
10.	Oktober	52	4	6	1	172,75	20
11.	November	65	11	103	11	152,40	18
12.	Desember	211	15	194	16	41,70	15

Dengan posisi yang spesifik, cuaca di kawasan Jakarta dipengaruhi oleh angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam. Dalam hal temperatur, rata-rata temperatur terendah di DKI Jakarta terjadi pada bulan Januari dan Februari, sedangkan tertinggi pada bulan September dan Oktober. Perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau relatif kecil. Kondisi ini dapat dipahami karena perubahan suhu udara di kawasan Jakarta seperti wilayah lainnya di Indonesia tidak dipengaruhi oleh musim, melainkan oleh perbedaan ketinggian wilayah. Suhu udara harian rata-rata pada daerah pantai di wilayah Utara Jakarta umumnya relatif tidak berubah, baik pada siang maupun malam hari. Secara rinci data suhu udara Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Suhu Udara Jakarta Menurut Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018

No.	Bulan	2014			2015			2016		
		Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)		
		Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata
1.	Januari	33,0	23,0	26,6	33,55	22,98	28,26	34,0	24,3	28,7
2.	Februari	32,8	22,8	26,6	32,88	22,65	27,76	32,6	24,0	27,8
3.	Maret	34,4	23,9	28,0	34,05	23,55	28,80	33,6	24,4	28,6
4.	April	35,2	23,2	28,8	34,33	24,03	29,18	34,7	24,8	29,4

No.	Bulan	2014			2015			2016		
		Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)		
		Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata
5.	Mei	35,2	25,0	29,3	34,20	23,63	29,91	35,2	25,0	29,3
6.	Juni	34,4	24,2	28,6	34,88	23,45	29,16	35,0	23,4	28,8
7.	Juli	34,2	23,4	28,0	34,55	23,48	29,01	35,0	24,0	28,5
8.	Agustus	34,6	24,0	28,7	34,40	22,40	28,40	34,4	24,0	28,5
9.	September	37,0	24,0	29,2	34,98	23,75	29,36	35,2	24,2	28,7
10.	Oktober	36,8	25,0	29,8	36,00	24,43	30,21	33,8	24,2	28,4
11.	November	36,0	23,8	29,4	35,15	24,08	29,61	34,2	24,7	28,6
12.	Desember	34,8	24,1	28,1	34,48	23,10	28,79	34,4	24,0	28,5

Untuk kelembaban udara, sepanjang tahun 2016 tercatat kelembaban udara minimum 59 persen dan maksimum 93 persen. Selanjutnya rata-rata kecepatan angin pada tahun 2016 berada pada antara 1,4 M/SE hingga 2,0 M/SE.

2.3.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian.

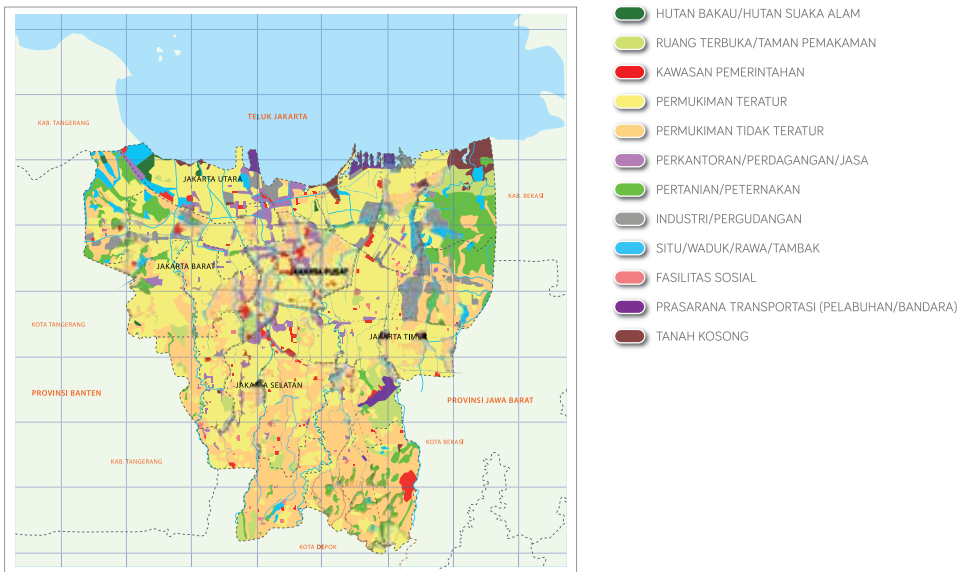
Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwasanya ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan fisik di Jakarta terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh pembangunan gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial serta infrastruktur kota lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya pembangunan dan perekonomian Jakarta. Gambaran penggunaan lahan di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut.

Peruntukan lahan untuk perumahan menduduki proporsi terbesar, yaitu 48,41 persen dari luas daratan utama DKI Jakarta. Sedangkan luasan untuk peruntukan bangunan industri, perkantoran dan perdagangan hanya mencapai 15,68 persen.

Gambar 2.6

Peta Penggunaan Lahan di
Provinsi DKI Jakarta

Sumber: RTRW Provinsi DKI
Jakarta 2030



2.3.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Jakarta merupakan wilayah yang sangat strategis baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, dalam pengembangan wilayah memperhatikan lingkungan strategis sekitarnya. Dalam pengembangan wilayah, rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi perkembangan kota Jakarta secara keseluruhan. Rencana struktur ruang yang dikembangkan di DKI Jakarta meliputi empat struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan sistem dan jaringan utilitas perkotaan.

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem pusat kegiatan primer dan sekunder. Sistem dan jaringan transportasi terdiri dari sistem dan jaringan transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Selanjutnya sistem prasarana sumber daya air terdiri dari sistem konservasi sumber daya air, sistem pendayagunaan sumber daya air, dan sistem pengendalian daya rusak air. Sedangkan sistem dan jaringan utilitas perkotaan terdiri atas sistem dan jaringan air bersih, sistem prasarana dan sarana pengelolaan air limbah, sistem prasarana dan sarana pengelolaan sampah, sistem dan jaringan energi, serta sistem dan jaringan telekomunikasi.

2.3.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang berpotensi melanda wilayah Jakarta adalah banjir dan genangan air, kebakaran serta gempa bumi. Bencana yang menjadi perhatian khusus bagi Jakarta adalah banjir. Banjir dan genangan air di Jakarta utamanya disebabkan oleh curah hujan lokal yang tinggi, curah hujan yang tinggi di daerah hulu yang berpotensi menjadi banjir kiriman, dan rob atau air laut pasang yang tinggi di daerah pantai utara. Selain itu, terjadinya banjir dan genangan

air di Jakarta juga disebabkan oleh sistem drainase yang tidak berfungsi dengan optimal, tersumbatnya sungai dan saluran air oleh sampah dan berkurangnya wilayah-wilayah resapan air akibat dibangunnya hunian pada lahan basah atau daerah resapan air serta semakin padatnya pembangunan fisik. Hal lainnya adalah prasarana dan sarana pengendalian banjir yang belum berfungsi maksimal.

Jika dilihat historis peristiwa banjir yang terjadi di Jakarta cenderung meningkat luasannya, pada tahun 1980 daerah genangan Jakarta adalah seluas 7,7 km², pada tahun 1996 seluas 22,59 km², pada tahun 2002 adalah seluas 167,88 km², dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 238,32 km². Pada tahun 2002 daerah genangan diperkirakan mencapai sekitar 13 persen dari wilayah DKI Jakarta sedangkan pada banjir tahun 2007 sekitar 37 persen dari wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak akibat banjir, telah dipasang 34 unit (SLHD 2010) *early warning* khususnya untuk sungai yang sering menjadi tampungan air hujan yaitu Kali Sunter, Kali Cipinang, Kali Ciliwung, Kali Krukut, Kali Pesanggrahan dan Kali Angke.

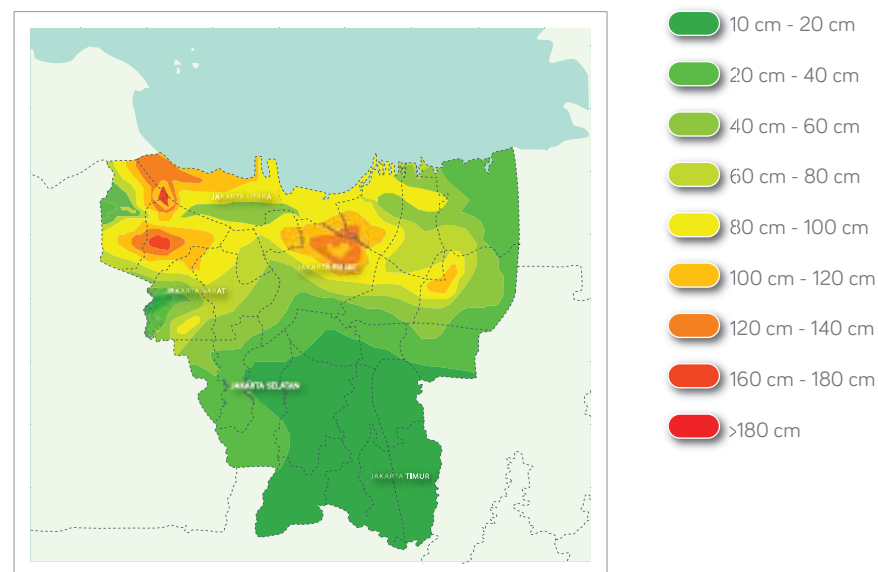
Hal lain yang dapat memperparah dampak banjir dan genangan adalah penurunan permukaan tanah (*land subsidence*). Secara umum laju penurunan tanah yang terdeteksi adalah sekitar 1-15 cm per tahun, bervariasi secara spasial maupun temporal. Beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan tanah yaitu pengambilan air tanah yang berlebihan, penurunan karena beban bangunan (*settlement*), penurunan karena adanya konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah, serta penurunan karena gayagaya tektonik.

Beberapa daerah yang mengalami *subsidence* cukup besar yaitu Cengkareng Barat, Pantai Indah Kapuk, sampai dengan Dadap. Nilai *subsidence* paling besar terdapat di daerah Muara Baru. Sementara untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan nilai *subsidence* relatif kecil. Peta penurunan tanah DKI Jakarta dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7

Peta Penurunan Muka Tanah
di Provinsi DKI Jakarta

Sumber: RTRW Provinsi DKI
Jakarta 2030



Bencana lain yang sering terjadi di Jakarta adalah kebakaran. Bencana ini umumnya terjadi di lokasi permukiman padat penduduk dan lingkungan pasar yang pada umumnya disebabkan oleh arus pendek listrik. Bahaya kebakaran diperkirakan akan terus menjadi ancaman apabila tidak tumbuh kesadaran masyarakat untuk hidup dengan budaya perkotaan. Di wilayah DKI Jakarta terdapat 53 Kelurahan rawan bencana kebakaran.

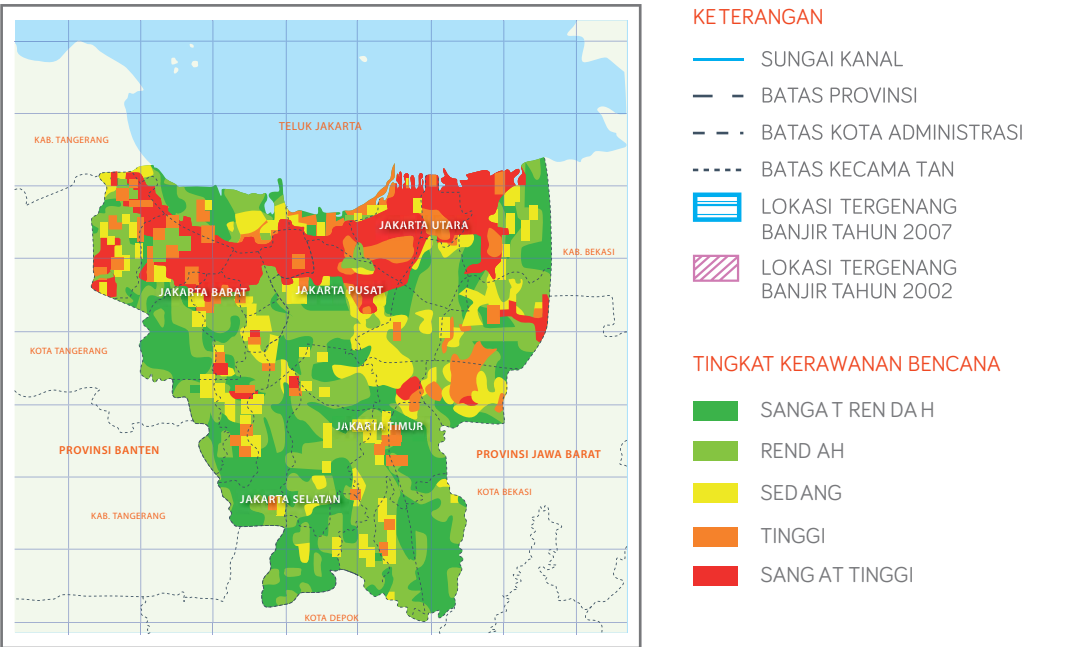
Secara ekonomi, kebakaran mengakibatkan kerugian materi yang tidak sedikit. Pada tahun 2015, kebakaran yang terjadi di Jakarta telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp285 Miliar dengan total kejadian kebakaran sebanyak 1.473 kejadian kebakaran. Tahun 2016, hingga akhir April 2016, telah terjadi 335 kejadian kebakaran dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp72 miliar.

Terkait dengan potensi gempa bumi, di sekitar Jakarta diperkirakan terdapat 10 sumber gempa dengan potensi terbesar di sekitar Selat Sunda, yang selama ini aktif dan berpotensi menimbulkan risiko bencana. Berdasarkan data seismik kegempaan seluruh Indonesia, di selatan Jawa bagian barat terdapat *seismic gap* (daerah jalur gempa dengan kejadian gempa yang sedikit dalam jangka waktu lama) yang juga menyimpan potensi gempa yang tinggi terhadap Jakarta. Kondisi Jakarta bagian utara yang merupakan batuan atau tanah lunak akan lebih rentan terhadap dampak gempa dibandingkan wilayah Jakarta bagian selatan. Kawasan rawan bencana di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Berdasarkan peta kawasan rawan bencana gempa bumi Jawa bagian barat, potensi gempa bumi di wilayah DKI Jakarta termasuk kategori tingkat menengah sampai rendah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menyusun peta zonasi gempa Level I – Level II, yaitu sampai dengan peta kondisi kerentanan batuan/tanah dan respon gempa berdasarkan data sekunder.

Gambar 2.8
Peta Kawasan Rawan
Bencana Alam di Provinsi
DKI Jakarta

Sumber: RTRW Provinsi DKI
Jakarta 2030



Untuk menanggulangi potensi kerawanan bencana tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menetapkan kawasan yang diperuntukan sebagai tempat evakuasi bencana. Kawasan peruntukan evakuasi bencana ini ditetapkan dengan ketentuan antara lain:

- a. memiliki luas minimum 1.000 m² (seribu meter persegi) dan diprioritaskan pada kelurahan rawan bencana;
- b. lokasi mudah diakses dari kawasan rawan bencana;
- c. relatif aman saat mengalami bencana;
- d. dapat dijangkau angkutan umum;
- e. tersedia utilitas dan sarana yang memadai; dan
- f. merupakan bagian dari fasilitas sosial atau fasilitas umum.

Adapun lokasi kawasan evakuasi bencana utama diarahkan antara lain di:

- a. Kawasan Monumen Nasional,
- b. Kawasan Gelora Bung Karno Senayan,
- c. Kawasan Taman Impian Jaya Ancol,
- d. Kawasan Islamic Centre,
- e. Kawasan Taman Mini Indonesia Indah,
- f. Kawasan Taman Margasatwa Ragunan,
- g. Kawasan Hutan Kota Srengseng,
- h. Kawasan Taman Kampung Sawah/Taman Catleya,
- i. Kawasan Halim Perdana Kusuma,
- j. Kawasan Taman BMW,
- k. Kawasan Kebon Pisang,
- l. Kawasan TPU Tegal Alur,
- m. Kawasan TPU Tanah Kusir,
- n. Kawasan pusat pemerintahan,
- o. Kawasan pemakaman, dan
- p. Kawasan rekreasi lainnya.

Selain kawasan evakuasi bencana, direncanakan pula jalur evakuasi bencana. Jalur evakuasi bencana adalah jaringan jalan yang dilalui Transjakarta, jalan arteri menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama dan menuju fasilitas vital yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Halim Perdana Kusuma.

Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan evakuasi bencana tersebut dilakukan berdasarkan arahan antara lain optimalisasi pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau dan kawasan terbuka plaza publik maupun privat sebagai kawasan evakuasi bencana dilengkapi sarana utilitas yang memadai; penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; peningkatan aksesibilitas dari dan ke kawasan evakuasi bencana; dan pengaturan dan

pengendalian kegiatan dan bangunan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan evakuasi bencana. (Sumber: RTRW 2030).

2.3.4 Demografi

Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.277.628 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sebanyak 5.159.683 jiwa atau 50,20 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 5.117.945 jiwa atau 49,80 persen. Oleh karenanya, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 memiliki *sex ratio* sebesar 100,8 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rincian perkembangan komposisi penduduk dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perkembangan Jumlah
Penduduk Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012-2016

*Sumber: Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta, 2018*

No.	Uraian	Tahun					
		SP2000	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Laki-laki	4.223.125	4.976.048	5.023.454	5.069.925	5.115.357	5.159.683
2.	Perempuan	4.123.958	4.886.040	4.946.494	5.005.385	5.062.567	5.117.945
3.	Jumlah	8.347.083	9.862.088	9.969.948	10.075.310	10.177.924	10.277.628
4.	Pertumbuhan	0,78	1,13	1,09	1,06	1,09	0,98
5.	Densitas (Ribu jiwa/km²)	12,60	14,89	15,05	15,23	15,37	15,51
6.	Sex Ratio	102,00	101,80	101,60	101,70	101,04	100,8

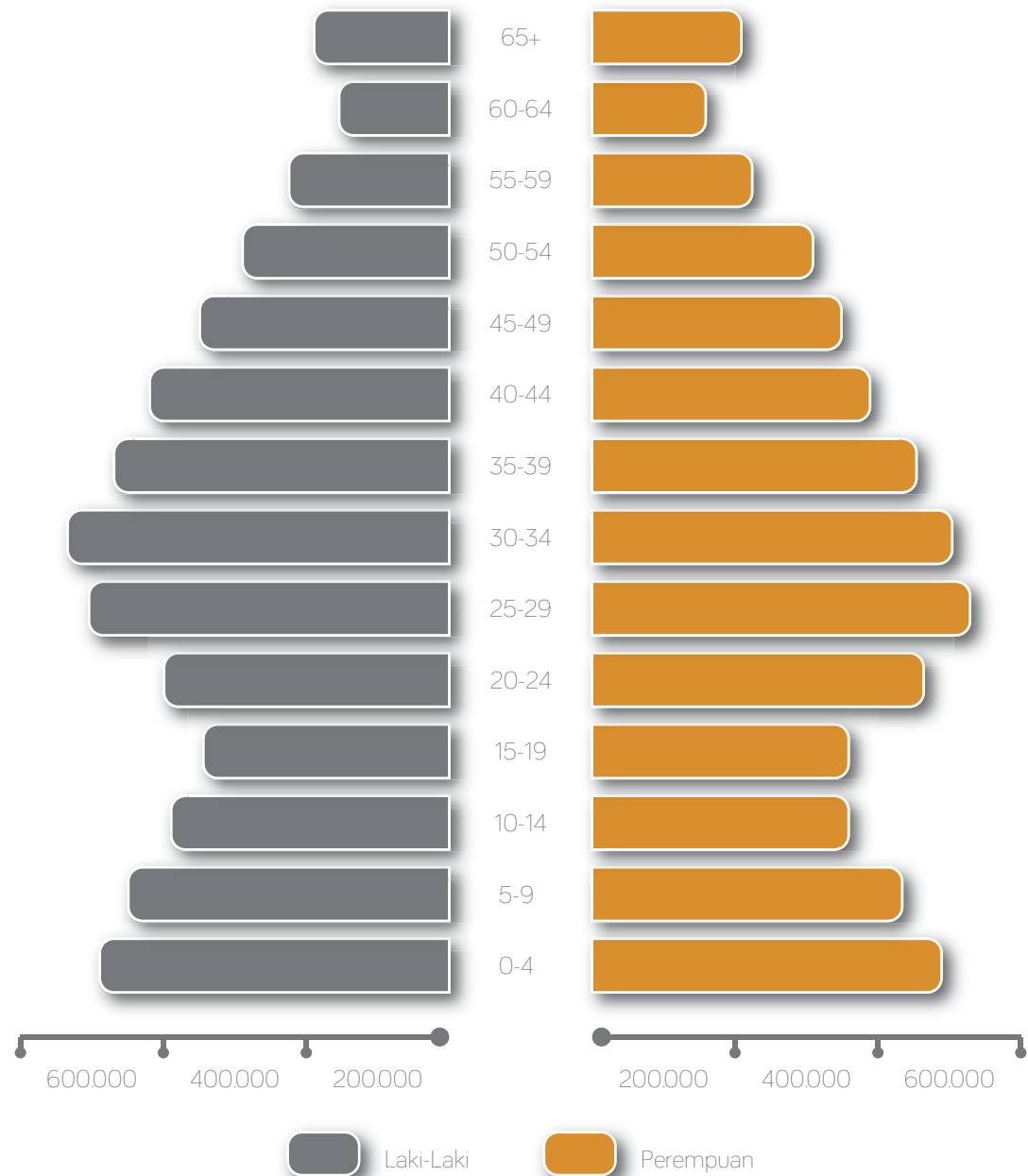
Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 1,13 persen, tahun 2013 sebesar 1,09 persen, tahun 2014 sebesar 1,06 persen, tahun 2015 sebesar 1,09 persen, dan tahun 2016 sebesar 0,98 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, dengan kepadatan penduduk 15,51 ribu jiwa/km².

Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta menunjukkan dominasi penduduk usia produktif (15-64) sebagaimana terlihat pada Gambar 2.9 Pada tahun 2016, penduduk usia produktif tercatat sebanyak 7.324.391 jiwa atau sebesar 71,27 persen dari total penduduk, penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 2.553.915 jiwa atau 24,85 persen, dan penduduk yang tidak produktif lagi atau melewati masa pensiun sebanyak 399.302 atau 3,89 persen. Dengan struktur penduduk tersebut, angka ketergantungan (*dependency ratio*) DKI Jakarta pada tahun 2016 sebesar 40,32 persen yang berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI Jakarta akan menanggung secara ekonomi sebesar 40,32 penduduk usia tidak produktif. Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 dapat dilihat melalui piramida penduduk pada gambar 2.9 berikut:

Gambar 2.9

Piramida Penduduk Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta, 2018



Secara umum, komposisi penduduk menurut jenis kelamin memiliki tren yang hampir sama antar wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, penduduk laki-laki cenderung berjumlah sama banyak dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu sebanyak 2.892.783 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu sebanyak 23.987 jiwa. Rincian jumlah penduduk menurut Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018

No	Kota/Kab. Administrasi	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Jakarta Pusat	459.628	461.716	921.344	99,55
2	Jakarta Utara	882.590	898.726	1.781.316	98,20
3	Jakarta Barat	1.276.097	1.251.968	2.528.065	101,93
4	Jakarta Selatan	1.114.688	1.112.142	2.226.830	100,23
5	Jakarta Timur	1.457.910	1.434.873	2.892.783	101,61
6	Kep. Seribu	11.902	11.995	23.897	99,22
Jumlah		5.202.815	5.171.420	10.374.235	100,61

2.4 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bagian ini dijabarkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2017 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan format urusan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.4.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.

2.4.1.1 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel 2.7

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018

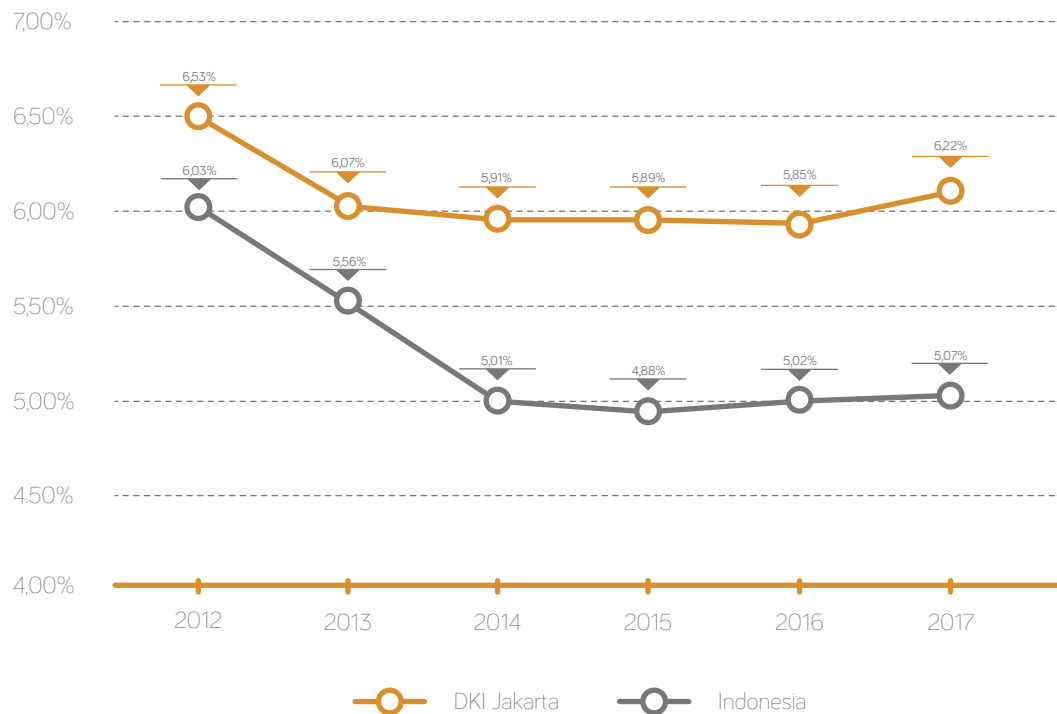
No	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (juta Rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta Rupiah)
1.	2012	1.222.527.925	1.369.432.639
2.	2013	1.296.694.573	1.546.876.491
3.	2014	1.373.389.547	1.760.217.252
4.	2015	1.454.102.107	1.983.420.526
5.	2016	1.539.376.650	2.177.119.880
6.	2017	1.635.860.000	2.410.370.000

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan yaitu yang semula Rp 1.369 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 2.410 triliun pada tahun 2017 (ADHB). Sedangkan berdasarkan ADHK tahun 2010 PDRB Provinsi DKI Jakarta juga mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 1.635 triliun pada tahun 2017. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, walaupun terus mengalami peningkatan secara nominal laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga konstan mengalami tren yang menurun. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.10

Pertumbuhan PDRB Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2012-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta, 2018

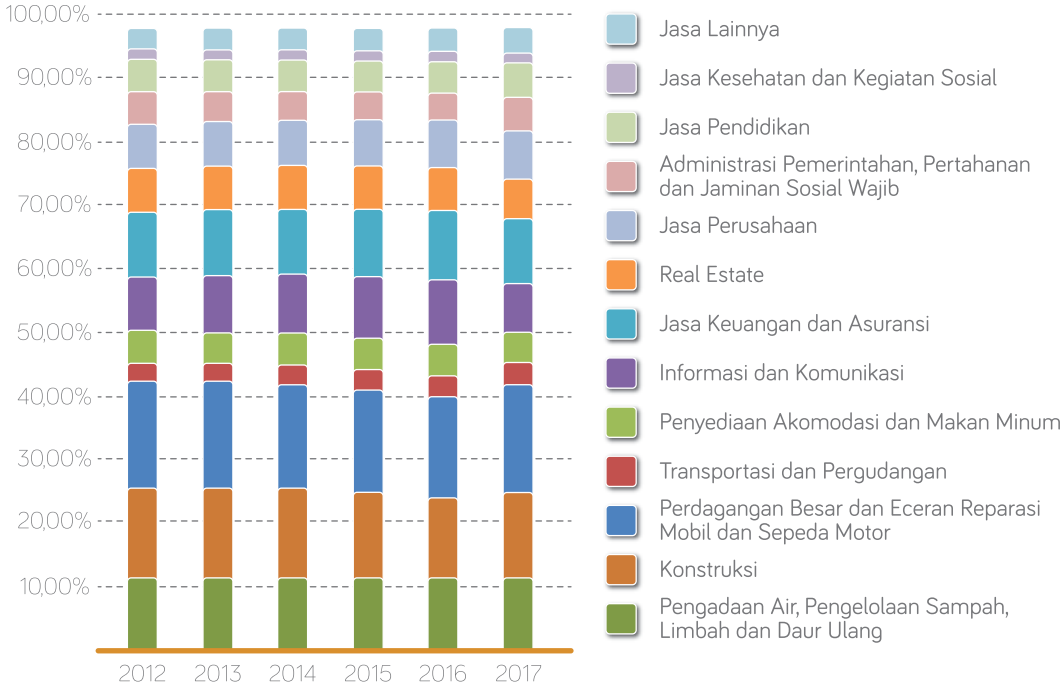


Apabila dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor pedagang besar dan eceran merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta dengan nilai kontribusi yang berada pada kisaran 16 persen selama periode 2012 hingga 2017. Sektor ekonomi yang mengalami tren peningkatan kontribusi adalah sektor transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya. Dari enam sektor tersebut peningkatan tren paling signifikan ditunjukkan oleh sektor informasi dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Gambar berikut juga memperlihatkan struktur ekonomi Provinsi DKI Jakarta, di mana perekonomian Provinsi DKI Jakarta lebih ditunjang oleh sektor perdagangan besar dan eceran; konstruksi; serta industri pengolahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada saat ini terletak pada ketiga sektor tersebut. Dengan demikian, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan perekonomian ketiga sektor tersebut.

Gambar 2.11
 Persentase Kontribusi Sektor terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta (Atas Dasar Harga Konstan tahun dasar 2010) Tahun 2012-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018



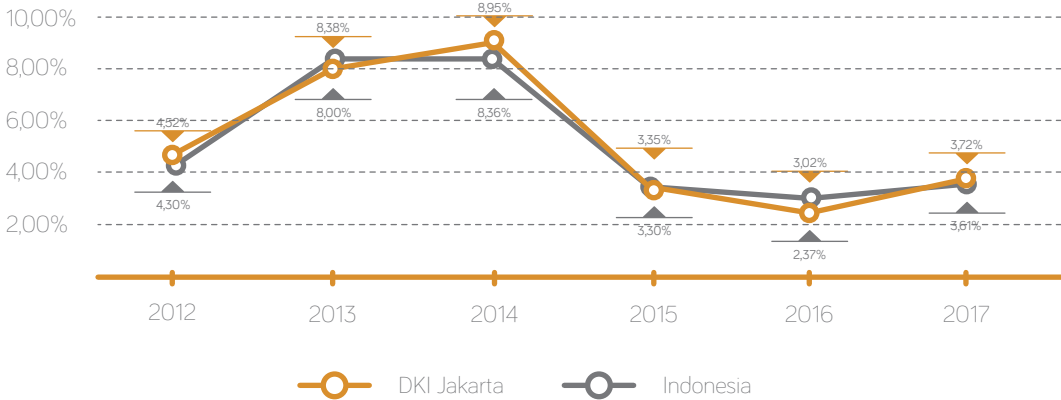
2.4.1.2 Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi selama tahun 2012 hingga 2017 (Gambar 2.12). Inflasi terendah di Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,37 persen dan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,95 persen. Penurunan laju inflasi di Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2012, 2015, dan tahun 2016.

Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang secara nasional. Perbedaan tren inflasi pada periode 2012-2016 terjadi pada tahun 2014, dimana inflasi nasional mengalami penurunan sementara Provinsi DKI Jakarta mengalami inflasi yang meningkat.

Gambar 2.12
 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2012-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018



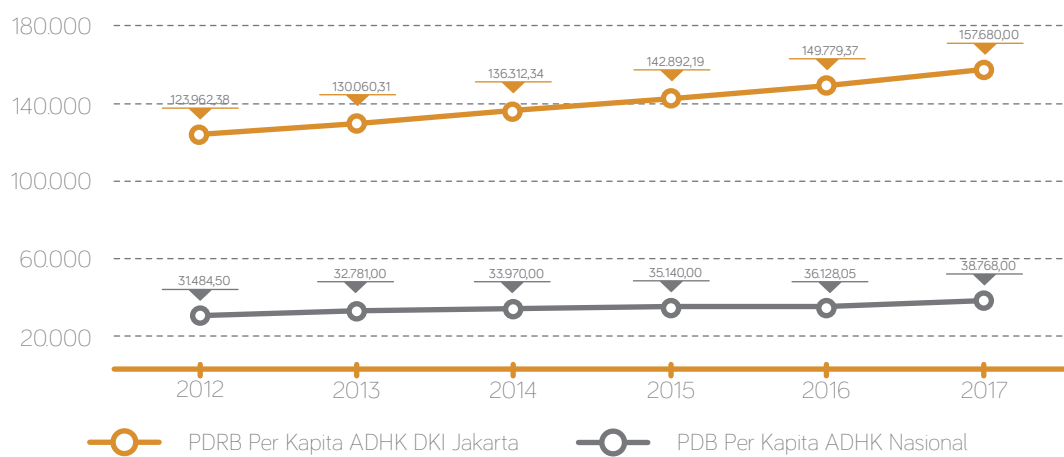
2.4.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang cenderung meningkat (Gambar 2.13). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2012, PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga konstan sebesar Rp123,96 Juta meningkat menjadi Rp157,68 juta pada tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan PDB per kapita nasional, nilai PDRB per kapita DKI Jakarta lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena PDRB DKI yang sudah cukup tinggi nilainya dan pembagi PDRB yang jauh lebih kecil, dalam hal ini jumlah penduduk DKI Jakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruh Indonesia.

Gambar 2.13

PDRB per Kapita Provinsi DKI Jakarta dan Nasional (Ribu Rupiah/jiwa) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Periode 2012-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018



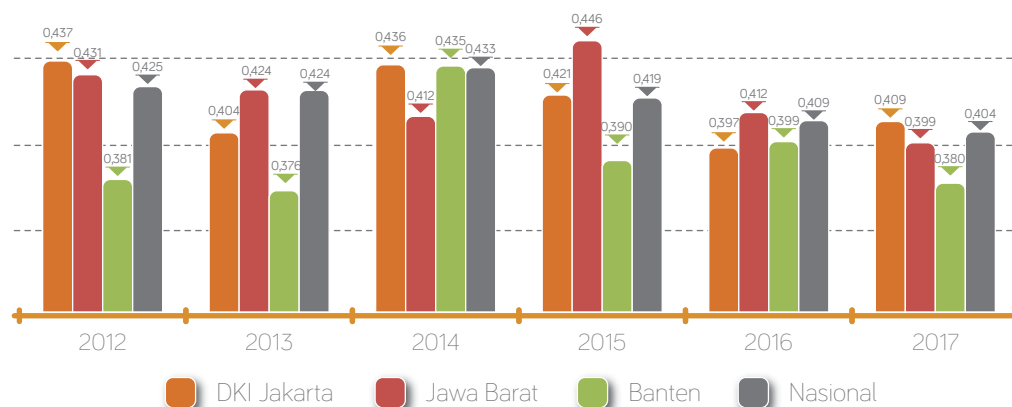
2.4.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.

Gambar 2.14

Indeks Gini DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Nasional 2012-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018



Gambar 2.14 memperlihatkan perbandingan Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Nasional. Dari gambar tersebut terlihat bahwa Indeks Gini DKI Jakarta pada tahun 2012, Indeks Gini DKI Jakarta berada di atas Indeks Gini Nasional, Banten, maupun Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam struktur masyarakat DKI Jakarta. Namun setelah itu, Indeks Gini DKI Jakarta mengalami tren yang menurun hingga tahun 2017. Untuk melihat secara lebih lengkap mengenai persentase pendapatan kelompok penduduk di DKI Jakarta, maka hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8
Indeks Gini &Tingkat
Ketimpangan Provinsi DKI
Jakarta 2012-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta, 2018

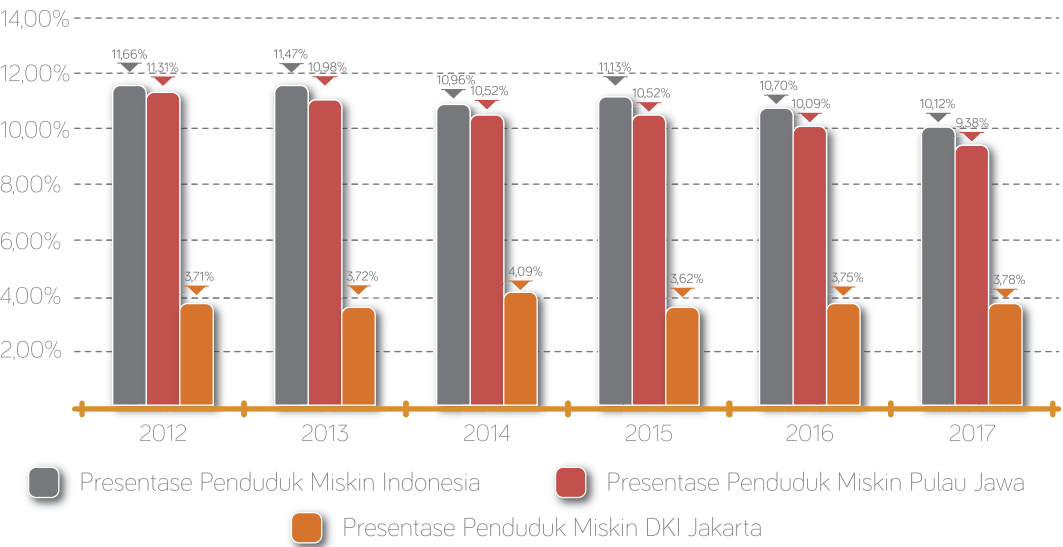
No.	Tahun	Indeks Gini	Tingkat Ketimpangan	Kelompok Penduduk		
				40% Terendah	40% Menengah	20% Teratas
1.	2012	0,397	Sedang	15,67	33,94	50,39
2.	2013	0,364	Sedang	17,59	31,51	50,90
3.	2014	0,436	Sedang	14,83	31,83	53,34
4.	2015	0,421	Sedang	16,57	33,48	49,95
5.	2016	0,397	Sedang	16,49	37,29	46,22
6.	2017	0,409	Sedang	17,16	34,30	48,54

2.4.1.5 Tingkat Kemiskinan

Walaupun tren PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren yang positif namun persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami tren yang cenderung meningkat. Walaupun demikian kenaikan persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta dalam periode 2012-2017 tidak mencapai 1 persen. Persentase penduduk miskin naik dari 3,71 persen pada tahun 2012 menjadi 3,78 persen pada tahun 2017.

Gambar 2.15
Persentase Penduduk Miskin
Provinsi DKI Jakarta, Pulau
Jawa, dan Nasional Tahun
2012-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta, 2018



2.4.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM ini, setidaknya ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: i) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

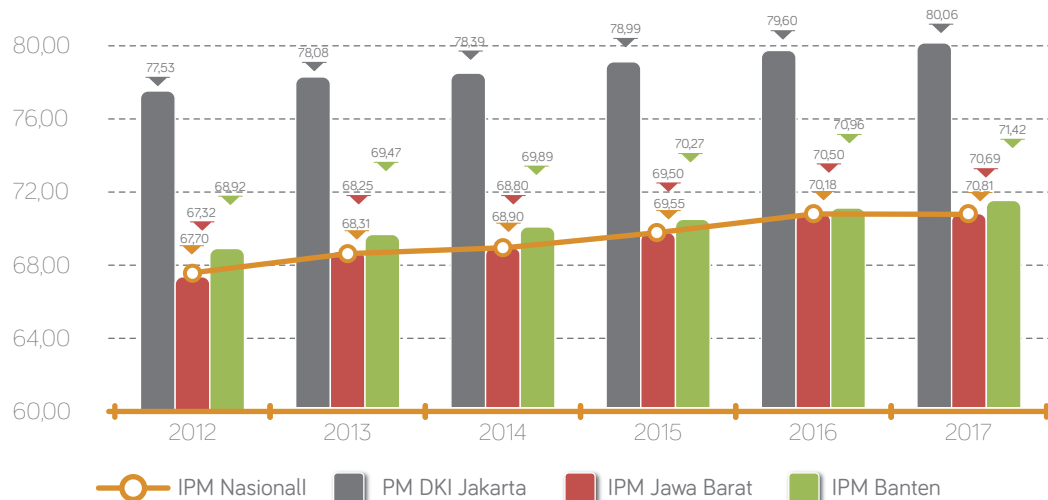
Sejak tahun 2010 BPS telah menggunakan metode baru dalam penentuan IPM. Perubahan tersebut mencakup data yang digunakan dan metode perhitungan. Dengan mengganti angka melek huruf dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Sementara itu dari sisi pendapatan PNB per kapita menggantikan PDB per kapita karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Capaian IPM Provinsi DKI Jakarta sendiri dari tahun 2012-2017 dengan menggunakan perhitungan baru meningkat dari 77,53 menjadi 79,60. Dengan metode perhitungan baru ini, IPM Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan 33 provinsi lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta dapat dikatakan lebih baik dibandingkan 33 provinsi lainnya di Indonesia. Nilai IPM DKI Jakarta dan perbandingannya dengan Nasional dan Provinsi Banten maupun Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.16

Perbandingan IPM Provinsi dan Nasional Dengan Menggunakan Metode Baru Tahun 2012-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018



2.4.1.7 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, hanya saja data yang ada dipilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, IPG DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan perbaikan kesetaraan gender dalam indikator-indikator pembentuk IPM.

Tabel 2.9
Indeks Pembangunan Gender
Provinsi DKI Jakarta dan
Nasional Tahun 2011-2015

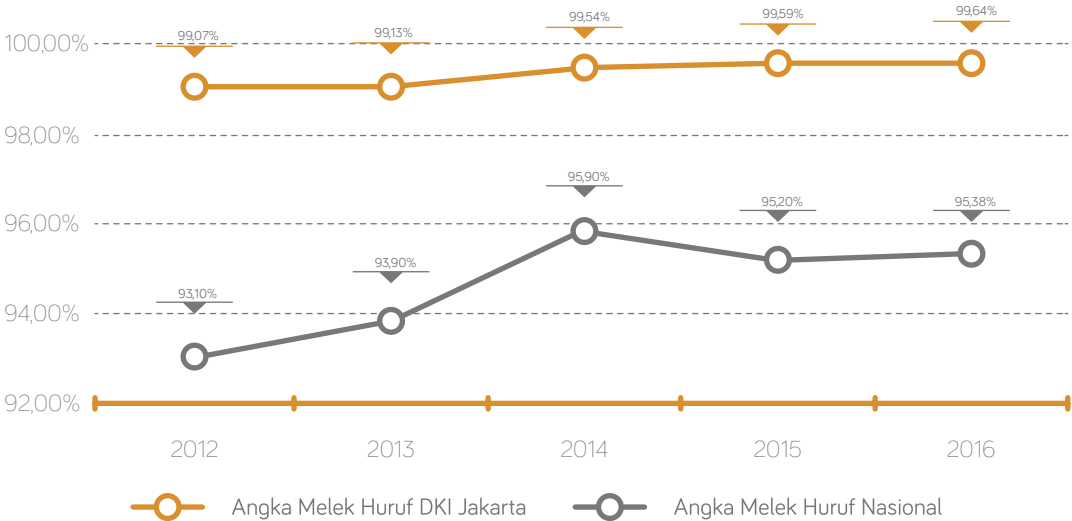
No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Indeks Pembangunan Gender DKI Jakarta	74,01	74,66	74,98	94,60	94,72
2	Indeks Pembangunan Gender Nasional	89,52	90,07	90,19	90,34	91,03

Sumber: Kementerian
Pemberdayaan Perempuan
dan Pelindungan Anak, 2018

2.4.1.8 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi DKI Jakarta dan perkembangan Angka Melek Huruf Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.17
Angka Melek Huruf
DKI Jakarta dan Nasional
Tahun 2012-2016



Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa capaian Angka Melek Huruf Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 hingga 2016 telah melampaui capaian Nasional. Perkembangan Angka Melek Huruf DKI Jakarta selama kurun waktu 2010-2016 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun demikian, capaian Angka Melek Huruf tersebut masih belum mencapai target MDG's, yakni 100 persen pada tahun 2015.

2.4.1.9 AngkaUsia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup penduduk di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 telah melampaui angka usia harapan hidup nasional. Pada tahun 2016 angka usia harapan hidup di DKI Jakarta mencapai 72,49 tahun, sedangkan angka usia harapan hidup nasional pada tahun 2016 sebesar 70,90 tahun. Adapun angka harapan hidup standar nasional adalah 71 tahun (WHO, 2014). Hal ini bermakna kesehatan penduduk di DKI Jakarta telah melampaui standar nasional. Lebih lanjut, perkembangan usia harapan hidup di DKI Jakarta tahun 2010-2016 dapat disimak dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2.18
Perkembangan Angka
Usia Harapan Hidup DKI
Jakarta dan Nasional Tahun
2012-2016

Sumber: Badan Pusat
Statistik, 2018



2.4.1.10 Persentase Balita Gizi Buruk

Permasalahan Gizi dapat terjadi pada semua kelompok umur, tetapi yang perlu lebih diperhatikan pada kelompok bayi dan balita. Pada usia 0-2 tahun merupakan masa tumbuh kembang yang optimal (*golden period*) terutama untuk pertumbuhan janin sehingga bila terjadi gangguan pada masa ini tidak dapat dicukupi pada masa berikutnya dan akan berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus. Dari hasil pengukuran status gizi pada balita 0-59 bulan, didapatkan prevalensi permasalahan gizi:

Tabel 2.10
Persentase Balita Gizi Buruk
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah balita gizi buruk (orang)	137	143	129	284	310
2.	Jumlah balita (orang)	908.764	843.773	875.558	481.928	934.422
3.	Persentase balita gizi buruk	0,02%	0,02%	0,01%	0,03%	0,03%

Persentase balita gizi buruk di DKI Jakarta mengalami tren meningkat, pada tahun 2012 tercatat sebesar 0,02 persen kemudian menjadi 0,03 persen pada tahun 2016. Hal tersebut terjadi karena penemuan gizi buruk secara aktif dilakukan oleh Tenaga Pengelola Gizi di Puskesmas Kelurahan dan oleh Tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH). Meskipun demikian, Persentase Balita Gizi Buruk di DKI Jakarta masih dibawah target MDG's yaitu sebesar 3,60 persen.

Upaya peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi balita pendek menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum di dalam sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015–2019 dan merupakan salah satu indikator pada *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) adalah menjadi 28 persen (RPJMN, 2015 – 2019). Stunting adalah masalah kurang gizi kroni yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh stunting adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunkan kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, berisiko tinggi untuk munculnya penyakit seperti diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke dan disabilitas pada usia tua, serta kulaitas kerja yang tidak kompetitif yang pada akhirnya berakibat pada rendahnya produktifitas perekonomian seorang individu.

Persentase balita stunting (pendek) hasil Riskesdas tercatat sebesar 27,50 persen, Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015 sebesar 23,10 persen dan hasil PSG tahun 2016 sebesar 20,10 persen. Walaupun hasil PSG mengalami penurunan tetapi balita stunting masih menjadi permasalahan gizi masyarakat sesuai dengan batasan WHO < 20 persen.

Tabel 2.11

 Persentase Balita Stunting
 Provinsi DKI Jakarta Tahun
 2012-2016

*Sumber: Sistem Informasi
 Pembangunan Daerah, 2018*

No.	Wilayah	Tahun				
		2012	2013*	2014	2015**	2016**
1.	Kota Jakarta Pusat	TAD	23,80%	TAD	21,30%	17,90%
2.	Kota Jakarta Utara	TAD	27,80%	TAD	26,90%	23,20%
3.	Kota Jakarta Barat	TAD	37,90%	TAD	23,40%	21,60%
4.	Kota Jakarta Selatan	TAD	26,30%	TAD	18,80%	17,40%
5.	Kota Jakarta Timur	TAD	21,90%	TAD	17,50%	21,60%
6.	Kabupaten Kepulauan Seribu	TAD	41,30%	TAD	30,50%	19,10%

Keterangan:
 * Riskesdas
 ** Pemantauan Status Gizi (PSG)

Masalah balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan. Oleh karena itu upaya perbaikan untuk menurunkan balita stunting meliputi upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung (intervensi gizi spesifik) dan upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung (intervensi gizi sensitif). Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan di sektor kesehatan, namun hanya berkontribusi 30 persen, sedangkan 70 persennya merupakan kontribusi intervensi gizi sensitif yang melibatkan berbagai sektor seperti ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan sebagainya.

2.4.1.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan adanya penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2013 TPAK di DKI Jakarta sebesar 71,56 persen, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2016 tercatat sebesar 66,91 persen atau dengan kata lain, dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 66 orang diantaranya memasuki pasar lapangan kerja.

Tabel 2.12
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja dan Tingkat
Pengangguran Terbuka
Provinsi DKI Jakarta
2012-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta, 2018

No.	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angkatan Kerja (ribu orang)	5.368,57	5.180,01	5.063,48	5.092,22	5.178,84	4.856,12
1.1.	Bekerja (ribu orang)	4.838,59	4.712,84	4.634,37	4.724,03	4.861,83	4.509,17
1.2.	Menganggur (ribu orang)	529,98	467,18	429,11	368,19	317,01	346,95
2.	Bukan Angkatan Kerja (ribu orang)	2.133,62	2.427,87	2.537,99	2.578,37	2.561,05	2.980,29
3.	Penduduk Usia 15 tahun keatas (ribu orang)	7.502,19	7.607,88	7.601,47	7.670,59	7.739,89	7.836,40
4.	TPAK	69,36	71,56	66,61	66,39	66,91	61,97
5.	TPT	9,87	9,02	8,47	7,23	6,12	7,14

Rasio penduduk yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan. Data tenaga kerja menunjukkan bahwa pada tahun 2012 sebesar 90,13 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain terdapat 9,87 persen angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur.

Pada tahun 2017 persentase angkatan kerja yang memperoleh pekerjaan naik menjadi sebesar 92,86 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan atau sebesar 7,14 persen angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Data tersebut menunjukkan tren jumlah pengangguran yang berkurang. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.13
Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI JakartaTahun 2012-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018

No.	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penduduk yang bekerja (ribu orang)	4.838,60	4.712,84	4.634,37	4.724,03	4.861,83	4.509,17
2.	Angkatan kerja (ribu orang)	5.368,60	5.180,00	5.063,50	5.092,22	5.178,84	4.856,12
3.	Rasio penduduk yang bekerja (%)	90,13%	90,98%	91,53%	92,77%	93,88%	92,86%

2.4.1.12 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah tidak lepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya.Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu. Terkait dengan hal tersebut, gambaran kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.14
Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2018

No.	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pajak daerah (Juta Rp)	17.721.493	23.370.213	27.050.949	29.076.926	31.613.197	36.514.113
2.	Retribusi daerah (Juta Rp)	1.820.435	333.787	515.162	459.459	675.475	624.400
3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan (Juta Rp)	351.823	397.234	465.979	527.280	303.204	489.478
4.	Lain-lain PAD yang sah (Juta Rp)	2.147.049	2.750.957	3.242.123	3.622.510	4.296.140	5.583.584
Pendapatan Asli Daerah (Juta Rp)		22.040.801	26.852.192	31.274.215	33.686.176	36.888.017	43.211.576
Pendapatan(Juta Rp)		35.379.180	39.517.544	43.824.300	44.209.238	53.784.706	64.134.650
Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)		62,30	67,95	71,36	76,20	68,58	67,38

Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Dari tahun 2012 hingga tahun 2016, PAD mengalami peningkatan. Demikian halnya dengan, persentase PAD terhadap pendapatan daerah.

2.4.1.13 Opini BPK atas Laporan Keuangan

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan keuangan oleh BPK tersebut merupakan pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah. Hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini Pemeriksa adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi (keuangan) yg disajikan dlm laporan keuangan. Opini didasarkan pada kriteria:

- 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- 2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*) = “kejujuran untuk / dalam menjelaskan”,
- 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
- 4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). setidaknya ada 4 kriteria yang telah ditetapkan oleh BPK dalam melakukan audit. Yang pertama adalah laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, kedua mengenai kelengkapan bukti yang memadai, ketiga Pengendalian intern harus baik, dan yang keempat penyusunan harus sesuai undang-undang. Berikut adalah opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 sampai dengan tahun 2016:

Tabel 2.15

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 menunjukkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sedangkan pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkat menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejak tahun 2014 hingga tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berturut-turut memberikan opini WDP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 sudah ada perbaikan dari tahun sebelumnya, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti kelemahan pengendalian sistem pada pengelolaan piutang pajak dan piutang lainnya, sehingga permasalahan yang masih muncul ada kedua akun piutang tersebut sudah tidak memberikan dampak yang signifikan dan tidak menjadi pengecualian.

2.4.2 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.2.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, pendidikan diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan seperti: Persentase Angka Partisipasi Sekolah; Persentase Angka Partisipasi Murni; Rata-rata lama sekolah; Persentase Angka Partisipasi Kasar; Persentase Angka Putus Sekolah; Persentase kelulusan; Rata-rata nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah; Persentase guru yang kompeten; Persentase Sekolah terakreditasi A; Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP); Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP); Persentase sekolah yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus; serta Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi.

Persentase Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Perhitungan tersebut sejak tahun 2009 memperhitungkan pula Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C). Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya Angka Partisipasi Sekolah pada setiap kelompok umur. Berikut persentase Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 2012 sampai dengan 2016:

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Sekolah
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka partisipasi sekolahusia 7-12 tahun	98,97	99,35	99,47	99,56	99,61
2.	Angka partisipasi sekolahusia 13-15 tahun	93,79	95,28	96,69	97,19	97,47
3.	Angka partisipasi sekolahusia 16-18 tahun	60,81	65,54	70,23	70,73	70,83

Berdasarkan Tabel 2.16, Persentase Angka Partisipasi Sekolah pada suatu kelompok umur tertentu di Provinsi DKI Jakarta masih sangat baik pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/ MTs. Walau belum mencapai 100 persen seluruhnya namun angka tertinggi pada angka partisipasi sekolah dasar (SD/MI) pada tahun 2015 yaitu sebesar 99,56 persen dan angka

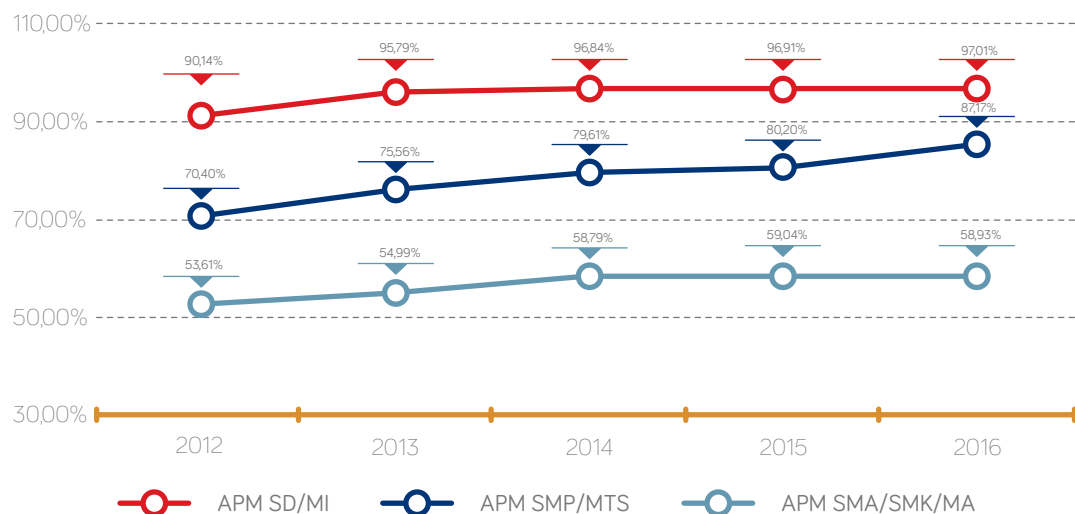
partisipasi sekolah menengah pertama (SMP/MTs) pada tahun 2016 yaitu sebesar 97,47 persen. Sementara itu, Persentase Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) mengalami peningkatan yang signifikan dari 60,81 persen pada tahun 2012, meningkat menjadi 70,83 persen pada tahun 2016.

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Perkembangan APM di Provinsi DKI Jakarta disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.19

Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018



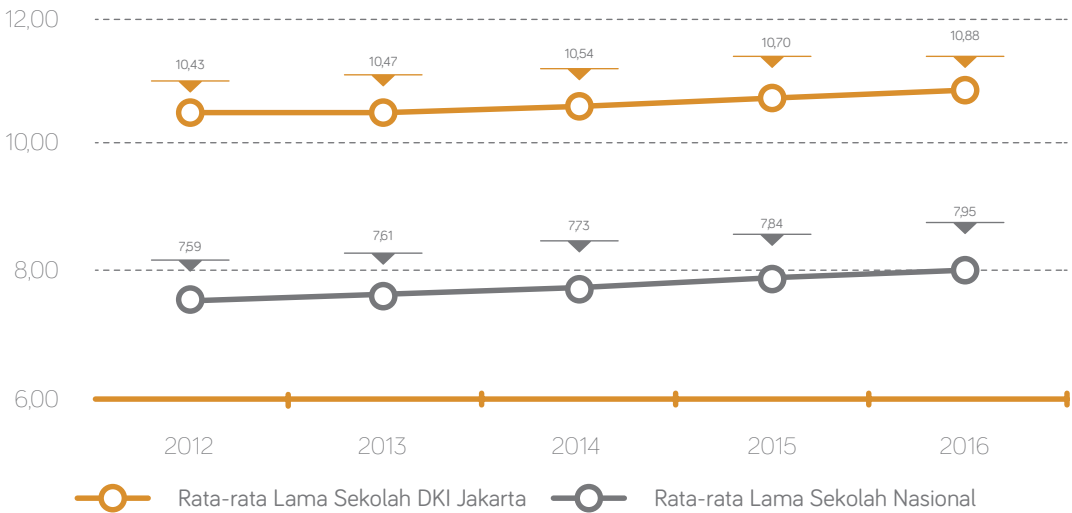
APM SD/MI mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2012 sebesar 90,14 persen menjadi 97,01 persen di tahun 2016, hal ini berarti terdapat 2,99 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak mengikuti pendidikan SD tepat waktu sesuai umurnya. Sedangkan APM SMP/MTs pada tahun 2012 tercatat sebesar 70,40 persen, kemudian mengalami peningkatan menjadi 87,17 persen di tahun 2016. Untuk APM SMA/SMK/MA selama tahun 2012 hingga tahun 2016 juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 53,61 persen menjadi 58,93 persen.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.20

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018



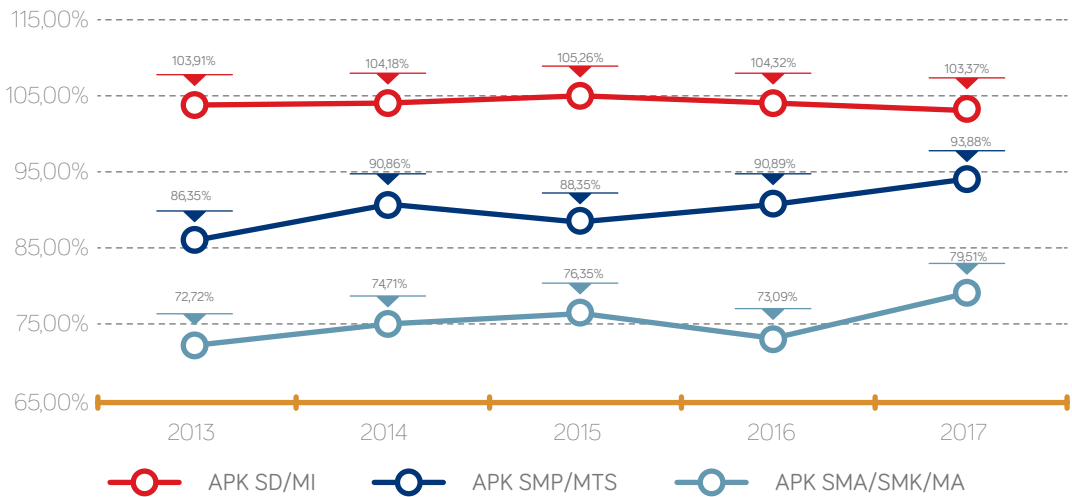
Berdasarkan gambar di atas, Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2012-2016 telah melampaui capaian nasional. Pada tahun 2016 Rata-Rata Lama Sekolah nasional mencapai 7,95 tahun atau masih setara dengan kelas VII, sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta mencapai 10,88 tahun atau setara dengan kelas X. Sementara itu, anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,39 tahun atau mencapai Diploma I.

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya. Pada gambar di bawah disajikan perkembangan SD/MI, SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA di DKI Jakarta tahun 2012-2016:

Gambar 2.21

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa APK SD/MI di DKI Jakarta selama tahun 2013-2017 telah melebihi 100 persen. Pada tahun 2013 terdapat 3,28 persen murid SD/MI yang tidak berusia 7-12, pada tahun 2015 terdapat 5,26 persen murid SD/MI yang tidak berusia 7-12 tahun, dan pada tahun 2016 terdapat 4,32 persen murid SD/MI yang tidak berusia 7-12. Hal ini dapat berarti adanya pengulangan kelas, penambahan murid dari daerah lain, atau adanya paket penyetaraan.

Sementara itu, APK SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 94,86 persen menjadi 88,35 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2016, APK siswa SMP/MTs meningkat menjadi 90,89 persen dan menjadi 93,88 persen pada tahun 2017.

APK siswa SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan dari 74,71 persen tahun 2013 menjadi 76,35 persen pada tahun 2014. Tahun 2015 APK siswa SMA/SMK/MA kembali meningkat menjadi 76,35 persen, namun menurun pada tahun 2016 menjadi 73,09 persen, dan kembali meningkat menjadi 79,51 persen pada 2017.

Persentase Angka Putus Sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Angka Putus Sekolah berfungsi untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12; 13-15; dan 16-18 tahun).Gambaran Persentase Angka Putus Sekolah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17

Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs;dan SMA/ SMK/MA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01
2.	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,13	0,15	0,18	0,11	0,06
3.	Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,04	0,33	0,42	0,36	0,15

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Persentase Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA di DKI Jakarta mengalami angka yang fluktuatif pada setiap jenjang pendidikan yang berarti masih ada warga DKI Jakarta yang putus atau berhenti sekolah pada jenjang-jenjang tertentu padahal pendidikan merupakan investasi modal manusia. Sesuai data tabel diatas, Persentase Angka Putus Sekolah tertinggi di DKI Jakarta terdapat pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2013 sebesar 0,04 persen yang kemudian relative meningkat setiap tahun hingga mencapai 0,15 persen pada tahun 2017. Hal yang berbeda terjadi jenjang pendidikan SMP/MTs relatif menurun dari 0,13 persen pada tahun 2013 menjadi 0,06 persen pada tahun 2017. Begitu pula dengan jenjang pendidikan SD/MI yang menurun namun tak signifikan dari 0,03 persen ke 0,02 persen.

Persentase kelulusan merupakan perbandingan antarajumlah siswa yang lulus dengan siswa padajenjang (kelas/tingkat) terakhir. Dalam 5 tahun terakhir, Persentase Kelulusan siswa di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren perkembangan positif, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100,00	99,32	100,00	100,00	100,00
2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,99	99,99	99,99	99,98	100,00
3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	99,99	98,99	99,99	91,36	100,00

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Pada jenjang SD/MI, persentase kelulusan tahun 2013 mencapai 100 persen, namun sedikit menurun pada tahun 2014 menjadi 99,32 persen dan kembali meningkat pada tahun 2015 sampai dengan 2017 mencapai 100,00 persen. Pada jenjang SMP/MTs, persentase kelulusan tahun 2013 mencapai 99,99 persen hingga tahun 2015. Pada tahun 2016, persentase kelulusan siswa SMP/MTs sedikit menurun menjadi 99,98 persen, dan kembali meningkat menjadi 100,00 persen pada tahun 2017. Angka kelulusan siswa jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2013 mencapai 99,99 persen, menurun pada tahun 2014 menjadi 98,99 persen, kemudian kembali meningkat menjadi 99,99 persen pada tahun 2015. Tahun 2016, angka kelulusan siswa SMA/SMK/MA menurun hingga mencapai 91,36 persen, namun kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 100,00 persen. Besarnya angka kelulusan siswa di semua jenjang digunakan untuk pemetaan dan perbaikan kebijakan.

Rata-rata nilai ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah Berbasis daerah SD, SMP, SMA, SMK bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan hasil pendidikan yang telah dijalani selama jenjang pendidikan untuk bisa mengukur seberapa besar angka nilai ujian nasional pada setiap jenjang pendidikan yang bersekolah di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2.19
Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI	7,72	7,20	7,15	7,01
2.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMP/MTs	7,50	7,55	7,49	6,23
3.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMA/MA	7,00	6,70	6,94	6,16
4.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMK	7,50	6,90	6,56	6,13

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata Nilai Ujian Nasional pada setiap jenjang pendidikan di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan setiap tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Pada tingkat jenjang SD/MI rata-rata nilai ujian nasional sebesar 7,72 pada tahun 2013 dan turun hingga 7,01 di tahun 2016, rata-rata nilai ujian nasional pada jenjang SMP/MTs mengalami penurunan yang signifikan dari 7,50 pada tahun 2013 turun hingga 6,32 pada tahun 2016, jenjang SMA/MA juga mengalami penurunan dari 7,00 pada tahun 2013 hingga 6,16 di tahun 2016, dan penurunan yang paling drastis terdapat di rata-rata nilai ujian nasional jenjang SMK yang berada pada 7,50 tahun 2013 turun signifikan menjadi 6,13 di tahun 2016.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia perlu adanya sertifikasi terhadap guru untuk memperoleh standar kompeten dalam menunjang aktifitas pendidikan. Persentase guru yang kompeten adalah jumlah guru yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi dengan jumlah keseluruhan guru. Berikut gambaran persentase guru yang kompeten di Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 2.20

Persentase Guru yang
Kompeten Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase guru yang kompeten	84,45%	94,00%	100,00%	99,90%	100,00%

*Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018*

Pada tahun 2013 persentase guru yang kompeten hanya 84,45 persen namun angka ini terus bergerak naik secara signifikan sampai dengan tahun 2015 dan 2017 yang mencapai angka 100 persen dimana seluruh guru yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta sudah menjadi guru yang kompeten.

Dalam rangka mengukur kualitas kelembagaan sekolah dan sebagai upaya memetakan mutu dan potensi sekolah di Indonesia, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) melakukan pengelompokan/klasterisasi sekolah, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Persentase sekolah yang terakreditasi A menggambarkan berapa banyak jumlah sekolah yang terdapat di DKI Jakarta yang memiliki kualitas baik dalam menjamin mutu pendidikan sebagai salah satu lembaga dalam mengembangkan sumber daya manusia. Hingga tahun 2016, sebanyak 70,50 persen sekolah jenjang SD/MI memperoleh akreditasi A. Sementara itu, sebanyak 59,11 persen sekolah jenjang SMP/MTs memperoleh akreditasi A. Pada jenjang SMA/MA, sebanyak 79,17 persen sekolah memperoleh akreditasi A, sedangkan pada jenjang SMK sebanyak 53,54 persen sekolah memperoleh akreditasi A. Berikut rincian persentase sekolah yang memperoleh akreditasi A pada semua jenjang Pendidikan:

Tabel 2.21

Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA Terakreditasi A Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2018

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Persentase Sekolah Jenjang SD/MI Terakreditasi A	6,40%	32,76%	50,86%	70,50%
2.	Persentase Sekolah Jenjang SMP/MTs Terakreditasi A	15,63%	31,51%	42,17%	59,11%
3.	Persentase Sekolah Jenjang SMA/MA Terakreditasi A	5,92%	45,42%	54,79%	79,17%
4.	Persentase Sekolah Jenjang SMK Terakreditasi A	9,50%	26,08%	34,54%	53,54%

Untuk terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan menjadikan pendidikan sebagai sasaran prioritas nasional dimana perlu adanya peningkatan akses sarana dan prasana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) agar dapat terwujudnya percepatan pemerataan akses infrastruktur fisik dan nonfisik. Berikut gambaran sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2016:

Tabel 2.22

Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	91,57%	92,00%	51,81%	68,21%

Pada tahun 2017 persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan pada tahun 2013 terdapat 91,57 persen sekolah yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta angka ini meningkat pada tahun 2014 menjadi 92,00 persen dan turun drastis pada tahun 2015 menjadi 51,81persen dan ditutup dengan angka 68,21 persen pada tahun 2016.

Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup : seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Perkembangan jumlah penerima KJP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23

Tabel Jumlah Penerima Kartu
Jakarta Pintar Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2014-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Jumlah Penerima KJP Siswa Negeri	422.548	328.183	310.118
2.	Jumlah Penerima KJP Siswa Swasta	150.541	233.225	220.889
3.	Jumlah Penerima KJP	573.089	561.408	531.007

Jumlah siswa penerima KJP pada 2014 mulai dari tingkat SD hingga SMA mencapai 573.089 siswa, yakni 422.548 atau 73,7 persen siswa sekolah negeri, dan 150.541 atau 26,3 persen siswa sekolah swasta. Selanjutnya, jumlah penerima KJP pada 2015 mengalami penurunan menjadi 561.408 siswa yang terdiri dari 328.183 atau 58,3 persen siswa sekolah negeri, dan 233.225 atau 41,7 persen siswa sekolah swasta. Kemudian, jumlah penerima KJP tahap pertama tahun 2016 mencapai 531.007 siswa, dengan rincian sebanyak 310.118 atau 58,3 persen siswa sekolah negeri serta 220.889 atau 41,7 persen siswa sekolah swasta.

Mulai tahun ajaran 2014/2015, seluruh sekolah negeri di Jakarta menampung siswa berkebutuhan khusus yang selama ini kesulitan memperoleh pendidikan. Pemprov DKI Jakarta tidak lagi membedakan anak didik berdasarkan kondisi fisik dan mental. Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan pendidikan (Inklusif). Yakni pendidikan yang tidak membedakan anak berdasar kondisi fisik dan mental. Sampai Se jauh ini persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus ada sebesar 2.120 sekolah dari 374 sekolah pada tahun 2013.

Tabel 2.24

Jumlah Sekolah Yang
Menerima Peserta Didik
Berkebutuhan Khusus di
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2013-2017

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus	374 sekolah	376 sekolah	372 sekolah	2.120 sekolah	2.120 sekolah

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Lembaga kursus dan pelatihan merupakan satuan pendidikan pendidikan luar sekolah (non formal) yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan program kursus dan pelatihan adalah jenis keterampilan yang di selenggarakan satuan pendidikan PNF dalam hal ini lembaga kursus dan pelatihan, dalam setiap lembaga kursus dan pelatihan dapat terdiri dari satu atau lebih program kursus dan pelatihan.

Untuk dapat menstandarkan pelayanan Lembaga kursus dan pelatihan, maka dilaksanakan akreditasi, yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF). Akreditasi lembaga kursus dan pelatihan adalah kegiatan penilaian kelayakan berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menilai kelayakan tersebut disusun instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk memperoleh data secara obyektif.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan satuan beserta program PNF berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menilai kelayakan tersebut disusun instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, yang mencakup 8 (delapan) standar, yaitu (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan; dan (8) Standar Penilaian Pendidikan.

Tabel 2.25
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017

No.	Indikator	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi per tahun	52	5	16	45	10	52

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Sebanyak 128 Lembaga Kursus dan Pelatihan di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2012 hingga 2017 telah diakreditasi.

B. Urusan Kesehatan

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara. Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan sehingga pelaksanaannya melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan, yang memuat 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengatur bahwa pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kewenangan dan kinerja Pemerintah Daerah.

SPM sekurangnya mempunyai dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan. Capain SPM kesehatan di Provinsi DKI Jakarta digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.26
Persentase Capain SPM
kesehatan Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2013-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun			
		2013	2013	2014	2015
1	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95,76	94,87	95,22	96,99
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	87,22	87,59	87,78	91,01
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	97,25	96,15	96,16	97,27
4	Cakupan Pelayanan Nifas	98,25	94,64	94,90	94,63
5	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	65,43	69,10	70,15	76,16
6	Cakupan kunjungan bayi	97,29	95,37	97,08	98,03
7	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100,00	100,00	100,00	99,63
8	Cakupan pelayanan anak balita	91,89	89,46	86,78	91,01
9	Cakupan Baduta Gakin dapat makanan Pendamping ASI (MPASI)	42,14	61,62	51,67	42,29
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	97,17	97,18	83,03	94,99
12	Cakupan peserta KB aktif	76,08	78,21	77,45	77,84
13.a	Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 th	2,997	1,96	2,17	2,27
13.b	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	31,37	39,33	92,12	103,17
13.c	Penemuan pasien baru TB BTA Positif	83,96	84,67	80,81	91,74
13.d	Penderita DBD yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00
13.e	Penemuan Penderita Diare	110,88	102,92	96,12	112,26
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien keluarga miskin (Gakin) / masyarakat miskin	153,85	78,00	196,90	224,03
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	49,57	100,00	100,00	40,28
16	Cakupan pelayanan gawat darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Cakupan Desa Siaga Aktif	78,51	77,53	92,88	98,50

Dalam aspek kesehatan masyarakat, upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan salah satunya yaitu menjadikan seluruh kelurahan sebagai kelurahan ODF. ODF (*Open Defecation Free*) merupakan kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Kelurahan ODF adalah Kelurahan yang 100 persen masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait Pilar 1 dari 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan. STBM menjadi acuan nasional untuk program sanitasi berbasis masyarakat sejak lahirnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis masyarakat. Pilar STBM meliputi: (1) Tidak Buang Air Besar (BAB) sembarangan; (2) Mencuci tangan pakai sabun; (3) Mengelola air minum dan makanan yang aman; (4) Mengelola sampah dengan benar; dan (5) Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

Di Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2017 sebanyak 4 Kelurahan telah mendeklarasikan sebagai Kelurahan ODF. Pada tahun-tahun selanjutnya, seluruh Kelurahan diharapkan dapat menjadi Kelurahan ODF, kemudian dapat meningkatkan statusnya menjadi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

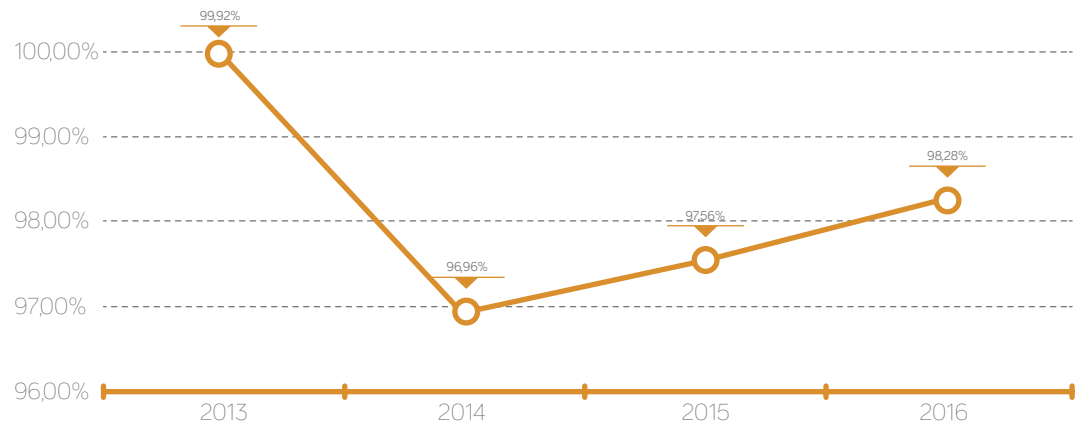
C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ruang lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup bina marga, cipta karya dan tata ruang, serta sumber daya air. Salah satu capaian kinerja bina marga yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal tersebut mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di DKI Jakarta mengalami penurunan. Pada tahun 2013 proporsi panjang jaringan jalan dengan kondisi baik sebesar 99,92 persen dari total panjang jalan keseluruhan, kemudian mengalami penurunan menjadi 96,96 persen di tahun 2014, 97,56 persen di tahun 2015, dan kemudian menjadi 98,28 persen di tahun 2016, sebagaimana digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 2.22

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di DKI Jakarta

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018



Capaian kinerja bina marga lainnya yaitu persentase panjang jalan yang memiliki trotoar. Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar di DKI Jakarta selama tahun 2012 hingga tahun 2016 masih berada dibawah 10 persen. Pada tahun 2012 hingga 2015 tercatat 7,91 persen jalan di Jakarta yang memiliki trotoar. Persentase ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 8,61 persen di tahun 2016. Dalam perspektif kedepan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan persentase panjang jalan yang memiliki trotar dalam konteks memberikan pelayanan pada pengguna jalan, khususnya pejalan kaki dan masyarakat berkebutuhan khusus. Berikut cecara rinci perkembangan persentase panjang jalan yang memiliki trotoar selama kurun waktu 2012 hingga 2016:

Tabel 2.27

Persentase Panjang Jalan
Yang Memiliki Trotoar Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2012-2016

*Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018*

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Panjang jalan yang memiliki trotoar (km)	540.336,86	540.336,86	540.336,86	540.336,86	588.311,76
2.	Panjang seluruh jalan (km) selain jalan tol	6.833.961	6.752.482	6.834.022	6.834.022	5.834.022
3.	Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar	7,91	8,00	7,91	7,91	8,61

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam lingkup cipta karya dan tata ruang, bahwa perencanaan tata ruang di DKI Jakarta diwujudkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ). Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana di DKI Jakarta berdasarkan data tahun 2007 adalah sebesar 43 persen. Untuk mewujudkan tertib tata ruang dan konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ditetapkan, maka diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang antara lain diwujudkan melalui perizinan dan pengenaan sanksi atau penindakan terhadap pelanggaran bangunan. Adapun penindakan terhadap pelanggaran bangunan terdiri atas: penerbitan Surat Peringatan (SP), pelaksanaan segel, penerbitan Surat Perintah Bongkar (SPB), dan penindakan/pembongkaran paksa bangunan yang melanggar. Persentase pelaksanaan segel dibandingkan dengan jumlah Surat Peringatan (SP) yang diterbitkan mengalami kecenderungan meningkat. Tahapan penindakan terhadap pelanggaran bangunan gedung setelah pelaksanaan segel adalah penerbitan SPB dan pelaksanaan bongkar paksa. Perbandingan pelaksanaan bongkar paksa terhadap jumlah SPB yang diterbitkan jauh lebih rendah dari pada persentase pelaksanaan segel dan penerbitan SP. Penjelasan secara numerik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.28

Capaian Kinerja Tata Ruang
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2013-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah IMB yang diterbitkan	13.037	9.765	11.746	11.450
2.	Jumlah Surat Peringatan (SP) yang diterbitkan	4.035	3.102	3.512	4.136
3.	Jumlah Pelaksanaan Segel	3.628	3.102	3.233	3.980
4.	Jumlah Surat Perintah Bongkar (SPB) yang diterbitkan	2.648	2.835	2.932	3.696
5.	Jumlah Pelaksanaan Bongkar	1.513	1.058	986	1.178
Persentase Segel/SP		90%	100%	92%	96%
Persentase Bongkar/SPB		57%	37%	34%	32%

Lingkup kinerja cipta karya, juga meliputi kinerja pembangunan dan perawatan gedung pemda. Secara keseluruhan telah dibangun/direhab 74 gedung Pemda, telah dipelihara/dilakukan perbaikan 40 gedung pemda.Data jumlah pembangunan dan pemeliharaan gedung pemda tahun 2013 hingga 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29

Data pembangunan gedung
pemda oleh Dinas Perumahan
dan Gedung Pemda Provinsi
DKI Jakarta 2013-2016

No.	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Pembangunan/ Rehab (Gedung Pemda)	9	28	26	11
2.	Jumlah Pemeliharaan/ Perbaikan (Gedung Pemda)	12	6	10	12

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

Secara keseluruhan telah dibangun/direhab 74 gedung pemda, telah dipelihara/dilakukan perbaikan 40 gedung pemda.Kewenangan gedung pemda mengalami perubahan, dari sebelumnya oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (sampai dengan tahun 2016), menjadi tugas dan kewenangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (mulai tahun 2017). Pembangunan gedung pemda yang dilaksanakan tahun 2013 hingga 2016 adalah pembangunan baru dan rehab total. Sedangkan pemeliharaan berupa perbaikan gedung/ rehab sedang dan/atau perbaikan mekanikal elektrik di gedung pemda yang menjadi kewenangan SKPD saat itu (Dinas Perumahan dan Gedung Pemda).

Untuk meningkatkan kualitas bangunan gedung pemda diperlukan standar bangunan yang sesuai fungsi dan layak secara struktur dan mekanikal elektrik untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemda. Oleh karena itu, untuk program gedung pemda tahun 2018 hingga 2022 akan didorong untuk sesuai dengan standar bangunan gedung pemda.

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per 1000 Penduduk

Mengacu pada Tabel 2.33 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di DKI Jakarta. Pada tahun 2012 rasio TPS per satuan penduduk tercatat 1.338,46m³ per 1.000 penduduk, kemudian di tahun 2016 menurun menjadi 1.284,34m³ per 1.000 penduduk. Hal ini dikarenakan jumlah daya tampung TPS yang tidak bertambah sejak tahun 2012 hingga 2016, sementara jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.30

Rasio TPS per Satuan
Penduduk Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah daya tampung TPS (m ³)	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000
2.	Jumlah penduduk	9.862.088	9.969.948	10.075.310	10.177.924	10.277.628
3.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1.338,46	1.323,99	1.310,13	1.296,93	1.284,34

Kinerja sumber daya air dapat dijelaskan bahwa sumber air di DKI Jakarta yaitu 3 persen berasal dari sumber air baku lokal, berasal dari Kali Krukut (Cilandak) dan Kali Pesanggrahan, sedangkan 97 persen bersumber dari air baku dari luar Jakarta, berasal dari Waduk Jatiluhur (81 persen) and Air Curah Olahan dari Tangerang (16 persen). Kapasitas produksi maksimum perusahaan air bersih di DKI Jakarta yaitu PAM Jaya dan kubikasi air terjual digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.31

Cakupan Pelayanan Air Bersih
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kapasitas Produksi Air Potensial (liter/detik)	15.200	15.200	15.200	15.200	16.200
2.	Kapasitas Produksi Air Efektif (liter/detik)	14.174	14.130	14.544	14.959	15.956
3.	Produksi Air (juta m ³)	537,10	537,02	548,19	560,38	594.18
4.	Kubikasi Air Terjual (juta m ³)	310,01	314,32	320,88	330,50	337.14

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kapasitas produksi efektif pada tahun 2012 sebesar 14.174 liter per detik dengan volume produksi air bersih mencapai 537,10 juta m³. Tahun 2013, kapasitas produksi air efektif sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 14.130 liter per detik, dengan volume produksi air bersih yang juga mengalami penurunan yaitu sebesar 537,02 juta m³. Penurunan tersebut disebabkan masih besarnya volume air yang bocor (*non revenue water*). Kebocoran air berdampak pada penurunan kualitas, kuantitas dan kontinuitas distribusi air kepada pelanggan yang resmi. Langkah yang sudah dilakukan untuk mengurangi kebocoran air antara lain: penggantian pipa-pipa air yang sudah tua, menggantikan water meter yang rusak, serta meningkatkan kemampuan administrasi dan menindak tegas pelaku pencurian air. Tahun 2014 kapasitas produksi meningkat menjadi 14.544 liter per detik, dengan volume produksi air bersih yang juga meningkat menjadi 548,19 m³. Tahun 2015, kapasitas produksi efektif kembali meningkat sebesar 14.959 liter per detik dengan volume produksi air bersih mencapai 560,38 juta m³. Tahun 2016, kapasitas produksi air efektif mengalami peningkatan menjadi 16.200 liter per detik, dengan volume produksi 594,18 m³. Badan Regulator PAM Jaya merilis Jakarta akan membutuhkan air sekitar 28.000 liter per detik pada tahun 2022.

Pemantauan status mutu air baku sepanjang tahun 2012 hingga 2016 dilakukan terhadap air sungai, situ/waduk, air tanah, serta perairan laut dan muara Teluk Jakarta dengan pelaksanaan pemantauan pada tabel berikut:

Tabel 2.32

Jumlah Titik Pemantauan
Kualitas Lingkungan Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2012-2016

*Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018*

No.	Kegiatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Air Sungai	67 titik	70 titik	80 titik	80 titik	90 titik
2.	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Air Situ/Waduk	40 Situ	40 Situ	40 Situ	40 Situ	40 Situ
3.	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Air Tanah	100 titik	100 titik	150 titik	200 titik	267 titik
4.	Jumlah Titik Pemantauan Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta	33 titik	45 titik	45 titik	45 titik	45 titik

Pada tahun 2013 dan 2014 hanya dilakukan pemantauan perairan dan muara Teluk Jakarta pada 43 titik dari 45 titik yang di targetkan karena di Muara rumah pompa Pluit sedang dilakukan perbaikan sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengambilan sampel. Berdasarkan hasil pemantauan dilakukan analisis menggunakan metode Indeks Pencemar tentang kondisi kualitas air, berikut adalah hasil analisa terhadap kualitas air sungai, air tanah, air situ/waduk, perairan teluk Jakarta dan muara yang disajikan secara berurutan:

Tabel 2.33

Status Mutu Pemantauan
Air Situ/Waduk berdasarkan
Indeks Pencemaran

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Status	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Baik	0%	2,0%	0%	0%	0%
2.	Tercemar Ringan	12,5%	30,0%	2,0%	57,0%	3,0%
3.	Tercemar Sedang	50,0%	40,0%	70,0%	33,0%	68,0%
4.	Tercemar Berat	37,5%	28,0 %	28,0%	10,0%	29,0%

Berdasarkan pemantauan tahun 2012 hingga 2016, kondisi kualitas air situ/waduk di DKI Jakarta mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat bahwa tahun 2016 status air tercemar berat mengalami peningkatan. Parameter dominan yang mencemari kualitas air situ/waduk yaitu Coliform, Fecal Coli, Detergen, Phosphat dan Organik, dimana kondisi situ/waduk saat ini adalah sebagai tempat buangan air limbah rumah tangga.

Selain pada status mutu air baku, pemantauan juga dilakukan terhadap status mutu air limbah. Status mutu air limbah yang merupakan tolak ukur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah terhadap usaha dan/atau kegiatan di Provinsi DKI Jakarta, sepanjang tahun 2012 hingga 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012, tingkat pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dari usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengujian air limbah ke UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) Provinsi DKI Jakarta sebesar 85,27 persen. Tingkat ketaatan ini sedikit menurun pada tahun 2013 menjadi 84,80 persen, hal ini dikarenakan keluarnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 tahun 2013 yang mengatur Baku Mutu Air Limbah (BMAL) bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang terbaru, terutama untuk kegiatan Rumah Sakit dan Hotel yang mewajibkan perusahaan untuk memeriksakan kualitas Total Coliform. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah terhadap usaha dan/atau kegiatan penghasil air limbah, dan hal ini terlihat dari meningkatnya tingkat ketaatan terhadap Baku Mutu Air Limbah (BMAL) sejak tahun 2014 sampai tahun 2016, dari 86,40 persen di tahun 2014 menjadi 90,08 persen di tahun 2016. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memeriksakan kualitas air limbah sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 873 Perusahaan di tahun 2012 meningkat sampai 1.346 Perusahaan di tahun 2016, yang berarti jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diberikan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkat setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, Gubernur memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Adapun data status mutu air limbah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.34

Data Status Mutu Air Limbah
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Sampel Masuk	3795	4046	4573	5252	6051
2.	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan	873	965	992	1105	1346
3.	Jumlah Sampel Memenuhi BMAL	3236	3431	3951	4725	5451
4.	Persen ketaatan BMAL	85.27%	84.80%	86.40%	89.97%	90.08%

Cakupan Pemantauan Status Mutu Air

Tabel 2.35

Status Mutu Pemantauan Air
Sungai berdasarkan Indeks
Pencemaran Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi DKI Jakarta,
2018

No.	Uraian	Persentase Berdasarkan Index Pencemaran				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Mutu Baik	0%	0%	1%	1%	0%
2.	Tercemar Ringan	9%	10%	23%	17%	0%
3.	Tercemar Sedang	26%	32%	44%	39%	40%
4.	Tercemar Berat	65%	58%	32 %	43%	60%

Berdasarkan hasil pemantauan dari tahun 2012 hingga 2016, terjadinya pencemaran air sungai berdasarkan sebagian besar disebabkan oleh limbah domestik (70 persen) dan kegiatan lain (30 persen). Tahun 2016 kualitas air sungai mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Parameter yang dominan mencemari kualitas air sungai adalah Coliform, Fecal Coli, Detergen, Phosphat, dan Organik.

Tabel 2.36

Status Mutu Pemantauan Air
Tanah Berdasarkan Indeks
Pencemaran Provinsi DKI
JakartaTahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Uraian	Persentase Berdasarkan Index Pencemaran				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Mutu Baik	35%	34%	0%	38%	46%
2.	Tercemar Ringan	39%	37%	99%	45%	28%
3.	Tercemar Sedang	14%	17%	1%	15%	24%
4.	Tercemar Berat	12%	12%	0%	3%	2%

Pengambilan sampel air tanah dilakukan tersebar pada seluruh wilayah Kota Administrasi, hal ini untuk mengetahui kondisi air tanah dangkal yang digunakan oleh warga DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2012 hingga tahun 2016, kondisi air tanah di DKI Jakarta

sebagian besar masih dalam kondisi baik, berdasarkan hasil pemantauan dari tahun 2012-2016 mengalami trend peningkatan kualitas.

Tabel 2.37

Status Mutu Pemantauan
Perairan Laut Teluk Jakarta
berdasarkan Indeks
Pencemaran Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012-2015

No.	Mutu Air	Persentase Index Pencemaran			
		2012	2013	2014	2015
1.	Baik	0	0	0	4%
2.	Tercemar Ringan	0	0	0	61%
3.	Tercemar Sedang	26,1%	17,4%	17,4%	35%
4.	Tercemar Berat	73,9%	82,6%	82,6%	0

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

Berdasarkan tabel diatas kualitas perairan mengalami peningkatan pada tahun 2016 kondisi perairan Teluk Jakarta berdasarkan hasil pemantauan tahun 2016 terjadi peningkatan, hal ini dapat dilihat bahwa kondisi status mutu air tercemar berat telah berkurang dan meningkat menjadi status mutu air tercemar ringan dan sedang.

Tabel 2.38

Status Mutu Pemantauan
Muara Teluk Jakarta
berdasarkan Indeks
Pencemaran Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012-2015

No.	Mutu Air	Presentase Indeks Pencemar			
		2012	2013	2014	2015
1.	Baik	0	0	0	0
2.	Tercemar Ringan	25%	0	0	9,1%
3.	Tercemar Sedang	25%	40%	40%	27,3%
4.	Tercemar Berat	50%	60%	60%	63,6%

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

Sedangkan kondisi status mutu muara Teluk Jakarta berdasarkan tabel di atas mengalami penurunan kualitas, pada Tahun 2016 status mutu dengan kategori tercemar berat mangalami peningkatan dari 60,00 persen pada tahun 2015 menjadi 63,6 persen pada tahun 2016.

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Tabel 2.43 dapat diketahui bawah persentase luas permukiman yang tertata di DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 0,57 persen menjadi 0,14 persen pada tahun 2015. Sehingga dalam perspektif kedepan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu menitikberatkan penyelesaian persoalan penataan permukiman.

Tabel 2.39

Luas Permukiman yang
Tertata Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1.	Luas area permukiman tertata (ha) (Perhitungan SIPPT Perumahan & Apartemen)	175,07	950,91	128,87	39,48
2.	Luas area permukiman keseluruhan (ha) (Sumber: Zona Kuning RDTR)	30.594,00	30.594,00	28.911,00	28.911,00
3.	Persentase Luas permukiman yang tertata	0,57	3,11	0,45	0,14

Rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga di DKI Jakarta terus mengalami tren yang meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2012, Rasio Rumah Layak Huni di DKI Jakarta berada pada angka 90,41 persen. Kemudian persentase rasio tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi 90,55 persen.

Tabel 2.40

Rasio Rumah Layak Huni
terhadap Jumlah Rumah
Tangga Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012-2015

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Rumah Layak Huni (Rumah Tangga)	2.329.410	2.356.428	2.384.256	2.407.864
2.	Jumlah Rumah Tangga	2.576.518	2.604.752	2.632.338	2.659.205
3.	Rasio Rumah Layak Huni	90,41%	90,47%	90,58%	90,55%

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam hal pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, setiap anggota masyarakat berhak atas rasa aman. Secara umum, keamanan diartikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma-norma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban merupakan keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Sementara ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Selain keamanan dan ketertiban, terdapat pula istilah ketrentraman dan ketertiban. Ketentraman dapat diartikan sebagai suasana batin dari individu dan atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma.

Dalam hal ketertiban umum, pemerintah daerah mempunyai kewajiban menegakan peraturan daerah melalui perangkat daerahnya. Apabila dipandang perlu, Polri akan membantu

pemerintah daerah. Sedangkan Polri menegakan semua peraturan perundang-undangan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam penegakan peraturan daerah, tidak jarang terjadi pelanggaran, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.41

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	76	276	403	332	621
2.	Jumlah pelanggaran K3	179	664	689	371	623
3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	42,46%	41,57%	58,49%	89,49%	99,68%

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Untuk cakupan penegakan perda di DKI Jakarta selama tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan angka yang berfluktuasi, yakni 42,46 persen pada tahun 2012 menjadi 41,57 persen di tahun 2013. Memasuki tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 58,49 persenkemudian meningkat menjadi 89,49 persen di tahun 2015, dan meningkat kembali di tahun 2016 menjadi 99,68 persen. Jika dilihat dari jumlah pelanggaran Perda terbanyak yang tidak terselesaikan berada di tahun 2013, dengan jumlah pelanggaran sebesar 664 kasus dan hanya 276 kasus yang terselesaikan.

Dalam hal penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok tersebut adalah Polisi Pamong Praja. Cakupan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per 10.000 penduduk mengalami tren penurunan selama tahun 2012 hingga tahun 2016 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.42

Cakupan Polisi Pamong Praja dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk					
1	Jumlah polisi pamong praja	4.353	4.100	4.091	3.452	3.303
2	Jumlah penduduk	9.862.088	9.969.948	10.075.310	10.177.924	10.277.628
3	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4,41	4,11	4,06	3,39	3,21
B.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (%)					
1	Jumlah linmas	22.909	22.906	19.795	18.074	18.230
2	Jumlah penduduk	9.862.088	9.969.948	10.075.310	10.177.924	10.277.628
3	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	23,23	22,98	19,65	17,76	17,74

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

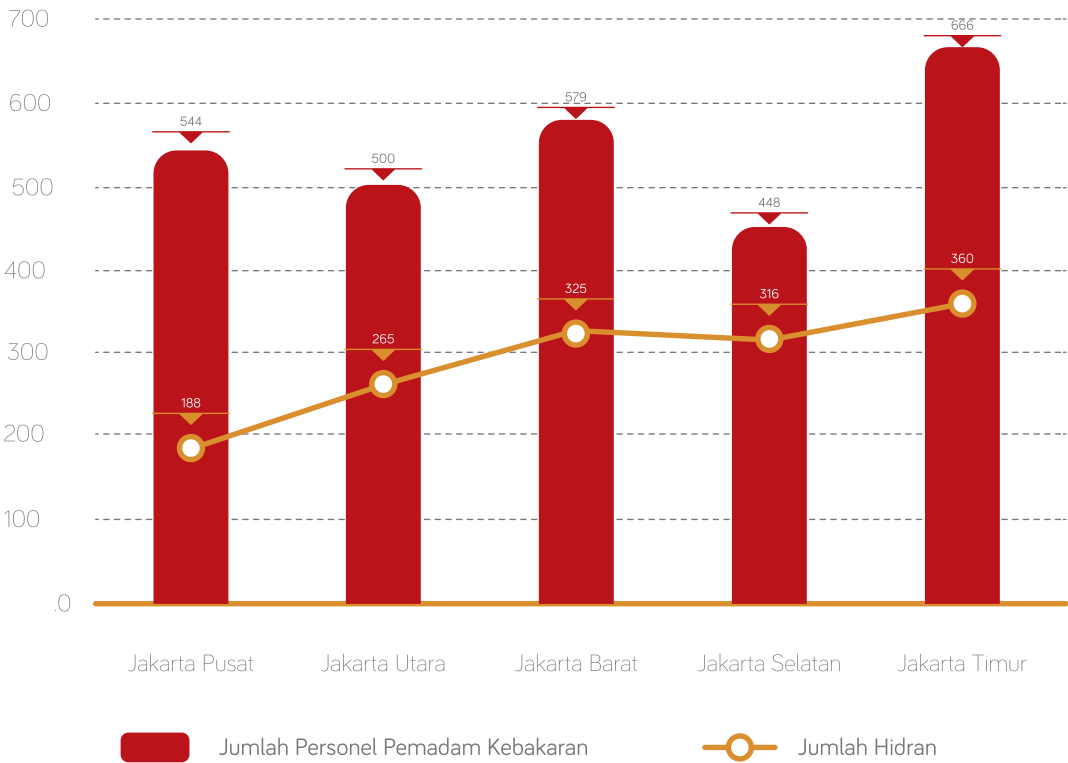
Pada tahun 2012 tercatat terdapat 4,41 Satpol PP untuk melayani 10.000 penduduk, menurun menjadi 3,21 Satpol PP untuk melayani 10.000 penduduk pada tahun 2016. Sementara itu, jumlah linmas per 10.000 penduduk di DKI Jakarta selama tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami tren yang menurun. Pada tahun 2012 tercatat 23,23 per 10.000 penduduk, sementara pada tahun 2016 tercatat 17,74 per 10.000 penduduk. Hal ini dipengaruhi adanya tren penurunan jumlah linmas di tahun 2013 hingga tahun 2016 disertai dengan peningkatan jumlah penduduk di tahun yang sama.

Dalam hal penanggulangan bencana kebakaran, kejadian kebakaran pada umumnya terjadi di lokasi dengan tingkat kepadatan aktivitas yang tinggi. Korelasi antara bangunan gedung, tingkat aktivitas kawasan serta kondisi kawasan seperti kawasan permukiman kumuh, permukiman liar hingga kawasan industri yang kurang tertata, memicu tingginya tingkat kerawanan kebakaran di wilayah perkotaan. Penanganan bencana kebakaran meliputi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan dimana memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak yang harus segera ditindaklanjuti. Dalam upaya penanggulangan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyiapkan sejumlah personel pemadam kebakaran dan hidran yang tersebar di seluruh wilayah, dengan gambaran sebagai berikut:

Gambar 2.23

Jumlah Personel Pemadam Kebakaran dan Jumlah Hidran Kebakaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2018



Sementara itu, banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43

Jumlah Kejadian Kebakaran
di Provinsi DKI Jakarta Tahun
2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jakarta Pusat	137	134	181	141	188
2.	Jakarta Utara	162	184	248	257	265
3.	Jakarta Barat	262	283	370	283	325
4.	Jakarta Selatan	224	232	374	241	316
5.	Jakarta Timur	211	258	388	246	360
6.	Jumlah Kejadian Kebakaran	996	1.091	1.561	1.168	1.454

Dalam upaya menjaga kualitas peralatan dan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melakukan pengujian mutu yang secara teknis dilakukan oleh Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Peralatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian mutu yaitu meliputi, pengujian alat pemadam api, pengujian *foam liquid*, pengujian pintu tahan api, pengujian *rolling door*, pengujian *fire stopping*, pengujian pengendali asap atau api, pengujian pompa *portable*, pengujian mobil pemadam, pengujian selang kebakaran, pengujian helm kebakaran, pengujian baju tahan panas, pengujian sepatu keselamatan kebakaran, pengujian kepala pemercik, pengujian brankas, pengujian komponen hidran, dan pengujian mulut pipa.

F. Urusan Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Secara umum, jumlah PMKS yang tertangani mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 9.692 orang, kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 15.113 orang, memasuki tahun 2015 menurun menjadi 11.650 dan kemudian meningkat kembali di tahun 2016 menjadi 14.808 PMKS. Upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain adalah meningkatkan kualitas pelayanan sarana prasarana rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi lansia, peningkatan kualitas SDM keluarga miskin dan pembinaan mental bagi PMKS. Lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.44

Penanganan PMKS di Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah PMKS	38.732	38.732	38.732	38.732	38.732
2.	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	12.513	16.400	19.741	18.585	19.854
3.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	32,31%	42,34%	50,97%	47,98%	51,26%
4.	Jumlah PMKS yang tertangani	9.692	12.287	15.113	11.650	14.808
5.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	25,02%	31,72%	39,02%	30,08%	38,23%

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Muara dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dapat hidup mandiri. Berikut gambaran fakir miskin yang dapat mandiri di Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 2013 hingga 2017:

Tabel 2.45

Jumlah Keluarga Miskin
yang mandiri Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Keluarga Miskin yang mandiri	15.004	21.224	26.644	26.644	26.644

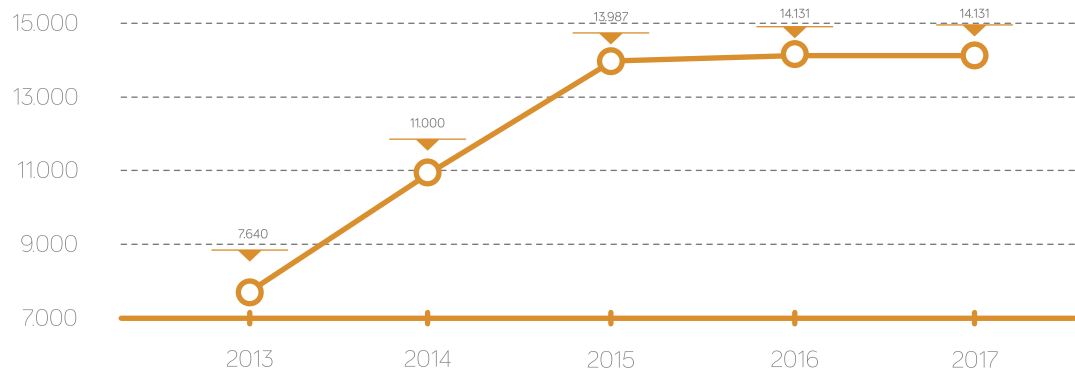
Mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Amanat tersebut membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut andil dalam penyelenggaraan kegiatan sosial kemanusiaan. Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial

dicerminkan antara lain dalam bentuk kesediaan masyarakat menjadi relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Tenaga kesejahteraan sosial merupakan seseorang yang dididik dan dilatih untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Berikut gambaran jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017:

Gambar 2.24

Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018



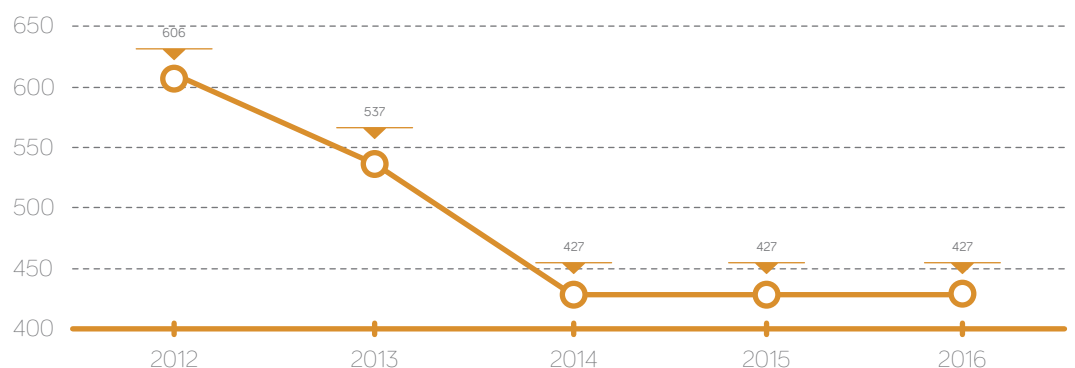
Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 hingga 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 7.640 orang pada tahun 2013

Untuk menunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan sarana sosial yang meliputi panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan sarana sejenis lainnya. Secara umum, tren jumlah sarana sosial di DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami pengurangan jumlah. Tahun 2012 merupakan tahun dengan sarana sosial terbanyak yaitu 606 sarana sosial. Memasuki tahun 2013 jumlahnya menurun menjadi 537, hingga tahun 2016 kembali mengalami pengurangan menjadi 427 sarana sosial. Pengurangan tersebut sebagian besar dikarenakan penggabungan beberapa sarana sosial sejenis. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.25

Perkembangan Jumlah Sarana Sosial di DKI Jakarta

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018



2.4.2.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Kinerja urusan tenaga kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.46
Jumlah Pencari Kerja Yang Berhasil Ditempatkan dan Berwirausaha Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Pencari Kerja yang berhasil di tempatkan	4.803	54.015	15.062	24.997	25.121
2.	Jumlah pencari kerja yang berwirausaha	914	930	1.120	1.050	1.040

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Sebanyak 4.803 pencari kerja berhasil ditempatkan selama tahun 2013. Jumlah tersebut relatif meningkat hingga tahun 2017 mencapai 25.121 pencari kerja yang berhasil ditempatkan. Dalam perkembangannya, tingkat pendidikan tidak menjamin pencari kerja akan mudah memperoleh pekerjaan. Di sisi lain, lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas. Tingginya *supply* (pencari kerja) dan terbatasnya lapangan kerja (*demand*) yang tersedia mengakibatkan terjadinya pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Oleh karenanya, selain membuka kesempatan kerja, kebijakan ketenagakejaan diarahkan untuk menggeser paradigma mencari kerja (*job seeking*) menjadi menciptakan lapangan kerja atau berwirausaha. Sebanyak 914 pencari kerja berwirausaha pada tahun 2013, jumlah tersebut juga terus meningkat hingga pada tahun 2017 mencapai 1.040 pencari kerja.

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada dasarnya mengatur berbagai norma yang mencakup norma pelatihan, norma penempatan, norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan norma hubungan kerja. Untuk menjaga pelaksanaan aturan ketenagakerjaan, perlu dilakukan pengawasan ketenagakerjaan. Pelaksanaan pengawasan bertujuan: Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Memberi penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha atau pengurus dan atau tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif daripada Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan tentang hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang luas. Selain itu juga untuk mengumpulkan bahan-bahan guna pembentukan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang baru. Pengawasan ketenagakerjaan penting dilakukan sebagai dasar untuk merancang, mendorong dan berkontribusi pada pengembangan budaya pencegahan yang mencakup semua aspek ketenagakerjaan seperti: hubungan industrial, upah, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Berikut gambaran pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 2013-2017:

Tabel 2.47

Kepatuhan Terhadap
Ketentuan Peraturan
Ketenagakerjaan di Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	6.553	6.564	8.050	6.425	6.543
2.	Jumlah Perusahaan yang menjalankan K3	1.397	1.395	1.425	1.392	1.432

Dalam aktivitasnya, tidak jarang terjadi perselisihan yang sering disebut sebagai perselisihan hubungan industrial, yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Sebagai upaya penciptaan hubungan industrial yang harmonis, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan terlebih dahulu melalui penyelesaian secara damai melalui perundingan bipartit, yang harus sudah selesai dalam 30 hari kerja. Jika salah satu pihak menolak berunding, atau hingga lewat batas waktu belum mencapai kesepakatan maka perundingan bipartit dianggap gagal, dan perselisihan harus dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk kemudian dilakukan konsiliasi untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, atau perselisihan antar serikat pekerja, yang apabila tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dan konsiliasi, maka para pihak yang berselisih dapat menempug gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Untuk perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja, dapat diselesaikan melalui arbitrase. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara arbitrase tidak dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial, karena keputusan arbiter bersifat akhir dan tetap. Berikut adalah jumlah kasus hubungan industrial yang masuk ke tingkat perjanjian Bersama di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.48

Kasus Hubungan Industrial
Yang Masuk Ke Tingkat
Perjanjian Bersama Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kasus Hubungan Industrial yang masuk ke tingkat Perjanjian Bersama	44	42	28	55	238

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu fokus dalam kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Walaupun Rasio KDRT di DKI Jakarta mengalami tren yang terlihat stagnan, namun jika dilihat berdasarkan jumlahnya mengalami tren yang meningkat sejak tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2012 tercatat terdapat 818 KDRT, kemudian jumlah ini meningkat menjadi 892 KDRT di tahun 2016. Secara detail, berikut gambaran KDRT di Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 hingga tahun 2016:

Tabel 2.49
KDRT di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah KDRT	818	825	966	897	892
2.	Jumlah rumah tangga	2.576.518	2.604.752	2.632.338	2.659.205	2.685.314
3.	Rasio KDRT	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%

Penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 telah diselesaikan seluruhnya. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penjelasan secara numerik disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.50
Penyelesaian Pengaduan
Perlindungan Perempuan
dan Anak dari Kekerasan di
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan	1.429	1.517	1.612	1.736	1.618
2.	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak	1.429	1.517	1.612	1.736	1.618
3.	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100%	100%	100%	100%	100%

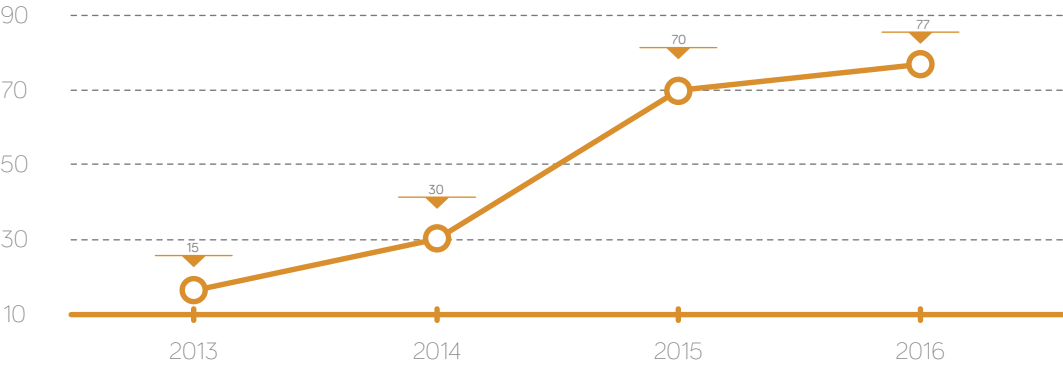
Fokus lain dalam kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu kesetaraan gender. Gender merupakan Konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Di dalam pemerintahan, dilakukan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Sementara anggaran yang responsif gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Berikut gambaran Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 2013-2016:

Gambar 2.26

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 2013-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018



C. Urusan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketersediaan pangan dapat diperoleh dari produksi sendiri, pasokan pangan dari luar (impor), memiliki cadangan pangan, dan adanya bantuan pangan. Di Provinsi DKI Jakarta, pemenuhan konsumsi pangan beras sebagai bahan pangan utama penduduk DKI Jakarta masih bergantung kepada daerah lain yang menjadi sentra penyuplai beras.

Perkembangan ketersediaan pangan pokok sumber karbohidrat yaitu beras tahun 2012-2016 menunjukkan adanya kecenderungan yang menurun, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51

Ketersediaan Pangan Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
Ketersediaan Pangan Utama						
1.	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	1.427.400.000	1.338.321.000	1.222.134.000	1.162.671.000	1.162.728.156
2.	Jumlah penduduk	9.862.088	9.969.948	10.075.310	10.177.924	10.277.628
3.	Ketersediaan pangan utama	144,74	139,25	121,30	114,23	113,13

Penurunan ketersediaan pangan pokok beras menggambarkan menurunnya dominasi pangan pokok sumber karbohidrat yang berasal dari beras. Penurunan tersebut terjadi seiring terus berkurangnya potensi lahan pertanian. Ketersediaan sumber bahan pangan yang tersedia di Jakarta hanya padi. Untuk jagung dan kedelai produksi yang dihasilkan sangat kecil, bahkan beberapa kali hasil produksinya 0. Dalam perkembangannya, kegiatan produksi pangan di Jakarta tidak dilakukan dengan basis lahan namun dengan teknologi. Salah satu contohnya adalah pertanian hidroponik yang dikemas dalam produk wisata atau agro wisata.

Untuk menjaga keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat, maka keamanan pangan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran fisik, biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pangan olahan yang diproduksi harus sesuai dengan cara pembuatan pangan olahan yang baik. Pangan harus layak dikonsumsi adalah pangan yang tidak busuk, tidak menjijikkan, dan bermutu baik, serta bebas dari tiga cemaran yaitu:

- Aman dari cemaran biologi, yaitu berupa bakteri, kapang, jamur, parasit, virus dan ganggang. Pertumbuhan mikroba bisa menyebabkan pangan menjadi busuk sehingga tidak layak untuk dimakan dan menyebabkan keracunan pada manusia bahkan kematian. Faktor yang membuat bakteri tumbuh: pangan memiliki kandungan protein tinggi, kondisi hangat (suhu 40°C-60°C), kadar air, tingkat keasaman, dan waktu penyimpanan.
- Aman dari cemaran kimia, yaitu bahan kimia yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pangan. Cemaran kimia masuk ke dalam pangan secara sengaja maupun tidak sengaja dan dapat menimbulkan bahaya.
- Aman dari cemaran fisik, yaitu aman dari benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan seperti rambut, kuku, staples, serangga mati, batu atau kerikil, pecahan gelas atau kaca, logam dan lain-lain. Benda-benda ini jika termakan dapat menyebabkan luka, seperti gigi patah, melukai kerongkongan dan perut. Benda tersebut berbahaya karena dapat melukai dan atau menutup jalan nafas dan pencernaan.

Dalam pelaksanaan pengawasan pangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian melibatkan PD Pasar Jaya dan sejumlah stakeholder terkait dari tingkat provinsi hingga tingkat kota. Apabila dari hasil uji di lapangan ditemukan adanya sampel produk yang positif mengandung bahan berbahaya, maka dilakukan penelusuran serta penanganan tindak lanjut. Bagi pedagang yang berdasarkan hasil uji terbukti menjual produk pangan mengandung zat berbahaya, diberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku. Capaian pengawasan pangan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 rata-rata diatas 80,00 persen, dengan capaian baik/aman, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52

Persentase Pangan Bebas
Bahan Berbahaya di Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produk Pertanian	90,00	90,28	95,90	91,25	90,00
2.	Produk Perikanan	81,83	93,38	99,11	98,23	81,83
3.	Produk Peternakan	93,38	92,00	93,00	99,88	93,38

D. Urusan Pertanian

Tanah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan menempati kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan manusia dan pembangunan. Belum terdatanya semua tanah-tanah yang mengakibatkan tidak jelasnya pemilikan tanah secara maksimum, tanah-tanah absentee, timbulnya absentee baru, dan penggunaan tanah maksimum. Belum terdatanya semua bidang tanah mengakibatkan tidak diketahuinya present pengaturan penggunaan (land use) dan pengaturan pemanfaatan (present land tenure) dari tanah tersebut, juga disebabkan tingkat pendaftaran tanah masih relatif rendah. Tap MPR No. IX/MPR/ 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menetapkan perlunya program land reform sebagai salah satu arah kebijakan pembaruan agraria yang dilakukan melalui pendataan pertanahan melalui Inventarisasi dan Registrasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, secara komprehensif dan sistematis. Kegiatan Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah kelurahan yang sudah terdata di 5 wilayah kota dan jumlah bidang tanah yang terdata digambarkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.53

Jumlah Kelurahan dan Bidang
Tanah yang Telah Didata di
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2003-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator Kinerja	Tahun		
		2003-2013	2015	2016
1.	Jumlah kelurahan	204	8	12
2.	Jumlah bidang tanah	917,337	38,161	73,230

Hingga tahun 2016 sebanyak 1.028.736 bidang tanah yang terdapat pada 224 kelurahan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mendukung data pemanfaatan ruang yang lebih akurat, selanjutnya akan dilakukan pendataan terhadap 37 Kelurahan yang masih tersisa dengan jumlah bidang tanah sebanyak 254.648 bidang dan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap data P4T di Provinsi DKI Jakarta yang sudah ada.

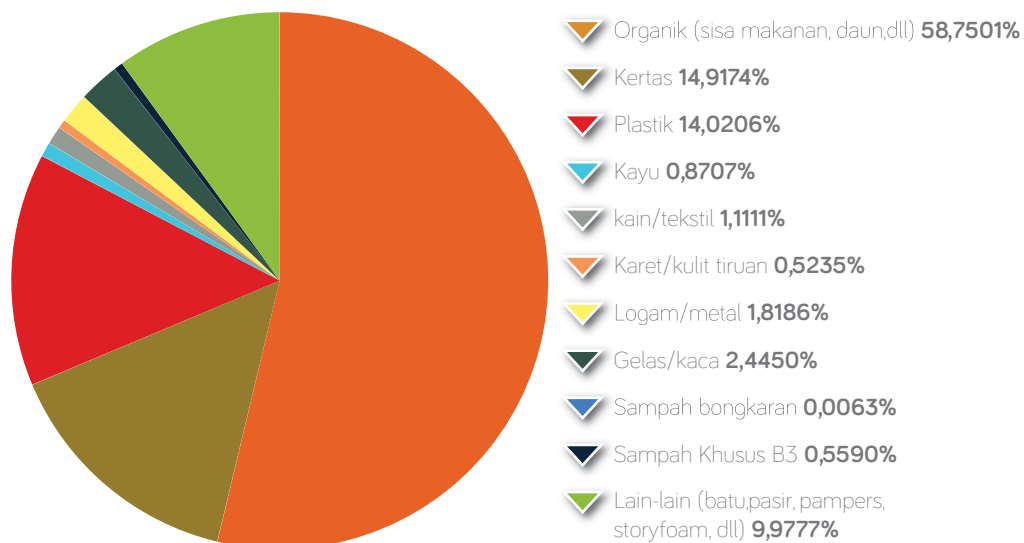
E. Urusan Lingkungan Hidup

Kebersihan lingkungan ialah suatu keadaan yang bebas dari kotoran seperti, debu, sampah, dan juga bau. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Berdasarkan hasil Studi Komposisi dan Karakteristik Sampah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011, diperoleh data timbulan sampah sebesar 3,4 liter/orang/hari. Secara rinci, berikut gambaran mengenai Timbulan, Komposisi, dan Karakteristik Sampah di Provinsi DKI Jakarta:

Gambar 2.27

Komposisi Sampah di
Sumber Sampah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2017

*Sumber: Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi DKI Jakarta,
2018*

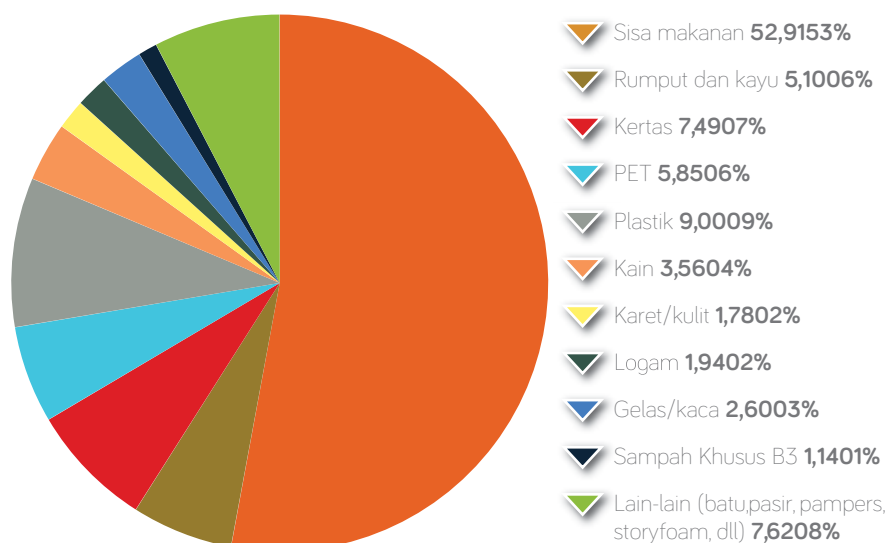


Sampah di sumber sampah didominasi oleh sampah organik, sampah kertas dan sampah plastik, sementara sampah di TPS didominasi oleh sampah sisa makanan, sampah plastik dan karet/kulit, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.28

Komposisi Sampah di TPS
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2017

*Sumber: Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi DKI Jakarta,
2018*



Paradigma lama sistem pengelolaan sampah menitikberatkan pada penanganan sampah yang terfokus kepada pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru ketika penampungan di TPA sudah melebihi kapasitas. Pengelolaan sampah paradigma baru terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Tujuannya adalah untuk membatasi timbulan sampah dari sumbernya dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*). Sedangkan, kegiatan penanganan sampah meliputi:

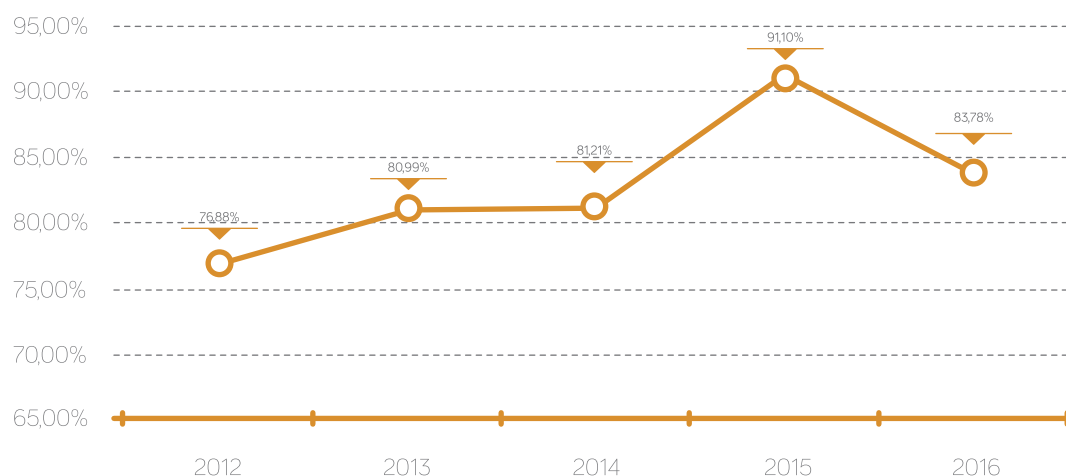
- Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah.
- Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA.
- Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Indikator kinerja penanganan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2012-2016 telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase penanganan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah setiap tahunnya. Tahun 2012 persentase penanganan sampah tercatat 76,88 persen dari 6.341 ton produksi sampah, kemudian di tahun 2015 penanganan sampah meningkat menjadi 91,10 persen dari 7.046 ton produksi sampah. Namun kemudian di tahun 2016, persentase penanganan sampah mengalami penurunan menjadi 83,78 persen dari 7.833 ton produksi sampah. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 2.29

Persentase Penanganan
Sampah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018



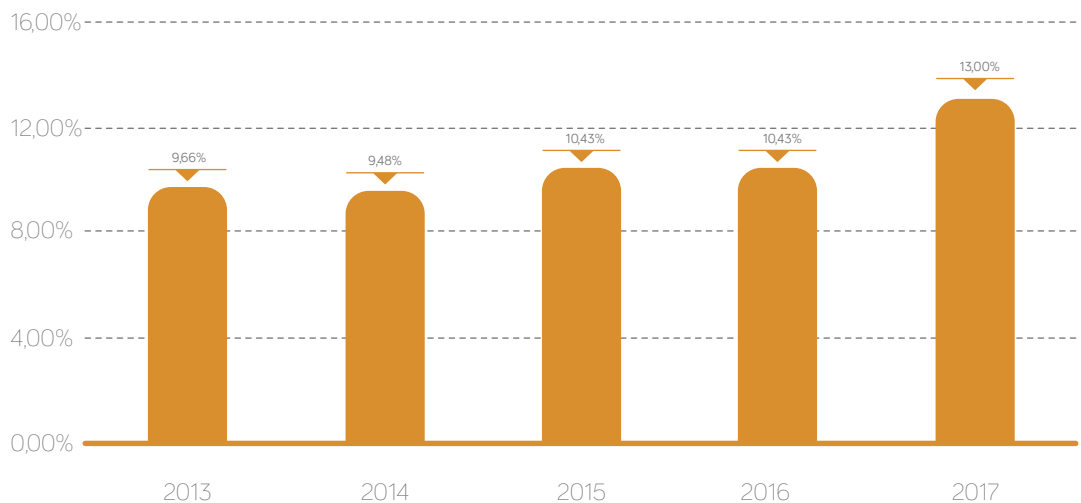
Paradigma baru pengelolaan sampah mendorong adanya pengelolaan sampah dari sumber dengan tujuan utamanya menciptakan sebuah kawasan yang bersih dan sehat. Dari beberapa komposisi sampah yang ditimbulkan di sumber, beberapa komposisi sampah seperti sampah organik, plastik dan kertas dapat diolah dan dimanfaatkan untuk kegunaan lain. Di sisi lain, pemanfaatan hasil pengelolaan sampah berupa energi, pupuk atau bahan baku industri merupakan nilai tambah.

Upaya pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan tata cara pengurangan sampah dapat dilakukan dengan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam. Kinerja pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2013-2017 telah meningkat sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini hingga 13 persen pada 2017.

Gambar 2.30

Pengurangan Sampah di
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2013-2017

*Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018*



Lebih lanjut mengenai kinerja urusan lingkungan hidup, penanganan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dapat dijelaskan bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Adapun pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Karakteristik limbah B3 adalah mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Salah satu jenis limbah B3 adalah limbah elektronik (*e-waste*). Limbah elektronik adalah barang atau peralatan elektrik dan elektronik yang sudah usang, telah berakhir daur hidupnya, dan/atau tidak lagi memberikan nilai atau manfaat bagi pemiliknya. Limbah elektronik termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), antara lain disebabkan *printed circuit board* (PCB) di dalam limbah ini mengandung logam-logam berat. Mengingat kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat perkotaan, khususnya Provinsi DKI Jakarta, akan berbagai macam peralatan elektronik sangat tinggi, sedangkan barang atau peralatan elektrik dan elektronik tersebut mempunyai masa pakai terbatas, maka volume dan jenis limbah elektronik juga sangat tinggi.

Pelaksanaan pengelolaan limbah elektronik (*e-waste*) di Provinsi DKI Jakarta saat ini belum berdasarkan suatu kebijakan formal dan belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, pelibatan aktif dari sektor dunia usaha (produsen peralatan elektronik) belum terlaksana. Mengingat potensi limbah elektronik di Provinsi DKI Jakarta yang begitu tinggi dan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan, perlu direalisasikan pengelolaan limbah elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelibatan seluruh sektor, termasuk juga pemerintah pusat.

Pembangunan di DKI Jakarta berkembang dengan pesat, baik dalam sektor industri maupun jasa. Pembangunan yang semakin meningkat dikhawatirkan menimbulkan resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan suatu kajian atau analisis mengenai dampak lingkungan sebagai upaya pencegahan dampak lingkungan dengan mengidentifikasi dampak penting, upaya pengelolaan lingkungan, dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan pada pembangunan tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan yang penting dalam upaya pencegahan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan tersebut. Melalui Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup melakukan penilaian terhadap analisis mengenai dampak lingkungan. Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta telah mendapatkan lisensi dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dimana lisensi yang terbaru diberikan pada tanggal 12 Oktober 2017.

Sepanjang tahun 1994-2016, telah dihasilkan 4.974 kegiatan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan, yang meliputi 1.852 kegiatan usaha memiliki dokumen lingkungan berskala Amdal dan 3.122 kegiatan usaha telah memiliki dokumen lingkungan berskala UKL-UPL. Terkait dengan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh setiap pemrakarsa kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan terhadap penataan dan komitmen dari pemrakarsa kegiatan untuk melaksanakan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54

Jumlah Kegiatan yang Diawasi dalam rangka Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017

No.	Indikator Kinerja	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kegiatan yang Diawasi dalam rangka Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	586	1.077	1.027	1.202	1.237	1.442

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Terkait dengan Izin Usaha, masih banyak kegiatan yang telah beroperasi dan telah memiliki Izin Usaha tetapi belum memiliki dokumen lingkungan. Berdasarkan data Jakarta Dalam Angka 2016 (BPS 2016), data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan tahun 2014 yang telah diterbitkan sebanyak 6.640 kegiatan, yang meliputi 3.732 untuk kegiatan konstruksi dan 2.908 untuk kegiatan yang telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, baru 75 persen kegiatan konstruksi dan telah beroperasi yang telah memiliki dokumen lingkungan, sedangkan 25 persen belum memiliki dokumen lingkungan. Berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan, kegiatan yang wajib memiliki Amdal agar segera menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) agar segera menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), setelah sebelumnya kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan akan dikenakan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah untuk menyusun Dokumen Lingkungan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah juga perlu dilengkapi dengan dokumen lingkungan, berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 hal Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang telah berjalan, bahwa untuk kegiatan pemerintah/pemerintah daerah yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan diperintahkan untuk segera menyusun DELH (untuk kegiatan pemerintah yang wajib memiliki Amdal) atau DPLH (untuk kegiatan pemerintah yang wajib memiliki UKL-UPL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, nilai IKLH dapat dijadikan rujukan bagi para penentu kebijakan dalam merumuskan program yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tujuan disusunnya IKLH adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator penghitungan IKLH terdiri dari kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Proses perhitungan IKLH seluruh provinsi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan data yang diberikan oleh pemerintah provinsi terkait. Perhitungan nilai indeks kualitas air dan udara mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (baku mutu air dan baku mutu udara ambien). Sedangkan indeks tutupan lahan/hutan menggunakan standar luas kawasan hutan di setiap provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keterangan: IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKA = Indeks Kualitas Air
IKU = Indeks Kualitas Udara
IKTH = Indeks Kualitas Tutupan Hutan

Tabel 2.55

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup Provinsi DKI
JakartaTahun 2011-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Indeks Kualitas Air	41,05	34,71	34,00	30,51	22,31
2.	Indeks Kualitas Udara	44,31	41,51	46,28	78,78	56,40
3.	Indeks Kualitas Tutupan Hutan	27,99	22,75	31,99	37,44	37,34
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		36,80	31,97	36,88	45,58	36,41

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Secara umum, capaian kinerja indikator urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di DKI Jakarta selama kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan indikator cakupan penerbitan kartu keluarga yang meningkat signifikan sejak tahun 2012 sebesar 88,20 persen menjadi 97,55 persen di tahun 2016. Begitu pula dengan cakupan penerbitan kartu tanda penduduk yang semula tercatat 91,90 persen pada tahun 2012, menjadi 98,67 persen di tahun 2016. Kedua indikator tersebut telah mendekati SPM yakni sebesar 100 persen. Adapun indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan indikator ketersediaan *data base* kependudukan skala provinsi telah terpenuhi selama tahun 2012 hingga tahun 2016.

Meskipun secara numerik mengalami peningkatan setiap tahun, kinerja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil masih perlu terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan kinerja. Pada indikator rasio pasangan berakte nikah tahun 2016 tercatat hanya sebesar 5,26 persen, sehingga masih terdapat 94,74 persen pasangan nikah yang belum memiliki akte nikah. Sementara itu jumlah penerbitan akte kelahiran pada tahun 2016 sebesar 92,66 persen. Kondisi demikian menggambarkan pada tahun 2016 terdapat 92 persen kelahiran yang memiliki akta kelahiran namun orang tuanya sendiri sebagian besar berasal dari pasangan yang belum memiliki akte nikah. Untuk indikator cakupan penerbitan kutipan angka kematian

selama periode 2012 hingga 2016 jumlah kematian yang terjadi selalu lebih tinggi dari kutipan akta kematian yang diterbitkan. Pada tahun 2012 cakupan penerbitan kutipan angka kematian tercatat 21,39 persen, kemudian meningkat menjadi 83,79 persen di tahun 2016. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.56

Indikator Kinerja Urusan
Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012-2016

*Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018*

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga					
1.	Jumlah KK yang diterbitkan	2.772.846	2.887.614	2.988.723	3.155.973	3.339.872
2.	Jumlah kepala keluarga	3.143.715	3.066.183	3.126.634	3.278.665	3.443.167
3.	Cakupan penerbitan kartu keluarga	88,20%	94,18%	95,59%	96,26%	97,55%
B.	Rasio Pasangan Berakte Nikah					
1.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	20.334	70.848	69.362	82.173	271.120
2.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	4.622.502	4.789.741	4.800.219	4.891.137	5.151.273
3.	Rasio pasangan berakte nikah	0,44%	1,48%	1,44%	1,68%	5,26%
C.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk					
1.	Jumlah KTP diterbitkan	6.471.366	6.814.295	6.906.736	7.056.064	7.547.616
2.	Jumlah penduduk wajib KTP	7.041.828	7.161.915	7.132.512	7.162.212	7.649.352
3.	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	91,90%	95,15%	96,83%	98,52%	98,67%
D.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran					
1.	Jumlah kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan	189.205	249.050	127.962	130.544	134.064
2.	Jumlah kelahiran yang terjadi	111.595	146.280	156.539	146.284	144.215
3.	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	169,55%	170,26%	81,74%	89,24%	92,66%

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
E.	Cakupan Penerbitan Akta Kematian					
1.	Jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan	6.552	7.414	7.734	9.185	42.483
2.	Jumlah kematian yang terjadi	30.631	41.616	49.941	49.710	56.290
3.	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	21,39%	17,82%	15,49%	18,48%	83,79%
F.	Ketersediaan Basis Data Kependudukan Skala Provinsi					
1.	Ketersediaan basis data kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada
G.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK					
1.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ukuran kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia setempat sebaik mungkin. Upaya yang harus dilakukan adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Di Provinsi DKI Jakarta, rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) selama kurun waktu 2014 hingga 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 tercatat 0,019, kemudian meningkat menjadi 0,196 di tahun 2016. Namun angka tersebut masih menunjukkan kecilnya kelompok binaan dibandingkan dengan jumlah LPM yang ada.

Untuk rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mengalami penurunan tren dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2014 tercatat 36.672 kemudian menurun menjadi 3.490 pada tahun 2016. Sedangkan Jumlah LPM berprestasi selama tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan peningkatan tren. Pada tahun 2012 tercatat 6,74 kemudian menjadi 15,73 pada tahun 2016.

Capaian kinerja posyandu aktif sejak tahun 2012 hingga 2016 mengalami tren yang meningkat. Pada tahun 2012 tercatat 92,79. Memasuki tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan hingga di tahun 2014 menjadi 87,69. Pada tahun 2015 dan 2016, posyandu aktif kembali meningkat hingga kemudian capaian pada tahun 2016 menjadi 98,91 persen.

Selanjutnya untuk Pemeliharaan program pasca program pemberdayaan masyarakat mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2013 tercatat pemeliharaan program pasca program pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 99,17, kemudian tahun 2015 menurun menjadi 1,49. Untuk tahun 2016, jumlah ini kemudian meningkat signifikan kembali menjadi 60,92 program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.57

Indikator Kinerja Urusan
Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2012-2016

*Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018*

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)					
1	Jumlah kelompok binaan LPM	-	-	5	39	45
2	Jumlah LPM	267	267	267	267	267
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0	0	0,019	0,146	0,169
B	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK					
1	Jumlah kelompok binaan PKK	86.394	96.566	97.914	95.409	10.853
2	Jumlah PKK	311	315	267	318	311
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	27.779	30.656	36.672	30.003	3.490
C	LPM Berprestasi					
1	Jumlah LPM berprestasi	18	24	30	36	42
2	Jumlah LPM	267	267	267	267	467
3	Persentase LPM Berprestasi	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73
D	PKK Aktif					
1	Jumlah PKK aktif	86.394	96.566	97.914	95.409	100.853
2	Jumlah PKK	311	315	267	318	311
3	PKK aktif	27.779	30.656	36.672	30.003	32.429
E	Posyandu Aktif					
1	Jumlah Posyandu aktif	3.987	3.987	3.825	4.356	4.362
2	Total Posyandu	4.297	4.330	4.362	4.490	4.410
3	Persentase Posyandu aktif	92,79%	92,08%	87,69%	97,02%	98,91%

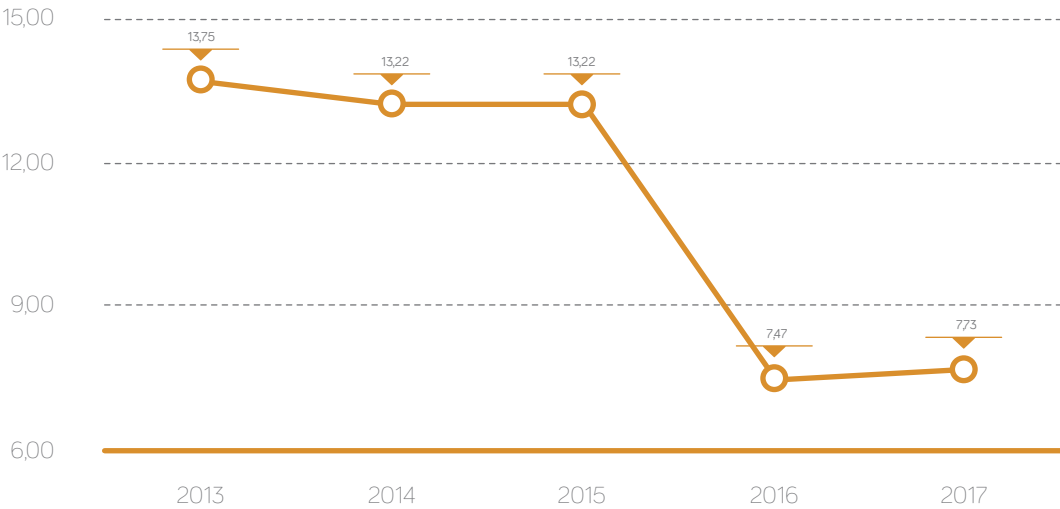
No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
F	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat					
1	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	3.928	1.670	0	39	1.754
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	4.909	1.684	0	2.612	2.879
3	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	80,02	99,17	0	1,49	60,92

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Fertilitas remaja menjadi isu yang perlu mendapat perhatian, karena dari segi kesehatan dan sosial dapat menyebabkan kematian dan kesakitan baik bagi ibu maupun anak. Ibu berumur remaja terutama masih dibawah umur ideal menikah, lebih berpeluang untuk mengalami masalah bahkan kematian bayi. Hal yang lebih menjadi fokus perhatian adalah mengalami fertilitas remaja akan mengurangi kesempatan bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan. Angka fertilitas menurut Umur (*Age Specific Fertility Rates*) kelompok umur 15-19 tahun menggambarkan banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun. Gambaran ASFR kelompok umur 15-19 tahun di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.31
Age Specific Fertility Rate
Kelompok umur 15-19
tahun Penduduk Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018



Pada tahun 2013, ASFR kelompok umur 15-19 di Provinsi DKI Jakarta adalah 13,74 yang berarti terdapat 13 kelahiran dari 1.000 penduduk wanita yang berusia 15-19 tahun pada tahun 2013. Angka tersebut menurun hingga tahun 2017 mencapai 7,73 yang berarti terdapat 7 kelahiran dari 1.000 penduduk wanita yang berusia 15-19 tahun pada tahun 2017.

Terkait dengan pengendalian penduduk, Perkembangan cakupan peserta KB aktif di DKI Jakarta telah menunjukkan capaian yang positif. SPM cakupan peserta KB Aktif yang ditetapkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) SPM adalah sebesar 65 persen dari total pasangan usia subur. Dengan demikian, sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 cakupan peserta KB aktif di DKI Jakarta telah melampaui SPM. Penjelasan secara numerik dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.58
Cakupan Peserta KB Aktif
Penduduk Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012-2016

*Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018*

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah peserta program KB aktif	1.067.522	1.050.086	1.108.841	1.082.195	1.370.787
2.	Jumlah pasangan usia subur	1.311.842	1.331.804	1.376.384	1.361.094	2.031.956
3.	Cakupan peserta KB aktif	81,38%	78,85%	80,56%	79,51%	67,46%

Sementara itu, tren perkembangan Rasio Akseptor KB per 1.000 Pasangan Usia Subur (PUS) menunjukkan angka penurunan. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 35,26, yang bermakna terdapat 35 PUS yang menggunakan KB dari 1.000 PUS. Rasio ini terus mengalami penurunan setiap tahun, hingga pada tahun 2016 tercatat 25,52 persen atau terdapat 25 PUS yang menggunakan KB dari 1.000 PUS. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59
Rasio Akseptor KB Penduduk
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2012-2016

*Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018*

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah akseptor KB	462.574	440.694	440.694	423.874	518.547
2.	Jumlah pasangan usia subur	1.311.842	1.331.804	1.376.384	1.361.094	2.031.956
3.	Rasio akseptor KB	35,26%	33,09%	32,02%	31,14%	25,52%

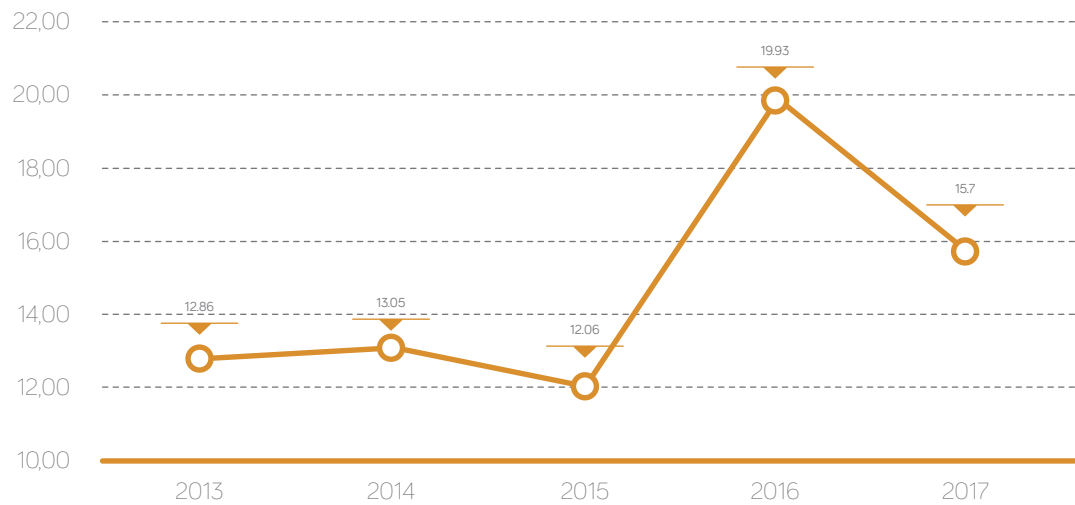
Dalam hal pengendalian penduduk, terdapat *unmet need*, yaitu kelompok yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, mencakup semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah atau hidup bersama dan dianggap aktif secara seksual yang tidak menggunakan metode

kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya. Berikut gambaran jumlah *unmet need* di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017:

Gambar 2.32

Unmet Need Penduduk
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2013-2017

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018



Selama kurun waktu 2013 hingga 2017, unmet need di Provinsi DKI Jakarta relatif mengalami peningkatan, dari 12,86 persen pada tahun 2013 menjadi 15,70 persen pada tahun 2017. *Unmet need* merupakan permasalahan multidimensional karena dipengaruhi berbagai faktor seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap dan akses pelayanan. Secara umum, *unmet need* banyak terjadi pada wanita yang menghadapi hambatan keuangan, pendidikan, geografis, dan social.

I. Urusan Perhubungan

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Arus kedatangan dan keberangkatan penumpang angkutan umum ke DKI Jakarta dapat dibagi menjadi 4 transportasi utama, yaitu: i) bis; ii) kereta api; iii) kapal laut; dan iv) pesawat udara.

Arus keberangkatan penumpang melalui angkutan umum dari DKI Jakarta didominasi oleh angkutan umum jenis bis dan kereta api. Sementara itu arus penumpang yang menggunakan angkutan umum kapal laut terus menurun jumlahnya sejak 2012 hingga tahun 2016 menjadi sebesar 115.962. Sebaliknya dengan keberangkatan melalui pesawat udara, jumlah penumpang pesawat udara mengalami tren peningkatan dari tahun 2012 sejumlah 89.059 penumpang menjadi 2.768.214 penumpang pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penumpang yang hendak bepergian ke luar daerah, terutama luar Pulau Jawa telah berpindah dan lebih memilih menggunakan pesawat udara daripada kapal laut.

Tabel 2.60

Arus Kedatangan dan Arus Keberangkatan Angkutan Umum di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Arus Kedatangan Penumpang Angkutan Umum					
1.	Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan kereta api (jumlah penumpang ke Jabodetabek dan dalam kota)	152.847.697	175.203.781	224.243.608	270.756.043	293.814.625
2.	Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan kapal laut (Tanjung Priok)	210.159	211.131	174.345	158.255	129.701
3.	Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan pesawat udara (Halim Perdana Kusuma)	79.173	16.710	825.295	1.792.896	2.803.051
B	Arus Keberangkatan Penumpang Angkutan Umum					
1.	Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan bis	111.251.687	112.522.624	111.969.896	102.950.384	123.706.856
2.	Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan kereta api (luar kota)	6.501.315	7.356.024	8.624.481	8.977.797	8.977.797
3.	Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan kapal laut (Tanjung Priok)	186.853	175.259	141.904	129.456	115.962
4.	Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan pesawat udara(Halim Perdana Kusuma)	81.359	22.443	824.569	1.586.445	2.768.214

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di DKI Jakarta nilainya berfluktuatif dalam periode 2012-2016. Pada periode 2012-2013 dan 2015-2016 jumlah orang/barang yang terangkut mengalami peningkatan. Sementara itu dalam periode 2011-2012 dan 2013-2015 jumlah orang/barang yang terangkut mengalami penurunan hingga pada tahun 2016 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di DKI Jakarta mencapai 111,61 juta.

Pada indikator orang/barang yang melalui dermaga/pelabuhan/ bandara/ terminal jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun dalam periode 2012-2016. Hal tersebut menunjukkan semakin meningkatnya aktivitas dermaga/pelabuhan/ bandara/ terminal yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Pada periode 2012-2016, jumlah orang/barang yang melalui dermaga/pelabuhan/ bandara/ terminal rata-rata meningkat 11,16 persen dengan peningkatan terbesar terjadi antara tahun 2015 ke 2016 dengan persentase peningkatan sebesar 20,70 persen.

Tabel 2.61

Akumulasi Arus Orang dan Barang di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (Jumlah penumpang Transjakarta)	111.260.869	112.522.638	111.630.305	102.950.384	111.613.674
2.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal pertahun	324.381.622	352.512.991	401.402.743	446.086.968	538.445.457

Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat DKI Jakarta perlu adanya trayek angkutan umum yang dapat menjangkau akses ke berbagai tempat. Perkembangan rasio ijin trayek dengan jumlah penduduk mengalami tren yang meningkat dari tahun 2012 hingga 2016 karena bertambahnya jumlah trayek-trayek baru dimana pada tahun 2016 telah mencapai 1.087 trayek. Dengan penambahan trayek tersebut, pada tahun 2016 rasio trayek per jumlah penduduk mencapai 1:9.455.

Tabel 2.62

Rasio Ijin Trayek di Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	371	387	415	1.083	1.087
2.	Jumlah penduduk	9.862.088	9.969.948	10.075.310	10.177.924	10.277.628
3.	Rasio ijin trayek	1:26.582	1:25.762	1:24.278	1:9.398	1:9.455

Jumlah Pelabuhan Udara, Jumlah Terminal Bus dan Jumlah Stasiun Kereta Api

Keberadaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu komponen utama untuk mendukung kelancaran sektor transportasi di DKI Jakarta. Jumlah infrastruktur transportasi sejak tahun 2012 hingga 2016 tidak mengalami perubahan baik untuk pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan terminal bis barang. Khusus untuk terminal bis penumpang mengalami penurunan, hal ini disebabkan pembebasan aset Terminal Lebak Bulus dalam rangka pembangunan stasiun MRT di Lebak Bulus.

Tabel 2.63

Jumlah Pelabuhan Laut,
Udara, serta Terminal Bis
Penumpang dan Barang

Di Provinsi DKI Jakarta Tahun
2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Pelabuhan Laut	12	12	12	12	12
2.	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Pelabuhan Terminal Bis Penumpang	18	18	17	17	17
4.	Jumlah Pelabuhan Terminal Bis Barang	2	2	2	2	2

Persentase Angkutan Darat

Persentase jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang angkutan darat terus mengalami perbaikan hingga tahun 2015 namun menurun di tahun 2016. Namun persentase angkutan darat nilainya tidak pernah melebihi 0,2 persen pada periode 2012-2016.

Indikator jumlah angkutan darat kurang cocok jika dijadikan sebagai acuan perbaikan transportasi umum darat. Hal ini dikarenakan setiap moda angkutan darat memiliki kapasitas penumpang yang berbeda-beda. Oleh karena itu lebih baik diganti dengan kapasitas penumpang yang dapat ditampung oleh angkutan darat atau jumlah penumpang yang dapat diangkut dalam satuan waktu tertentu.

Tabel 2.64

Persentase Angkutan Darat di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah angkutan darat	103.815	104.147	112.724	111.847	72.002
2.	Jumlah penumpang angkutan darat	111.251.687	112.522.624	111.969.896	102.950.384	123.706.856
3.	% Angkutan darat	0,09%	0,09%	0,10%	0,11%	0,06%

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum dan Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Jumlah kendaraan yang menguji KIR Angkutan Umum didominasi oleh mobil barang dengan jumlah kendaraan mobil barang yang mengikuti uji KIR pada tahun 2016 sebanyak 260.757 kendaraan. Jenis kendaraan dengan jumlah terbesar kedua yang mengikuti uji KIR adalah mobil bus dengan jumlah kendaraan yang mengikuti uji KIR pada tahun 2016 sebanyak 43.340 kendaraan. Jumlah total kendaraan yang mengikuti uji KIR sendiri berfluktuasi sejak tahun 2012 hingga 2016. Pada periode tersebut jumlah kendaraan yang mengikuti uji KIR terbanyak tercatat pada tahun 2013.

Untuk biaya uji KIR telah mengalami penyesuaian pada tahun 2013 untuk seluruh angkutan umum. Penyesuaian biaya tersebut mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan biaya tahun 2012.

Tabel 2.65

Perkembangan Indikator Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum					
1.	Kendaraan Kanjen IV	28.463	27.033	24.461	20390	19.142
2.	Kendaraan Penumpang Umum	23.850	34.233	42.948	48.239	35.262
3.	Mobil Barang	328.381	357.878	325.600	342.109	260.757
4.	Mobil Bus	52.429	53.254	53.914	54.150	43.340
5.	Kereta Gandengan	30	11	18	0	316
6.	Kereta Tempelan	23.586	24.101	31.712	15.015	18.059
7.	Kendaraan Khusus	29.262	31.417	30.128	20.185	36.309
8.	Total	486.001	527.927	508.781	500.088	413.185

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
B	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Rp)					
1.	Mobil barang, mobil bus, dan kendaraan khusus (per kendaraan per 6 bulan)	40.000	87.000	87.000	87.000	87.000
2.	Kereta tempelan/gandengan (per kendaraan per 6 bulan)	35.000	87.000	87.000	87.000	87.000
3.	Kendaraan jenis IV/kendaraan bermotor roda 3	25.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4.	Mobil penumpang umum	30.000	62.000	62.000	62.000	62.000

Persentase Pemasangan Rambu-Rambu

Untuk indikator persentase pemasangan rambu-rambu, sudah mencapai angka 100 persen pada tahun 2015. Tidak adanya penambahan jumlah rambu-rambu yang harusnya tersedia pada tahun 2014-2015 memungkinkan untuk peningkatan jumlah pemasangan rambu-rambu mencapai 100 persen di tahun 2015. Kondisi 100 persen tersebut berhasil dipertahankan di 2016 dengan penambahan jumlah pemasangan rambu dan jumlah rambu-rambu yang seharusnya terpasang menjadi sebanyak 84.148.

Tabel 2.66

Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	80.564	81.826	82.326	82.847	84.148
2.	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	81.826	82.326	82.847	82.847	84.148
3.	Pemasangan Rambu-rambu	98,46%	99,39%	99,37%	100,00%	100,00%

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Panjang Jalan di Provinsi DKI Jakarta mengalami tren yang terus meningkat dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Namun, panjang jalan di Provinsi DKI Jakarta kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 karena berkurangnya panjang jalan negara dan panjang jalan provinsi. Jika kita lihat dari rasio panjang jalan terhadap kendaraan, hal ini juga mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai dengan 2016, dimana rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2016 hanya mencapai 0,35.

Tabel 2.67

Rasio Panjang Jalan per
Jumlah Kendaraan

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Panjang jalan	6.955.842	6.875.963	6.955.842	6.955.842,26	6.280.807
	a) Tol	123.731	123.481	123.731	123.731,00	138.689
	b) Negara	152.516	152.517	152.576	152.576,50	53.552
	c) Provinsi	6.681.445	6.599.965	6.681.446	6.679.534,76	6.088.566
2.	Jumlah kendaraan	14.618.313	16.072.869	17.523.967	18.668.056	18.006.404
3.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,48	0,43	0,40	0,37	0,35

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan arah pembangunan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, penyediaan infrastruktur TIK ditujukan antara lain untuk memastikan tersedianya konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan telepon dan internet di seluruh wilayah, yang menjadi bagian dari Program *Universal Service Obligation* (USO) atau kewajiban pelayanan universal.

Dalam konteks perkembangan moda komunikasi dasar berbasis *Public Switched Telephone Network* (PSTN) di DKI Jakarta, ditunjukkan dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah, dimana sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 indikator ini mengalami penurunan. Pada tahun 2012 tercatat 21,64 persen rumah tangga memiliki telepon rumah, kemudian menurun menjadi 15,46 persen pada tahun 2016.

Sedangkan untuk moda komunikasi berbasis nirkabel (*wireless/cellular phone*) di DKI Jakarta telah mendekati 100,00 persen. Pada tahun 2012 persentase rumah tangga yang menguasai HP tercatat 96,76 persen, kemudian mengalami peningkatan, hingga tahun 2014 menjadi 97,24 persen, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 82,81 persen dan di tahun 2016 kembali menurun menjadi 75,78 persen.

Dalam hal mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*), ketersediaan sarana prasarana komputer/desktop/notebook di tingkat rumah tangga menjadi suatu tuntutan. Perkembangan rumah tangga yang memiliki komputer/desktop/notebook di DKI Jakarta mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2015. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 33,01 persen rumah tangga yang memiliki komputer/

desktop/notebook, meningkat menjadi 36,95 persen di tahun 2015, dan kemudian sedikit menurun di tahun 2016 menjadi 35,66 persen.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (*realtime*). Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Adapun jumlah rumah tangga yang menggunakan internet baik di warnet, kantor, sekolah dan tempat lainnya mengalami peningkatan sejak tahun 2012 hingga 2016. Penjelasan lebih rinci dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.68

Indikator Kinerja Urusan
Komunikasi dan Informatika
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A. Jumlah jaringan komunikasi						
1.	Telepon Rumah					
a	Jumlah rumah tangga yang memiliki telepon rumah	546.852	499.889	494.177	495.860	426.622
b	Jumlah rumah tangga	2.526.784	2.616.392	2.631.943	2.700.310	2.685.314
c	Persentase Rumah tangga yang memiliki telpon rumah	21,64	19,19	18,78	18,36	15,88%
2.	HP					
a	Persentase Rumah tangga yang menguasai HP	96,76	97,91	97,24	82,81	75,78
B. Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/desktop/notebook						
1.	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki komputer/ desktop/notebook	834.182	842.183	910.800	997.721	984.219
2.	Jumlah rumah tangga	2.526.784	2.616.392	2.640.000	2.700.310	2.685.314
3..	Rumah Tangga yang memiliki komputer/desktop/ notebook	33,01	32,19	34,5	36,95	36,65

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
C. Penggunaan Internet						
1.	Jumlah rumah tangga yang menggunakan internet di warnet (%)	39,95	29,54	25,05	28,05	37,31
2.	Jumlah rumah tangga yang menggunakan internet di kantor (%)	33,40	29,87	33,01	44,60	46,36
3.	Jumlah rumah tangga yang menggunakan internet di sekolah (%)	12,84	9,00	10,67	19,61	18,15
4.	Jumlah rumah tangga yang menggunakan internet di tempat lainnya (%)	85,55	11,44	15,24	4,90	5,14

K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan ini memiliki peran strategis dalam kontribusinya bagi peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Secara umum persentase koperasi aktif di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 68,03 persen, meningkat menjadi 75,61 persen di tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan manajemen koperasi dan meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan hasil produksi koperasi. Secara rinci, perkembangan aktivitas koperasi di Provinsi DKI Jakarta dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2.69

Persentase Koperasi Aktif di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

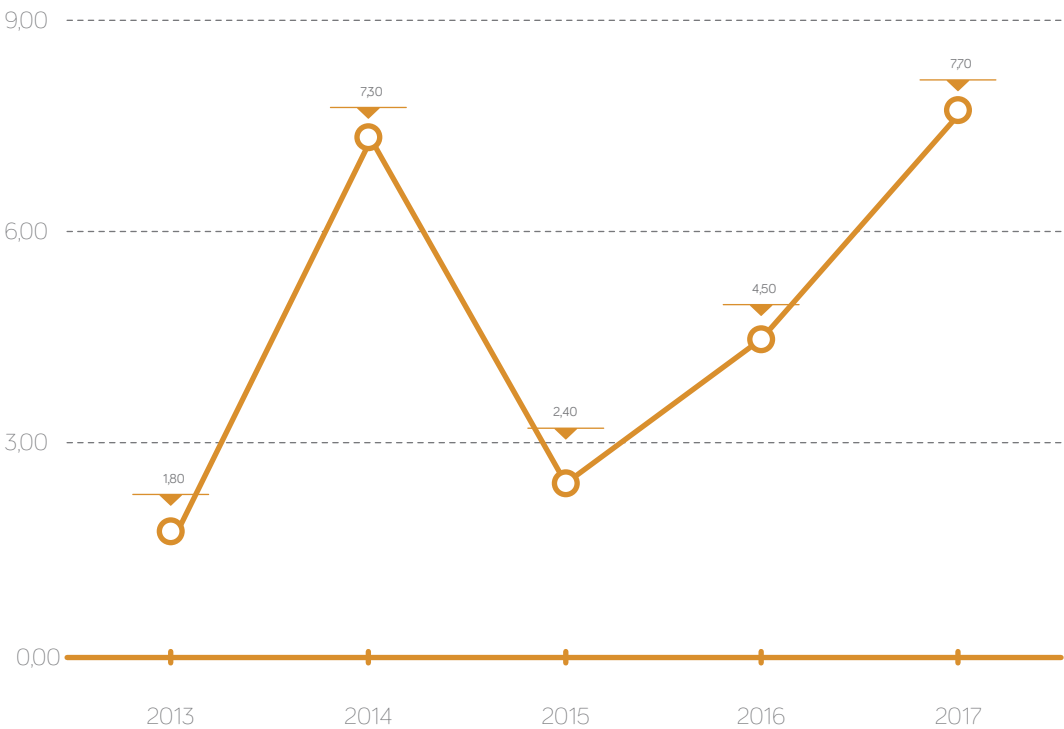
No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah koperasi aktif	5.289	5.579	5.645	6.016	6.222
2.	Jumlah seluruh koperasi	7.775	7.775	7.928	8.024	8.229
3.	Persentase koperasi aktif	68,03%	71,76%	71,20%	74,98%	75,61%

Sementara itu, gambaran kinerja koperasi di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari volume usaha koperasi yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.33

Jumlah Volume Usaha Koperasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018



Tahun 2013, volume usaha koperasi sebesar Rp1,8 triliun yang kemudian meningkat menjadi Rp7,3 triliun pada tahun 2014. Pada tahun 2015, volume usaha koperasi mengalami penurunan drastis hingga menjadi Rp2,4 miliar, namun kembali meningkat hingga pada tahun 2017 sebesar Rp7,7 triliun.

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap seluruh UKM di DKI Jakarta selama kurun waktu 2012 hingga 2016 tercatat sebesar 93,46 persen. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.70

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Usaha Mikro	92.715	92.715	92.715	92.715	70.230
2.	Jumlah Usaha Kecil	683.741	683.741	683.741	683.741	1.154.792
3.	Jumlah seluruh UKM (mikro, kecil dan menengah)	837.905	837.905	37.905	837.905	1.235.651
4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap seluruh UKM	92,67%	92,67%	92,67%	92,67%	93,46%

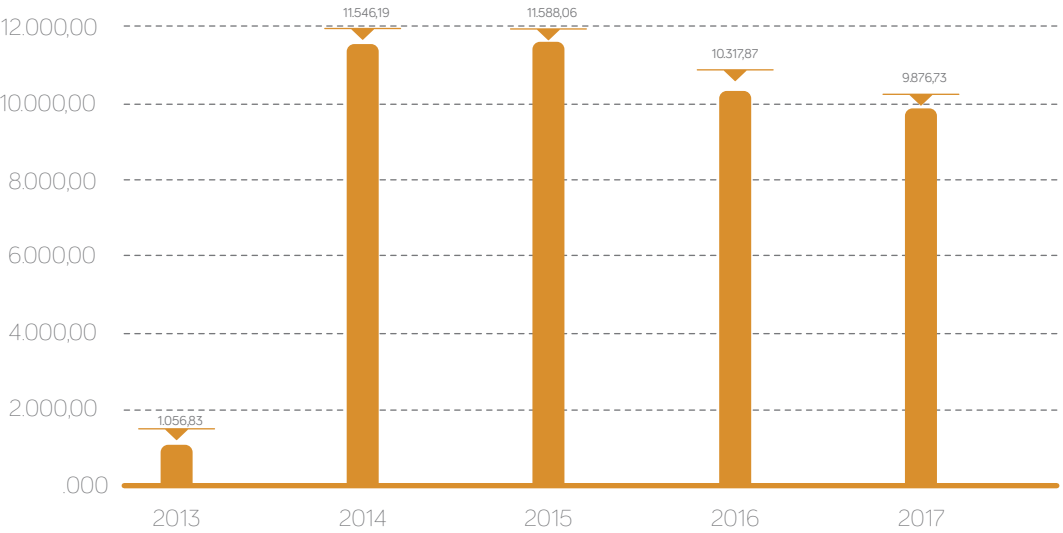
Dari data yang terhimpun, terdapat sebanyak 171.806 pelaku usaha, yang eksisting telah menjadi binaan Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan sebanyak 77.329 orang, terdiri dari pelaku usaha di 18 Lokbin sebanyak 3.575 orang, di 233 titik Loksem sebanyak 10.977 orang, di UPK PPUMKMP Pulogadung sebanyak 222 orang, di Pusat Promosi sebanyak 93 orang.

Kapasitas produksi UMKM di Provinsi DKI Jakarta dapat digambarkan melalui Jumlah nilai ekspor produk DKI Jakarta, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2.34

Jumlah Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

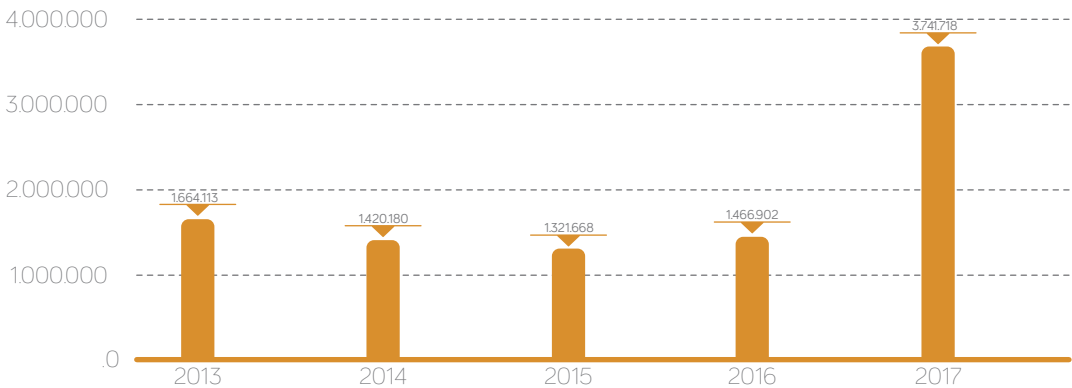


Dalam hal perdagangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dengan demikian, tiap pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan. Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Untuk itu, informasi dan kondisi yang jujur dan benar mengenai barang yang ditransaksikan harus tersampaikan dengan baik.

Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat dan benar. Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan. Artinya, tujuan pemerintah daerah menyelenggarakan tera/tera ulang dan pengawasan terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa. Berikut capaian pengawasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap UTTP kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017:

Gambar 2.35
Jumlah Alat Ukur Yang Ditera dan Ditera Ulang, Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

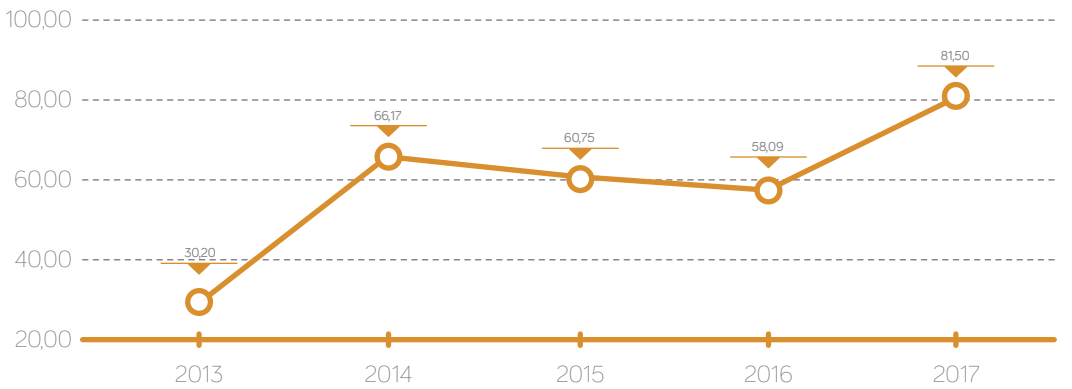


L. Urusan Penanaman Modal

Fokus dalam urusan penanaman modal yaitu pertumbuhan investasi. Di era perdagangan bebas, pemerintah dituntut untuk lebih kompetitif dalam menggiatkan investasi. Menghadapi hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu membenahi kebijakan-kebijakan yang intinya diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, serta melaksanakan alih teknologi. Realisasi nilai investasi di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 hingga 2017 digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.36
Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018



Jumlah nilai investasi di DKI Jakarta pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp30,194 Triliun. Pada tahun 2014 nilai investasi PMDN berskala nasional mengalami peningkatan hingga mencapai Rp66,17 Triliun, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan hingga mencapai Rp60,75 Triliun. Nilai investasi kembali turun di tahun 2016 menjadi Rp58,09 Triliun. Pada tahun 2016, nilai investasi kembali meningkat menjadi Rp81,5 Triliun.

Untuk mengoptimalkan potensi investasi, baik asing maupun domestik, pemerintah daerah berlomba dalam memberi kemudahan berinvestasi dari sisi administrasi birokratif dengan memangkas perizinan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyederhanakan proses dan prosedur perizinan, dengan menghapus izin yang tidak lagi relevan sehingga berhasil mengurangi jenis izin/non izin untuk mendongkrak peringkat Kemudahan Berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB) di Indonesia. Pada tahun 2015, sebanyak 9 layanan dari 518 izin/non izin dapat diproses secara online, jumlah tersebut meningkat pada tahun 2016 menjadi 60 layanan dari 476 izin/non izin, dan pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 200 layanan dari 269 izin/non izin atau 74 persen yang dapat diproses secara online.

M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Perkembangan indikator yang digunakan untuk merepresentasikan kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga periode tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.71
Indikator Kinerja Urusan
Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah organisasi pemuda	105	128	128	192	193
2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	62	82	107	6	18
3.	Jumlah kegiatan olahraga	74	99	101	9	44
4.	Jumlah lapangan olahraga	50	52	52	51	52

Sebutan pemuda pada umumnya merujuk pada seluruh warga negara yang berusia antara 15–35 tahun. Dengan memperhatikan komposisi penduduk berdasarkan usia, pemuda merupakan kelompok usia dengan populasi terbesar dibandingkan golongan anak-anak maupun orang tua. Mengingat besarnya populasi pemuda, maka kedudukan pemuda merupakan faktor strategis dalam pembangunan. Keberadaan pemuda menjadi harapan bangsa, karena di masa yang akan datang para pemuda lah yang akan menggantikan kepemimpinan di masa sekarang. Untuk memaksimalkan peran pemuda, perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan baik secara individu maupun kelembagaan/keorganisasian. Dengan mempertimbangkan karakteristik

pemuda, organisasi sebagai wadah berkumpulnya sekumpulan orang untuk mencapai tujuan bersama merupakan pendekatan yang lebih tepat bagi pemuda. Pada tahun 2016, terdapat 193 organisasi pemuda dengan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebar di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dalam upaya pembinaan dan bimbingan terhadap pemuda, maka pada tahun 2016 dilaksanakan 18 kegiatan kepemudaan. Selain kegiatan kepemudaan, juga dilaksanakan 44 kegiatan olah raga. Kegiatan olahraga tersebut merupakan perwujudan dukungan dari berbagai pihak untuk membina dan membimbing pemuda. Untuk mendukung hal tersebut, tersedia 52 lapangan olah raga yang dapat digunakan untuk aktivitas olah raga.

N. **Urusan Statistik**

Buku Provinsi dalam angka dan Kota Dalam Angka selama periode tahun 2012 sampai dengan 2016 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Provinsi DKI Jakarta serta Kota/Kabupaten yang ada di DKI Jakarta, yang dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat atau acuan dalam perencanaan pembangunan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB kabupaten/kota dan Buku PDRB Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2012 sampai dengan 2016 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di seluruh kabupaten/kota dan tingkat provinsi. Informasi lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.72
Indikator Kinerja Urusan
Statistik Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Buku "kabupaten/kota dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku "PDRB kabupaten/kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku "Provinsi dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Buku "PDRB Provinsi"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

O. **Urusan Kebudayaan**

Selama kurun waktu 2012 hingga 2016 indikator kebudayaan cenderung menunjukkan capaian yang positif. Hal ini dapat dilihat dari persentase pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan telah mencapai 100 persen selama tahun 2010-2016. Namun demikian, untuk capaian indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami fluktuasi setiap tahunnya, jumlah penyelenggaraan tertinggi pada tahun 2013 sebanyak 481 festival, kemudian jumlah penyelenggaraan terendah pada tahun 2015 sebanyak 254 festival. Lebih lanjut disampaikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.73

Indikator Kinerja Urusan
Kebudayaan Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	287	481	397	254	261
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	18	18	18	18	21
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan					
a.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	19.342	19.342	19.342	19.342	19.352
b.	Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah	19.342	19.342	19.342	19.342	19.352
c.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%

P. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat DKI Jakarta. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan senantiasa terus dilakukan dengan menambah jumlah perpustakaan di lokasi yang mendekati permukiman masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun perpustakaan di 186 lokasi RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak).

Sementara itu, total jumlah buku yang tersedia di seluruh perpustakaan selama tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tercatat 569.552 koleksi, meningkat menjadi 835.941 di tahun 2016. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.74

Indikator Kinerja Urusan
Perpustakaan Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	Jumlah Perpustakaan					
1.	Perpusnas	1	1	1	1	1
2.	Perpumda	1	1	1	2	2
3.	Kota/Kab	6	6	6	6	6
4.	Pusling	n/a	n/a	n/a	34	34
5.	Perpus Khusus	n/a	n/a	n/a	974	974
6.	Perpus Sekolah	n/a	n/a	n/a	1.194	1.194
7.	TBM	n/a	251	189	254	391
8.	RPTRA	0	0	0	24	186
9.	Lapas	n/a	n/a	n/a	2	4
10.	SKKT	n/a	n/a	n/a	2	-

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
B.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun					
1.	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	355.812	282.055	492.207	850.785	1.185.694
C.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah					
1.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	251.625	270.496	284.462	308.402	396.679
2.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	569.552	638.207	679.293	770.862	835.941
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	569.552	638.207	679.293	770.862	835.941

Q. Urusan Kearsipan

Sejak tahun 2016, ANRI sebagai lembaga arsip nasional, melakukan akreditasi kearsipan terhadap lembaga arsip di tingkat daerah yang merupakan kegiatan penilaian mutu dan kelayakan terhadap lembaga kearsipan, unit kearsipan, lembaga penyelenggara jasa kearsipan serta lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kearsipan. Akreditasi Kearsipan bertujuan untuk mempertinggi mutu dan kelayakan pengelolaan arsip dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan. Akreditasi kearsipan dimaksudkan untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kearsipan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 telah memperoleh akreditasi kearsipan A. Kendati telah memperoleh akreditasi A dari ANRI, namun pengelolaan kearsipan di perangkat daerah maupun BUMD di Provinsi DKI Jakarta masih belum memenuhi standar yang ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat bahwa persentase pengelolaan kearsipan di Perangkat Daerah dan BUMD yang sesuai standar, baru mencapai 7,41 persen.

Selain harus memenuhi standar, salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik pula sehingga negara harus mewujudkan tata kelola kearsipan modern. Sebagai perwujudan tata kelola kearsipan modern, Provinsi DKI Jakarta telah memulai layanan arsip siap layan (e-arsip) dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 2,94 persen. Kedepannya, pengelolaan arsip menjadi e-arsip akan dilakukan secara berkesinambungan sehingga arsip-arsip yang semula hanya dapat dilihat dan dibaca pada pusat-pusat arsip, nantinya dapat diakses secara online, dan bahkan layanannya telah mengarah pada sistem layanan otomasi seluruhnya.

2.4.2.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

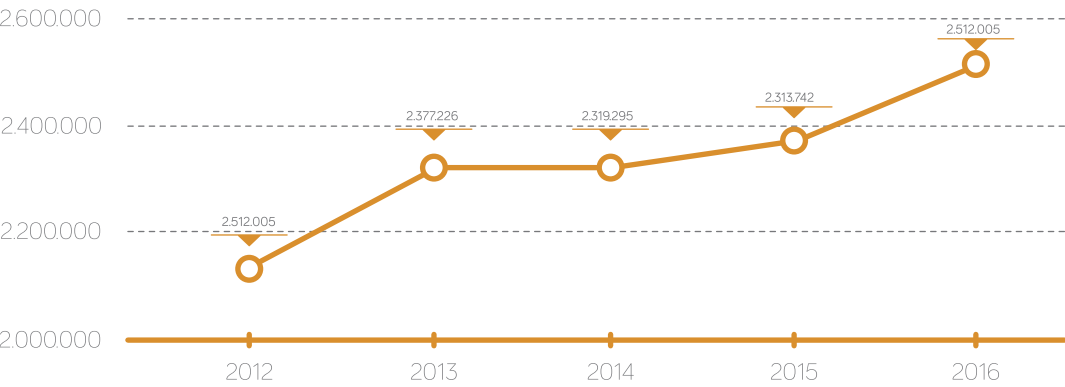
A. Urusan Pariwisata

Jumlah kunjungan wisata di DKI Jakarta menunjukkan kenaikan jumlah setiap tahunnya dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2012-2013 dengan peningkatan kunjungan wisata sebesar 8,85 persen.

Gambar 2.37

Kunjungan Wisata Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018



Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum nilainya terus meningkat dalam periode 2012-2016. Dari nilai sektor tersebut sub sektor akomodasi menyumbang sekitar 15 persen dari total nilai. Sedangkan sub sektor makan minum menyumbang 85 persen dari total nilai. Apabila dibandingkan dengan PDRB total nilai sektor akomodasi dan makan minum menyumbang sekitar 5 persen dari seluruh sektor.

Tabel 2.75

Kontribusi Sektor Akomodasi
dan Makan Minum terhadap
PDRB Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB					
1.	Atas dasar harga berlaku (juta Rupiah)	69.531.496	79.798.169	92.190.044	105.882.374	109.181.700
2.	Atas dasar harga konstan (juta Rupiah)	61.258.499	65.235.431	68.850.215	72.582.234	76.788.430
B.	Kontribusi sub sektor akomodasi terhadap PDRB					
1.	Atas dasar harga berlaku (Miliar Rupiah)	10.446.581,6	13.238,00	15.505,11	16.427,12	16.726,64

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
2.	Atas dasar harga konstan (Miliar Rupiah)	8.744.187,3	9.609,4	10.467,52	10.604,55	11.763,99
C. Kontribusi sub sektor makan minum terhadap PDRB						
1.	Atas dasar harga berlaku (Miliar Rupiah)	59.084.914,4	66.560,17	76.684,93	89.455,26	92.455,06
2.	Atas dasar harga konstan (Miliar Rupiah)	52.514.312,1	55.626,03	58.382,70	61.977,68	65.024,44

B. Urusan Pertanian

Kontribusi sektor pertanian di DKI Jakarta dari tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami tren yang menurun walaupun secara nilai PDRB baik berdasarkan harga konstan 2010 maupun harga berlaku terus mengalami peningkatan. Adapun sektor pertanian berkontribusi terhadap total PDRB pada tahun 2012 sebesar 0,11 persen. Kontribusi ini kemudian terus menurun hingga pada tahun 2016, sektor pertanian hanya mampu berkontribusi sebesar 0,09 persen dari seluruh PDRB DKI Jakarta.

Tabel 2.76

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	1.488.288	1.628.412	1.718.712	1.867.185	1.985.310
2.	Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)	1.319.310	1.353.560	1.360.073	1.375.396	1.387.530
3.	Kontribusi terhadap PDRB (%)	0,11%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%

Selanjutnya dari segi produktivitas, dapat kita lihat pada tabel bahwa produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar DKI Jakarta mengalami tren yang menurun. Pada tahun 2012, produktivitas yang dapat dihasilkan oleh 1 hektar lahan adalah sebanyak 5,82 ton. Produktivitas ini kemudian menurun terus hingga di tahun 2016 menjadi 5,33 ton/hektare. Produktivitas tertinggi yang pernah dicapai oleh DKI Jakarta adalah pada tahun 2013, dimana produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mencapai 5,89 ton/hektare dalam satu tahun.

Tabel 2.77

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	11.044	10.268	7.541	6.361	5.342
2.	Luar areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya	1.897	1.744	1.400	1.137	1.002
3.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	5,82	5,89	5,39	5,59	5,33

C. Urusan Kehutanan

Dalam kinerja urusan kehutanan, total pembebasan lahan RTH hutan tahun 2012 hingga 2016 seluas 15,8 Ha. Total pembebasan lahan RTH taman tahun 2012 hingga 2016 adalah 90,61 Ha. Sedangkan total pembebasan lahan RTH makam tahun 2012 hingga 2016 adalah 8,41 Ha. Pembebasan lahan RTH mengalami peningkatan pada tahun 2015 hingga 55,17 Ha. Hal ini karena penganggaran tidak lagi dilakukan secara spesifik per lokasi namun menjadi satu paket sehingga tidak ada kendala apabila ada satu lokasi yang tidak dapat terlaksana. Tahun sebelumnya penganggaran masih dilakukan kegiatan per lokasi. Berikut rincian pembebasan lahan RTH baik RTH hutan, RTH taman, dan RTH makam selama kurun waktu 2012 hingga 2016:

Tabel 2.78

Pembebasan Lahan RTH Hutan, RTH Taman, RTH Makam Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas lahan untuk RTH hutan yang dibebaskan (Ha)	4,03	4,72	2,4	4,65	0
2.	Luas lahan untuk RTH taman yang dibebaskan (Ha)	7,4	7,11	11,86	48,72	15,52
3.	Luas lahan untuk RTH makam yang dibebaskan (Ha)	0,0047	2,21	1,89	1,8	2,51
TOTAL		11,43	14,04	16,15	55,17	18,03

Pembebasan lahan RTH tersebut berkontribusi pada penambahan rasio RTH, dengan capaian tahunan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79

Persentase Penambahan Rasio RTH Hutan, RTH Taman, dan RTH Makam Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Penambahan rasio RTH hutan	0,0062	0,0072	0,0037	0,0071	0
2.	Penambahan rasio RTH taman	0,0113	0,0109	0,0181	0,0745	0,0237
3.	Penambahan rasio RTH makam	0,0000072	0,0034	0,0029	0,0027	0,0038
TOTAL		0,0175	0,0215	0,025	0,0843	0,0275

Persentase penambahan ratio RTH hutan, taman, makam dihitung dari pembebasan lahan RTH hutan, taman, makam setiap tahun dibagi dengan luas daratan DKI Jakarta.

Pembangunan RTH Taman dan Makam

Kondisi awal tahun 2012 luas RTH taman yang dibangun dan kebun bibit adalah 2.127,89 Ha. Pada tahun 2014 luas RTH taman yang dibangun mengalami penurunan dari 4,02 Ha menjadi 1,17 Ha karena ada beberapa lokasi yang gagal lelang. Pada tahun 2016 tidak terdapat pembangunan RTH taman dan makam dikarenakan terjadi gagal lelang (proses pengadaan tidak ada pelaksana yang mampu memenuhi spesifikasi teknis pada saat pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa).

Tabel 2.80

Pembangunan RTH Taman dan RTH Makam Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1.	Luas RTH taman yang dibangun dan Kebun Bibit (Ha)	2.127,89	4,02	1,17	1,09
2.	Luas RTH makam yang dibangun (Ha)	0,96	0,705	0,14	0,13
TOTAL		2.128,85	4,725	1,31	1,22

Pemeliharaan RTH Hutan,Taman,Makam

Jumlah RTH taman yang dipelihara adalah keseluruhan taman, jalur hijau, kebun bibit yang tanggung jawab pemeliharaannya oleh Dinas Kehutanan, baik merupakan aset Dinas Kehutanan maupun bukan aset Dinas Kehutanan (aset Perangkat Daerah lain).

Tabel 2.81

Luas RTH Hutan, RTH Taman, dan RTH Makam yang Dipelihara Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas lahan untuk RTH hutan yang dipelihara (Ha)	240,02	243,19	244,46	244,46	254,26
2.	Luas RTH taman yang dipelihara (Ha)	736,08	497,22	576,91	567	749,43
3.	Jumlah RTH makam yang dipelihara (Ha)	607,10	607,10	607,10	607,10	607,10
TOTAL		1.583,2	1.347,51	1.428,47	1.418,56	1.610,79

D. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sebagai dukungan Pemprov DKI Jakarta dalam mempercepat pembangunan di Kepulauan Seribu sebagai satu dari sepuluh destinasi unggulan wisata nasional, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi di kawasan Kepulauan Seribu, pasokan listrik ke Kepulauan Seribu akan ditambah. Saat ini, dari 110 pulau dalam zonasi Kepulauan Seribu, baru 15 pulau yang sudah terhubung dengan jaringan kabel laut yang terdiri dari 12 pulau berpenduduk dan tiga pulau resort dimana pemakaian daya eksisting berkisar 4-5 MW dari kapasitas sebesar 8 MW. Kapasitas listrik di Kepulauan Seribu direncanakan akan ditambah menjadi sebesar 16 MW yang diprioritaskan untuk memasok listrik di pulau-pulau yang berpenghuni, sedangkan pulau-pulau tak berpenghuni akan dialiri listrik untuk memenuhi kebutuhan resort berskala internasional. Sebagai alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan listrik warga Kepulauan Seribu, juga akan didorong penggunaan energi baru dan terbarukan yaitu energi listrik tenaga surya, energi tenaga angin dan tenaga sampah.

Capaian pasokan listrik di Kepulauan Seribu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82

Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase daya listrik terpasang di kepulauan seribu	66,7%	66,7%	66,7%	66,7%	66,7%
2.	Bauran energi baru terbarukan	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
3.	Persentase cakupan pencahayaan kota	43,53%	52,90%	58,07%	68,69%	68,69%
4.	Persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system	0%	0%	0%	0%	79,78%

Dalam hal ketahanan energi di daratan Jakarta, sebagai sebuah kota, Jakarta dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi kebutuhan warga, sekaligus menjaga lingkungan agar tetap kondusif untuk ditinggali, dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penghematan Energi di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta serta Instruksi Gubernur Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air, pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) yang menjadi salah satu bentuk peningkatan layanan masyarakat yang memungkinkan warga hidup lebih aman dan nyaman siang maupun malam hari kan dilakukan dengan penggunaan lampu jenis *Light Emiting Diode Smart System* (LED SS). Pemasangan LED SS untuk PJU akan dilakukan secara bertahap di seluruh jalan di DKI Jakarta baik di gang-gang, di jalan lingkungan dan di jalan penghubung serta di jalan protokol. Saat ini cakupan pencahayaan kota mencapai 68,69 persen dengan cakupan pencahayaan kota hemat energi berbasis *smart system* mencapai 79,78 persen. Pemasangan lampu tersebut selain bertujuan untuk menerangi jalan umum juga mengurangi angka kejahatan di malam hari. LED SS ini

memiliki banyak keunggulan, salah satunya daya tahan selama 50 ribu jam atau 12 tahun sehingga menghemat pembayaran listrik. Selain hemat energi, titik lampu terkoneksi dan data kinerjanya bisa langsung dikirim melalui jaringan seluler ke pengelola di Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta untuk memudahkan pengelolaan.

E. **Urusan Perdagangan**

Sektor perdagangan merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di DKI Jakarta. Kontribusi sektor perdagangan sendiri dalam periode tahun 2012 sampai dengan 2016 terhadap PDRB DKI Jakarta selalu bernilai di atas 16 persen. Nilai tambah dari sektor perdagangan jumlahnya terus meningkat dari Rp180,82 triliun menjadi Rp358,89 triliun pada tahun 2016. Walaupun demikian persentase proporsi nilai tambah dari sektor perdagangan mengalami peningkatan yang begitu sejak 2012 hingga 2015, persentase kenaikan nilai tambah meningkat dari 16,38 persen menjadi 16,49 persen.

Tabel 2.83
Indikator Kinerja Urusan
Perdagangan Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012-2016

*Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018*

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	Kontribusi sektor Perdagangan besar terhadap PDRB (juta Rp.)					
1.	Atas dasar harga berlaku	224.375.960	261.040.403	304.598.489	330.319.573	358.898.310
2.	Atas dasar harga konstan	206.961.971	217.980.309	228.775.732	234.872.712	245.826.850
B.	Ekspor Bersih Perdagangan (berat bersih)	-48.801.557.241	-42.710.378.151	-36.525.327.633	-24.741.852.191	-25.418.858.648
C.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal					
1.	Jumlah kelompok pedagang/ usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n	-	-	150	100	200
2.	Jumlah kelompok pedagang/ usaha informal	10.379	10.540	11.161	11.651	15.963
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	0,00%	0,00%	1,34%	0,86%	1,25%

F. **Urusan Perindustrian**

Sektor perindustrian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar kedua di DKI Jakarta setelah sektor perdagangan. Kontribusi sektor perindustrian sendiri dalam periode tahun 2012 sampai dengan 2016 terhadap PDRB DKI Jakarta selalu bernilai di atas 13 persen. Nilai tambah dari sektor perindustrian jumlahnya terus meningkat dari Rp160,01 triliun menjadi Rp193,61 triliun pada tahun 2016. Walaupun demikian, persentase kenaikan nilai tambah dari sektor perindustrian terus mengalami penurunan dalam jangka waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, persentase kenaikan nilai tambah dari sektor perindustrian turun dari 13,09 persen menjadi 12,58 persen.

Secara total, jumlah industri di DKI Jakarta dalam periode 2012-2016 selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2016. Industri terus bertumbuh dari tahun 2012 sampai 2015. Namun kemudian pada tahun 2016 pertumbuhannya menurun menjadi -12,17 persen. Untuk cakupan bina kelompok pengrajin, terlihat perlu untuk ditingkatkan lebih lagi karena cakupan pembinaannya tidak pernah melebihi angka 15 persen.

Tabel 2.84

Indikator Kinerja Urusan
Perindustrian Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012-2016

*Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018*

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A. Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB						
1.	Atas dasar harga berlaku	188.822.070	209.498.625	239.287.410	274.492.251	295.043.440
2.	Atas dasar harga konstan	160.011.696	168.558.608	177.829.006	186.803.041	193.610.260
B. Pertumbuhan Industri						
1.	Jumlah industri tahun n- jumlah industri tahun (n-1)	830	824	1.007	916	(3.618)
2.	Jumlah industri s.d. tahun n	30.590	31.414	32.421	33.337	29.719
b1	Industri besar	1.410	1.242	1.246	1.251	1.240
b2	Industri kecil dan menengah	29.180	30.172	31.175	32.086	28.479
C	Pertumbuhan Industri	2,71%	2,62%	3,11%	2,75%	-12,17%

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
C. Cakupan bina kelompok pengrajin						
1.	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n					
a.	Jumlah sentra yang dibina	5	6	7	12	4
b.	Jumlah pengrajin yang dibina	418	489	4.528	1.102	376
2.	Jumlah kelompok pengrajin	78	80	82	89	62
3.	Cakupan bina kelompok pengrajin	6,41%	7,50%	8,54%	13,48%	6,42%

G. Urusan Kelautan dan Perikanan

Tren produksi ikan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya) DKI Jakarta selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan namun kemudian menurun secara signifikan di tahun 2016. Pada tahun 2012 tercatat 188.442,46 ton, meningkat menjadi 297.173,40 ton pada tahun 2015. Pada tahun 2016, jumlah tersebut kemudian mengalami penurunan menjadi 147.979,66 ton.

Selain itu, jumlah konsumsi ikan masyarakat DKI Jakarta per kapita sudah menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2012-2014 dengan jumlah konsumsi ikan yang terus meningkat tiap tahunnya. Namun pada tahun 2015, target konsumsi ikan per kapita DKI Jakarta belum mencapai target. Hal tersebut dikarenakan peningkatan jumlah konsumsi ikan per kapita masyarakat DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan target daerah. Pada tahun 2016, konsumsi ikan per kapita akhirnya dapat melampaui target daerah dengan persentase 103,18 persen dari target daerah.

Untuk indikator cakupan bina kelompok nelayan masih perlu ditingkatkan cakupannya. Pada tahun 2012 terdapat 74,5 persen nelayan yang dibina, kemudian cakupan ini mengalami tren yang meningkat hingga tahun 2015 menjadi 70,8 persen. Namun kemudian pada tahun 2016 tidak ada nelayan yang dibina, sehingga persentase cakupannya menjadi 0 persen. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.85

Indikator Kinerja Urusan
Kelautan dan Perikanan
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A. Produksi Perikanan						
1.	Jumlah Produksi Ikan (ton)	225.620,30	214.802,33	233.030,73	297.173,40	147.979,67
a	Produksi perikanan tangkap (ton)	219.835,00	209.733,10	226.060,10	289.214,10	143.143,30
b	Produksi perikanan budidaya (ton)	5.784,23	5.069,23	6.970,63	7.959,30	4.836,36
2.	Target daerah (ton)	225.620,30	232.784,00	239.767,00	246.960,00	240.773,05
3.	Produksi perikanan	100,00%	92,28%	97,19%	120,33%	61,46%
B. Konsumsi Ikan (perkapita/tahun)						
1.	Jumlah konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	31,31	32,95	32,55	33,52	34,06
2.	Target daerah (kg)	25,09	25,01	29,53	33,53	33,01
3.	Konsumsi ikan	118,93%	125,19%	106,54%	97,08%	103,18%
C. Cakupan Bina Kelompok Nelayan						
1.	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	38	40	70	85	0
2.	Jumlah kelompok nelayan	51	70	89	120	120
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	74,5	57,14	78,65	70,80	0

2.4.2.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025. Kemudian RPJMD Provinsi DKI Jakarta juga telah ditetapkan menjadi Perda melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Hal ini bermakna selama periode 2012-2016 telah ada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah yang menjadi acuan dan terlegitimasi. Selain itu, selama periode 2012-2016 dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.86

Kinerja Fokus Fungsi
Penunjang Bidang
Perencanaan Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

B. Keuangan

• Opini BPK

Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah DKI Jakarta sempat mengalami perbaikan pada tahun 2012. Namun sejak tahun 2013 hingga 2015, opini BPK terhadap LKPD DKI Jakarta selalu dalam predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 2.87

Opini BPK Atas LKPD Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Opini BPK atas LKPD DKI Jakarta	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP

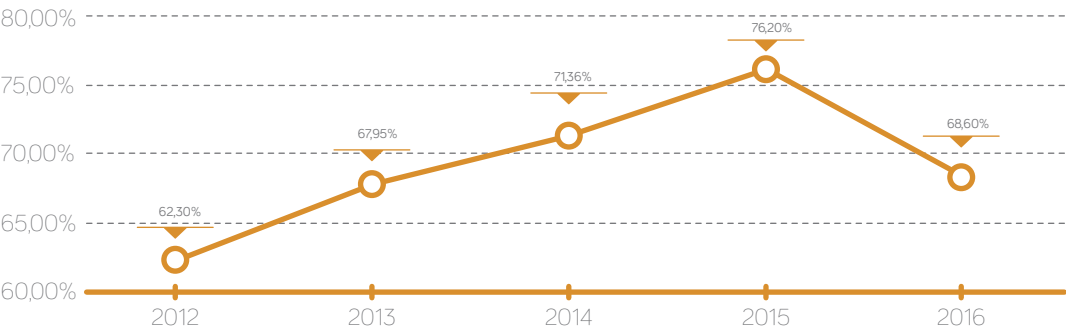
• Realisasi Penerimaan Asli Daerah

Realisasi PAD DKI Jakarta terhadap total pendapatan daerah DKI Jakarta selama tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami tren yang meningkat. Secara rata-rata realisasi PAD DKI Jakarta terhadap realisasi total pendapatan daerah naik 3,72 persen per tahun. Hal tersebut menunjukkan kinerja yang baik dari dinas-dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjaring penerimaan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 2.38

Persentase Realisasi
PAD terhadap Realisasi
Pendapatan Daerah Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018



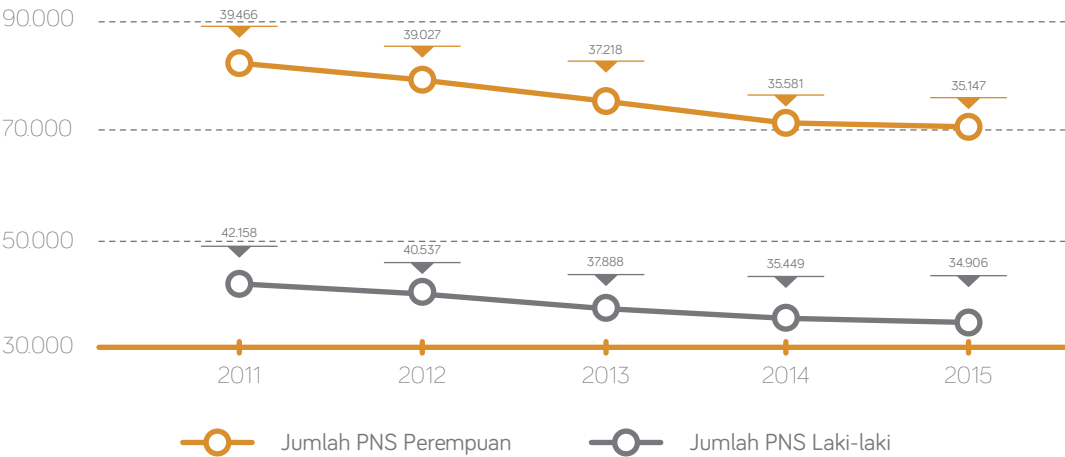
C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Secara keseluruhan, jumlah PNS Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan. Pada tahun 2011, total PNS sebanyak 81.624 orang, dengan 51,65 persen atau sebanyak 42.158 adalah PNS laki-laki, dan selebihnya yaitu 48,35 persen atau sebanyak 39.466 orang adalah PNS perempuan. Jumlah tersebut menurun terus hingga pada tahun 2015, jumlah total PNS Pemprov DKI Jakarta adalah sebanyak 70.053 orang, dengan sebanyak 49,83 persen atau 34.906 orang adalah PNS laki-laki, dan selebihnya yaitu sebanyak 50,17 persen atau 35.147 orang adalah PNS perempuan. Secara rinci, berikut gambaran perkembangan jumlah PNS Pemprov DKI Jakarta tahun 2011-2015:

Gambar 2.39

Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Berdasarkan Jenis
Kelamin Tahun 2011-2015

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018



Dari 81.624 orang PNS Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2011, sebanyak 6.338 orang atau 7,76 persennya menduduki jabatan struktural. Berbalik dengan jumlah PNS yang terus mengalami penurunan, jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural justru meningkat dari waktu ke waktu hingga pada tahun 2015 sebanyak 7.195 orang PNS Pemprov DKI Jakarta, atau sebesar 10,27 persen dari 70.053 PNS menduduki jabatan struktural.

Tabel 2.88

Data Rekapitulasi Pejabat
Struktural Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2011-2015

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

No.	Jenis Jabatan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Pejabat Eselon 1B	3	4	3	3	3
2	Jumlah Pejabat Eselon 2A	43	40	43	40	42
3	Jumlah Pejabat Eselon 2B	42	41	37	43	42
4	Jumlah Pejabat Eselon 3A	578	581	606	612	640
5	Jumlah Pejabat Eselon 3B	188	236	243	247	250
6	Jumlah Pejabat Eselon 4A	3.453	3.625	3.682	3.753	3.831
7	Jumlah Pejabat Eselon 4B	2.031	2.154	2.200	2.164	2.387
Grand Total		6.338	6.681	6.814	6.862	7.195

2.4.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah.

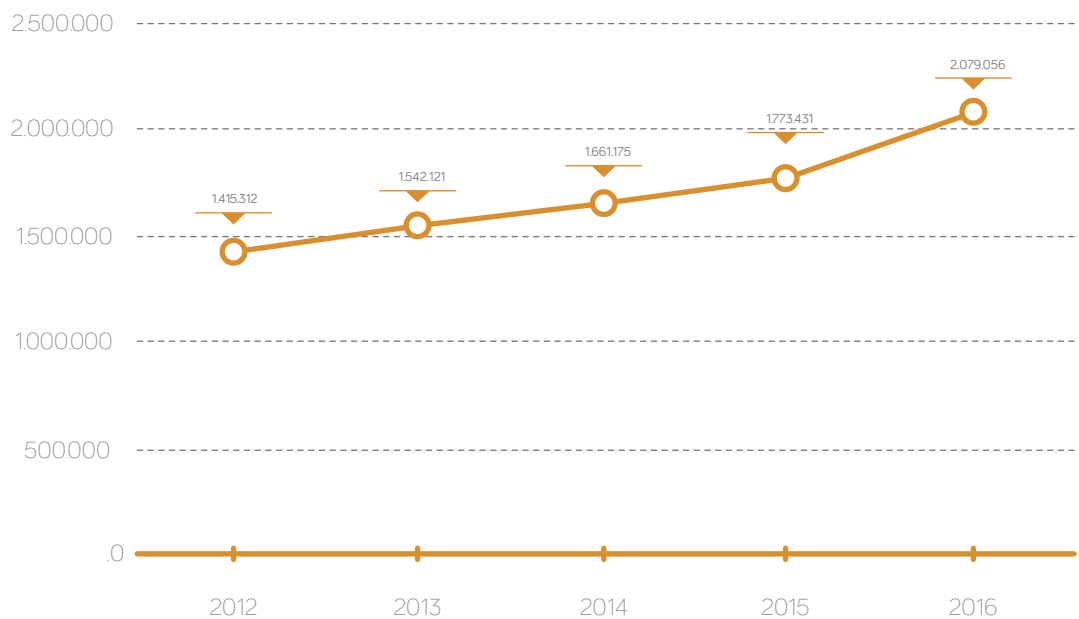
A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Adapun rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukan tren yang meningkat.

Gambar 2.40

Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018



B. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Adapun makna besaran nilai tukar petani yakni :

- $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Mengacu pada Tabel 2.86, dapat diketahui bahwa NTP di DKI Jakarta pada tahun 2013 tercatat sebesar 100,81, hal ini bermakna pada tahun 2013 petani di DKI Jakarta mengalami surplus. Namun angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 97,22 dan mengalami peningkatan sebesar 1,55 di tahun 2015 menjadi 98,77. Sehingga pada tahun 2015 nilai tukar petani mengalami defisit 1,23. Untuk tahun 2017, rasio nilai tukar petani juga masih berada di bawah seratus atau berada pada level 97,71, atau dengan kata lain petani masih mengalami defisit 2,29.

Tabel 2.89

Rasio Nilai Tukar Petani di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks yang diterima petani (It)	109,46	114,1	118,5	119,4	119,20
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	108,58	117,37	119,97	120,12	122,00
3.	Rasio Nilai tukar petani	100,81	97,22	98,77	99,10	97,71

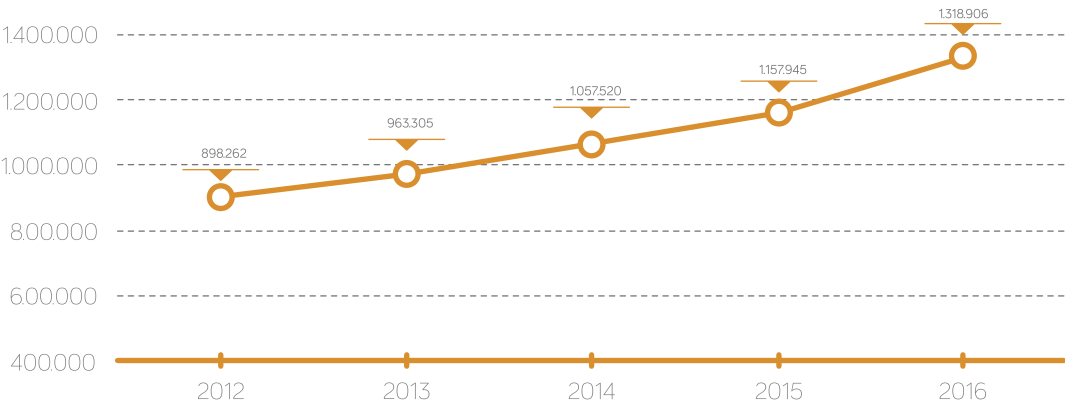
C. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu komponen pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran rumah tangga non makanan. Dari indikator ini dapat dilihat bagaimana kecenderungan masyarakat untuk membelanjakan pendapatannya selain makanan. Masyarakat DKI Jakarta sendiri dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan kecenderungan peningkatan konsumsi non makanan.

Gambar 2.41

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga non Makanan per Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018



D. Indikator Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari indikator rasio jumlah ekspor dan impor terhadap PDRB suatu daerah tersebut. Untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri, rasio ekspor dan impor terhadap PDRB DKI Jakarta terus mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2012, rasio ekspor dan impor terhadap PDRB adalah sebesar 1,08. Rasio ini kemudian terus menurun hingga tahun 2016 menjadi 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di DKI Jakarta sedang mengalami penurunan. Sebab dari terjadinya hal ini adalah karena ekonomi global yang sedang dalam kondisi lesu, sehingga berdampak pada aktivitas perdagangan internasional DKI Jakarta. Penjelasan lebih lengkap dalam bentuk angka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah ekspor barang dan jasa	224.117.319	228.551.621	230.043.956	227.742.951	226.783.183
2.	Jumlah impor barang dan jasa	795.573.959	804.219.550	801.138.804	710.306.166	705.091.658
3.	Net Ekspor Antar Daerah	304.294.418	291.097.601	291.798.551	219.352.389	231.965.193
4.	PDRB	1.222.527.925	1.296.694.573	1.373.389.129	1.454.345.823	1.539.376.654
5.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB	1,08	1,02	0,96	0,79	0,75

2.4.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

A. Fasilitas Listrik Dan Telepon

Salah satu perangkat yang memudahkan masyarakat DKI Jakarta untuk melakukan komunikasi adalah telepon rumah dan telepon seluler (handphone). Tren persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah di DKI Jakarta terus menurun dari 27,35 persen pada tahun 2012 menjadi 15,46 persen pada tahun 2016. Hal dimungkinkan dengan semakin banyaknya pengguna telepon seluler dan meninggalkan telepon rumah.

Tabel 2.91

Penggunaan Telepon Rumah dan Seluler di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase Rumah tangga yang memiliki telpon rumah	21,64%	19,11%	18,78%	18,36%	15,46%
2.	Persentase Rumah tangga yang menguasai HP	96,76%	97,91%	97,24%	82,81%	75,78%

Ketersediaan daya listrik di Jakarta sejak tahun 2012 sudah melebihi dibandingkan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada tahun 2016 rasio ketersediaan listrik di DKI Jakarta mencapai 106,93 persen. Sementara itu, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di DKI Jakarta tercatat mencapai 99,70 persen pada tahun 2016.

Tabel 2.92

Ketersediaan dan Penggunaan Listrik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio ketersediaan daya listrik	108,56%	107,25%	107,08%	107,05%	106,93%
2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	102,10%	100,28%	99,50%	99,63%	99,70%

B. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Sebagai kota perdagangan dan jasa, DKI Jakarta memiliki berbagai fasilitas penunjang yang menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi, serta bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke DKI Jakarta, adapun fasilitas tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.93 dan Tabel 2.94 berikut.

Tabel 2.93

Jumlah Usaha Restoran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Usaha Restoran Golongan tertinggi	1.656	1.668	1.678	1.893	3.090
2.	Usaha Restoran Golongan menengah	1.841	1.852	1.860	2.009	2.137
3.	Usaha Restoran Golongan terendah	108	122	141	189	157
4.	Jumlah Seluruh Usaha Restoran (penjumlahan a+b+c)	3.605	3.642	3.679	4.091	5.384

Tabel 2.94

Fasilitas Perdagangan dan
Jasa Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012-2015

Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018

Indikator	2012			2013			2014			2015		
	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
Hotel Bintang 5	23	9.368	11.936	26	10.411	13.383	26	9.881	12.571	27	10.447	13.232
Hotel Bintang 4	33	8.307	12.427	34	8.572	12.859	39	10.241	14.953	41	10.675	15.212
Hotel Bintang 3	59	7.521	10.202	60	7.767	11.025	72	9.365	13.570	77	9.924	14.510
Hotel Bintang 2	37	3.378	4.860	40	3.631	5.223	46	4.200	6.309	54	5.146	7.212
Hotel Bintang 1	23	1.561	2.319	25	1.916	2.671	22	1.817	2.556	29	2.819	3.833
Hotel Melati	175	7.145	9.654	180	7.096	9.100	191	7.825	10.352	183	7.877	9.948
Pondok Wisata	19	252	303	17	180	231	20	261	766	19	417	486
Penginapan Remaja	2	75	75	2	76	76	1	48	304	3	123	341
Villa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa akomodasi lainnya	12	509	809	22	716	1.157	4	98	141	7	235	274
Jumlah	383	38.116	52.585	406	40.365	55.725	421	43.737	61.522	440	47.663	65.048

2.4.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain faktor keamanan dan ketertiban suatu wilayah dan kemudahan proses perizinan. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut.

A. Keamanan dan Ketertiban

Angka kriminalitas selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 relatif menurun, pada tahun 2012 terjadi sebanyak 30.729 kejahatan di tahun 2012, namun mengalami peningkatan di tahun 2013 menjadi 32.656 kejahatan, kemudian menurun di tahun 2014 menjadi 29.186 kejahatan. Secara umum kondisi tersebut relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas sosial masyarakat maupun kegiatan investasi. Meskipun demikian, tetap diperlukan upaya untuk menekan meningkatnya angka kriminalitas, melalui pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk turut menjaga keamanan lingkungannya. Deskripsi secara numerik angka kriminalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.95

Angka Kriminalitas Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2012-2014

*Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018*

No.	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
1.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	30.729	32.656	29.186
2.	Jumlah Penduduk	9.862.088	9.969.948	10.075.310

Jika dirata-rata, di Provinsi DKI Jakarta terjadi kejahatan tidak kurang 80 kejahatan setiap hari, atau tidak kurang 3 kejahatan setiap jam pada tahun 2014.

B. Kemudahan Perizinan

Kemudahan prosedur dan tata cara memperoleh perizinan atau pengurusan izin untuk berinvestasi merupakan salah satu faktor pendukung minat investor untuk berinvestasi di DKI Jakarta. Kecepatan birokrasi dalam melayani permohonan perizinan untuk beberapa jenis izin/surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah <7 hari, terkecuali izin untuk mendirikan bangunan.

Dalam perspektif kedepan, pelayanan perizinan ini akan terus disempunakan dan diperbaiki sehingga terjamin kepastian prosedur, waktu dan keamanan perizinan serta pada akhirnya akan memberi kenyamanan dan kemudahan investor untuk berinvestasi di Jakarta. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.96

Lama Proses Perizinan
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2016

*Sumber: Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, 2018*

No.	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maksimum Rupiah)
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1	7	0
2.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1	7	0
3.	Izin Usaha Industri (IUI)	7	18	0
4.	Tanda Daftar Industri (TDI)	7	14	0
5.	Izin Mendirikan Bangunan	42	20	Rp0,00 untuk bangunan baru dengan luas kurang dari 100m ²

2.4.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia

A. Kualitas Tenaga Kerja

Jumlah lulusan perguruan tinggi yang bekerja di DKI Jakarta rasionya terus mengalami peningkatan sejak tahun 2012. Pada tahun 2012 terdapat seorang lulusan perguruan tinggi yang bekerja dari 12 orang penduduk. Sementara itu pada 2017 sudah jauh mengalami perbaikan, dari sebanyak 7 orang penduduk DKI Jakarta terdapat satu orang yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi.

Tabel 2.97

Rasio Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2012-2017

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

No.	Indikator	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah lulusan S1/ S2/S3	777.380	795.473	920.552	1.099.571	1.131.829	1.354.875
2.	Jumlah penduduk	9.862.088	9.969.948	10.075.310	10.177.924	10.277.628	10.374.235
3.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	1:12,78	1:12,53	1:10,94	1:9,26	1:9,08	1:7,66

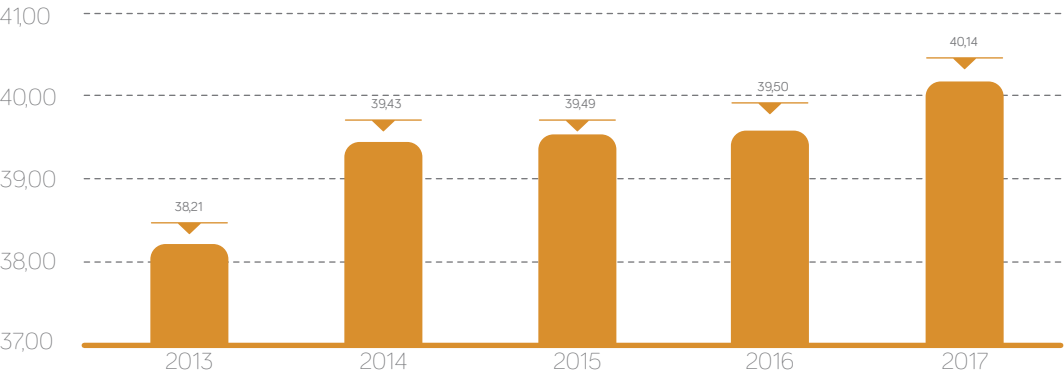
B. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Rasio tersebut merupakan indikator demografi yang sangat penting. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk DKI Jakarta dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.42

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018



Sejak tahun 2013 hingga 2017, rasio ketergantungan penduduk DKI Jakarta cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, rasio ketergantungan penduduk DKI Jakarta sebesar 40,14 yang bermakna bahwa dari 100 orang usia produktif mempunyai tanggungan sekitar 40 orang usia tidak produktif, yaitu usia di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas. Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan yang berada di bawah 50. Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (usia <15 dan >64 tahun). Rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif dibandingkan dengan penduduk usia produktif akan menghasilkan bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif lebih banyak, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat mendatangkan manfaat jika disikapi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan, pelatihan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan investasi, untuk mencapai produktivitas penduduk yang tinggi. Namun, jika bonus demografi tidak dipersiapkan dengan baik, seperti penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban pembangunan.

Tabel 2.98

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1)	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.1.1.	Pertumbuhan PDRB	6,53%	6,07%	5,91%	5,89%	5,85%	
1.1.2.	Laju Inflasi	4,52%	8,00%	8,95%	3,30%	2,37%	
1.1.3.	PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah/ jiwa)	123.962	130.060	136.312	142.892	149.779	
1.1.4.	Indeks Gini	0,425	0,424	0,433	0,419	0,409	
1.1.5.	Tingkat Kemiskinan	3,71%	3,72%	4,09%	3,62%	3,75%	
1.1.6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,53	78,08	78,39	78,99	79,60	
1.1.7.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	74,66	74,98	94,60	94,72	NA	
1.1.8.	Angka Melek Huruf	99,07%	99,13%	99,54%	99,59%	99,64%	
1.1.9.	Angka Usia Harapan Hidup	72,03	72,19	72,27	72,43	72,49	
1.1.10.	Persentase Balita Gizi Buruk	0,02%	0,02%	0,01%	0,03%	0,03%	
1.1.11.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,36	71,56	66,61	66,39	66,91	
1.1.12.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	62,30%	67,95	71,36	76,20	68,58	
1.1.13.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP	
2)	Aspek Pelayanan Umum						
2.1	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar						
2.1.1	Urusan Pendidikan						
2.1.1.1	Angka partisipasi sekolahusia 7-12 tahun	98,97	99,35	99,47	99,56	99,61	

No	Aspek /Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.1.2	Angka partisipasi sekolahusia 13-15 tahun	93,79	95,28	96,69	97,19	97,47		
2.1.1.3	Angka partisipasi sekolahusia 16-18 tahun	60,81	65,54	70,23	70,73	70,83		
2.1.1.4	Rata-rata Lama Sekolah DKI Jakarta	10,43	10,47	10,54	10,7	10,88		
2.1.1.5	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (SD/MI)	103,91%	104,18%	105,26%	104,332%	103,37%		
2.1.1.6	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	86,35%	90,86%	88,35%	90,89%	93,88%		
2.1.1.7	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas (SMA/ SMK/MA)	72,72%	74,71%	76,35%	73,09%	79,51%		
2.1.1.8	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01		
2.1.1.9	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,13	0,15	0,18	0,11	0,06		
2.1.1.10	Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,04	0,33	0,42	0,36	0,15		
2.1.1.11	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00%	99,32%	100,00%	100,00%	100,00%		
2.1.1.12	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	99,99%	99,99%	99,99%	99,98%	100,00%		
2.1.1.13	Angka Kelulusan (AL) SMA/ SMK/MA	99,99%	98,99%	99,99%	91,36%	100,00%		
2.1.1.14	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/ Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI	NA	7,72	7,20	7,15	7,01		
2.1.1.15	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/ Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMP/ MTs	NA	7,50	7,55	7,49	6,23		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.1.16	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/ Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMA/ MA	NA	7,00	6,70	6,94	6,16		
2.1.1.17	Rata-rata Nilai Ujian Nasional/ Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMK	NA	7,50	6,90	6,56	6,13		
2.1.1.18	Persentase guru yang kompeten	NA	84,45%	94,00%	100%	99,90%		
2.1.1.19	Persentase Sekolah Jenjang SD//MI Terakreditasi A	NA	6,40%	32,76%	50,86%	70,50%		
2.1.1.20	Persentase Sekolah Jenjang SMP/MTs Terakreditasi A	NA	15,63%	31,51%	42,17%	59,11%		
2.1.1.21	Persentase Sekolah Jenjang SMA/MA Terakreditasi A	NA	5,92%	45,42%	54,79%	79,17%		
2.1.1.22	Persentase Sekolah Jenjang SMK Terakreditasi A	NA	9,50%	26,08%	34,54%	53,54%		
2.1.1.23	Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	NA	91,57%	92,00%	51,81%	68,21%		
2.1.1.24	Jumlah Penerima KJP Siswa Negeri	-	-	422.548	328.183	310.118		
2.1.1.25	Jumlah Penerima KJP Siswa Swasta	-	-	150.541	233.225	220.889		
2.1.1.26	Jumlah sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus	NA	374 sekolah	376 sekolah	372 sekolah	2.120 sekolah		
2.1.1.27	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi per tahun	52	5	16	45	10		
2.1.2	Kesehatan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.2.1	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	NA	95,76	94,87	95,22	96,99		
2.1.2.2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	NA	87,22	87,59	87,78	91,01		
2.1.2.3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	NA	97,25	96,15	96,16	97,27		
2.1.2.4.	Cakupan Pelayanan Nifas	NA	98,25	94,64	94,90	94,63		
2.1.2.5	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	NA	65,43	69,10	70,15	76,16		
2.1.2.6	Cakupan kunjungan bayi	NA	97,29	95,37	97,08	98,03		
2.1.2.7	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	NA	100,00	100,00	100,00	99,63		
2.1.2.8	Cakupan pelayanan anak balita	NA	91,89	89,46	86,78	91,01		
2.1.2.9	Cakupan Baduta Gakin dapat makanan Pendamping ASI (MPASI)	NA	42,14	61,62	51,67	42,29		
2.1.2.10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	NA	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.1.2.11	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	NA	97,17	97,18	83,03	94,99		
2.1.2.12	Cakupan peserta KB aktif	NA	76,08	78,21	77,45	77,84		
2.1.2.13	Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 th	NA	2,997	1,96	2,17	2,27		
2.1.2.14	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	NA	31,37	39,33	92,12	103,17		
2.1.2.15	Penemuan pasien baru TB BTA Positif	NA	83,96	84,67	80,81	91,74		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.2.16	Penderita DBD yang ditangani	NA	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.1.2.17	Penemuan Penderita Diare	NA	110,88	102,92	96,12	112,26		
2.1.2.18	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien keluarga miskin (Gakin) / masyarakat miskin	NA	153,85	78,00	196,90	224,03		
2.1.2.19	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	NA	49,57	100,00	100,00	40,28		
2.1.2.20	Cakupan pelayanan gawat darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	NA	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.1.2.21	Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	NA	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.1.2.22	Cakupan Desa Siaga Aktif	NA	78,51	77,53	92,88	98,50		
2.1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	NA	99,92%	96,96%	97,56%	98,28%		
2.1.3.2	Panjang jalan yang memiliki trotoar (km)	540.336,86	540.336,86	540.336,86	540.336,86	588.311,76		
2.1.3.3	Panjang seluruh jalan (km) selain jalan tol	6.833.961	6.752.482	6.834.022	6.834.022	5.834.022		
2.1.3.4	Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar	7,91	8,00	7,91	7,91	8,61		
2.1.3.5	Jumlah IMB yang diterbitkan	NA	13.037	9.765	11.746	11.450		
2.1.3.6	Jumlah Surat Peringatan (SP) yang diterbitkan	NA	4.035	3.102	3.512	4.136		
2.1.3.7	Jumlah Pelaksanaan Segel	NA	3.628	3.102	3.233	3.980		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.3.8	Jumlah Surat Perintah Bongkar (SPB) yang diterbitkan	NA	2.648	2.835	2.932	3.696		
2.1.3.9	Jumlah Pelaksanaan Bongkar	NA	1.513	1.058	986	1.178		
2.1.3.10	Jumlah Pembangunan/ Rehab (Gedung Pemda)	NA	9	28	26	11		
2.1.3.11	Jumlah Pemeliharaan/ Perbaikan (Gedung Pemda)	NA	12	6	10	12		
2.1.3.12	Luas lahan untuk RTH hutan yang dibebaskan (Ha)	4,03	4,72	2,4	4,65	NA		
2.1.3.13	Luas lahan untuk RTH taman yang dibebaskan (Ha)	7,4	7,11	11,86	48,72	15,52		
2.1.3.13	Luas lahan untuk RTH makam yang dibebaskan (Ha)	0,0047	2,21	1,89	1,8	2,51		
2.1.3.14	Penambahan ratio RTH hutan	0,0062	0,0072	0,0037	0,0071	NA		
2.1.3.15	Penambahan ratio RTH taman	0,0113	0,0109	0,0181	0,0745	0,0237		
2.1.3.16	Penambahan ratio RTH makam	0,00000072	0,0034	0,0029	0,0027	0,0038		
2.1.3.17	Luas RTH taman yang dibangun dan Kebun Bibit (Ha)	2.127,89	4,02	1,17	1,09	NA		
2.1.3.18	Luas RTH makam yang dibangun (Ha)	0,96	0,705	0,14	0,13	NA		
2.1.3.19	Luas lahan untuk RTH hutan yang dipelihara (Ha)	240,02	243,19	244,46	244,46	254,26		
2.1.3.20	Luas RTH taman yang dipelihara (Ha)	736,08						
	497,22	576,91	567	749,43				
2.1.3.21	Jumlah RTH makam yang dipelihara (Ha)	607,10	607,10	607,10	607,10	607,10		
2.1.3.22	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1.338,46	1.323,99	1.310,13	1.296,93	1.284,34		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.3.23	Kapasitas Produksi Air Potensial							
(liter/detik)	15.200	15.200	15.200	15.200	16.200			
2.1.3.24	Kapasitas Produksi Air Efektif							
(liter/detik)	14.174	14.130	14.544	14.959	15.956			
2.1.3.25	Produksi Air (juta m ³)	537,10	537,02	548,19	560,38	594,18		
2.1.3.26	Kubikasi Air Terjual (juta m ³)	310,01	314,32	320,88	330,50	337,14		
2.1.3.27	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Air Sungai	67 titik	70 titik	80 titik	80 titik	90 titik		
2.1.3.28	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Air Situ/Waduk	40 Situ	40 Situ	40 Situ	40 Situ	40 Situ		
2.1.3.29	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Air Tanah	100 titik	100 titik	150 titik	200 titik	267 titik		
2.1.3.30	Jumlah Titik Pemantauan Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta	33 titik	45 titik	45 titik	45 titik	45 titik		
2.1.3.31	Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk (Baik)	0%	2,0%	0%	0%	0%		
2.1.3.32	Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk (Tercemar Ringan)	12,5%	30,0%	2,0%	57,0%	3,0%		
2.1.3.33	Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk (Tercemar Sedang)	50,0%	40,0%	70,0%	33,0%	68,0%		
2.1.3.34	Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk (Tercemar Berat)	37,5%	28,0 %	28,0%	10,0%	29,0%		
2.1.3.35	Persen ketaatan BMAL	85,27%	84,80%	86,40%	89,97%	90,08%		
2.1.3.36	Status Mutu Pemantauan Air Sungai (Baik)	0%	0%	1%	1%	0%		
2.1.3.37	Status Mutu Pemantauan Air Sungai (Tercemar Ringan)	9%	10%	23%	17%	0%		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.3.38	Status Mutu Pemantauan Air Sungai (Tercemar Sedang)	26%	32%	44%	39%	40%		
2.1.3.39	Status Mutu Pemantauan Air Sungai (Tercemar Berat)	65%	58%	32 %	43%	60%		
2.1.3.40	Status Mutu Pemantauan Air Tanah (Baik)	35 %	34%	0%	38%	46%		
2.1.3.41	Status Mutu Pemantauan Air Tanah (Tercemar Ringan)	39%	37%	99%	45%	28%		
2.1.3.42	Status Mutu Pemantauan Air Tanah (Tercemar Sedang)	14 %	17%	1%	15%	24%		
2.1.3.43	Status Mutu Pemantauan Air Tanah (Tercemar Berat)	12 %	12%	0%	3%	2%		
2.1.3.44	Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta (Baik)	0	0	0	4	0		
2.1.3.45	Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta (Tercemar Ringan)	0	0	0	61%	0		
2.1.3.46	Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta (Tercemar Sedang)	26,1%	17,4%	17,4%	35%	26,1%		
2.1.3.47	Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta (Tercemar Berat)	73,9%	82,6%	82,6%	0	73,9%		
2.1.3.48	Status Mutu Pemantauan Muara Teluk Jakarta (Baik)	0	0	0	0	0		
2.1.3.49	Status Mutu Pemantauan Muara Teluk Jakarta (Tercemar Ringan)	25%	0	0	9,1%	0		
2.1.3.50	Status Mutu Pemantauan Muara Teluk Jakarta (Tercemar Sedang)	25%	40%	40%	27,3%	0		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.3.51	Status Mutu Pemantauan Muara Teluk Jakarta (Tercemar Berat)	50%	60%	60%	63,6%	0		
2.1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
2.1.4.1	Persentase Luas permukiman yang tertata	0,57	3,11	0,45	0,14	NA		
2.1.4.2	Rasio Rumah Layak Huni	90,41%	90,47%	90,58%	90,55%	NA		
2.1.5	Urusan Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
2.1.5.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, keindahan)	42,46%	41,57%	58,49%	89,49%	99,68%		
2.1.5.2	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4,41	4,11	4,06	3,39	3,21		
2.1.5.3	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	23,23	22,98	19,65	17,76	17,74		
2.1.5.4	Jumlah Kejadian Kebakaran	996	1.091	1.561	1.168	1.454		
2.1.6.	Urusan Sosial							
2.1.6.1.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	32,31%	42,34%	50,97%	47,98%	51,26%		
2.1.6.2.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	25,02%	31,72%	39,02%	30,08%	38,23%		
2.1.6.3.	Jumlah Keluarga Miskin yang mandiri	15.004	21.224	26.644	26.644	26.644		
2.1.6.4.	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	NA	7.640	11.000	13.987	14.131		
2.1.6.5.	Jumlah sarana sosial	606	537	427	427	427		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.	Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
2.2.1	Urusan Tenaga Kerja							
2.2.1.1	Jumlah Pencari Kerja yang berhasil di tempatkan	4.803	54.015	15.062	24.997	25.121		
2.2.1.2	Jumlah pencari kerja yang berwirausaha	914	930	1.120	1.050	1.040		
2.2.1.3	Jumlah Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	NA	6.553	6.564	8.050	6.425		
2.2.1.4	Jumlah Perusahaan yang menjalankan K3	NA	1.397	1.395	1.425	1.392		
2.2.1.5	Jumlah kasus Hubungan Industrial yang masuk ke tingkat Perjanjian Bersama	NA	44	42	28	55		
2.2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.2.2.1	Rasio KDRT	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%		
2.2.2.2	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100%	100%	100%	100%	100%		
2.2.2.3	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	NA	15,480	30	70,150	76,920		
2.2.3	Urusan Pangan							
2.2.3.1	Ketersediaan pangan utama	144,74	139,25	121,30	114,23	113,13		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.3.2	Persentase Pangan Bebas Bahan Berbahaya (Produk Pertanian)	NA	90,00	90,28	95,90	91,25		
2.2.3.3	Persentase Pangan Bebas Bahan Berbahaya (Produk Perikanan)	NA	81,83	93,38	99,11	98,23		
2.2.3.4	Persentase Pangan Bebas Bahan Berbahaya (Produk Peternakan)	NA	93,38	92,00	93,00	99,88		
2.2.4	Urusan Pertanian							
2.2.4.1	Jumlah kelurahan yang telah didata	NA	204	NA	8	12		
2.2.4.2	Jumlah bidang tanah yang telah didata	NA	917,337	NA	38,161	73,230		
2.2.5	Urusan Lingkungan Hidup							
2.2.5.1	Persentase Penanganan Sampah	76,88%	80,99%	81,21%	91,10%	83,78%		
2.2.5.2	Pengurangan Sampah	NA	0,10%	0,09%	0,10%	0,10%		
2.2.5.3	Jumlah Kegiatan yang Diawasi dalam rangka Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	586	1.077	1.027	1.202	1.237		
2.2.5.4	Indeks Kualitas Air	41,05	34,71	34,00	30,51	22,31		
2.2.5.5	Indeks Kualitas Udara	44,31	41,51	46,28	78,78	56,40		
2.2.5.6	Indeks Kualitas Tutupan Hutan	27,99	22,75	31,99	37,44	37,34		
2.2.5.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	36,80	31,97	36,88	45,58	36,41		
2.2.6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.6.1	Cakupan penerbitan kartu keluarga	88,20%	94,18%	95,59%	96,26%	97,55%		
2.2.6.2	Rasio pasangan berakte nikah	0,44%	1,48%	1,44%	1,68%	5,26%		
2.2.6.3	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	91,90%	95,15%	96,83%	98,52%	98,67%		
2.2.6.4	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	169,55%	170,26%	81,74%	89,24%	92,66%		
2.2.6.5	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	21,39%	17,82%	15,49%	18,48%	83,79%		
2.2.6.6	Ketersediaan basis data kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada		
2.2.6.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		
2.2.7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.2.7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	NA	NA	0,019	0,146	0,169		
2.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	27.779	30.656	36.672	30.003	3.490		
2.2.7.3	Persentase LPM Berprestasi	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73		
2.2.7.4	PKK aktif	27.779	30.656	36.672	30.003	32.429		
2.2.7.5	Persentase Posyandu aktif	92,79%	92,08%	87,69%	97,02%	98,91%		
2.2.7.6	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	80,02	99,17	NA	1,49	60,92		
2.2.8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2.2.8.1	Age Specific Fertility Rate Kelompok umur 15-19 tahun	NA	13,747	13,222	13,222	7,465		
2.2.8.2	Cakupan peserta KB aktif	81,38%	78,85%	80,56%	79,51%	67,46%		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.8.3	Rasio akseptor KB	35,26%	33,09%	32,02%	31,14%	25,52%		
2.2.8.4	Unmet Need	NA	12,86	13,05	12,06	19,93		
2.2.9	Urusan Perhubungan							
2.2.9.1	Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan kereta api (jumlah penumpang ke Jabodetabek dan dalam kota)	152.847.697	175.203.781	224.243.608	270.756.043	293.814.625		
2.2.9.2	Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan kapal laut (Tanjung Priok)	210.159	211.131	174.345	158.255	129.701		
2.2.9.3	Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan pesawat udara (Halim Perdana Kusuma)	79.173	16.710	825.295	1.792.896	2.803.051		
2.2.9.4	Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan bis	111.251.687	112.522.624	111.969.896	102.950.384	123.706.856		
2.2.9.5	Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan kereta api (luar kota)	6.501.315	7.356.024	8.624.481	8.977.797	8.977.797		
2.2.9.6	Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan kapal laut (Tanjung Priok)	186.853	175.259	141.904	129.456	115.962		
2.2.9.7	Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan pesawat udara (Halim Perdana Kusuma)	81.359	22.443	824.569	1.586.445	2.768.214		
2.2.9.8	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (Jumlah penumpang Transjakarta)	111.260.869	112.522.638	111.630.305	102.950.384	111.613.674		
2.2.9.9	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal pertahun	324.381.622	352.512.991	401.402.743	446.086.968	538.445.457		
2.2.9.10	Rasio ijin trayek	1:26.582	1:25.762	1:24.278	1:9.398	1:9.455		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.9.11	Jumlah Pelabuhan Laut	12	12	12	12	12		
2.2.9.12	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1		
2.2.9.13	Jumlah Pelabuhan Terminal Bis Penumpang	18	18	17	17	17		
2.2.9.14	Jumlah Pelabuhan Terminal Bis Barang	2	2	2	2	2		
2.2.9.15	Persentase Angkutan darat	0,09%	0,09%	0,10%	0,11%	0,06%		
2.2.9.16	Jumlah Uji KIR Kendaraan Kanjen IV	28.463	27.033	24.461	20390	19.142		
2.2.9.17	Jumlah Uji KIR Kendaraan Penumpang Umum	23.850	34.233	42.948	48.239	35.262		
2.2.9.18	Jumlah Uji KIR Mobil Barang	328.381	357.878	325.600	342.109	260.757		
2.2.9.19	Jumlah Uji KIR Mobil Bus	52.429	53.254	53.914	54.150	43.340		
2.2.9.20	Jumlah Uji KIR Kereta Gandengan	30	11	18	0	316		
2.2.9.21	Jumlah Uji KIR Kereta Tempelan	23.586	24.101	31.712	15.015	18.059		
2.2.9.22	Jumlah Uji KIR Kendaraan Khusus	29.262	31.417	30.128	20.185	36.309		
2.2.9.23	Biaya Pengujian Kelayakan Mobil barang, mobil bus, dan kendaraan khusus (per kendaraan per 6 bulan)	40.000	87.000	87.000	87.000	87.000		
2.2.9.24	Biaya Pengujian Kelayakan Kereta tempelan/gandengan (per kendaraan per 6 bulan)	35.000	87.000	87.000	87.000	87.000		
2.2.9.25	Biaya Pengujian Kelayakan Kendaraan jenis IV/kendaraan bermotor roda 3	25.000	71.000	71.000	71.000	71.000		
2.2.9.26	Biaya Pengujian Kelayakan Mobil penumpang umum	30.000	62.000	62.000	62.000	62.000		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.9.27	Pemasangan Rambu-rambu	98,46%	99,39%	99,37%	100,00%	100%		
2.2.9.28	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,48	0,43	0,40	0,37	0,35		
2.2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika							
2.2.10.1	Persentase Rumah tangga yang memiliki telpon rumah	21,64	19,19	18,78	18,36	15,88%		
2.2.10.2	Persentase Rumah tangga yang menguasai HP	96,76	97,91	97,24	82,81	75,78		
2.2.10.3	Rumah Tangga yang memiliki komputer/desktop/notebook	33,01	32,19	34,5	36,95	36,65		
2.2.10.4	Jumlah rumah tangga yang menggunakan internet di tempat lainnya (%)	85,55	11,44	15,24	4,90	5,14		
2.2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
2.2.11.1	Persentase koperasi aktif	68,03%	71,76%	71,20%	74,98%	75,61%		
2.2.11.2	Jumlah Volume Usaha Koperasi (Triliun Rupiah)	1,8	7,3	2,4	4,5	7,7		
2.2.11.3	Jumlah Usaha Mikro	92.715	92.715	92.715	92.715	70.230		
2.2.11.4	Jumlah Usaha Kecil	683.741	683.741	683.741	683.741	1.154.792		
2.2.11.5	Jumlah seluruh UKM (mikro, kecil dan menengah)	837.905	837.905	837.905	837.905	1.235.651		
2.2.11.6	Jumlah Nilai Ekspor Produk	NA	1.056,83	11.546,19	11.588,06	10.317,87		
2.2.11.7	Jumlah Alat Ukur Yang Ditera dan Ditera Ulang, Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)							
2.2.12	Urusan Penanaman Modal							
2.2.12.1	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal	NA	30,195	66,170	60,750	58,090		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga							
2.2.13.1	Jumlah organisasi pemuda	105	128	128	192	193		
2.2.13.2	Jumlah kegiatan kepemudaan	62	82	107	6	18		
2.2.13.3	Jumlah kegiatan olahraga	74	99	101	9	44		
2.2.13.4	Jumlah lapangan olahraga	50	52	52	51	52		
2.2.14	Urusan Statistik							
2.2.14.1	Buku "kabupaten/kota dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.2.14.2	Buku "PDRB kabupaten/kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.2.14.3	Buku "Provinsi dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.2.14.4	Buku "PDRB Provinsi"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.2.15	Urusan Kebudayaan							
2.2.15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	287	481	397	254	261		
2.2.15.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	18	18	18	18	21		
2.2.15.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%		
2.2.16	Urusan Perpustakaan							
2.2.16.1	Jumlah Perpustakaan Perpusnas	1	1	1	1	1		
2.2.16.2	Jumlah Perpustakaan Perpmda	1	1	1	2	2		
2.2.16.3	Jumlah Perpustakaan Kota/Kab	6	6	6	6	6		
2.2.16.4	Jumlah Perpustakaan Pusing	NA	NA	NA	34	34		
2.2.16.5	Jumlah Perpustakaan Perpus Khusus	NA	NA	NA	974	974		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.16.6	Jumlah Perpustakaan Perpustakaan Sekolah	NA	NA	NA	1.194	1.194		
2.2.16.7	Jumlah Perpustakaan TBM	NA	251	189	254	391		
2.2.16.8	Jumlah Perpustakaan RPTRA	NA	NA	NA	24	186		
2.2.16.9	Jumlah Perpustakaan Lapas	NA	NA	NA	2	4		
2.2.16.10	Jumlah Perpustakaan SKKT	NA	NA	NA	2	NA		
2.2.16.11	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	NA	282.055	492.207	850.785	1.185.694		
2.2.16.12	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	NA	270.496	284.462	308.402	396.679		
2.2.16.13	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	569.552	638.207	679.293	770.862	835.941		
2.2.16.14	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	569.552	638.207	679.293	770.862	835.941		
2.3	Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan							
2.3.1	Urusan Pariwisata							
2.3.1.1	Kunjungan Wisata	2.125.513	2.313.742	2.319.295	2.377.226	2.512.005		
2.3.1.2	Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Atas dasar harga berlaku (juta Rupiah)	69.531.496	79.798.169	92.190.044	105.882.374	109.181.700		
2.3.1.3	Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Atas dasar harga konstan (juta Rupiah)	61.258.499	65.235.431	68.850.215	72.582.234	76.788.430		
2.3.1.4	Kontribusi sub sektor akomodasi terhadap PDRB Atas dasar harga berlaku (Miliar Rupiah)	10.446.581,6	13.238,00	15.505,11	16.427,12	16.726,64		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.3.15	Kontribusi sub sektor akomodasi terhadap PDRB Atas dasar harga konstan (Miliar Rupiah)	8.744.187,3	9.609,4	10.467,52	10.604,55	11.763,99		
2.3.16	Kontribusi sub sektor makan minum terhadap PDRB Atas dasar harga berlaku (Miliar Rupiah)	10.446.581,6	13.238,00	15.505,11	16.427,12	16.726,64		
2.3.17	Kontribusi sub sektor makan minum terhadap PDRB Atas dasar harga konstan (Miliar Rupiah)	8.744.187,3	9.609,4	10.467,52	10.604,55	11.763,99		
2.3.2	Urusan Pertanian							
2.3.2.1.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	0,11%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%		
2.3.2.2.	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	11.044	10.268	7.541	6.361	5.342		
2.3.2.3.	Luar areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya	1.897	1.744	1.400	1.137	1.002		
2.3.2.4.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	5,82	5,89	5,39	5,59	5,33		
2.3.3	Urusan Kehutanan							
2.3.3.1	Luas lahan untuk RTH hutan yang dibebaskan (Ha)	4,03	4,72	2,4	4,65	0		
2.3.3.2	Luas lahan untuk RTH taman yang dibebaskan (Ha)	7,4	7,11	11,86	48,72	15,52		
2.3.3.3	Luas lahan untuk RTH makam yang dibebaskan (Ha)	0,0047	2,21	1,89	1,8	2,51		
2.3.3.4	Penambahan rasio RTH hutan	0,0062	0,0072	0,0037	0,0071	0		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.3.3.5	Penambahan rasio RTH taman	0,0113	0,0109	0,0181	0,0745	0,0237		
2.3.3.6	Penambahan rasio RTH makam	0,00000072	0,0034	0,0029	0,0027	0,0038		
2.3.3.7	Luas RTH taman yang dibangun dan Kebun Bibit (Ha)	2.127,89	4,02	1,17	1,09	NA		
2.3.3.8	Luas RTH makam yang dibangun (Ha)	0,96	0,705	0,14	0,13	NA		
2.3.3.9	Luas lahan untuk RTH hutan yang dipelihara (Ha)	240,02	243,19	244,46	244,46	254,26		
2.3.3.10	Luas RTH taman yang dipelihara (Ha)	736,08						
	497,22	576,91	567	749,43				
2.3.3.11	Jumlah RTH makam yang dipelihara (Ha)	607,10	607,10	607,10	607,10	607,10		
2.3.4	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral							
2.3.4.1	Persentase daya listrik terpasang di kepulauan seribu	66,7%	66,7%	66,7%	66,7%	66,7%		
2.3.4.2	Bauran energi baru terbarukan	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%		
2.3.4.3	Persentase cakupan pencahayaan kota	43,53%	52,90%	58,07%	68,69%	68,69%		
2.3.4.4	Persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system	0%	0%	0%	0%	79,78%		
2.3.3	Urusan Perdagangan							
2.3.3.1	Kontribusi sektor Perdagangan besar terhadap PDRB Atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	224.375.960,0	261.040.403,0	304.598.489,0	330.319.573,0	358.898.310		
2.3.3.2	Kontribusi sektor Perdagangan besar terhadap PDRB Atas dasar harga konstan (Juta Rp)	206.961.971,0	217.980.309,0	228.775.732,0	234.872.712,0	245.826.850		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.3.3.3	Ekspor Bersih Perdagangan (berat bersih)	48.801.557.241	42.710.378.151	36.525.327.633	24.741.852.191	25.418.858.648		
2.3.3.4	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	0,00%	0,00%	1,34%	0,86%	1,25%		
2.3.4	Urusan Perindustrian							
2.3.4.1	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB Atas dasar harga berlaku	188.822.070,0	209.498.625,0	239.287.410,0	274.492.251,0	295.043.440		
2.3.4.2	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB Atas dasar harga konstan	160.011.696,0	168.558.608,0	177.829.006,0	186.803.041,0	193.610.260		
2.3.4.3	Pertumbuhan Industri	2,71%	2,62%	3,11%	2,75%	-12,17%		
2.3.4.4	Cakupan bina kelompok pengrajin	6,41%	7,50%	8,54%	13,48%	6,42%		
2.3.5	Urusan Kelautan dan Perikanan							
2.3.5.1	Produksi perikanan	100%	92,28%	97,19%	120,33%	61,46%		
2.3.5.2	Konsumsi ikan	118,93%	125,19%	106,54%	97,08%	103,18%		
2.3.5.3	Cakupan bina kelompok nelayan	74,5	57,14	78,65	70,80	NA		
2.4	Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
2.4.1	Perencanaan Pembangunan							
2.4.1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.4.1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.4.1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.4.2	Keuangan							
2.4.2.1.	Opini BPK atas LKPD DKI Jakarta	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP		
2.4.2.2.	Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah	0,62%	0,68%	0,71%	0,76%	0,69%		
2.4.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
2.4.3.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	39466	39027	37218	35581	35147		
2.4.3.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Laki-laki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	42.158	40.537	37.888	35.449	34.906		
2.4.3.3	Jumlah Pejabat Eselon 1B	3	4	3	3	3		
2.4.3.4	Jumlah Pejabat Eselon 2A	43	40	43	40	42		
2.4.3.5	Jumlah Pejabat Eselon 2B	42	41	37	43	42		
2.4.3.6	Jumlah Pejabat Eselon 3A	578	581	606	612	640		
2.4.3.7	Jumlah Pejabat Eselon 3B	188	236	243	247	250		
2.4.3.8	Jumlah Pejabat Eselon 4A	3.453	3.625	3.682	3.753	3.831		
2.4.3.9	Jumlah Pejabat Eselon 4B	2.031	2.154	2.200	2.164	2.387		
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
3.1	Kemampuan Ekonomi Daerah							
3.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	1.415.312	1.542.121	1.661.175	1.773.431	2.079.056		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.1.2.	PengeluaranKonsumsiNon Pangan Rumah Tangga Per Kapita	898.262	963.305	1.057.520	1.157.945	1.318.906		
3.1.3	Nilai Tukar Petani	NA	100,81	97,22	98,77	99,10		
3.1.4	Indikator Keterbukaan Ekonomi							
3.1.4.1	Jumlah ekspor barang dan jasa	224.117.319	228.551.621	230.043.956	227.742.951	226.783.183		
3.1.4.2	Jumlah impor barang dan jasa	795.573.959	804.219.550	801.138.804	710.306.166	705.091.658		
3.1.4.3	Net Ekspor Antar Daerah	304.294.418	291.097.601	291.798.551	219.352.389	231.965.193		
3.1.4.4	PDRB	1.222.527.925	1.296.694.573	1.373.389.129	1.454.345.823	1.539.376.654		
3.1.4.5	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB	1,08	1,02	0,96	0,79	0,75		
3.2	Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur							
3.2.1	Fasilitas Listrik dan Telepon							
3.2.1.1	Persentase Rumah tangga yang memiliki telpon rumah	21,64%	19,11%	18,78%	18,36%	15,46%		
3.2.1.2	Persentase Rumah tangga yang menguasai HP	96,76%	97,91%	97,24%	82,81%	75,78%		
3.2.1.3	Rasio ketersediaan daya listrik	108,56%	107,25%	107,08%	107,05%	106,93%		
3.2.1.4	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	102,10%	100,28%	99,50%	99,63%	99,70%		
3.2.2	Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa							
3.2.2.1	Usaha Restoran Golongan tertinggi	1.656	1.668	1.678	1.893	3.090		
3.2.2.2	Usaha Restoran Golongan menengah	1.841	1.852	1.860	2.009	2.137		
3.2.2.3	Usaha Restoran Golongan terendah	108	122	141	189	157		
3.2.2.4	Hotel Bintang 5	23	26	26	27	NA		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.2.2.5	Hotel Bintang 4	33	34	39	41	NA		
3.2.2.6	Hotel Bintang 3	59	60	72	77	NA		
3.2.2.7	Hotel Bintang 2	37	40	46	54	NA		
3.2.2.8	Hotel Bintang 1	23	25	22	29	NA		
3.2.2.9	Hotel Melati	175	180	191	183	NA		
3.2.2.10	Pondok Wisata	19	17	20	19	NA		
3.2.2.11	Penginapan Remaja	2	2	1	3	NA		
3.2.2.12	Villa	NA	NA	NA	NA	NA		
3.2.2.13	Jasa akomodasi lainnya	12	22	4	7	NA		
3.2.3	Keamanan dan Ketertiban							
3.2.3.1	Angka Kriminalitas	22,90	23,33	20,80	NA	NA		
3.2.4	Kemudahan Perijinan							
3.2.4.1	Lama Proses Perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	NA	NA	NA	NA	1		
3.2.4.2	Lama Proses Perijinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	NA	NA	NA	NA	1		
3.2.4.3	Lama Proses Perijinan Ijin Usaha Industri (IU)	NA	NA	NA	NA	7		
3.2.4.4	Lama Proses Perijinan Tanda Daftar Industri (TDI)	NA	NA	NA	NA	7		
3.2.4.5	Lama Proses Perijinan Ijin Mendirikan Bangunan	NA	NA	NA	NA	42		
3.2.5	Sumberdaya Manusia	NA	NA	NA	NA			
3.2.5.1	Kualitas Tenaga Kerja							
3.2.5.1.1	Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan Lulusan S1/S2/S3	1:12,78	1:12,53	1:10,94	1:9,26	1:9,08		
3.2.5.1.2	Rasio Ketergantungan	NA	38,21	39,43	39,49	40		



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



Secara umum komponen APBD Provinsi DKI Jakarta terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

BAB

III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum komponen APBD Provinsi DKI Jakarta terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Secara umum, kinerja APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 hingga tahun 2017 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pada tahun 2013 hingga tahun 2016 tidak mencapai target, sementara hanya realisasi pendapatan pada tahun 2012 dan tahun 2017 yang melebihi target. Sedangkan realisasi komponen belanja daerah tahun 2012 hingga tahun 2017 tidak mencapai target tahunannya. Untuk realisasi komponen penerimaan pembiayaan, hanya pada tahun 2013 yang targetnya terpenuhi, sedangkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan target dari tahun 2012 hingga 2017 tidak tercapai, hanya realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2012 hingga 2014 yang melebihi target. Dalam perspektif perencanaan, kondisi tersebut menunjukkan penetapan target yang terlalu optimis. Lebih lanjut dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Realisasi dan Proyeksi
Pendapatan Daerah, Belanja
Daerah, Penerimaan
Pembiayaan, dan Pengeluaran
Pembiayaan Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012-2017

Sumber: Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi
DKI Jakarta (Audited) Tahun
2012-2016 dan Laporan
Realisasai Anggaran
(Unaudited) Tahun 2017.

Tahun	Target	Realisasi	Persen	Bertambah/Berkurang
Pendapatan Daerah				
2012	33.650.011.958.617	35.379.180.051.989	105,14	1.729.168.093.372
2013	40.799.864.826.912	39.517.544.011.690	96,86	(1.282.320.815.222)
2014	65.042.099.407.000	43.824.300.560.665	67,38	(21.217.798.846.335)
2015	56.309.238.000.000	44.209.238.168.583	78,51	(12.099.999.831.417)
2016	57.161.248.465.732	53.784.706.312.513	94,09	(3.376.542.153.219)
2017*	62.517.744.026.535	64.132.247.593.845	102,58	1.614.503.567.310
Belanja Daerah				
2012	38.366.680.073.841	31.558.706.898.925	82,26	(6.807.973.174.916)
2013	46.578.865.629.904	38.301.502.396.759	82,23	(8.277.363.233.145)
2014	63.650.106.383.473	37.799.664.298.459	59,39	(25.864.447.791.798)
2015	59.685.552.609.233	43.031.322.947.557	72,10	(16.624.203.162.226)
2016	57.149.280.800.656	46.918.496.211.824	82,10	(10.230.784.588.832)
2017*	61.821.923.000.480	51.041.790.699.543	82,56	(10.780.132.300.937)
Penerimaan Pembiayaan				
2012	7.703.218.490.508	6.475.552.012.483	84,06	(1.227.666.478.024)
2013	9.463.721.530.814	9.463.721.530.814	100,00	-
2014	7.863.394.776.473	7.593.994.776.473	96,57	(269.400.000.000)
2015	9.459.467.609.233	9.209.781.909.639	97,36	(249.685.699.594)
2016	5.748.789.849.634	5.607.751.958.338	97,55	(141.037.891.296)
2017*	9.305.831.336.723	8.711.817.362.299	93,62	(593.837.477.422)
Pengeluaran Pembiayaan				
2012	2.986.550.375.284	832.303.634.733	27,87	(2.154.246.740.551)
2013	3.684.720.727.822	3.085.768.369.272	83,74	(598.952.358.550)
2014	9.255.387.800.000	4.456.716.331.883	48,15	(4.447.460.944.083)
2015	6.083.153.000.000	5.454.177.678.915	89,66	(628.975.321.085)
2016	5.544.998.000.000	4.557.358.688.274	82,19	(987.639.311.726)
2017*	10.001.652.362.778	9.303.641.224.699	93,02	(698.011.138.079)

A). Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang komponennya dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- Penerimaan pajak daerah
- Penerimaan retribusi daerah
- Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Adapun pendapatan dari Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer, terdiri dari:

- Dana bagi hasil
- Dana alokasi umum
- Dana alokasi khusus

Sedangkan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari:

- Bantuan/hibah
- Dana darurat
- Lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Analisis Pendapatan Daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang. Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 2012 hingga 2017 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 13,12 persen. Pada tahun 2012, pendapatan Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp35,37 Triliun, meningkat menjadi Rp64,81 Triliun pada tahun 2017.

Komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar yaitu Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang memiliki rata-rata pertumbuhan 24,55 persen selama kurun waktu 2012 hingga 2017. Selain Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pertumbuhan Pajak Daerah juga cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,86 persen. Salah satu faktor pengungkit eksternal pertumbuhan Pajak Daerah dikarenakan adanya pelimpahan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah pada tahun 2012. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain yaitu Hasil Pengelolaan

Keuangan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah yang selama tahun 2012 hingga 2017 tumbuh rata-rata sebesar 12,46 persen dan 0,26 persen.

Selain itu, komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah juga menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 6.200,25 persen, hal ini dikarenakan terjadi peningkatan jumlah hibah dari Rp3,73 Miliar pada tahun 2012, menjadi sebesar Rp1,14 Triliun pada tahun 2013. Pada 2017 Lain-lain Pendapatan Yang Sah kembali mengalami peningkatan menjadi Rp1,95 Triliun pada tahun 2017.

Jika melihat Tabel 3.2 keseluruhan komponen Pendapatan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan nilai pertumbuhan yang positif. Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2012 hingga tahun 2016 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012–2017 (Juta Rupiah)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasai Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

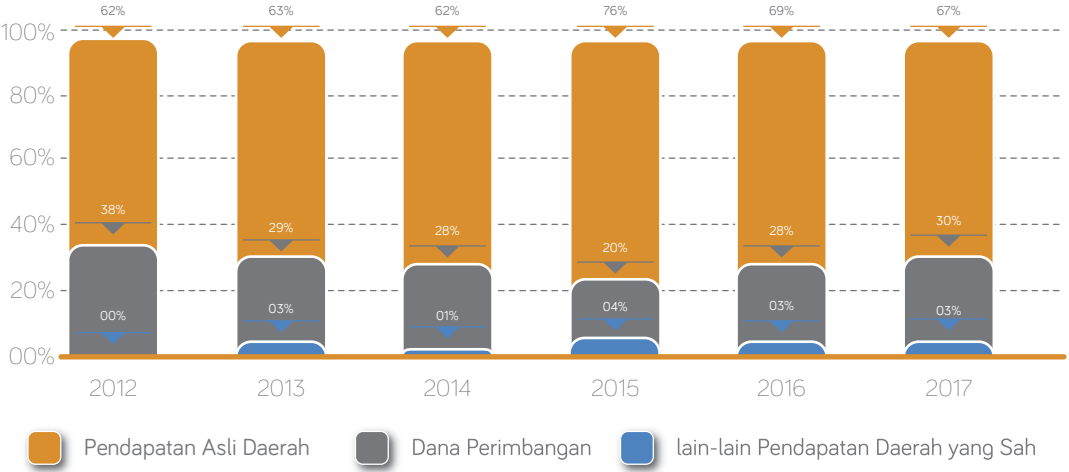
No.	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
1	PENDAPATAN	35.379.180	39.517.544	43.824.300	44.209.238	53.784.706	64.132.248	12,87%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	22.040.801	26.852.192	31.274.215	33.686.176	36.888.017	43.209.849	14,53%
1.1.1	Pajak Daerah	17.721.493	23.370.213	27.050.949	29.076.926	31.613.197	36.514.113	15,87%
1.1.2	Retribusi Daerah	1.820.435	333.787	515.162	459.459	675.475	624.420	0,26%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	351.823	397.234	465.979	527.280	303.204	489.478	12,46%
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	2.147.049	2.750.957	3.242.123	3.622.510	4.296.140	5.583.584	21,26%
1.2	Total Pendapatan Transfer	13.334.647	11.517.024	12.160.469	8.642.378	15.271.661	18.969.291	12,79%
1.2.1	Dana Perimbangan- Pendapatan Transfer	11.554.964	9.387.539	9.677.533	5.887.267	15.271.661	18.969.291	25,76%
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	10.984.787	8.863.205	9.279.068	5.751.741	12.304.612	16.605.608	19,25%
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil SDA	294.849	225.151	312.478	135.525	83.970	241.880	21,71%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	275.327	299.182	85.985	0	0	0	0,00%
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0	0	0	0	2.883.078	2.121.801	0,00%
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	1.779.682	2.129.484	2.482.936	2.755.110	0	0	0,00%
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0,00%

No.	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	1.779.682	2.129.484	2.482.936	2.755.110	0	0	0,00%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.731	1.148.327	389.614	1.880.682	1.625.027	1.953.781	6.200,25%
1.3.1	Hibah	3.731	1.148.327	389.614	1.880.682	1.625.027	1.953.781	6.200,25%
1.3.2	Dana darurat	0	0	0	0	0	0	0,00%

Jika dilihat dari tren persentase masing-masing komponen Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Gambar 3.1), dapat diketahui bahwa sumber pendapatan dari Dana Perimbangan mengalami penurunan tren dan sumber pendapatan dari PAD mengalami peningkatan tren. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi DKI Jakarta sangat baik dan mengarah pada kemandirian pendapatan daerah.

Gambar 3.1
Proporsi Realisasi Komponen
Pendapatan Daerah Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2012-2017

Sumber: Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi
DKI Jakarta (Audited) Tahun
2012-2016 dan Laporan
Realisasai Anggaran
(Unaudited) Tahun 2017.



Apabila dilihat dari proporsi komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (Gambar 3.1), terlihat bahwa pendapatan dari Pajak Daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.

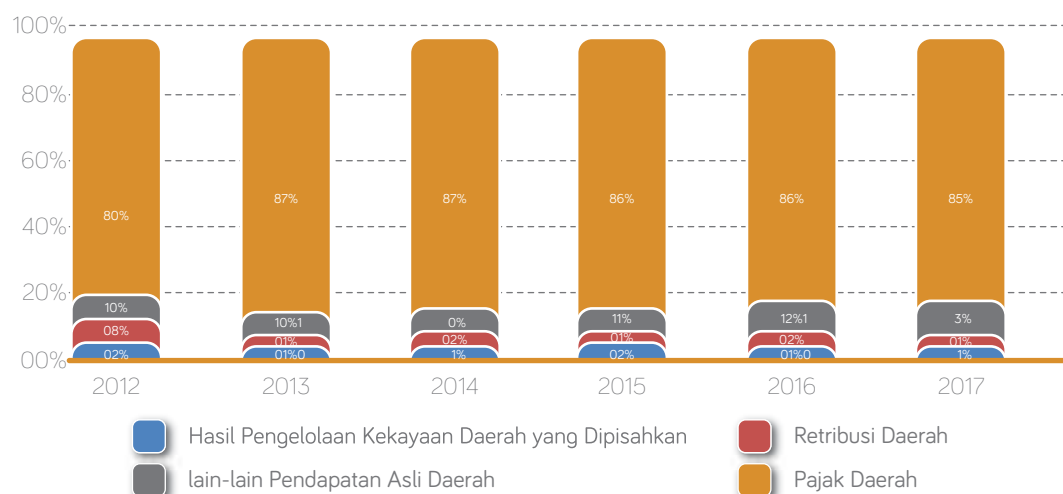
Meski demikian, persentase proporsi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami fluktuasi tren proporsi. Persentase proporsi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari yang semula sebesar 80,40 persen pada tahun 2012 meningkat menjadi 87,03 persen pada tahun 2013. Pada tahun-tahun selanjutnya, proporsi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan menjadi 86,50 persen pada tahun 2014, menjadi 84,50persen pada tahun 2017.

Sementara itu, proporsi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 2012-2017 mengalami fluktuasi, pada tahun 2012 sebesar 8,26 persen, kemudian menurun menjadi 1,24 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014 proporsi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kembali meningkat menjadi 1,65 persen, dan berkurang lagi pada tahun 2015 menjadi 1,36. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan proporsi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menjadi 1,83 persen dan kembali turun pada tahun 2017 menjadi 1,44 persen. Lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut:

Gambar 3.2

Proporsi Realisasi Komponen Pembentuk PAD Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun 2017



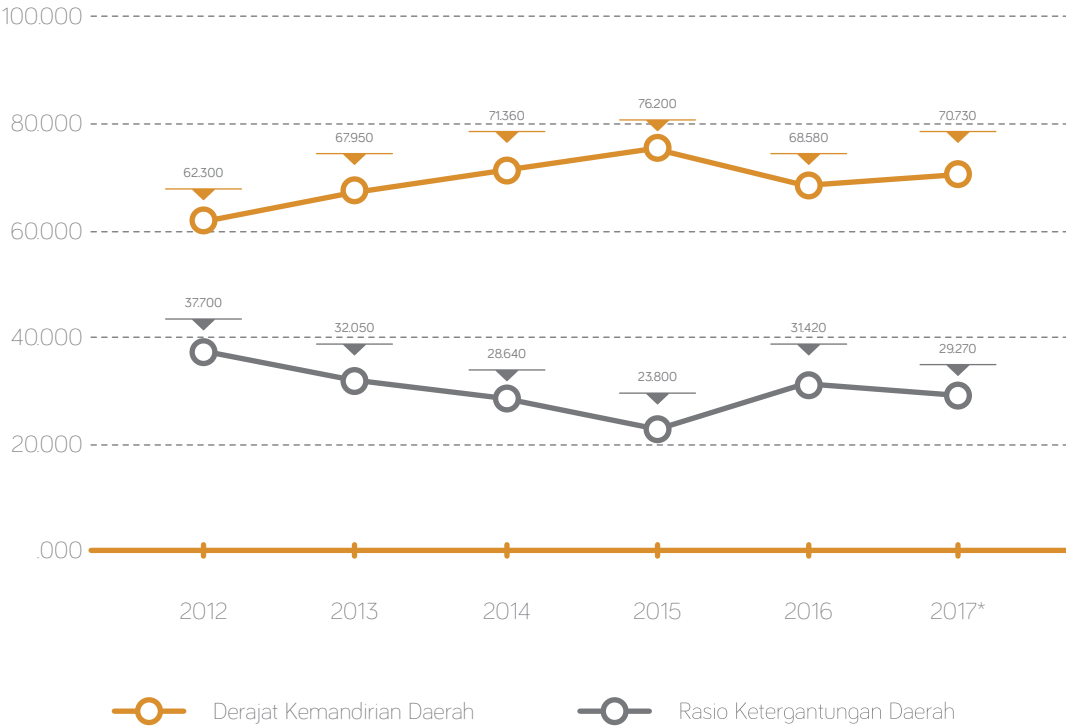
Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang rendah.

Perkembangan derajat kemandirian Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren meningkat yang semula sebesar 62,30 pada tahun 2012 menjadi 70,73 pada tahun 2017. Sedangkan rasio ketergantungan daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren menurun yang semula sebesar 37,70 pada tahun 2012 menjadi 29,27 pada tahun 2017. Kondisi tersebut menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta relatif baik, yang dapat mengarah pada terwujudnya kemandirian daerah.

Gambar 3.3

Derajat Kemandirian Daerah
dan Rasio Ketergantungan
Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi
DKI Jakarta (Audited) Tahun
2012-2016 dan Laporan
Realisasai Anggaran
(Unaudited) Tahun 2017.



B). Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2012-2016 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Perkembangan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan angka fluktuatif, yaitu peningkatan pada tahun 2010 ke 2013 dari Rp21,55 Triliun menjadi Rp38,30 Triliun. Pada tahun 2013 ke 2014 terjadi penurunan dari Rp38,30 Triliun menjadi Rp37,79 Triliun. Pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp43,03 Triliun, pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi Rp47,12 Triliun, dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp51,04 Triliun (Tabel 3.3).

Tabel 3.3

Rata-rata Pertumbuhan
Belanja Daerah Provinsi DKI
Jakarta Periode 2012-2017
(Juta Rupiah)

Sumber: Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi
DKI Jakarta (Audited) Tahun
2012-2016 dan Laporan
Realisasai Anggaran
(Unaudited) Tahun 2017.

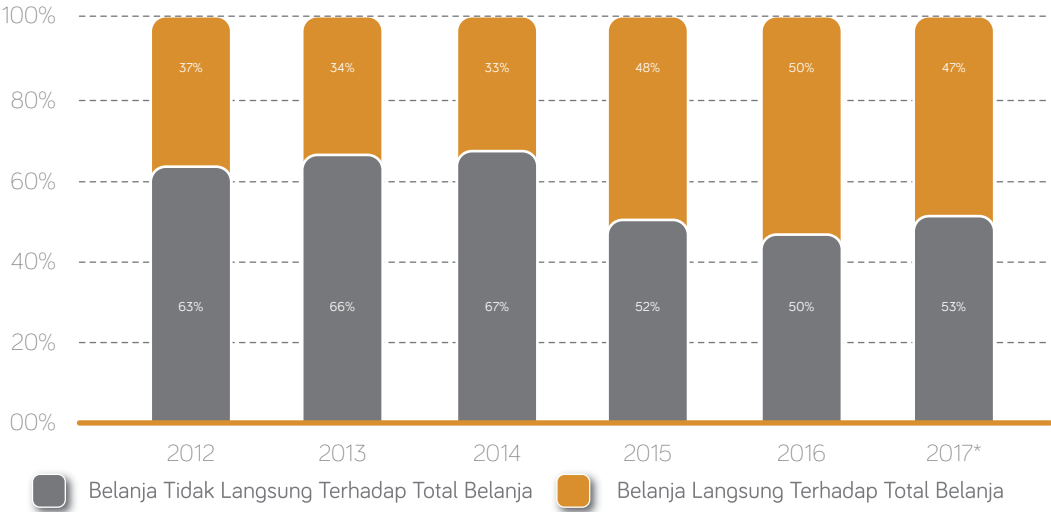
No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
1	Belanja Tidak Langsung	11.673.114	13.148.602	12.631.884	20.707.205	23.768.629	23.737.781	17,46%
1.1	Belanja Pegawai	9.688.176	10.046.180	10.472.324	15.866.062	18.027.767	17.624.763	14,17%
1.2	Belanja Bunga	3.172	2.191	1.218	5.478	11.739	31.897	112,09%
1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	659.081	903.898	1.405.914	0,00%
1.4	Belanja Hibah	1.933.097	1.999.968	1.462.044	1.717.428	2.161.217	1.112.365	(5,73%)
1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.993	1.044.598	680.155	2.087.123	2.452.948	3.202.680	1.330,33%
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	30.186	44.286	14.005	371.152	210.314	344.121	509,75%
1.7	Belanja Tidak Terduga	2.487	11.376	2.136	877	744	16.038	451,55%
2	Belanja Langsung	19.885.592	25.152.900	25.167.779	22.324.117	23.360.180	27.304.009	7,36%
2.1	Belanja Pegawai	1.397.773	1.815.488	2.132.264	1.446.281	1.332.040	2.617.374	20,75%
2.2	Belanja Barang dan jasa	9.703.452	12.641.399	12.624.396	10.633.820	13.062.670	13.642.146	8,30%
2.3	Belanja Modal	8.784.365	10.696.012	10.411.118	10.244.016	8.965.470	11.044.488	5,64%
Belanja Daerah		31.558.706	38.301.502	37.799.664	43.031.322	47.128.810	51.041.790	10,34%

Penggunaan terbesar dari Belanja Daerah terdapat pada Belanja Langsung, yaitu pada tahun 2012 tercatat sebesar 63,01 persen, kemudian meningkat menjadi 66,58 persen pada tahun 2014, mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 51,88 persen dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 49,57 (Gambar 3.4). Meski tren nilai Belanja Langsung mengalami peningkatan, namun tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta yang cenderung mengalami perlambatan sejak tahun 2012-2016 (Gambar 3.4).

Gambar 3.4

Proporsi Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasai Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.



C). Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2010 hingga tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4

Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasai Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
A	Penerimaan Pembiayaan							
1.	Penggunaan SILPA	6.470.618	9.463.721	7.593.994	9.160.897	4.933.519	7.706.289	11,44%
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0,00%
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.933	0	0	0	0	0	0,00%
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	48.884	335.756	1.599.542	0,00%

No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
5.	Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	338.475	0	0,00%
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00%
Jumlah Penerimaan		6.475.552	9.463.721	7.593.994	9.209.781	5.607.751	8.711.817	12,78%
B. Pengeluaran Pembiayaan								
1.	Pembentukan Dana Cadangan	49.061	54.037	73.101	78.999	81.575	79.391	10,81%
2.	Penyertaan Modal Investasi Pemda	618.480	2.988.845	4.412.981	5.371.093	4.475.782	9.207.434	108,33%
3.	Pembayaran Pokok Utang	8.169	8.169	8.169	4.084	0	16.814	0,00%
4.	Pembayaran Utang pihak ketiga	34.653	39.759	0	0	0	0	0,00%
5.	Pembayaran Utang pegawai	112	0	0	0	0	0	0,00%
6.	Pembayaran Utang biaya pemungutan	4.077	0	0	0	0	0	0,00%
7.	Pembayaran Utang STNK	3	0	0	0	0	0	0,00%
8.	Pembayaran Utang Pajak	62.307	0	0	0	0	0	0,00%
9.	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00%
10.	Pemberian Pinjaman Daerah	55.440	2.400	4.819	0	0	0	0,00%
Jumlah Pengeluaran		832.303	3.085.768	4.456.716	5.454.177	4.557.358	9.303.641	85,05%
Pembiayaan Netto		5.643.248	6.377.953	3.137.278	3.755.604	1.050.393	(591.824)	(49,33%)
SILPA		9.463.721	7.593.994	9.160.897	4.933.519	7.706.289	12.498.633	14,62%

Dari data tersebut terlihat bahwa penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta berfluktuasi setiap tahunnya, dimana SILPA memberikan kontribusi terbesar terhadap Penerimaan Pembiayaan Daerah. Sedangkan dari sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Provinsi DKI Jakarta, terlihat adanya peningkatan pengeluaran yang semula Rp832 Miliar pada tahun 2012, menjadi Rp9.306 Miliar tahun 2017. Pengeluaran yang besar sejak tahun 2013 disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Tabel 3.5

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017(Rupiah)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasai Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
I	ASET	387.303.033.097.835	405.660.082.519.504	425.353.600.919.701	421.061.389.203.531	442.977.223.000.927	475.755.289.354.389	3,35%
A	ASET LANCAR	11.156.562.127.012	11.831.945.211.932	14.872.136.514.127	17.450.490.675.026	22.623.365.067.145	24.033.570.895.197	21,61%
1	Kas di Kas Daerah	9.457.673.627.660	7.306.204.021.184	9.069.887.775.249	4.447.646.232.438	7.684.222.409.201	12.415.229.094.596	3,08%
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	58.812.066.657	49.351.994.3185	40.474.605.3001	816.807.645.256	22.118.245.979	82.398.267.423	(18,97%)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	2.260.860	13.951.913.625	23.308.500	0	230.712.654	1.021.317.543	0,00%
4	Kas dan Setara Kas BLUD	424.844.726.091	437.700.431.893	984.007.705.203	1.017.491.155.074	1.017.166.144.568	682.056.363.826	24,39%
5	Piutang Pajak	365.651.751.132	4.524.910.233.446	5.459.957.134.383	6.310.691.128.624	6.615.787.893.791	8.059.766.658.303	83,46%
6	Penyisihan Piutang Pajak	0	0	(2.579.100.761.179)	(2.735.632.100.316)	(3.332.144.371.361)	(4.242.519.951.392)	13,67%
7	Piutang retribusi	75.814.361.784	92.205.813.520	78.689.895.378	31.195.082.860	59.231.344.954	76.169.274.034	2,57%
8	Penyisihan Piutang Retribusi	0	0	(9.943.467.597)	(22.518.014.465)	(29.294.928.036)	(55.289.508.723)	71,64%
9	Piutang BLUD	67.883.800.527	74.196.737.748	233.460.046.307	356.383.764.220	370.867.306.668	515.889.568.433	52,88%
10	Penyisihan Piutang BLUD	0	0	(5.101.783.507)	(40.002.354.569)	(43.854.005.828)	(52.576.473.464)	193,19%
11	Piutang Dana Perimbangan	40.510.071.353	0	0	5.459.274.194.651	6.496.853.041.149	2.291.576.829.949	0,00%
12	Piutang Penjualan Barang Bergerak/ Kendaraan	1.705.415.742	1.296.397.959	971.534.331	971.534.331	971.534.331	0	8,44%
13	Penyisihan Piutang Penjualan Barang Bergerak/ Kendaraan	0	0	0	(4.857.672)	(4.857.672)	0	0,00%
14	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	14.799.266.672	14.614.290.897	16.145.560.786	17.103.762.096	17.099.762.096	17.074.937.096	23,26%
15	Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi	0	0	(5.175.429.900)	(5.198.326.738)	(5.196.326.737)	(5.171.501.737)	0,20%

No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
16	Piutang Kerjasama/ Pemanfaatan Aset	19.129.947.636	18.672.626.283	39.240.912.984	20.501.789.384	17.111.434.243	0	(0,37%)
17	Penyisihan Piutang Kerjasama/ Pemanfaatan Aset	0	0	0	(593.443.678)	(7.795.737.182)	0	0,00%
18	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	96.373.461.207	98.034.010.811	100.518.114.851	100.749.956.231	104.433.452.127	80.342.880.611	2,03%
19	Penyisihan Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	0	0	0	(592.332.844)	(20.355.151.9518)	(20.355.151.9518)	0,00%
20	Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN	68.002.646.550	62.188.169.818	46.499.582.131	44.114.013.599	43.440.001.183	43.015.535.436	(12,10%)
21	Piutang Penjualan Saham	0	0	0	0	0	3.335.432.039	0,00%
22	Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	2.366.309.441	2.938.272.353	3.632.571.620	3.674.517.300	3.844.678.244	3.418.826.975.789	12,90%
23	Piutang Lainnya	10.492.265.788	31.708.044.568	176.698.039.421	731.164.994.198	2.572.168.307.848	(34.353.671.283)	48,12%
24	Penyisihan Piutang Lainnya	0	0	(4.832.223.926)	(11.578.943.046)	(20.911.634.162)	14.333.820.706	108,03%
25	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(1.884.004.113.769)	(2.604.153.666.109)	0	3.599.020.000.000		0,00%
26	Aset Lancar Lainnya	14.923.237.564	51.703.819.928	228.768.215.755	158.298.034.978	233.889.610.831	31.151.242.190	98,97%
27	Persediaan	437.576.910.348	492.104.598.483	633.043.730.336	750.543.243.114	823.482.567.774	1.051.239.976.008	9,19%
B	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.191.505.580.814	11.055.970.412.626	16.101.293.405.632	22.508.090.659.786	28.808.880.033.985	38.000.681.325.823	36,75%
1	Investasi Non Permanen	449.259.739.803	447.211.521.471	403.394.131.382	409.862.523.178	70.545.184.800	70.545.184.800	(39,02%)
a	Investasi Dalam Dana Bergulir	889.968.530.527	892.368.530.527	897.187.591.237	897.187.591.237	558.634.400.664	558.634.400.664	(77,6%)
b	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(440.708.790.724)	(445.157.009.056)	(493.793.459.855)	(487.325.068.059)	(488.089.215.864)	(488.089.215.864)	2,59%
2	Investasi Permanen	6.742.245.841.011	10.608.758.891.155	15.697.899.274.250	22.098.228.136.608	28.538.334.849.185	37.930.136.141.023	40,64%
C	ASET TETAP	342.279.347.954.770	332.877.691.631.442	341.982.544.524.372	334.403.041.973.049	382.499.763.351.880	376.417.497.257.709	2,68%

No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
1	Tanah	279.151.046.794.830	271.561.924.821.489	273.519.641.092.661	284.068.689.312.488	295.047.301.522.144	313.503.706.589.888	1,03%
2	Peralatan dan Mesin	14.464.442.456.567	13.392.474.082.635	17.190.097.083.385	18.986.813.894.851	20.694.146.032.418	22.515.533.249.950	12,88%
3	Gedung dan Bangunan	21.566.584.083.436	15.566.967.164.876	17.384.759.492.812	24.169.792.568.590	25.196.220.526.094	30.586.688.285.483	7,31%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.831.416.473.846	29.357.168.861.315	29.731.234.210.492	32.306.882.017.848	35.571.427.457.658	40.429.814.311.774	10,21%
5	Aset tetap Lainnya	1.859.808.199.687	1.318.843.852.752	1.361.719.093.920	1.422.710.645.797	1.364.063.565.649	1.450.571.042.050	0,56%
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.406.049.946.404	1.680.312.848.375	2.795.093.551.102	2.629.578.816.582	4.626.604.247.817	7.002.386.632.470	12,24%
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0	0	(29.181.425.283.107)	(32.878.267.871.012)	(39.071.202.853.906)	0,00%
D	DANA CADANGAN	840.077.164.208	894.114.628.239	967.216.539.301	1.046.215.749.016	1.127.791.738.847	1.207.183.241.669	7,35%
1	Dana Cadangan	840.077.164.208	894.114.628.239	967.216.539.301	1.046.215.749.016	1.127.791.738.847	1.207.183.241.669	7,35%
E	ASET LAINNYA	25.835.540.271.031	49.000.360.635.265	51.430.409.936.269	45.653.550.146.654	40.995.690.680.082	36.096.356.633.991	10,09%
1	Tagihan Penjualan Angsuran	68.109.789.672	61.619.785.278	56.147.710.109	50.949.015.300	48.524.770.887	55.894.658.587	5,07%
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0	964.201.310	0	0	0	0,00%
3	Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih	0	0	(4.821.007)	0	0	0	0,00%
4	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	3.317.851.376.057	3.343.483.302.597	3.578.851.777.917	6.554.369.249.425	6.285.119.814.778	6.498.705.739.298	14,74%
5	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	(278.165.572.423)	(400.512.727.332)	(436.569.854.252)	0,00%
6	Aset Tidak Berwujud	41.639.162.110	86.147.710.157	191.045.494.586	200.362.096.132	220.728.943.724	251.037.392.127	75,67%
7	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0	0	(102.917.195.195)	(148.473.981.973)	(195.109.478.772)	0,00%
8	Aset di BP THR Lokasari	12.593.785.847	0	0	0	0	0	0,00%
9	Aset Lain-lain	22.395.346.157.345	45.509.109.837.233	47.603.405.573.354	40.223.272.327.802	36.863.408.468.608	32.202.682.879.931	10,75%
10	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0	0	0	(994.319.774.387)	(1.197.310.460.859)	(2.280.284.702.928)	0,00%

No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
II	KEWAJIBAN	903.875.313.321	1.086.634.987.381	577.594.425.006	956.577.417.224	1.485.383.731.060	2.630.092.602.456	15,73%
A	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	891.621.380.088	1.082.550.342.970	577.594.425.006	758.869.632.554	948.325.136.957	1.087.924.062.143	6,41%
1	Utang PFK	45.609.595.424	199.151.665.095	302.606.765.141	328.601.120.662	184.294.6101	1.055.450.066	(60,45%)
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga	919.895.960	551.937.576	183.979.192	0	0	0	(100,00%)
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok	8169.288.822	8.169.288.822	4.084.644.411	0	0	0	(100,00%)
4	Pendapatan Diterima Dimuka	14.790.800.740	17.465.217.829	19.492.721.268	82.396.090.395	499.741.678.825	514.602.035.851	106,18%
5	Utang Belanja	577.640.915.543	846.247.377.425	239.294.214.510	342.052.450.888	445.239.100.211	570.535.098.394	(6,30%)
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	244.490.883.599	10.964.856.223	11.932.100.484	5.819.970.609	1.501.393.820	1.731.477.832	(68,47%)
B	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	12.253.933.233	4.084.644.411	0	197.707.784.670	537.058.594.103	1.542.168.540.313	0,00%
1	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	12.253.933.233	4.084.644.411	0	169.192.675.455	504.949.300.724	1.493.839.011.587	0,00%
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	28.515.109.215	32.109.293.379	48.329.528.726	0,00%
III	EKUITAS DANA	386.399.157.784.514	404.573.447.532.123	424.776.006.494.695	420.104.811.786.307	441.491.839.269.867	473.125.196.751.933	3,32%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	387.303.033.097.835	405.660.082.519.504	425.353.600.919.701	421.061.389.203.531	442.977.223.000.927	475.755.289.354.389	3,35%

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio (Tabel 3.6). Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (*Leverage*), dan Rasio Aktivitas. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini adalah :

1. *Current Ratio* (rasio lancar) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya. Dari tabel 3.6 dapat ketahui bahwa Rasio lancar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada diatas angka 1, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.
2. *Quick Ratio* (rasio cair) yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid, sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat tabel 3.9, Rasio Cair, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta capaiannya lebih dari 1, artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.6
Hasil Perhitungan Neraca
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012-2016

Sumber: Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio lancar (current ratio)	1.251,27	1.092,97	2.574,84	2.299,54	2.299,54
2	Rasio quick (quick ratio)	1.202,19	1.047,51	2.465,24	2.200,63	2.200,63
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,23	0,27	0,14	0,23	0,23
4	Rasio hutang terhadap modal	0,23	0,27	0,14	0,23	0,23

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para kreditur. Rasio yang digunakan yaitu:

1. Rasio total hutang terhadap total aset, adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar

resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tergolong kecil, yaitu hanya 0,001447906 pada tahun 2010 dan 0,003353183 pada tahun 2016. Hal ini berarti kewajiban-kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah sangat kecil dibandingkan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan aset yang dimilikinya, pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya.

- .2. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur kebutuhan untuk berhutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri atau tidak bergantung pada pembiayaan dari kreditur. Dari tabel 3.6 diketahui bahwa rasio hutang terhadap modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tergolong baik dengan nilai rasio 0,001450005 pada tahun 2010 dan 0,003364465 pada tahun 2016.

Hasil analisis terhadap current ratio dan quick ratio atas keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kekuatan kemampuan keuangan yang baik. Demikian halnya dengan rasio total hutang terhadap aset yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan kapasitas keuangannya relatif cukup besar bila terdapat rencana peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini merupakan opsi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka lebih mendorong pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada publik.

RasioAktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Pada pemerintahan daerah, Rasio Aktivitas terdiri dari perhitungan Rata-rata Umur Piutang dan Rata-rata Umur Persediaan.

Rata-rata Umur Piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (mengubah piutang menjadi kas). Untuk tahun 2012, Rata-rata Umur Piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada pada nilai -0,62496. Hal ini terjadi karena terdapat pengurangan piutang di tahun 2012 yang kemudian membuat nilai Rata-rata Umur Piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada pada kisaran angka minus tersebut. Kemudian Rata-rata Umur Piutang ini mengalami fluktuasi mulai dari 15,45537 di tahun 2013; 3,00468 di tahun 2014; 36,34185 di tahun 2015; dan 12,77692 di tahun 2016.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2017, akan diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; serta Analisis Pembiayaan, yang diuraikan ke dalam analisis Sumber Penutup Defisit Riil, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung menurun dari tahun 2012 hingga 2014, namun pada tahun 2015 hingga tahun 2017 terjadi peningkatan. Pada tahun 2012, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 24,87persen, menurun menjadi 17,94 persen pada tahun 2014, namun meningkat menjadi 26,83 persen pada tahun 2015 dan 37,46 persen. Pada tahun 2017 terjadi penurunan kembali menjadi 33,54 persen (Tabel 3.7). Dengan menurunnya penggunaan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, diharapkan proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan cukup besar, sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

Tabel 3.7

Analisis Proporsi Belanja
Pemenuhan Kebutuhan
Aparatur Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012-2017 (Juta
Rupiah)

*Sumber: Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi
DKI Jakarta (Audited) Tahun
2012-2016 dan Laporan
Realisasai Anggaran
(Unaudited) Tahun 2017.*

No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
1.	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	10.286.142	11.140.294	13.078.480	17.647.037	19.359.807	20.242.344	14,98%
2.	Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	41.353.230	50.263.586	72.905.494	65.768.705	51.686.168	60.349.066	13,60%
Persentase		24,87%	22,16%	17,94%	26,83%	37,46%	33,54%	-

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit, dalam penganggaran dikenal Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis Pembiayaan Daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Surplus/defisit riil anggaran Provinsi DKI Jakarta yang disajikan pada tabel 3.8 menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki defisit anggaran pada tahun 2013 dan 2015. Sementara itu pada tahun 2012, 2014 dan 2016 anggaran DKI mengalami surplus.

Tabel 3.8

Defisit Riil AnggaranProvinsi
DKI Jakarta Tahun 2012-2017

*Sumber: Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi
DKI Jakarta (Audited) Tahun
2012-2016 dan Laporan
Realisasai Anggaran
(Unaudited)Tahun 2017.*

No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
1	Realisasi Pendapatan Daerah(juta Rp)	35.379.180	39.517.544	43.824.300	44.209.238	53.784.706	64.134.650	13,12%
Dikurangi realisasi:								
2	Belanja Daerah(juta Rp)	31.558.706	38.301.502	37.799.664	43.031.322	47.128.810	51.043.030	10,34%
3	Pengeluaran Pembiayaan (juta Rp)	832.303	3.085.768	4.456.716	5.454.177	4.557.358	9.306.035	84,06%
Surplus/Defisit Riil (juta Rp)		2.988.169	(1.869.726)	1.567.919	(4.276.262)	2.098.537	3.785.584	(157,57%)

Kemampuan Provinsi DKI Jakarta untuk menutup defisit riil dapat dilihat dari hasil analisis sumber penutup defisit riil pada tabel 3.9 di bawah ini:

Tabel 3.9

Analisis Sumber Penutup
Defisit Riil Anggaran Provinsi
DKI JakartaTahun 2012-2017
(Juta Rupiah)

*Sumber: Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi
DKI Jakarta (Audited) Tahun
2012-2016 dan Laporan
Realisasai Anggaran
(Unaudited)Tahun 2017.*

No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	35.379.180	39.517.544	43.824.300	44.209.238	53.784.706	64.805.863	13,12%
Dikurangi realisasi:								
2.	Belanja Daerah	31.558.706	38.301.502	37.799.664	43.031.322	47.128.810	51.043.030	10,34%
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	832.303	3.085.768	4.456.716	5.454.177	4.557.358	9.303.641	85,06%
A	Surplus/Defisit riil	2.988.169	(1.869.726)	1.567.919	(4.276.262)	2.098.537	3.785.584	(157,57%)
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:								
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	6.470.618	9.463.721	7.593.994	9.160.897	4.933.519	7.706.289	11,44%
5.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0,00%
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	4.993	0	0	0	0	0	0,00%
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	48.884	335.756	1.003.985	0,00%

No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	338.475	0	0,00%
9.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00%
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	6.475.612	9.463.721	7.593.994	9.209.781	5.607.751	8.711.817	12,78%
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	9.463.781	7.593.994	9.161.914	4.933.519	7.706.289	12.497.577	14,62%

Dari Tabel 3.9 terlihat bahwa pada tahun 2012 hingga tahun 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai SILPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit, ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup kuat untuk membiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Berdasarkan Tabel 3.9 analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut:

Tabel 3.10

Komposisi Penutup Defisit Riil
Anggaran Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012-2017

*Sumber: Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi
DKI Jakarta (Audited) Tahun
2012-2016 dan Laporan
Realisasai Anggaran
(Unaudited) Tahun 2017.*

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	216,54	(506,16)	484,34	(214,23)	235,09	331,97
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	(1,14)	16,00	26,78
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	316,71	(406,16)	584,34	(115,37)	367,22	330,14

B. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Berikut adalah gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2010 hingga 2016 (Tabel 3.11)

Tabel 3.11

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasai Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

No	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016		2017*	
		Juta Rp	% dari SiLPA	Juta Rp	% dari SiLPA	Juta Rp	% dari SiLPA	Juta Rp	% dari SiLPA	Juta Rp	% dari SiLPA	Juta Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	9.463.721	100,00	7.593.994	100,00	9.160.897	100,00	4.933.519	100,00	7.706.289	100,00	12.467.664	100,00
2	Pelampauan penerimaan PAD	1.517.368	16,03	548.094	7,22	(8.483.092)	(92,60)	(4.279.439)	(86,74)	(1.613.767)	(20,94)	1.522.461	17,61
3	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	1.778.086	18,79	(1.159.997)	(15,28)	(8.092.466)	(88,34)	(7.108.198)	(144,08)	(718.706)	(9,33)	(73.870)	2,19
4	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(1.566.286)	(16,55)	(670.417)	(8,83)	(4.642.239)	(50,67)	(712.362)	(14,44)	(1.044.068)	(13,55)	(73.710)	(1,45)
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	6.807.973	71,94	8.277.363	109,00	25.850.442	282,18	16.654.229	337,57	6.462.439	(83,86)	10.780.132	80,19
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	196.518	2,08	199.385	2,63	110.344	1,20	113.884	2,31	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.12

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015 (Juta Rupiah)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016.

No.	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Saldo kas neraca daerah	9.941.332	8.251.376	10.458.664	6.281.945
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	196.518	199.385	110.344	113.884
3	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran		9.463.721	7.593.994	9.160.897	4.933.519

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Tabel 3.13

Pengeluaran Periodik
Wajib dan Mengikat serta
Prioritas Utama Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012-2017 (Juta
Rupiah)

*Sumber: Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi
DKI Jakarta (Audited) Tahun
2012-2016 dan Laporan
Realisasai Anggaran
(Unaudited) Tahun 2017.*

No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
A	Belanja Tidak Langsung	11.673.114	13.148.602	12.631.884	20.707.205	23.768.629	23.707.536	17,46%
1	Gaji dan Tunjangan	8.061.669	8.262.088	8.295.383	13.688.201	15.837.994	15.490.248	16,28%
2	Tambahan Penghasilan PNS	78.822	76.862	53.664	3.137	37.798	31.325	192,19%
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	26.936	36.822	45.244	62.701	63.471	65.679	20,57%
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	446.913	431.602	447.563	477.938	472.834	478.814	1,45%
5	Biaya Kematian Pegawai	16.192	38.493	36.396	35.262	22.653	224	(1,12%)
6	Biaya Guru NIP 15	37.779	38.169	38.018	38.174	37.895	38.172	0,21%
7	Belanja Penghasilan Lainnya	1.019.862	1.162.142	1.462.455	1.295.723	1.305.652	1.313.055	5,94%

No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
8	Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat)	0	0	93.597	264.923	249.466	207.283	0,00%
9	Belanja Bunga	3.172	2.191	1.218	5.478	11.739	31.897	112,09%
10	Belanja Subsidi	0	0	0	659.081	903.896	1.405.914	0,00%
11	Belanja Hibah	1.933.097	1.999.968	1.462.044	1.717.428	2.161.217	1.112.365	(5,73%)
12	Belanja Bantuan Sosial	15.993	1.044.598	680.155	2.087.123	2.452.948	3.202.680	1.330,33%
13	Belanja Bantuan Keuangan	30.186	44.286	14.005	371.152	210.314	344.121	509,75%
14	Belanja Tidak Terduga	2.487	11.376	2.136	877	744	16.038	451,55%
B	Belanja Langsung	19.885.592	25.152.900	25.167.779	22.324.117	23.360.180	27.305.210	7,36%
C	Pengeluaran Pembiayaan	832.303	3.085.768	4.456.716	5.454.177	4.557.358	9.303.641	85,06%
1	Pembentukan Dana Cadangan	49.061	54.037	73.101	78.999	81.575	79.391	10,81%
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	618.477	2.981.402	4.370.626	5.371.093	4.475.782	9.207.434	108,12%
3	Pembayaran Pokok Utang	8.169	8.169	8.169	4.084	0	16.814	0,00%
4	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	101.041	39.759	0	0	0	0	0,00%
5	Pembayaran Utang Kepada Pegawai	112	0	0	0	0	0	0,00%
6	Pemberian Pinjaman Daerah	55.440	2.400	4.819	0	0	0	0,00%

3.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2022

3.3.2.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:(1)Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan nasional, pertumbuhan ekonomi Jakarta diperkirakan tumbuh membaik. Pertumbuhan didorong oleh perbaikan struktur ekonomi, perbaikan iklim investasi, pembiayaan dan pembangunan infrastruktur, implementasi paket kebijakan, peningkatan konsumsi Pemerintah dan rumah tangga, didukung oleh inflasi yang terjaga.

Inflasi terjaga dalam level yang rendah didukung perbaikan efisiensi baik dalam distribusi barang dan jasa, perbaikan manajemen stok, dan proses bisnis yang lebih tertata baik. Pengendalian inflasi Jakarta difokuskan pada 4K yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi untuk pengendalian ekspektasi. Dalam kaitan tersebut, pengendalian inflasi diarahkan baik untuk mengurangi dampak maupun frekuensi dari inflasi komoditas strategis. Inflasi tahun 2022 diperkirakan lebih rendah dari inflasi saat ini, dengan asumsi permasalahan struktural terkait infrastruktur telah diselesaikan dan proses tataniaga yang semakin efisien.

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional, serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah, pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta dan tingkat inflasi pada tahun 2018 hingga tahun 2022 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.14
Proyeksi Asumsi
Makroekonomi DKI Jakarta
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	6,3	6,6	6,7	6,9	7,0
2.	Inflasi (yoy persen ± 1 persen)	3,7	3,6	3,6	3,4	3,3

Sumber: Bank Indonesia
Kantor Perwakilan DKI
Jakarta, 2018

Dengan melihat proyeksi asumsi makroekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 hingga tahun 2022 serta melihat performa Pendapatan Daerah tahun 2013 hingga tahun 2017, pada masa yang akan datang Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih meningkat, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

A. Pajak Daerah

Intensifikasi:

1. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan Online System terhadap empat jenis Pajak Daerah, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir menggunakan *National Payment Gateway* (NPG), *Point of Sale* (POS), sistem Parkir Tapping dan CMS BRI .
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui:
 - a. Pendataan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Pajak Air Tanah, PAT dan Reklame
 - b. Melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis NomorInduk Kependudukan (NIK) terhadap PKB, BPHTB dan PBB
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):
 - 1) Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2
 - 2) Pemutakhiran data objek tanah dan bangunan
 - 3) Penilaian individual terhadap objek PBB-P2
3. Melakukan Pemeriksaan terhadap:
 - a. Wajib Pajak Self-Assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran masa minimal
 - b. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai Wajib Pajak PBB-KB
 - c. Penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak PPJ
4. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain:
 - a. Kendaraan bermotor Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui kegiatan Razia Gabungan dan kegiatan *Door-to-door*
 - b. Penyelenggaraan reklame yang Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak Reklame
 - c. PBB-P2 dan Jenis-jenis Pajak Daerah Lainnya
 - d. Melakukan cleansing data terhadap Piutang Pajak

- e. Melakukan pemasangan sticker atau plang bagi penunggak pajak
- f. Melakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) oleh Juru Sita

Ekstensifikasi:

1. Asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi:
 - a. Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Baru (KBm Baru) secara nasional rata-rata meningkat sebesar 1-2 persen serta peningkatan share penjualan KBm Baru di DKI Jakarta
 - b. Peningkatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
 - c. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2013-2017
 - d. Pertumbuhan penjualan properti rata-rata meningkat sebesar 2-2,5 persen
 - e. Perkembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) di lintasan MRT dan LRT
2. Melakukan Revisi Peraturan terkait Pajak Daerah:
 - a. Melakukan Revisi Peraturan Daerah terhadap Pajak Daerah
 - 1) Melakukan perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) melalui revisi Peraturan Daerah untuk penyerahan kendaraan bermotor pertama/baru (BBN-I) yang semula 10 persen menjadi 15 persen
 - 2) Melakukan perubahan tariff melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang semula 2,4-3 persen menjadi progresif sampai dengan 8 persen (berjenjang)
 - 3) Melakukan perubahan tariff melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Parkir yang semula 20 persen menjadi 30 persen
 - 4) Melakukan revisi Peraturan Daerah terhadap jenis pajak BPHTB antara lain:
 - Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai Dasar Pengenaan Pajak BPHTB
 - Perubahan tarif BPHTB untuk objek pajak atas transaksi Dana Investasi Real Estate (DIRE) dalam rangka peningkatan investasi

- b. Melakukan Revisi Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah:
- 1) Melakukan perubahan tarif Layanan Parkir Off-Street berdasarkan Zona Waktu dan Zona Tempat melalui revisi Peraturan Gubernur yang semula maksimal Rp5.000/jam menjadi maksimal Rp10.000/jam
 - 2) Perubahan Pajak Reklame atas:
 - Melakukan penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame melalui revisi Peraturan Gubernur
 - Perluasan objek reklame dan revisi Pergub Juklak Penyelenggaraan Reklame atas pembatasan kawasan pengendalian reklame khususnya pada kawasan kendali ketat
 - Mendorong kebijakan penyelenggaraan reklame Digital/LED pada kawasan kendali ketat
 - 3) Melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar rata-rata sebesar 15 persen melalui revisi Peraturan Gubernur
 - 4) Melakukan penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) serta perubahan cara perhitungan Pajak Air Tanah yang sebelumnya dikenakan secara progresif menjadi clustering sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah melalui revisi Peraturan Gubernur
 - 5) Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengenaan tarif layanan parkir off-street yang lebih tinggi terhadap Kendaraan Bermotor Belum Daftar Ulang (KBm BDU)
 - 6) Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang penerapan parkir tapping kepada seluruh pengelola parkir *off-street*
 - 7) Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pelaporan data transaksi usaha (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir) secara elektronik
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
- a. Melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Melakukan Peningkatan integritas dan kualitas SDM
 - c. Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan

4. Peningkatan koordinasi kelembagaan:
 - a. Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (*Tax Clearance*)
 - b. Koordinasi dalam rangka *Law Enforcement*
 - c. Koordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air
 - d. Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak
 - e. Koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (*One Map, One Data, One Policy*).

B. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

1. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
 - b. Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - c. Menerapkan transaksi non tunai;
 - d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - e. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
2. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a. Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti: Retribusi Izin Undang Undang Gangguan, Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - b. Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan/peremajaan.

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
2. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
3. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
4. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management*;
4. Mengoptimalkan pendapatan BLUD dengan penambahan dari RSUD Adhyaksa, RSUD Jati Padang dan RSUD Kebayoran Baru, yang sedang dalam proses pembentukan menjadi PPK BLUD.

D. Dana Perimbangan

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

E. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Koordinasi dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan SKPD/UKPD terkait MoU penarikan/pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Seluruh kebijakan Pendapatan Daerah yang telah dijabarkan akan diformulasikan sedemikian rupa, sehingga diperoleh proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15

Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2018

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Pendapatan Asli Daerah	46.215.508.023.737	53.072.726.848.619	57.945.638.535.083	63.466.592.768.907	70.268.735.109.075	11,07%
1.1	Pajak Daerah	39.770.000.000.000	46.155.000.000.000	50.480.000.000.000	55.430.000.000.000	61.630.000.000.000	11,60%
1.2	Retribusi Daerah	689.900.500.000	647.991.580.105	658.029.225.593	673.485.989.407	686.269.361.674	(0,07%)
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	539.928.000.000	701.401.000.000	847.202.000.000	1.000.083.240.000	1.178.599.213.200	21,65%
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.215.679.523.737	5.568.334.268.514	5.960.407.309.490	6.363.023.539.500	6.773.866.534.201	6,75%
2.	Dana Perimbangan	21.401.860.311.000	23.502.073.560.850	25.818.304.052.873	28.371.254.123.707	31.183.831.251.792	9,87%
2.1	Dana bagi hasil pajak	18.105.337.484.000	19.915.871.232.400	21.907.458.355.640	24.098.204.191.204	26.508.024.610.324	10,00%
2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	159.891.125.000	135.907.456.250	115.521.337.813	98.193.137.141	83.464.166.570	(15,00%)
2.3	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0,00%
2.4	Dana Alokasi Khusus	3.136.631.702.000	3.450.294.872.200	3.795.324.359.420	4.174.856.795.362	4.592.342.474.898	10,00%
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	57.614.920.000	3.423.215.848.635	3.689.404.623.659	5.228.604.006.995	13.700.000.000	1.447,83%
3.1	Hibah	57.614.920.000	3.423.215.848.635	3.689.404.623.659	5.228.604.006.995	13.700.000.000	1.447,83%
TOTAL PENDAPATAN		67.674.983.254.737	79.998.016.258.104	87.453.347.211.615	97.066.450.899.608	101.466.266.360.867	10,75%

3.3.2.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018-2022

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2018 hingga 2022 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2017 hingga tahun 2022 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
5. Mendorong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara
6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Subsidi dalam mendukung pelayanan publik;
 - b. Hibah untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
 - c. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d. Bantuan keuangan untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/ komitmen antar pemerintah daerah serta kepada partai politik sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Adapun ruang lingkup kerjasama daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.
7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 3.16

Proyeksi Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2018

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Tidak Langsung	30.994.017.280.389	31.788.079.844.893	32.713.533.957.861	34.639.250.751.899	35.300.917.111.473	3,32%
1.1	Belanja Pegawai	20.127.464.181.000	20.874.443.292.000	21.659.530.620.000	22.485.039.238.000	23.353.435.258.000	3,79%
1.2	Belanja Bunga	50.520.000.000	83.000.000.000	92.000.000.000	98.500.000.000	106.000.000.000	22,45%
1.3	Belanja Subsidi	4.210.500.000.000	3.946.317.040.000	4.011.293.160.000	4.273.705.260.000	4.583.024.660.000	2,29%
1.4	Belanja Hibah	1.802.081.420.379	1.997.870.654.598	2.014.765.416.516	2.796.565.938.681	2.223.520.996.635	7,51%
1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.183.309.062.000	4.232.651.062.000	4.282.147.062.000	4.331.643.062.000	4.381.139.062.000	1,16%
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	271.784.528.960	305.439.773.000	305.439.773.000	305.439.773.000	305.439.773.000	3,10%
1.7	Belanja Tidak Terduga	348.358.088.050	348.358.088.050	348.357.926.345	348.357.480.218	348.357.361.838	0,00%
2	Belanja Langsung	47.487.036.222.291	50.513.533.079.842	58.091.836.981.792	63.764.089.685.203	73.562.880.350.192	11,63%
2.1	Belanja Pegawai	3.144.721.741.810	3.459.193.915.991	3.805.113.307.590	4.185.624.638.349	4.604.187.102.184	10,00%
2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.035.707.633.058	21.181.622.860.309	24.641.001.816.850	27.714.540.229.038	31.614.495.355.334	12,15%
2.3	Belanja Modal	24.306.606.847.423	25.872.716.303.543	29.645.721.857.352	31.863.924.817.816	37.344.197.892.674	11,43%

3.3.2.3 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2022

Dalam penyertaan penganggaran Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada Kebijakan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 terdiri dari atas beberapa unsur pembentukan yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya; Penerimaan dari Obligasi Daerah; Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Pengembalian Investasi Dana Bergulir. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah; dan Pembayaran Pokok Utang. Adapun Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 hingga tahun 2022 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.17

Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2018

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
PEMBIAYAAN NETTO							
1.	Penerimaan Pembiayaan	16.753.793.247.943	9.835.536.741.896	8.292.801.788.385	7.936.585.100.392	13.692.240.639.133	2,81%
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	12.467.664.247.943	7.813.239.356.654	8.194.801.788.385	7.073.620.285.535	7.431.181.100.797	(10,27%)
1.2	Penerimaan dari Obligasi Daerah	0	0	0	0	0	0,00%
1.3	Penerimaan Pengembalian PMD (Jakpro)	650.000.000.000	0	0	0	0	0,00%
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.636.129.000.000	2.022.297.385.242	98.000.000.000	862.964.814.856	6.261.059.538.336	316,64%
1.5	Pengembalian Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0	0,00%
2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.947.723.000.000	7.531.940.075.265	4.940.778.060.347	6.599.695.562.898	6.294.709.538.336	5,30%
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	5.914.093.000.000	7.498.290.075.265	4.907.128.060.347	6.566.045.562.898	6.261.059.538.336	5,35%
2.1	Pembayaran Pokok Utang	33.630.000.000	33.650.000.000	33.650.000.000	33.650.000.000	33.650.000.000	0,01%

Selanjutnya, dilakukan analisis proyeksi pembiayaan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah;
4. Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan;
5. Asumsi penyerapan pendapatan rata-rata per tahun sebesar 100 persen;

6. Asumsi penyerapan belanja rata-rata per tahun berkisar antara 93,68 s.d. 96,31 persen yang antara lain dikarenakan adanya mekanisme pengadaan barang dan jasa (seperti sisa lelang, gagal lelang), harga satuan, efisiensi dan lain-lain;
7. Asumsi penyerapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan rata-rata per tahun sebesar 100 persen.

Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) hendaknya dimanfaatkan sesuai dengan amanat pasal 137 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;

3.3.2.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis Kerangka Pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung dan ke dalam pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang nilainya didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

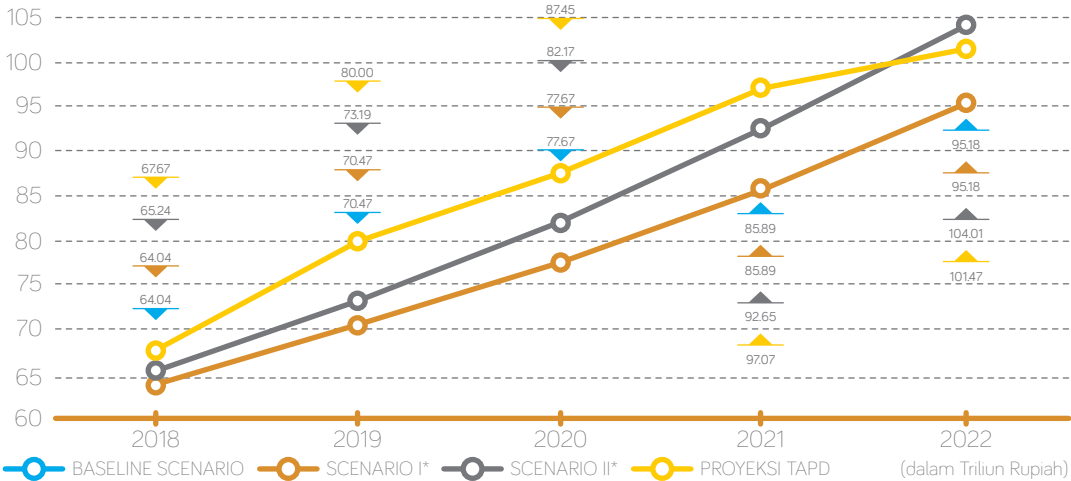
Dalam melakukan proyeksi APBD 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank Dunia melalui metode *Medium Term Fiscal Planning* (MTFF) dengan skenario dasar (baseline scenario, scenario I dan scenario II) dimana menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Asumsi proyeksi fiskal didasarkan pada proyeksi pertumbuhan PDRB yang diharapkan mencapai angka 7,0 persen pada tahun 2022
2. Pendapatan diasumsikan mengikuti tren tingkat elastisitas pajak (tahun 2012-2016) dan pertumbuhan PDRB harga konstan (tahun 2012-2016).
3. Belanja diproyeksikan tumbuh sejalan dengan PDRB nominal diluar penambahan pengeluaran untuk kegiatan prioritas baru

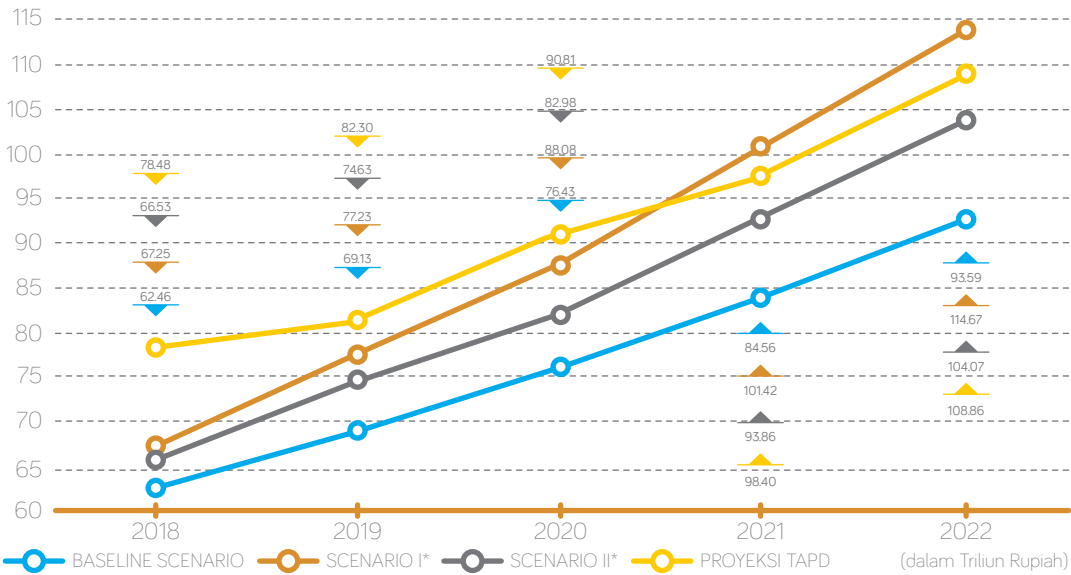
Namun demikian, proyeksi MTFF tersebut hanya merupakan landasan dalam proyeksi APBD berdasarkan kebutuhan riil pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Gambar 3.5

Gambaran Proyeksi
Pendapatan dan Proyeksi
Belanja versi World Bank
dan TAPD.



	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
BASELINE SCENARIO	64.04	70.74	77.67	85.89	95.18	393.25
SCENARIO I*	64.04	70.47	77.67	85.89	95.18	393.25
SCENARIO II*	65.24	73.19	82.17	92.65	104.01	417.26
PROYEKSI TAPD	67.67	80.00	87.45	97.07	101.47	490.17



	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
BASELINE SCENARIO	62.46	69.13	76.43	84.56	93.59	386.17
SCENARIO I*	67.25	77.23	88.08	101.42	114.67	448.65
SCENARIO II*	66.53	74.63	82.98	93.86	104.07	422.07
PROYEKSI TAPD	78.48	82.30	90.81	98.40	108.86	458.86

Proyeksi APBD tahun 2018 hingga tahun 2022 sebenarnya dihitung berdasarkan asumsi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan riil yang akan diperoleh selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, setelah melalui berbagai upaya perbaikan yang akan dilakukan. Demikian juga untuk pengeluaran dalam bentuk belanja dan pengeluaran pembiayaan, proyeksi telah memperhitungkan seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk mendanai program-program strategis yang akan dilaksanakan 5 tahun yang akan datang.

Khusus untuk tahun 2018, angka proyeksi APBD didasarkan pada RAPBD-P tahun 2018. Perhitungan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa kondisi riil APBD-P tahun 2018 akan lebih mencerminkan kondisi riil kapasitas fiskal daerah, mengingat pada saat penyusunan RPJMD ini telah diperoleh angka realisasi (audited) antara lain pelampauan pendapatan pada tahun 2007 serta SILPA yang jauh melebihi penetapan 2018.

Tabel 3.18

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2018

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
A	PENDAPATAN	67.674.983.254.737	79.998.016.258.104	87.453.347.211.615	97.066.450.899.608	101.466.266.360.867	10,76%
1.	Pendapatan Asli Daerah	46.215.508.023.737	53.072.726.848.619	57.945.638.535.083	63.466.592.768.907	70.268.735.109.075	11,07%
1.1	Pajak Daerah	39.770.000.000.000	46.155.000.000.000	50.480.000.000.000	55.430.000.000.000	61.630.000.000.000	11,60%
1.2	Retribusi Daerah	689.900.500.000	647.991.580.105	658.029.225.593	673.485.989.407	686.269.361.674	(0,07%)
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	539.928.000.000	701.401.000.000	847.202.000.000	1.000.083.240.000	1.178.599.213.200	21,65%
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.215.679.523.737	5.568.334.268.514	5.960.407.309.490	6.363.023.539.500	6.773.866.534.201	6,75%
2.	Dana Perimbangan	21.401.860.311.000	23.502.073.560.850	25.818.304.052.873	28.371.254.123.707	31.183.831.251.792	9,87%
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	18.105.337.484.000	19.915.871.232.400	21.907.458.355.640	24.098.204.191.204	26.508.024.610.324	10,00%
2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	159.891.125.000	135.907.456.250	115.521.337.813	98.193.137.141	83.464.166.570	(15,00%)
2.3	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Dana Alokasi Khusus	3.136.631.702.000	3.450.294.872.200	3.795.324.359.420	4.174.856.795.362	4.592.342.474.898	10,00%
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	57.614.920.000	3.423.215.848.635	3.689.404.623.659	5.228.604.006.995	13.700.000.000	1,447,83%
B	BELANJA	78.481.053.502.680	82.301.612.924.735	90.805.370.939.653	98.403.340.437.102	108.863.797.461.665	8,55%
1	Belanja Langsung	47.487.036.222.291	50.513.533.079.842	58.091.836.981.792	63.764.089.685.203	73.562.880.350.192	11,63%
2	Belanja Tidak Langsung	30.994.017.280.389	31.788.079.844.893	32.713.533.957.861	34.639.250.751.899	35.300.917.111.473	3,32%
C	PEMBIAYAAN	10.806.070.247.943	2.303.596.666.632	3.352.023.728.039	1.336.889.537.493	7.397.531.100.797	90,01%
1	Penerimaan Pembiayaan	16.753.793.247.943	9.835.536.741.896	8.292.801.788.385	7.936.585.100.392	13.692.240.639.133	2,81%
2	Pengeluaran Pembiayaan	5.947.723.000.000	7.531.940.075.265	4.940.778.060.347	6.599.695.562.898	6.294.709.538.336	5,30%
Total APBD		84.428.776.502.680	89.833.553.000.000	95.746.149.000.000	105.003.036.000.000	115.158.507.000.000	8,08%

Berdasarkan proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan untuk periode 2018–2022. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam Tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19

Kapasitas Riil Kemampuan
Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta untuk Mendanai
Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2018-2022 (Triliun Rupiah)

No.	Uraian	Proyeksi Tahun					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Pendapatan	67,63	76,59	83,78	91,85	101,47	421,31
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	12,47	7,81	8,19	7,07	7,43	42,98
Total penerimaan		80,10	84,40	91,97	98,92	108,90	464,29
Dikurangi:							
4.	Belanja tidak langsung	30,99	31,79	32,71	34,64	35,30	165,44
5.	Pengeluaran Pembiayaan	2,27	2,10	1,17	0,52	0,03	6,09
Kapasitas riil kemampuan keuangan		46,84	50,51	58,09	63,76	73,56	292,77

**Keterangan : termasuk untuk intervensi kegiatan KJP Plus, KJMU, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Pekerja, Subsidi Pangan, OK OTRIP, PSO MRT, PSO LRT.*

Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran merupakan komponen sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya yang masuk pada perhitungan pendapatan tahun berkenan. Pada tabel diatas menunjukkan nilai Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta yang positif atau surplus hal ini menunjukkan pemerintah daerah mampu untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dengan optimal atau dengan kata lain adanya potensi surplus penerimaan daerah dimana memberikan dampak positif terhadap pembiayaan pembangunan daerah.

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta relatif cukup besar. Meski demikian, proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Tabel 3.20

Rencana Kapasitas Riil
Kemampuan Keuangan
Daerah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2018-2022
(Triliun Rupiah)

No.	Uraian	Proyeksi Tahun					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	46,84	50,51	58,09	63,56	73,56	292,77
2.	Prioritas I	36,65	42,07	43,00	40,00	39,88	200,61
3.	Prioritas II	6,45	3,72	10,11	18,17	27,82	66,26
4.	Prioritas III	4,73	4,72	4,99	5,60	5,86	25,90

Keterangan :
Prioritas I = Belanja Prioritas Gubernur berdasarkan visi, misi serta 23 Janji Kerja
Prioritas II = Belanja di luar Prioritas I
Prioritas III = Belanja Operasional

Belanja Daerah dialokasikan dengan mendasarkan pada prioritas kebutuhan, yang terbagi menjadi Belanja prioritas dan belanja operasional. Belanja prioritas diklasifikasikan lagi dengan mempertimbangkan urgensi menjadi Belanja Prioritas I dan Belanja Prioritas II, dimana prioritas I merupakan belanja prioritas Gubernur berdasarkan 23 Janji Kerja yang dimana menjadi program unggulan. Sedangkan Belanja Prioritas II merupakan belanja urusan pemerintahan sesuai di luar Belanja Prioritas Gubernur. Selanjutnya Belanja Prioritas III merupakan belanja operasional Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan. Pengalokasian dana pada prioritas II harus memperhatikan pemenuhan dana pada Prioritas I terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Alokasi Belanja terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Prioritas I dan Belanja Tidak Langsung yang bersifat mengikat (*money follow priority programs*).



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH



Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi saat ini.

BAB

IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam bab IV ini diuraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Provinsi DKI Jakarta, khususnya untuk jangka waktu 2017-2022. Komponen pembentuk isu-isu strategis di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari : analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta dan faktor penentu keberhasilannya; hasil telaah terhadap dokumen RPJPD DKI Jakarta 2005- 2025; hasil telaah terhadap dokumen RPJMN 2015-2019; hasil telaah isu dari dunia internasional; dan analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/ bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi, dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penjelasan dalam bentuk skematik disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 4.1

Komponen Pembentuk Isu
Strategis Provinsi DKI Jakarta

*Sumber : Bappeda Provinsi
DKI Jakarta, 2017*



4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi saat ini. Dalam pembahasan ini, permasalahan

pembangunan yang dijabarkan ialah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDGs/ Standar Nasional/ dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya atau tren).

Secara umum, kondisi indikator sosial ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada saat ini (tahun 2016 dan/atau 2017) diantaranya sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM Provinsi DKI Jakarta sebesar 79,60 pada tahun 2016 merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan 33 provinsi lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta dapat dikatakan lebih baik dibandingkan 33 provinsi lainnya di Indonesia.
- Pertumbuhan PDRB
Perekonomian DKI Jakarta meningkat dari 5,85 persen pada tahun 2016 menjadi 6,22 persen pada tahun 2017. Struktur ekonomi Provinsi DKI Jakarta lebih ditunjang oleh sektor perdagangan besar dan eceran; konstruksi; serta industri pengolahan.
- Laju Inflasi
Laju inflasi Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 laju inflasi terkendali pada level 3,72 persen. Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang secara nasional.
- Opini Laporan Keuangan Daerah : WDP
Opini Laporan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 masih pada predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti.
- Nilai/Predikat AKIP
Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2016 sebesar 65,05 (predikat B). Penilaian tersebut diberikan dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan tahun 2016 lalu, meningkat dari tahun 2015 sebesar 60,13 (predikat B).
- Gini Ratio: 0,409
Indeks Gini DKI Jakarta mengalami peningkatan dari 0,397 pada tahun 2016 menjadi 0,409 pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam struktur masyarakat DKI Jakarta.

- Persentase Penduduk miskin
Persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta mengalami tren peningkatan meskipun masih di kisaran 3 (tiga) persen. Pada tahun 2017 Persentase Penduduk miskin sebesar 3,78 persen.
- Tingkat Pengangguran Terbuka: 7,14 persen
Tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 7,14 persen.
- Most Livable City Index : Average Tier City
Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) mengatakan Jakarta mendapat nilai indeks 62,6 soal kota layak huni atau Most Liveable City Index (MLCI) 2017. Nilai tersebut merupakan komposit dari nilai beberapa aspek diantaranya sebagai berikut : aspek pendidikan dengan indeks 74, persampahan 67, dan pengelolaan air bersih 72. aspek kemudahan memiliki rumah dengan nilai 46. aspek kualitas fasilitas pejalan kaki dengan indeks 54, aspek transportasi ada di angka 52 dan aspek keselamatan kota dalam rasa aman dari bencana di angka 59. Kualitas penataan PKL dengan indeks 52 dan keterlibatan warga dalam pembangunan dengan indeks 38.
- Indeks Kebahagiaan: 71,33 (peringkat 19 dari 34 Provinsi)
Indeks Kebahagiaan DKI Jakarta tahun 2017 sebesar 71,33 yang merupakan indeks komposit tiga dimensi, yaitu (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 71,60; (2) Indeks Dimensi Perasaan (Affect) sebesar 68,06; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 74,04.

Tabel 4.1

Permasalahan Pembangunan

No	Permasalahan Utama	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Pembangunan manusia	Ketimpangan pendapatan masih sedang	Tingkat Ketimpangan Provinsi DKI Jakarta 2012-2017	Ketimpangan menurun, namun Indeks Gini masih berada pada kategori Sedang (> 0,4)
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2012-2016	Rasio penduduk yang bekerja terus meningkat, tingkat pengangguran juga terus menurun. Namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami tren yang menurun sejak tahun 2012 (69,36 persen) hingga 2017 (61,97 persen).
		Belum mencapai wajib belajar 12 tahun	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2012-2016	Angka Rata-rata lama sekolah DKI Jakarta (10,88) sudah lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Namun belum menyentuh angka 12 tahun (wajib belajar 12 tahun).
		Masih kurangnya partisipasi sekolah SMP dan SMA	Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Tahun 2012-2016	APM SMP (87,17 persen) dan APM SMA (58,93 persen) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi anak pada usia tersebut yang bersekolah sesuai jenjangnya
		Masih ada sekolah yang belum memiliki akreditasi baik	Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA Terakreditasi A Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016	Pada tahun 2016 sekolah yang memperoleh akreditasi A belum mencapai 100 persen, SD sebanyak 70,50 persen, SMP/MTs sebanyak 59,11 persen, SMA/MA sebanyak 79,17 persen dan SMK sebanyak 53,54 pesen. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekolah yang belum memiliki kualitas baik dalam menjamin mutu pendidikan
		Menurunnya Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana	Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persentase sekolah yang memiliki saran dan prasaran sesuai SNP di DKI Jakarta memiliki angka yang terus menurun pada tahun 2016 menurun menjadi 68,21 persen dari 91,57 persen pada tahun 2013

No	Permasalahan Utama	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
		jumlah sarana sosial berkurang	Perkembangan Jumlah Sarana Sosial di DKI Jakarta	Sejak tahun 2012 hingga 2016 tren jumlah sarana sosial di DKI Jakarta mengalami pengurangan jumlah, pada tahun 2012 jumlah sarana sosial mencapai 606 dan pada tahun 2016 menurun menjadi 427 sarana social. Pengurangan tersebut sebagian besar dikarenakan penggabungan beberapa sarana sosial sejenis.
		Jumlah KDRT terus meningkat	Rasio KDRT	Rasio KDRT di DKI Jakarta mengalami tren yang stagnan tetapi jika dilihat dari jumlah KDRT dari tahun 2012 hingga 2016 jumlahnya terus meningkat dari 818 KDRT meningkat menjadi 892 KDRT.
		Jumlah kegiatan olahraga menurun	Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah kegiatan kepemudaan dalam setahun sangat sedikit di tahun 2015-2016. Jumlah kegiatan olahraga juga mengalami tren menurundari tahun 2012-2016. Jumlah lapangan olahraga kurang berkembang hanya berada pada kisaran 50, 51, dan 52 (2016)
2	Pembangunan ekonomi dan infrastruktur	Belum semua jalan memiliki trotoar	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar	Panjang jalan yang memiliki trotoar baru mencapai 8,61 persen pada tahun 2016.
		Jumlah daya tampung TPS stagnan	Rasio TPS per Satuan Penduduk	Jumlah daya tampung TPS tidak meningkat selama 5 tahun terakhir, namun jumlah penduduk meningkat terus. Hal ini mengakibatkan rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk terus menurun.
		Perusahaan yang menjalankan K3 mengalami penurunan	Keselamatan dan Perlindungan (Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 dari total perusahaan yang ada di wilayah kab/kot pada tahun n)	Jumlah perusahaan yang menjalankan K3 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 1.432 perusahaan dan tahun 2013 sebesar 1.397 perusahaan.

No	Permasalahan Utama	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
		Ketersediaan pangan utama menurun	Ketersediaan pangan utama	Dihat dari data ketersediaan pangan utama DKI Jakarta dari 2012-2016 memiliki tren yang cenderung menurun.
		Penanganan produksi sampah belum 100 persen	Persentase Penanganan Sampah	Penanganan produksi sampah masih belum mencapai 100 persen atau baru 83,78 persen (2016)
		Angkutan darat belum bisa memenuhi kebutuhan penumpang (<i>lack of supply</i>)	Persentase Angkutan Darat	Persentase jumlah angkutan darat terhadap penumpang angkutan darat hanya sebesar 0,06 persen pada tahun 2016. Angkutan darat belum bisa memenuhi kebutuhan penumpang (<i>lack of supply</i>)
		Panjang Jalan yang masih kurang	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan masih berada pada angka 0,35 persen (2016) dan jumlahnya terus menurun dari tahun 2012 yang memiliki rasio 0,48. Hal ini bisa dipandang melalui 2 perspektif, yaitu Panjang Jalan yang masih kurang, atau pengguna kendaraan yang terlalu banyak
3.	Integritas Aparatur	Opini laporan keuangan belum WTP	Opini BPK Atas LKPD	Opini BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum mencapai WTP (masih WDP)
4.	Kota Lestari	Kondisi air situ/waduk tercemar berat	Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk berdasarkan Indeks Pencemaran	Kondisi air situ/waduk berdasarkan pemantauan tahun 2012-2016 di DKI Jakarta mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada kondisi tercemar berat pada tahun 2016 meningkat menjadi 29 persen dari 10 persen pada tahun 2015
		kualitas air sungai mengalami penurunan	Status Mutu Pemantauan Air Sungai berdasarkan Indeks Pencemaran Provinsi DKI Jakarta	Pada tahun 2016 kualitas air sungai mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh air limbah domestic (70 persen) dan kegiatan lain (30 persen)

No	Permasalahan Utama	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
		Permukiman yang tertata berkurang	Persentase Luas Permukiman yang Tertata	Persentase luas permukiman yang tertata di DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga 2015 mengalami penurunan dari 0,57 persen pada tahun 2012 menjadi 0,14 persen pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya penyelesaian mengenai penataan permukiman
		Belum semua warga memiliki rumah berkategori layak	Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Rumah Tangga	Rasio Rumah Layak Huni masih berada di angka 90,55 persen (2015). Artinya terdapat 9,45 persen rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak
		Pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL) belum 100 persen	Jumlah Kegiatan yang Diawasi dalam rangka Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Terkait dengan Izin Usaha, masih banyak kegiatan yang telah beroperasi dan telah memiliki Izin Usaha tetapi belum memiliki dokumen lingkungan, dimana sebesar 75 persen kegiatan konstruksi dan telah beroperasi yang sudah memiliki dokumen lingkungan, sedangkan 25 persen belum memiliki dokumen lingkungan

4.2 Penelaahan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang DKI Jakarta dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah “*Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global*”. Visi tersebut diwujudkan dengan 6 misi, yakni : Misi 1 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah; Misi 2 Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas; Misi 3 Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya; Misi 4 Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam; Misi 5 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan; Misi 6 Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.

Adapun tujuan RPJMD periode 2017-2022 (Tahap Ke-4) adalah memantapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode 2013-2017, dengan fokus pada pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan, dengan terus memantapkan daya saing global. Pembangunan pada periode ini diarahkan pada :

A. Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Kota Jakarta

1. Sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi berfungsi dengan baik dalam meminimalkan kemacetan dan efisiensi mobilitas kota melalui :
 - Peningkatan sistem jaringan transportasi terpadu berupa berfungsinya 15 koridor *Bus Rapid Transit* (BRT) dan *Light Rapid Transit* (LRT) secara mantap, efektif dan efisien, berfungsinya *Mass Rapid Transit* (MRT) *North-South Line* koridor Lebak Bulus – Ancol secara optimal, dibangunnya MRT *East-West Line* koridor Kembangan – Ujung Menteng, yang kesemuanya terintegrasi juga dengan Kereta Lingkar Jakarta dan sistem transportasi pelabuhan.
 - Peningkatan dan pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) modern sehingga dapat mendukung mobilitas masyarakat secara efektif dan efisien.
2. Menghindari Banjir dan mengurangi/mengendalikan genangan melalui :

Pemantapan sistem tata air dan drainase, pemeliharaan badan sungai dan kanal dari sampah dan limbah, serta menjaga luasan badan air permukaan waduk dan situ.

3. Pengolahan dan Pengendalian Sampah dan Limbah melalui :
 - Pengembangan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) dengan teknologi yang lebih modern dan pemantapan sistem pengolahan sampah dan limbah terpadu berupa *solid waste treatment and final disposal* serta pengembangan sistem sanitasi (*sewerage system*) kota dengan area cakupan seluruh kota;
 - Penguatan kerjasama pengelolaan sampah dan limbah dengan pemerintah daerah sekitar juga dilakukan dalam menciptakan sistem pengolahan sampah dan limbah yang terintegrasi dengan daerah sekitar.
4. Menjamin Kebutuhan Air Bersih/Air Minum melalui :

Pembangunan jaringan air bersih yang mencakup seluruh wilayah kota dan pengembangan penyediaan sistem jaringan air minum kota.
5. Menjamin Kebutuhan Energi melalui :

Penguatan kebijakan efisiensi energi serta prasarana dan sarana sumber energi baru dan terbarukan yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan energi kota.
6. Pemantapan Pemenuhan Kebutuhan Hunian yang Layak melalui :

Pengembangan hunian vertikal yang terintegrasi dengan tata ruang kota serta penciptaan lingkungan kota yang bebas kumuh merupakan prioritas dalam pembangunan permukiman di Jakarta.
7. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui :

Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana perdagangan diantaranya pemantapan pengembangan pelabuhan dan berfungsinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara efektif dan efisien yang mampu meningkatkan pengembangan ekonomi.

B. Pemantapan Stabilitas Perekonomian Jakarta

Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan mantap dengan tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan serta inklusifitas. Struktur ekonomi semakin terdiversifikasi sehingga menjadi semakin kokoh dan mantap. Produk masyarakat semakin berkualitas karena semakin berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksinya. Selain itu, dalam melakukan kegiatan ekonomi, masyarakat semakin mampu dalam menggunakan sumberdaya secara efisien dan efektif. Daya beli masyarakat terkelola dengan baik sehingga tidak mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terwujud melalui :

1. Pemantapan sistem distribusi barang kebutuhan masyarakat Jakarta;
2. Berfungsinya lembaga ketahanan pangan secara profesional sehingga dapat meningkatkan stabilitas ketersediaan pangan;
3. Berfungsinya secara mantap kawasan ekonomi;
4. Beroperasi dan berfungsinya lembaga perekonomian profesional yang mendukung masyarakat;
5. Menjaga tingkat pengangguran dalam batas tertentu sehingga masih mampu mendukung kegiatan produksi, sehingga perekonomian tetap sehat dan mantap;
6. Meningkatkan iklim investasi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas;
7. Menyediakan sistem perijinan usaha yang terintegrasi dengan sistem kegiatan ekonomi lainnya sehingga perekonomian terus tumbuh berkelanjutan, hal ini ditandai dengan wirausaha dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta kelompok kelas profesional semakin mantap dan berkualitas.

C. Pemantapan Ketahanan Sosial Budaya

Untuk mewujudkan pemantapan ketahanan sosial budaya diperlukan :

1. Pemantapan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta untuk pendidikan yang kualitas dan mampu bersaing. Selain itu kualitas pendidikan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mendukung pembangunan secara keseluruhan;
2. Mengarahkan warga Jakarta untuk menjadi warga yang lebih berbudaya dalam lingkungan multikultur termasuk kelompok pemuda melalui revitalisasi kelembagaan pemuda sehingga harmonisasi hubungan masyarakat dalam budaya multikultur semakin mantap;
3. Pemantapan pengarusutamaan gender dan anak melalui kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran dengan mengedepankan proses partisipatif;
4. Menyediakan prasarana dan sarana kesehatan yang mencukupi serta menyediakan kebijakan kesehatan yang komprehensif sehingga derajat kesehatan warga Jakarta semakin mantap.

D. Pemantapan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup Dan Sumberdaya Alam

Pemantapan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam diupayakan semakin diperkuat menuju lingkungan kota yang berkelanjutan, melalui:

1. Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan menjadikan lingkungan perkotaan menjadi lebih bersih, sehat dan berkualitas;
2. Berbagai kebijakan dan rencana aksi diterapkan dalam memperkuat antisipasi perubahan iklim demi pengurangan emisi gas rumah kaca. Pembangunan Jakarta *Coastal Defense Strategy* (JCDS) terus dilaksanakan dan dikembangkan;
3. Efisiensi pemanfaatan sumber daya energi dan air tanah diperkuat dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam bentuk penguatan kebijakan efisiensi energi dan pengurangan pemanfaatan air tanah menjadi pemanfaatan air olahan (*recycle*) dan air hujan menggunakan sistem tadah hujan (*rain water harvesting*) sehingga optimalisasi daya dukung dan daya tampung kota dapat terwujud;
4. Penggunaan energi terbarukan pada sebagian besar sarana transportasi umum dan penerapan kebijakan energi efisiensi pada sebagian besar gedung-gedung bertingkat, dalam rangka menuju kota berketahanan energi;
5. Melakukan penguatan kawasan lindung, hutan mangrove, dan daerah resapan air yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem kota dan mengurangi risiko degradasi lingkungan;
6. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menciptakan badan air permukaan (sungai, kanal, waduk, situ, dan saluran) yang bebas sampah sehingga kualitas air sungai semakin membaik di atas baku mutu lingkungan, disamping itu juga merupakan upaya mitigasi bencana dan manajemen pengelolaan bencana (*disaster management*) kota.

E. Pemantapan Kualitas Organisasi Pemerintah

Pemantapan kualitas organisasi pemerintah diarahkan mampu melayani masyarakat sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, melalui :

1. Pemberian kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan didukung oleh ketatalaksanaan yang tangguh;
2. Memantapkan akuntabilitas publik dalam hal pelayanan masyarakat;
3. Memantapkan struktur birokrasi dan aparatur, hubungan antar lembaga, BUMD dan swasta semakin kokoh sehingga menghilangkan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, serta mengurangi ekonomi biaya tinggi dan konflik kepentingan.

F. Pengembangan Kapasitas Ide, Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Jakarta

Pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta secara berkelanjutan dengan memanfaatkan jaringan regional dan global sehingga hasilnya lebih berdaya guna

dan berhasil guna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemantapan kapasitas dan kualitas sumber daya daerah untuk mendukung pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sesuai dengan kubutuhan masyarakat Jakarta sehingga hasil lebih berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian akan mendorong kemampuan dan keunggulan kompetitif untuk bersaing secara global sehingga meningkatkan nilai ekonomi daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan pengembangan kreativitas dan inovasi pada periode ini diarahkan untuk pemantapan apresiasi. Berdasarkan RPJPD 2005-2025, pada periode tahun 2017-2022 proyeksi jumlah penduduk mencapai 10,6 – 11 juta dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6 – 8,2 persen dan PDRB per kapita Rp.195 juta – Rp.280 juta per tahun. Kondisi ini diproyeksikan mampu mengendalikan tingkat kemiskinan sebesar 2,7-3,1 persen. Selain itu, pada periode ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan mencapai 82,5 – 84,1.

4.3 Penelaahan RPJMN 2015-2019

Amanah pembangunan nasional tahun 2015-2019 untuk Provinsi DKI Jakarta tercantum dalam RPJMN Buku III mengenai Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi DKI Jakarta. Secara eksplisit, kegiatan strategis tersebut mencakup 8 bidang beserta kegiatan-kegiatan pada setiap bidangnya, dengan uraian sebagaimana tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2
Kegiatan Strategis Nasional
Provinsi DKI Jakarta Dalam
RPJMN 2015-2019

Sumber : Buku III RPJMN
2015-2019

No	Bidang	Kegiatan
1	Perhubungan / Transportasi	<p>Perkeretaapian diperuntukan bagi pengangkutan penumpang dan barang:</p> <p>(a) Pembangunan jalur lingkaran KA layang (elevated loopline) Jabodetabek; (b) Pembangunan MRT North-South antara Lebak Bulus - Kampung Bandan; (c) Pembangunan MRT East-West; (d) Pembangunan jalur KA dari Stasiun Pasosok menuju Dermaga Peti Kemas JICT/KOJA; (e) Monorail Jakarta koridor green line (circular & extension line) oleh Pemda DKI Jakarta; (f) Pembangunan jalur KA antara Batu Ceper - Bandara Soetta; (g) Pembangunan Jalur KA Bandara Soekarno Hatta - Halim.</p> <p>Perhubungan Darat :</p> <p>(a) Pengembangan BRT Transjakarta.</p> <p>Perhubungan Laut :</p> <p>(a) Pembangunan Dermaga Kali Baru Utara (Tahap 1) - New Priok; (b) Pengembangan Terminal Multipurpose di area Reklamasi Ancol Timur.</p> <p>Jalan :</p> <p>(a) Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Akses Tanjung Priok (E2, E2 A, dan NS) dan Akses Dry Port Cikarang; (b) Pembangunan Flyover Dalam Kota (Semanggi, RE Martadinata, Pinang Baris, Pancoran, Kuningan, Sudirman); (c) Pembangunan FO/Underpass Perlintasan KA; (d) Pembangunan 6 (enam) Ruas Jalan Tol DKI Jakarta (Semanan - Sunter, Sunter - Pulo Gebang, Duri Pulo-Kampung Melayu, Kemayoran- Kampung Melayu, Ulu-Jami-Tanah Abang, Pasar Minggu - Casablanca).</p>
2	Energi	Penambahan SPBG dan Jaringan Gas kota.

No	Bidang	Kegiatan
3	Telekomunikasi dan Informatika	(a) Pembangunan serat optik antar seluruh kabupaten/kota; (b) Pengembangan transmisi penyiaran TVRI.
4	Sumber Daya Air	(a) Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke KBT Jakarta; (b) Normalisasi Kali Ciliwung Paket 1 Jakarta; (c) Normalisasi Kali Ciliwung Paket 2 Jakarta; (d) Normalisasi Kali Ciliwung Paket 3 Jakarta; (e) Normalisasi Kali Ciliwung Paket 4 Jakarta; (f) Perbaikan dan Pengaturan Kali Krukut Jakarta; (g) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cipinang Jakarta; (h) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cisadane Jakarta; (i) Perbaikan dan Pengaturan Kali Buaran, Jatikramat, Cakung Jakarta; (j) Perbaikan dan Pengaturan Cikarang Bekasi Laut Jakarta; (k) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cilemah Abang Jakarta; (l) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cimanceuri Jakarta; (m) Pembangunan Cengkareng Drain 2 Jakarta; (n) JUFMP/JEDI Paket 2A Cengkareng Floodway Jakarta; (o) JUFMP/JEDI Paket 2B Lower Sunter Jakarta; (p) JUFMP/JEDI Paket 6 Upper Sunter dan West Canal Flood Jakarta; (q) National Capital Integrated Coastal Defence (Tanggul Laut) Jakarta; (r) O&P Banjir Kanal Barat Jakarta; (s) O&P Banjir Kanal Timur Jakarta.
5	Sanitasi	Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta.
6	Pendidikan	(a) Penyediaan/pelatihan Pendidik Layanan Khusus (Guru Pembimbing Khusus pada sekolah inklusi); (b) Penyediaan Layanan PAUD.
7	Kesehatan	(a) Pengendalian Penyakit Menular: Pengendalian HIV dan AIDS, Pengendalian wabah antardaerah (Jabodetabek) seperti flu burung; (b) Jaminan Kesehatan Nasional; (c) Kebutuhan tenaga kesehatan di RSUD Kep. Seribu (dokter spesialis anak dan spesialis kandungan); (d) Kebutuhan tenaga spesialis untuk mengoperasikan hiperbarik (terapi oksigen).
8	Perumahan	Pembangunan Rusunaswa di Pasar Minggu dan Pasar Rumput.

4.4 Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya

Tabel 4.3

Identifikasi RPJMD
Daerah Lain

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Ket
1.	Provinsi Jawa Barat	2013-2018	<ul style="list-style-type: none"> Misi Kedua “Membangun Perkonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan”, Bidang Perdagangan, disebutkan kebijakan yang terkait dengan Provinsi DKI Jakarta, yakni “Pembangunan Sentra Agroindustri di Perbatasan DKI Jakarta”. Selanjutnya, pada Misi Keempat “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan”, Bidang Perhubungan, disebutkan kebijakan yang terkait dengan Provinsi DKI Jakarta, yakni “Mendorong pembangunan jalur Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung – Kertajati – Cirebon”. 	
2	Kota Bogor	2015-2019	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya jumlah penduduk merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bogor khususnya pada bidang kependudukan dan catatan sipil. Jumlah penduduk di Kota Bogor semakin meningkat dengan perkembangan penduduk yang semakin padat. Rasio kepadatan penduduk per km² mencapai 6.000 jiwa yang kemudian di tahun 2012 kepadatan penduduk Kota Bogor mencapai 8.480 orang per km². Dalam dokumen RPJP Kota Bogor 2005-2025 dinyatakan bahwa Kota Bogor sebagai Kota penyangga ibukota diarahkan untuk dapat menampung 1,5 juta jiwa pada tahun 2025. Kontribusi pertumbuhan penduduk ini semakin nyata berhubungan dengan tingginya pula tingkat migrasi wilayah-wilayah yang menjadi satelit bagi DKI Jakarta. 	
3	Kota Depok	2011-2016	<ul style="list-style-type: none"> Pembentuk inflasi Kota Depok relatif berbeda dengan kota lainnya di Jabar, yakni biaya transportasi, biaya tempat tinggal, dan harga makanan menjadi penyumbang utama. Karakteristik inflasi ini relatif sama dengan Jakarta, karena Depok merupakan salah satu penyangga Jakarta. Untuk meningkatkan pendapatan, Kota Depok berpeluang meningkatkan nilai pajak dan retribusi misalnya dari mutasi pajak kendaraan bermotor yang berasal dari Jakarta ke Depok. Hal ini tertuang dalam Misi ke-2: mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, dengan sasaran: Meningkatkan penerimaan daerah secara optimal, strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan yang berasal dari sumber lain. 	

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Ket
			<ul style="list-style-type: none"> Dari sisi transportasi, lalu lintas Angkutan Penumpang Kereta Api merupakan alat transportasi antar kota yang paling banyak diminati karena biayanya yang relatif murah, daya angkut yang besar serta lebih cepat sampai di tujuan. Di Kota Depok terdapat 5 Stasiun Kereta Api yakni Stasiun Kereta Api Pondok Cina, UI, Depok Baru, Depok Lama, dan Citayam sedangkan rute yang dilayani saat ini adalah Depok – Angke, Depok – Bekasi, Depok – Bojong Gede, Depok – Jakarta Kota, Depok – Manggarai dan Depok – Tanah Abang. Sebagian penduduk Kota Depok adalah warga komuter yang bermata pencaharian di Jakarta dan sekitarnya, mengakibatkan tuntutan terhadap sarana dan prasarana transportasi yang tinggi pula. Pertumbuhan penduduk Kota Depok didominasi oleh migrasi penduduk khususnya dari wilayah DKI Jakarta. Jumlah warga miskin Kota Depok masih cukup besar (120.000 orang data Susenas 2009 atau 8 persen menurut Jamkesda 2009) yang diperkirakan sebagiannya berasal dari migrasi masyarakat ekonomi lemah yang termarginalisasi di Jakarta. Hal ini sudah diakomodir dalam Misi 1: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi, Sasaran: Meningkatkan tertib administrasi kependudukan, dan Sasaran: Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta dalam Misi 3: Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman, Sasaran: Meningkatkan kualitas permukiman. 	
4	Kota Bekasi	2013-2018	<ul style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi lebih didominasi oleh laju pertambahan melalui arus migrasi penduduk dari luar wilayah Kota Bekasi, hal ini juga didorong oleh semakin tumbuhnya sektor industri dan perdagangan di Kota Bekasi juga peran Kota Bekasi sebagai kota satelit bagi Ibukota DKI Jakarta. Permasalahan ini diakomodir dalam Misi 3: Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya, sasaran: tersedianya prasarana dan sarana layanan pendidikan sesuai kebutuhan yang berkualitas, tersedianya prasarana dan sarana layanan kesehatan sesuai kebutuhan yang berkualitas. 	

4.5 Penelaahan Isu Global/Agenda Pembangunan Internasional

Dalam penelaahan Isu Global/ Agenda Pembangunan Internasional, akan diuraikan beberapa Isu-Isu Strategis berskala internasional yang erat kaitannya dengan pembangunan Kota Jakarta di masa mendatang yakni menyangkut Masyarakat Ekonomi ASEAN dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

4.5.1 Masyarakat Ekonomi ASEAN

KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 menghasilkan kesepakatan *Concord* yang menyepakati pembentukan ASEAN *Community* untuk mempererat integrasi ASEAN. Dari kesepakatan tersebut terbentuk tiga komunitas dalam ASEAN *Community* yang disesuaikan ke dalam tiga pilar di dalam ASEAN Vision 2021, yakni bidang keamanan politik (ASEAN *Political-Security Community*), ekonomi (ASEAN *Economic-Security Community*), dan sosial budaya (ASEAN *Socio-Culture Community*). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2021.

Untuk membantu terwujudnya integrasi ASEAN melalui MEA, maka disusun *Blue Print* MEA yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu : (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil, dan menengah; (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah, Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi; serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Secara umum, tantangan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA antara lain adalah meningkatkan daya saing produk dan sumberdaya manusia Indonesia. Indonesia masih harus mengembangkan industri yang berbasis nilai tambah. Oleh karena itu Indonesia perlu kerja keras melakukan hilirisasi produk. Dari sisi hulu, Indonesia sudah menjadi produsen yang dapat diandalkan mulai dari pertanian, kelautan dan perkebunan. Tetapi semua produk tersebut belum sampai ke hilir untuk mengurangi impor barang jadi, karena Indonesia telah memiliki bahan baku yang cukup.

Secara khusus, tantangan daerah dalam menghadapi MEA dapat dituangkan kedalam 5 (lima) strategi, yakni :

Strategi 1 : Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah, melalui : (1) menjalin kerjasama riset dengan universitas; (2) mendukung UKM dalam pengembangan produk dan kemasan; (3) mengembangkan produk daerah yang berorientasi ekspor. Kemudian dapat pula dilakukan dengan upaya mendorong ekspansi dan promosi produk unggulan baik barang maupun jasa, melalui : (1) memfasilitasi dan mendorong eksportir untuk mengembangkan pasar di ASEAN; (2) memberikan fasilitas promosi bagi UKM; (3) meningkatkan jaringan kerjasama dan mitra usaha dengan negara ASEAN.

Strategi 2 : Mendorong investasi daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui : (1) menyederhanakan prosedur, mempersingkat waktu, serta transparansi proses perijinan investasi/memulai usaha; (2) menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah melalui tata kelola investasi, kualitas sumberdaya manusia dan kualitas pelayanan dan perizinan; (3) mengoptimalkan kinerja dan efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); (4) meningkatkan promosi sektor unggulan yang belum menjadi target investasi.

Strategi 3 : Meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara : (1) meningkatkan utilisasi Balai Pelatihan Tenaga Kerja daerah; (2) bekerjasama dengan lembaga sertifikasi di daerah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja sehingga diakui di dunia internasional.

Strategi 4 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara : (1) meningkatkan proporsi anggaran daerah untuk pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi, yaitu jalan raya, pelabuhan, dan bandara, serta ketersediaan pasokan energi dan listrik untuk mendukung keterhubungan antar provinsi di Indonesia; (2) mengoptimalkan peran dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan infrastruktur melalui mekanisme *Public-Private Partnership* (PPP).

Strategi 5 : Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui sinkronisasi kerangka regulasi kebijakan dan program pusat dan daerah dalam menghadapi MEA.

4.5.2 Sustainable Development Goals (SDGs)

Seiring dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Pada tanggal 30 Mei 2013, *High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda* mengeluarkan “*A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development*,” sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (*New Global Partnership*) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang. Dalam laporan tersebut, *High Level Panel* mendorong tujuan pembangunan pasca 2015 untuk melakukan 5 (lima) pergeseran transformasi utama, yaitu:

1. ***Leave No One Behind*** - Tidak meninggalkan siapapun di belakang. Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrim, dalam segala bentuknya. Dunia perlu memastikan bahwa tidak ada satu orangpun-
apapun etnis, gender, geografi, disabilitas, ras dan status lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi.
2. ***Put Sustainable Development at the Core*** - Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti. Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia.
3. ***Transform Economies for Jobs and Inclusive Growth*** - Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang inklusif. Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan inklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
4. ***Build Peace and Effective, Open and Accountable Institutions for All*** - Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel bagi semua. Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat di seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak sebuah pergeseran fundamental yang menempatkan perdamaian dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra.
5. ***Forge a New Global Partnership*** - Membina kemitraan global baru. Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus menyokong agenda pembangunan pasca 2015. Kemitraan baru harus dilandaskan pada pemahaman bersama akan perikemanusiaan, berbasis pada pengertian dan manfaat antar pihak.

Hal tersebut harus berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacat dan penduduk lokal/*indigenous*. Kemitraan tersebut harus melibatkan organisasi masyarakat, institusi multilateral, pemerintah daerah dan pusat, komunitas sains dan akademis, pelaku bisnis dan filantropi.

Kelima pergeseran transformasi utama tersebut kemudian di elaborasikan ke dalam 17 tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global yang baru ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030.

Gambar 4.2

Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)



Adapun 17 Tujuan dari SDGs terdiri dari :

1. ***No Poverty*** - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. ***Zero Hunger*** - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi salah satunya melalui percepatan penurunan angka stunting, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
3. ***Good Health and Well-being*** - Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
4. ***Quality Education*** - Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;

5. ***Gender Equality*** - Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan;
6. ***Clean Water and Sanitation*** - Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
7. ***Affordable and Clean Energy*** - Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang;
8. ***Decent Work and Economic Growth*** - Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
9. ***Industry, Innovation and Infrastructure*** - Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;
10. ***Reduced Inequalities*** - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antar negara;
11. ***Sustainable Cities and Communities*** - Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
12. ***Responsible Consumption and Production*** - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. ***Climate Action*** - Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya;
14. ***Life Below Water*** - Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumberdaya laut secara berkelanjutan;
15. ***Life on Land*** - Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
16. ***Peace, Justice and Strong Institutions*** - Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;
17. ***Partnerships for the Goals*** - Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

4.6 Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Berkaitan dengan peran sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi Kekhususan pada bentuk pemerintahan, Kekhususan pada Susunan Pemerintahan, Kekhususan pada Kewenangan dan Urusan Pemerintahan.

4.7 Isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

Isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2017-2022 merupakan aspek global dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. permasalahan strategis berdasarkan hasil analisa data;
- b. isu-isu strategis dalam RPJPD Tahun 2005-2025;
- c. kebijakan dalam RTRW 2030;
- d. kebijakan dalam RPJMN serta RPJMD Prov/Kab/Kota penyangga;
- e. tujuan pembangunan dalam SDGs, serta;
- f. Isu-isu global yang sedang berkembang;

Gambar 4.3
Perumusan Isu-isu strategis
Pembangunan DKI Jakarta
tahun 2017-2022



Adapun Visi, Misi serta Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur juga menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. 18 isu strategis pembangunan jangka menengah tahun 2017-2022 dikelompokkan ke dalam kelompok isu utama yaitu Isu Pembangunan Manusia, Isu Percepatan Ekonomi dan Infrastruktur, Isu Integritas Aparatur, Isu Kota Lestari dan Isu Jakarta sebagai Simpul Kemajuan pembangunan nasional. 18 isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 4.4
Isu-isu Strategis
Pembangunan DKI Jakarta
Tahun 2017-2022

No	Isu Utama	Isu-isu strategis
1.	Isu Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Isu Peningkatan Kualitas Pendidikan Isu Peningkatan Kualitas PembangunanKesehatan Isu Penguatan Kesetaraan Akses Untuk Disabilitas Isu Permuliaan Perempuan Isu Pemuda dan Olahraga
2.	Isu Percepatan Ekonomi dan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Isu Penguatan Ketahanan Pangan Isu Industri Kreatif Yang Berdaya Saing Isu Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja Isu Antisipasi Banjir, Rob dan Genangan Isu Ketahanan Energi Isu Pengembangan Sistem Transportasi Isu Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
3.	Isu Integritas Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> Isu Reformasi Birokrasi Isu Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan
4.	Isu Kota Lestari	<ul style="list-style-type: none"> Isu Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota Isu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5.	Isu Jakarta sebagai Simpul Kemajuan	<ul style="list-style-type: none"> Isu Pembangunan Budaya Multikultur Isu Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah

Penjabaran dari 18 isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2017-2022 secara lengkap dijabarkan sebagai berikut.

1) Peningkatan Kualitas Pendidikan

Kondisi pendidikan di DKI Jakarta secara umum sudah menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangka menciptakan pelayanan pendidikan prima bagi masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ke depan dengan adanya MEA dan globalisasi perlu memperhatikan akses pendidikan berkualitas yang menjangkau seluruh kalangan, baik kaum disabilitas maupun yang sudah mencapai usia non sekolah, namun belum mengenyam pendidikan secara baik (belum lulus pendidikan dasar). Kemudian hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah Angka Partisipasi Murni tingkat SMA sederajat di DKI Jakarta belum optimal. Ini artinya masih ada anak-anak usia SMA di DKI Jakarta yang seharusnya berada di bangku sekolah, namun mereka tidak berkesempatan untuk bersekolah.

Saat ini pendidikan Madrasah di DKI Jakarta, khususnya Madrasah swasta juga masih memerlukan perhatian khusus. Perluasan kesejahteraan tenaga pendidik swasta dan bantuan operasional pendidikan perlu dikaji lebih lanjut dalam rangka peningkatan kualitas mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan juga perlu didorong khusus untuk wilayah Kepulauan Seribu.

Untuk menjaga kualitas pendidikan di DKI Jakarta sendiri juga diperlukan suatu ukuran agar kualitas pendidikan DKI dapat lebih unggul dibandingkan dengan daerah lainnya. Dalam hal menambah wawasan siswa sekolah tentang kondisi global, dapat dilakukan proses pertukaran pelajar secara reguler, khususnya dengan negara-negara tetangga. Kemudian ancaman globalisasi dapat diminimalisir dengan penciptaan lulusan sekolah yang sudah memiliki keterampilan. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan pula untuk menciptakan sekolah kejuruan dengan bidang yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan perekonomian DKI Jakarta.

Untuk kualitas pendidikan anak sejak dini, perlu didorong peningkatan jumlah dan kualitas sekolah PAUD di Jakarta. Kemudian untuk tenaga pengajar/ guru PAUD, terutama PAUD Kelompok Belajar, Tempat Penitipan Anak, Status PAUD Sejenis (SPS), serta Taman Pendidikan Al Quran, juga perlu mendapat perhatian. Yang perlu menjadi perhatian kedepan adalah Pembelajaran PAUD yang membangun sikap dan pembelajaran baca-tulis-hitung (calistung) yang bernuansa akademik.

2) Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan

Status Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat perekonomian menarik masyarakat untuk datang mencari kesempatan kerja di Jakarta. Hal tersebut harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan jumlah penduduk yang kian

bertambah. Terkendalanya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan akan berimplikasi pada berbagai masalah kesehatan. Terkait dengan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kendala yang masih dihadapi saat ini antara lain meningkatnya penggunaan kartu JKN/KIS dalam upaya kuratif. Perlu ada langkah terobosan yang tidak hanya fokus pada upaya pengobatan, tetapi fokus pada upaya preventif (pencegahan) dan promotif berbasis siklus kehidupan manusia (*Continuum of Care*) melalui pendekatan keluarga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menanggulangi berbagai isu beban penyakit yaitu masih tingginya kejadian penyakit menular (contoh: Tuberkulosis, HIV/AIDS), meningkatnya kejadian Penyakit Tidak menular (PTM) (Contoh: Diabetes, Hipertensi) dan masih terdapatnya berbagai kejadian *Re-Emerging Disease* (contoh: Difteri, Polio) serta *New-Emerging Disease* (contoh: Flu Burung). Selain itu, permasalahan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta juga masih terfokus pada upaya penurunan angka kematian Ibu dan bayi, yang salah satu penyebabnya adalah kendala akses pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu memberikan perhatian lebih untuk kaum masyarakat lanjut usia. Diketahui bahwa angka harapan hidup semakin meningkat di Jakarta, jumlah penduduk usia 60 tahun keatas (Lansia) semakin bertambah. Dalam prosesnya menjadi tua, Lansia akan mengalami permasalahan seperti menurunnya tingkat penghasilan, kondisi fisik dan kesehatan yang kian melemah, termasuk kondisi sosial dan psikologisnya. Adapun jumlah “lanjut usia terlantar” di DKI Jakarta pada tahun 2015 sebanyak 6.684 orang (Jakarta Dalam Angka, 2015), dan jumlah penduduk Lansia lebih dari 65 tahun sebesar 396.379 orang.

Selain permasalahan dalam pengendalian penyakit, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memfokuskan pada upaya pengendalian masalah gizi masyarakat, salah satunya adalah stunting. Persentase balita stunting (pendek) hasil Riskesdas Tahun 2013 tercatat sebesar 27,5 persen, Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 2015 sebesar 23,1 persen dan hasil PSG 2016 sebesar 20,1 persen. Walaupun hasil PSG mengalami penurunan tetapi balita stunting masih menjadi permasalahan gizi masyarakat sesuai dengan batasan WHO yaitu kurang dari 20 persen.

Upaya intervensi gizi spesifik untuk balita pendek difokuskan pada kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak 0-23 bulan, karena penanganan balita pendek yang paling efektif dilakukan pada 1.000 HPK. Periode 1.000 HPK meliputi yang 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pertama setelah bayi yang dilahirkan telah dibuktikan secara ilmiah merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan. Oleh karena itu, periode ini ada yang menyebutnya sebagai “periode emas”, “periode kritis”, atau yang dikenal sebagai “*window of opportunity*”. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode tersebut, dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dengan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang akibat buruk yang

dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi.

Upaya intervensi spesifik tersebut meliputi:

1. Pada ibu hamil

Memperbaiki gizi dan kesehatan Ibu hamil merupakan cara terbaik dalam mengatasi stunting. Ibu hamil perlu mendapat makanan yang baik, sehingga apabila ibu hamil dalam keadaan sangat kurus atau telah mengalami Kurang Energi Kronis (KEK), maka perlu diberikan makanan tambahan kepada ibu hamil tersebut. Setiap ibu hamil perlu mendapat tablet tambah darah, minimal 90 tablet selama kehamilan. Kesehatan ibu harus tetap dijaga agar ibu tidak mengalami sakit

2. Pada saat bayi lahir

Persalinan ditolong oleh bidan atau dokter terlatih dan begitu bayi lahir melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Bayi sampai dengan usia 6 bulan diberi Air Susu Ibu (ASI) saja (ASI Eksklusif)

3. Bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun

Mulai usia 6 bulan, selain ASI bayi diberi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Pemberian ASI terus dilakukan sampai bayi berumur 2 tahun atau lebih. Bayi dan anak memperoleh kapsul vitamin A dan imunisasi dasar lengkap.

4. Memantau pertumbuhan Balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.

5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus diupayakan oleh setiap rumah tangga termasuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan. PHBS menurunkan kejadian sakit terutama penyakit infeksi yang dapat membuat energi untuk pertumbuhan teralihkan kepada perlawanan tubuh menghadapi infeksi, gizi sulit diserap oleh tubuh dan terhambatnya pertumbuhan.

Walaupun remaja putri secara eksplisit tidak disebutkan dalam 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), namun status gizi remaja putri atau pra-nikah memiliki kontribusi besar pada kesehatan dan keselamatan kehamilan dan kelahiran, apabila remaja putri menjadi ibu.

Terkait dengan intervensi gizi sensitif yang dapat dilakukan oleh Lintas Sektor terkait beberapa diantaranya adalah kegiatan sebagai berikut:

1. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih. Tujuan dari Kegiatan tersebut adalah meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan
2. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi melalui kebijakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
3. Melakukan fortifikasi bahan pangan (garam, terigu, dan minyak goreng),
4. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi, peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, pendidikan pengasuhan pada Orang tua
5. Pendidikan gizi di sekolah
6. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, misalnya melalui Program Subsidi Beras Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin/Rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan lainnya berupa pemberian subsidi untuk mengakses pangan (beras dan telur) dan pemberian bantuan tunai bersyarat kepada ibu hamil, menyusui dan balita.
7. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui Program Ketahanan Pangan dan Gizi yang dilaksanakan lintas sektor

3) Penguatan Kesetaraan Akses Untuk Disabilitas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat masih memerlukan pembenahan dan penyempurnaan. Salah satunya adalah belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang, yang secara jelas menyebutkan bahwa kewajiban Pemerintah Daerah di antaranya adalah hak untuk pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi. Upaya untuk mendorong partisipasi para disabilitas antara lain dengan mendirikan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dan pemberian insentif kepada pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas minimal satu persen dari jumlah karyawan. Hak difabel lainnya yang perlu untuk difasilitasi secara optimal yaitu hak untuk hidup secara mandiri, termasuk penentuan tempat tinggal dengan menerima bantuan Pemerintah Daerah, serta menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendorong perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Disamping itu hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah akan pentingnya peningkatan fasilitas publik dan pelayanan publik untuk disabilitas yang hingga saat ini belum maksimal.

4) Permuliaan Perempuan

Salah satu fakta terkait dengan permuliaan perempuan adalah mengenai jumlah pelaku UKM di DKI Jakarta, yang besarnya mencapai sekitar 60 persen, dimana mayoritas perempuan yang bekerja adalah sebagai karyawan/buruh.

Fakta lain yang cukup berkorelasi terhadap permuliaan perempuan adalah angka capaian ASI eksklusif di Provinsi DKI Jakarta masih rendah yaitu 67,1 persen, atau masih dibawah dari target nasional sebesar 80 persen. Lebih lanjut dapat kita ketahui bersama bahwa belum semua rumah sakit dan puskesmas menerapkan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM), serta belum semua tempat kerja menyediakan ruang ASI. Dalam rangka mendukung fasilitas publik ramah perempuan dan anak, perlu adanya kebijakan dan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyediakan *daycare* terjangkau bagi warga menengah ke bawah, terutama di wilayah pusat kegiatan ekonomi warga.

Guna menunjang pertumbuhan anak yang optimal, selain ASI eksklusif ditekankan pula akan pentingnya peran ayah pasca kelahiran anak. Alasan pentingnya *paternity leave* adalah bahwa secara alami, penting bagi seorang ayah untuk membentuk koneksi yang kuat dan ikatan dengan anaknya. Lebih lanjut juga bahwa kedekatan seorang ayah dan bayinya itu sama pentingnya dengan kedekatan dengan ibunya. Jadi akan sangat berarti buat seorang ayah untuk menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan bayinya. Sebagai informasi praktik *paternity leave* telah diterapkan di berbagai negara, diantaranya Islandia selama 4 bulan, Finlandia selama 54 hari dan Portugal selama 20 hari.

Guna menunjang upaya permuliaan perempuan, Pemerintah Provinsi. DKI Jakarta akan memberikan perhatian lebih terhadap fasilitas umum yang rawan tidak aman bagi kaum perempuan dan anak, diantaranya adalah penjaminan keamanan. Perlindungan perempuan juga erat kaitannya dengan masih terdapatnya kasus KDRT. Hal ini lah yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap upaya permuliaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam upaya perlindungan anak, Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya pelaksanaan Kota Layak Anak secara resmi dengan peluncuran Deklarasi Jakarta Menuju Kota Layak Anak pada tanggal 17 Desember 2013. Dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak dengan melakukan internalisasi Konsep KLA ke dalam kebijakan dan kelembagaan dalam rangka melaksanakan berbagai inisiatif untuk percepatan pencapaian KLA. Maka dari itu untuk mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak perlunya meningkatkan upaya penguatan kelembagaan KLA melalui peraturan/kebijakan, pembentukan lembaga tugas dan pelibatan pemangku kepentingan terkait.

5) Pemuda dan Olahraga

Para pemuda di DKI Jakarta sangat memerlukan wahana olahraga sebagai wadah aktualisasi diri. Tanpa adanya hal tersebut, akan membuat para pemuda cenderung menyalurkannya pada kegiatan yang sifatnya negatif. Terkait hal tersebut, diperlukan adanya sarana prasarana yang dapat menjadi media bagi para pemuda untuk mengaktualisasikan dirinya, sekaligus untuk memperkuat bentuk aktivitas komunitas.

Wahana olah raga yang berskala paling besar saat ini di DKI Jakarta adalah Stadion Gelora Bung Karno. Selain itu di masing-masing wilayah, telah tersedia pula Gelanggang Remaja. Untuk ke depan, diperlukan banyak prasarana yang dapat mengakomodir penyelenggaraan berbagai kegiatan kepemudaan dan olah raga yang sesuai standar difasilitasi oleh Pemerintah. Diharapkan dengan peningkatan sarana prasarana olahraga tersebut dapat menjadi wahana interaksi sekaligus pengembangan bakat para pemuda dan masyarakat pada umumnya.

6) Penguatan Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik. Disisi lain tingkat ketergantungan pangan DKI Jakarta pada daerah lain mencapai 95 persen. Dengan demikian keterjaminan kelangsungan pasokan pangan bagi seluruh warga Jakarta menjadi isu penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun diketahui bahwa tingginya inflasi *volatile food* menunjukkan harga bahan pangan sukar dikendalikan dan membuat warga kesulitan mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah gangguan kelancaran distribusi bahan pokok; rantai distribusi yang panjang dan pasokan yang tidak menentu, Infrastruktur logistik yang kurang, kurangnya moda transportasi untuk mengangkut kebutuhan bahan pokok dari daerah penghasil, dan tidak adanya tempat-tempat untuk menyimpan bahan pangan yang dekat dengan warga. Kondisi ini diperburuk dengan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta dari sektor pertanian yang setiap tahun terus menurun dan belum digalakkannya pertanian kota.

Kendala lain yang dihadapi adalah masih terdapatnya indikasi bahan-bahan berbahaya dalam pangan yang tersedia di DKI Jakarta. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dan pengendalian kualitas kesehatan pangan serta pengawasan distribusi pangan. Pengawasan dan pengendalian tersebut juga diharapkan dapat mencegah spekulasi distribusi pangan.

Kemudian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di DKI Jakarta, diperlukan penguatan kelembagaan dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses atau keterjangkauan pangan, serta peningkatan distribusi dan diversifikasi pangan. Untuk mencapainya, maka sinergitas Pemerintah dengan dunia usaha menjadi mutlak diperlukan dengan cara mendorong BUMD sektor pangan berperan serta dalam menjamin ketersediaan bahan pangan pokok dengan harga yang stabil.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah optimalisasi kerjasama antar daerah pemasok pangan utama guna memastikan pasokan tetap stabil dan terjaga, dengan cara penguatan jalur distribusi pangan. Dengan demikian amanat RPJMN 2015-2019 berupa peningkatan kualitas konsumsi pangan dalam bentuk mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) dapat tercapai.

7) Industri Kreatif Yang Berdaya Saing

Menurut definisi dari Kementerian Perdagangan RI, industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplotasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Lebih lanjut pengembangan industri kreatif di DKI Jakarta masih perlu didorong, yang mana hal tersebut terlihat dari pertumbuhan industri di DKI Jakarta yang masih berjalan lambat dan cenderung menurun pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,75 persen dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 3,11 persen. Padahal agar perekonomian bergerak lebih maju, sektor industri harus menjadi motor penggerak. Industri kreatif merupakan salah satu sektor industri yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan industri ramah lingkungan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Perlu didorongnya industri kreatif salah satunya adalah karena banyaknya produk asing yang beredar dipasaran dengan harga yang terjangkau.

Pengembangan industri kreatif juga merupakan amanat RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 yaitu : 1) Meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas. Dalam upaya melaksanakan misi ini, pengembangan dan penguatan perekonomian difokuskan pada struktur ekonomi yang berbasis jasa, perdagangan, pariwisata dan industri kreatif, kualitas ketenagakerjaan, perijinan usaha yang efektif dan efisien, laju inflasi yang terkendali dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; 2) Memperkuat inovasi dan kreativitas daerah. Penguatan inovasi dan kreasi daerah difokuskan pada : pengembangan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha, dan masyarakat; pengembangan ekonomi kreatif, klaster unggulan daerah dan kewirausahaan berbasis teknologi; penguatan regulasi dan kebijakan pro inovasi dan kreasi; penguatan kapasitas dan kualitas pelaku industri kreatif; penguatan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif dan perwujudan institusi pengembangan inovasi; dan penyediaan sarana kota yang berkelanjutan.

8) Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Sejak tahun 2014, capaian indeks Gini DKI Jakarta sudah menunjukkan ketimpangan yang melebihi rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan semakin rendahnya peran kelompok penduduk dengan pendapatan rendah dalam pembentukan total pendapatan yang diterima penduduk DKI Jakarta. Bahkan peran kelompok penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah dan 40 persen menengah sudah lebih rendah dibandingkan dengan 20 persen penduduk dengan pendapatan teratas di DKI Jakarta.

Lebih jauh lagi, kemiskinan hakikatnya tidak hanya mengenai kesenjangan pendapatan, melainkan bersifat multidimensi sehingga hal ini berkorelasi dengan aspek kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup masyarakat. Kondisi saat ini di DKI Jakarta masih terdapat warga miskin/rentan miskin yang tidak mendapatkan akses kebutuhan dasar dan kesempatan kehidupan yang layak. Hal tersebut dibuktikan oleh masih adanya penduduk miskin dan rentan miskin yang belum mendapat akses air bersih sebesar 94,9 persen, permukiman yang layak sebesar 90,1 persen, sanitasi yang layak sebesar 65,5 persen, dan bayi miskin dan rentan miskin yang belum memperoleh nutrisi yang cukup sebesar 55,6 persen. Adanya persoalan tersebut dapat menghambat pembangunan dan stabilitas perekonomian DKI Jakarta, sehingga perlu upaya khusus dalam perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat, salah satunya melalui penggunaan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM), yang mencakup akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup, serta perlu adanya perlindungan fiskal dan keadilan hukum bagi masyarakat.

Penyediaan lapangan kerja menjadi aspek krusial dalam menekan angka kemiskinan, namun penyediaan lapangan kerja masih menjadi masalah utama bagi mayoritas warga DKI Jakarta berdasarkan Survey Poltrack bulan September 2016. Selain penyediaan lapangan kerja, aspek penilaian kemudahan berbisnis juga cukup mendasar dalam upaya mendorong perekonomian Jakarta. Sebagaimana diketahui peringkat kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Business*) Indonesia pada 2017 meningkat 15 posisi, menjadi peringkat 91, dari sebelumnya peringkat 106. Lebih lanjut Indonesia termasuk 10 besar negara dengan peningkatan terbaik EoDB, bersama di antaranya dengan Brunei, Pakistan, dan Kenya. Selain penyediaan lapangan pekerjaan dan mengupayakan terwujudnya kemudahan berbisnis, diupayakan pula pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat Jakarta. Hal ini penting mengingat bahwa prospek kewirausahaan di DKI Jakarta cukup baik dan pengembangannya akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.

9) Antisipasi Banjir, Rob dan Genangan

Rentanannya kondisi Provinsi DKI Jakarta terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari demografi Jakarta, yang memiliki tingkat kemiringan 0-3 persen dan aliran 13 sungai di dalam wilayahnya. Disamping itu adanya perkembangan dalam bentuk kegiatan konstruksi berskala besar di wilayah ibukota serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, menyebabkan berkurangnya luas daerah resapan. Selain itu juga ditambah dengan kondisi dimana sebagian besar tanah di Jakarta sudah menjadi hak milik perseorangan, kian mempersulit penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) terkait pengelolaan skema pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam implementasi penanggulangan banjir dan genangan adalah diperlukannya penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia,

dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, pintu air, situ dan waduk, proteksi air laut, pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, dan kesiap-siagaan masyarakat.

Selain banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu mengantisipasi fenomena banjir rob yang disebabkan oleh pasang surut air laut maupun penurunan muka tanah (*land subsidence*) pada beberapa kawasan. Dalam rangka menanggulangi hal tersebut diperlukan upaya pembangunan tanggul laut dan tanggul muara sungai.

10) Ketahanan Energi

Ketahanan energi adalah kemampuan ekonomi untuk menjamin ketersediaan pasokan sumber daya energi pada tingkat yang tidak akan mempengaruhi kinerja ekonomi (*World Economi Forum*, 2006). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek pasokan/*supply* dan harga menjadi aspek utama dalam ketahanan energi. Dalam konteks Jakarta, maka ketahanan energi berkaitan dengan kemampuan pasokan energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pasokan energi di Jakarta tidak hanya terkait dengan kuantitas tetapi juga kualitas, dengan kata lain pasokan energi di wilayah Provinsi DKI Jakarta harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dengan mengedepankan energi ramah lingkungan yang menitikberatkan pada pemanfaatan bahan bakar gas dan pengembangan energi baru terbarukan.

Setiap tahun, kebutuhan listrik masyarakat DKI Jakarta menunjukkan peningkatan. Saat ini kebutuhan daya listrik di Jakarta mencapai 7,5 gigawatt per hari, sementara jumlah peningkatan produksi tidak sebanding dengan jumlah peningkatan kebutuhan masyarakat atas listrik. Salah satu hal untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan meminimalisir kehilangan daya di transmisi listrik. Untuk itu diperlukan penataan utilitas kota serta perbaikan infrastruktur listrik yang lebih baik sehingga deteksi terhadap pencurian listrik di tingkat masyarakat dapat segera dihindari.

Dalam konteks penyediaan energi baru terbarukan di bidang penyediaan listrik, ketersediaan pembangkit listrik tenaga surya melalui teknologi panel surya (*solar cell*) berpotensi menjawab tantangan kebutuhan listrik masyarakat di DKI Jakarta. Saat ini Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan panel surya di beberapa infrastruktur publik, diantaranya adalah gedung-gedung pemerintahan dan sekolah. Dalam perspektif kedepan, Pemerintah DKI Jakarta akan menerapkan teknologi panel surya pada seluruh lampu lalu lintas (*traffic light*), lampu taman dan rumah susun. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah menyiapkan penyediaan tenaga listrik berbasis sampah, salah satunya melalui pembangunan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) yang dapat mengkonversi volume produksi sampah menjadi tenaga listrik. Dengandemikian, ke depan diharapkan DKI Jakarta dapat menjadi contoh kota yang menerapkan ketahanan energi melalui energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energimasyarakatnya, serta berkontribusi terhadap pencapaian target penggunaan energi baru terbarukan nasional yaitu sebesar 23 persen.

11) Pengembangan Sistem Transportasi

Sebagai salah satu kota megapolitan di dunia, Jakarta menghadapi permasalahan transportasi yang kompleks akibat meningkatnya aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan transportasi di DKI Jakarta secara teknis disebabkan antara lain kapasitas jalan yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan kendaraan khususnya kendaraan pribadi, terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum, tidak terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi multimoda, terbatasnya ketersediaan dan akses prasarana jalan untuk mendukung mobilitas barang dan orang di pelabuhan dan bandar udara, terbatasnya akses transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu, dan lain-lain.

Adapun permasalahan yang paling mendasar adalah menyangkut kapasitas jalan yang sudah tidak mencukupi untuk memenuhi pergerakan orang dan barang yang terus meningkat dari dalam kota maupun dari luar kota Jakarta. Penambahan ruas jalan yang hanya sekitar 0,01 persen per tahun tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang mencapai sekitar 12 persen per tahun. Kondisi ini menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan menimbulkan titik-titik kemacetan. Hampir semua ruas jalan arteri di Jakarta sudah mengalami kemacetan.

Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Kapasitas angkutan umum hanya mampu melayani sekitar 19 persen dari jumlah permintaan perjalanan. Pertambahan kendaraan bermotor terus meningkat setiap waktu. Data tahun 2014 menunjukkan bahwa penambahan jumlah kendaraan roda empat setiap hari mencapai 1.600 unit dan kendaraan roda dua 4.000 unit. Memang beberapa tahun terakhir telah dilakukan penambahan armada Transjakarta secara masif, namun pengadaan bus dapat dikatakan hanya fokus pada bus-bus besar. Sedangkan untuk bus sedang (metromini) dan bus kecil (angkot, KWK, mikrolet, dll) yang merupakan satu moda transportasi yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi *feeder* ke kawasan pemukiman, perumahan dan revitalisasinya masih belum optimal.

Sistem dan jaringan transportasi antar moda belum seluruhnya terintegrasi dengan baik, sehingga menyebabkan mobilitas penduduk tidak efisien dan efektif. Sistem transportasi angkutan jalan raya tidak terhubung dengan baik dengan sistem dan jaringan transportasi berbasis rel. Begitu pula sistem dan jaringan angkutan bus massal (*busway*) belum terintegrasi dengan sistem angkutan *feeder* yang melayani permukiman masyarakat. Dukungan transportasi antar kota dan antar provinsi juga perlu untuk dikembangkan untuk memperlancar akses masuk-keluar wilayah ibukota. Belum tersedianya moda transportasi yang cepat, aman, dan ekonomis menjadikan kendaraan pribadi menjadi alat transportasi utama masyarakat.

Ketersediaan prasarana jalan dan akses untuk mendukung Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno Hatta kurang memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses aliran barang yang pada akhirnya menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Akses jalan menuju dan dari pelabuhan dan bandara menggunakan

jaringan jalan yang juga digunakan untuk menunjang kegiatan perkotaan lainnya. Padahal kendaraan barang yang melintas termasuk kendaraan dengan beban berat. Kondisi seperti ini selain merusak daya tahan jalan yang ada juga meningkatkan beban jalan dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan yang dilewatinya.

Ketersediaan dan pelayanan transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu masih terbatas untuk melayani pergerakan orang dan barang, sehingga mengurangi aksesibilitas dan konektivitas dengan Kota Jakarta. Hal tersebut terlihat dari data keadaan transportasi di Kepulauan Seribu yang tidak banyak berubah selama lima tahun terakhir, dimana hingga saat ini transportasi ke Kepulauan Seribu hanya memiliki 40 kapal kayu, 21 kapal milik pemerintah, dan 9 kapal penumpang reguler.

Faktor lain yang menyebabkan kemacetan adalah rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Ketidaksiplinan tersebut dapat dilihat dari cara berkendara yang tidak tertib, tidak mematuhi rambu lalu lintas dan pelanggaran etika pada lampu pengaturan lalu lintas. Rendahnya tingkat kedisiplinan salah satunya juga didorong oleh minimnya pelibatan masyarakat secara luas dalam perencanaan program transportasi.

12) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan untuk menjamin pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang guna terwujudnya visi, misi, dan tujuan penataan ruang. Adapun beberapa instrumen yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang antara lain terdiri atas: Peraturan Zonasi, arahan pemanfaatan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana/sarana umum, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penjatuhan sanksi.

Peraturan Zonasi merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Peraturan Zonasi memuat uraian zonasi pada setiap zona peruntukan, meliputi: ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, antara lain Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Ketinggian Bangunan, dan sebagainya, termasuk ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimum, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan ruang di atas dan/atau di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum, mempunyai batasan kedalaman tertentu sesuai dengan fungsi yang akan dikembangkan, akan diatur dengan peraturan tersendiri. Untuk hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah, namun kebijakan ini masih memerlukan dukungan payung hukum pada tingkatan undang-undang atau aturan Pemerintah, mengingat selama ini belum terdapat aturan yang mengatur mengenai hak kepemilikan masyarakat dalam pemanfaatan ruang bawah dan atas tanah.

Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standard pelayanan minimal bidang penataan ruang; mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; serta melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

Selanjutnya mengenai pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk: meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. Salah satu peraturan terkait disinsentif yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.

Dalam implementasi pemanfaatan ruang, seringkali ditemukan adanya pelanggaran. Terkait hal tersebut, setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana. Salah satu bentuk pelanggaran adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang atau izin yang diberikan. Penindakan terhadap pelanggaran bangunan gedung di Pemerintah Provinsi. DKI Jakarta terdiri atas penerbitan Surat Peringatan (SP), pelaksanaan segel, penerbitan Surat Perintah Bongkar (SPB), dan penindakan pembongkaran bangunan gedung yang melanggar.

Dalam praktek pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang saat ini, masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain belum adanya peraturan dan instrumen yang mengatur tentang insentif dan disinsentif dari Pemerintah, keterbatasan data dan informasi, serta belum efektifnya kelembagaan dan peran serta masyarakat.

Keterbatasan data/ informasi, dokumen, dan peta terkait kondisi di lapangan seringkali menyulitkan upaya-upaya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, selain diperlukan adanya peraturan dan panduan yang implementatif, juga diperlukan dukungan sistem informasi yang berkaitan dengan dinamika pemanfaatan ruang di lapangan.

Permasalahan dalam implementasi pengendalian pemanfaatan ruang sangat erat kaitannya dengan isu efektivitas kelembagaan dalam pengendalian penataan ruang. Agar dapat menciptakan tertib ruang sesuai dengan rencana tata ruang, maka pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan secara terpadu, bukan hanya oleh perangkat daerah yang berwenang, tetapi juga harus didukung oleh lembaga lain yang terkait dengan penataan ruang, baik pemerintah dan non-pemerintah di level pusat sampai dengan daerah. Kurangnya koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang berakibat pada rendahnya keterpaduan pemanfaatan ruang, mengingat penataan ruang merupakan urusan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Keterbatasan perangkat daerah atau sumber daya manusia dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang juga menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan solusi. Selama ini pengendalian pemanfaatan ruang masih menjadi tanggung jawab Pemerintah, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 telah mengatur bentuk dan tata cara masyarakat dalam berpartisipasi dalam penataan ruang. Namun dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ada masih belum optimal. Selama ini LSM dan masyarakat baru dilibatkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang, namun belum dilibatkan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

13) Reformasi Birokrasi

Pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tidak terlepas dari peran DKI Jakarta sebagai ibukota negara, yang mempunyai kedudukan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kedudukan tersebut, tentu DKI Jakarta menjadi panutan dan acuan bagi provinsi lain dalam upaya penyediaan optimal bagi masyarakat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan dimana itu dapat terwujud jika Pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Lebih lanjut diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik.

Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta menghindari *high cost economy* diperlukan peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum, pemerintahan daerah, dan sistem peradilan, maka diperlukan langkah – langkah perbaikan –

perbaikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta bebas pungutan – pungutan liar terutama di sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat telah diawali dengan ditandatanganinya 14 (empat belas) Komitmen Bersama Program Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Provinsi DKI Jakarta oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Unsur Polda Metro Jaya, Perwakilan BPKP DKI Jakarta, unsur Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Adapun 14 (empat belas) Komitmen Bersama Program Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Provinsi DKI Jakarta, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang mengkomodir kepentingan publik serta bebas intervensi pihak luar melalui implementasi *e-planning* yang terintegrasi dengan *e-budgeting*.
2. Mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik serta menjamin kemandirian Unit Layanan Pengadaan (ULP).
3. Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi berbasis elektronik.
4. Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai.
5. Tidak akan menawarkan atau memberikan, meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan pengendalian gratifikasi dan mengoptimalkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
7. Menjaga kerahasiaan data pelapor, penerima gratifikasi kepada pihak manapun kecuali diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Melakukan pembaruan peraturan LHKPN dan membentuk Unit Pengelola LHKPN.
9. Melaksanakan perbaikan manajemen PNS dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja.
10. Melaksanakan upaya-upaya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang transparan dan akuntabel dalam hal pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, pengamanan fisik dan hukum serta pelaporan.
11. Melaksanakan langkah-langkah perbaikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta bebas pungutan-pungutan liar, khususnya di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

12. Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik dan penggalian potensi pendapatan serta penegakan aturan, termasuk penagihan piutang-piutang pendapatan yang belum terealisasi.
13. Bertanggung jawab dalam mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem.
14. Melaksanakan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

14 (empat belas) Komitmen Bersama Program Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Provinsi DKI Jakarta dimaksud, selanjutnya diimplementasikan secara operasional ke dalam Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH). Untuk menjamin, memperkuat, serta meningkatkan akselerasi pencapaian dan pengendalian capaian pelaksanaan target Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 694 Tahun 2018 tentang Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018.

14) Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan

Mengingat tingginya kebutuhan anggaran dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya serta terbatasnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk keperluan dimaksud, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk mampu mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan Jakarta akan hal tersebut di atas.

Ada beberapa alternatif pembiayaan non-APBD yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, di antaranya skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema penerbitan Obligasi Daerah. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mempertimbangkan dan mampu menghitung kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kewajiban pengembalian pembiayaan yang diperoleh dari berbagai skema dimaksud. Skema KPBU dan Obligasi Daerah merupakan pendekatan/skema yang relatif baru dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik di Provinsi DKI Jakarta, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan berbagai langkah strategis dalam penyiapan pengimplementasian dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, dan lain-lain.

Selain skema pembiayaan yang relatif baru tersebut di atas, adapula bentuk pelibatan lain dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) / *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sejauh ini, sudah cukup banyak

layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari skema TSLDU. Namun demikian, dirasakan masih ada peluang dan ruang untuk optimalisasi baik dari sisi swasta maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didalam pengelolaannya, diantaranya sinergi antara kegiatan TSLDU dengan program pembangunan dan kesesuaian dengan kebutuhan riil di masyarakat.

Selain pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan pihak swasta, terdapat potensi pembiayaan yang cukup signifikan dan belum dioptimalkan oleh pemerintah, yaitu pendanaan yang bersifat swadaya dan berasal dari komunitas/masyarakat itu sendiri. Selama ini, pola pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat telah banyak digunakan untuk keperluan aktivitas yang berbasis komunitas seperti pembangunan rumah ibadah, aktifitas sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Untuk lebih menggerakkan potensi “swa-pendanaan” Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mendorong dan melakukan pembinaan melalui tokoh-tokoh masyarakat, memberikan stimulan dan apresiasi terhadap komunitas masyarakat yang mampu memberdayakan potensi yang ada di mereka untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Disamping itu, masih terdapat peluang untuk mendapatkan sumber pembiayaan alternatif khususnya dari instrumen pemanfaatan ruang, seperti kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan pengenaan kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagai salah satu bentuk disinsentif dalam proses pemanfaatan ruang. Tantangan utama yang dihadapi dalam pengimplementasian instrumen tersebut di atas dalam konteks sebagai alternatif pembiayaan pembangunan adalah pengintegrasian program dan pengadministrasian ke dalam sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

15) Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta, kebutuhan akan perumahan dan permukiman pun semakin meningkat. Hingga saat ini peruntukan lahan untuk perumahan dan permukiman sudah menduduki proporsi terbesar di Jakarta. Namun dalam kenyataannya tingginya permintaan terhadap perumahan dan permukiman, tidak disertai dengan pertambahan jumlah perumahan dan permukiman, sehingga mengakibatkan adanya *backlog*. Sebagaimana diketahui DKI Jakarta merupakan provinsi kedua dengan *backlog* perumahan terbesar di Indonesia. Sebanyak 1,3 juta rumah tangga belum memiliki rumah (BPS 2014). Adapun hal yang menjadi persoalan utama dalam upaya Pemerintah untuk menyediakan hunian adalah keterbatasan lahan dan mahal nya harga lahan.

Sebagaimana diketahui saat ini 47 persen masyarakat di DKI Jakarta masih tinggal di rumah sewa, baik kontrak/kost sebanyak 34 persen, bebas sewa sebanyak 13 persen, rumah dinas dan lainnya (Susenas 2015). Dalam rangka memperoleh hunian, tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah saja yang mengalami kesulitan memperoleh hunian, namun juga para pekerja dan kelas menengah. Hingga saat ini mereka masih mengalami kesulitan dalam membayar DP rumah, sehingga otomatis menyulitkan bagi mereka untuk memperoleh KPR

dari bank. Fenomena ini memberikan gambaran akan pentingnya Kredit Murah Berbasis Tabungan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah Kebawah.

Dalam menuntaskan persoalan di atas, diperlukan peran aktif dari Pemerintah, antara lain memberikan kemudahan dalam regulasi yang mengatur tentang investasi rumah susun maupun ketataruangan, penguatan manajemen pengelolaan aset dalam konteks pemetaan aset tanah daerah dan lahan-lahan potensial secara optimal. Selain itu aspek lain yang memerlukan peran aktif Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan perumahan adalah pentingnya pengadaan bank tanah dikarenakan semakin mahalnya harga tanah di DKI Jakarta yang berimbas pada harga jual rumah, sehingga diperlukan adanya intervensi dari Pemerintah untuk mengendalikan harga tanah. Harga lahan di DKI Jakarta tumbuh hingga 16 persen per tahun, sedangkan upah riil pekerja tumbuh dibawah 10 persen. Banyak pekerja kelas menengah bawah yang akhirnya harus tinggal dipinggiran DKI Jakarta.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah permukiman kumuh. Area permukiman di wilayah DKI Jakarta belum tertata sepenuhnya, sehingga perlu ditekankan pentingnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota melalui prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk penataan kampung, perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali. DKI Jakarta sebagai magnet bagi migrasi penduduk merupakan salah satu faktor yang mendorong munculnya kawasan-kawasan kumuh di DKI Jakarta, sehingga optimalisasi pencegahan dan penanganan terhadap penertiban permukiman kumuh perlu terus ditingkatkan melalui penataan kawasan sungai, penertiban tanah negara, dan penertiban jalur hijau yang saat ini masih terdapat permukiman kumuh. Dengan melakukan perbaikan lingkungan tempat tinggal dan penyediaan hunian yang layak dapat membantu mewujudkan salah satu sasaran SDGs, yakni “membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan”.

16) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk di wilayah DKI Jakarta, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan memengaruhi kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta. Permasalahan lingkungan hidup di DKI Jakarta mencakup kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan ditandai oleh masih adanya pencemaran air sungai, air laut, tanah dan udara, serta pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal, efektif dan efisien. Selain itu juga masih terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup, antara lain belum optimalnya pembangunan tanggul laut dan normalisasi sungai, serta masih tingginya penggunaan air tanah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta giat melaksanakan upaya kuratif (keterdesakan) membersihkan sampah dengan dana yang besar, mengingat pencemaran, kekumuhan di penjuru kawasan (area privat, pemerintahan maupun publik) baik di darat maupun di perairan

(sungai dan danau) di Ibukota Republik Indonesia disadari perlu ditanggulangi secara cepat. Dalam pengelolaan persampahan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pelarangan pemakaian bahan yang tidak dapat di daur ulang, dimanfaatkan atau material lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran eksklusif dan berat. Selain itu, perlu menyiapkan prasarana dan sarana wadah, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan dengan ruang dan mekanisme siap menangani sampah terpilah diikuti dengan konsistensi pemrosesannya.

17) Pembangunan Budaya Multikultur

Penyelenggaraan pesta merupakan alternatif hiburan dan peluang bagi anak muda untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang seni dan budaya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengembangkan pertunjukan seni rakyat dan seni perfilman. Untuk pertunjukan seni perfilman, Jakarta dapat belajar dari *Sundance Film Festival*, yang berdiri sejak 1978, dan saat ini selalu dihadiri tak kurang ada 45.000 pencinta film, diantaranya sebanyak sembilan persen merupakan wisatawan mancanegara. Festival ini mampu menyerap 1.500 tenaga kerja, menyumbang PAD US\$5,5 juta. Itu semua di luar belanja pelancong yang diserap oleh hotel, transportasi, kuliner, cendera mata yang mencapai US\$54,5 juta.

Kemudian terkait pengembangan kebudayaan, aspek revitalisasi museum menjadi hal yang tidak terlepas. Ratusan museum-museum di Jakarta berada di bawah pengelolaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan swasta. Sayangnya saat ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke museum masih belum optimal, dikarenakan penyajian atraksi yang kurang atraktif dan monoton. Oleh karena itu diperlukan sebuah terobosan untuk membuat museum kembali semarak dan dipenuhi pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Terobosan yang dimaksud adalah terobosan yang meningkatkan peran publik dalam proses pengelolaan museum di DKI Jakarta.

Selain museum, perlu juga dioptimalkan kembali Titik-Titik Sejarah (*Historical Spot*) di Jakarta sebagai bagian dari peningkatan upaya cagar budaya. Jakarta merupakan tempat di mana titik pusat pergerakan sejarah Indonesia berlangsung. Gedung tempat pelaksanaan Sumpah Pemuda, Proklamasi, Titik Nol Jakarta di Menara Syahbandar, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pulau Onrust, Kelenteng Petak Sembilan, serta banyak tempat bersejarah lain, perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah. Program peningkatan nilai kesejarahan Jakarta ini diharapkan dapat menjadi atraksi baru bagi para wisatawan lokal dan mancanegara. Selain itu juga akan menjadi pusat-pusat edukasi sejarah bagi masyarakat Jakarta. Melalui pembenahan ini, diharapkan akan membuat Jakarta menjadi tujuan wisata dan budaya yang memiliki alternatif hiburan yang edukatif.

Berbicara tentang aspek kebudayaan, DKI Jakarta tidak dapat mengesampingkan pengembangan budaya Betawi. Salah satu hal yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pembangunan Pusat Budaya Betawi di Setu Babakan. Namun kawasan tersebut perlu lebih banyak dikembangkan seperti diperkaya dengan fasilitas Museum Kebudayaan Betawi, yang berisi tentang sejarah perkembangan Betawi dan Museum Benyamin Sueb

sebagai salah satu legenda budaya Betawi. Budaya sastra juga menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diantaranya melalui Revitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin.

Dari aspek pariwisata, salah satu potensi wisata Jakarta adalah wisata konvensi. Berdasarkan ICCA (*International Congress and Convention Assosiation*) Jakarta mengadakan 16 meeting International pada 2015. Jumlah 16 meeting ini membuat Jakarta berada di peringkat 34 untuk wilayah Asia pasifik dan peringkat 163 di dunia, berbeda dengan Bali dengan 40 meeting di peringkat 37 dunia serta peringkat 16 di Asia Pasifik. Thailand adalah negara yang punya kebijakan *convene on paradise*, yang mana penyelenggara konvensi Internasional akan mendapatkan subsidi dari pemerintah jika mampu menyelenggarakan konvensi Internasional. Pemerintah Thailand meyakini bahwa kedatangan tamu-tamu internasional mampu memberikan manfaat terhadap ekonomi lokal yang ada di Thailand. Saat ini Bangkok berada di peringkat 4 untuk Asia Pasifik dan 15 dunia dengan 103 meeting per tahun.

Pengembangan wisata konvensi di DKI Jakarta belum optimal, karena DKI Jakarta tidak memiliki gedung konferensi dengan kapasitas besar dan bertaraf Internasional. Satu-satunya gedung dengan kapasitas besar yang tersedia adalah Jakarta Convention Centre(JCC). Gedung pertemuan berskala besar lainnya berada di luar Jakarta, yakni SICC di Sentul, Jawa Barat dan ICE di Serpong, Banten.

Selain wisata konvensi, wisata lain yang memiliki potensi cukup baik adalah wisata kuliner. Hal ini tidak terlepas keberagaman budaya yang terdapat di Jakarta dan tidak ditemukan di daerah lain. Jakarta adalah titik tengah Indonesia, berbagai etnis dengan cirinya masing-masing ada di Jakarta. Berbagai etnis dari segala penjuru Indonesia memiliki budaya masing-masing terutama makanan. Namun masih terbatasnya pusat-pusat kuliner di Jakarta seperti Lenggang Jakarta, Pusat Jajanan Serba Ada di Melawai, Kantin PKL di Menara 165 dan Pusat Jajanan Blok S. Kebanyakan festival makanan yang ada di Jakarta masih diselenggarakan oleh swasta dan bukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terkait pengembangan budaya multikultur, hal lain yang sangat penting adalah pengembangan wilayah Kepulauan Seribu sebagaimana telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kepulauan Seribu memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan, namun pengembangannya belum maksimal. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepulauan Seribu masih rendah. Sepanjang 2011 hingga 2015, tidak ada penambahan rumah makan dan resort wisata baru. Struktur ekonomi Kepulauan Seribu masih didominasi sektor pertambangan/penggalan.

18) Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah

Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sering kali dikaitkan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Beberapa daerah telah berhasil meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonominya dengan signifikan melalui penciptaan dan pengembangan kapasitas iptek. Namun, pengembangan Iptek saja tidak cukup, karena perlu diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan publik yang mencakup kultur, budaya, serta pembangunan manusia dan wilayah. Selain itu perlu disesuaikan pula pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat Jakarta.

Adapun salah satu bentuk pengembangan dan penguatan inovasi dan kreativitas daerah yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah rencana pembangunan *science* dan *technopark*, yang diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat DKI Jakarta dalam memperluas wawasan mengenai perkembangan iptek internasional. Pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diharapkan Jakarta dapat meningkatkan keunggulan komparatif Jakarta menjadi keunggulan kompetitif dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan wilayah dan masyarakat menjadi basis penting dalam keberlanjutan pembangunan.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi saat ini.

BAB

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

V

Pada bagian ini disajikan visi, misi, janji kerja, tujuan dan sasaran untuk pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022. Visi, misi dan janji kerja yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode tahun 2017 – 2022. Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Gubernur bersama Wakil Gubernur. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

5.1 VISI

Adapun visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Jakarta: meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.

Maju: memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergesaran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

Berbudaya: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut *World Cities Culture Report* 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

Keberadaban: peradaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Hal ini berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

Keadilan: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Kesejahteraan: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman. Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

5.2 MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk

mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. *Misi Pertama : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.*

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Jakarta yang aman, tertib, dan inklusif, dan mewujudkan manusia Jakarta yang cerdas, sehat dan berkarya. Jakarta sebagai kota yang aman bagi setiap penghuninya. Perhatian terutama diberikan kepada peningkatan rasa aman bagi perempuan dan anak. Keamanan tersebut tercipta melalui kuatnya kesadaran kolektif masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Peran serta masyarakat tersebut dibarengi dengan upaya perbaikan layanan Pemerintah, serta penggunaan teknologi yang mampu meningkatkan pengawasan keamanan di tempat-tempat publik serta respons atas pengaduan korban kekerasan secara baik dan cepat.

Kesehatan merupakan salah satu indikator pembangunan yang paling penting. Pentingnya cakupan program jaminan kesehatan menjadi salah satu kunci pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan yang adil dan berkualitas. Selain itu, Jakarta yang sehat juga akan didorong oleh terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

Jakarta yang pintar diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang berkualitas. Penjangkauan anak-anak luar sekolah menjadi salah satu upaya untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. Selain itu peningkatan relevansi keahlian masyarakat dengan kebutuhan dan dinamika dunia industri menjadi salah satu upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai motor perubahan pembangunan yang terus relevan.

Kebudayaan menjadi aset utama pembangunan. Jakarta sebagai pusat perekonomian tidak bisa mengesampingkan sejarah panjang Jakarta yang mewariskan generasi saat ini dengan kawasan-kawasan cagar budaya serta koleksi-koleksi museum dan kepurbakalaan yang amat berharga. Selain itu, kesenian dan aspirasi kebudayaan lainnya juga dikembangkan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kebudayaan-kebudayaan lokal akan didorong untuk terus dikembangkan, tidak sekedar untuk melestarikan namun juga menjadi pemberi warna atas kehidupan sehari-hari warga Jakarta. Kebudayaan juga tidak melulu dipandang sebagai kondisi statis, namun terus berkembang. Kreativitas masyarakat menjadi faktor penting dalam mengembangkan kebudayaan sekaligus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebudayaan tetap terus relevan dalam perkembangan zaman.

Jakarta sebagai kota metropolitan sejatinya adalah rumah besar bagi semua orang. Nilai-nilai kekeluargaan menjadi pusat gravitasi semua aktivitas individunya. Nilai moral, kesusilaan, agama dan religious digerakkan di lingkup masyarakat terkecil atau keluarga. Keluarga

yang harmonis dan sehat secara mental juga akan melahirkan masyarakat yang mampu menempatkan dirinya dalam dinamika zaman yang terus berubah.

2. Misi Kedua : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan, meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta, dan mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri. Langkah kedua adalah memastikan keterjangkauan dan kestabilan harga-harga kebutuhan pokok terutama bagi masyarakat tidak mampu. Selanjutnya, pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan pengelolaan tata ruang dan wilayah, serta memastikan meningkatnya daya saing Jakarta melalui kemudahan untuk berbisnis dan berinvestasi.

3. Misi Ketiga : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Jakarta sebagai ruang pembelajaran bagi aparatur negara untuk menumbuhkan kembangkan kemampuannya. Birokrasi di Jakarta harus menjadi wahana pengembangan diri para aparatur negara agar semakin produktif, profesional, melayani dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aparatur negara juga tidak hanya mampu bekerja secara efektif dan berintegritas, namun juga mampu mewujudkan tata pemerintahan yang kolaboratif, inklusif dan terbuka. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, namun juga dilibatkan dalam proses penyusunan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan.

4. Misi Keempat : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan menjadi kunci perbaikan kualitas lingkungan di Jakarta. Pembangunan yang lestari tidak hanya memerhatikan daya dukung lingkungan namun juga menaruh perhatian besar pada daya dukung sosial. Daya dukung sosial ini memerlukan komitmen Pemerintah dan seluruh pihak untuk memastikan adanya keseimbangan antara proses pembangunan yang secara lingkungan lestari dengan pembangunan yang menghormati ruang hidup sosial masyarakat yang telah dulu ada.

5. Misi Kelima : Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia, menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras, dan mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia.

Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia menjadi miniatur Indonesia yang beragam kelompok, suku, ras dan agama. Semua golongan masyarakat hadir dan membentuk wajah Jakarta yang dinamis dan majemuk serta saling memperkaya khazanah kehidupan sehari-hari di Jakarta. Keberagaman tersebut merupakan sebuah keniscayaan, sehingga sudah selayaknya menjadi modal utama pembangunan Jakarta. Keberagaman tersebut dirayakan dengan nilai-nilai kebangsaan sebagai upaya untuk selalu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta.

5.3 JANJI KERJA

Janji Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimandatkan oleh warga Jakarta merupakan unsur pokok dalam menyusun program pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Adapun 23 Janji Kerja dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun), yang juga dapat digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu.
2. Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para guru mengaji, pengajar

Sekolah Minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama.

3. Membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga untuk menghasilkan 200.000 pewirausaha baru.
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengintegrasikan dunia usaha ke dalamnya, untuk menghasilkan lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja dan berwirausaha.
5. Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi, menyediakan Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tidak mampu, serta merevitalisasi pasar-pasar tradisional dan Pedagang Kali Lima untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang.
6. Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta.
7. Membangun pemerintahan yang bersih, modern dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi (*Smart City*).
8. Mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95 persen, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit laporan keuangan, mencapai predikat 80 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi, dan memperbaiki manajemen aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Meningkatkan Realisasi Rencana Program (daya serap anggaran) untuk memperluas cakupan dan efektivitas program-program penanggulangan banjir dan kemacetan, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.
10. Memuliakan perempuan Jakarta dengan mendukung Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif, melakukan pendataan dan pemantauan dini terhadap ibu-ibu hamil dan balita yang memerlukan bantuan khusus, memberikan cuti khusus bagi suami selama proses kelahiran anak, serta menyediakan fasilitas-fasilitas publik khusus seperti Ruang Menyusui dan Tempat Penitipan Anak yang dikelola secara sehat, profesional dan bisa diakses seluruh warga.
11. Memberdayakan perempuan Jakarta dengan mendukung sepenuhnya partisipasi perempuan dalam perekonomian, antara lain melalui pemberian Kredit Usaha Perempuan Mandiri.

12. Melindungi perempuan dan anak-anak Jakarta dari praktik pelecehan, kekerasan dan diskriminasi serta praktik perdagangan manusia (*human trafficking*), dengan mengaktifkan 267 Rumah Aman, merevitalisasi Unit Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan berbasis aplikasi bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jakarta, dan memberi subsidi bantuan hukum bagi korban.
13. Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen layanan transportasi umum, perluasan daya jangkau transportasi hingga menjangkau seluruh warga, pengintegrasian sistem transportasi umum dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta.
14. Mengatasi kesenjangan Ibu Kota dengan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Kepulauan Pembangunan Mandiri, dengan menyediakan infrastruktur, lapangan kerja, fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi segenap warganya dan menjadikannya sebagai pusat inovasi konservasi ekologi.
15. Mengaktifkan kembali komunitas-komunitas di Jakarta melalui kegiatan pengembangan kebudayaan, kesenian, olahraga, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan budaya membaca melalui Program Taman Maju Bersama, yaitu merevitalisasi taman-taman yang ada, membangun taman-taman baru dari wilayah pinggiran Jakarta, serta membangun Taman Pintar (*Science Park*).
16. Membangun dan merevitalisasi pusat-pusat pengembangan kebudayaan, antara lain dengan: membangun Taman Benyamin Sueb, menyelamatkan dan merevitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, menjadikan Jakarta sebagai pusat kebangkitan film nasional.
17. Menyelenggarakan festival olahraga dan kesenian Jakarta sepanjang tahun untuk mengembangkan pembinaan olahraga dan kesenian berbasis komunitas.
18. Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga, menggalakkan kegiatan cocok tanam kota (*urban farming*); melakukan audit berkala keamanan kampung, serta memperluas cakupan dan memperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
19. Memperluas cakupan dan memperbaiki kualitas layanan air bersih dengan prioritas pada wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk, dan memberikan subsidi langsung untuk warga tidak mampu.
20. Merevitalisasi layanan dokter komunitas, melakukan pelatihan peduli kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar, melakukan pelatihan peduli lingkungan

hidup, dan mengaktifkan Pos Perempuan Mandiri sebagai bagian dari program pengembangan Posyandu dan Posbindu.

- 21. Memberdayakan para pengembang kelas menengah untuk merealisasikan pembangunan kampung susun, kampung deret dan rumah susun, serta mempermudah akses kepemilikan bagi warga tidak mampu.
- 22. Membangun pusat-pusat pariwisata, tempat-tempat bersejarah dan pusat-pusat kegiatan warga sebagai tempat yang ramah, aman dan sejuk bagi anak, lansia dan disabilitas.
- 23. Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, Sekolah Minggu dan Majelis Taklim berbasis asas proporsionalitas dan keadilan.

Gambar 5.1
Penjabaran Visi Misi
RPJMD 2017-2022



5.4 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dengan Visi dan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Visi jangka panjang Provinsi DKI Jakarta adalah ***“Jakarta Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”***, diwujudkan melalui visi jangka menengah yaitu ***“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua”***.

Adapun Misi 1 jangka panjang “Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah” diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 4: “Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial”.

Misi 2 jangka panjang “Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas” diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 2: “Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang”.

Misi 3 jangka panjang “Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya” diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 5: “Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan”.

Misi 4 jangka panjang “Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam” diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 4: “Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial”.

Kemudian Misi 5 jangka panjang “Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan” diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 3: “Menjadikan Jakarta tempat wahana aparaturnegara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas”.

Sedangkan Misi 6 jangka panjang “Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah” diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 1: “Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui

kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan”.

Lebih lanjut uraian mengenai hal ini dapat disimak pada Gambar 5.2.

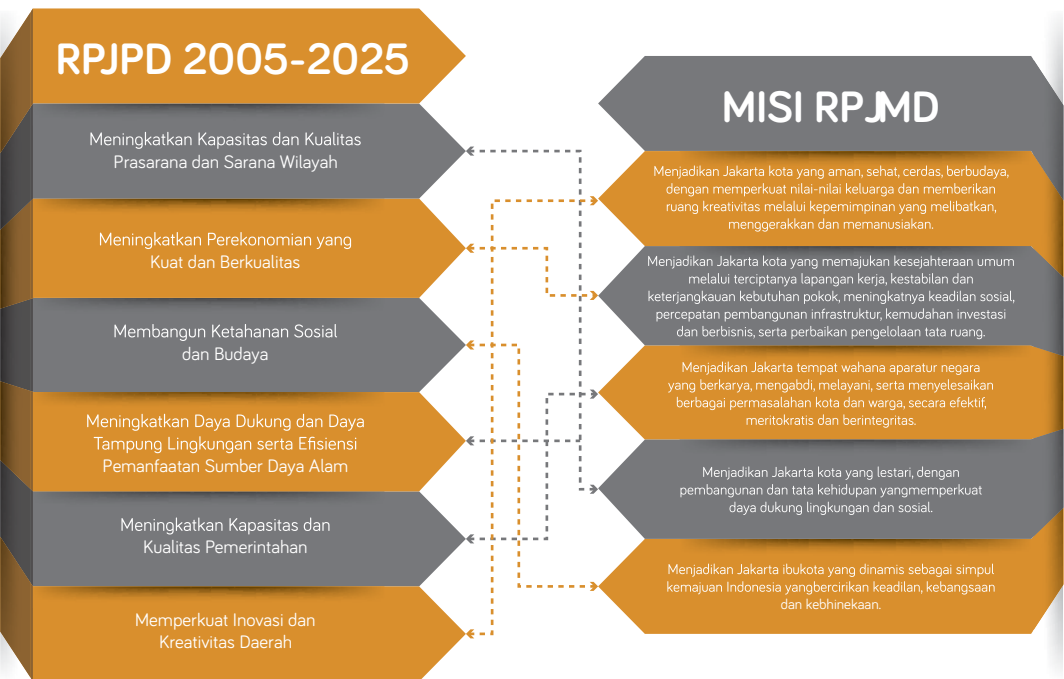
Gambar 5.2
Keterkaitan Visi RPJPD
dengan Visi dan Misi RPJMD

*Sumber : Bappeda Provinsi
DKI Jakarta, 2017*



Gambar 5.3
Keterkaitan Misi RPJPD
dengan Visi dan Misi RPJMD

*Sumber : Bappeda Provinsi
DKI Jakarta, 2017*



5.5 Keselarasan Visi, Misi RPJMD Provinsi DKI Tahun 2017-2022 dengan Visi, Misi RPJMN Tahun 2015-2019

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia adalah: “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur”. Proses pencapaian visi tersebut dilakukan melalui pentahapan lima tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Saat ini dokumen RPJMN 2015-2019 merupakan tahapan ketiga dengan Visi “Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dokumen RPJMN ini telah ditetapkan pemerintah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan Nasional Indonesia tahun 2015-2019 diprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warga yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian semakin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan IPTEK seraya bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Adapun Visi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta lima tahun mendatang (2017-2022) yaitu “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”, selaras dengan Visi RPJMN 2015-2019 yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dalam hal menciptakan masyarakat yang berkepribadian, berjiwa gotong royong, dan masyarakat yang memiliki keharmonisan antarkelompok sosial,

Gambar 5.4

Keterkaitan Visi RPJPN, RPJMN dan RPJMD DKI Jakarta



serta pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kesejahteraan dengan berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan IPTEK.

Lebih lanjut, uraian keterkaitan antara Misi RPJPN Tahun 2005-2025, Misi RPJMN 2015-2019 dan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 dijabarkan dalam Gambar 5.3.

Gambar 5.5

Keterkaitan Misi RPJPN,
RPJMN dan RPJMD
DKI Jakarta

Delapan Misi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Tujuh Misi Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Lima Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan

Adapun hubungan antara Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 dengan Misi dan Nawacita (Agenda Prioritas) dalam dokumen RPJMN tahun 2005-2019 dapat disimak dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
 Hubungan Antara Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dengan Misi dan Agenda Prioritas RPJMN 2015-2019

Misi RPJMD		Misi RPJMN	Agenda Prioritas RPJMN (Nawacita)
1.	Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.	2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.	1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
5.1	Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melaluiterciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.	4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama sama bangsa asia lainnya 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
5.2	Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.	2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.	2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

Misi RPJMD		Misi RPJMN	Agenda Prioritas RPJMN (Nawacita)
5.3	Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.	2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum	5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
5.4	Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan	5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

5.6 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : “Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan”.

Tujuan pertama: Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif

Sasaran:

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial

2. Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak
3. Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana

Tujuan kedua: Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berdaya

Sasaran :

1. Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua
2. Terwujudnya keluarga sejahtera

Misi Kedua : “Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang”.

Tujuan pertama: Meningkatkan kesempatan kerja

Sasaran:

Berkurangnya tingkat pengangguran

Tujuan kedua: Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif

Sasaran:

Meningkatnya kewirausahaan baru

Tujuan ketiga: Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan

Sasaran:

Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat

Tujuan keempat: Mendorong terciptanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat

Sasaran :

Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat

Tujuan kelima: Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan

Sasaran:

1. Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi
2. Meningkatnya akses sanitasi layak
3. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta
4. Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota
5. Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat

Tujuan keenam: Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta

Sasaran :

Meningkatnya pertumbuhan investasi

Tujuan ketujuh: Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan

Sasaran:

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

Misi Ketiga : “Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas”.

Tujuan pertama: Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan

Sasaran:

Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur

Tujuan kedua: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan

Sasaran :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi

Misi Keempat : “Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial”.

Tujuan pertama: Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial

Sasaran :

1. Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Melambatnya penurunan permukaan tanah
4. Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya

Misi Kelima : “Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan”.

Tujuan pertama : Mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia

Sasaran :

Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat.

Tujuan kedua: Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras

Sasaran :

1. Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya
2. Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional
3. Terwujudnya pelestarian kebudayaan
4. Terwujudnya pelestarian cagar budaya

Tujuan ketiga: Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian Kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia

Sasaran:

- 1. Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional
- 2. Terwujudnya pelestarian kebudayaan
- 3. Terwujudnya pelestarian Cagar Budaya

Tabel 5.2

Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Misi 1 : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial	Indeks Potensi Kerawanan Sosial	Nilai	25,52	24,97	24,95	22,19	22,00	22,47	22,47
		Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	36,30	35,52	34,74	33,96	33,18	32,40	32,40
			Indeks Pembangunan Gender	Nilai	95,18	95,39	95,59	95,79	96,00	96,20	96,20
		Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	Nilai	4,97	5,28	6,08	6,77	7,32	7,91	7,91
2	Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berkarya	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80,06	80,00	80,40	80,80	81,20	81,60	81,60
		Terwujudnya keluarga sejahtera	Total Fertility Rate	Nilai	2,20	2,18	2,15	2,13	2,12	2,11	2,11

Misi 2 : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan kesempatan kerja	Berkurangnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,14	5,20	5,10	5,00	4,90	4,80	4,80
2.	Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif	Meningkatnya kewirausahaan baru	Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan	Wirau-saha	73.453	19.304	46.554	46.554	46.554	46.552	278.971
3.	Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas dan berkelanjutan	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 80,5	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 81	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 82	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 83	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 84	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 85	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 85
4.	Mendorong terciptanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,78	3,58	3,38	3,18	2,98	2,78	2,78
5.	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Jumlah titik genangan banjir	Titik	15	12	7	6	5	0	0
		Meningkatnya akses sanitasi layak	Cakupan pelayanan air bersih	Persen	60,99	60,99	63,65	66,09	73,69	79,61	79,61
			Cakupan pelayanan air limbah	Persen	14,33	15,93	17,04	20,49	23,00	26,44	26,44
			Persentase penurunan volume sampah di kota	Persen	11,00	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	26,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
		Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Jumlah titik macet	Titik	155	140	116	85	47	0	0
			Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share)	Persen	18	20	22	25	28	30	30
		Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenaga listrik secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	Persentase penyediaan energi dan ketenaga listrik yang berkelanjutan	Persen	0	0	0,6	0,6	0,6	1,6	3,4
		Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Jumlah backlog hunian	Unit	302.319	294.756	293.290	291.696	290.584	287.755	287.755
6.	Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi Nilai Investasi	Triliun Rupiah	55,00	93,10	100,20	107,80	115,90	124,50	124,50
7.	Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	Persen	43	42	41	40	39	38	38

Misi 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas

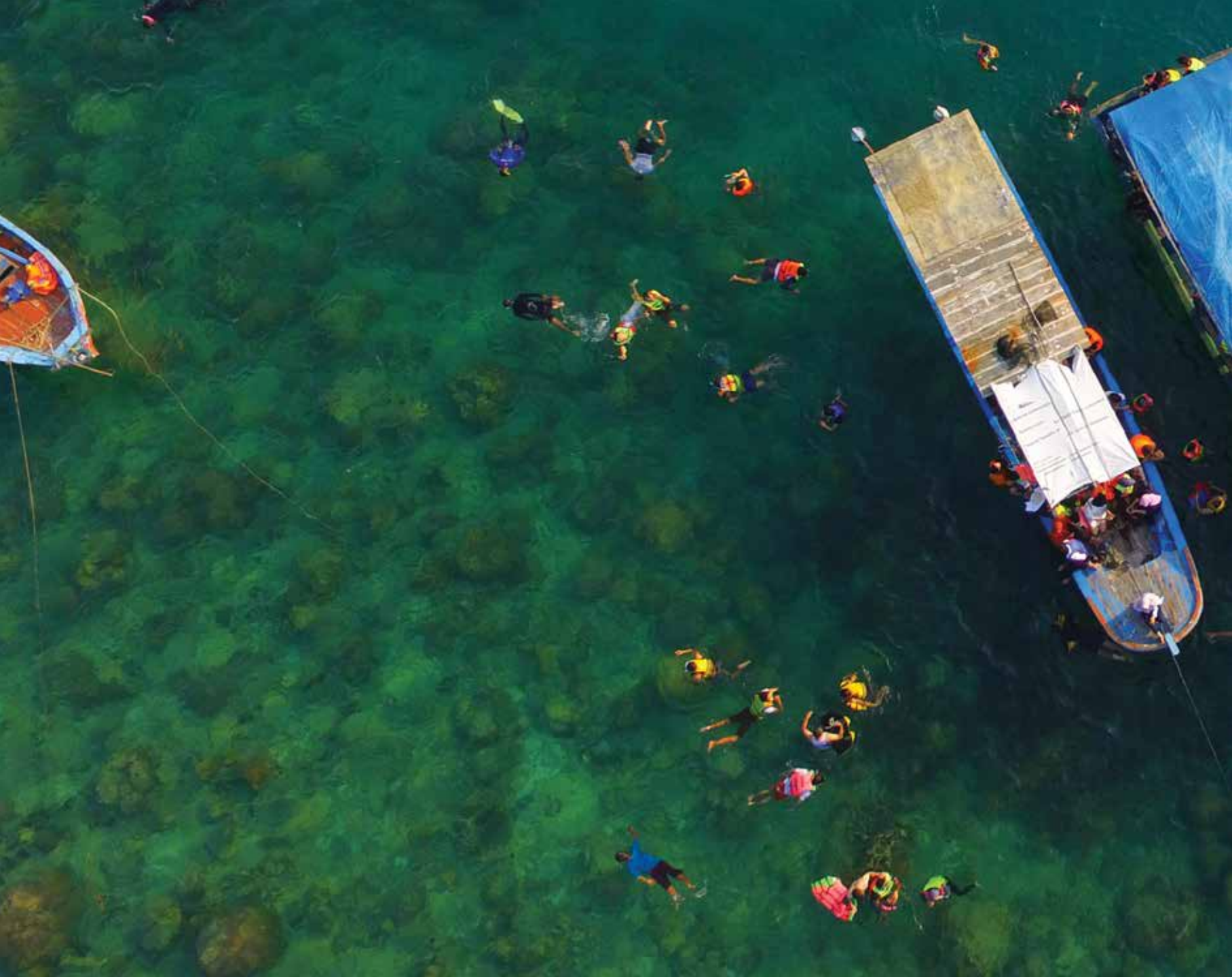
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	89,94	89,95	89,96	89,97	89,99	90,00	90,00
			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	Persen	50	52	54	56	58	60	60
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai / Predikat AKIP	Predikat	B	A	A	A	AA	AA	AA
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	0	80,00	83,00	86,00	88,00	88,50	88,50
			Skor EKPPD	Persen	3,056	3,100	3,150	3,200	3,250	3,300	3,300
			Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	0	20	20	20	20	20	100
			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	63,75	68,00	73,00	78,00	85,00	91,00	91,00
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Indeks E-Gov	Nilai	3,39	3,35	3,40	3,45	3,50	3,55	3,55

Misi 4 : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	36,41	36,77	37,14	37,51	37,89	38,27	38,27
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penambahan Rasio RTH	Persen	0,18	0,0665	0,0351	0,0351	0,0351	0,0351	0,38
		Melambatnya penurunan permukaan tanah	Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence)	Persen	0	4,30	4,185	4,099	3,985	3,870	3,870
		Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	RW	223	164	115	67	23	23	23

Misi 5 : Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia	Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat	Jumlah inovasi yang layak diikutsertakan dalam lomba berskala nasional	inovasi	-	1	2	2	2	2	9
2.	Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras	Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya	Indeks Demokrasi	Nilai	70,85	73,35	73,85	74,35	74,85	75,35	75,35
3.	Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian Kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia	Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	Jumlah wisatawan	Orang	35600.000	38800.000	41460.000	43583.000	47539.350	53.575.417	53.575.417
		Terwujudnya pelestarian kebudayaan	Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru/ kreatif dan inovatif	Event	24	25	26	27	28	29	29
		Terwujudnya pelestarian Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikonservasi	Objek	11	11	10	8	7	4	40



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong-royong.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022. Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan ini selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

6.1 Strategi Pembangunan

Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong-royong. Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu :

1. Keadilan dan keberpihakan

Strategi ini dijabarkan dalam 4 (empat) hal yaitu :

a. Kesempatan yang setara

Memastikan hadirnya kesempatan yang setara bagi semua, keadilan dirasakan dalam setiap sendi pengelolaan kota, sejak pembuatan regulasi sampai layanan publik, serta mengajak seluruh elemen kota ikut bergerak memberdayakan warga yang lemah dan terpinggirkan.

b. Suara warga

Mendengarkan suara seluruh elemen warga, mempertimbangkan perspektif perempuan, anak-anak, difabilitas, dan masyarakat marjinal dalam setiap kebijakan, membangun interaksi yang manusiawi dan realistis dengan seluruh warga dan elemen kota.

c. Kota global

Mendorong Jakarta menjadi kota global dengan segala keragaman dan kegiatannya, terbuka terhadap perubahan dan kemajuan dunia, serta masyarakat dan bisnis merasakan manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

d. Kelestarian kota

Memastikan kelestarian lingkungan (*sustainability*), tradisi, dan karakter kota ikut terjaga dan berkembang, membangun keindahan setiap sudut kota, serta memberikan ruang seluasnya bagi seni dan budaya.

2. Orientasi pada warga dan ruang interaksi

Strategi orientasi pada warga dan ruang interaksi dijabarkan dalam 4 (empat) hal yaitu :

a. Pola perilaku dan ruang interaksi

Setiap kebijakan mempertimbangkan pola perilaku dan ruang interaksi antar warga, warga difabilitas yang terhubung dengan komunitasnya, serta saling terhubung lintas segmen.

b. Ekosistem sosial

Membangun ekosistem sosial, tak hanya ekosistem ekonomi, peka pada perubahan konteks sosial dan ekonomi yang dinamis.

c. Pelibatan warga

Warga adalah pelaku utama pembangunan dengan pemerintah sebagai rekan kolaborator yang menggerakkan dan memberikan dukungan. Menangkap dan mengembangkan praktik baik, kearifan lokal dan solusi inovatif dari masyarakat.

3. Birokrasi efektif dan penguatan tata kelola

Strategi orientasi pada warga dan ruang interaksi dijabarkan dalam 3 (tiga) hal yaitu :

a. Kepercayaan publik

Mengedepankan etika, transparansi dan keterbukaan dalam setiap proses pemerintahan dan interaksi dengan warga dan elemen kota.

b. Profesionalisme birokrasi

Mengambil keputusan terukur berdasarkan data, fakta dan bukti di lapangan, bekerja sebagai satu tim yang saling mendukung, setiap aparat menjadi wakil kehadiran negara dan menjadi duta pemerintah kepada warga.

c. Sistem dan institusionalisasi solusi

Tidak terus-menerus mengandalkan solusi spontan, terutama untuk masalah yang dapat diantisipasi atau berulang, mengembangkan sistem dan prosedur operasional standar untuk meminimalkan diskresi, menjadi birokrasi yang terus belajar dan bergerak maju.

Dalam mencapai strategi pembangunan sebagaimana sebelumnya, perencanaan secara partisipatif mutlak diperlukan dalam rangka menjaring aspirasi warga DKI Jakarta dalam pembangunan tahunan maupun lima tahunan. perencanaan partisipatif merupakan salah satu pendekatan dalam proses perencanaan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan partisipatif yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta mengedepankan pemberian peluang kepada masyarakat yang seluas-luasnya sehingga dapat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan secara bottom-up bagi kepentingan bersama. Untuk itu, titik berat dari perencanaan partisipatif tersebut diarahkan pada penggerakan seluruh sumber daya yang ada di masyarakat. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi untuk berkolaborasi sesama warga melalui penggerakan partisipasi masyarakat dalam wadah filantropi, *corporate social responsibility* (CSR), swadaya masyarakat dan lain-lain.

Dalam rangka mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat tersebut, dilakukan pendampingan bagi masyarakat pada level komunitas atau rukun warga (RW) yang telah digagas sebagai percontohan pada proses musrenbang dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2019. Dengan adanya pendampingan bagi proses musrenbang, diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada di level komunitas secara lebih riil, sekaligus dapat diselaraskan dengan target dan prioritas daerah. Pendampingan dimaksud dilakukan oleh kader-kader yang berasal dari masyarakat setempat, yang diharapkan mengerti akan kondisi, permasalahan, dan potensi lingkungannya masing-masing. Direncanakan pada pelaksanaan musrenbang untuk penyusunan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2020, seluruh RW dapat difasilitasi dengan kader-kader pendamping tersebut.

Adapun rincian strategi masing-masing Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 tersusun dalam Tabel 6.1

Tabel 6.1

Strategi dan Arah Kebijakan
Provinsi DKI Jakarta
2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi
VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua		
MISI 1 : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan		
Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial	Meningkatkan upaya rehabilitasi sosial dan memperluas lokasi strategis yang bersih dan bebas dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
		Melaksanakan penegakan Perda dan atau Perkada secara yustisial dan non yustisial dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta memberdayakan potensi masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
		Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
		Meningkatkan kompetensi PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penegakan Perda dan/atau Perkada secara yustisial
		Optimalisasi PSKS
		Peningkatan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana sosial
	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	Penanganan komprehensif terhadap tindakan kekerasan perempuan dan anak, termasuk perdagangan orang dan berbagai jenis eksploitasi lainnya
		Meningkatkan pembangunan yang responsif gender secara berkelanjutan
	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Menerapkan strategi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan penanganan bencana
		Pengembangan Pengendalian operasi penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan
		Melakukan Penyusunan kebijakan teknis partisipasi masyarakat
		Pengurangan Risiko Bencana melalui Peningkatan Kemampuan Masyarakat dan Aparatur, Implementasi Fasilitas Publik Aman dan Kelurahan Tangguh Bencana serta Pemberdayaan Masyarakat, stakeholder dan difasilitasi oleh Sistem Informasi Kebencanaan.
		Penanganan Kedaruratan, Pengungsi dengan dukungan Logistik dan Peralatan, serta Pemberdayaan Masyarakat Pada Saat dan Pasca Bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan manusia sehat, cerdas, dan berdaya	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan pendidikan
		Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan
		Meningkatkan kemampuan literasi, budaya gemar membaca dan pelestarian karya
		Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi semua
		Optimalisasi pengelolaan sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien
		Pemberdayaan dan peningkatan peran pemuda dan pramuka
		Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	Terwujudnya keluarga sejahtera	Mengendalikan kuantitas penduduk dan pembangunan kualitas keluarga
Misi 2 : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang		
Meningkatkan kesempatan kerja	Berkurangnya tingkat pengangguran	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru
		Memberikan pembinaan hubungan industrial
		Melakukan pembinaan dan penegakan hukum dalam rangka perlindungan norma ketenagakerjaan
Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif	Meningkatnya kewirausahaan baru	Meningkatkan pertumbuhan IKM yang berkualitas dan berkelanjutan
		Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran anggota dan Masyarakat dalam mengembangkan Koperasi melalui kompetensi manajerial pengelolaan, pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan berbasis IT
		Peningkatan fasilitasi UKM untuk mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan kemitraan, serta pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan UKM DKI Jakarta
		Partisipasi pada pameran dagang, melakukan Misi Dagang, meningkatkan wawasan para pelaku usaha / UKM

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Pengintensifan kuantitas dan kualitas Pengawasan Perdagangan
		Peningkatan Pelayanan Tera/Tera Ulang
		Peningkatan partisipasi pameran dagang, Pemasaran hasil produk koperasi dan UKM melalui Bazar dan Expo
Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Ketahanan pangan yang berkelanjutan
Mendorong terciptanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	Mensinergikan upaya penanganan fakir miskin
Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Membangun dan memelihara infrastruktur pengendali banjir dan abrasi.
	Meningkatnya akses sanitasi layak	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air bersih.
		Membangun dan mengelola sistem pengolahan air limbah.
		Mengurangi sampah dan meningkatkan pelayanan penanganan sampah
	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan
		Meningkatkan konektivitas di wilayah provinsi
		Mempertahankan kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap
		Meningkatkan Panjang Jalan yang Memiliki prasarana Jaringan Utilitas
		Pengembangan Sistem Angkutan Umum
		Pengembangan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan
		Penyediaan, Pengelolaan dan pengembangan pencahayaan kota yang hemat energi
	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan jumlah perumahan rakyat yang layak huni tertata rapi dan berkelanjutan
		Peningkatan Jumlah Perumahan Rakyat yang lengkap sarana dan prasarana
Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Penerapan Kebijakan, Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dan Pembangunan Jakarta <i>Investment Center</i> (JIC)
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan non Perijinan
		Meningkatkan sinergi antar sesama BUMD/PT Patungan dan SKPD, memperkuat daya saing BUMD/PT Patungan, konsolidasi BUMD/PT Patungan untuk menguatkan struktur modal, SDM dan bisnis, menerapkan prinsip GCG, mendorong BUMD/PT Patungan <i>Go Public</i> , transformasi bisnis BUMD/PT Patungan, optimalisasi aset BUMD, meningkatkan pelayanan BUMD, memberikan PMD secara selektif untuk proyek penugasan tertentu.
Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan masyarakat, secara efektif, meritokratis dan berintegritas		
Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Pemetaan Kompetensi SDM Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Mengembangkan sistem manajemen kinerja ASN
		Mewujudkan jiwa korps Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta
		Peningkatan Kompetensi SDM
		Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pengembangan SDM
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung pemda yang memenuhi standar
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja pembangunan
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
		Optimalisasi pelayanan pemakaman
		Peningkatan Pelayanan Penghuni Rumah Susun
		Optimalisasi sistem pengaduan warga yang terintegrasi, Optimalisasi layanan <i>environment</i> sosial dan dukungan TIK Optimalisasi penyediaan analisis big data untuk sektor prioritas
		Digitalisasi sistem tindak lanjut SKPD/UKPD atas aspirasi warga Jakarta pada media massa
		Melaksanakan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi
		Peningkatan kualitas pelayanan, aparatur, database kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan
		Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah
		Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Gubernur kepada Kota/Kabupaten
		Trending topik /berita strategis, Mengidentifikasi media dan komunitas potensial, Meningkatkan <i>awareness</i> netizen, Menempatkan beragam informasi di LED dan website informasi SKPD/UKPD, Membuat kemasan informasi menjadi menarik dan mudah dipahami netizen, Penetapan standar kompetensi SDM, kerjasama dengan stakeholder, Melaksanakan Advokasi, Peningkatan Badan Publik, Edukasi dan Sosialisasi

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Mengimplementasikan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik
		Peningkatan Daya Tanggap dan Inovasi atas Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Publik Urusan Kesehatan
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan non Perijinan
		Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat
		Meningkatkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi sektor keuangan
		Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan Perekonomian
		Meningkatkan efektivitas kerjasama luar negeri yang berbasis gerakan
		Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
		Fasilitasi Penyelenggaraan tugas dan fungsi kedewanan
		Menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral, Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik, Membangun dan mengintegrasikan Sistem Informasi Statistik Peningkatan data sektoral SKPD/ wilayah yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Statistik
		Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai
		Meningkatkan dan mengelola kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai.
		Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai
		Peningkatan Capaian Kinerja Daerah
		Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat
		Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pemerintahan
		Peningkatan Efektifitas Kerjasama Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan penataan kota dan lingkungan hidup
		Pengelolaan Administrasi Umum dan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah yang efektif dan efisien
		Pengelolaan aset daerah yang akuntabel
		Peningkatan pengelolaan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah
		Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
		Optimalisasi teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa
		Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		1. Identifikasi kebutuhan penyelenggaraan persandian; 2. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan persandian; 3. Sosialisasi <i>Security Awareness</i> ; 4. Pelatihan di bidang persandian; 5. Pengelolaan sumberdaya persandian; 6. Operasional pengamanan persandian;
		Membentuk Organisasi Perangkat Daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi serta tepat perilaku melalui penataan kelembagaan, analisa jabatan, penatalaksanaan dan peningkatan pelayanan publik dalam mewujudkan target Reformasi Birokrasi
		Peningkatan Persentase Regulasi yang harmonis
		Peningkatan Persentase Pemberian Bantuan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
		Identifikasi kebutuhan, menentukan Skala Prioritas, Pengalokasian anggaran, Registrasi perangkat komputer yang digunakan untuk operasional tata kelola pemerintahan berbasis elektronik secara bertahap, <i>Redundant</i> perangkat jaringan, <i>Redundant bandwidth</i> jaringan
		Identifikasi kebutuhan, menentukan Skala Prioritas, Investasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pengalokasian anggaran, peningkatan <i>coverage</i> , pemeliharaan berkala

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Membuat kajian dan regulasi, identifikasi kebutuhan kapasitas data centre dari seluruh SKPD/UKPD, menghitung daya tampung eksisting dan daya tampung yang dibutuhkan, membuat desain ketersediaan dan penataan ruang data center serta DED (<i>Detil Engginering Design</i>), pembangunan perluasan data centre, relokasi perangkat data dari SKPD/UKPD, penyediaan perangkat
		Membuat surat edaran, melakukan sosialisasi, melakukan monitoring pembuatan subdomain di seluruh SKPD, mengkoordinasikan dengan BKD untuk menjadikan bagian dari KPI, <i>Assesment</i> TIK pada SKPD
		<i>Assesment</i> TIK pd SKPD, Penguatan fungsi Dinas Kominikasi Informatika dan Statistik Prov. DKI Jakarta khususnya Rekomendasi dan Controlling , Komitmen dari pimpinan, Penguatan SDM (jumlah dan kualitas), Pembentukan IT Implementasi Project Tim, Implementasi RITIK
		Pemenuhan standarisasi LKPP, Standarisasi ISO 27001, Terpenuhinya Standard Sistem Manajemen Keamanan Informasi Standardisasi LPSE dan SNI/ISO 27001
Misi 4 : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.		
Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Pengembangan dan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
		Menjaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan jumlah flora dan fauna yang dikonservasi dengan didukung penyediaan sarana prasarana yang memadai
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas RTH
	Melambatnya penurunan permukaan tanah	Peningkatan cadangan air tanah

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Peningkatan jumlah kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan
Misi 5 : Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan		
Mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia.	Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat.	Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja pembangunan
Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras	Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya	Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat
		Pemberian pemahaman tentang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan kesadaran bela negara, kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan
		Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia	Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan E-Tourism
	Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan	Melakukan pembinaan, pelatihan, pengembangan dan pelestarian SDM dan unsur kebudayaan serta peningkatan sarana prasarana dan melalui upaya lainnya berupa pengelolaan mandiri.
	Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya	Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik, menciptakan nilai tambah, dan membuka akses seluas-luasnya terhadap cagar budaya melalui upaya lainnya berupa pengelolaan mandiri

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

6.2.1 Arah Kebijakan Provinsi

Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran Visi dan Misi pembangunan DKI Jakarta tahun 2017-2022 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai bagian dari program dunia untuk mencapai target *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015. Tujuan pembangunan dalam RPJMD 2017-2022 sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah memantapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode 2013- 2017 dengan fokus pada pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan dengan terus memantapkan daya saing global.

Pembangunan periode ini sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 diarahkan pada :

1. Pemantapan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta
 - a. Sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi
 - b. Pemantapan sistem tata air dan drainase, pemeliharaan badan sungai dan kanal
 - c. Pengolahan dan pengendalian sampah dan limbah
 - d. Pembangunan jaringan air bersih yang mencakup seluruh wilayah kota dan pengembangan penyediaan sistem jaringan air minum kota
 - e. Penguatan kebijakan efisiensi energi
 - f. Pemantapan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak
2. Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta
 - a. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan mantap dengan tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan serta inklusifitas
 - b. Daya beli masyarakat terkelola dengan baik
 - c. Ketahanan pangan semakin mantap

- d. Beroperasi dan berfungsinya lembaga perekonomian profesional yang mendukung ekonomi masyarakat
 - e. Sistem perijinan usaha terintegrasi dengan sistem kegiatan ekonomi lainnya
- 3. Pemantapan ketahanan sosial budaya
 - a. Pemantapan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta
 - b. Pemantapan derajat kesehatan warga Jakarta
 - c. Revitalisasi kelembagaan pemuda
 - d. Pemantapan pengarusutamaan gender dan anak
- 4. Pemantapan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam
 - a. Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan
 - b. Optimalisasi daya dukung dan daya tampung kota melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya energi dan air tanah
 - c. Menuju kota yang berketahanan energi
 - d. Pelestarian lingkungan alam dalam peningkatan daya dukung
- 5. Pemantapan kualitas organisasi pemerintah
 - a. Pemberian kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - b. Pemantapan akuntabilitas publik dalam hal pelayanan masyarakat
 - c. Pemantapan struktur birokrasi dan aparatur, hubungan antar lembaga, BUMD dan swasta
- 6. Pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta
 - a. Pemantapan kapasitas dan kualitas sumber daya daerah untuk mendukung pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi
 - b. Kebijakan pengembangan kreativitas dan inovasi serta pemantapan apresiasi

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dengan tahapan sebagai berikut :

Gambar 6.1

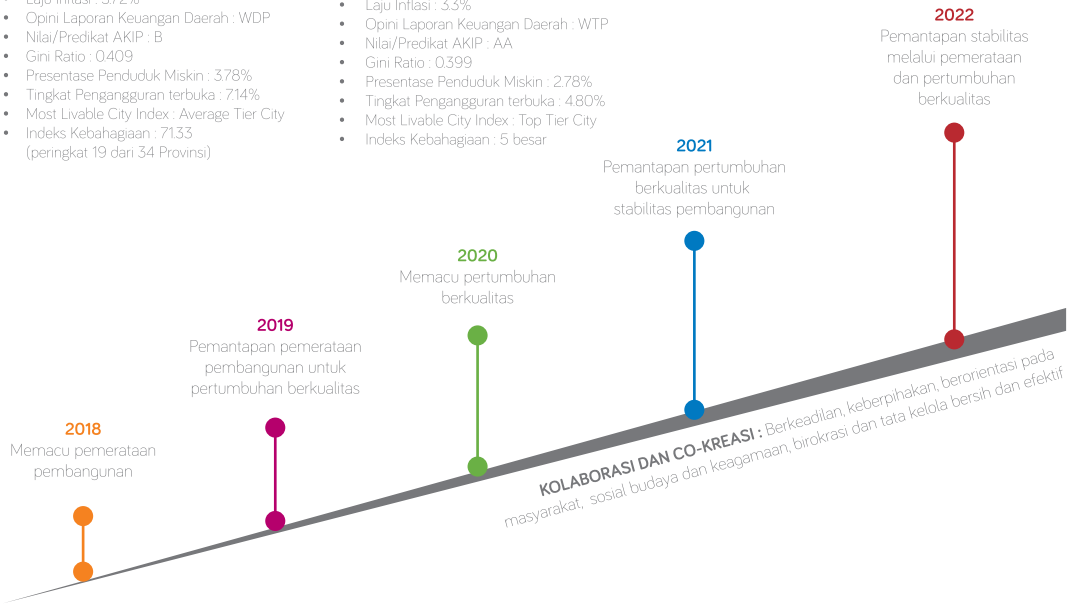
Arah kebijakan pembangunan
(Milestone) tahun 2017-2022

KONDISI SAAT INI

- IPM : 8006
- Pertumbuhan PDRB : 622%
- Laju Inflasi : 3,72%
- Opini Laporan Keuangan Daerah : WDP
- Nilai/Predikat AKIP : B
- Gini Ratio : 0,409
- Presentase Penduduk Miskin : 3,78%
- Tingkat Pengangguran terbuka : 7,14%
- Most Livable City Index : Average Tier City
- Indeks Kebahagiaan : 7133
(peringkat 19 dari 34 Provinsi)

KONDISI TAHUN 2022

- IPM : 8160
- Pertumbuhan PDRB : 7%
- Laju Inflasi : 3,3%
- Opini Laporan Keuangan Daerah : WTP
- Nilai/Predikat AKIP : AA
- Gini Ratio : 0,399
- Presentase Penduduk Miskin : 2,78%
- Tingkat Pengangguran terbuka : 4,80%
- Most Livable City Index : Top Tier City
- Indeks Kebahagiaan : 5 besar



1. Arah kebijakan Tahun 2018

Pembangunan pada tahun 2018 diselenggarakan dengan tema **Memacu Pemerataan Pembangunan**.

2. Arah kebijakan Tahun 2019

Pembangunan pada tahun 2019 diselenggarakan dengan tema yaitu **Pemantapan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas**.

3. Arah kebijakan Tahun 2020

Pembangunan pada tahun 2020 diselenggarakan dengan tema yaitu **Memacu Pertumbuhan Berkualitas**.

4. Arah kebijakan Tahun 2021

Pembangunan pada tahun 2021 diselenggarakan dengan tema yaitu **Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas Untuk Stabilitas Pembangunan**.

5. Arah kebijakan Tahun 2022

Pembangunan pada tahun 2022 diselenggarakan dengan tema yaitu **Pemantapan Stabilitas Melalui Pemerataan dan Pertumbuhan Berkualitas**.

6.2.2 Arah Kebijakan Kewilayahan

Sebagai daerah otonomi di tingkat Provinsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewajiban dalam perencanaan dan pengembangan keenam wilayah adminitrasinya, yang terdiri dari 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi.

Kedudukan kota administrasi dan kabupaten administrasi tersebut merupakan konsekuensi format otonomi tunggal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diletakkan di tingkat provinsi. Kedudukan kota administrasi dan kabupaten administrasi sebagai perangkat daerah provinsi memerlukan pengaturan khusus sehingga terwujud keharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu sebagai wujud nya hal tersebut, maka untuk meningkatkan dan optimalisasi pelayanan masyarakat di wilayah kota dan kabupaten administrasi maka diperlukan pengembangan kawasan kota dan kabupaten administrasi secara selaras, terarah, terpadu, dan terintegrasi. Berikut arah kebijakan kewilayahan yang dijabarkan dalam bentuk pengembangan wilayah 5 (lima) Kota administrasi dan 1 (satu) Kabupaten administrasi.

A. Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Pusat

a. Penataan Kawasan Johar Baru

Kawasan Johar Baru merupakan wilayah kecamatan dengan luas wilayah 2,38 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 117.985 jiwa (tahun 2015). Pemanfaatan lahan di wilayah Kecamatan Johar Baru lebih banyak didominasi oleh permukiman padat, selain itu tersedia beberapa fasilitas umum yaitu gelanggang remaja, sekolah dan pasar.

Kepadatan penduduk Johar Baru sebesar 48.890 jiwa/km² (tahun 2015) menyebabkan terbatasnya jumlah ruang publik/ruang terbuka hijau dan kualitas permukiman baik dari segi fisik bangunan, akses serta sanitasi menjadi buruk. Hal ini semakin menambah masalah kerawanan sosial seperti rawan narkoba dan tawuran antar warga. Disamping itu, sebagian wilayah di Kawasan Johar Baru merupakan kawasan rawan banjir/genangan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta tahun 2030, Kawasan Johar Baru diarahkan pengembangannya sebagai Rencana pengembangan kawasan campuran dengan perbaikan lingkungan kawasan campuran dan disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Selain itu meningkatkan infrastruktur, pembangunan Johar Baru juga diarahkan untuk membentuk masyarakat yang mempunyai kohesivitas dan lebih toleran, kreatif dan berkembang.

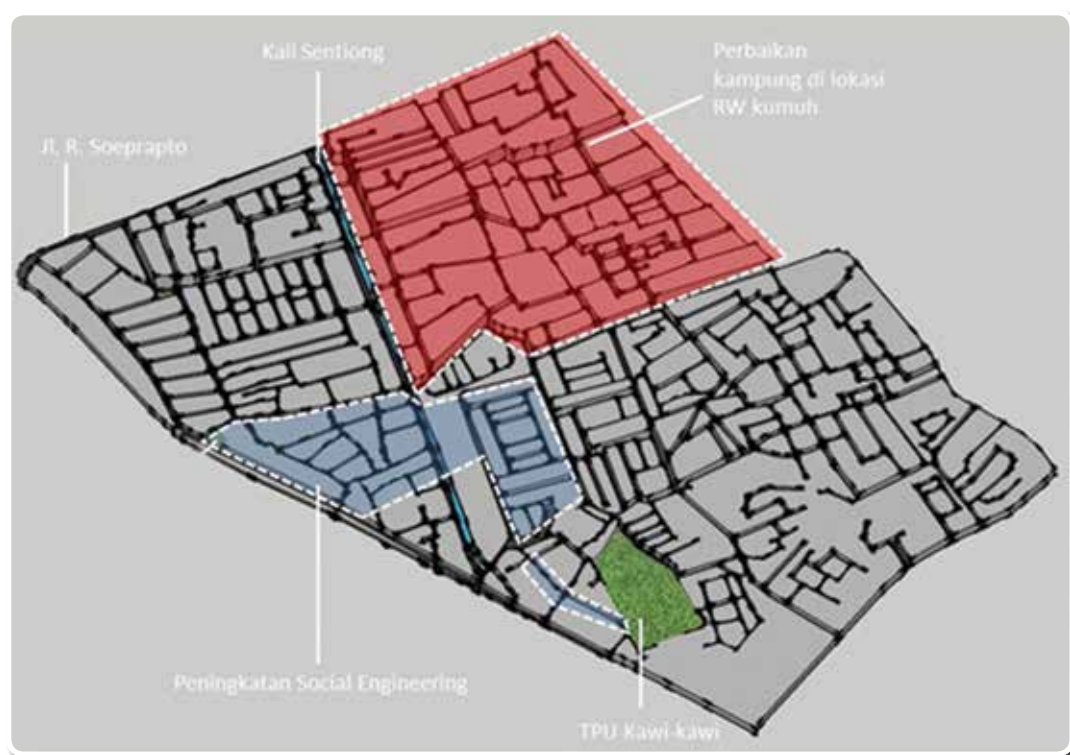
Rencana pengembangan dan penataan Kawasan Johar Baru diarahkan pada :

- Pembangunan dan pemeliharaan taman interaktif dan ruang publik terbuka ramah anak
- Peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jalan lingkungan/orang
- Peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase
- Penataan kampung di lokasi RW kumuh
- Pemeliharaan taman dan jalur hijau
- Peningkatan *social engineering*
- Pembentukan karakter building
- Pengembangan kelompok usaha baru/wirausaha baru
- Pemberdayaan masyarakat dengan pola pendekatan cultural, struktural dan prosesusual
- Sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan oleh seluruh stake holder

Gambar 6.2

Penataan Kawasan Johar Baru

Sumber : Subanppeko Jakarta Pusat, 2018



b. Pengembangan Kawasan Senen

Kawasan Senen saat ini masih menjadi salah satu pusat perdagangan di Jakarta. Stasiun Pasar Senen merupakan Stasiun Kereta Api yang melayani rute antar kota utama di Pulau Jawa maupun rute komuter. Jumlah penumpang per hari yang dilayani dari Stasiun Pasar Senen sebanyak 19.000 orang, sedangkan pada musim mudik lebaran dapat meningkat menjadi 25.000 orang per hari. Fasilitas publik lainnya yaitu adanya terminal Pasar Senen yang merupakan terminal antara yang melayani rute-rute angkutan umum dalam kota dan rute Jabotabek. Di kawasan ini juga terdapat pusat pertokoan yang modern serta berderet beberapa bangunan apartemen.

Untuk pusat perbelanjaan terdapat Proyek Pasar Senen dimana aktivitasnya sama seperti di pasar tradisional dimana masih terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli. Permasalahan di kawasan Pasar Senen yaitu terdapat sekitar 396 Pedagang Kaki Lima (PKL), dan masih banyak PKL yang berjualan tidak pada tempatnya atau berjualan di trotoar dan bahu jalan. Penataan atau relokasi PKL masih terkendala dengan ketersediaan kios serta kemampuan PKL untuk memenuhi kewajibannya. Jumlah Tempat Usaha di Pasar Senen yang dikelola PD. Pasar Jaya mencapai 7.000-an dan belum dapat menampung PKL lainnya. Belum tertibnya parkir kendaraan di kawasan ini juga turut menyumbang kemacetan. Hal ini menyebabkan kapasitas jalan menjadi mengecil dan berdampak pada semakin padatnya kendaraan di kawasan Senen. Selain itu, penutupan lintasan sebidang ini juga berpengaruh pada pergerakan warga di sekitar kawasan tersebut serta berpotensi menurunkan omset penjualan lokbin poncol dan pedagang lainnya.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, Kawasan Senen ditetapkan sebagai sistem pusat kegiatan sekunder. Kawasan ini adalah pusat kawasan perdagangan dan jasa dengan stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep *Transit Oriented Development* (TOD). Kawasan Senen menjadi pusat kegiatan sekunder yang memiliki berbagai fungsi seperti stasiun, terminal, pusat perbelanjaan, gelanggang remaja dan hunian.

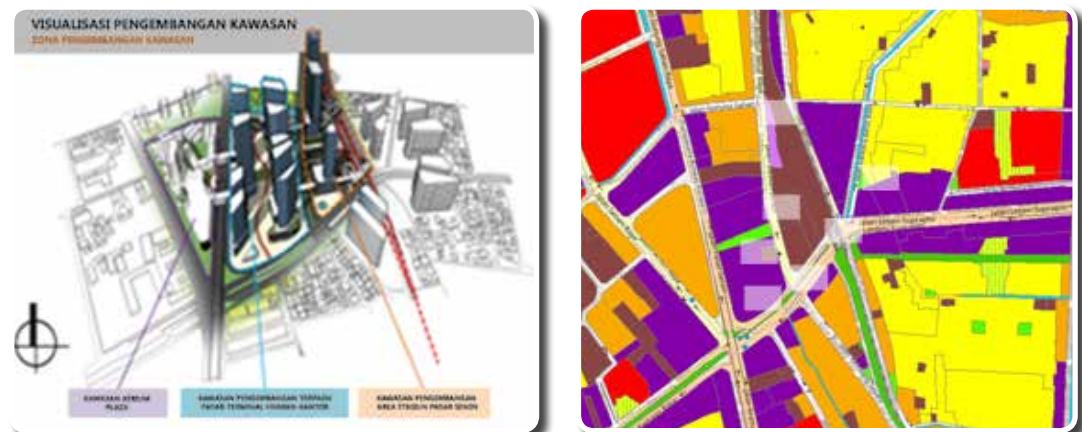
Untuk mengatasi permasalahan di kawasan ini terdapat beberapa solusi untuk mendukung Pemerintah Propinsi dalam mengembangkan kawasan Pasar Senen yang diarahkan menjadi pusat kawasan perdagangan dan jasa serta stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep *Transit Oriented Development* (TOD), yaitu dengan :

- Melakukan penataan dan relokasi pedagang kaki lima di beberapa titik/ jalur perpindahan penumpang, termasuk pembinaan para PKL
- Perbaikan infrastruktur kota untuk mendukung konsep TOD, antara lain penataan trotoar yang saling menghubungkan antar moda
- Melakukan penataan taman dan ruang terbuka hijau
- Pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk penyeberangan yang menghubungkan fasilitas perpindahan angkutan umum massal ke pusat-pusat kegiatan
- Pengendalian arus orang atau warga agar semakin mudah untuk mengakses menuju lokasi binaan atau penampungan PKL, pusat-pusat perbelanjaan atau fasilitas publik lainnya
- Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota
- Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk pengendalian parkir liar
- Pemasangan rambu dan marka jalan
- Peningkatan saluran air

Gambar 6.3

Pengembangan Kawasan
Senen

Sumber : Subanppeko Jakarta
Pusat, 2018



c. Penataan Kawasan Pasar Baru

Kawasan Pasar Baru telah dikenal sebagai tempat perbelanjaan elit orang-orang di Batavia sejak zaman kolonial Belanda. Secara umum, Kawasan Pasar Baru dibagi menjadi enam area utama, yakni Metro Pasar Baru, Metro Atom atau Pasar Atom, Harco Pasar Baru, Pasar Baru, Istana Pasar Baru, dan Jalan Pintu Air

Seiring berjalannya waktu, popularitas Kawasan Pasar Baru sebagai tempat perbelanjaan elit semakin menurun. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pusat-pusat perbelanjaan baru yang lebih modern seperti mall dan supermarket di Jakarta dan sekitarnya, serta adanya pergeseran gaya hidup warga kota. Untuk melindungi pasar yang penuh nilai sejarah ini, pada tahun 2000 Pemerintah DKI Jakarta menetapkan Pasar Baru dan kawasan sekitarnya sebagai kawasan belanja bertaraf internasional melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3048 tahun 2000. Adapun dalam RTRW 2030, Kawasan Pasar Baru ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan skala kota atau pusat kegiatan tersier (pusat perdagangan dan jasa).

Kawasan Pasar Baru juga ditetapkan sebagai pusat kegiatan tersier, atau pusat kegiatan perdagangan skala kota untuk mengembangkan dan mengembalikan popularitas Pasar Baru sebagai pusat wisata belanja dan kuliner.

Untuk mendukung pusat kegiatan tersier dan mengatasi potensi permasalahan di Kawasan Pasar Baru, terdapat beberapa solusi untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

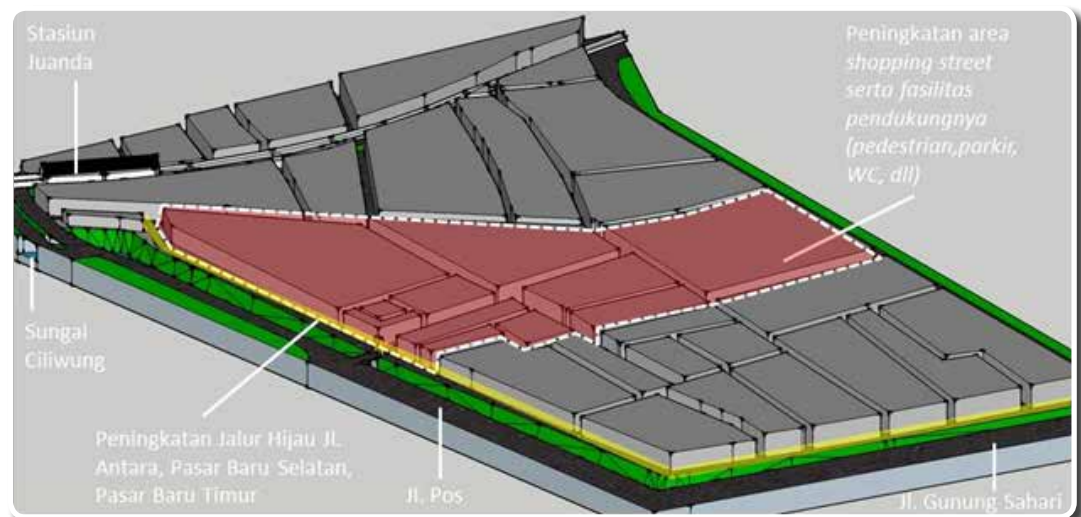
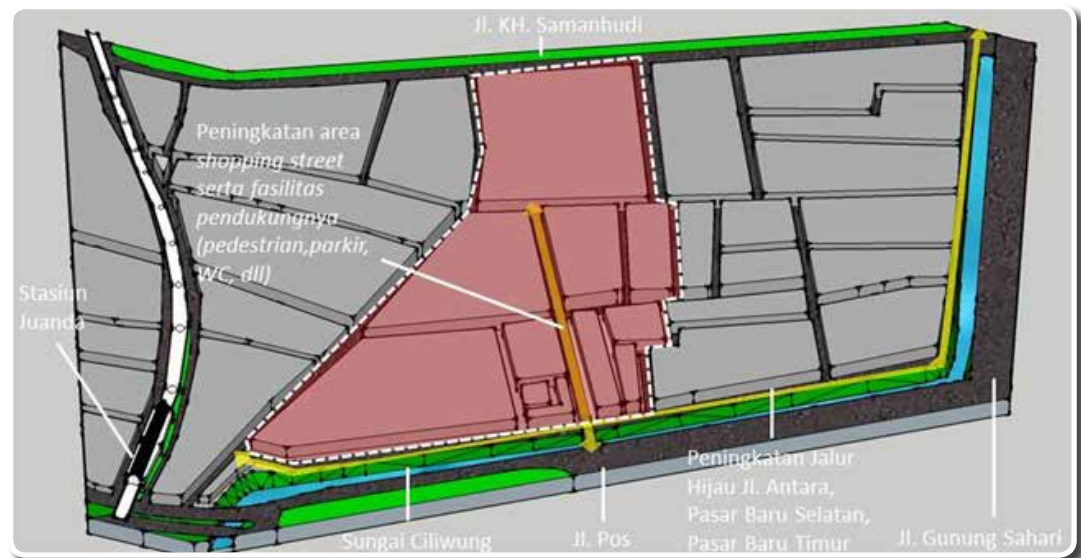
- Perbaikan infrastruktur kota untuk mendukung fungsi sebagai kawasan kegiatan perdagangan skala kota atau wisata belanja
- Penataan dan optimalisasi area parkir yang tersedia
- Peningkatan jalur pedestrian di dalam Kawasan Pasar Baru.
- Peningkatan Jalur Hijau Jalan Pintu Air, Jalan Antara, Jalan Pasar Baru Selatan dan Jalan Pasar Baru Timur untuk mendukung konsep water front city.
- Pengendalian ketertiban dan kenyamanan di sepanjang kawasan
- Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan mengantisipasi munculnya PKL baru/liar dalam Kawasan Pasar Baru.
- Penyelenggaraan festival-festival
- Penataan dan penyelenggaraan kuliner
- Peningkatan penatacahayaan pintu masuk kawasan dan sepanjang koridor Pasar Baru

- Peningkatan infrastruktur jembatan, trotoar/pedestrian, kali, penghijauan dan taman
- Peningkatan koordinasi, fungsi dan pelibatan asosiasi/komunitas Pasar Baru dalam penataan Kawasan.

Gambar 6.4

Penataan Kawasan Pasar Baru

Sumber : Subanppeko Jakarta Pusat, 2018



d. Pengembangan Kawasan Tanah Abang

Kawasan Tanah Abang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tanah Abang yang mempunyai luas wilayah sebesar 9,3 km² dan jumlah penduduk 181.135 jiwa (2017). Awal mula Kawasan Tanah Abang berupa pasar yang dikhususkan untuk berjualan tekstil dan barang kelontong serta dibuka hanya pada hari sabtu.

Seiring berjalannya waktu Pasar Tanah Abang semakin berkembang, bangunan pasar yang awal mula berdiri hanya menggunakan konstruksi sederhana berbahan bambu, kini telah berubah menjadi bangunan tinggi yang berlantai banyak dan terbagi kedalam beberapa blok, dari blok A sampai dengan blok G. Disamping itu, terdapat pula aktivitas perdagangan khusus hari Senin dan Kamis (Pasar Tasik) sejumlah 1.200 pedagang di 3 (tiga) lokasi yaitu lokasi bongkaran Tanah Abang, areal parkir Masjid Said Naum dan sisi timur Jl. Jatibaru.

Kawasan Tanah Abang merupakan salah satu kawasan strategis yang dimiliki DKI Jakarta saat ini, namun demikian disisi lain kondisi dan kualitas lingkungan di kawasan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota Jakarta saat ini. Untuk itu diperlukan perbaikan kondisi dan kualitas lingkungan di kawasan tersebut. Hal ini mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 41 Tahun 2014 yang menugaskan PD. Pembangunan Sarana Jaya untuk dapat melaksanakan pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang.

Permasalahan di Kawasan Tanah Abang adalah banyaknya pedagang kaki lima (PKL), kemacetan lalu lintas di Kawasan Tanah Abang, kurangnya lahan untuk parkir kendaraan maupun aktivitas bongkar muat barang, serta tidak tertibnya perilaku pengguna KRL yang rata-rata per hari mencapai 120.000 orang keluar-masuk area Stasiun Tanah Abang maupun berpindah moda transportasi di sekitar area stasiun.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 Provinsi DKI Jakarta, Kawasan Tanah Abang diarahkan sebagai kawasan pusat kegiatan primer. Definisi kawasan pusat kegiatan primer dalam RTRW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nasional atau beberapa provinsi dan internasional.

Untuk jangka pendek telah dilakukan penataan PKL di Jalan Jatibaru sebanyak 372 PKL dan penataan ojek didalam area Stasiun Tanah Abang untuk mempermudah perpindahan moda, sedangkan untuk 5 (lima) tahun kedepan diperlukan beberapa solusi, antara lain:

- Revitalisasi Pasar Blok G, dan pembangunan *Sky Bridge* maupun jembatan penyebrangan orang menuju Stasiun Tanah Abang atau ke titik pemberhentian antar moda transportasi.
- Pembangunan *fly over/* jalan tembus di Kali Inspeksi Kanal banjir Barat untuk menghindari perlintasan sebidang rel kereta api menuju Jl. Tenaga Listrik/Jl. Jati Pinggir

Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Pelabuhan Muara Baru yang melayani lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang, Jakarta Utara juga memiliki pusat wisata sejarah, bahari, budaya dan berbagai pusat perbelanjaan.

Salah satu sektor pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi peningkatan ekonomi untuk wilayah Jakarta Utara sesuai dengan karakteristiknya sebagai daerah pesisir adalah melalui optimalisasi kawasan pariwisata pesisir.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, rencana pembangunan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (2) huruf k untuk Pola Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, diarahkan untuk pengembangan kawasan tujuan wisata pesisir.

Kawasan tujuan wisata pesisir sebagaimana dimaksud dalam RTRW 2030, pasal 133 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut : Sentra Perikanan Muara Angke, Masjid dan Makam Luar Batang, Kawasan Sunda Kelapa, Pusat Perbelanjaan Mangga Dua, Taman Impian Jaya Ancol, Bahtera Jaya dan Yacht Club, Stasiun Tanjung Priok, Masjid Islamic Center, Gereja Tugu dan Kampung Tugu, Cagar Budaya Rumah Si Pitung dan Masjid Al Alam dan Pusat Perbelanjaan Kelapa Gading.

Rencana pengembangan kawasan wisata unggulan/ prioritas Kota Administrasi Jakarta Utara selama periode 5 Tahun (2018 - 2022) diprioritaskan pada Kawasan Destinasi Wisata Cagar Budaya Rumah si Pitung dan Masjid Al Alam.

Gambar 6.6

Rencana Peruntukan Kawasan Marunda (Rumah si Pitung dan Masjid Al-Alam)

Sumber : Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Utara, 2018



Sebagai kawasan tujuan wisata pesisir, direncanakan program Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Rumah si Pitung dan Masjid Al Alam, dapat dilihat melalui 3 (tiga) aspek pendukung, diantaranya : Aspek Aksesibilitas; Aspek Aminitas dan Aspek Atraksi. Penataan trotoar yang ramah terhadap anak-anak, orang tua dan penyandang disabilitas; pembangunan jembatan di atas Sungai Tiram; pembangunan beberapa akses jalan menuju lokasi; papan penunjuk arah menuju lokasi; penataan parkir pengunjung wisata, baik untuk kendaraan menggunakan bus maupun kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) masuk dalam Aspek pendukung Aksesibilitas. Peningkatan kebersihan dengan penyediaan tempat sampah pilah dan gerakan masyarakat peduli lingkungan; pengadaan souvenir bernuansa betawi; penghijauan di dalam kawasan; pengadaan sarana wifi id untuk publik; pengadaan sarana CCTV; pengadaan *Tourist Information Center* (TIC); restorasi Rumah si Pitung dan Masjid Al Alam; penyediaan ruang kesenian indoor; Pembangunan sarana wisata kuliner; pembangunan MCK Umum untuk pria, ibu dan anak serta penyandang disabilitas; pembangunan gerbang kawasan dan pembangunan penerangan jalan umum serta penatacahayaan masuk dalam Aspek pendukung Aminitas. Sedangkan ditinjau dari Aspek Atraksi direncanakan penjadwalan rutin pertunjukan kesenian betawi di Kawasan Cagar Budaya Rumah si Pitung.

Gambar 6.7

Rencana Pengembangan
Rumah si Pitung

*Sumber : Suku Dinas Cipta
Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Kota Adm.
Jakarta Utara, 2018*



Gambar 6.8

Rencana Pengembangan
Masjid Al-Alam

*Sumber : Suku Dinas Cipta
Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Kota Adm.
Jakarta Utara, 2018*



b. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kalibaru, Cilincing dan Kamal Muara

Dalam mendukung terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai kota pantai dan kawasan wisata bahari, untuk pengembangan kawasan permukiman padat penduduk diprioritaskan pada 6 RW kumuh di Kelurahan Kalibaru dan 2 RW kumuh di Kelurahan Cilincing dan 1 RW Kumuh di Kelurahan Kamal Muara. Rencana penanganan kawasan permukiman kategori kumuh ringan dan kumuh sedang yang berada di RW 01, 06, 07, 010 dan 013 Kelurahan Kalibaru, serta RW 04 dan 09 Kelurahan Cilincing RW 01 Kelurahan Kamal Muara. Penanganannya dilakukan melalui peningkatan kualitas permukiman. Sedangkan untuk RW 012 Kelurahan Kalibaru dengan kategori kumuh berat, penanganannya dilakukan melalui pengembangan permukiman lingkungan yang melibatkan pemerintah pusat dan stakeholder terkait. Adapun uraian pelaksanaan penataan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan *Community Action Plan* (CAP) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- 2) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur, antara lain: peningkatan sarana-prasarana dan utilitas, pembangunan trotoar, pemeliharaan jalan lingkungan dan orang, pembangunan dan pemeliharaan saluran serta pembangunan ruang publik;
- 3) Pembangunan/Peningkatan Sistem Drainase;
- 4) Pembangunan Sistem Sanitasi
- 5) Peningkatan Kebersihan kawasan;
- 6) Penataan dan Pemeliharaan ruang terbuka hijau taman dan jalur;
- 7) Pembangunan/ Peningkatan kualitas pencahayaan kota;
- 8) Peningkatan perekonomian/kemandirian usaha masyarakat;
- 9) Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat;
- 10) Peningkatan layanan pendidikan masyarakat;
- 11) Peningkatan layanan antisipasi bahaya bencana banjir dan penanggulangan kebakaran.

- 12) Pendampingan masyarakat dalam penataan kawasan permukiman
- 13) Pelepasan masyarakat dalam penataan kawasan permukiman

Gambar 6.9

Rencana Pengembangan
Kalibaru

Sumber : Kementrian PUPR



c. Rencana Pengembangan Kawasan Danau Sunter Selatan

Kawasan Danau Sunter Selatan direncanakan sebagai salah satu icon Destinasi Pariwisata Pesisir Jakarta Utara. Kawasan Danau Sunter Selatan terdiri dari 2 (dua) buah badan air yang berada di tengah kota, sehingga bisa menjadi penyegar bagi penghuni kota Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Adapun tahapan pengembangan Danau Sunter Selatan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- Untuk perencanaan Danau Sunter Selatan Sisi Barat, hanya sebatas pemeliharaan dalam menjaga kebersihan, keindahan dan kualitas air waduk yang dilaksanakan kewenangannya di tingkat provinsi.
- Untuk perencanaan Danau Sunter Selatan Sisi Timur, dalam pengembangannya berada di tingkat wilayah kota. Kawasan ini sangat berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sebagai wahana rekreasi (area pemancingan, olahraga air dan kuliner). Konsep pengembangannya adalah dengan mengembalikan sisi alami danau dengan mengusung tema ekosistem Riparian, yakni peralihan antara sisi air (aquatic) dan sisi darat (terrestrial) yang akan menghadirkan ekosistem yang baru. Fungsi ekologis, sosial dan ekonomi dikolaborasikan menjadi satu desain yang bukan hanya estetis, tetapi juga akan dikembangkan sebagai *water front* dan menjadikan danau sebagai orientasi utama. Rencana pengembangan kawasan Danau Sunter Selatan perlu mendapatkan dukungan program/ kegiatan secara lintas sektor, yang meliputi : peningkatan/pembangunan jalan, pembangunan trotoar, peningkatan /pembangunan saluran dan sistem drainase, penerangan jalan umum, penataan sarana parkir,

traffic management, pemantau kualitas air danau, pengelolaan ruang terbuka hijau taman dan jalur, pembangunan kantor pengelola kawasan, penanganan kebersihan, penyediaan toilet, pojok baca, pengelola olahraga air, penataan PKL dan penyelenggaraan penertiban.

Gambar 6.10

Konsep Pengembangan
Danau Sunter Selatan

Sumber : Subanppeko Jakarta
Utara, 2018



C. Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Barat

a. Penataan Kawasan Sentra Primer Baru Barat (SPBB)

Posisi wilayah Jakarta Barat sangat penting bagi wilayah Provinsi DKI Jakarta, karena wilayah Jakarta Barat merupakan titik temu (*hub*) arus dari arah selatan dan utara Jakarta. Wilayah Jakarta Barat memiliki potensi masa depan yang akan menjadi salah satu lokasi bisnis strategis dan favorit, seperti misalnya kawasan Sentra Primer Baru Barat (SPBB) yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 1629 Tahun 1986 tentang Penguasaan Perencanaan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Kawasan.

Sentra Primer Baru Barat (SPBB) merupakan kawasan sentra perdagangan, industri dan perkantoran dengan memiliki luas ± 135 Ha terletak di Kecamatan Kembangan, di mana 57,07 hektar di antaranya diakuisisi oleh PT. Antilope Madju Puri Indah, dan 15 hektar oleh PT Lippo Karawaci Tbk, separuh konsesi sisanya dimiliki oleh pengembang lainnya.

Sesuai dengan RTRW 2020, Sentra Primer Baru Barat direncanakan sebagai pusat kegiatan primer, melalui pengembangan campuran berbagai fungsi kawasan tersebut, yakni kawasan perdagangan, perkotaan, pemukiman dan jasa serta hunian skala kota. Rencana pengembangan kawasan Sentra Primer Baru Barat perlu dukungan program/kegiatan secara terpadu lintas sektor yang meliputi penataan jalan, trotoar terkoneksi antar area satu dengan area lainnya, penataan saluran dan sistem drainase, pencahayaan kota, penataan taman dan jalur, penataan PKL dan penambahan sarana parkir di kawasan tersebut.

Gambar 6.11

Ilustrasi Sentra Primer Baru Barat (SPBB)

Sumber : Subanppeko Jakarta Barat, 2018



b. Penataan Kawasan Sentra Flona Semanan

Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Sentra Flona Semanan dimulai pada tahun anggaran 2010 sampai tahun anggaran 2014. Kawasan ini berlokasi di RT 007 RW 03 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres dan memiliki luas ± 29.507 meter persegi atau $\pm 2,9$ Hektar.

Kawasan Sentra Flona Semanan direncanakan sebagai sentra floricultura pusat budidaya tanaman hias. Untuk mendukung rencana tersebut maka perlu dilakukan beberapa program/kegiatan antara lain melalui : peningkatan layanan informasi pusat budidaya, pemasangan paving block, penyediaan toilet umum, perbaikan kios-kios, penyelenggaraan event lomba, festival dan kontes flora fauna, pembukaan trayek menuju lokasi, pemeliharaan jalan, pemeliharaan saluran, pencahayaan kota dan peningkatan kualitas lingkungan disekitar kawasan.

Gambar 6.12

Ilustrasi Kawasan Sentra
Flona Semanan

*Sumber : Subanppeko Jakarta
Barat, 2018*



c. Penataan Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH) Slipi

Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH) Slipi diresmikan pada 16 Desember Tahun 2007, yang berlokasi Jl. KS Tubun III Dalam RT 001/04 No.39, Kel. Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dengan luas lahan 831 m² dan luas bangunan 300 m², dan dikelola oleh Koperasi Pengusaha Ikan Hias Kota Bambu Slipi (Kobapi).

Direncanakan di kawasan Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH) akan dikembangkan sebagai destinasi wisata dan sarana promosi ikan hias skala lokal, nasional maupun internasional. Untuk mendukung rencana pengembangan kawasan Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH), perlu dilakukan perbaikan fisik bangunan serta dukungan program/ kegiatan secara terpadu lintas sektor yang meliputi pengadaan rambu wisata/ RPPJ, penggantian lampu PJU berbasis *smart system*, pemeliharaan jalan dan saluran di sekitar kawasan, serta penanganan sarana kebersihan disekitar kawasan.

Gambar 6.13

Ilustrasi Sentra Promosi dan
Pemasaran Ikan Hias (SPPIH)
Slipi

*Sumber : Subanppeko Jakarta
Barat, 2018*



d. Penataan Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya

Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya berlokasi di Jalan Albarkah II RT 02 RW 03 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng. Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya seluas 1,09 Ha ini, memiliki jumlah pohon sebanyak 1.851 pohon dengan tinggi pohon antara 1,5 meter sampai dengan 2 meter, antara lain bisbol, gowok, manggis, jamplang, gandaria, kecapi, kemang, trembesi, gaharu, mahoni, dan lain-lain.

Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya sebagai ruang terbuka hijau akan dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata lingkungan hidup dan sarana edukasi. Rencana pengembangan kawasan Hutan Kota Rawa Buaya dilakukan secara terpadu melalui kegiatan Pengadaan Rambu wisata/ RPPJ, pengadaan papan penunjuk lokasi, penertiban di sekitar kawasan, peningkatan jalan akses menuju lokasi, peningkatan pencahayaan, pemeliharaan saluran dan pengelolaan kebersihan di sekitar kawasan.

Gambar 6.14

Ilustrasi Kawasan Hutan Kota
Rawa Buaya

*Sumber : Subanppeko Jakarta
Barat, 2018*



D. Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Selatan

a. Penataan Kawasan Lenteng Agung

Kawasan Lenteng Agung yang berlokasi di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selama ini cukup dikenal sebagai pintu gerbang Ibukota Provinsi DKI Jakarta di sisi selatan sebagai perbatasan dengan Kota Depok dan juga dikenal merupakan pusat pendidikan di kawasan selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di Jalan Lenteng Agung Raya sepanjang $\pm 4,5$ km terbagi menjadi 2 (dua) jalur yang di batasi oleh jalan rel kereta api yang selama ini dikenal sebagai kawasan rawan kemacetan di pagi/sore hari dan sering digunakan sebagai ajang balapan liar di malam hari karena jalannya yang lurus dan sepi. Serta infrastruktur belum tertata menyebabkan kawasan Lenteng Agung terlihat kurang indah, yang selama ini dirasa kurang menggambarkan batas Ibukota Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

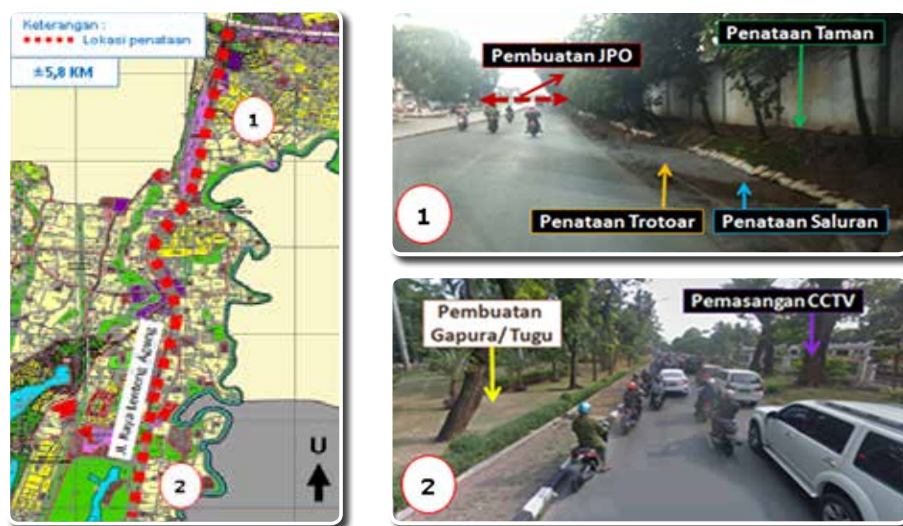
Sebagaimana telah disebutkan bahwa kawasan Lenteng Agung merupakan pintu masuk sebelah selatan menuju Provinsi DKI Jakarta, hal ini berpotensi memberikan kesan pada wajah Ibukota Indonesia dari arah Depok. Selain itu potensi lain penataan di kawasan ini adalah perkembangan sektor ekonomi dan sektor pariwisata karena di kawasan ini berdekatan dengan tempat wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dan terdapat mobilisasi masyarakat yang tinggi dengan adanya perlintasan Kereta Api Comuter Line dengan 3 (tiga) stasiun di sepanjang Jl. Lenteng Agung Raya.

Rencana penataan di kawasan Lenteng Agung meliputi penataan fasilitas umum seperti Trotoar, Saluran air, Pembuatan Gapura / Tugu selamat datang, pemasangan penerangan, penataan taman, pembangunan dan perbaikan JPO, dan pemasangan CCTV untuk memantau keamanan di area tersebut.

Gambar 6.15

Gambar Lokasi Rencana
Penataan Kawasan Lenteng
Agung

*Sumber : Subanppeko Jakarta
Selatan, 2018*



b. Penataan Kawasan Tebet

Kawasan Tebet sebagai tempat pemukiman yang sangat diminati baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, sekolah dan lain-lain. Rencana penataan kawasan tebet meliputi Jalan. Tebet Timur Raya dan Jalan Tebet Barat Raya. Di Sekitar Kawasan tersebut saat ini terdapat Rumah Susun Harum tebet, Rumah Susun Berlian dan terdapat 2 (dua) ruang publik terpadu ramah anak, terdapat juga Sekolah, TPS & bank sampah dan tempat ibadah. Permasalahan yang terdapat di lokasi tersebut saat ini adalah infrastruktur yang belum memadai yaitu belum tertatanya pedestrian dan saluran air, dan belum terpadunya antar fasilitas umum di kawasan tersebut. Pada Tahun 2018 akan dibangun taman lalu lintas yang bertujuan sebagai taman edukasi lalu lintas untuk anak-anak.

Potensi wilayah di kawasan Tebet terutama di Jl Tebet Timur (taman honda) sepanjang $\pm 1,4$ Km saat ini merupakan salah satu daerah resapan air / Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Suku Dinas Perhubungan berencana akan membangun taman lalu lintas pada tahun 2018 di sebelah RPTRA Teratai sebagai media edukasi lalu lintas untuk masyarakat.

Rencana penataan di kawasan Tebet meliputi penataan infrastruktur fasilitas umum yang terintegrasi seperti penataan trotoar, saluran air, pemasangan penerangan, penataan taman, peningkatan tempat pembuangan sampah sementara yang ramah lingkungan serta peningkatan fungsi bank sampah dan pemasangan CCTV untuk memantau keamanan di area tersebut.

Gambar 6.16

Gambar Lokasi Rencana
Penataan Kawasan Tebet

Sumber : Subanppeko Jakarta
Selatan, 2018



E. Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Timur

a. Penataan Kawasan Jatinegara

Kawasan Jatinegara atau seringkali disebut sebagai segitiga Jatinegara terletak di Kelurahan Bali Mester dan Kelurahan Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara dan merupakan lintasan pendukung jalur kendaraan utara selatan serta arus masuk dari Bekasi ke Jakarta. Keberadaan Stasiun Jatinegara juga merupakan gerbang komuter untuk Jakarta Timur sekaligus pintu masuk ke Jakarta dari berbagai daerah di Pulau Jawa.

Rencana pengembangan Kawasan Jatinegara dilakukan melalui:

- Peningkatan infrastruktur kawasan antara lain pelebaran dan pembenahan trotoar, penataan parkir on street, pembangunan gedung parkir kawasan, pembangunan RTH, dan pemasangan pencahayaan kota yang memberikan ciri khas kawasan;
- Peningkatan aksesibilitas Lalu-lintas dengan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas;
- Peningkatan dan pembedayaan kewirausahaan masyarakat dengan penataan kaki lima yang lebih tertib dan terjadwal serta penyediaan kantong-kantong lahan untuk menampung pedagang kaki lima;
- Revitalisasi dan regenerasi bangunan antara lain dengan pemugaran terhadap bangunan-bangunan tua, perbaikan fasad pertokoan yang lebih menarik, dan pembangunan icon kawasan.

Gambar 6.17

Rencana Tata Massa
Bangunan Kawasan
Jatinegara

Sumber : UDGL Jatinegara,
2018



b. Penataan Kawasan 1000 Danau

Kecamatan Ciracas, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Pasar Rebo merupakan 3 (tiga) Kecamatan di Jakarta Timur yang lokasinya saling berbatasan dan pada area tersebut memiliki 24 buah waduk, situ dan embung yang bervariasi luasan *existing*-nya antara 0,4 Ha – 120 Ha dengan total luasan rencana 1.078,1 Ha. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa semua waduk tersebut hanya memegang fungsi sebagai pengendali banjir dengan daerah sempadannya yang belum terbangun optimal.

Rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan 1000 Danau dilakukan melalui:

- Mengembangkan daerah sempadan waduk sebagai RTH yang dapat dimanfaatkan menjadi tempat memancing, camping ground, tempat bermain anak, jogging track, dll
- Membangun sarana dan prasarana olahraga, wisata air dan jalur sepeda antar danau
- Mengadakan event-event lomba di kawasan 1000 danau.
- Menerapkan teknologi penjernihan air agar badan air dapat dimanfaatkan untuk olah raga dan wisata air yang lebih luas.

Gambar 6.18

Kawasan 1000 Danau

Sumber : Hasil Survey
Subanppeko Jakarta Timur,
2018



c. Penataan Kawasan Sekolah Kreatif Kecamatan Cipayung

Pengembangan Kawasan Sekolah Kreatif merupakan strategi dalam rangka membentuk “*branding*” yang lebih mantap dalam pengembangan yang bersifat fisik kawasan maupun penjalinan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya sehingga dapat lebih meningkatkan kompetensi lulusan dan produk yang dihasilkannya. Arah yang dituju untuk membentuk “*branding*” Kawasan Sekolah Kreatif adalah:

- membentuk kawasan yang mencerminkan keunggulan dan hasil kreativitas siswa SMK
- sebagai model pembentukan berbagai kreativitas kompetensi keahlian siswa SMK
- pusat promosi produk kreatif siswa SMK
- sebagai model/symbol keunggulan pendidikan SMK

Rencana pengembangan sekolah kreatif dilakukan melalui:

- pengukuhan kawasan sekolah kreatif dan sosialisasinya kepada publik
- pengembangan networking sekolah kreatif
- pembangunan akses jalan dan perbaikan infrastruktur lainnya di sekitar Kawasan Sekolah Kreatif
- Integrasi layanan transportasi Bus Sekolah
- Pengembangan lainnya untuk mencapai 8 (delapan) standar nasional pendidikan

Gambar 6.19

Kawasan Sekolah Kreatif
Kecamatan Cipayung

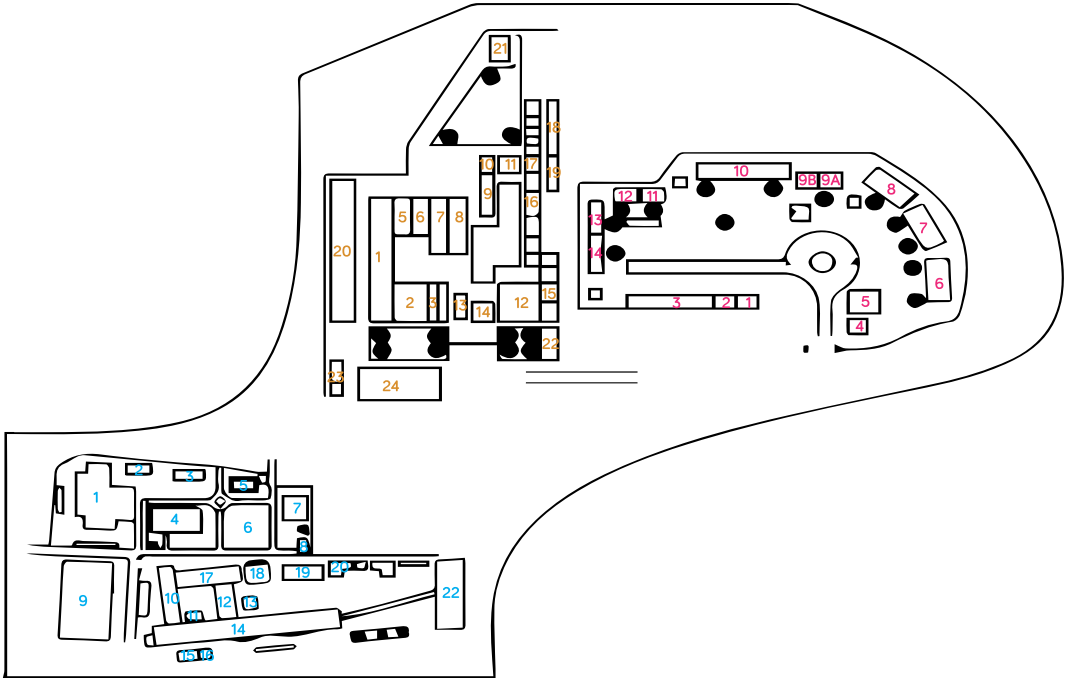
Sumber : Hasil Survey
Subanppeko Jakarta Timur,
2018



Gambar 6.20

Layout Kawasan Sekolah
Kreatif Kecamatan Cipayung

Sumber : Hasil Survey
Subanppeko Jakarta Timur,
2018



KETERANGAN GAMBAR

1. RUANG GURU
2. RUANG TU
3. RUANG KASUBAK TU
4. RUANG WAKIL
5. TOILET GURU WANITA
6. TOILET GURU PRIA
7. RUANG KEPSEK
8. RUANG RAPAT TERBATAS
9. PERPUSTAKAAN
10. GEDUNG PROGRAM BROADCASTING (LAB DAN R. MATERI)

KETERANGAN GAMBAR

1. AUDITORIUM
2. KOLAM RENANG
3. PARKIR MOBIL
4. HOTEL
5. LP MULTI FUNGSI (RKB)
6. JOGING TRACK DAN FITNES OUTDOOR
7. MASJID
8. PERPUSTAKAAN
9. R. PAMERAN UTAMA

KETERANGAN GAMBAR

1. RUANG PIKET
2. KANTOR LSP
3. LT. 1 RUANG MANAJEMEN
4. POS SATPAM
5. RUANG PAMER
6. GEDUNG PROGRAM KKKR
7. LT. 1 LAB. KAYU
8. LT. 2 RUANG GURU PRODUKTIF, TOILET, GALERY
9. LT. 3 RUANG TEORI
10. GEDUNG PROGRAM TP
11. LT. 1 LAB. PENGELASAN
12. LT. 2 RUANG GURU PRODUKTIF, TOILET, GALERY
13. LT. 3 RUANG TEORI

11. GEDUNG PROGRAM MULTIMEDIA (LAB RUANG MATERI DAN R. GURU)
12. MINI TEATER
13. GURU PIKET
14. R. TAMU
15. GEDUNG PROGRAM AKUTANSI (LAB RUANG MATERI DAN R. GURU)
16. GEDUNG PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN (LAB RUANG MATERI DAN R. GURU)

10. KANTOR SEKOLAH
11. GAZEBO
12. R. GURU
13. PANGGUNG PENTAS
14. R. KELAS
15. GUDANG
16. PANGGUNG
17. SERVICE ROOM
18. MUSHOLA

8. GEDUNG PROGRAM KKLK
9. LT. 1 LAB. LOGAM
10. LT. 2 RUANG GURU PRODUKTIF, TOILET, GALERY
11. LT. 3 RUANG TEORI
12. LT. 1 MUSHOLLA (9A) UKS (9B)
13. GEDUNG PROGRAM KKB
14. LT. 1 LAB TEKSTIL DAN BATIK
15. LT. 2 RUANG GURU PRODUKTIF, TOILET, GALERY
16. LT. 3 RUANG TEORI
17. GEDUNG PROGRAM SENI LUKIS
18. LT. 1 RUANG TEORI
19. LT. 2 RUANG GURU PRODUKTIF, TOILET, GALERY
20. LT. 3 LAB. SENI LUKIS

17. GEDUNG PROGRAM PEMASARAN
18. GUDANG
19. DAPUR
20. LISA CAFE
21. MASJID
22. POS SATPAM
23. R. OSIS
24. MINI MARKET

19. HOTEL
20. UKS
21. TOILET SISWA
22. KELAS
23. SANGGAR BUSANA
24. POS SATPAM
25. RENCANA KANTIN

12. GEDUNG PROGRAM DP1B
13. LT. 1 RUANG TEORI
14. LT. 2 RUANG GURU PRODUKTIF, TOILET, GALERY
15. LT. 3 LAB. DP1B
16. GEDUNG PROGRAM DKV
17. LT. 1 RUANG TEORI
18. LT. 2 RUANG GURU PRODUKTIF, TOILET, GALERY
19. LT. 3 LAB. DKV
20. GEDUNG PROGRAM TEATER/KARAWITAN
21. LT. 1 RUANG TEORI
22. LT. 2 RUANG GURU PRODUKTIF, TOILET, GALERY
23. LT. 3 LAB. TEATER/KARAWITAN
24. KANTIN (A,B,C)

d. Penataan Kawasan Eco Wisata Cipayung

Kecamatan Cipayung merupakan kecamatan yang terletak di Jakarta Timur sisi selatan yang memiliki karakteristik yang relatif lebih hijau, berbeda dengan kecamatan-kecamatan lainnya yang berada di DKI Jakarta.

Kecamatan Cipayung terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan: Lubang Buaya, Ceger, Cipayung, Munjul, Pondok Ranggon, Cilangkap, Setu, Bambu Apus memiliki luas 2844 Ha. Kecamatan ini memiliki berbagai waduk, taman kota dan taman-taman pemancingan di berbagai sudut, khususnya pada Kelurahan Munjul, Pondok Ranggon, Setu dan Cilangkap terdapat lokasi yang potensial untuk dikembangkan meliputi :

- Agro Wisata Cilangkap di Kelurahan Cilangkap seluas 50 Ha
- Hutan Kota Munjul di Kelurahan Munjul seluas 2.7 Ha
- Hutan Kota Setu di Kelurahan Setu seluas 1 Ha
- Taman Salik di Kelurahan Pondok Ranggon seluas 0,27 Ha
- Peternakan Sapi Perah Wisata Cibugari di Kelurahan Pondok Ranggon seluas 0,2 Ha
- Waduk Pondok Ranggon di Kelurahan Pondok Ranggon seluas 1 Ha
- Waduk Cilangkap di Kelurahan Cilangkap seluas 50 Ha
- Waduk Setu di Kelurahan Setu seluas 3 Ha
- Taman Cempaka di Kelurahan Cilangkap seluas 1.2 Ha
- Taman Flamboyan di Kelurahan Cilangkap seluas 0.92 Ha
- Taman Melati di Kelurahan Cilangkap seluas 1.3 Ha
- Taman Bluntas di Kelurahan Cilangkap seluas 1.5 Ha
- Taman Bambu di Kelurahan Setu seluas 0.3 Ha
- Taman Kembang Sepatu di Kelurahan Setu seluas 0.6 Ha
- Empang Pemancingan Jl. Harimau Jaya Kelurahan Munjul seluas 0.6 Ha
- Empang Pemancingan Jl. Wijaya Kusuma KelurahanMunjul seluas 0.3 Ha

Dengan potensi tersebut, diharapkan kawasan Kecamatan Cipayung dapat lebih dikembangkan menjadi kawasan yang memiliki ciri khas sebagai kawasan Eco Wisata serta menjadi salah satu pilihan wisata perkotaan sehingga dapat memberikan nuansa berbeda dari wisata perkotaan pada umumnya. Dalam rangka mewujudkan Kecamatan Cipayung sebagai kawasan Eco Wisata, perlu dilakukan berbagai pembenahan khususnya dari sisi peningkatan infrastruktur seperti:

- Memantapkan dan mensosialisasikan visi kawasan Eco Wisata Kecamatan Cipayung;
- Perbaikan dan peningkatan waduk, empang pemancingan, taman dan hutan kota dan melengkapi fasilitasnya;
- Perbaikan dan peningkatan jalan dan aksesibilitas menuju waduk, empang pemancingan, taman dan hutan kota;
- Perbaikan dan peningkatan Kawasan Agro Wisata Cilangkap
- Penerapan shuttle bus antar titik lokasi ecowisata.

Gambar 6.21

Kawasan Kawasan Eco
Wisata Cipayung

*Sumber : Hasil Survey
Kecamatan Cipayung, 2018*



e. **Pengembangan Kawasan Religi Pangeran Jayakarta**

Makam Pangeran Jayakarta terletak di Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulogadung. Di lokasi terdapat makam Pangeran Achmad Djakarta atau Pangeran Jayakarta, di mana nama Jakarta diambil dari nama tokoh tersebut. Makam Pangeran Jayakarta berada di dalam kompleks Masjid Assalafiyah yang didalamnya juga terdapat makam-makam lain seperti Pangeran Lahut anak dari Pangeran Jayakarta, Pangeran Soeria dan Pangeran Sageri yang merupakan keponakan Pangeran Jayakarta dan Ratu Rupiah, istri Pangeran Sageri.

Rencana pengembangan dan penataan Kawasan Religi Makam Pangeran Jayakarta dilakukan melalui perluasan dan penataan area kompleks secara keseluruhan, pembenahan lahan parkir, trotoar, dan dilengkapi dengan pusat informasi serta tempat membeli oleh-oleh. Selain itu perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan maupun festival yang dapat mendukung konsep religi.

Gambar 6.22

Kawasan Religi
Pangeran Jayakarta

*Sumber : Rencana Penataan
oleh Suku Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Jakarta
Timur, 2018*



f. **Pengembangan Kawasan Cakung Barat Terpadu**

Pengembangan Kawasan Cakung Barat Terpadu merupakan salah satu alternative strategi untuk mendorong arah pengembangan kota ke arah Timur Jakarta. Kawasan ini berada pada pemukiman padat di Kelurahan Cakung Barat dengan peruntukan makro secara umum zona industri. Lokasi ini memiliki akses jalan masuk dari Jl.Tipar Cakung – Jl.Cakung Barat dengan batas lahan sebelah Utara adalah Rusun Albo, batas Selatan Saluran Bekasi Tengah, batas Timur jalan Pool PPD (lebar ± 8 m, rencana jalan double (2x11m) dan batas Bara lahan kosong (zona R.7) dan bangunan PT.Mitsubishi Krama Yudha Motor, jalan Inspeksi kali dan Cakung Drain. Pembangunan kawasan dengan ketersediaan aksesibilitas yang optimal dan pola ruang *mixed use* menjadi konsep utama dengan beberapa elemen kegiatan sebagai berikut:

- Rumah Susun
- Rumah sakit tipe B
- Kantor Lurah Cakung Barat
- Puskesmas
- Gedung Serbaguna/Olahraga
- Ruang Terbuka Publik
- Taman Kota
- IPAL dan TPST
- Konektivitas angkutan umum massal Transjakarta

F. **Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Kepulauan Seribu**

Gambar 6.23

Basic Site Plan
Kawasan Cakung Barat

Sumber : Subanppeko
Jakarta Timur, 2018



a. **Penataan Kawasan Pulau Pramuka**

Pulau Pramuka merupakan salah satu pulau permukiman di Kepulauan Seribu, yang terletak di Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, dengan luas 16,00 Ha. Selain sebagai kawasan permukiman, Pulau Pramuka juga diperuntukan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Seperti halnya pulau permukiman lainnya, Pulau Pramuka menjadi salah satu pilihan sebagai tempat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu.

Pulau Pramuka memiliki sumber daya alam yang masih relatif terjaga dan pulaunya dikelilingi terumbu karang tepian (*fringing reef*) dengan kedalaman 1 – 20 meter dan ditumbuhi tanaman mangrove serta padang lamun. Mempunyai topografi yang landai (0 - 5 persen) dengan ketinggian rata-rata (0 - 2) meter di atas permukaan laut.

Transportasi menuju Pulau Pramuka dapat dilakukan melalui Pelabuhan Kali

Gambar 6.24

Pulau Pramuka

Sumber : Kementerian
PUPR RI, 2017



Adem (Muara Angke), Marina Ancol dan Pelabuhan Sunda Kelapa dengan menggunakan transportasi umum baik berupa kapal yang dikelola masyarakat, swasta, serta kapal yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun PT. ASDP.

Rencana Pengembangan Kawasan Pulau Pramuka yang akan dilakukan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan antara lain penataan kanopi dan pohon peneduh di sekitar dermaga Kabupaten, penataan dan pembangunan sentra kuliner dan sentra atraksi wisata olahraga air di Dermaga Timur, mengoptimalkan

fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah ada, pembangunan toilet wisata bertaraf internasional, pembangunan *floating deck* di sisi barat dan sisi timur Pulau Pramuka, pembangunan *floating deck* untuk menikmati hutan mangrove, penataan *streetscape* dan *street furniture* bernuansa alam, pembangunan *signage*, pembangunan tanggul dan dermaga sisi timur, pembangunan pengelolaan air dengan *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) yang terkoneksi dengan perpipaan ke rumah-rumah penduduk, pemeliharaan pengelolaan IPAL, penyediaan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan yang lokasinya terpisah dengan permukiman, beutifikasi penerangan tempat-tempat umum, penanaman dan rehabilitasi mangrove, pembuatan lumbung ikan melalui rumpon dasar dan permukaan sebagai tempat wisata mancing, peningkatan gang hijau, penanaman pohon untuk penghijauan, peningkatan aktivitas kerajinan masyarakat, peningkatan aktivitas budaya masyarakat, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dan pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan akan telekomunikasi yang handal.

Gambar 6.25

Rencana Pengembangan
Pulau Pramuka

Sumber : Kementerian
PUPR RI, 2017



b. **Penataan Kawasan Pulau Panggang**

Pulau Panggang merupakan salah satu pulau yang berada di gugusan pulau di Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, yang merupakan pulau permukiman terpadat di Kabupaten Kepulauan Seribu. Luas Pulau Panggang sebesar 9 Ha, berpenduduk sebanyak 4.123 jiwa, dengan tingkat kepadatan 458 jiwa/Ha. Luas terbagun permukiman 7,75 Ha atau 86,1 persen.

Gambar 6.26

Pulau Panggang



Rencana Pengembangan kawasan Pulau Panggang dalam rentang lima tahun kedepan dilaksanakan melalui, revitalisasi pelabuhan dan dermaga utama di Pulau Panggang, pembangunan pengelolaan air dengan swro yang dapat disalurkan dengan perpipaan ke rumah-rumah penduduk, pemeliharaan pengelolaan IPAL, beautifikasi penerangan, penanaman mangrove, pembuatan lumbung ikan melalui rumpon dasar dan permukaan sebagai tempat wisata memancing, peningkatan gang hijau dan penanaman pohon, penataan *streetscape* dan *street furniture*, membangun *signage*, revitalisasi kampung, pembangunan gazebo,

pembangunan sentra kuliner di dermaga utama, peningkatan fungsi gedung karang taruna sebagai pusat kuliner, galeri seni dan workshop, pembangunan toilet pariwisata bertaraf internasional, pemugaran dan memfungsikan Gedung Eks Kewedanaan sebagai museum, peningkatan aktivitas kerajinan dan budaya masyarakat, merevitalisasi makam Habib Ali sebagai objek wisata rohani, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi yang handal.

c. Penataan Kawasan Pulau Tidung Besar

Pulau Tidung Besar merupakan salah satu pulau permukiman di Kepulauan Seribu yang terletak di Kelurahan Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan luas 50,13 Ha yang merupakan pulau terluas di Kawasan Gugusan Kepulauan Seribu. Pada saat ini Pulau Tidung Besar menjadi salah satu pilihan favorit sebagai tempat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke kepulauan seribu dengan icon Jembatan Cintanya.

Seperti pulau-pulau lain, Pulau Tidung Besar dikelilingi terumbu karang tepian (*fringing reef*) dengan kedalaman 1 – 20 meter dan tumbuh tanaman mangrove serta padang lamun. Mempunyai topografi yang landai (0 – 5 persen) dengan ketinggian rata-rata (0 – 2) meter di atas permukaan laut.

Gambar 6.27

Pulau Tidung Besar



Cuaca di Pulau Tidung Besar sama seperti cuaca umumnya di Kepulauan Seribu dipengaruhi oleh musim hujan, musim kemarau, musim pancaroba dengan suhu udara rata-rata antara 26,5 – 28,5 °C. Kelembaban nisbi rata-rata antara 75 – 85 persen, dan tekanan udara rata-rata antara 1.009,0 – 1.011,0 Mb (Dishidros, 1998). Kondisi Perumahan yang berada di Pulau Tidung Besar sebagian besar terletak ditengah pulau dengan bangunan permanen dari tembok.

Sarana dan Prasarana yang terdapat di Pulau Tidung Besar terdiri dari fasilitas umum (Gedung Pemerintahan, Gedung Serba guna, Taman Bermain, Puskesmas

Kecamatan), Sarana Transportasi (Dermaga), Gedung Pendidikan, Sarana Beribadatan (Masjid dan Musholla), IPAL, RO, Tempat pengelolaan sampah dengan L-Boks dan *Home Stay*.

Transportasi untuk dapat mencapai Pulau Tidung Besar dapat melalui Pelabuhan Kali Adem (Muara Angke), Marina Ancol dengan menggunakan transportasi umum baik berupa kapal tradisional yang di kelola masyarakat, Kapal Boat yang di kelola Swasta, dan Kapal yang dikelola Pemerintah Provinsi.

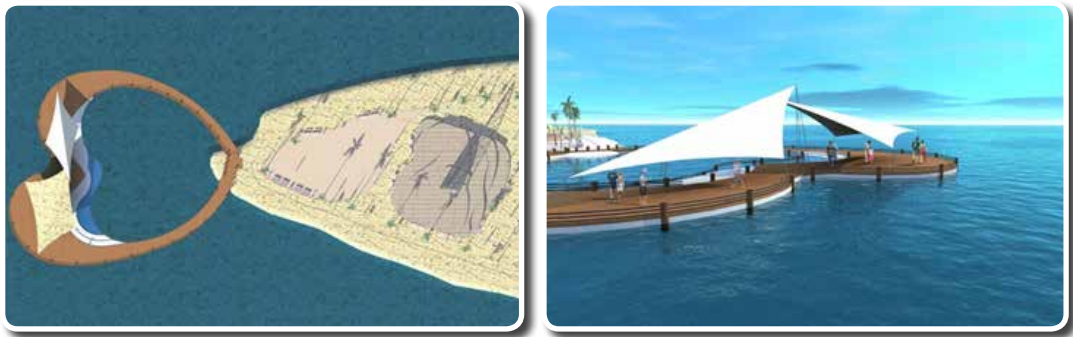
Pulau Tidung Besar dengan alam yang khas kepulauan yang indah, lokasi relatif mudah dan cepat dijangkau serta letaknya yang berada ditengan gugusan kepulauan seribu memudahkan koordinasi dengan pulau-pulau lainnya serta merupakan pusat Pemerintahan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, sehingga mempunyai potensi pengembangan sektor kepariwisataan sebagai daya tarik ekonomi yang tinggi.

Rencana Pengembangan Kawasan Pulau Tidung Besar, 5 (lima) tahun kedepan antara lain adalah sebagai berikut pembangunan dermaga dan kolam labuh di sisi selatan dan utara bagian barat, revitalisasi dermaga utama agar sesuai dengan kebutuhan terkait pariwisata, membangun *floating deck* untuk menikmati matahari tenggelam di sisi barat pulau Tidung Besar serta pembangunan dan perbaikan jalan menuju sisi barat pulau Tidung Besar, penataan dan pembangunan sentra kuliner, membangun toilet wisata bertaraf internasional, penataan *streetscape* dan *street furniture* bersuasana alam, pembangunan *signage*, pembangunan Doking Kapal, pembangunan pengelolaan air dengan SWRO yang dapat disalurkan dengan perpipaan ke rumah-rumah penduduk, pemeliharaan pengelolaan IPAL, penyediaan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, beutifikasi penerangan tempat-tempat umum, penanaman mangrove, pengembangan dan pengelolaan pertanian rumput laut, pembuatan lumbung ikan melalui rumpon dasar dan permukaan sebagai tempat wisata mancing, penanaman pohon sebagai penghijauan dan meningkatkan Gang Hijau, penanaman pohon sebagai penghijauan, meningkatkan aktivitas kerajinan masyarakat, meningkatkan aktivitas budaya masyarakat, Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, merevitalisasi makam Raja Tidung sebagai objek wisata rohani, penataan lapangan sepak bola dan sarana olahraga lainnya, restorasi pantai dan membangun sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi agar kebutuhan wisatawan akan telekomunikasi.

Gambar 6.28

Rencana Pembangunan
floating deck sisi barat

Sumber : Kajian Subanppekab
Kepulauan Seribu, 2017



6.3 Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program pembangunan yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan 23 Janji Kerja. Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta. Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam lima bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari dan Simpul Kemajuan.

Gambar 6.29

Panca Upaya Utama
Pembangunan Jakarta



Adapun program-program prioritas yang masuk dalam Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta dapat dijabarkan diantaranya sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia

- a. Program Rehabilitasi Sosial
- b. Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
- c. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
- d. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- e. Program Pengelolaan Risiko Bencana
- f. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- g. Program Wajib Belajar 12 Tahun
- h. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
- i. Program Peningkatan Mutu Pendidikan
- j. Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
- k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- l. Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
- m. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
- n. Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
- o. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
- p. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
- q. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan
- r. Program Pembinaan Upaya Kesehatan
- s. Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga
- t. Program Penanganan Fakir Miskin

- u. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara
- v. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat
- w. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- x. Program peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan
- y. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur
- z. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

2. Ekonomi dan Infrastruktur

- a. Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan UKM
- e. Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM
- f. Program pengawasan dan pelayanan perdagangan
- g. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
- h. Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
- i. Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan
- j. Program Pengendali Banjir dan Abrasi
- k. Program Pengendalian Banjir
- l. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih
- m. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
- n. Program Pengelolaan Persampahan
- o. Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan
- p. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

- q. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- r. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
- s. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
- t. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
- u. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
- v. Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat
- w. Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat
- x. Program Peningkatan Penanaman Modal
- y. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- z. Program Penataan Ruang

3. Integritas Aparatur

- a. Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN
- b. Program Peningkatan Kapasitas KORPRI
- c. Program Pengembangan Kompetensi SDM
- d. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat
- e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
- f. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- g. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan
- h. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra
- i. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH
- j. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian
- k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- l. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- m. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan Daerah
- n. Program Penataan Administrasi Kependudukan
- o. Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah
- p. Program Pemanfaatan Aset Daerah
- q. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah
- r. Program Pengelolaan Retribusi Daerah
- s. Program Pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- t. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
- u. Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- v. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Jabatan Aparatur
- w. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
- x. Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
- y. Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara
- z. Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
- aa. Program Penelitian dan Pengembangan

4. Kota Lestari

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- b. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
- c. Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
- d. Program Pengelolaan Hutan
- e. Program Pengelolaan Pertamanan

- f. Program Pengelolaan Pemakaman
- g. Program Penataan Kawasan Permukiman
- h. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara
- i. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Utara
- j. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat
- k. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat
- l. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- m. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- n. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
- o. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
- p. Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan kota administrasi jakarta timur
- q. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur
- r. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- s. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

5. Simpul Kemajuan

- a. Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan
- b. Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata
- d. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- e. Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya
- f. Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya
- g. Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

Program Pembangunan Daerah Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta yang merupakan penjabaran dari masing-masing Misi secara lebih lengkap disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 6.2

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1		Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.																	
1	1	Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif																	
1	1	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertarikan dan bebas konflik sosial	Indeks Potensi Kerawanan Sosial																
1	1	1	Program Rehabilitasi Sosial	4,8 %	14,9 %	38,7 %	218.034.449.093	64,5 %	229.469.990.247	75 %	240.851.663.553	85,4 %	253.569.705.806	85,4 %	1.138.668.410.283				
			Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya	196.742.601.584	173.547.309.246		193.045.642.085		203.115.282.068		212.929.103.834		224.557.588.683		1.007.194.925.916				DINAS SOSIAL
			Persentase (%) lokasi strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang bersih PMKS jalanan	23.195.292.338	89 %	92 %	24.988.807.008	94 %	26.354.708.179	97 %	27.922.559.719	100 %	29.012.117.123	100 %	131.473.484.367				DINAS SOSIAL
1	1	392	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial				68.0118.17.044		56.4596.02.591		42.166.788.608		36.977.710.428		243.654.712.560				
			Presentase prasarana dan sarana kesejahteraan sosial yang memenuhi standar pelayanan	40.038.793.889	51.000.000.000	64.000.000.000	68.0118.17.044	77.000.000.000	56.4596.02.591	87.000.000.000	42.166.788.608	100.000.000.000	36.977.710.428	100.000.000.000	243.654.712.560				DINAS SOSIAL
1	1	2	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak																
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak																

Kode		Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp			
1	2	6				5,713.13 7.723		19,251.6 71.090		19,885.8 69.981		20,350.7 41.392		21,271 08.190		86,472.5 28.376	DINAS PEMBERDA YAAAN, PERLINDUN GAN ANAK DAN PENGENDA LIAN PENDUDUK		
		74.34 %	0	82,66 %	5,053.15 2.168	91 %	5,119.03 4.700	99.33 %	5,168.65 8.225	99.5 %	5,220.76 2.926	99.5 %	20,561.6 08.019						
				3115 orang	0	2831 orang	12,708.1 16.650	2689 orang	13,050.0 15.593	2547 orang	13,480.9 87.689	2405 orang	14,106.9 86.382	2405 orang	53,346.1 06.314				DINAS PEMBERDA YAAAN, PERLINDUN GAN ANAK DAN PENGENDA LIAN PENDUDUK
				691 orang	677 orang	4,859.88 2.723	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0 orang	0	0 orang	677 orang	4,859.88 2.723			DINAS PEMBERDA YAAAN, PERLINDUN GAN ANAK DAN PENGENDA LIAN PENDUDUK
				2424 orang	2296 orang	635,142. 000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0 orang	0	0 orang	2296 orang	635,142. 000			DINAS PEMBERDA YAAAN, PERLINDUN GAN ANAK DAN PENGENDA LIAN PENDUDUK
				0 keluarga	1050 keluarga	218,113. 000	0 keluarga	0	0 keluarga	0	0 keluarga	0 keluarga	0	0 keluarga	1050 keluarga	218,113. 000			DINAS PEMBERDA YAAAN, PERLINDUN GAN ANAK DAN PENGENDA LIAN PENDUDUK
				0 kota/ka bupaten	0 kota/ka bupaten	0	1 kota/ka bupaten	149,040 2272	1 kota/ka bupaten	1,716.81 9.688	2 kota/ka bupaten	1,701.09 5.478	2 kota/ka bupaten	194,335 8.882	2 kota/ka bupaten	685,167 6.320			DINAS PEMBERDA YAAAN, PERLINDUN GAN ANAK DAN PENGENDA LIAN PENDUDUK
1	2		Indeks Pembangunan Gender																
			Terwujudnya kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak																

Kode		Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
1	1	Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	0 %	12 %	0	549.271.750	24 %	549.271.750	36 %	605.895.288	48 %	665.995.717	60 %	729.955.398	2.551.111.8153	DINAS PEMBERDA YAAAN, PERLINDUN GAN ANAK DAN PENGENDA LIAN PENDUDUK		
	2		Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	0 lembaga	5 lembaga	145.205.000	0 lembaga	0	0 lembaga	0 lembaga	0	0 lembaga	0	145.205.000	DINAS PEMBERDA YAAAN, PERLINDUN GAN ANAK DAN PENGENDA LIAN PENDUDUK				
	7																		
1	1	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah																
	3																		
1	1	Program Pengelolaan Risiko Bencana	Persentase Mitigasi Risiko Bencana yang dilaksanakan	2,96 %	7,23 %	7.356.596.773	0	20.090.721.614	0	0	0	22.680.531.208	0	23.689.741.760	0	24.644.276.868	98.461868.223	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
			Persentase Informasi kebencanaan yang disampaikan ke masyarakat	0 %	0 %	0	100 %	17.219.500.346	100 %	19.744.450.346	100 %	20.682.315.346	100 %	21.558.370.346	100 %	79.204.636.384	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
			Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	0,38 %	0 %	0	0,54 %	1.758.750.360	0,62 %	1.758.750.360	0,7 %	1.758.750.360	0,78 %	1.758.750.360	0,78 %	70.350.01.440	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Persentase Implementasi Fasilitas Publik Aman serta Ketahanan Masyarakat Jakarta terhadap Bencana	658 %	0 %	0	1975 %	1112.47 0.908	2633 %	1177.33 0.502	32,92 %	1248.67 6.054	395 %	1327.15 6162	395 %	4.865.63 3.626	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
1	2																	
1	2	4	Indeks Pembangunan Manusia															
1	2	4	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	83,07 %	86,35 %	10.684,2 05.301	89,63 %	237218 39731	92,91 %	282789 00.671	96,19 %	33.651,9 91710	99,5 %	38910,2 80289	99,5 %	158.579 419.318	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	159	249	2.022,97 2.500	339	4.215,82 2.438	429	5.107,44 8.263	519	5.550,34 7.615	609	6.435,61 0.800	609	23.332,2 01.616	DINAS PENDIDIKAN	
1	2	4	Program Wajib Belajar 12 Tahun			2.66913 6.978,48 7		2.805,39 3.104,50 9		3.247,23 3.989,57 6		3.267,80 6.525,78 2		3.426,87 4.765,67 9		15.416,4 45.364,0 33		
			Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI	96,15 %	96,54 %	617.549, 578.035	96,93 %	626.812, 821.706	97,32 %	925.466, 294.709	97,71 %	645.758, 239.242	98,1 %	655.444, 612.830	98,1 %	3.471.03 1.546,52 2	DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	84,79 %	86,73 %	315.190, 797.619	88,67 %	319.918, 659.583	90,62 %	324.717, 439.477	92,59 %	483.347, 280.000	94,5 %	490.596, 600.000	94,5 %	193.377 0.776,67 9	DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Angka Partisipasi Murni SWA/SWK/MA	71,87 %	74,65 %	769.753 534.832	77,42 %	831.494 310.107	80,2 %	908.131, 553.053	82,95 %	984.105, 187.138	85,75 %	1.054,51 1.562,56 6	85,75 %	4.547,99 6.147,69 6	DINAS PENDIDIKAN	
			Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	10,88 Tahun	11,1 Tahun	20.511,3 05.001	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0	0	111 Tahun	20.511,3 05.001	DINAS PENDIDIKAN	

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Persentase angka putus sekolah SD, SMP, SMA, SMK	96,15 %	96,54 % 945.391. 128.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	96,54 %	945.391. 128.000	DINAS PENDIDIKAN		
		Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/ MA/SMK	0,36 %	0,29 %	0	0,22 %	215.825. 450.801	0,15 %	233.748. 604.140	0,08 %	253.281. 103.227	0,01 %	274.574. 734.156	0,01 %	977.429. 892.324	DINAS PENDIDIKAN	
		Rata-rata lama sekolah penduduk jakarta	10,88 tahun	11,1 tahun	229.385. 000	11,32 tahun	219.850. 58.551	11,55 tahun	24.075,8 52.224	11,77 tahun	25.423,4 22.123	12 tahun	27.726,7 71.693	12 tahun	99.440,4 89.591	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI	0,01 %	0,01 %	0	0,01 %	530.542. 073.761	0,01 %	546.458. 335.973	0,01 %	562.852. 086.051	0,01 %	579.737. 648.634	0,01 %	2.219,59 0.144.41 9	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs	0,11 %	0,09 %	0	0,07 %	258.211. 800.000	0,05 %	284.032. 980.000	0,03 %	312.436. 278.001	0,01 %	343.679. 905.800	0,01 %	1.198,36 0.963.80 1	DINAS PENDIDIKAN	
1	2	Persentase penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bersekolah	100 %	100 %	511.250. 000	100 %	602.930. 000	100 %	602.930. 000	100 %	602.930. 000	100 %	602.930. 000	100 %	2.922,97 0.000	DINAS PENDIDIKAN	
	4			6.666,44 6.353	31.520,2 15.648		45.928,0 79.329		59.864,8 18.025		76.437,5 61.048		220,417 120.403				
		Persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan inklusi	0 %	0 %	6.666,44 6.353	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	6.666,44 6.353	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus	49,04 %	618 %	0	74,54 %	31.520,2 15.648	87,28 %	45.928,0 79.329	100 %	59.864,8 18.025	100 %	76.437,5 61.048	100 %	213,750. 674.050	DINAS PENDIDIKAN	
1	2	Program Peningkatan Mutu Pendidikan		103.484. 283.568	139.712. 469.854		153.442. 420.486		170.905. 877.561		189.744. 733.633		757.289. 785.102				
	4		100 %	100 %	689.395 975.63	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	689.395 97.563	DINAS PENDIDIKAN	
		Rata-rata nilai Ujian Nasional/ Ujian Sekolah Madrasah Berbasis Daerah SD, SMP, SMA, SMK	61,31 poin	66,04 poin	4.577,89 2.604	0 poin	0	0 poin	0	0 poin	0	0 poin	0	66,04 poin	4.577,89 2.604	DINAS PENDIDIKAN	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Persentase Sekolah Sekolah terakreditasi A	0 %	70,03 %	0	77,52 %	1933,07 0,000	85,02 %	1,145,09 9,000	92,51 %	1,736,10 1,000	100 %	1255,00 9,000	100 %	6,069,27 9,000	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase SD/ SDLB berakreditasi Minimal B	0 %	0 %	802,786. 000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	802,786. 000	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase SMP/ SMPLB berakreditasi Minimal B	0 %	0 %	370,279. 200	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	370,279. 200	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase SMA/ SMALB berakreditasi Minimal B	0 %	0 %	209,357. 000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	209,357. 000	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	0 %	0 %	6,443,04 1,399	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	6,443,04 1,399	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase SD/ SDLB yang memenuhi SPM	0 %	0 %	1,691,53 8,350	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	1,691,53 8,350	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase SMP/ SMPLB yang memenuhi SPM	0 %	0 %	121,406 5,160	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	121,406 5,160	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase SMA/ SMALB yang memenuhi SPM	0 %	0 %	222,902 6,227	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	222,902 6,227	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase Kelulusan Jenjang SD/MI	100 %	100 %	0	100 %	22,185,6 06,491	100 %	22,876,0 35,836	100 %	23,825,1 94,416	100 %	24,090,2 73,156	100 %	92,97,1 09,899	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase Kelulusan Jenjang SMP/MTs	99,98 %	100 %	187,675 8,000	100 %	27,365,3 37,818	100 %	30,143,7 40,921	100 %	32,851,2 99,957	100 %	36,071,8 96,471	100 %	128,309. 033,167	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase Kelulusan Jenjang SMA/MA	99,99 %	100 %	151,299 42,065	100 %	59,683,5 06,446	100 %	64,783,9 46,717	100 %	70,000,2 57,651	100 %	75,932,7 17,819	100 %	285,530. 370,698	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase Kelulusan Jenjang SMK	99,98 %	100 %	0	100 %	22,300,6 18,295	100 %	27,696,6 73,168	100 %	35,091,8 38,200	100 %	44,332,7 34,758	100 %	129,421. 864,421	DINAS PENDIDIKAN	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			7,41 %	25,93 %	0	44,44 %	27782,1 29159	62,96 %	125710, 992569	81,48 %	122685, 168319	100 %	351470 76819	100 %	311325, 366866	DINAS PERPUSTAK AAN DAN KEARSIPAN	
			2,94 %	14,44 %	0	35,56 %	136291 00209	56,67 %	149920, 10228	77,78 %	164912 11252	100 %	18140,3 32375	100 %	63252,6 54064	DINAS PERPUSTAK AAN DAN KEARSIPAN	
			0 persen	75 persen	364300 29882	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0	364300 29882	DINAS PERPUSTAK AAN DAN KEARSIPAN
1	21				270180 00000	337958 507232 7			394242 687138 5	422614 036850 7			470632 543492 7		162814 957471 46		
			81,82 %	0 %	270180 00000	328216 563232 7	100 %	100 %	382255 255138 5	100 %	409269 249670 7	100 %	459552 022232 7	100 %	158199 48902,7 46	DINAS KESEHATAN	
			86,27 %	0 %	0	85 %	904164 40000	85 %	112458, 320000	85 %	125419, 871800	85 %	102225, 212600	85 %	430519, 844400	DINAS KESEHATAN	
			6 Kota/Kabu paten	0 Kota/Ka bupaten	0	6 Kota/Ka bupaten	700300 0000	6 Kota/Ka bupaten	741600 0000	6 Kota/Ka bupaten	802800 0000	6 Kota/Ka bupaten	858000 0000	6 Kota/Ka bupaten	310270 00000	DINAS KESEHATAN	
1	22				158234 860800 0	178391 083408 0			179990 188842 1	181604 275330 5			183235 502683 8		891455 911064 4		
			73 %	0 %	0	95 %	178391 083408 0	95 %	179990 188842 1	95 %	181604 275330 5	100 %	183235 502683 8	100 %	723221 050264 4	DINAS KESEHATAN	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
			3518959 Penduduk	573290 8 Penduduk	168234 860800 0	0 Penduduk	0 0	0 Penduduk	0 0	0 0	0 Penduduk	0 0	0 0	573290 8 Penduduk	168234 860800 0	DINAS KESEHATAN			
1	2	4	23		0		168791 152790 5		273927 762770 6		352989 8.39523 3		376575 170618 3	117228 392570 27					
				11 %	0	40 %	168791 152790 5		273927 762770 6	53 %	352989 8.39523 3	72 %	376575 170618 3	117228 392570 27		DINAS KESEHATAN			
1	2	4	24		0		173916 755037 5		305732 296289 3		315565 023303 8		395894 466768 9	119110 854139 95					
				100 %	0	100 %	173916 755037 5		305732 296289 3	100 %	315565 023303 8	100 %	395894 466768 9	119110 854139 95		DINAS KESEHATAN			
1	2	4	25		115400 0.000		0		0		0		0	115400 0.000					
				100 %	115400 0.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	115400 0.000	0 %	DINAS KESEHATAN			
1	2	4	27		444422. 507539		642558. 011156		106322 731311 6		550772. 270952		652221. 232849	3.35320 1.33561 2					
				8420367 orang	24.9192 36.055	877293 7 orang	508958 86577	894209 1 orang	481889 63626	911741 8 orang	52.9760 38.944	929950 4 orang	614116 11686	447406 64 orang	238.391. 736888	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			
1	2	4			1808 medali	259669 497680	1989 medali	171320. 449400	2188 medali	698319. 082.824	2088 medali	1898 medali	204.809. 889452	1538.25 541996 0	1538.25 541996 0	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			
				58.8 persen	159833. 773804	6754 persen	420341. 675.179	7067 persen	316719. 266666	72,12 persen	293.659. 731404	73,64 persen	385.999. 731711	73,64 persen	1576.55 417876 4	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	4	395	Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit					0			0			0	12.398.931.485			12.398.931.485			
				Jumlah balita gizi buruk	274 Balita	995.420.500	0 Balita	0	0 Balita	0	0 Balita	0	0 Balita	0	0 Balita	0	995.420.500	0	0 Balita	995.420.500	DINAS KESEHATAN	
				Persentase pemenuhan SPM kesehatan	50 %	9.032.338.289	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	9.032.338.289	0 %	0 %	9.032.338.289	DINAS KESEHATAN	
				Jumlah kasus penyakit potensial wabah	1611 Alert Kasus	2.371.172.696	0 Alert Kasus	0	0 Alert Kasus	0	0 Alert Kasus	0	0 Alert Kasus	0	0 Alert Kasus	0	2.371.172.696	0	0 Alert Kasus	2.371.172.696	DINAS KESEHATAN	
1	2	4	396	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					0							0	1.311.074.212.567			1.311.074.212.567		
				Persentase fasilitas kesehatan dengan indeks layanan > 3	3,78 Poin	18155,577.715	0 Poin	0	0 Poin	0	0 Poin	0	0 Poin	0	0 Poin	0	18155,577.715	0	0 Poin	18155,577.715	DINAS KESEHATAN	
				Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar	11 %	1289338415645	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	1289338415645	0 %	0 %	1289338415645	DINAS KESEHATAN	
				Persentase kota/kabupaten yang melaporkan data kesehatan	6 Kota/Kabupaten	3580219207	0 Kota/Kabupaten	0	0 Kota/Kabupaten	0	0 Kota/Kabupaten	0	0 Kota/Kabupaten	0	0 Kota/Kabupaten	0	3580219207	6 Kota/Kabupaten	6 Kota/Kabupaten	3580219207	DINAS KESEHATAN	
2				Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan bisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.																		
2	3			Meningkatkan kesempatan kerja																		
2	3	6		Berkurangnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka																	
2	3	6	31	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja		50612828781	66468789750	73128736825	80427235260	88485771091							359123361707					
				Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan	20000 orang	21000 orang	42833463750	21000 orang	47129878225	21000 orang	51828490860	21000 orang	57027152291	105000 orang	246830153907						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Jumlah pencari kerja yang berwirausaha	962 orang	0 orang	20773500000	3399 orang	22850850000	3399 orang	25135935000	3399 orang	27649528500	13596 orang	96409813500						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	2,5 persen	2,5 persen	2,5 persen	2,5 persen	2,5 persen	2,5 persen	2,5 persen	2,5 persen	2,5 persen	2,5 persen	2,5 persen	12,5 persen	15.883,3 94.300	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	4	Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif															
2	4	Meningkatnya kewirausahaan baru															
2	4	34 Program Pembinaan dan Pengembangan Industri			15.334,8 67,011		555.395 05.537		80.869,5 70.645		56.717,6 19.007		57.584,0 79.388		266.045. 641.588	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	
		Jumlah wirausaha industri baru	1630 Wirausaha	2000 Wirausaha	0	5560 Wirausaha	39.984.000.000	5560 Wirausaha	39.984.000.000	5560 Wirausaha	40.783.800.000	5560 Wirausaha	41.599,3 53.600	25870 Wirausaha	161.567. 033.600	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	
		Persentase Jumlah IKM yang berkualitas	4,23 %	7,04 %	3.023,51 4.500	9,85 %	15.182,4 86.482	12,66 %	39.728,5 51.590	15,47 %	14.776,9 19.952	18,28 %	14.827,7 06.733	18,28 %	87.5391 79.257	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	
		Persentase pertumbuhan Jumlah Industri Kreatif	0 %	14,6 %	12.311,3 52.511	29,1 %	1.157,01 9.055	43,7 %	1.157,01 9.055	58,3 %	1.157,01 9.055	72,8 %	1.157,01 9.055	72,8 %	169.394 28.731	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	
2	4	36 Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi			2.336,86 0,463		1987,61 5.963		2.022,76 4.188		2.058,09 7.824		2.099,96 3.342		10.505,3 01.780	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN	
		Jumlah Volume Usaha Koperasi	45333750 00000 Rupiah	498671 2500000 0 Rupiah	2.336,86 0,463	0 Rupiah	0	0 Rupiah	0	0 Rupiah	0	0 Rupiah	0	498671 2500000 0 Rupiah	2.336,86 0,463	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN	
		Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi	246 Koperasi	0 Koperasi	0	120 Koperasi	1987,61 5.963	120 Koperasi	2.022,76 4.188	120 Koperasi	2.058,09 7.824	120 Koperasi	2.099,96 3.342	726 Koperasi	8168,44 1.317	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN	
2	4	37 Program Pembinaan dan Pengembangan UKM			101.385. 417.986		0		0		0		0		101.385. 417.986		
		Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, kecil, dan Menengah	0 UMKM	10000 UMKM	101.385. 417.986	0 UMKM	0	0 UMKM	0	0 UMKM	0	0 UMKM	0	10000 UMKM	101.385. 417.986	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN	

Kode		Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
2	4	7	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan			228530. 830		541967. 223		588011. 984		599938. 533		649857. 604		260830 6174		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGAN GAN	
			jumlah pasar yang menjual produk ber SNI (Standar Nasional Indonesia)	14 Pasar	16 Pasar	228530. 830	0 Pasar	0	0 Pasar	0	0 Pasar	0	0 Pasar	0	16 Pasar	228530. 830		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGAN GAN	
			Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrologian yang diawasi	14 Pasar	0 Pasar	0	18 Pasar	541967. 223	20 Pasar	588011. 984	22 Pasar	599938. 533	24 Pasar	649857. 604	24 Pasar	237977 5344		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGAN GAN	
2	4	7				527931. 250		470892. 675		500233. 057		531620. 033		565213. 890		259589 0905			
			persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	527931. 250	100 %	470892. 675	100 %	500233. 057	100 %	531620. 033	100 %	565213. 890	100 %	259589 0905		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGAN GAN	
2	4	7	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan			606258. 400		212955 8400		219572 3400		219572 3400		226519 6650		939246 0250			
			Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	40439181 98 USD	408435 7380 USD	606258. 400	412520 0954 USD	212955 8400	416645 2963 USD	219572 3400	420811 7493 USD	219572 3400	425019 8668 USD	226519 6650	425019 8668 USD	939246 0250		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGAN GAN	
2	4	7	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM			0		109427. 298210		107726. 455074		109496. 946623		110518. 228114		437168. 928021		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGAN GAN	
			Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	62050 UMKM	0 UMKM	0	27799 UMKM	109427. 298210	27799 UMKM	107726. 455074	27799 UMKM	109496. 946623	27797 UMKM	110518. 228114	173244 UMKM	437168. 928021			
2	5		Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan																

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	5	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Indeks ketahanan pangan														
2	8				48.0879 54.479		62.3658 53.250		124.807 208.790		91.904.6 12.800		98.118.6 98.408		425.284. 327.727		
2	5			Persentase ketersediaan pangan	100 %	2.905.51 5.861	100 %	6.193.91 8.450	100 %	377.20.0 00.000	100 %	15.464.0 00.000	100 %	16.736.8 00.000	100 %	79.020.2 34.311	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		Persentase pangan yang bebas bahan berbahaya	95 %	45.182.4 38.618	95 %	53.893.2 79.934	95 %	85.352.2 08.790	96 %	74.690.6 12.800	96 %	79.611.8 98.408	96 %	338.730. 438.550	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
		Skor Pola Pangan Harapan	80,5 Skor	0	82 Skor 4.866	83 Skor 0.000	17.350.0 0.000	84 Skor 0.000	17.500.0 0.000	17.700.0 0.000	85 Skor 0.000	75.533.65 4.866	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN				
2	5	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan		95.2070 12.740		157.833. 675.853		66.093.2 99.335		58.262.8 47.029		123.825. 918.264		501.222. 753.221			
2	8		0 Ton	0	4.412 Ton	21.270.8 57.470	4.434 Ton	23.508.4 32.141	4.456 Ton	19.567.1 96.395	4.478 Ton	18.433.0 86.660	17.780 Ton	82.779.5 72.666	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
2	5		703786 ton	95.2070 12.740	0 ton	803.000. 000	0 ton	0	0 ton	0	0 ton	0	703786 ton	96.010.0 12.740	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
		Jumlah produksi perikanan	703786 ton														
		Jumlah Produksi Perikanan tangkap	212166,7 6 ton	0	150552 ton	128633. 257236	152430 ton	351877 01.580	153701 ton	30.465.0 00.000	155386 ton	96.071.9 31.018	612069 ton	290357. 889.834	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
		Jumlah Produksi Ikan Hias	19386028 Ekor	0	207773 03 Ekor	14.025.0 00	218322 31 Ekor	65.304.4 98	61.697.1 50	223246 73 Ekor	93.667.2 75	862697 83 Ekor	234.693. 923	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN			

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Jumlah produksi benih ikan	74509415 Ekor	0 Ekor	795947 51 Ekor	917114 000	849981 43 Ekor	110053 7880	908101 58 Ekor	132064 5456	992583 35 Ekor	1584.77 4.547	354661 387 Ekor	4923.07 1883	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN			
		Jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan	5198,5 Ton	0 Ton	5959,1 5 Ton	822.357. 702	6379,0 7 Ton	113961 0933	6827,5 7 Ton	101456 8474	7310,2 3 Ton	1280,81 5.609	26476, 02 Ton	425735 2.718	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN			
		Angka Konsumsi Ikan	355 Kg/Kapita/ Tahun	0 Kg/Kapita/ ta/Tahun	37 Kg/Kapita/ ta/Tahun	5373,06 4445	38,5 Kg/Kapita/ ta/Tahun	5091,71 2.303	40 Kg/Kapita/ ta/Tahun	5833,73 9554	41,5 Kg/Kapita/ ta/Tahun	6361,64 3155	41,5 Kg/Kapita/ ta/Tahun	22.660,1 59457	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN			
2	8	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan			981816 09140		62.680,0 02.856		131094. 024.713		79.7296 15479		52.868.4 56284	424.553. 708472	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN			
5		Jumlah produksi benih padi	44 Ton	0 Ton	45,6 Ton	400.000. 000	472 Ton	450.000. 000	472 Ton	500.000. 000	48 Ton	550.000. 000	188 Ton	190000 0.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN			
		Jumlah Produksi Pertanian dan Peternakan	0 ton	69229 ton	91248,8 61672	0 ton	0 ton	0	0 ton	0	0 ton	0	69229 ton	912488 61672	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN			
		Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	0 kasus	0 kasus	0	22.444,9 29753	0 kasus	7245,39 4.593	0 kasus	674893 4.055	0 kasus	7310,81 2319	0 kasus	43.750,0 70720	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN			
		Jumlah kasus penyakit menular strategis	12 kasus	12 kasus	6.87769 1.863	0	0 kasus	0	0 kasus	0	0 kasus	0	12 kasus	6.87769 1.863	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN			
		Jumlah pelanggaran bidang pertanian dan peternakan	10 kasus	10 kasus	55.055,6 05	8 kasus	209155. 518	8 kasus	44.500,0 000	502.500. 000	7 kasus	562.750. 000	7 kasus	1774,46 1.123	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN			
		Jumlah produksi Tanaman produktif	36000 Bibit	0 Bibit	36700 Bibit	2.981,37 0.066	36700 Bibit	2.954,17 8.575	37000 Bibit	3.068,89 3.712	37000 Bibit	3267,36 1.451	147400 Bibit	12.271,8 03804	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN			

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	25000 ton	0 ton	0	33063 ton	12,922.8 ton	38022 ton	13,667.1 ton	43725 ton	15,255.5 ton	50284 ton	176,796 ton	165094 ton	595,251.1 ton	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
		Jumlah produksi dan pemasaran produk pertanian	98,99 ton	0 ton	0	1094 ton	1744,67 ton	11468 ton	192,586 ton	120,04 ton	212,653 ton	125,27 ton	2,348.88 ton	469,39 ton	814,595 ton	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
		Jumlah lokasi Agrowisata yang dikembangkan	3 Lokasi	0 Lokasi	0	8 Lokasi	762,131 ton	10 Lokasi	838,344 ton	12 Lokasi	922,179 ton	14 Lokasi	501,439 ton	44 ton	753,705 ton	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
		Jumlah kasus pelanggaran bidang pertanian	8 kasus	0 kasus	0	6 kasus	400,000 ton	4 kasus	600,000 ton	2 kasus	700,000 ton	0 kasus	800,000 ton	0 kasus	2,500,000 ton	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
		Jumlah produksi susu	499,459 liter	0 liter	0	519,637 liter	2,707.57 ton	530,030 liter	3,945.70 ton	54,063 liter	8,682.02 ton	55,144 liter	3,943.72 ton	214,174 liter	19,279 ton	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
		Jumlah produksi daging	288,145 kg	0 kg	0	318,476 kg	11,404.6 ton	344,400 kg	11,613 ton	351,120 kg	34,954.5 ton	368,676 kg	5,068 ton	138,267 kg	63,040.3 ton	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
		Jumlah produksi dan pemasaran produk peternakan	10,000 ton	0 ton	0	11,000 ton	2,161.72 ton	12,000 ton	6,580.48 ton	13,000 ton	20,808 ton	14,000 ton	18,294 ton	50,000 ton	126,524 ton	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
		Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Brucellosis, AI, SE dan anthrax)	12 kasus	0 kasus	0	11 kasus	700,323 ton	10 kasus	862,711 ton	9 kasus	10,020 ton	8 kasus	11,200 ton	8 kasus	3,685.06 ton	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
		Jumlah pelayanan kesehatan hewan	8,500 ekor	0 ekor	0	9,000 ekor	189,331 ton	9,500 ekor	211,344 ton	10,000 ekor	233,278 ton	21,000 ekor	256,906 ton	21,000 ekor	890,861 ton	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Jumlah omzet pemasaran bunga dan tanaman hias	92000000 000 rupiah	0 0 rupiah	102000 000000 rupiah	3.65134 3.056 rupiah	107000 000000 rupiah	79.754,6 47.640 rupiah	112000 000000 rupiah	2.952,37 2.963 rupiah	116000 000000 rupiah	3.116,49 1.446 rupiah	437000 000000 rupiah	89.474,8 55105 rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN			
2	6	Mendorong terciptanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat																
2	6	10 Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	Tingkat Kemiskinan															
2	6	10 47 Program Penanganan Fakir Miskin		7533,43 4,732		165,817 179,411		166,252 678,277		167,058 146,557		167,851 075,127		674,512 514,104		DINAS SOSIAL		
		Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri	840 KPM	890 KPM	1475 KPM	165,817 179,411	2060 KPM	166,252 678,277	2645 KPM	3230 KPM	167,851 075,127	3230 KPM	674,512 514,104					
2	7	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masa lah perkotaan																
2	7	11 Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Jumlah titik genangan banjir															
2	7	48 Program Pengendali Banjir dan Abrasi		0		4,246,19 3,360,09 2		3,654,67 7,444,67 0		4,058,49 6,141,34 7		4,352,90 2,099,00 8		16,312,2 69,045,1 17				
		Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam	77 %	0 %	79 %	4,054,33 7,679,70 0		81 %	3,478,96 9,815,96 4	83 %	3,858,34 6,949,62 6	85 %	4,131,23 8,089,95 6	85 %	15,522,8 92,535,2 46	DINAS SUMBER DAYA AIR		

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			42,14 %	0 %	0	50,78 %	191855. 680392	5646 %	175707. 628706	63,78 %	200149. 191721	72,52 %	221664. 009052	789376. 509871	DINAS SUMBER DAYA AIR			
2	7	49			409079 325289 9		0		0		0		0	409079 325289 9				
			75 %	77 %	409079 325289 9	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	409079 325289 9	DINAS SUMBER DAYA AIR			
2	7	12																
2	7	12			208046 533879 6		147257 386324 5		884475 44216		151233 602733 4		295614 153292 0	810996 430651 1				
			60 %	60,99 %	207546 477867 6	63,65 %	144757 386324 5	66,09 %	634475 44216	73,69 %	151233 602733 4	79,61 %	293114 153292 0	802996 374639 1	DINAS SUMBER DAYA AIR			
			0 %	0 %	500056 0120	0,93 %	250000 00000	185 %	250000 00000	0 %	0	2,78 %	250000 00000	800005 60120	DINAS SUMBER DAYA AIR			
2	7	12																
2	7	12			484581 14245		243475. 176393		183550 102736 5		283255 616343 4		374926 977977 9	870926 026121 6				
			14,33 %	15,93 %	484581 14245	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	484581 14245	DINAS SUMBER DAYA AIR			
			15,93 %	0 %	0	1704 %	243475. 176393	20,49 %	183550 102736 5	23 %	283255 616343 4	26,44 %	374926 977977 9	866080 214697 1	DINAS SUMBER DAYA AIR			

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Target	Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	7	Meningkatnya akses sanitasi layak														
2	7	Program Pengelolaan Persampahan		149520 095082 5		189646 937170 6		195915 252819 4		322713 340207 8		328501 879709 0	118629 750498 93			
		Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA	6645,24 ton/hari	65518 9 ton/hari	149520 095082 5	0 ton/hari	0	0 ton/hari	0	0 ton/hari	0	0 ton/hari	65518 9 ton/hari	149520 095082 5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Persentase pengurangan sampah di kota	14 %	0 %	0	17 %	189646 937170 6	20 %	195915 252819 4	23 %	322713 340207 8	26 %	328501 879709 0	103677 740990 68	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta														
2	7	Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan		349603 996798		439845 193951		434507 722946		584578 356330		528829 491771	233736 476179 6			
		persentase ruas jalan yang tidak macet (kecepatan rata-rata 35 Km/ jam)	0 %	5 %	345417 368976	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	5 %	345417 368976	DINAS PERHUBUNGAN	
		Persentase pelanggaran oleh operator angkutan perairan	0 %	40 %	418662 7822	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	418662 7822		DINAS PERHUBUNGAN	
		Kecepatan Rata-Rata di 41 Koridor Jalan Utama pada Jam Sibuk	19,97 Km/ Jam	0 Km/ Ja m	0	22 Km/ Ja m	439845 193951	23 Km/ Ja m	434507 722946	24 Km/ Ja m	584578 356330	25 Km/ Ja m	198776 076499 8		DINAS PERHUBUNGAN	
2	7	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan		208129 614851 4		221996 018693 1		356411 144627 7		362571 381859 2		286808 980952 1	143591 714098 35			
		Penambahan Road Ratio	71029 %	Q0032 %	149830 456893 5	Q0032 %	167404 513955 8	Q0032 %	293570 704653 6	Q0032 %	301402 109886 3	Q0032 %	217816 330380 6	113002 411576 98	DINAS BINA MARGA	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	7	13	55	146400 m2	582.991.579.579	146400 m2	545.915.047.373	146400 m2	628.404.399.741	146400 m2	611.692.719.729	146400 m2	689.926.505.715	254.787 m2	3.058.930.252.137	DINAS BINA MARGA	
					1023.069.357.614		1041.482.750.269		1079.778.612.576		1.130.693.461.081		1.188.830.648.157		5.463.854.829.697		
				0 %	0	96,5 %	104148 2750269	97 %	107977 8612.576	975 %	113069 3.461081	98 %	118883 0648157	98 %	4.440.785.472.083	DINAS BINA MARGA	
				96 %	1023.069.357.614	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	96 %	1.023.069.357.614	DINAS BINA MARGA	
2	7	13	56		513.624.18.514		52.500.000.000		551.250.000.000		578.812.50.000		607.753.12.500		277.643.981.014		
				0 m	0	30000 m	52.500.000.000	30000 m	551.250.000.000	30000 m	578.812.50.000	30000 m	607.753.12.500	199125 m	226.281.562.500	DINAS BINA MARGA	
				30000 m	513.624.18.514	0 m	0	0 m	0	0 m	0	0 m	0	79125 m	51.362.418.514	DINAS BINA MARGA	
2	7	13															
2	7	13	59		151.534.900.949		848.392.07.948		217.163.034.923		251.069.335.958		1.094.604.192.894		1.799.210.672.672		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari	413377 Penumpang per hari	0 Penumpang per hari	0	925785 Penumpang per hari	84.239207948	1179494 Penumpang per hari	216563.034923	1433363 Penumpang per hari	249069.335958	1767292 Penumpang per hari	109460419289	1767292 Penumpang per hari	1644475771723	DINAS PERHUBUNGAN		
		Jumlah penumpang angkutan umum sesuai Standar Pelayanan Prima yang terlayani per hari	413377 Penumpang per hari	493021 Penumpang per hari	151534.900949	0 Penumpang per hari	0	0 Penumpang per hari	0	0 Penumpang per hari	0	0 Penumpang per hari	0	493021 Penumpang per hari	151534.900949	DINAS PERHUBUNGAN		
		Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi	82 %	20 %	0	50 %	600000000	80 %	600000000	100 %	200000000	100 %	0	100 %	3200000000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	7	60			129873.745372		94169577132		90730173032	65712316632	50570344632		431056.156800					
		Persentase armada angkutan perairan yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan	20 %	30 %	52.033504174	41 %	18.579538532	61 %	15.679736632	82 %	21079736.632	100 %	16.279736.632	100 %	123652.252.602	DINAS PERHUBUNGAN		
		Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	0 Terminal Penumpang	0 Terminal Penumpang	77.840241.198	0 Terminal Penumpang	70.653938.600	0 Terminal Penumpang	69700.436.400	1 Terminal Penumpang	38.782.580.000	3 Terminal Penumpang	27.554508.000	4 Terminal Penumpang	284.531.704.198	DINAS PERHUBUNGAN		
		Persentase Operator Angkutan Perairan yang Memenuhi Peraturan	0 %	5 %	0	15 %	4936100000	35 %	5350000000	65 %	5.850000000	100 %	6.736100000	100 %	22.872.200000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	7	61			68.245012.736		105787840.196		104.912.244.693	115.577.767.655	127896186.192		522.419.051.472					
		Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun	783 Kejadian	626 Kejadian	67255.552.046	0 Kejadian	0	0 Kejadian	0	0 Kejadian	0	0 Kejadian	0	626 Kejadian	67255.552.046	DINAS PERHUBUNGAN		
		Jumlah kecelakaan angkutan perairan per tahun	0 Kejadian	0 Kejadian	989460.690	0 Kejadian	0	0 Kejadian	0	0 Kejadian	0	0 Kejadian	0	0 Kejadian	989460.690	DINAS PERHUBUNGAN		

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Presentase kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan korban jiwa pertahun	0,33 %	0,26 %	0	0,17 %	105.787.840196	0,11 %	104.912.244.693	0,08 %	115.577.767655	0,02 %	127.896.186192	0,02 %	454.174.038.736	DINAS PERHUBUNGAN	
2	7																
2	15	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat															
2	7																
2	15	Program Penyediaan dan Pemeliharaan/ Perawatan Perumahan Rakyat			3.876.065.011.864		45.0897.9260.021		5.233.084.742.143		5.878.781.272.250		4.903.118.983.163		24.400.029.269.41		
		persentase unit perumahan rakyat yang terbangun	8,33 %	0 %	3.876.065.011.864	0,48 %	45.0897.9260.021	0,53 %	5.233.084.742.143	0,37 %	5.878.781.272.250	0,94 %	4.903.118.983.163	10,65 %	24.400.029.269.41	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA	
2	7				0		172.816.268.455		828.377.170.503		988.281.119.029		944.895.093.480		2.934.369.651.467		
2	15	Program Penyediaan dan Pemeliharaan/ Perawatan Perumahan Rakyat			0	35 %	139.166.268.455	57 %	613.377.170.503	78 %	747.481.119.029	100 %	862.720.093.480	100 %	2.362.744.651.467	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA	
		persentase perumahan rakyat yang lengkap sarana prasarana	17 %	0 %	0												
		persentase unit perumahan rakyat yang terpelihara/ terawat	13 %	0 %	0	18 %	33.650.000.000	39 %	215.000.000.000	66 %	240.800.000.000	87 %	82.175.000.000	87 %	571.625.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA	
2	7				2.620.709.178.864		0		0		0		0		2.620.709.178.864		
2	15	Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat			2.423.857.487.481	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	8,33 %	2.423.857.487.481	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA	
		presentase unit perumahan rakyat yang terbangun	5,83 %	2,5 %	2.423.857.487.481			0 %	0	0 %	0	0 %	0				

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Persentase Perumahan yang lengkap sarana prasarana	0 %	17 %	82,064,5 69,614	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	17 %	82,064,5 69,614	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA	
		persentase unit perumahan yang terpelihara	0 %	13 %	114,787 121,769	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	13 %	114,787 121,769	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA	
2	8	Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta															
2	8	Meningkatnya pertumbuhan investasi															
2	8	Program Peningkatan Penanaman Modal			3,715,71 4,306		8,650,000 0,000		8,650,000 0,000		8,650,000 0,000		8,650,000 0,000		38,315,7 14,306		
		Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	55 Triliun	93,1 Triliun	3,715,71 4,306	100,2 Triliun	8,650,000 0,000	1078 Triliun	8,650,000 0,000	115,9 Triliun	8,650,000 0,000	124,5 Triliun	8,650,000 0,000	124,5 Triliun	38,315,7 14,306	DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu			120,247 475,933		0		0		0		0		120,247 475,933		
		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,5 %	85,5 %	100,211 739,446	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	85,5 %	100,211 739,446	DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	74 %	100 %	200,35,7 36,487	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	200,35,7 36,487	DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	9	Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan															

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	9	17	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana														
2	9	17	72	Program Penataan Ruang		10.422.3 40.199	57.003.0 00.000	56.835.0 00.000	15.915.0 00.000	13.885.0 00.000	154.060. 340.199							
				Rasio kesesuaian rencana tata ruang	57 %	58 %	9.238.48 0.199	59 %	55.451.0 00.000	60 %	55.583.0 00.000	61 %	14.663.0 00.000	62 %	12.633.0 00.000	62 %	147.568. 480.199	DINAS CIPTA KARYA, TAT RUANG DAN PERTANAHAN
				Persentase pelanggaran tata ruang yang dihangi	90 %	90 %	1.183.86 0.000	90 %	1.552.00 0.000	90 %	1.252.00 0.000	90 %	1.252.00 0.000	90 %	1.252.00 0.000	90 %	6.491.86 0.000	DINAS CIPTA KARYA, TAT RUANG DAN PERTANAHAN
3				Menjadikan Jakarta tempat wahana aparaturnegara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.														
3	10			Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan														
3	10	18		Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Indeks profesionalitas ASN													
3	10	18	76	Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN	Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta	0 Nilai (Skala 0-100)	0 84 Nilai (Skala 0-100)	124.409 89.365	127.935 31.357	14.192.2 33.417	158.309 71.836	136.939. 885	64.565.1 14.425		90 Nilai (Skala 0-100)	90 Nilai (Skala 0-100)	608.487. 904	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
				Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	45 %	0 %	0	70 %	9.020.46 2.725	9.657.20 6.776	75 %	80 %	85 %	85 %	85 %	41.659.1 33.858	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM	27 %	40 % 49.9012 13.060	0 % 0	0 1.044.36 2.772	0 % 1.202.62 1.807	0 1.267.14 9.438	0 % 1.202.62 1.807	0 1.202.62 1.807	0 % 2 jenis diklat	0 1.202.62 1.807	0 1.202.62 1.807	40 % 4.716.75 5.824	49.9012 13.060	BADAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
3	10	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggara an Diklat	5 jenis diklat	0 jenis diklat	0 4 jenis diklat	1.044.36 2.772	2 jenis diklat	1.202.62 1.807	4 jenis diklat	1.267.14 9.438	2 jenis diklat	1.202.62 1.807	17 jenis diklat	4.716.75 5.824		BADAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
3	11	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel																
3	11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel																
3	11	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan			32.2616 98.568	0	0	0	0	0	0	0	32.2616 98.568					
		Persentase usulan hasil rembuk RW yang diakomodir	45 Persentas e	45 Persent ase	698.140. 050	0 Persent ase	0	0 Persent ase	0	0 Persent ase	0 Persent ase	0	45 Persent ase	698140. 050		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		persentase capaian indikator kinerja program dalam RPJMD yang berkinerja tinggi	0 %	75 % 201606 54,140	0 % 0	0 0	0 % 0	0 0	0 % 0	0 0	0 % 0	0 0	75 % 201606 54,140			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	45 %	45 % 8935,75 1,375	0 %	0	0 % 0	0 0	0 % 0	0 0	0 % 0	0 0	45 % 8935,75 1,375			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		persentase keselarasan RKPD terhadap KUA PPAS	100 %	100 % 535.200. 000	0 %	0	0 % 0	0 0	0 % 0	0 0	0 % 0	0 0	100 % 535.200. 000			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja ('Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD ('Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		persentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	0 %	100 %	262.450. 077	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	262.450. 077	BADAN PERENCAN AAN PEMBANGU NAN DAERAH	
		persentase data set informasi publik yang diverifikasi dan terpublikasi kepada masyarakat	0 %	50 %	166950 2926	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	50 %	166950 2926	50 %	166950 2926	BADAN PERENCAN AAN PEMBANGU NAN DAERAH	
3	11	359	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		0	22.207.4 83.773		23.769.5 98.707		24.959.9 15.128		28.513.7 23.376		99.450.7 20.984		99.450.7 20.984	BADAN PERENCAN AAN PEMBANGU NAN DAERAH		
3	11	360	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan		0	26.462.5 650		27.918.0 061		29.453.4 964		31.073.4 387		1.149.07 5.062		1.149.07 5.062	BADAN PERENCAN AAN PEMBANGU NAN DAERAH		
3	11	361	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra		0	542.692. 000		572.540. 060		604.029. 763		637.251. 400		2.356.51 3.223		2.356.51 3.223	BADAN PERENCAN AAN PEMBANGU NAN DAERAH		
3	11	362	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLN		0	147.693. 670		155.816. 822		164.386. 747		173.428. 018		641.325. 257		641.325. 257	BADAN PERENCAN AAN PEMBANGU NAN DAERAH		
3	11	363	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian		0	242.080. 300		255.394. 717		269.441. 426		284.260. 704		1.051.17 7.147		1.051.17 7.147			

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang Perekonomian	78,2 %	0 %	0	85 %	242.080. 300	85 %	255.394. 717	85 %	269.441. 426	85 %	284.260. 704	85 %	105117 7147	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		0			2.886.81 5.352		3.423.59 0.197		3.467.88 7.657		2.920.12 1.479		12.698.4 14.685	
		Persentase keselarasan pembangunan daerah dalam RKPD dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD	100 %	0 %	0	100 %	2.886.81 5.352	100 %	3.423.59 0.197	100 %	3.467.88 7.657	100 %	2.920.12 1.479	100 %	12.698.4 14.685	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	19	Program Pengelolaan Data dan Sistem		0			1210.00 0.000		1270.50 0.000		1.334.02 5.000		1400.72 6.250		5215.25 1.250	
		Indeks kepuasan pelayanan sistem informasi Perencanaan , Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	0 IKM	0 IKM	0	3 IKM	1210.00 0.000	3 IKM	1270.50 0.000	3 IKM	1.334.02 5.000	3 IKM	1400.72 6.250	3 IKM	5215.25 1.250	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	11	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD		0			500.000 00		750.000 00		125.000. 000		100.000. 000		350.000. 000	
		Rata-rata capaian kegiatan OPD Perencanaan Pembangunan Daerah	91,63 %	0 %	0	91,8 %	500.000 00	91,9 %	750.000 00	92 %	125.000. 000	92,1 %	100.000 000	92,1 %	350.000. 000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel														
3	11	Program Penataan Administrasi Kependudukan		93.943,6 02.376			98.884.4 05.508		96.899.3 11.476		99198.4 31.872		103133. 008.306		492.058. 759.538	

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil	62 %	65 %	406295 95521	70 %	409005 99666	76 %	386199 56375	83 %	404438 28749	90 %	440205 97492	90 %	204614 577803	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA N SIPIL		
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	49,5 %	59,3 %	533140 06855	67,1 %	566900 45342	75,7 %	571158 55101	82,9 %	575711 03123	89,7 %	579089 10814	89,7 %	282599 921235	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA N SIPIL		
		Persentase pemanfaatan data penduduk instansi/ lembaga pengguna data	22 %	0 %	0	40 %	129376 0500	60 %	116350 0000	80 %	118350 0000	100 %	120350 0000	100 %	484426 0500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA N SIPIL		
3	11	Program Peningkatan Penyelenggara an Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu			0		785677 2800		766209 4650		827757 4670		937438 6121		331708 28241			
19			80 %	0 %	0	85 %	600000 00	90 %	700000 00	95 %	800000 00	95 %	900000 00	95 %	300000 000	KABUPATEN ADMINISTRA SI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU		
324			80 %	0 %	0	85 %	160000 00	90 %	176000 00	95 %	195000 00	95 %	212960 00	95 %	743960 00	KABUPATEN ADMINISTRA SI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU		
		Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	80 %	0 %	0	85 %	980000 00	90 %	107800 000	95 %	120000 000	95 %	122000 000	95 %	447800 000	KABUPATEN ADMINISTRA SI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU		
		Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	83 Nilai	0 Nilai	0	84 Nilai	377000 000	85 Nilai	406000 000	86 Nilai	445000 000	87 Nilai	460000 000	87 Nilai	168800 0000	KABUPATEN ADMINISTRA SI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU		
		Persentase Capaian Kinerja Bupati (KPI, Perkin dan Lakip)	80 %	0 %	0	85 %	100000 000	85 %	120000 000	90 %	140000 000	90 %	160000 000	90 %	520000 000	KABUPATEN ADMINISTRA SI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU		
		Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	70 %	0 %	0	80 %	400000 00	85 %	400000 00	90 %	400000 00	100 %	400000 00	100 %	160000 000	KABUPATEN ADMINISTRA SI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU		

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Jumlah Kawasan yang Tertata	0 Kawasan	0 Kawas an	1 Kawas an	200000 00	1 Kawas an	200000 00	2 Kawas an	200000 00	2 Kawas an	200000 00	2 Kawas an	800000 00	KABUPATEN ADMINISTRA SI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	3 Indeks	0 Indeks	0 Indeks	560.000. 000	3 Indeks	460.000. 000	4 Indeks	495.000. 000	4 Indeks	590.000. 000	4 Indeks	2.10500 0.000	KABUPATEN ADMINISTRA SI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU			
		Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat	70 %	0 %	0	50.085.0 00	80 %	55.873.0 00	90 %	58.240.5 00	95 %	60.134.5 00	95 %	224.333. 000	KABUPATEN ADMINISTRA SI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU			
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten	80 %	0 %	0	30.560.0 00	85 %	33.616.0 00	95 %	36.977.6 00	95 %	40.675.3 60	95 %	141828. 960	KABUPATEN ADMINISTRA SI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU			
		Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak	70 %	0 %	0	967500 0	80 %	10.642.5 00	90 %	11.706.7 50	95 %	12.877.4 25	95 %	44.901.6 75	KABUPATEN ADMINISTRA SI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU			
		Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	80 %	0 %	0	14.080.0 00	85 %	15.104.0 00	90 %	15.744.0 00	95 %	16.256.0 00	95 %	61.184.0 00	KABUPATEN ADMINISTRA SI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU			
		Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu > 80 %	90 %	0 %	0	6.481.37 2.800	95 %	6.305.45 9.150	95 %	6.795.40 5.820	95 %	7.741.14 6.836	95 %	27.323.3 84.606	KABUPATEN ADMINISTRA SI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU			
3	11	Program Peningkatan Pengembang an Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		0	610208 06424			60.113.6 71.032		69.433.0 85.640		65.194.2 00.248		255.761. 763.344				

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	3 Indeks	0 Indeks	0	586208 06.424	3 Indeks	474136 71032	4 Indeks	635830 85.640	4 Indeks	53.294,2 00.248	4 Indeks	222.911. 763.344	KABUPATEN ADMINISTRA SI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU			
		Jumlah Kantor/ Rumah Dinas Lurah dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	0 Gedung	0 Gedung g	0 Gedung g	100000 0.000	4 Gedung g	750000 0.000	4 Gedung g	585000 0.000	4 Gedung g	990000 0.000	12 Gedung g	24.250.0 00.000	KABUPATEN ADMINISTRA SI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU			
		Jumlah Kantor Camat/ Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	0 Gedung	1 Gedung g	0	140000 0.000	1 Gedung g	520000 0.000	1 Gedung g	0	1 Gedung g	2.00000 0.000	4 Gedung g	860000 0.000	KABUPATEN ADMINISTRA SI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU			
3	11	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat			0	367469 3.451		402069 8.462		4404,11 0225		481857 4089		16.9180 76.227				
		Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	0 %	0 %	0	267000. 000	80 %	292.000. 000	90 %	312.000. 000	100 %	330.000. 000	100 %	120100 0.000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA PUSAT			
		Persentase penanganan perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	0 %	0 %	0	127440. 000	100 %	127440. 000	100 %	127440. 000	100 %	127.440. 000	100 %	509760. 000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA PUSAT			
		Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	0 %	0 %	0	495000. 00	100 %	495000. 00	100 %	495000. 00	100 %	495000. 00	100 %	198.000. 000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA PUSAT			
		Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	0 Nilai	0 Nilai	0	345800. 000	90 Nilai	345800. 000	91 Nilai	345800. 000	91 Nilai	345.800. 000	91 Nilai	1.383.20 0.000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA PUSAT			
		Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	0 %	0 %	0	33.4078 41	100 %	34.3076 06	100 %	35.2973 90	100 %	36.3861 46	100 %	139.398. 983	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA PUSAT			

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	0 %	0	0 %	25.000.00	100 %	30.750.00	100 %	35.562.500	100 %	39.509.375	100 %	130.821.875	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA PUSAT		
		Jumlah Kawasan yang tertata	0 kawasan	0	4 kawasan	23.500.00	4 kawasan	25.850.00	4 kawasan	28.435.00	4 kawasan	31.278.500	4 kawasan	109.063.500	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA PUSAT		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	0 Indeks	0	4 Indeks	514.382.664	4 Indeks	565.820.930	4 Indeks	622.403.023	4 Indeks	684.643.325	4 Indeks	2.387.249.942	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA PUSAT		
		Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	0 %	0	100 %	6750.000	100 %	2.232.000	100 %	6750.000	100 %	2.320.000	100 %	18052.000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA PUSAT		
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	0 %	0	100 %	8.480.000	100 %	8.480.000	100 %	8.480.000	100 %	8.480.000	100 %	33.920.000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA PUSAT		
		Koordinasi Pelaksanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat Kota Layak Anak	0 %	0	100 %	6760.000	100 %	6760.000	100 %	6760.000	100 %	6760.000	100 %	27040.000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA PUSAT		
		Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	0 %	0	100 %	8.125.000	100 %	9.750.000	100 %	11.375.000	100 %	13.000.000	100 %	42.250.000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA PUSAT		
		Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat > 80 %	0 %	0	90 %	2.258.547.946	90 %	2.522.007.926	100 %	2.814.307.312	100 %	3.143.456.743	100 %	107383.19927	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA PUSAT		
3	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat			0		304.785.675.475		336.839.679.537		370.489.914.478		409.418.686.966		1.421.533.956.456	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA PUSAT		
11		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Pusat	0 Indeks	0	4 Indeks	277.494.675.475	4 Indeks	306.318.079.537	4 Indeks	338.184.914.478	4 Indeks	373.423.686.966	4 Indeks	1.295.421.356.456	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA PUSAT		
19																	
329																	

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja ('Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perangkatannya yang memenuhi standar	0 Gedung	0	75 Gedun g	26.441,0 00.000	80 Gedun g	30.521,6 00.000	85 Gedun g	32.305,0 00.000	89 Gedun g	35.095,0 00.000	89 Gedun g	124.362. 600.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT		
		Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perangkatannya yang memenuhi standar	0 Gedung	0	15 Gedun g	850.000. 000	15 Gedun g	0	15 Gedun g	0	16 Gedun g	900.000. 000	16 Gedun g	1.750.00 0.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT		
3	11	Program Peningkatan Pengembangan n Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Utara		0		312.588. 909.200		381.477. 800.110		398.610. 580.131		435.346. 638.146		1.528.02 3.927.587			
	19		0 Indeks	0	3 Indeks	309.388. 909.200	3 Indeks	340.327. 800.110	4 Indeks	374.360. 580.131	4 Indeks	411.796. 638.146	4 Indeks	1.435.87 3.927.587	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		
		Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perangkatannya yang memenuhi standar	42 Gedung	0	46 Gedun g	1.400.000 0.000	50 Gedun g	191.500 00.000	54 Gedun g	22.550,0 00.000	57 Gedun g	22.550,0 00.000	57 Gedun g	65.650,0 00.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		
		Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perangkatannya yang memenuhi standar	6 Gedung	0	7 Gedun g	1800.000 0.000	8 Gedun g	22.000,0 00.000	9 Gedun g	1700.000 0.000	9 Gedun g	1000.000 0.000	9 Gedun g	26.500,0 00.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		
3	11	Program Peningkatan Penyelenggara an Kota Administrasi Jakarta Utara		0		4.259.24 9.661		4.257.50 2.847		4.601.21 7.903		5.195.74 0.851		18.3137 11.262			
	19		85 %	0	93 %	113.333. 400	95 %	113.333. 400	97 %	113.333. 400	98 %	113.333. 400	98 %	453.333. 600	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		
		Percentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan		0		105.988. 000	85 %	116.600. 000	90 %	128.300. 000	95 %	141.100. 000	95 %	491.988. 000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Percentase Penyelesaian Sengketa Hukum.	84 %	0 %	0	87 %	924000 0	90 %	102000 00	92 %	112000 00	94 %	123000 00	94 %	42.9400 00	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA UTARA		
		Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	84 Nilai	0 Nilai	0	87 Nilai	133650. 000	89 Nilai	147015. 000	91 Nilai	161716. 500	92 Nilai	177888. 150	92 Nilai	620269. 650	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA UTARA		
		Percentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	80 %	0 %	0	87 %	173838 00	90 %	173838 00	95 %	173838 00	100 %	173838 00	100 %	695352 00	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA UTARA		
		Percentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	80 %	0 %	0	87 %	376055 00	90 %	413660 00	95 %	455025 00	100 %	500530 00	100 %	174527. 000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA UTARA		
		Jumlah Kawasan yang Tertata	3 Kawasan	0 Kawas an	0	3 Kawas an	340200 00	3 Kawas an	374220 00	3 Kawas an	411642 00	3 Kawas an	452805 00	3 Kawas an	157886 700	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA UTARA		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	3 Indeks	0 Indeks	0	4 Indeks	125000 0000	4 Indeks	125000 0000	4 Indeks	130000 0000	4 Indeks	130000 0000	4 Indeks	510000 0000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA UTARA		
		Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	80 %	0 %	0	100 %	157800 00	100 %	165400 00	100 %	171000 00	100 %	146600 00	100 %	640800 00	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA UTARA		
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	100 %	0 %	0	100 %	416500 00	100 %	426700 00	100 %	443725 00	100 %	455300 00	100 %	174222. 500	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA UTARA		
		Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	80 %	0 %	0	100 %	504000 0	100 %	532000 0	100 %	560000 0	100 %	588000 0	100 %	218400 00	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA UTARA		
		Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	80 %	0 %	0	100 %	180000 0	100 %	190000 0	100 %	200000 0	100 %	210000 0	100 %	780000 0	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA UTARA		
		Percentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Utara > 80 %	80 %	0 %	0	100 %	249375 8961	100 %	245775 2647	100 %	271354 5003	100 %	327023 2001	100 %	109352 88612	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA UTARA		
3	11	335	Program Peningkatan Penyelenggara an Kota Administrasi Jakarta Timur		0		882127 8305		803408 2875		840518 9617		909896 5640		343595 16437			

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJWD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur > 80 %	0 %	0	100 %	6.654.15 0.324	100 %	5.68141 1096	100 %	5.871.47 8.231	100 %	6.344.76 3.615	100 %	24.551.8 03.266	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA TIMUR	
		Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	0 %	0	100 %	437934. 524	100 %	481727. 976	100 %	529900. 774	100 %	582890. 851	100 %	2.032.45 4.125	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA TIMUR	
		Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur	100 %	0	100 %	121296. 740	100 %	133426. 414	100 %	146769. 055	100 %	161445. 961	100 %	562.938. 170	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA TIMUR	
		Penyelesaian Sengketa Hukum	0 %	0	100 %	860612 90	100 %	94.6674 19	100 %	104134. 161	100 %	114.547. 577	100 %	399.410. 447	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA TIMUR	
		Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	85.61 Nilai	86.61 Nilai	87.61 Nilai	223.030. 500	88.61 Nilai	245.333. 550	89.61 Nilai	269.866. 905	90.61 Nilai	296.853. 596	90.61 Nilai	1035.08 4.551	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA TIMUR	
		Persentase Capaian Kinerja Walkota (KPI, Perkin dan Lakip)	0 %	0	100 %	516450. 00	100 %	56.8095 00	100 %	62.4904 50	100 %	687394 95	100 %	239.684. 445	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA TIMUR	
		Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	0 %	0	100 %	611500. 00	100 %	677600. 00	100 %	73.2650 00	100 %	79.8750 00	100 %	282.050. 000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA TIMUR	
		Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	0 %	0	100 %	62.4650. 00	100 %	62.4650 00	100 %	62.4650 00	100 %	62.4650 00	100 %	249.860. 000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA TIMUR	
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	0 %	0	100 %	154.497. 000	100 %	154.497. 000	100 %	154.497. 000	100 %	154.497. 000	100 %	617.988. 000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA TIMUR	
		Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	0 %	0	100 %	74.6780 00	100 %	74.6780 00	100 %	74.6780 00	100 %	74.6780 00	100 %	298.712. 000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA TIMUR	
		Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	0 %	0	100 %	25.0000. 00	100 %	25.0000 00	100 %	25.0000 00	100 %	25.0000 00	100 %	100.000. 000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA TIMUR	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	0 Indeks	0	3 Indeks	822.847. 142	3 Indeks	905.131. 856	4 Indeks	995.645. 041	4 Indeks	1.095.20 9545	14 Indeks	3.81883 3.584	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA TIMUR			
		Jumlah Kawasan yang Tertata	0 Kawasan	0	3 Kawasan	465227. 85	2 Kawasan	511750. 64	2 Kawasan	350000. 00	2 Kawasan	380000. 00	9 Kawasan	170697. 849	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA TIMUR			
3	11			0		476.310. 488.231		484.248. 332.065		527.424. 463.716		573.442. 365.866		2.06142 564987 8				
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur	0 Indeks	0 Indeks	3 Indeks	441.310. 488.231	3 Indeks	481.248. 332.065	3 Indeks	523.424. 463.716	3 Indeks	568.442. 365.866	3 Indeks	2.01442 564987 8	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA TIMUR			
		Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	51 Gedung	0 Gedung	66 Gedung	350000. 00000	69 Gedung	300000. 0000	72 Gedung	400000. 0000	75 Gedung	500000. 0000	75 Gedung	470000. 00000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA TIMUR			
3	11			0		6.052.19 4.740		6.591.42 5.160		6.939.94 4.594		7.376.54 2.908		26.9601 07.402				
		Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	0 %	0 %	100 %	229.954. 000	100 %	252.949. 400	100 %	278.244. 340	100 %	306.068. 774	100 %	1.067.21 6.514	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA BARAT			
		Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	0 %	0 %	20 %	75.000.0 00	40 %	80000.0 00	60 %	80000.0 00	80 %	100000. 000	80 %	335000. 000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA BARAT			
		Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	0 %	0 %	100 %	28.512.0 00	100 %	31.363.2 00	100 %	34.499.5 20	100 %	37.949.4 72	100 %	132.324. 192	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA BARAT			
		Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	0 Nilai	0	94 Nilai	97.988.0 00	95 Nilai	107.820. 800	96 Nilai	118.660. 000	97 Nilai	130.560. 000	97 Nilai	455028. 800	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA BARAT			
		Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	0 %	0 %	100 %	63.825.9 60	100 %	63.825.9 60	100 %	63.825.9 60	100 %	63.826.6 40	100 %	255.304. 520	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA BARAT			

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja ('Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				0 %	0	100 %	50.000.000	100 %	60.000.000	100 %	75.000.000	100 %	225.000.000	100 %	410.000.000		
		Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	0 %	0	100 %	50.000.000	100 %	60.000.000	100 %	75.000.000	100 %	410.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT				
		Jumlah Kawasan yang Tertata	0 Kawasan	0	1 Kawasan	25116.000	1 Kawasan	28883.400	1 Kawasan	33215.910	1 Kawasan	38198.297	4 Kawasan	125.413.607	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	0 indeks	0	4 Indeks	872.260.000	4 Indeks	889705.000	4 Indeks	907500.000	4 Indeks	925650.000	4 indeks	3595.115.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		
		Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat	0 %	0	100 %	44850.000	100 %	51577.500	100 %	59313.625	100 %	68211.244	100 %	223952.369	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	0 %	0	100 %	75.000.000	100 %	78000.000	100 %	82.000.000	100 %	85.000.000	100 %	320.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		
		Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak	0 %	0	100 %	44.850.000	100 %	51577.500	100 %	60.323.625	100 %	68.211.244	100 %	224.962.369	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		
		Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	0 %	0	100 %	7680.0000	100 %	7680.0000	100 %	10.240.000	100 %	10.240.000	100 %	35.840.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		
		Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta	0 %	0	85 %	4.437.158.780	86 %	4.888.042.400	87 %	5.137.121.614	88 %	5.317.627.237	88 %	19.779.500.031	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		
3	19	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat		0		442.619.141.613		650.529.884.097		781.088.849.324		980.595.504.119		2.854.833.379.153			
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi	0 indeks	0	4 indeks	438.869.141.613	4 indeks	570.529.884.097	4 indeks	741.688.849.324	4 indeks	964.195.504.119	4 indeks	2.715.283.379.153	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		
		Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	51 gedung	0 gedung	53 gedung	2.500.000.000	64 gedung	20.000.000.000	72 gedung	37.500.000.000	76 gedung	16.400.000.000	76 gedung	76.400.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
3	11	352	Program peningkatan penyelengaraa n Kota Administrasi Jakarta Selatan	6 gedung	0	0	1250.000.000	6 gedung	60.000.000	11 gedung	1900.000.000	11 gedung	0	11 gedung	63150.000.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		
					0	0	5448.369.312		5.891.073.996		6185.387.830		6664.488.859		24189.319.997			
			0 %	0 %	0	100 %	130700.000	100 %	131700.000	100 %	132700.000	100 %	133700.000	100 %	528800.000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		
			0 %	0 %	0	100 %	402.036.377	100 %	442.240.014	100 %	486.464.033	100 %	535.110.416	100 %	186585.0840	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		
			0 %	0 %	0	100 %	49.333.000	100 %	54.266.300	100 %	59.692.870	100 %	65.662.357	100 %	228.954.527	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		
			81 Nilai	0 Nilai	0	83 Nilai	237044.000	83 Nilai	260748.400	84 Nilai	268085.060	84 Nilai	294890.966	84 Nilai	106076.8426	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		
			99 %	0 %	0	100 %	10260.000	100 %	11286.000	100 %	12414.600	100 %	13.656.060	100 %	476166.60	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		
			0 %	0 %	0	100 %	10400.000	100 %	11440.000	100 %	12584.000	100 %	13.842.400	100 %	48266.400	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		
			0 Kawasan	0 Kawasan	0	3 Kawasan	34.380.000	3 Kawasan	37.818.000	3 Kawasan	41.599.800	3 Kawasan	45.759.780	3 Kawasan	159557.580	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		
			0 Indeks	0 Indeks	0	4 Indeks	723355.600	4 Indeks	795.691.160	4 Indeks	875.260.276	4 Indeks	962788.297	4 Indeks	3.357.095.333	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		
			0 %	0 %	0	100 %	49.375.000	100 %	54.312.500	100 %	59.743.750	100 %	65.718.250	100 %	229149.375	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	0 %	0	100 %	720000 0	100 %	800000 0	100 %	880000 0	100 %	960000 0	100 %	336000 00	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA SELATAN	
		Koordinasi Pelaksanaan Kota Kota Layak Anak	0 %	0	100 %	317500 00	100 %	351450 00	100 %	386595 00	100 %	425254 50	100 %	148079 950	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA SELATAN	
		Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	0 %	0	100 %	325000 00	100 %	357500 00	100 %	393250 00	100 %	432575 00	100 %	150832 500	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA SELATAN	
		Persentase Tertaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 80 %	0 %	0	100 %	373003 5335	100 %	401267 6622	100 %	415005 8941	100 %	443797 7508	100 %	163307 48406	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA SELATAN	
3	11	Program Peningkatan Pengembang an Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan		0		451558 814569		501003 696024		555958 810418		604949 691460	211347 101247 1			
	19		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0 Indeks	0	3 Indeks	418048 814569	4 Indeks	459853 696024	4 Indeks	512408 810418	4 Indeks	563649 691460	4 Indeks 101247 1	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA SELATAN	
		Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	99 Gedung	0	105 Gedun g	312500 00000	113 Gedun g	399500 00000	121 Gedun g	408500 00000	130 Gedun g	403000 00000	130 Gedun g	152350 000000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA SELATAN	
		Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	15 Gedung	0	16 Gedun g	226000 0000	17 Gedun g	120000 0000	19 Gedun g	270000 0000	20 Gedun g	100000 0000	20 Gedun g	716000 0000	KOTA ADMINISTRA SI JAKARTA SELATAN	

Kode		Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
3	11	369	Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan kota administrasi jakarta timur	0 %		636.749.607.796	0	0	0	0	0	0	0	636.749.607.796	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR				
		100 %			0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	100 %	636.749.607.796						
3	11	379	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0 %		556.060.723.223	0	0	0	0	0	0	0	556.060.723.223	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN				
		100 %			0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	100 %	556.060.723.223						
3	11	380	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara	0 %		422.741.820.708	0	0	0	0	0	0	0	422.741.820.708	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA				
		100 %			0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	100 %	422.741.820.708						
3	11	381	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	0 %		389.087.909.203	0	0	0	0	0	0	0	389.087.909.203	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT				
		90 %			0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	90 %	389.087.909.203						
3	11	384	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0 %		58.643.076.685	0	0	0	0	0	0	0	58.643.076.685	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU				
		80 %			0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0 %	58.643.076.685						

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
3	11	387	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	80 %	520.312.310.046	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	520.312.310.046	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT			
3	11	388	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	815 indeks	0	87 indeks	109.490.776.000	88,5 indeks	122.303.276.000	90 indeks	133.590.026.000	91,5 indeks	145.951.651.000	511.335.729.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
3	11	19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	74 persen	0	100 persen	53.832.000.000	100 persen	15.332.000.000	100 persen	34.332.000.000	100 persen	15.332.000.000	118.828.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
3	11	232	Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah	99 %	82.258934.774	100 %	97.146628.679	100 %	97.610906.868	100 %	97.988498.938	100 %	103.038.421.417	478.043.390.676	BADAN PENGELOLA ASET DAERAH			
				99 %	79.109.339.721	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	79.109.339.721	BADAN PENGELOLA ASET DAERAH			
				95 %	2.178.182.053	99 %	1.692.301.392	99 %	1.725.562.678	99 %	1.923.118.8946	99 %	1.885.430.840	9.404.595.909	BADAN PENGELOLA ASET DAERAH			

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Jumlah SKPD tertib pengelolaan aset daerah	720 SKPD/ UKPD	540613. 000	720 SKPD/ UKPD	721563. 000	720 SKPD/ UKPD	540613. 000	720 SKPD/ UKPD	540613. 000	720 SKPD/ UKPD	540613. 000	720 SKPD/ UKPD	720 SKPD/ UKPD	2884.01 5000	BADAN PENGELOLA ASET DAERAH	
		Persentase penyelesaian temuan audit terkait aset	0 %	430800. 000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	100 %	430800. 000	BADAN PENGELOLA ASET DAERAH	
3	11	233				0		171400. 000		171400. 000		171400. 000			685600. 000		
		Jumlah penerimaan hasil aset daerah yang dikerjasamakan	27 PKS	895000. 00	30 PKS	0	30 PKS	895000. 00	30 PKS	895000. 00	30 PKS	895000. 00	150 PKS	358000. 000		BADAN PENGELOLA ASET DAERAH	
		Jumlah piutang atas aset daerah yang dikerjasamakan	10 PKS	819000. 00	10 PKS	0	10 PKS	819000. 00	10 PKS	819000. 00	10 PKS	819000. 00	50 PKS	327600. 000		BADAN PENGELOLA ASET DAERAH	
3	11	234				108736. 588145	118822. 503527		118822. 503527	117942. 503527		117220. 097527			581544. 196253		
		Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	35359 Triliun Rupiah	108736. 588145	46155 Triliun Rupiah	118822. 503527	5048 Triliun Rupiah	118822. 503527	5543 Triliun Rupiah	117942. 503527	6163 Triliun Rupiah	117220. 097527	6163 Triliun Rupiah	6163 Triliun Rupiah	581544. 196253	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
3	11	235				0	100000. 000		100000. 000	100000. 000		100000. 000			400000. 000		
		Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	680152 Miliar Rupiah	0	70476 5 Miliar Rupiah	100000. 000	71545 3 Miliar Rupiah	100000. 000	73377 Miliar Rupiah	100000. 000	74982 9 Miliar Rupiah	100000. 000	74982 9 Miliar Rupiah	74982 9 Miliar Rupiah	400000. 000	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
3	11	236				166612 84944	204217 79000		166590 57900	15375.5 35840		158634 40289			849810 97973		
		Opini Laporan Keuangan Daerah	2 Nilai	6082.89 1100	0 Nilai	0	0 Nilai	0	0 Nilai	0	0 Nilai	0	3 Nilai	6.082.89 1100		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		Jumlah Modul Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	0 Modul	102461 03844	0 Modul	0	0 Modul	0	0 Modul	0	0 Modul	0	11 Modul	102461 03844		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
		Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP dan tepat waktu	0 %	332.290. 000	100 %	17064.5 19000	100 %	134320 70900	100 %	12012.2 77990	100 %	12099.5 05789	100 %	549406 63679		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		0 %	100 %	0	100 %	3.357.26 0.000	100 %	3.226.98 7.000	100 %	3.363.25 7.850	100 %	3.763.93 4.500	100 %	13.711.4 39.350	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			
3	11	237			2.160.53 1.133	4.982.06 7.080		4.396.19 6.080		4.379.54 6.080		4.379.54 6.080		202978 86.453				
			80 %	85 %	2.160.53 1.133	3.773.85 7.080	87,5 %	90 %	3.187.98 6.080	92,5 %	3.187.98 6.080	95 %	3.187.98 6.080	95 %	15.498.3 46.453	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/ JA SA		
			90 %	0 %	0	1.208.21 0.000	95 %	96 %	1.208.21 0.000	97 %	1.191.56 0.000	98 %	1.191.56 0.000	98 %	4.799.54 0.000	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/ JA SA		
3	11	312			19.093.6 58.635			31.962.5 27.112		41.551.2 85.246		54.016.6 70.819		169.204. 778.200				
			69 %	0 %	0	22.535.6 36.388	79 %	84 %	31.905.4 89.612	89 %	41.477.1 36.496	94 %	53.920.2 77.444	94 %	149.838 539.940	INSPEKTOR AT		
			65 %	70 %	33.750.0 00	45.000.0 00	75 %	80 %	57.037.5 00	85 %	74.148.7 50	90 %	96.393.3 75	90 %	306.329 625	INSPEKTOR AT		
			69 %	74 %	19.059.9 08.635	0	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	74 %	19.059.9 08.635	INSPEKTOR AT		
3	11	19																
3	11	19			0	2.142.39 7.500			590.550. 000		531.917. 125		594.761 819		3.859.62 6.444	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI		
			63,75 (Skala 1 - 100)	0 (Skala 1 - 100)	0	2.142.39 7.500	73 (Skala 1 - 100)	78 (Skala 1 - 100)	590.550. 000	85 (Skala 1 - 100)	531.917. 125	91 (Skala 1 - 100)	594.761 819	91 (Skala 1 - 100)	3.859.62 6.444			

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	11	307			199.350. 000	518.310. 000	673.803. 000	875.803. 000	1138.54 3.900	3.405.80 9900						
			99 %	100 %	199.350. 000	518.310. 000	100 %	673.803. 000	100 %	875.803. 000	100 %	1138.54 3.900	100 %	3.405.80 9900		BIRO HUKUM
3	11	308			3532.22 4.169	4723.78 4.753	6107.79 5.178	7906.03 3.732	10242.7 68.852	32.512.6 06.684						
			70 %	0 %	0	3010.73 1623	85 %	3913.95 1.109	90 %	5.088.13 6.442	100 %	6.614.57 7.375	100 %	18.627.3 96.549		BIRO HUKUM
			70 %	0 %	0	67288.0 00	85 %	87.474.4 00	90 %	113.716 720	100 %	147.831 736	100 %	416.310. 856		BIRO HUKUM
			56 %	0 %	0	1645.76 5.130	88 %	2.106.36 9.669	94 %	2.704.18 0.570	100 %	3.480.35 9.741	100 %	9.936.67 5.110		BIRO HUKUM
			70 %	80 %	2.359.52 0.223	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	80 %	2.359.52 0.223		BIRO HUKUM
			56 %	64 %	1172.70 3.946	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	64 %	1172.70 3.946		BIRO HUKUM
3	11	389			533.109. 500	0	0	0	0	533.109. 500						
			63,75 (Skala 1 - 100)	68 (Skala 1 - 100)	410.804. 500	0 (Skala 1 - 100)	0 (Skala 1 - 100)	0 (Skala 1 - 100)	0 (Skala 1 - 100)	0 (Skala 1 - 100)	0 (Skala 1 - 100)	0 (Skala 1 - 100)	68 (Skala 1 - 100)	410.804. 500		BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
			0 (Skala 1 - 4)	80 (Skala 1 - 4)	122.305. 000	0 (Skala 1 - 4)	0 (Skala 1 - 4)	0 (Skala 1 - 4)	0 (Skala 1 - 4)	0 (Skala 1 - 4)	0 (Skala 1 - 4)	0 (Skala 1 - 4)	80 (Skala 1 - 4)	122.305. 000		BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target		Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
3	11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Indeks E Gov	90 %	0 %	98 %	111.131. 783.991	99 %	123.159. 922.158	99 %	135.163. 835.583	99 %	147.834. 429.930	99 %	517.289. 971.662	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A DAN STATISTIK		
3	20				150.970. 303.586	272.014. 030.445	305.201. 531.020	327.002. 086.438	351.534. 975.089	1.406.72 2.926.578								
4	12	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.	28 sistem informasi	95 %	95 %	141.472. 053.235	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	95 %	141.472. 053.235	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A DAN STATISTIK		
					0 %	96 %	178.730 06.753	96 %	15.477.5 38.693	97 %	13.606.4 22.550	97 %	12.191.6 91.832	97 %	591.486 59.828		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A DAN STATISTIK	
					0 %	99 %	100.187 895.474	99 %	142.343. 126.652	99 %	153.246. 519.542	99 %	165.356. 761.174	99 %	561.134. 302.842			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A DAN STATISTIK
					0 %	100 %	3.120.28 3.066	100 %	618.285. 000	100 %	497.857. 122	100 %	343.285. 000	100 %	457.971 0.188			
4	12	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.	28 sistem informasi	38	48	39.701.0 61.161	58	23.602.6 58.517	68	24.487.4 51.641	78	25.808.8 07.153	78	123.098. 228.823	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK A DAN STATISTIK		
					9.498.25 0.351	sistem informasi	38	sistem informasi	58	sistem informasi	68	sistem informasi	78	sistem informasi	78		sistem informasi	
					0.351	sistem informasi	61.161	sistem informasi	58.517	sistem informasi	51.641	sistem informasi	07.153	sistem informasi	228.823		sistem informasi	
					0.351	sistem informasi	61.161	sistem informasi	58.517	sistem informasi	51.641	sistem informasi	07.153	sistem informasi	228.823		sistem informasi	

RPJMD PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 2017-2022

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
4	12	21	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup														
4	12	21	245	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		103.774.305.307		30565259077		41601770227		44477915124		36617661999		257036911734		DINAS LINGKUNGA N HIDUP
				Penurunan Tingkat Pencemaran Air	33,65 indeks	3455 indeks	33553878260	0 indeks	0	0 indeks	0	0 indeks	0	0 indeks	0	33553878260	0 indeks	DINAS LINGKUNGA N HIDUP
				Penurunan Tingkat Pencemaran Udara	40,23 indeks	4043 indeks	27857301482	0 indeks	0	0 indeks	0	0 indeks	0	0 indeks	0	27857301482	0 indeks	DINAS LINGKUNGA N HIDUP
				Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	0 %	10 %	7138414583	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	7138414583	0 %	DINAS LINGKUNGA N HIDUP
				Presentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	30 %	40 %	35224710982	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	35224710982	0 %	DINAS LINGKUNGA N HIDUP
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	36,77 indeks	0 indeks		30565259077	3751 indeks	41601770227	3789 indeks	44477915124	3827 indeks	36617661999	3827 indeks	153262606427		DINAS LINGKUNGA N HIDUP
4	12	21	246	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan		0	0	9598843488		10190229165		10893964316		11957238524		42640275493		DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
				Jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	98 Pelangaran	0 Pelangaran	78 Pelangaran	914565727	73 Pelangaran	1009023936	68 Pelangaran	1191953775	65 Pelangaran	1298377969	65 Pelangaran	4413921407		DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
				Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	140,9 Ha.	0 Ha.	141,9 Ha.	8684277761	142,4 Ha.	9181205229	142,9 Ha.	9702010541	143,4 Ha.	10658860555	143,4 Ha.	38226354086		DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Kode		Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp										
4	12	21	247	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan					0		0		0		0	6.471,29 8.134			585.300. 319	83 Pelang garan				DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
				jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	98 Pelanggar an	83 Pelang garan	0 Pelang garan	0 Pelang garan	0	0	0	0 Pelang garan	0	0	0	0	585.300. 319	83 Pelang garan						DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
				luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang berhasil direhabilitasi	140,9 Ha.	141,4 Ha.	0 Ha.	0	0	0	0	0 Ha.	0	0 Ha.	0	0	5.885.99 7.815	141,4 Ha.			5.885.99 7.815	141,4 Ha.				DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
4	12	22		Penambahan Rasio RTH																						
				Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)																						
4	12	22	250	Program Pengelolaan Hutan			354.032. 172.948	551.323. 939.972	655.202. 251.181		780.653. 068.801		929.816. 278.512		3.271.02 7.711.41 4											
				Penambahan Rasio RTH Hutan	0,024 %	0,0085 %	0,0115 %	0,0115 %	0,0115 %	0,0115 %	0,0115 %	0,0115 %	0,0115 %	0,0115 %	0,0785 %	3.043.67 7.478.03 3	DINAS KEHUTANA N									
				Persentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara	93 %	95 %	90.7186 94.915	30.823.9 39.972	32.602.2 51.181	96 %	97 %	35.533.0 68.801	97 %	37.672.2 78.512	97 %	227.350. 233.381	DINAS KEHUTANA N									
4	12	22	251	Program Pengelolaan Pertamanan			1.483.77 4.306.27 5	1.181.58 3.367.85 3	1.380.94 6.728.37 4		1.615.94 4.820.89 4		1.894.13 6.996.21 1		7.556.38 6.219.60 7											
				Penambahan Rasio RTH Taman	0,139 %	0,044 %	1.345.71 5.859.73 8	962.555. 000.000 %	1.129.42 7.750.00 0	0,019 %	0,019 %	1.340.81 913.750 0	0,019 %	1.593.43 0.094.37 5	0,259 %	636.194 7.841.61 3	DINAS KEHUTANA N									
				Persentase lokasi RTH Taman yang terpelihara	99 %	99 %	138.058. 446.537	229.028. 367.853	251.518. 978.374	99 %	99 %	275.125. 683.394	99 %	300.706. 901.836	99 %	119.443 8.377.99 4	DINAS KEHUTANA N									
4	12	22	252	Program Pengelolaan Pemakaman			418.833. 985.766	302.503. 267.554	342.348. 390.036		388.960. 582.734		443.627. 574.768		1.896.27 3.800.85 8											
				Penambahan Rasio RTH Makam	0,013 %	0,014 %	418.833. 985.766	159.787. 932.421	188.845. 271.090	0,0046 %	0,0046 %	223.703. 670.428	0,0046 %	265.523. 297.817	0,0454 %	1.256.69 4.157.52 2	DINAS KEHUTANA N									

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target		Rp	Target	Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
5	13	255	Program Penelitian dan Pengembangan		471968,491	2299951742	3014575221	3171287530	3060539549	12,018322,533	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
			0 % persentase penyelenggaraan analisis hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan	25 % 471968,491	0 % 0	0 % 0	0 % 0	0 % 0	0 % 0	25 % 471968,491								
			0 Inovasi Jumlah inovasi yang dapat diimplementasikan	0 Inovasi	0 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	11,546354,042	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
5	14		Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras															
5	14	26	Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya															
5	14	26	Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		41057638458	45620753399	50182828728	55201111586	60721222760	252,783,554,931	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
			Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat	0 Persen	20 Persen	20 Persen	20 Persen	20 Persen	20 Persen	100 Persen	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
			Jumlah Konflik Sosial	41 kejadian konflik	16,447,739,976	185,49865,064	20,404,851,561	22,445,336,712	24,689,870,393	102,537,663,706	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
5	15	Mengembangk an kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia																
5	15	27	Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional															
5	15	27	258	Program Pembinaan dan Pengembang an Industri Pariwisata	87,5 %	963.153. 430	95 %	1.147.45 1.993	97 %	1.262.19 7.192	99 %	1.388.41 6.912	100 %	1.527.25 8.603	100 %	6.288.47 8.130		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				Persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat	49,07 %	4.735.67 9.500	75 %	6.276.45 7.640	85 %	6.781.83 8.934	95 %	7.337.66 2.789	100 %	7.954.98 5.224	100 %	33.086.6 24.087		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
				Jumlah E-tourism	0	0	1500000 pengun- jung halaman website	1.351.38 3.409	2250000 pengunj ng halaman website	1.486.52 1.750	3000000 pengun- jung halaman website	1.635.17 3.925	3375000 pengunj ng halaman website	1.798.69 1.317	101250 00 0.401 pengun- jung halaman website	6.271.77 0.401		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5	15	27	259	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata		535.082. 000		0		0		0		0		535.082. 000		

Kode	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Jumlah usaha pariwisata hiburan	0 Industri	1669 Industri	535.082. 000	0 Industri	0	0 Industri	0	0 Industri	0	0 Industri	0	1669 Industri	535.082. 000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
5	15				57465.3 23.462	65540.6 74.966	95290.6 74.966								348878. 023.326		
		Jumlah Wisatawan Mancanegara	2600000 orang	2800000 orang	36.984.8 33.309	2940000 orang	36.984.8 33.309	3087000 orang	36.984.8 33.309	3241350 orang	36.984.8 33.309	3403417 orang	36.984.8 33.309	15471767 orang	184.924. 166.545	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah Wisatawan Nusantara	330000000 orang	360000 00 orang	20480.4 90.153	385200 00 orang	28305.8 41.657	404960 00 orang	28305.8 41.657	442980 00 orang	28305.8 41.657	501720 00 orang	28305.8 41.657	209486 000 orang	133.703. 856.781	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N	
		Jumlah Objek Wisata Baru	0 Objek wisata	2 Objek wisata	0	3 Objek wisata	250.000. 000	3 Objek wisata	300.000. 00.000	3 Objek wisata	0	2 Objek wisata	0	13 Objek wisata	30.250.0 00.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N	
5	28	Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru / kreatif dan inovatif															
5	15				73.355.0 73.475		70.841.9 84.945		76.166.5 33.310		81.698.5 36.510		88.020.7 40.031		390.082 868.271		
		Jumlah Pelaku Seni Budaya yang dilatih	6760 orang	8040 orang	20.751.7 21.581	10080 orang	22.898.0 68.604	10830 orang	24.727.8 75.465	11250 orang	26.760.6 63.010	11770 orang	29.016.7 29.311	51970 orang	124.155. 057.971	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N	



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagian dengan dilandasi semangat gotong-royong.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, terdiri atas 5 (lima) Kota Administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur serta 1 (satu) Kabupaten Administrasi yakni Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat Provinsi. Sebagai implikasinya, maka pengelolaan keuangan Daerah berada pada tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada dasarnya struktur keuangan pemerintah daerah hampir sama dengan struktur keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Adapun Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, komponen Belanja terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Sedangkan, Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan dan Pengeluaran.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (*gap*) antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam perkembangannya, Pembiayaan Daerah dimanfaatkan pula untuk menjalankan proyek penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD, utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, terkait sumber dari sisi penerimaan adalah dapat berasal dari SiLPA dari tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang diantaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo serta pemberian pinjaman Daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal daerah. Adapun skala prioritas program/kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pada pelayanan publik, mampu memberikan manfaat lebih serta peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah penyelesaian pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat.

Jakarta merupakan 'rumah' lebih dari 10 juta penduduk pada malam hari dan 'mengakomodir' tambahan sekitar 3 juta orang penglaju/*commuter* dari daerah sekitar yang bekerja dan beraktifitas di Kota Jakarta pada siang hari.

Sebagai pusat pemerintahan, bisnis, politik, dan budaya, Jakarta adalah kantor pusat bagi BUMN, perusahaan swasta nasional maupun perusahaan multinasional. Jakarta juga menjadi tuan rumah untuk berbagai organisasi internasional seperti kantor Sekretariat ASEAN, Duta Besar dan perwakilan negara lain.

Selain itu, Jakarta merupakan pusat aktivitas ekonomi dan keuangan nasional maupun internasional di mana banyak Investasi Asing/*Foreign Direct Investment* (FDI) di berbagai sektor yang diinvestasikan di Jakarta, seperti sektor transportasi, pergudangan, telekomunikasi, pertambangan, listrik, gas dan air, perumahan, industri dan perkantoran, makanan dan industri lainnya.

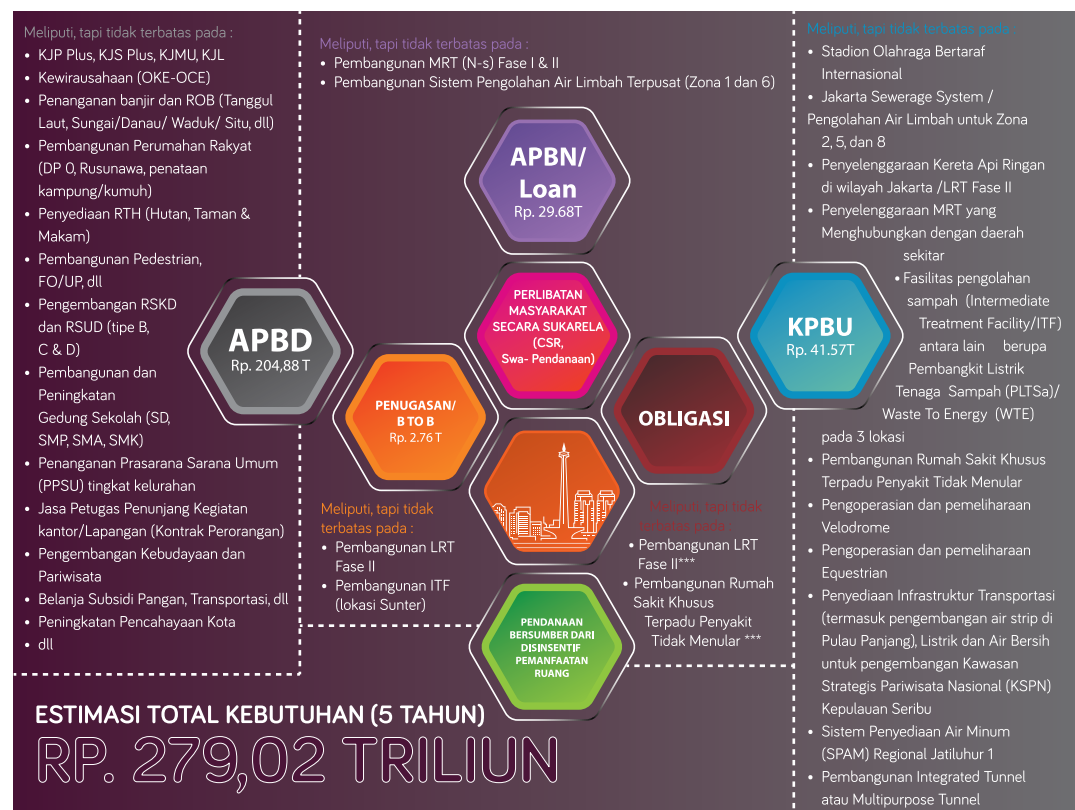
Sebagai konsekuensi logis atas fakta tersebut diatas serta dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai Kota yang layak, nyaman dan berkelanjutan untuk dihuni bagi semua, maka penyiapan berbagai infrastruktur strategis maupun pendukung seperti transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, pengolahan sampah dan air limbah, serta pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan perumahan rakyat dan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Secara empiris dari tren realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta 5 tahun terakhir (2012-2017) menunjukkan kemampuan Pemerintah DKI Jakarta dalam mengalokasikan belanja modal khususnya dalam penyediaan infrastruktur semakin

terbatas, seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan publik lainnya. Untuk itu pada masa 5 tahun ke depan, yakni pada periode RPJMD 2017-2022, kebijakan sumber pendanaan perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Penerbitan Obligasi Daerah, Pinjaman Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) / *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan. Secara skematis berbagai kerangka pendanaan yang dapat diimplementasikan pada kurun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar 7.1.

Gambar 7.1

Kerangka Pendanaan yang Dapat Diimplementasikan pada Kurun 2017-2022



Adapun penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut:

7.1.1 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber antara lain dari Kreditor Multilateral; Kreditor Bilateral; Kreditor Swasta Asing; dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Di samping itu, pengajuan Pinjaman Luar Negeri harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan pinjaman secara langsung kepada pihak luar negeri. Namun demikian, Pemerintah dapat melakukan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

Adapun syarat untuk mendapatkan Pinjaman Daerah antara lain :

- a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- c. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman.

Adapun seluruh penerimaan maupun pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali memanfaatkan skema Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ini, diantaranya untuk proyek *Jakarta Emerge Dredging Initiative* (JEDI) dengan pendanaan World Bank dan *Mass Rapid Transit* (MRT) Koridor Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) dengan pendanaan JICA.

Pembangunan MRT Jakarta Fase I dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI pendanaannya berasal dari pinjaman Pemerintah Jepang (JICA) dengan pengaturan komposisi berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Untuk Membiayai Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahap I (Lebak Bulus – Bundaran HI), sebesar 51 persen ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*on-lending*) dan 49 persen ditanggung oleh Pemerintah yang selanjutnya dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*on-granting*).

Pada periode 2017-2022, untuk menuntaskan penyelesaian MRT koridor Selatan-Utara hingga Kampung Bandan, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara – Selatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-

sama Pemerintah telah menyepakati komposisi pembiayaan sebagaimana telah diterapkan pada pola pembiayaan MRT Selatan-Utara Fase I, dengan komposisi pendanaan 51 persen ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*on-lending*) dan 49 persen ditanggung oleh Pemerintah yang selanjutnya dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*on-granting*). Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mendapatkan hibah APBN yang berasal dari pinjaman luar negeri untuk pembangunan *Jakarta Sewerage System* (JSS) Zona 1.

i. *Mass Rapid Transit* (MRT) Koridor Selatan-Utara Fase II (Bundaran HI-Kampung Bandan)

Sehubungan dengan akan dilanjutkannya pembangunan MRT Fase I dengan pembangunan MRT Fase II, proyeksi besaran biaya total pembangunan MRT Fase II dan tambahan biaya penyelesaian MRT Fase I adalah sebesar USD 1.869.000.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta Dolar Amerika) atau setara dengan JPY 217.590.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh juta Yen Jepang), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya konstruksi MRT Bundaran HI – Kampung Bandan, dengan Depo di Kampung Bandan yaitu sebesar USD 1.678.000.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta Dolar Amerika) atau setara dengan Rp.22.545.608.000.000,- (dua puluh dua triliun lima ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan juta rupiah); dan
- b. Kekurangan pembiayaan atas perubahan pekerjaan dan pekerjaan tambah dalam pembangunan MRT Jakarta sebesar USD 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta Dolar Amerika) atau setara dengan Rp 2,56 triliun.

(Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) atas Pembangunan Sistem MRT Fase I Dalam Rangka Pembiayaan *Variation Order* (VO), *Price Adjustment* (PA) dan Klaim pada tahun 2015, BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan perhitungan PT. MRT)

Besaran biaya dimaksud telah teregistrasi dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah 2015-2019 (*Blue Book*) dan telah mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Pembiayaan Pembangunan Proyek MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara (Koridor Lebak Bulus – Kampung Bandan) serta pertimbangan Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor 979/4695/SJ tanggal 6 Oktober 2017. (untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan).

Proses pembahasan untuk mendapatkan pembiayaan pembangunan MRT Jakarta Fase II akan terus digulirkan bersama-sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan beberapa Kementerian terkait, diantaranya Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Keseluruhan rangkaian pembahasan dengan pihak donor dalam hal ini Pemerintah Jepang melalui JICA, diharapkan dapat dituntaskan serta ditandatangani Perjanjian Pinjaman pada pertengahan Tahun 2018. Diharapkan, bila proses penandatanganan Perjanjian pinjaman dapat dilaksanakan sesuai target, maka konstruksi pembangunan MRT Koridor Selatan-Utara dapat dimulai pada tahun 2019.

Selain Koridor Selatan – Utara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya akan membangun pula Koridor Timur – Barat sepanjang 87 km yang akan melintasi Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat yang sampai dengan saat ini baru pada tahap *preliminary study* mengenai rute. Diharapkan pada periode 5 tahun kedepan, pembahasan pinjaman dan penyusunan *engineering design* dapat dimulai dan dituntaskan.

ii. ***Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1 dan Zona 6***

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama beberapa tahun ini telah memulai serangkaian kegiatan untuk merintis pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Provinsi DKI Jakarta. Ada 14 zona yang akan dibangun, dan hingga saat ini telah ada 2 zona yang dibahas bersama Pemerintah Pusat yaitu Zona 1 dan Zona 6.

Total nilai investasi untuk pembangunan Zona 1 sebesar 8,1 Triliun Rupiah (berdasarkan hasil studi JICA *Metropolitan Priority Area/MPA* Tahun 2015) dengan rincian: Pembangunan IPAL 2,6 Triliun Rupiah; Pembangunan Jaringan Perpipaan 2,8 Triliun Rupiah; dan Pembangunan Sambungan Rumah (SR) sebesar 2,7 Triliun Rupiah.

Sebagaimana tertuang pada Surat Deputi Koordinasi Percepatan Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Kemenko Bidang Perekonomian, Nomor S-5/D.VI.M.EKON. KPPIP/02/2016 tanggal 16 Februari 2016, dinyatakan bahwa pendanaan Zona 1 akan menggunakan skema pendanaan bersama APBN dan APBD dengan pembagian sebagai berikut:

- a. IPAL, *Main Trunk*, Sambungan Rumah pada Daerah percontohan oleh Pemerintah Pusat melalui pinjaman luar negeri; dan
- b. *Sub trunk* dan Sambungan Rumah di luar daerah percontohan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk konstruksi Zona 1, direncanakan dimulai pada Triwulan ke-3 Tahun 2019. Konstruksi tersebut akan selesai sampai dengan sambungan rumah pada Juni Tahun 2024.

Adapun untuk pembangunan *Jakarta Sewerage Development Project* Zona 6 nilai investasi yang dibutuhkan berdasarkan studi yang dilakukan oleh INDII – Mott MacDonald yang bekerjasama dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebesar Rp.8,7 Triliun.

Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 terbagi menjadi 4 fase karena tingginya biaya dan periode konstruksi, dimana keseluruhan fase (fase 1, 2, 3 dan 4) disebut Fase *Ultimate*. Untuk Fase 1 *Jakarta Sewerage* Zona 6 telah disusun Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) pada Tahun 2013 yang dilengkapi dengan *Supplemental Study* pada Tahun 2017. Studi Kelayakan (FS) untuk fase 2, 3 dan 4 akan disusun pada kontrak 1 *Jakarta Sewerage* Zona 6 Fase 1.

Direncanakan porsi pembiayaan kegiatan *Jakarta Sewerage Development Project* Zona 6 Fase 1 berasal dari APBN (*loan*) 78,3 persen dan APBD 21,7 persen dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.1

Porsi Pembiayaan Kegiatan
Jakarta Sewerage
Development Project Zona 6
Fase 1

No.	Sumber Dana	Biaya (juta Yen)	Persentase
1.	APBN (Loan)	30,978	78,3%
2.	APBD	8,578	21,7%
Total		39,556	100%

7.1.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Pembiayaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian resiko antara para pihak. Penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur strategis dalam 5 tahun kedepan, diantaranya bertujuan untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, tepat sasaran dan tepat waktu sekaligus sebagai salah satu strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan.

Skema KPBU dapat dilakukan dengan prakarsa dari Pemerintah (*solicited*) maupun prakarsa dari Badan Usaha (*unsolicited*) dengan masing-masing keunggulan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Adapun lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU mencakup sebagian atau seluruh proses kegiatan KPBU, seperti membiayai, merancang, membangun, merehabilitasi, mengoperasikan, memelihara, dan lainnya.

Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur antara lain :

- a. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
- b. Termasuk ke dalam 19 jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
- c. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (*Value for Money*) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang.

Dalam 5 tahun ke depan, kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU akan difokuskan pada percepatan pengimplementasian kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek

Prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.

Beberapa kegiatan yang masuk kategori sebagaimana disebut di atas dan berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha, di antaranya meliputi, dan tidak terbatas pada :

- a. Stadion Olahraga Bertaraf Internasional
- b. Jakarta *Sewerage System*/Pengolahan Air Limbah untuk Zona 2, 4, 5 dan 8
- c. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di wilayah Jakarta/LRT Fase II
- d. Penyelenggaraan MRT yang menghubungkan dengan daerah sekitar
- e. Fasilitas pengolahan sampah (*Intermediate Treatment Facility*/ITF) antara lain berupa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT_{Sa})/ *Waste To Energy* (WTE) pada 3 lokasi
- f. Pembangunan Rumah Sakit Khusus Terpadu Penyakit Tidak Menular
- g. Pengoperasian dan pemeliharaan Velodrome
- h. Pengoperasian dan pemeliharaan Equestrian
- i. Penyediaan Infrastruktur Transportasi (termasuk pengembangan air strip di Pulau Panjang), Listrik dan Air Bersih untuk pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu
- j. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur 1
- k. Pembangunan Integrated Tunnel atau Multipurpose Tunnel

Untuk mengimplementasikan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya, perlu disiapkan kelembagaan, pengorganisasian dan penguatan pelaksanaan skema KPBU yang efektif dan fleksibel serta mampu berperan dalam mengakselerasi pengimplementasiannya baik pada tataran Sekretariat Pengelolaan KPBU, Simpul KPBU, Tim KPBU maupun Panitia Pengadaan.

Untuk pengoptimalan pengimplementasian skema KPBU di Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan penguatan sinergi dan kapasitas para pihak yang terkait, tidak hanya sebatas pada kelembagaan KPBU yang ada, namun juga seluruh jajaran SKPD yang terkait termasuk Kementerian/Lembaga di tingkat nasional.

7.1.3 Obligasi Daerah

Obligasi Daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal dalam bentuk mata uang rupiah. Selain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah, Obligasi Daerah merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Selain itu, Obligasi Daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Penerbitan Obligasi Daerah ini juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan penerapan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Daerah, di mana penilaian atas tata kelola keuangan dan pemerintahan dimaksud dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitannya.

Ada beberapa jenis kegiatan yang bisa dibiayai melalui skema penerbitan Obligasi Daerah, di antaranya:

- a. Kegiatan sebagai investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan (*revenue bond*). Ke depan, diharapkan instrumen Obligasi Daerah ini juga bisa dimanfaatkan untuk investasi prasarana dan/atau sarana yang tidak menghasilkan penerimaan (*general bond*) sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Sesuai dengan dokumen perencanaan daerah;
- c. Merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada;
- d. Dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Obligasi Daerah; dan
- e. Kegiatan beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Beberapa kegiatan yang potensial untuk dilaksanakan dan dibiayai melalui penerbitan obligasi daerah, diantaranya dan tidak terbatas pada:

- a. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di wilayah Jakarta/LRT Fase II *)
- b. Pembangunan Rumah Sakit Khusus Terpadu Penyakit Tidak Menular*)
- c. Kegiatan yang dapat ditentukan kemudian sesuai dengan peraturan perundangan.

Selain beberapa kriteria tersebut di atas, kecermatan dalam melihat peluang serta minat pasar/investor menjadi salah satu langkah strategis yang ikut menentukan tingkat penyerapan

Obligasi Daerah di pasar modal. Selanjutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengoptimalkan rencana penerbitan Obligasi Daerah, yaitu :

- a. Penguatan koordinasi dan komunikasi terkait beberapa kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah.
- b. Penyiapan struktur kelembagaan dan sumber daya berikut kelengkapannya agar mampu dalam menjalankan rangkaian proses dari perencanaan dan persiapan hingga penerbitan Obligasi Daerah.
- c. Penyediaan beberapa instrumen regulasi dan pendukung lainnya.

Dengan adanya skema Obligasi Daerah sebagai salah satu skema alternatif pembiayaan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di samping menghadirkan dana untuk kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur.

7.1.4 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pembiayaan dengan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ *Corporate Social Responsibility* (CSR), berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, di tingkat Pemerintah Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha, yang mana dalam peraturan dimaksud, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) dimaksudkan untuk mengoptimalkan program pembangunan daerah, dengan prinsip bahwa TSLDU merupakan kegiatan sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/pola kegiatan TSLDU dilaksanakan. Namun demikian, perlu adanya sinergi antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam penerapannya agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara optimal. Sinergi tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui keberadaan Forum TSLDU, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. Diharapkan Forum TSLDU dapat terbentuk sesegera mungkin melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

TSLDU bukan merupakan kewajiban/kompensasi/persyaratan/insentif atas diberikannya pelayanan perizinan terhadap kegiatan atau aktivitas perusahaan. TSLDU dapat berupa kegiatan langsung kepada masyarakat atau melalui keikutsertaan dalam program pemerintah

daerah berupa kegiatan TSLDU terkait barang milik daerah dan atau jasa/non barang milik daerah.

Adapun ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) meliputi:

- a. bina sosial dan budaya;
- b. bina ekonomi;
- c. bina fisik lingkungan, dan;
- d. penanggulangan bencana

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha, keberadaan Forum TSLDU diinisiasi oleh unsur dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan operasional Forum TSLDU dibebankan pada dana TSLDU masing-masing perusahaan dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat. Nantinya, semua dana yang diterima oleh Forum TSLDU akan dipertanggung jawabkan dan dilaporkan kepada pemberi dana.

Namun demikian, mengingat kedepannya skema TSLDU akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya minat pihak swasta untuk menyalurkan dana TSLDU di wilayah Provinsi DKI Jakarta, untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang lebih optimal, diharapkan keberadaan Forum TSLDU tersebut dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dilembagakan dalam penyusunan program dan aktivitas TSLDU dimaksud agar sejalan dengan arah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kebutuhan riil yang ada dimasyarakat.

7.1.5 Pendanaan Terkait Pemanfaatan Ruang

a. Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)

Salah satu pemafaatan yang dioptimalkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mendukung pembangunan infrastruktur adalah kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) berupa prasarana lingkungan, fasilitas sosial, dan utilitas umum/fasilitas umum.

Pada dasarnya kewajiban SIPPT dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan melalui kontribusi swasta/masyarakat. Namun, guna terus mendorong tingkat akuntabilitas pengelolaan kewajiban SIPPT dan pencapaiannya yang dirasa kurang optimal, tentunya pengelolaan kewajiban tersebut perlu ditingkatkan kedepannya melalui penyempurnaan peraturan, tata cara penetapan nilai dan bentuk kewajiban serta meningkatkan pelibatan masyarakat.

b. Pengenaan Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi (RDTR dan PZ), disebutkan bahwa dalam rangka mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, Pemerintah Daerah dapat menerapkan ketentuan insentif maupun disinsentif.

Terkait dengan disinsentif, dalam dinamika perkembangan kota Jakarta yang seringkali ditemui adalah berupa pelampauan terhadap Koefisien Lantai Bangunan. Hal tersebut muncul karena tingginya intensitas ruang yang dibutuhkan oleh masyarakat, sementara lahan yang dapat dimanfaatkan jumlahnya sangat terbatas.

Dalam Peraturan Daerah RDTR dan PZ ini disebutkan bahwa pelampauan KLB dimungkinkan pada lokasi-lokasi sebagai berikut :

- 1) Pusat Kegiatan Primer;
- 2) Pusat Kegiatan Sekunder;
- 3) Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi;
- 4) Kawasan Terpadu Kompak dengan Pengembangan Konsep TOD;
- 5) Kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride); dan
- 6) Lokasi pertemuan angkutan umum massal.

Terhadap pelampauan KLB tersebut, Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif dengan jenis diantaranya pengenaan denda secara progresif; membatasi penyediaan prasarana, pengenaan kompensasi, dan penalti; pelarangan pengembangan untuk pemanfaatan ruang yang telah terbangun; serta pengenaan pajak /retribusi yang lebih tinggi disesuaikan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang.

Jenis disinsentif ini nantinya ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan besaran penetapan pelampauan nilai KLB dan perhitungan nilai kompensasi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki pengalaman dalam penerapan pengenaan Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), diantaranya dalam pembangunan infrastruktur Simpang Susun Semanggi, Penataan Kawasan Kota Tua, dan beberapa fasilitas publik lainnya.

Selanjutnya, untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas serta memenuhi kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya secara terstruktur dalam perbaikan tata kelola penerimaan bentuk kompensasi pelampauan nilai KLB termasuk penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) penetapan prioritas penggunaan kompensasi pelampauan nilai KLB.

7.1.6 Kelembagaan Pembiayaan Pembangunan

Seiring dengan semakin tingginya aktivitas berbagai sektor pembangunan baik yang diinisiasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun pihak swasta serta dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan dan pendayagunaan potensi pembiayaan yang ada di daerah maupun sumber-sumber lainnya yang berasal dari lembaga pembiayaan di tingkat nasional maupun multinasional, maka dipandang perlu dibentuknya lembaga pembiayaan yang dapat mengakomodir dan berperan sebagai katalisator dalam berbagai aktivitas pembangunan yang diinisiasi oleh berbagai pihak.

Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan ini dimungkinkan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden ini meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimungkinkan untuk membentuk Perusahaan Daerah/BUMD dengan '*core business*' di bidang pembiayaan.

Aktivitas pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud disini dapat berbentuk penyediaan dana atau barang modal yang dimungkinkan dilaksanakan secara kerjasama dengan berbagai institusi keuangan swasta maupun multilateral sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga pembiayaan pembangunan ini akan dikembangkan secara bertahap yang pada periode awal setelah pendiriannya fokus pada membangun fondasi korporasi atau bentuk kelembagaan lainnya yang kuat. Selanjutnya secara bertahap akan dikembangkan menjadi lembaga yang dapat menjadi katalisator sekaligus solusi yang komprehensif dalam berbagai aktifitas pembangunan termasuk penyediaan infrastruktur di Jakarta hingga dapat berkiprah di tingkat nasional.

7.2 Program Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun penyusunan program pembangunan dalam bab ini merujuk pada (1) Program sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur, (2) Program yang mengacu kepada Permendagri 13 Tahun 2006, dan (3) Program Kementerian/Lembaga terkait.

Selain mencakup pemenuhan urusan konkuren dan fungsi penunjang urusan pemerintahan, seluruh program perangkat daerah disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 7.2 hanya yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta dan bersifat indikatif.

Sebagai catatan, mengingat adanya masa transisi pada tahun 2018 dimana penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 belum berpendoman kepada RPJMD 2017-2022, sesuai ketentuan yang berlaku Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018. Namun demikian, sejalan dengan proses penyusunan RPJMD 2017-2022 yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat program-program serta indikator kinerja program baru yang berbeda dengan apa yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018. Oleh karena itu, pada Tabel 7.2 berikut terdapat Program Perangkat Daerah yang hanya digunakan pada tahun 2018 sesuai dengan RKPD Tahun 2018 (dengan tidak mencantumkan target dan indikasi anggaran pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022) dan Program Perangkat Daerah untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Tabel Program Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta pagu indikatifnya untuk tahun perencanaan 2018 – 2022 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 7.2

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Rp	Target		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1	1	Pendidikan															
1	1	13	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat		13.350,9 53.801	279.376 62.169	33.386,3 48.934		39.202,3 39.325	45.345,8 91.089	159.223. 195.318						
				83,07 %	86,35 % 81.301	89,63 % 39.731	92,91 % 00.671	96,19 % 91.710	99,5 % 80.289	99,5 % 135.890. 993.702			DINAS PENDIDIKAN				
				Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	159 lembaga	2.022,97 2.500	4.215,82 2.438	5.107,44 8.263	519 lembaga	5.550,34 7.615	6.435,61 0.800	609 lembaga	23.332,2 01616			DINAS PENDIDIKAN	
1	1	14	Program Wajib Belajar 12 Tahun		2.669,13 6.978,48 7	2.805,39 3.104,50 9	3.247,23 3.989,57 6		3.267,80 6.525,78 2	3.426,87 4.765,67 9	15416,4 45364,0 33						
				96,15 %	96,54 % 578.035	96,93 % 821.706	97,32 % 294.709	97,71 % 239.242	98,1 % 612.830	98,1 % 3.471,03 1546,52 2			DINAS PENDIDIKAN				
				Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI		315190. 797619	88,67 % 659583	90,62 % 439.477	92,59 % 280.000	94,5 % 600.000	94,5 % 1933,77 0,77667 9			DINAS PENDIDIKAN			
			Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	71,87 %	769753. 534832	77,42 % 310107	80,2 % 553.053	82,95 % 187138	85,75 % 984.105	85,75 % 1.054,51 1.562,56 6	85,75 % 614769 6					DINAS PENDIDIKAN	
			Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	10,88 Tahun	20.511,3 05.001	0 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	20.511,3 05.001	11,1 Tahun				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase angka putus sekolah SD, SMP, SMA, SMK	96,15 %	945.391. 128.000	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	945.391. 128.000	96,54 %				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/MA/ SMK	0,36 %	0	215.825. 450.801	0,15 % 604.140	0,08 % 103.227	0,01 % 253.281. 103.227	0,01 % 274.574. 734.156	977.429. 892.324	0,01 %				DINAS PENDIDIKAN	
			Rata-rata lama sekolah penduduk Jakarta	10,88 tahun	229.385. 000	11,32 tahun 58.551	24.075,8 52.224	11,77 tahun 22.123	25.423,4 22.123	27.726,7 71.693	99.440,4 89.591	12 tahun				DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI	0,01 %	0	530.542. 073.761	0,01 % 335.973	0,01 % 086.051	0,01 % 562.852. 086.051	0,01 % 579.737. 648.634	2.219,59 0144,41 9	0,01 %				DINAS PENDIDIKAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp			
1	1	15	Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs	0,11 %	0,09 %	0	0,07 %	258.211.800.000	0,05 %	284.032.980.000	0,03 %	312.436.278.001	0,01 %	343.679.905.800	0,01 %	1.198.360.963.801	DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bersekolah	100 %	100 %	511.250.000	100 %	602.930.000	100 %	602.930.000	100 %	602.930.000	100 %	602.930.000	100 %	2.922.970.000	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	15	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus			6.666.446.353		31.520.215.648		45.928.079.329		59.864.818.025		76.437.561.048		220.417.120.403		DINAS PENDIDIKAN
			Persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan inklusi	0 %	0 %	6.666.446.353	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	6.666.446.353		DINAS PENDIDIKAN
			Persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus	49,04 %	61,8 %	0	74,54 %	31.520.215.648	87,28 %	45.928.079.329	100 %	59.864.818.025	100 %	76.437.561.048	100 %	213.750.674.050		DINAS PENDIDIKAN
1	1	16	Program Peningkatan Mutu Pendidikan			103.484.283.568		139.712.469.854		153.442.420.486		170.905.877.561		189.744.733.633		757.289.785.102		DINAS PENDIDIKAN
			Persentase kelulusan SD, SMP, SMA, SMK	100 %	100 %	689.395.975.663	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	689.395.975.663		DINAS PENDIDIKAN
			Rata-rata nilai Ujian Nasional/ Ujian Sekolah Madrasah Berbasis Daerah SD, SMP, SMA, SMK	61,31 poin	66,04 poin	4.577.892.604	0 poin	0	0 poin	0	0 poin	0	0 poin	0	66,04 poin	4.577.892.604		DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Sekolah terakreditasi A	0 %	70,03 %	0	77,52 %	1.933.070.000	85,02 %	1.145.099.000	92,51 %	1.736.101.000	100 %	1.255.009.000	100 %	6.069.279.000		DINAS PENDIDIKAN
			Persentase SD/SDLB berakreditasi Minimal B	0 %	0 %	802.786.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	802.786.000		DINAS PENDIDIKAN
			Persentase SMP/SMPLB berakreditasi Minimal B	0 %	0 %	370.279.200	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	370.279.200		DINAS PENDIDIKAN
			Persentase SMA/SMALB berakreditasi Minimal B	0 %	0 %	209.357.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	209.357.000		DINAS PENDIDIKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	0 %	6.443.041.399	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0	0 %	6.443.041.399	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	0 %	1.691.153.8.350	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0	0 %	1.691.153.8.350	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	0 %	1214.065.160	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0	0 %	1214.065.160	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase SMA/SMALB yang memenuhi SPM	0 %	2.229.026.227	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	0	0 %	2.229.026.227	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Kelulusan Jenjang SD/MI	100 %	0	100 %	22.185606.491	100 %	22.876035.836	100 %	23.825194.416	100 %	24.090273.156	100 %	92.977109.899	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase Kelulusan Jenjang SMP/MTs	99,98 %	1876.758.000	100 %	27.365.337.818	100 %	30.143.740.921	100 %	32.851.299.957	100 %	36.071.896.471	100 %	128.309.033.167	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase Kelulusan Jenjang SMA/MA	99,99 %	15129942.065	100 %	59.683.506.446	100 %	64.783.946.717	100 %	70.000.257.651	100 %	75.932.717.819	100 %	285.530.370.698	DINAS PENDIDIKAN	
		Persentase Kelulusan Jenjang SMK	99,98 %	0	100 %	22.300.618.295	100 %	27.696.673.168	100 %	35.091.838.200	100 %	44.332.734.758	100 %	129.421.864.421	DINAS PENDIDIKAN	
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMP/MTs	62,32 poin	66,85 poin	0	67,63 poin	2.064.433.800	68,41 poin	2.270.877.180	69,19 poin	2.497.964.898	70 poin	2.747.761.388	70 poin	9.581.037.266	DINAS PENDIDIKAN
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMK	61,31 poin	66,04 poin	0	67 poin	50.857.800	68 poin	53.400.690	69 poin	56.070.725	70 poin	58.874.261	70 poin	219.203.476	DINAS PENDIDIKAN
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI	70,11 poin	72 poin	0	74 poin	1.385.923.004	76 poin	1.455.219.154	78 poin	1.527.980.112	80 poin	1.604.379.118	80 poin	5.973.501.388	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMA/MA	61,57 poin	6625 poin	0	67 poin	2.743.116.200	68 poin	3.017.427.820	69 poin	3.319.170.602	70 poin	3.651.087.662	70 poin	127.308.022.284	DINAS PENDIDIKAN
1	17	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan			10.497.253.355.262		140.548.280.9030		157.200.2.694.519		212.616.8.247.164		250.601.7.631.038		8.659.396.717.013	
		Persentase guru yang kompeten	72,16 %	7772 %	10.497.253.355.262	83,28 %	140.548.280.9030	88,84 %	157.200.2.694.519	94,4 %	212.616.8.247.164	100 %	250.601.7.631.038	100 %	8.659.396.717.013	DINAS PENDIDIKAN
1	18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan			2.105.925.995.866		3.016.996.002.186		3.422.106.897.891		144.918.5.699.631		140.405.4.758.132		11.398.269.353.706	
		Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	81,3 %	85,04 %	2.105.925.995.866	88,78 %	3.016.996.002.186	92,52 %	3.422.106.897.891	96,26 %	144.918.5.699.631	100 %	140.405.4.758.132	100 %	11.398.269.353.706	DINAS PENDIDIKAN
1	144	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan			323.602.033.143		128.750.733.360		91.9197.06.800		96.365174.800		101.108.71.1850		741.746.359.953	
		indeks kepuasan pelayanan kantor	4 index	4 index	323.602.033.143	4 index	128.750.733.360	4 index	91.9197.06.800	4 index	96.365174.800	4 index	101.108.71.1850	4 index	741.746.359.953	DINAS PENDIDIKAN
1	202	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan			548.853.790		714.580.800		733.810.050		754.345.800		776.287.800		3.527.878.240	
		indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 index	4 index	548.853.790	4 index	714.580.800	4 index	733.810.050	4 index	754.345.800	4 index	776.287.800	4 index	3.527.878.240	DINAS PENDIDIKAN
1	2	Kesehatan														
1	21	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan			27018000.000		3379585.072.327		3942426.871.385		4226140.368.507		4706325.434.927		16.281.495.747.146	
		Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	81,82 %	0 %	27018000.000	100 %	3.282.165.632.327	100 %	3.822.552.551.385	100 %	4.092.692.496.707	100 %	4.595.520.222.327	100 %	15.819948.902.746	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini Penyakit Menular yang Direspon	86,27 %	0	85 %	90416440000	85 %	112458320000	85 %	125419871800	85 %	102225212600	85 %	430519844400	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Kota/Kabupaten yang Melaksanakan Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri	6 Kota/Kabupaten	0	6 Kota/Kabupaten	7003000000	6 Kota/Kabupaten	7416000000	6 Kota/Kabupaten	8028000000	6 Kota/Kabupaten	8580000000	6 Kota/Kabupaten	31027000000	DINAS KESEHATAN
1	22	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah		1682348608000		1783910834080		1799901888421		1816042753305		1832355026838		891455910644	
		Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	73 %	0	95 %	1783910834080	95 %	1799901888421	95 %	1816042753305	100 %	1832355026838	100 %	7232210502644	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)	3518959 Penduduk	5732908	0 Penduduk	0	0 Penduduk	0	0 Penduduk	0	0 Penduduk	0	5732908	1682348608000	DINAS KESEHATAN
1	23	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan		0		1687911527905		2739277627706		3529898395233		3765751706183		11722839257027	
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	11 %	0	40 %	1687911527905	53 %	2739277627706	65 %	3529898395233	72 %	3765751706183	72 %	11722839257027	DINAS KESEHATAN
1	24	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)		0		1739167550375		3057322962893		3155650233038		3958944667689		11911085413995	
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100 %	0	100 %	1739167550375	100 %	3057322962893	100 %	3155650233038	100 %	3958944667689	100 %	11911085413995	DINAS KESEHATAN
1	25	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan		1154000000		0		0		0		0		1154000000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase SDM kesehatan yang kompeten	100 %	115400 0000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	115400 0000	DINAS KESEHATAN	
1	2	145		794.333.240.000		864.733.370.000		914.743.205.000		936.495.450.000		103001 504000 0		454032 030500 0		
		indeks kepuasan pelayanan kantor	4 Indeks	794.333.240.000	4 Indeks	864.108.670.000	4 Indeks	914.112.005.000	4 Indeks	935.844.750.000	4 Indeks	102934 484000 0	4 Indeks	453774 350500 0	DINAS KESEHATAN	
		Persentase Capaian Kinerja Program Kesehatan Sesuai Target	63,64 %	0	100 %	624.700.000	100 %	631200 000	100 %	650.700.000	100 %	670200 000	100 %	257680 0000	DINAS KESEHATAN	
1	2	203		296383 83040		296383 83040		299533 83040		308983 83040		320283 83040		152156 915200		
		indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 Indeks	296383 83040	4 Indeks	296383 83040	4 Indeks	299533 83040	4 Indeks	308983 83040	4 Indeks	320283 83040	4 Indeks	152156 915200	DINAS KESEHATAN	
1	2	382		0		120110 27962		133327 90373		157772 82926		170860 65159		582071 66420		
		Rerata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD/UKPD Urusan Kesehatan	76 Poin	0 Poin	82 Poin	120110 27962	84 Poin	133327 90373	86 Poin	157772 82926	88,5 Poin	170860 65159	88,5 Poin	582071 66420	DINAS KESEHATAN	
1	2	395		123989 31485		0		0		0		0		123989 31485		
		Program Kesehatan Masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	274 Balita	995420 500	0 Balita	0	0 Balita	0	0 Balita	0	0 Balita	0	0 Balita	995420 500	DINAS KESEHATAN	
		Persentase pemenuhan SPM kesehatan	50 %	100 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	903233 8289	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah kasus penyakit potensial wabah	1611 Alert Kasus	237117 2696	0 Alert Kasus	0	0 Alert Kasus	0	0 Alert Kasus	0	0 Alert Kasus	0	0 Alert Kasus	237117 2696	DINAS KESEHATAN	
1	2	396		131107 421256 7		0		0		0		0		131107 421256 7		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			3,78 Poin	38 Poin	0 Poin	0	0 Poin	0	0 Poin	0	0 Poin	0	0 Poin	18155577715	0 Poin	18155577715	DINAS KESEHATAN
			11 %	27 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	1289338415645	0 %	1289338415645	DINAS KESEHATAN
			6 Kota/Kabupaten	6 Kota/Kabupaten	0 Kota/Kabupaten	0	0 Kota/Kabupaten	0 Kota/Kabupaten	0 Kota/Kabupaten	0 Kota/Kabupaten	0 Kota/Kabupaten	0 Kota/Kabupaten	6 Kota/Kabupaten	3580219207	6 Kota/Kabupaten	3580219207	DINAS KESEHATAN
1	2	397 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan				0	0	0		0		0		15722311250		15722311250	
			83,33 %	85 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	495980000	0 %	495980000	DINAS KESEHATAN
			0 %	80 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %			105925000	0 %	105925000	DINAS KESEHATAN
			98 %	100 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %			15120406250	0 %	15120406250	DINAS KESEHATAN
1	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1	3	48 Program Pengendali Banjir dan Abrasi				0	4246193360092	3654677444670		4058496141347		4352902099008		1631226904517			
			77 %	0 %	79 %	0	4054337679700	3478969815964	81 %	83 %	85 %	4131238089956	85 %	15522892535246	85 %		DINAS SUMBER DAYA AIR
			42,14 %	0 %	50,78 %	0	191855680392	175707628706	56,46 %	63,78 %	72,52 %	221664009052	72,52 %	789376509871	72,52 %		DINAS SUMBER DAYA AIR
1	3	49 Program Pengendalian Banjir				4090793252899	0	0		0		0		4090793252899			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Presentase penanganan penangan yang kurang dari 2 jam	75 %	77 % 4.090.79 3.252.89 9	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	409079 3.252.89 9	DINAS SUMBER DAYA AIR	
1	3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih		2.080.46 5.338.79 6	1522.57 3.863.24 5	38.4475 44.216	1512.33 6.027.33 4	2.956.14 1532.92 0	8.109.96 4.306.51 1							
			Presentase cakupan pelayanan air bersih	60 %	60.99 % 2.075.46 4.778.67 6	63.65 % 1.497.57 3.863.24 5	66.09 % 13.4475 44.216	73.69 % 1512.33 6.027.33 4	79.61 % 2.931.14 1532.92 0	79.61 % 802.996 3.746.39 1						DINAS SUMBER DAYA AIR
		persentase waduk yang memenuhi baku mutu untuk air baku	0 %	0 % 5.000.56 0.120	0.93 % 25.000.0 00.000	1.85 % 25.000.0 00.000	0 %	2.78 % 25.000.0 00.000	2.78 % 80.000.5 6.012.0						DINAS SUMBER DAYA AIR	
1	3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah		48.458.1 14.245	243.475. 176.393	1835.50 1.027.36 5	2.832.55 6.163.43 4	3.749.26 9.779.77 9	8.709.26 0.261.21 6							
			Presentase cakupan area yang terlayani sistem pengelolaan air limbah	14.33 %	15.93 % 48.458.1 14.245	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	48.458.1 14.245	DINAS SUMBER DAYA AIR	
		Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	15.93 %	0 %	17.04 % 243.475. 176.393	20.49 % 1.835.50 1.027.36 5	23 % 2.832.55 6.163.43 4	26.44 % 3.749.26 9.779.77 9	26.44 % 8.660.80 2.146.97 1						DINAS SUMBER DAYA AIR	
1	3	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan		2.081.29 6.148.51 4	221.996 0.186.93 1	3.564.11 1.446.27 7	3.625.71 3.818.59 2	2.868.08 9.809.52 1	14.359.1 71.409.8 35							
			Penambahan Road Ratio	7.1029 %	0.0032 % 1.498.30 4.568.93 5	0.0032 % 167.404 513.955 8	0.0032 % 2.935.70 7.046.53 6	0.0032 % 3.014.02 1.098.86 3	0.0032 % 2.178.16 3.303.80 6	0.0032 % 11.300.2 41.157.6 98						DINAS BINA MARGA
		Penambahan Luas jalur pejalan kaki	1815875 m2	146400 m2 582.991. 579.579	146400 m2 545.915. 0.473.73	146400 m2 628.404. 399.741	146400 m2 611.692. 719.729	146400 m2 689.926. 505.715	254787 5 m2 3.058.93 0.252.13 7						DINAS BINA MARGA	
1	3	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		1.023.06 9.357.61 4	1.041.48 2.750.26 9	1.079.77 8.612.57 6	1.130.69 3.461.08 1	1.188.83 0.648.15 7	5.463.85 4.829.69 7							
			Persentase Kondisi Jalan Mantap	96 %	0 % 1.041.48 2.750.26 9	96.5 % 1.041.48 2.750.26 9	97 % 1.079.77 8.612.57 6	97.5 % 1.130.69 3.461.08 1	98 % 1.188.83 0.648.15 7	98 % 4.440.78 5.472.08 3						DINAS BINA MARGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	3	56	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	96 %	102306 935761 4	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	96 %	102306 935761 4	DINAS BINA MARGA	
				79125 m	513624 18514	525000 00000	30000 m	551250 00000	30000 m	578812 50000	607753 12500	277643 981014					
				Panjang Jalan yang Memiliki Prasarana Jaringan Utilitas (m)	0 m	0	30000 m	525000 00000	30000 m	578812 50000	607753 12500	226281 562500					
			Persentase Panjang Jalan yang memiliki Prasarana jaringan Utilitas	30000 m	513624 18514	0 m	0	0 m	0 m	0	0 m	79125 m	513624 18514			DINAS BINA MARGA	
1	3	72	Program Penataan Ruang		104223 40199	570030 00000		568350 00000	159150 00000	138850 00000	154060 340199						
				57 %	923848 0199	59 %	554510 00000	60 %	555830 00000	61 %	146630 00000	62 %	147568 480199	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN			
				90 %	118386 0000	90 %	155200 0000	90 %	125200 0000	90 %	125200 0000	649186 0000					
1	3	147	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air		127145 526237	128069 304643		128073 449498	130282 906629	132407 222372	645978 409379						
				4 indeks	127145 526237	4 indeks	128069 304643	4 indeks	128073 449498	4 indeks	130282 906629	4 indeks	645978 409379	DINAS SUMBER DAYA AIR			
1	3	148	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Bina Marga		242206 91604	247682 12567		259981 17616	272376 48495	286391 55920	130863 826202						
				4 indeks	242206 91604	4 indeks	247682 12567	4 indeks	259981 17616	4 indeks	272376 48495	4 indeks	130863 826202	DINAS BINA MARGA			
1	3	149	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanian		233848 24808	285150 00000		276150 00000	276150 00000	276150 00000	134744 824808						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				4 indeks	23.384,8 24.808	4 indeks	28.5150 00.000	4 indeks	27.6150 00.000	4 indeks	27.6150 00.000	4 indeks	27.6150 00.000	4 indeks	27.6150 00.000	
1	3	205	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air		11.272,8 52.104		12.512,4 94.750		13.583,8 41.584		14.761,1 63.399		16.056,4 64.920		68.186,8 16.757	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
				4 indeks	11.272,8 52.104	4 indeks	12.512,4 94.750	4 indeks	13.583,8 41.584	4 indeks	14.761,1 63.399	4 indeks	16.056,4 64.920	4 indeks	68.186,8 16.757	
1	3	206	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Bina Marga		44.770,5 97.520		47.009,1 27.396		49.359,5 83.765		51.827,5 62.954		54.418,9 41.101		247.385, 812.736	DINAS BINA MARGA
				3 indeks	44.770,5 97.520	3 indeks	47.009,1 27.396	3 indeks	49.359,5 83.765	3 indeks	51.827,5 62.954	3 indeks	54.418,9 41.101	3 indeks	247.385, 812.736	
1	3	207	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan		117.404 0.950		125.000 0.000		125.000 0.000		125.000 0.000		125.000 0.000		6174,04 0.950	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
				4 indeks	117.404 0.950	4 indeks	125.000 0.000	4 indeks	125.000 0.000	4 indeks	125.000 0.000	4 indeks	125.000 0.000	4 indeks	6174,04 0.950	
1	3	288	Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup		113.099, 500		169.150, 000		169.150, 000		169.150, 000		169.150, 000		789.699, 500	BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Peningkatan Upaya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	0 %	0	50 %	136.300, 000	60 %	136.300, 000	70 %	136.300, 000	80 %	136.300, 000	80 %	545.200, 000	
			Peningkatan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPTT)	0 %	78.581,2 5	10 %	32.850,0 00	15 %	32.850,0 00	20 %	32.850,0 00	25 %	32.850,0 00	25 %	139.258, 125	
			Kesesuaian Implementasi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Rencana Tata Ruang	0 Persentas e	105.241, 375	0 Persent ase	0	0 Persent ase	0	0 Persent ase	0	0 Persent ase	0	0 Persent ase	105.241, 375	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	3	313 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda			231247.640169		309660.000000		318660.000000		318360.000000		320010.000000		1497937640169		DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
		Persentase pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar	50 %	52 %	231247.640169	54 %	309660.000000	56 %	318660.000000	58 %	318360.000000	60 %	320010.000000	60 %	1497937640169		
1	4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
1	4	66 Program Penyediaan dan Pemeliharaan/ Perawatan Perumahan Rakyat			3876065.011864		4508979260021		5233084742143		5878781272250		4903118983163		24400029269441		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
		persentase unit perumahan rakyat yang terbangun	8,33 %	0 %	3876065.011864	0,48 %	4508979260021	0,53 %	5233084742143	0,37 %	5878781272250	0,94 %	4903118983163	10,65 %	24400029269441		
1	4	67 Program Penyediaan dan Pemeliharaan/ Perawatan Perumahan Rakyat			0		172816268455		828377170503		988281119029		944895093480		2934369651467		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
		persentase perumahan rakyat yang lengkap sarana prasarana	17 %	0 %	0	35 %	139166268455	57 %	613377170503	78 %	747481119029	100 %	862720093480	100 %	2362744651467		
		persentase unit perumahan rakyat yang terpelihara/ terawat	13 %	0 %	0	18 %	33650000000	39 %	215000000000	66 %	240800000000	87 %	821750000000	87 %	571625000000		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
1	4	68 Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat			2620709178864		0		0		0		0		2620709178864		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
		presentase unit perumahan rakyat yang terbangun	5,83 %	2,5 %	2.423857.487481	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	8,33 %	2.423857.487481		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Perumahan yang lengkap sarana prasarana	0 %	17 %	82.064,5 69614	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	17 %	82.064,5 69614	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA		
		persentase unit perumahan yang terpelihara	0 %	13 %	114.787 121.769	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	13 %	114.787 121.769	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA		
1	4	83	Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun		19.8576 31442		44.6002 91055		43.6639 44.766		46.0461 55.852		49.4189 21.550		203.586 944.665			
		Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun	0 Indeks	0	19.8576 31442	0 Indeks	44.6002 91055	77 Indeks	43.6639 44.766	78 Indeks	46.0461 55.852	80 Indeks	49.4189 21.550	80 Indeks	203.586 944.665	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA		
1	4	152	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman		224.852. 470.381		290.359. 629.498		394.185. 507.283		542.163. 959.182		885.266 218.642		2.336.82 7.784.986			
		Indeks kepuasan pelayanan kantor	0 indeks	4 indeks	224.852. 470.381	4 indeks	290.359. 629.498	4 indeks	394.185. 507.283	4 indeks	542.163. 959.182	4 indeks	885.266 218.642	4 indeks	2.336.82 7.784.986	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA		
1	4	210	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman		2.419,82 2.404		2.998,77 4.990		3.681,34 4.789		4.565,04 7.299		6.254,01 7.662		19.919,0 071.44			
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	0 indeks	4 indeks	2.419,82 2.404	4 indeks	2.998,77 4.990	4 indeks	3.681,34 4.789	4 indeks	4.565,04 7.299	4 indeks	6.254,01 7.662	4 indeks	19.919,0 071.44	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA		
1	4	254	Program Penataan Kawasan Permukiman		168.624. 704.035		500.125. 964.133		563.061 340.665		783.793. 141.389		1.599,78 8.064.520		3.615,39 3.214.742			
		Jumlah kawasan/ fasilitas permukiman yang ditata	0 RW Kumuh	10 RW Kumuh	161.902. 440.943	40 RW Kumuh	421.335. 333.894	56 RW Kumuh	514.265. 325.546	46 RW Kumuh	750.901. 196.789	48 RW Kumuh	1.512,67 3.112.092	200 RW Kumuh	3.361,07 7.409.264	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase kawasan/ fasilitas permukiman yang terpelihara	0 %	6722.26 3.092	100 %	78790.6 30239	100 %	48796.0 15119	100 %	32891.9 44600	100 %	87114.9 52.428	100 %	254.315, 805.478	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA	
1	5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat														
1	5	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	0 Persen	55 Persen	349886 916522	55 Persen	504099 004435	70 Persen	574274 896891	80 Persen	503097 118898	90 Persen	592774 572961	90 Persen	2.52413 2.50970 7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial	1 Persen	5 Persen	487614 6800	10 Persen	311122 4480	15 Persen	351568 3662	20 Persen	397272 2537	25 Persen	448917 6467	25 Persen	199649 53946	
1	5	Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21														
1	5	Program Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan			253504. 884651		908856. 877100		601348 964685		492103. 951083		494552. 648637		275036 732615 6	
		Persentase penanggulangan kebakaran yang berhasil	82 %	82,5 %	234617 498724	83 %	675398, 779348	83,5 %	448244, 033861	84 %	392577 663260	84,5 %	456914, 235337	84,5 %	2.20775 2.21053 0	DINAS PENANGGU LANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		Persentase Operasi Penyelamatan yang Berhasil	78 %	78,5 %	18887,3 85927	79 %	207042, 192192	79,5 %	151759, 855236	80 %	988384 07399	80,5 %	364184 97146	80,5 %	512946, 337900	DINAS PENANGGU LANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Rp		Target		Rp		
1	5	10	0 %	0 %	0	38,05 %	26.415,905.560	57,91 %	1345,075.588	78,48 %	687.880.424	100 %	1219,916.154	100 %	29668,77726	DINAS PENANGGU LANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMA TAN				
1	5	Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran			4.503,971.897		11.093,776.065		7.449,412.528		7.571,325.241		7.739,131.706		38.357,617.437					
		Tingkat kerawanan kebakaran	5,3 Indeks	4,9 Indeks	4.503,971.897	4,1 Indeks	11.093,776.065	3,3 Indeks	7.449,412.528	3 Indeks	7.571,325.241		7.739,131.706	2,2 Indeks	38.357,617.437		DINAS PENANGGU LANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMA TAN			
1	5	Program Pengelolaan Risiko Bencana			7.356,596.773		20.090,721.614		22.680,531.208		23.689,741.760		24.644,276.868		98.461,868.223					
		Persentase Mitigasi Risiko Bencana yang dilaksanakan	2,96 %	7,23 %	7.356,596.773	0 %	0	0 %	0	0 %	0		0	0	7,23 %	7.356,596.773	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH			
		Persentase informasi kebencanaan yang disampaikan ke masyarakat	0 %	0 %	0	100 %	17.219,500.346	100 %	19.744,450.346	100 %	20.682,315.346		21.558,370.346	100 %	79.204,636.384		BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH			
		Persentase masyarakat dan aparaturnya yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	0,38 %	0 %	0	0,54 %	17.587,503.60	0,62 %	17.587,503.60	0,7 %	17.587,503.60		17.587,503.60	0,78 %	70.350,1440		BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH			
		Persentase Implementasi Fasilitas Publik Aman serta Ketahanan Masyarakat Jakarta terhadap Bencana	6,58 %	0 %	0	19,75 %	1.112,470.908	26,33 %	1.177,330.502	32,92 %	1.248,676.054		1.327,156.162	39,5 %	48.656,33626		BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH			
1	5	Program Penanggulangan Bencana			1.593,386.604		6.115,699.576		5.785,972.282		5.976,772.260		6.179,302.235		25.651,32.957					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Severity Rate/Tingkat Keparahan Bencana	0 %	159338 6604	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0	0 %	159338 6604	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
		Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	11 %	0	445104 7500	100 %	397464 7500	100 %	400410 7500	100 %	402916 3500	100 %	164589 66000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
		Persentase kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1 kali 24 jam	100 %	0	166465 2076	100 %	181132 4782	100 %	197266 4760	100 %	215013 8735	100 %	759878 0353	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
1	75	Program Peningkatan Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		14.7416 17600	723933 44452		773185 18517		348739 53519		217468 13225		221074 247313			
		Persentase petugas pemadam kebakaran yang kompeten	42,1 %	44,64 % 17600	53,09 % 44452	61,55 % 18517	773185 18517	70,01 % 53519	348739 53519	78,46 % 13225	217468 13225	78,46 % 13225	221074 247313	DINAS PENANGGU LANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
1	116	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD SATPOL PP		13.1976 24.772	161533 22.949		168520 47072		190428 13189		215183 78.905		867641 86887			
		indeks kepuasan pelayanan kantor	3 indeks	13.1976 24.772	3 indeks 22.949	3 indeks 47072	168520 47072	4 indeks	190428 13189	4 indeks	215183 78.905	4 indeks	867641 86887	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	117	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		925435 42.763	127637. 335.957		92562.7 71431		104209. 688.360		129534. 351.745		546487. 690256			
		indeks kepuasan pelayanan kantor	1 Indeks	92.5435 42.763	3 Indeks 335.957	3 Indeks 71431	92.562.7 71431	4 Indeks	104.209. 688.360	4 Indeks	129534. 351.745	4 Indeks	546487. 690256	DINAS PENANGGU LANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Rp			
1	5	118	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Indeks	3 Indeks	8797011582	9609218972	10521740241	11713699917	47290512776						BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	174	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD SATPOL PP	4 Indeks	3 Indeks	40368939677	45616901833	51547099075	58248221954	231359205997							
1	5	175	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	3 Indeks	3 Indeks	28194715723	27119450000	25148000000	23149450000	24088000000	127699615723						DINAS PENANGGU LANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	5	176	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Indeks	3 Indeks	852530154	852530154	852530154	852530154	852530154	3767623870						BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1	6		Sosial														
1	6	1	Program Rehabilitasi Sosial			196742601584	219097391689	230439907103	241824110509	254546672312	1142650683197						DINAS SOSIAL
			Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya	4,8 %	14,9 %	173547309246	194387142491	204456782474	214270604240	225899089089	1012560927540						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			87 %	89 %	23,195,2 92.338	92 %	24,710,2 49,198	94 %	25,983,1 24,629	97 %	27,553,5 06,269	100 %	28,647,5 83,223	100 %	130,089 755,657	DINAS SOSIAL
1	6				17570,1 33,757		22,175,5 19,136		22,211,2 11,469		22,845,8 04,275		23,086,2 08,744		107,888 877,381	
			100 %	100 %	17570,1 33,757	100 %	22,175,5 19,136	100 %	22,211,2 11,469	100 %	22,845,8 04,275	100 %	23,086,2 08,744	100 %	107,888 877,381	DINAS SOSIAL
1	6				7533,43 4,732		18710,4 756,425		187,313 391,814		187,704 079,143		188,102 829,927		757,758 492,041	
			840 KPM	890 KPM	7533,43 4,732	1475 KPM	18710,4 756,425	2060 KPM	187,313 391,814	2645 KPM	187,704 079,143	3230 KPM	188,102 829,927	3230 KPM	757,758 492,041	DINAS SOSIAL
1	6				700690 65,746		73,651,9 88,547		891586 68,670		83,291,5 32,228		87,988,7 54,891		404,160 010,082	
			4 Indeks	4 Indeks	700690 65,746	4 Indeks	73,651,9 88,547	4 Indeks	891586 68,670	4 Indeks	83,291,5 32,228	4 Indeks	87,988,7 54,891	4 Indeks	404,160 010,082	DINAS SOSIAL
1	6				7526,79 4,452		71,615,9 15,45		4,968,89 4,719		5,253,00 6,619		5,610,61 8,153		30,520,9 05,488	
			4 indeks	4 indeks	7526,79 4,452	4 indeks	71,615,9 15,45	4 indeks	4,968,89 4,719	4 indeks	5,253,00 6,619	4 indeks	5,610,61 8,153	4 Indeks	30,520,9 05,488	DINAS SOSIAL
1	6				3,425,74 5,000		5,124,19 8,960		5,162,16 0,742		5,243,56 9,066		5,326,97 5,916		24,282,6 49,684	
			2714 Orang	2744 Orang	2,385,29 6,000	3194 Orang	3,507,08 2,210	3644 Orang	3,541,66 1,662	4094 Orang	3,567,92 9,864	4545 Orang	3,595,07 5,029	4545 Orang	16,597,0 44,765	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Target	Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	33	Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan	3540 perusahaan	3700 perusahaan	2.042.465.004	3700 perusahaan	162.756.000	3700 perusahaan	179.031.600	3700 perusahaan	196.934.800	3700 perusahaan	216.628.250	18500 perusahaan	12.745.128.154	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				3700 perusahaan	147.960.000	3700 perusahaan	162.756.000	3700 perusahaan	179.031.600	3700 perusahaan	196.934.800	3700 perusahaan	216.628.250	18500 perusahaan	903.310.650	
		jumlah perusahaan yang menjalankan norma K3	1180 perusahaan	1380 perusahaan	189.450.5004	1380 perusahaan	2.143.355.400	1380 perusahaan	2.357.690.950	1380 perusahaan	2.593.460.000	1380 perusahaan	2.852.806.150	6900 perusahaan	118.418.17.504	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	160	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja	4 indeks	4 indeks	100.133.437.091	4 indeks	108.898.008.000	4 indeks	119.787.809.100	4 indeks	131.766.589.900	4 indeks	144.943.249.140	605.529.093.231		
				4 indeks	100.133.437.091	4 indeks	108.898.008.000	4 indeks	119.787.809.100	4 indeks	131.766.589.900	4 indeks	144.943.249.140	4 indeks	144.943.249.140	605.529.093.231
2	218	Program Pengelolaan Operasional Urusan Tenaga Kerja	4 indeks	4 indeks	1.050.187.712	4 indeks	1.155.206.550	4 indeks	1.270.727.200	4 indeks	1.397.799.900	4 indeks	1.537.579.850	6.411.501.212		
				4 indeks	1.050.187.712	4 indeks	1.155.206.550	4 indeks	1.270.727.200	4 indeks	1.397.799.900	4 indeks	1.537.579.850	4 indeks	1.537.579.850	6.411.501.212
2	2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
2	6	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	63,4 %	74,34 %	5.713.137.723	82,66 %	50.531.152.168	91 %	51.190.034.700	99,33 %	51.686.658.225	99,5 %	5.220.762.926	99,5 %	86.472.528.376	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
				0	50.531.152.168	91 %	51.190.034.700	99,33 %	51.686.658.225	99,5 %	5.220.762.926	99,5 %	5.220.762.926	99,5 %	5.220.762.926	
		Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak	3115 orang	2973 orang	0	2831 orang	12.708.116.650	2689 orang	13.050.015.593	2547 orang	13.480.987.689	2405 orang	14.106.986.382	2405 orang	53.348.106.314	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	2	Jumlah Kekerasan Anak	691 orang	677 orang	4.859.882.723	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	677 orang	4.859.882.723	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Jumlah Kekerasan Perempuan	2424 orang	2296 orang	635142.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	2296 orang	635142.000	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		Jumlah Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah	0 keluarga	1050 keluarga	218113.000	0 keluarga	0	0 keluarga	0	0 keluarga	0	0 keluarga	0	1050 keluarga	218113.000	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		Jumlah Kota/Kabupaten Layak Anak mendapatkan predikat Madya	0 kota/kabupaten	0 kota/ka bupaten	1490402272	1 kota/ka bupaten	1716819688	2 kota/ka bupaten	1701095478	2 kota/ka bupaten	1943358882	2 kota/ka bupaten	2	6851676320	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2	2	Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan		12 %	0	24 %	549271750	36 %	605895288	48 %	665995717	60 %	729955398	2696323153	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	0 lembaga	5 lembaga	145205.000	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	5	145205.000	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2	2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			4334484689		0		0		0		4334484689	4334484689	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2	2	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			960014918		0		0		0		0	960014918		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 indeks	4	960.014.918	0 indeks	0	0 indeks	0	0 indeks	0	0	0	4 Indeks	960.014.918	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	3	Pangan														
2	3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat			48.0879 54.479	62.3658 53.250	124.807 208.790		91.9046 12.800		98.1186 98.408		425.284. 327.727			
		Persentase ketersediaan pangan	100 %	100 %	2.905.51 5.861	6.193.91 8.450	377.200 00.000	100 %	15.464.0 00.000	100 %	16.7368 00.000	100 %	79.020.2 34.311			DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		Persentase pangan yang bebas bahan berbahaya	95 %	95 %	45.182.4 38.618	53.893.2 79.934	85.352.2 08.790	96 %	74.690.6 12.800	96 %	79.611.8 98.408	96 %	338.730. 438.550			DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		Skor Pola Pangan Harapan	80,5 Skor	0 Skor	0	2.278.65 4.866	82 Skor	83 Skor	1735.00 0.000	84 Skor	1770.00 0.000	85 Skor	753.365 4.866			DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
2	3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan			61.845.4 05.399	76.011.5 20.128	90.565.4 78.646		87.513.4 87.910		98.649.9 84.517		414.585, 876.600			
		indeks kepuasan pelayanan kantor	3 Indeks	4 Indeks	61.845.4 05.399	76.011.5 20.128	90.565.4 78.646	4 Indeks	87.513.4 87.910	4 Indeks	98.649.9 84.517	4 Indeks	414.585, 876.600			DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
2	3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan			2.671.31 0.556	5.963.41 2.245	6.920.08 1.430		3.728.30 8.727		10.282.3 38.005		29.565.4 50.963			
		indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3 Indeks	4 Indeks	2.671.31 0.556	5.963.41 2.245	6.920.08 1.430	4 Indeks	3.728.30 8.727	4 Indeks	10.282.3 38.005	4 Indeks	29.565.4 50.963			DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
2	4	Pertanian														
2	4	Program Penyirapan Akuisisi Tanah			896.276. 088	0	0		0		0		896.276. 088			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase penyelesaian administrasi pertanahan	72,55 %	73,26 % 088	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	73,26 % 088	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
2	4	Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan		0	136250 00.000		2.312.00 0.000		2.125.00 0.000		2.312.00 0.000		20.374.0 00.000	
		Jumlah bidang tanah yang sudah terdata.	1028736 Bidang	103873 6 Bidang	112773 6 Bidang	136250 00.000	123373 6 Bidang	2.312.00 0.000	131823 6 Bidang	2.125.00 0.000	141784 1 Bidang	2.312.00 0.000	20.374.0 00.000	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
2	5	Lingkungan Hidup												
2	5	Program Pengelolaan Persampahan		1495.20 0.950.82 5	1896.46 9.371.70 6	0	0 ton/hari	1959.15 2.528.19 4	3.227.13 3.402.07 8	3.285.01 8.797.09 0	0	11862.9 750.49.8 93		
		Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA	6645.24 ton/hari	6551.8 9 ton/hari	0 ton/hari	0	0 ton/hari	0	0 ton/hari	0	6551.8 9 ton/hari	1495.20 0.950.82 5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Persentase pengurangan sampah di kota	14 %	0 %	17 %	1896.46 9.371.70 6	20 %	1959.15 2.528.19 4	3.227.13 3.402.07 8	3.285.01 8.797.09 0	26 %	10.367.7 74.099.0 68	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	5	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup		90204.1 30.345	100.110 176.688			107.110 889.056	114.651 651.290	122.616 766.881		534.693. 614.260		
		Indeks kepuasan pelayanan kantor	4 indeks	4 indeks	4 indeks	100.110 176.688	4 indeks	107.110 889.056	114.651 651.290	122.616 766.881	4 indeks	534.693. 614.260	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	5	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup		225.193. 195.642	554.113. 858.703			592.901. 828.812	634.404. 956.829	678.813. 303.807		2.685.42 714.379 3		
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 indeks	4 indeks	4 indeks	554.113. 858.703	4 indeks	592.901. 828.812	634.404. 956.829	678.813. 303.807	4 indeks	2.685.42 714.379 3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		103.774. 305.307	30.565.2 59.077			41.601.7 70.227	44.477.9 15.124	36.617.6 61.999		257.036. 911.734		
		Penurunan Tingkat Pencemaran Air	33,65 indeks	34,55 indeks	0 indeks	0	0 indeks	0	0 indeks	0	0 indeks	33.553.8 78.260	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Penurunan Tingkat Pencemaran Udara	40,23 indeks	40,43 indeks	0 indeks	0	0 indeks	0	0 indeks	0	0 indeks	27.857.3 01.482	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	0 %	10 %	713841 4583	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	713841 4583	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Presentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	30 %	40 %	352247 10982	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	352247 10982	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	36,77 indeks	0 indeks	0	3714 indeks	305652 59077	3751 indeks	416017 70227	3789 indeks	444779 15124	3827 indeks	366176 61999	3827 indeks	153262 606427	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
2	108	Program Penataan Administrasi Kependudukan			939436 02.376		988844 05508		968993 11476		991984 31872		103133 008306		492.058 759538	
		Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil	62 %	65 %	406295 95521	70 %	409005 99666	76 %	386199 56375	83 %	404438 28749	90 %	440205 97492	90 %	204614, 577803	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	49,5 %	59,3 %	53.3140 06855	67,1 %	56690,0 45342	75,7 %	57115,8 55101	82,9 %	57571,1 03123	89,7 %	57908,9 10814	89,7 %	282.599 921235	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase pemanfaatan data penduduk instansi/ lembaga pengguna data	22 %	0 %	0	40 %	129376 0500	60 %	116350 0000	80 %	118350 0000	100 %	120350 0000	100 %	4.844,26 0500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil			24904,7 39837		306745 39832		272014 87094		295836 26426		323501 99870		144.714, 593059	
		Indeks kepuasan pelayanan kantor	3 Indeks	3 Indeks	24904,7 39837	3 Indeks	306745 39832	4 Indeks	272014 87094	4 Indeks	295836 26426	4 Indeks	323501 99870	4 Indeks	144.714, 593059	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	6	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil			2323,73 7533		2404,14 7713		256918 6736		274715 0823		294019 3625		12.984,4 16430	
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	1 Indeks	2 Indeks	2323,73 7533	2 Indeks	2404,14 7713	3 Indeks	256918 6736	3 Indeks	274715 0823	3 Indeks	294019 3625	3 Indeks	12.984,4 16430	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2	7	Program Pemberdayaan Masyarakat			194962 52.582	207270 72.731	206806 28.802	20734.9 31775	204815 65.801		102120. 451691						
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	30 %	40 %	0	50 %	207270 72.731	60 %	206806 28.802	70 %	20734.9 31775	80 %	204815 65.801	80 %	82624.1 99109	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
			Jumlah Masyarakat yang Berhasil Diberdayakan	3350 orang	644 orang	4,741,95 2,703	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	644 orang	4,741,95 2,703	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		Jumlah RPTRA Aktif	290 lokasi	46 lokasi	14,754.2 99,879	0 lokasi	0	0 lokasi	0	0 lokasi	0	0 lokasi	0	336 lokasi	14,754.2 99,879	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
2	7	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa			730887 8850	0	0	0	0	0	0	0	0		730887 8850		
			indeks kepuasan pelayanan kantor	4 indeks	4 indeks	730887 8850	0 indeks	0	0 indeks	0	0 indeks	0	0 indeks	0	4 indeks	730887 8850	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	7	Program Pengelolaan Operasional Urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa			315628 720	0	0	0	0	0	0	0	0		315628. 720		
			indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 indeks	4 indeks	315628 720	0 indeks	0	0 indeks	0	0 indeks	0	0 indeks	0	4 indeks	315628. 720	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
2	8	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga			0	6980.71 9.778	5.128.02 2.977	5.556.29 9.218	6.158.47 8.984		23.823.5 20.957						
			Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	25 per 1000	24 per 1000	0	23 per 1000	328.585. 000	22 per 1000	342.908. 250	21 per 1000	357.703. 563	20 per 1000	373.007. 631	20 per 1000	1402.20 4.444	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	56,9 %	57,34 %	0	57,78 %	2.780.253.886	58,22 %	120.179.674,2	58,66 %	1.339.081.741	59,1 %	1483.584.039	59,1 %	6804.716.408	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		Unmetneed (PUS yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani)	18 %	14,7 %	0	14,5 %	2.779.476.392	14,4 %	3.052.277.560	14,2 %	3.357.238.337	14 %	3.705.692.884	14 %	12.894.685.173	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		Persentase keluarga yang terdata	51 %	61 %	0	69 %	803.638.500	77 %	145.195.425	84 %	154.555.197	90 %	164.232.956	90 %	1267.622.078	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		Persentase masyarakat yang mengetahui isu kependudukan	35 %	48,5 %	0	51 %	288.766.000	53 %	385.845.000	54,5 %	347.720.380	56 %	431.961.474	56 %	1.454.292.854	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	8	Program Pengendalian Penduduk			13.082,260.779		0		0		0		0		13.082,260.779	
		Total Fertility Rate (TFR)	2,2 TFR	2,18 TFR	13.082,260.779	0 TFR	0	0 TFR	0	0 TFR	0	0 TFR	0	218 TFR	13.082,260.779	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	8	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana			4.827,476.470		278.883.891,27		268.499.09.687		279.150.29707		306.791.73.838		118.159.978.829	
		Indeks kepuasan pelayanan kantor	4 indeks	4 indeks	4.827,476.470	4 indeks	278.883.891,27	4 indeks	268.499.09.687	4 indeks	279.150.29707	4 indeks	306.791.73.838	4 indeks	118.159.978.829	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	8	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional			1812,399.043		2.466.183.620		2.675,737.394		2.904.866.296		3.155.468.280		13.014,654.633	
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 indeks	4 indeks	1812,399.043	4 indeks	2.466.183.620	4 indeks	2.675,737.394	4 indeks	2.904.866.296	4 indeks	3.155.468.280	4 indeks	13.014,654.633	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	9	Perhubungan														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Target	Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	9	53	Program Pengendalian dan Penerbitan Lalu Lintas dan angkutan		349.603.996.798	439.845.193.951		434.507.722.946		584.578.356.330	528.829.491.771	2.337.364.761.796				
			persentase ruas jalan yang tidak macet (kecepatan rata-rata 35 Km/jam)	0 %	345.417.368.976	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	5 %	345.417.368.976	DINAS PERHUBUNGAN	
			Persentase pelanggaran oleh operator angkutan perairan	0 %	4.186.627.822	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	40 %	4.186.627.822	DINAS PERHUBUNGAN	
			Kecepatan Rata-Rata di 41 Koridor Jalan Utama pada Jam Sibuk	1997 Km/Jam	0 Km/Jam	439.845.193.951	22 Km/Jam	434.507.722.946	23 Km/Jam	584.578.356.330	528.829.491.771	25 Km/Jam	1.987.760.764.998		DINAS PERHUBUNGAN	
2	9	59	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum		151534.900.949	84.839.207.948		217.163.034.923		251.069.335.958	1.094.604.192.894	179.921.067.2672				
			Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari	413377 Penumpang per hari	0 Penumpang per hari	84.239.207.948	925.785 Penumpang per hari	216.563.034.923	117.9494 Penumpang per hari	143.3363 Penumpang per hari	1.094.604.192.894	176.7292 Penumpang per hari	1.644.475.577.1723		DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah penumpang angkutan umum sesuai Standar Pelayanan Prima yang terlayani per hari	413377 Penumpang per hari	493021 Penumpang per hari	151534.900.949	0 Penumpang per hari	0	0 Penumpang per hari	0	0	493021 Penumpang per hari	151534.900.949		DINAS PERHUBUNGAN	
			Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi	8,2 %	20 %	0	50 %	600.000.000	80 %	100 %	0	100 %	3.200.000.000		DINAS PERHUBUNGAN	
2	9	60	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Keolahbuanan		129.873.745.372	94.169.577.132		907.301.73.032		65.712.316.632	50.570.344.632	431.056.156.800				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Persentase armada angkutan perairan yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan	20 %	30 %	52.033.504.174	41 %	18.579.38532	61 %	15.679.36.632	82 %	21.079.36.632	100 %	16.279.36.632	100 %	123.652.252.602	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	0 Terminal Penumpang	0 Terminal Penumpang	77840241198	0 Terminal Penumpang	70653938600	0 Terminal Penumpang	69700436400	1 Terminal Penumpang	38782580000	3 Terminal Penumpang	27554508000	4 Terminal Penumpang	284.531.704.198	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Operator Angkutan Perairan yang Memenuhi Peraturan	0 %	5 %	0	15 %	4.936.10000	35 %	5.350.000000	65 %	5.850.000000	100 %	6.736.100000	100 %	22.872.200.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	9	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan			68.245.012.736		105.787.840.196		104.912.244.693		115.577.767.655		127.896.186.192		522.419.051.472	
		Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun	783 Kejadian	626 Kejadian	67.255.52.046	0 Kejadian	0	0 Kejadian	0	0 Kejadian	0	0 Kejadian	0	626 Kejadian	67.255.52.046	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah kecelakaan angkutan perairan per tahun	0 Kejadian	0 Kejadian	989.460.690	0 Kejadian	0	0 Kejadian	0	0 Kejadian	0	0 Kejadian	0	0 Kejadian	989.460.690	DINAS PERHUBUNGAN
		Presentase kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan korban jiwa per tahun	0,33 %	0,26 %	0	0,17 %	105.787.840.196	0,11 %	104.912.244.693	0,08 %	115.577.767.655	0,02 %	127.896.186.192	0,02 %	454.174.038.736	DINAS PERHUBUNGAN
2	9	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan			241.892.775.898		233.007.946.872		258.778.766.347		252.669.836.206		281.495.888.502		1.267.845.213.825	
		indeks kepuasan pelayanan kantor	4 Indeks	4 Indeks	241.892.775.898	4 Indeks	233.007.946.872	4 Indeks	258.778.766.347	4 Indeks	252.669.836.206	4 Indeks	281.495.888.502	4 Indeks	1.267.845.213.825	DINAS PERHUBUNGAN
2	9	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan			73.983.387.463		54.577.265.027		70.700.492.019		81.955.642.053		96.915.305.147		378.132.091.709	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	Target		Rp
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3 Indeks	4 73.983,3 87.463	4 Indeks	54.577,2 65.027	4 Indeks	70.700,4 92.019	4 Indeks	81.955,6 42.053	4 Indeks	96.915,3 05.147	4 Indeks	378.132. 091.709	DINAS PERHUBUNGAN			
2	10	Komunikasi dan Informatika																
2	10	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik			121.436. 880.107		151.421. 060.902		172.078. 116.960		145.153. 374.045		158.395. 333.668		748.484. 765.682			
		Persentase Respon SKPD Terhadap Aspirasi Warga Jakarta melalui Media Cetak	80 %	80 %	49.332,2 15.467	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	80 %	49.332,2 15.467	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
		Persentase Laporan Warga melalui Aplikasi Interaktif Jakarta Smart City	62 %	74 %	72.104,6 64.640	77 %	98.994,0 92.588	81 %	114.449. 023.897	87 %	81.835,4 48.336	87 %	88.305,5 15.221	87 %	455.688. 744.682	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
		Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan perlu dilakukan klarifikasi	80 %	0 %	0	83 %	25.628,4 81.111	86 %	271.435 55.173	90 %	28.808,9 13.301	93 %	30.554,5 39.202	93 %	112.135. 488.787	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
		Persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi	100 %	0 %	0	100 %	6.014,55 8.855	100 %	72.174,7 0,626	100 %	8.660,96 4.750	100 %	10.393,1 5.770,1	100 %	32.286,1 51.932	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
		Jumlah masyarakat yang mengonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta	304.361,4 orang	0 orang	0	440.000 0 orang	20.783,9 28.348	510.000 0 orang	23.268,0 67.264	580.000 0 orang	25.848,0 47.658	660.000 0 orang	29.142,1 21.544	660.000 0 orang	99.042,1 64.814	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
2	10	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika			35.208,4 8.662		5.680,66 0,321		66.378,4 4.729		6.922,18 3.877		7.382,18 1.987		30.143,7 19.576			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				4 Indeks	3.520.848.662	4 Indeks	5.680.660.321	4 Indeks	6.637.844.729	4 Indeks	6.922.183.877	4 Indeks	7.382.181.987	4 Indeks	30143.719.576	
		indeks kepuasan pelayanan kantor	3 Indeks	656.623.484		723.836.637		787.916.646		861.152.266		944.849.948		3.974.378.981	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	10	215	Program Pengelolaan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika		656.623.484	3 Indeks	723.836.637	4 Indeks	787.916.646	4 Indeks	861.152.266	4 Indeks	944.849.948	4 Indeks	3.974.378.981	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	10	239	Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)		150.970.303.586		272.014.030.445		305.201.531.020		327.002.086.438		351.534.975.089		140672.2926.578	
		Service Level Agreement Jaringan	90 %	0	98 %	111131.783.991	99 %	123.159.922.158	99 %	135.163.835.583	99 %	147.834.429.930	99 %	517.289.971.662	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		Service Level Agreement	95 %	141.472.053.235	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	141.472.053.235	95 %	141.472.053.235	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		Service Level Agreement Telekomunikasi Intra Pemerintah Daerah	95 %	0	96 %	178730.06.753	96 %	154.775.38.693	97 %	136.064.22.550	97 %	12.1916.91.832	97 %	59148.659.828	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		Service Level Agreement Data Center	98 %	0	99 %	100.187.895.474	99 %	142.343.126.652	99 %	153.246.519.542	99 %	165.356.76.1174	99 %	561134.302.842	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		Pemenuhan Standard LPSE dan SNI ISO/IEC 27001	65 %	0	100 %	312028.3066	100 %	618.285.000	100 %	497.857.122	100 %	343.285.000	100 %	4.579.710.188	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
		Jumlah cakupan layanan e-gov	28 sistem informasi	94.9825.0351	48 sistem informasi	39.7010.61161	58 sistem informasi	23.602.658.517	68 sistem informasi	24.487.451.641	78 sistem informasi	25.808.807.153	78 sistem informasi	123.098.228.823	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah														
2	11	36	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi		2.336.860.463		1987.615.963		2.022.764.188		2.058.097.824		2.099.963.342		10.505.301.780	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah Volume Usaha Koperasi	4533375000000 Rupiah	498671 250000 0 Rupiah	0 Rupiah	0 Rupiah	0 Rupiah	0 Rupiah	0 Rupiah	0 Rupiah	0 Rupiah	498671 250000 0 Rupiah	233686 0463 0 Rupiah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN		
		Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi	246 Koperasi	0 Koperasi	120 Koperasi	198761 5.963 0 Koperasi	120 Koperasi	202276 4188 0 Koperasi	120 Koperasi	205809 7824 0 Koperasi	120 Koperasi	726 Koperasi	816844 1317 0 Koperasi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN		
2	11	Program Pembinaan dan Pengembangan UKM			101385 417986	0	0	0	0	0	0		101385 417986			
		Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	0 UMKM	10000 UMKM	101385 417986	0 UMKM	0 UMKM	0 UMKM	0 UMKM	0 UMKM	0 UMKM	10000 UMKM	101385 417986	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN		
2	11	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah			130171 47245		128007 79790		139999 19385		131909 04.967		659819 06124			
		indeks kepuasan pelayanan kantor	3 indeks	4 indeks	130171 47245	4 indeks	128007 79790	4 indeks	139999 19385	4 indeks	131909 04.967	4 indeks	659819 06124	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN		
2	11	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah			482413 872		562225 284		563900 088		565658 633		274170 2.982			
		indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3 indeks	4 indeks	482413 872	4 indeks	562225 284	4 indeks	563900 088	4 indeks	565658 633	4 indeks	274170 2.982	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN		
2	11	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM			0		109427 298.210		107726 455.074		109496 946.623		437168 928.021			
		Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	62050 UMKM	0 UMKM	0	27799 UMKM	109427 298.210	27799 UMKM	107726 455.074	27799 UMKM	109496 946.623	27797 UMKM	437168 928.021	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN		
2	12	Penanaman Modal														
2	12	Program Peningkatan Penanaman Modal			3715.71 4.306		8650.00 0.000		8650.00 0.000		8650.00 0.000		8650.00 0.000	38315.7 14.306		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	55 Triliun	93,1 Triliun	3,715.714.306	100,2 Triliun	8.650.000.000	1078 Triliun	8.650.000.000	115,9 Triliun	8.650.000.000	124,5 Triliun	8650.000.000	124,5 Triliun	38.315,7 Triliun	14.306	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu			120.247.475.933		0		0		0		0		120.247.475.933		
		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,5 %	85,5 %	100.211.739.446	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	85,5 %	100.211.739.446		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	74 %	100 %	20.035,736.487	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	20.035,736.487		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	12	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal			120.031.743.771		143.098.000.000		145.214.000.000		148.177.000.000		151.009.000.000		707.529.743.771		
		indeks kepuasan pelayanan kantor	3 Indeks	4 Indeks	120.031.743.771	4 Indeks	143.098.000.000	4 Indeks	145.214.000.000	4 Indeks	148.177.000.000	4 Indeks	151.009.000.000	4 Indeks	707.529.743.771		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	12	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal			2.882,190.750		2.883.000.000		2.883.000.000		2.883.000.000		2.883.000.000		14.411.90.750		
		indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	2 Indeks	4 Indeks	2.882,190.750	4 Indeks	2.883.000.000	4 Indeks	2.883.000.000	4 Indeks	2.883.000.000	4 Indeks	2.883.000.000	4 Indeks	14.411.90.750		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu			0		163.322.776.000		137.635.276.000		167.922.026.000		161.283.651.000		630.163.729.000		
		Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	815 indeks	0 indeks	0	87 indeks	109.490.776.000	88,5 indeks	122.303.276.000	90 indeks	133.590.026.000	91,5 indeks	145.951.651.000	915 indeks	511.335.729.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	74 persen	0 persen	0	100 persen	53832,0 00,000	100 persen	15332,0 00,000	100 persen	34,332,0 00,000	100 persen	15332,0 00,000	100 persen	118828,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	13	Kepemudaan dan Olah Raga															
2	13	Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka		22,014,04,367		27518,527,541		28,826,866,087		31709,552,695		34,880,507,965		144,949,458,655			
			Jumlah pemuda yang berhasil dibina	460203 orang	33104 orang	22,014,04,367	25726 orang	27518,527,541	25726 orang	28,826,866,087	25726 orang	31709,552,695	25726 orang	34,880,507,965	136008 orang	144,949,458,655	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	13	Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga		444,422,507,539		642,558,011,156		1,063,227,313,116		550,772,270,952		652,221,232,849		3,353,320,133,561 ²			
			Jumlah masyarakat aktif berolahraga	8420367 orang	860871 orang	24,919,236,055	877293 orang	50,895,886,577	894209 orang	48,188,963,626	911741 orang	52,976,038,944	929950 orang	61,411,611,686	447406 orang	238,391,736,888	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh	3172 medali	1808 medali	259,669,497,680	1989 medali	171,320,449,400	2188 medali	698,319,082,824	2088 medali	204,136,500,604	1898 medali	204,809,889,452	1898 medali	1538,255,419,960	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga	588 persen	64,36 persen	159,833,773,804	6754 persen	420,341,675,179	7067 persen	316,719,266,666	72,12 persen	293,659,731,404	73,64 persen	385,999,731,711	73,64 persen	157,655,417,876 ⁴	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2	13	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kepemudaan dan olah raga		114,672,572,279		147,093,251,461		160,067,607,200		176,064,950,661		193,661,129,678		791,559,511,279			
			indeks kepuasan pelayanan kantor	0 NIK	65 NIK	114,672,572,279	70 NIK	147,093,251,461	75 NIK	160,067,607,200	80 NIK	176,064,950,661	85 NIK	193,661,129,678	85 NIK	791,559,511,279	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	13	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kepemudaan dan olah raga		383,099,266		619,582,898		671,964,755		739,161,231		813,077,353		3,226,688,550,3			
			indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	0 NIK	80 NIK	383,099,266	82,5 NIK	619,582,898	85 NIK	671,964,755	87,5 NIK	739,161,231	90 NIK	813,077,353	90 NIK	3,226,688,550,3	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	14	Statistik															
2	14	Program Pengembangan Data Statistik Sektor		2,720,234,962		16,772,738,369		15,530,012,206		12,583,013,426		13,641,314,769		61,247,313,732			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Rp	Target	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0 %	25 %	2.720.234.962	40 %	16.772.738.369	55 %	15.530.12.206	75 %	12.5830.13.426	95 %	13.641.314.769	61.247.313.732	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	15	Persandian														
2	15	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi			8.028.995.633		5.071.630.500		6.226.318.232		9.717.415.163		5.071.630.500	34.115.990.028		
		Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	0 %	20 %	8.028.995.633	20 %	5.071.630.500	20 %	6.226.318.232	20 %	9.717.415.163	20 %	5.071.630.500	34.115.990.028	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	16	Kebudayaan														
2	16	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kebudayaan			104.271.251.072		103.457.850.006		103.934.975.006		103.457.850.006		103.934.975.006	519.056.901.096		
		Indeks kepuasan pelayanan kantor	3 Indeks	4 Indeks	104.271.251.072	4 Indeks	103.457.850.006	4 Indeks	103.934.975.006	4 Indeks	103.457.850.006	4 Indeks	103.934.975.006	519.056.901.096	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2	16	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kebudayaan			3.005.997.180		3.005.997.180		3.005.997.180		3.005.997.180		3.005.997.180	15.0299.85.900		
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3 indeks	4 indeks	3.005.997.180	4 indeks	3.005.997.180	4 indeks	3.005.997.180	4 indeks	3.005.997.180	4 indeks	3.005.997.180	15.0299.85.900	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2	16	Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya			73.3550.73.475		70.8419.84.945		76.1665.33.310		81.698.536.510		88.0207.40.031	390.082.868.271		
		Jumlah Pelaku Seni Budaya yang dilatih	6760 orang	8040 orang	20.7517.21.581	10080 orang	22.8980.68604	11250 orang	24.7278.75.465	11770 orang	26.7606.63.010	51970 orang	29.0167.29.311	124.155.057.971	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah Pelaku Seni Budaya yang tampil	13520 orang	16080 orang	52.603.351.894	20160 orang	47.743.916.341	21660 orang	51.2886.57.845	23450 orang	54.9378.73.500	103850 orang	59.0040.10.720	265.577.810.300	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah unsur seni budaya yang dilestarikan	0 jenis	0 jenis	0	19 jenis	200.000.000	20 jenis	150.000.000	20 jenis	0	20 jenis	0	350.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	16	286	Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya		105061.761209		107080.130095		109300.335869		111742.562222		114429.011209	547613.800604	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		Persentase Cagar Budaya yang berhasil direvitalisasi		11 %	105061.761209	57 %	107080.130095	77 %	109300.335869	94 %	111742.562222	100 %	114429.011209	547613.800604		
2	16	287	Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata		76789.435552		76986.392439		77499.801823		78064.552145		78685.777499	388025.959458	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		Persentase Kelengkapan sarana Prasarana		35 %	76789.435552	28 %	76986.392439	8 %	77499.801823	5 %	78064.552145	2 %	78685.777499	388025.959458		
2	17		Perpustakaan													
2	17	19	Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan		105504.073046		675806.04944		651202.97319		103607.327052		809911.53402	422.803.455.763	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Rasio pengunjung perpustakaan		16,7 %	19,98 %	0	23,9 %	33.857543.439	28,58 %	37.583585.330	34,18 %	41.341943.863	40,89 %	45.999231.898		158.782.304.530
		Persentase perpustakaan binaan yang memenuhi SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	12 %	20 %	0	35 %	337230.61505	55 %	275367.11989	75 %	622663.83189	100 %	349919.21504	158.517.078.187	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Indeks minat baca	0 persen	30 persen	105504.073046	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	30 persen	105.504.073046	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	17	172	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan		245147.28338		295263.38266		327394.72089		357463.34229		390527.82584	161579.655506	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Indeks kepuasan pelayanan kantor		4 indeks	245147.28338	4 indeks	295263.38266	4 indeks	327394.72089	4 indeks	357463.34229	4 indeks	390527.82584	161579.655506		
2	17	230	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perpustakaan		576483.981		763756.030		840131.633		924144.796		101655.9275	412107.5715	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		4 indeks	576483.981	4 indeks	763756.030	4 indeks	840131.633	4 indeks	924144.796	4 indeks	101655.9275	412107.5715		
2	18		Kearsipan													
2	18	20	Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan		364300.29882		41412.29368		140703.002797		139176.379571		532874.09194	411008.050812		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase Pengelolaan Kearsipan di SKPD/UKPD dan BUMD sesuai standar	7,41 %	25,93 %	0	44,44 %	27782,1	62,96 %	125,710	81,48 %	122,685	100 %	351470	311325	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Persentase Arsip yang Siap Layan (e-arsip)	2,94 %	14,44 %	0	35,56 %	136291	56,67 %	14,992,0	77,78 %	164912	100 %	18140,3	63.252,6	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Indeks kepuasan layanan kearsipan	0 persen	75 persen	36430,0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	36430,0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
3		Urusan Pemerintahan Pilihan														
3	1	Kelautan dan Perikanan														
3	1	43	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan		952070	157833	660932	582628	123825	501222		123825	918264	753.221		DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
			Jumlah produksi perikanan budidaya	4462946	0	4412	212708	4434	23508,4	4456	195671	4478	184330	827795	72666	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
			Jumlah produksi perikanan	703786	952070	803000	0	0	0	0	0	0	0	703786	960100	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
			Jumlah Produksi Perikanan tangkap	212166,7	0	150552	128.633	152430	351877	153701	30465,0	155386	960719	290357	889834	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
			Jumlah Produksi Ikan Hias	19386028	0	207773	14.0250	213355	65304,4	218322	616971	223246	936672	234693	923	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
			Jumlah produksi benih ikan	74509415	0	795947	917.114	849981	1100,53	908101	132064	992583	1584,77	4923,07	1883	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan	5198,5 Ton	0 0 Ton	59591 5 Ton	822.357. 702	63790 7 Ton	113961 0933	1014.56 8474	73102 3 Ton	128081 5609	26476 0,2 Ton	4.25735 2,718	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
		Angka Konsumsi Ikan	35,5 Kg/Kapita/Tahun	0 Kg/Kapita/Tahun	37 Kg/Kapita/Tahun	5.373.06 4.445	385 Kg/Kapita/Tahun	5.09171 2.303	40 Kg/Kapita/Tahun	415 Kg/Kapita/Tahun	6.36164 3.155	415 Kg/Kapita/Tahun	22.6601 59.457	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
3	166	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kelautan dan perikanan		136182 05.761		169236 44.737		188690 29.827		218323 22.023		24.4287 15.540	956719 17.888			
		indeks kepuasan pelayanan kantor	3 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	169236 44.737	4 Indeks	188690 29.827	4 Indeks	218323 22.023	4 Indeks	24.4287 15.540	956719 17.888	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
3	224	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kelautan dan perikanan		317634. 822		344.759. 170		387964. 352		436.799. 440		492.023. 836	197918 1.620			
		indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	344.759. 170	4 Indeks	387964. 352	4 Indeks	436.799. 440	4 Indeks	492.023. 836	197918 1.620	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
3	246	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan		0		9598.84 3.488		101902 29165		10893.9 64.316		119572 38.524	42.640.2 75.493			
		Jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	98 Pelanggaran	0 Pelanggaran	78 Pelanggaran	914.565. 727	73 Pelanggaran	100902 3.936	68 Pelanggaran	65 Pelanggaran	129837 7.969	65 Pelanggaran	4.41392 1.407	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
		Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	140,9 Ha.	0 Ha.	1419 Ha.	8684.27 7.761	142,4 Ha.	918120 5.229	142,9 Ha.	143,4 Ha.	10658.8 60.555	143,4 Ha.	38.226,3 54.086	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
3	247	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan		6.47129 8134		0		0		0		0	6.47129 8134			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		jumlah pelanggaran pemantauan sumberdaya kelautan dan perikanan	98 Pelanggaran	83 Pelang garan	585.300.319	0 Pelang garan	0	0 Pelang garan	0	0 Pelang garan	0	0 Pelang garan	83 Pelang garan	585.300.319	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	
		luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang berhasil direhabilitasi	140,9 Ha.	141,4 Ha.	5885,997.815	0 Ha.	0	0 Ha.	0	0 Ha.	0	0 Ha.	141,4 Ha.	5885,997.815	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	
3	2	Pariwisata														
3	2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pariwisata			54604,151961		54604,151961		54604,151961		54604,151961		54604,151961	273020.759805		
		indeks kepuasan pelayanan kantor	3 indeks	4 indeks	54604,151961	4 indeks	54604,151961	4 indeks	54604,151961	4 indeks	54604,151961	4 indeks	54604,151961	273020.759805	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
3	2	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pariwisata			791968.114		791968.114		791968.114		791968.114		791968.114	395984.0570		
		indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3 indeks	4 indeks	791968.114	4 indeks	791968.114	4 indeks	791968.114	4 indeks	791968.114	4 indeks	791968.114	395984.0570	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
3	2	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata			56988,832930		8775,293042		103612.53626		11280,935144		456468.72618			
		Persentase Industri Pariwisata yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)	87,5 %	92 %	963153.430	95 %	114745.1993	97 %	1262,197.192	99 %	1388,416.912	100 %	1527,258.603	628847.8130	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		Persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat	49,07 %	58 %	473567.9500	75 %	6276,457.640	85 %	678183.8934	95 %	733766.2789	100 %	795498.5224	330866.24087	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah E-Tourism	0 pengunjung halaman website	0 pengunjung halaman website	0	150000.0	135138.3409	225000.0	148652.1750	300000.0	163517.3925	337500.0	179869.1317	627177.0401	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
3	2	259	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata			535.082.000	0		0		0		0		535.082.000		
			Jumlah usaha pariwisata hiburan	0 Industri	1669 Industri	535.082.000	0 Industri	0	0 Industri	0	0 Industri	0	0 Industri	1669 Industri	535.082.000		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	2	260	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			574.653.234.62	65.540.674.966		95.290.674.966		65.290.674.966		65.290.674.966	348.878.023.326			
			Jumlah Wisatawan Mancanegara	2600000 orang	280000 0 orang	36.984.833.309	294000 0 orang	36.984.833.309	308700 0 orang	36.984.832.4135 0 orang	36.984.833.309	340.341 7 orang	36.984.833.309	154.717 67 orang	184.924.166.545		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Wisatawan Nusantara	33000000 orang	360000 00 orang	20.480.490.153	385.200 00 orang	28.305.841.657	404.960 00 orang	44.2980 00 orang	28.305.841.657	501.720 00 orang	28.305.841.657	209.486 000 orang	133.703.856.781		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Objek Wisata Baru	0 Objek wisata	2 Objek wisata	0	3 Objek wisata	250.000.000	300.000.00.000	3 Objek wisata	0	2 Objek wisata	0	13 Objek wisata	30.250.000.000		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	3	3	Pertanian														
3	3	44	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan			98.181.609.140	62.680.002.856		131.094.024.713		79.729.615.479		52.868.456.284	424.553.708.472			
			Jumlah produksi benih padi	44 Ton	0 Ton	0	456 Ton	400.000.000	472 Ton	450.000.000	472 Ton	48 Ton	550.000.000	188 Ton	190.000.000		DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
			Jumlah Produksi Pertanian dan Peternakan	0 ton	69.229 ton	91.248.861.672	0 ton	0	0 ton	0 ton	0 ton	0 ton	0	69.229 ton	91.248.861.672		DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
			Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	0 kasus	0 kasus	0	0 kasus	22.444.929.753	0 kasus	72.453.94.593	0 kasus	0 kasus	7.310.812.319	0 kasus	43.750.070.720		DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
			Jumlah kasus penyakit menular strategis	12 kasus	12 kasus	68.776.91.863	0 kasus	0	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0	12 kasus	68.776.91.863		DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Jumlah pelanggaran bidang pertanian dan peternakan	10 kasus	55055605	8 kasus	209155518	8 kasus	445000000	7 kasus	502500000	7 kasus	562750000	7 kasus	1774461123	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	
		Jumlah produksi Tanaman produktif	36000 Bibit	0	36700 Bibit	2.981370066	36700 Bibit	2.954178575	37000 Bibit	3068893712		3.267361451	147400 Bibit	12271803804	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	
		Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	25000 ton	0	33063 ton	12922835269	38022 ton	13667179997	43725 ton	15255526129		17679657105	165094 ton	59525198500	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	
		Jumlah produksi dan pemasaran produk pertanian	98,99 ton	0	1094 ton	1744670200	114,68 ton	1925868850	120,04 ton	2126533692		2348880607	46939 ton	8145953349	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	
		Jumlah lokasi Agrowisata yang dikembangkan	3 Lokasi	0 Lokasi	8 Lokasi	762131448	10 Lokasi	838344593	12 Lokasi	922179052		5014396957	44 Lokasi	7537052050	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	
		Jumlah kasus pelanggaran bidang pertanian	8 kasus	0	6 kasus	400000000	4 kasus	600000000	2 kasus	700000000		800000000	0 kasus	2500000000	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	
		Jumlah produksi susu	4994597 liter	0	5196379 liter	2707576261	5300306 liter	3945704801	5406312 liter	8682025281		3943727810	21417436 liter	19279034153	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	
		Jumlah produksi daging	28814525 kg	0	31847633 kg	11404611591	34440014 kg	11613167895	35112014 kg	34954550000		5068005000	138267275 kg	63040334486	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	
		Jumlah produksi dan pemasaran produk peternakan	10000 ton	0	11000 ton	2161724552	12000 ton	6580482404	13000 ton	2080810375		1829450583	50000 ton	12652467914	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp			
		Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Brucellosis, AI, SE dan anthrax)	12 kasus	0 kasus	0	11 kasus	700.323.742	10 kasus	862.711.025	9 kasus	1002.011.446	8 kasus	1.120.016.355	8 kasus	3.685.062.568	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
		Jumlah pelayanan kesehatan hewan	8500 ekor	0 ekor	9000 ekor	189.331.400	9500 ekor	211.344.340	10000 ekor	233.278.774	21000 ekor	256.906.651	21000 ekor	890.861.165	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN			
		Jumlah omzet pemasaran bunga dan tanaman hias	920000000000 rupiah	0 rupiah	1020000000000 rupiah	3.651.343.056	1070000000000 rupiah	79.754.647.640	1120000000000 rupiah	2.952.372.963	1160000000000 rupiah	3.116.491.446	4370000000000 rupiah	89.474.855.105	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN			
3	162	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian		10.345.725.183	14.972.673.048	15.416.529.581	16.758.182.538	18.234.000.792	75.727.111.42	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN								
3	220	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian		3 Indeks	4 Indeks	10.345.725.183	14.972.673.048	4 Indeks	15.416.529.581	4 Indeks	16.758.182.538	4 Indeks	18.234.000.792	4 Indeks	75.727.111.42	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN		
3	3			334.549.696	356.726.196	392.398.816	431.638.697	474.802.567	1990.115.972	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN								
3	4	Kehutanan																
3	81	Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman		0	6.902.659.203	7.553.584.884	8.269.603.132	9.057.223.204	31.783.070.423	DINAS KEHUTANAN								
3		Indeks kepuasan masyarakat Pelayanan Pemakaman	80 %	80 %	82 %	83 %	85 %							87 %	31.783.070.423	DINAS KEHUTANAN		
3	82	Program Pengelolaan Pemakaman		123.849.420.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.849.420.109	DINAS KEHUTANAN		
3		indeks kepuasan masyarakat	80 %	80 %	123.849.420.109	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	123.849.420.109	DINAS KEHUTANAN		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	4	165	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan		152.393,760.892		107745,009922		115625,174.472		124.124,742.686		133.468,347.985		633.357,035.957	DINAS KEHUTANAN
			indeks kepuasan pelayanan kantor	4 indeks	152.393,760.892	4 indeks	107745,009922	4 indeks	115625,174.472	4 indeks	124.124,742.686	4 indeks	133.468,347.985	4 indeks	633.357,035.957	
3	4	223	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan		68.3460,92.270		66.368.359.414		72.3799,01.954		75.897.367.009		84.024.320.165		367.016,040.812	DINAS KEHUTANAN
			indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3 indeks	68.3460,92.270	3 indeks	66.368.359.414	3 indeks	72.3799,01.954	3 indeks	75.897.367.009	3 indeks	84.024.320.165	3 indeks	367.016,040.812	
3	4	248	Program Konservasi Flora dan Fauna		0		121.496,044.109		215.768,853.249		162.497,969.749		148.962,989.604		648.725,856.711	DINAS KEHUTANAN
			Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi	2132 fauna	2142 fauna	2162 fauna	199177,047.195	2172 fauna	144.246,983.090	2182 fauna	128886,904.279	2182 fauna	578723,518.624			
			Penambahan jumlah flora yang dikonservasi	52733 flora	52753 flora	52773 flora	150834,600.049	52793 flora	165918,06.054	52813 flora	18.250.986.659	52833 flora	20.0760,85.325	52833 flora	70.002.338.087	DINAS KEHUTANAN
3	4	249	Program Konservasi Satwa		116.028,745.134		0	0	0	0	0	0	0		116.028,745.134	DINAS KEHUTANAN
			Penambahan jumlah Satwa yang dikonservasi	2132 satwa	2142 satwa	0 satwa	0	0 satwa	0	0 satwa	0	0 satwa	0	0 satwa	116.028,745.134	
3	4	250	Program Pengelolaan Hutan		354.032,172.948		551323,939.972		655.202,251.181		780.653,068.801		929816,278.512		3.27102,7711414	DINAS KEHUTANAN
			Penambahan Rasio RTH Hutan	0,024 %	263.313,478.033	0,0115 %	520.500,000.000	0,0115 %	622.600,000.000	0,0115 %	745.120,000.000	0,0115 %	892.144,000.000	0,0785 %	3.043.667,7.478.033	
			Persentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara	93 %	907186,94.915	95 %	30.8239,39.972	96 %	32.602.251.181	97 %	35.533.068.801	97 %	37.672.278.512		227.350,233.381	DINAS KEHUTANAN
3	4	251	Program Pengelolaan Pertamanan		1.483.77,4.306.275		118158,3.367.853		138094,6.728.374		161594,4.820.894		189413,6.996.211		7.556.38,6.219.607	DINAS KEHUTANAN
			Penambahan Rasio RTH Taman	0,159 %	1.345.71,5.859.738	0,019 %	952.555,000.000	0,019 %	1.129.42,7.750.000	0,019 %	1.340.81,9.137.500	0,019 %	1.593.43,0.094.375	0,259 %	6.361.94,784.161	
			Persentase lokasi RTH Taman yang terpelihara	99 %	138.058,446.537	99 %	229.028,367.853	99 %	251.518,978.374	99 %	275.125,683.394	99 %	300.706,901.836	99 %	1.194.43,8.377.994	DINAS KEHUTANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	4	252	Program Pengelolaan Pemakaman		418.833.985.766		302.503.267.554		342.348.390.036		388.960.582.734		443.627.574.768	189.627.380.085.8		
			Penambahan Rasio RTH Makam	0,013 %	418.833.985.766	0,0046 %	159.787.932.421	0,0046 %	188.845.271.090	0,0046 %	223.703.670.428	0,0046 %	265.523.297.817	0,0454 %	1.256.669.415.752.2	DINAS KEHUTANAN
			Persentase lokasi RTH Makam yang terpelihara	83 %	0	89 %	142.715.335.133	90 %	153.503.118.946	90 %	165.256.912.306	91 %	178.104.276.951	91 %	639.579.643.336	DINAS KEHUTANAN
3	5		Energi dan Sumber Daya Mineral													
3	5	63	Program Pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan		10.4011.89.221		38.4213.06.595		314.956.784.461		378.057.080.114		36.6674.05.331	778.503.765.722		
			Persentase bangunan/gedung /sarana/prasaran a milik pemda yang memiliki SLO ketenagalistrikan	0 %	4.03182.1200	40 %	210.592.92.625	60 %	200.745.40.491	80 %	201.525.83.144	100 %	202.384.30.061	85.556.6.67.521		DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
			Persentase daya listrik terpasang di kepulauan seribu	67 %	6.237.06.8.021	67 %	4.429.71.3.970	73 %	267.929.713.970	87 %	330.929.713.970	100 %	4.429.71.3.970	613.955.923.901		DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
			bauran energi baru terbarukan	0 %	132.300.000	0,03 %	12.932.3.00.000	0,07 %	26.952.5.30.000	0,09 %	26.974.7.83.000	0,11 %	11.999.2.61.300	78.9911.74.300		DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
3	5	64	Program Peningkatan Pencahayaan Kota		107108.2850.000.4		756.373.334.128		772.546.388.079		848.864.845.199		928.364.748.253	4.377.23.2.165.66.3		
			Persentase cakupan pencahayaan kota	68,7 %	53.9656.777.464	78,93 %	555.770.646.128	85,95 %	561.913.565.679	92,98 %	608.118.058.679	100 %	655.834.016.557	2.921.29.306.450.7		DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
			persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system	79,78 %	531.426.072.540	100 %	200.602.688.000	100 %	210.632.822.400	100 %	240.746.786.520	100 %	272.530.731.696	14.559.910.115.6		DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
3	5	163	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan energi dan sumber daya mineral		52.8701.12.672		58.3070.08.811		63.3184.73.029		68.9844.35.691		75.2047.25.583	318.684.755.786		
			indeks kepuasan pelayanan kantor	3 Indeks	52.8701.12.672	4 Indeks	58.3070.08.811	4 Indeks	63.3184.73.029	4 Indeks	68.9844.35.691	4 Indeks	75.204.7.25.583	4 Indeks	318.684.755.786	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	5	221	Program Pengelolaan Kendaraan		23.5160 09807		15.5017 62.784		15.5275 35.003		16.5391 04.254		17.6264 37.068	88710.8 48.916	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	
			indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3 Indeks	23.5160 09807	4 Indeks	15.5017 62.784	4 Indeks	15.5275 35.003	4 Indeks	16.5391 04.254	4 Indeks	17.6264 37.068	4 Indeks 48.916		
3	5	253	Program Konservasi air tanah dan pengendalian penurunan muka tanah		15.0718 27759		33.1103 31450		35.892.4 56.751		33.2056 75.266		29.5053 33.095	146.785. 624.321	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	
			Jumlah bangunan gedung yang memenuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah	50 %	15.0718 27759	85 %	33.1103 31450	90 %	35.892.4 56.751	95 %	33.2056 75.266	100 %	29.5053 33.095	100 % 624.321		
3	6		Perdagangan													
3	6	38	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan		228.530. 830	16 Pasar	541.967. 223	0 Pasar	588.011 984	0 Pasar	599.938. 533	0 Pasar	649.857. 604	2.608.30 6.174	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN	
			jumlah pasar yang menjual produk ber SNI (Standar Nasional Indonesia)	14 Pasar	228.530. 830	0 Pasar	0	0 Pasar	0	0 Pasar	0	0 Pasar	16 Pasar	228.530. 830		
			Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat ukur yang diawasi	14 Pasar	0	0 Pasar	541.967. 223	18 Pasar	588.011 984	20 Pasar	599.938. 533	24 Pasar	649.857. 604	2.379.77 5.344	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN	
3	6	39	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan		527.931. 250		470.892. 675		500.233. 057		531.620 033		565.213. 890	2.595.89 0.905	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN	
			persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	100 %	527.931. 250	100 %	470.892. 675	100 %	500.233. 057	100 %	531.620. 033	100 %	565.213. 890	2.595.89 0.905		
3	6	40	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan		76593.3 1.176		7833.99 9.558		798100 4.495		8142.60 5.231		8312.06 1.448	39929.0 01908		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			95 %	96 %	765933 1176	97 %	783399 9558	98 %	798100 4.495	99 %	814260 5.231	100 %	8312.06 1448	100 %	399290 01908	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN
3	6	41			606258. 400		212955 8.400		219572 3.400		219572 3.400		2.265.19 6650		9392.46 0.250	
			40439181 98 USD	408435 7380 USD	606258. 400	412520 0954 USD	212955 8.400	416645 2963 USD	219572 3.400	420811 7493 USD	219572 3.400	425019 8668 USD	2.265.19 6650	425019 8668 USD	9392.46 0.250	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN
3	6	159			284509 84.013		308275 91296		334390 58.934		367849 55.489		644779 24.621		193.980 514.353	
			3 indeks	4 indeks	284509 84.013	4 indeks	308275 91296	4 indeks	334390 58.934	4 indeks	36784.9 55.489	4 indeks	64477.9 24.621	4 indeks	193.980 514.353	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN
3	6	217			223982. 956		319544. 758		320329 530		321153. 540		322.018. 752		1507.02 9.536	
			3 indeks	4 indeks	223982. 956	4 indeks	319544. 758	4 indeks	320329 530	4 indeks	321153. 540	4 indeks	322.018. 752	4 indeks	1507.02 9.536	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN
3	7															
3	7	34			15.334.8 67011		555395 05537		80.869.5 70.645		56.717.6 19007		57.584.0 79.388		266.045. 641.588	
			1630 Wirausaha	2000 Wirausaha	0	5560 Wirausaha	39200.0 00.000	5560 Wirausaha	39984.0 00.000	5560 Wirausaha	40783.6 80.000	5560 Wirausaha	41599.3 53.600	25870 Wirausaha	161.567. 033.600	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
			4,23 %	7,04 %	3,023.51 4.500	9,85 %	15.182.4 86.482	12,66 %	39.728.5 51.590	15,47 %	14.776.9 19.952	18,28 %	14.827.7 06.733	18,28 %	87.539.1 79.257	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
			0 %	14,6 %	12.311.3 52.511	29,1 %	11.570.1 9.055	43,7 %	11.570.1 9.055	58,3 %	11.570.1 9.055	72,8 %	11.570.1 9.055	72,8 %	169.394 28.731	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
3	7	35	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri		8104486.755	10421874.487	10749537.793	11094580.057	11457969.804	51828448.896							
			Persentase produk industri dengan standar SNI	70 %	72 %	7110676.355	74 %	7721874.487	76 %	8049537.793	78 %	8394580.057	80 %	8757969.804	80 %	40034638.496	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
			Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya	129 %	15,03 %	993810.400	28,77 %	2700.000.000	42,52 %	2700.000.000	56,26 %	2700.000.000	70 %	2700.000.000	70 %	11793810400	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
3	7	156	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian		11195242.398	12589551.869			12541059.942	13245874.594		14008696.594				63580.425.397	
			indeks kepuasan pelayanan kantor	3 Indeks	4 Indeks	11195242.398	4 Indeks	12589551.869	4 Indeks	12541059.942	4 Indeks	13245874.594	4 Indeks	14008696.594	4 Indeks	63580.425.397	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
3	7	214	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian		289645.410	305975.991			323601.579	342634.775		363198.588				1625056.343	
			indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3 Indeks	4 Indeks	289645.410	4 Indeks	305975.991	4 Indeks	323601.579	4 Indeks	342634.775	4 Indeks	363198.588	4 Indeks	1625056.343	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
4			Penunjang Urusan Pemerintahan														
4	1		Perencanaan														
4	1	78	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		32261698.568		0		0		0		0			32261698.568	
			Persentase usulan hasil rembuk RW yang diakomodir	45 Persentase	45 Persentase	698140.050	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	0 Persentase	0	45 Persentase	698140.050	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			persentase capaian indikator kinerja program dalam RPJMD yang berkinerja tinggi	0 %	75 %	20160654.140	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	75 %	20160654.140	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	45 %	45 %	8935751.375	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	45 %	8935751.375	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			persentase keselarasan RKPD terhadap KUA PPAS	100 %	100 %	535200.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	535200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		persentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	0 %	100 %	262.450.077	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	262.450.077	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		persentase data set informasi publik yang diverifikasi dan terpublikasi kepada masyarakat	0 %	50 %	1669502.926	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	50 %	1669502.926	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	1	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD			9652258039		10885971999		7284896427		7650368172		8034319106	43507813743		
		indeks kepuasan pelayanan kantor	4 Indeks	4 Indeks	9652258039	4 Indeks	10885971999	4 Indeks	7284896427	4 Indeks	7650368172	4 Indeks	8034319106	4 Indeks	43507813743	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	1	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD			279936904		307963395		295598142		331852559		320759714	1536110714		
		indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 Indeks	4 Indeks	279936904	4 Indeks	307963395	4 Indeks	295598142	4 Indeks	331852559	4 Indeks	320759714	4 Indeks	1536110714	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	1	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			0		22.207483.773		23.769598.707		24.959915.128		28.513723.376	99450720984		
		Rata-rata capaian program pembangunan daerah	65,6 %	0 %	0	85 %	22.207483.773	85 %	23.769598.707	85 %	24.959915.128	85 %	28.513723.376	85 %	99450720984	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan			0		264.625.650		279.180.061		294.534.964		310.734.387	1149075062		
		Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang Pemerintahan	79,5 %	0 %	0	85 %	264.625.650	85 %	279.180.061	85 %	294.534.964	85 %	310.734.387	85 %	1149075062	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada Bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Adapun penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 8.1.

8.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

8.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan indikator seni budaya dan olahraga.

8.2.2 Aspek Pelayanan Umum

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek Pelayanan Umum dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan non Dasar dan Urusan Pilihan.

8.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam hal ini Daya Saing Daerah digambarkan oleh Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Investasi dan Fokus Sumberdaya Manusia.

Target per tahun terhadap indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah dijabarkan pada tabel 8.2.

Tabel 8.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks Potensi Kerawanan Sosial	Nilai	25,52	24,97	24,95	22,19	22,00	22,47	22,47
2	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	36,30	35,52	34,74	33,96	33,18	32,40	32,40
3	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	95,18	95,39	95,59	95,79	96,00	96,20	96,20
4	Indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah	Nilai	4,97	5,28	6,08	6,77	7,32	7,91	7,91
5	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80,06	80,00	80,40	80,80	81,20	81,60	81,60

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	
6	Total Fertility Rate	Nilai	2,20	2,18	2,15	2,13	2,12	2,11	2,11
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,14	5,20	5,10	5,00	4,90	4,80	4,80
8	Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan	Wirausaha	73.453	19.304	46.554	46.554	46.554	46.552	205.518
9	Indeks ketahanan pangan	Nilai	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 80,5	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 81	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 82	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 83	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 84	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 85	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 85
10	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,78	3,58	3,38	3,18	2,98	2,78	2,78
11	Jumlah titik genangan banjir	Titik	15	12	7	6	5	0	0
12	Cakupan pelayanan air bersih	Persen	60,99	60,99	63,65	66,09	73,69	79,61	79,61
13	Cakupan pelayanan air limbah	Persen	14,33	15,93	17,04	20,49	23,00	26,44	26,44
14	Persentase penurunan volume sampah di kota	Persen	11	14	17	20	23	26	26
15	Jumlah titik macet	Titik	155	140	116	85	47	0	0
16	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public transportation Modal Share)	Persen	18	20	22	25	28	30	30

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	
17	Persentase penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan	Persen	0	0	0,6	0,6	0,6	1,6	3,4
18	Jumlah backlog hunian	Unit	302.319	294.756	293.290	291.696	290.584	287.755	287.755
19	Realisasi Nilai Investasi	Triliun Rupiah	55,00	93,10	100,20	107,80	115,90	124,50	124,50
20	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	Persen	43	42	41	40	39	38	38
21	Indeks profesionalitas ASN	Nilai	89,94	89,95	89,96	89,97	89,99	90,00	90,00
22	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	Persen	50	52	54	56	58	60	60
23	Nilai / Predikat AKIP	Predikat	B	A	A	A	AA	AA	AA
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	0	80,00	83,00	86,00	88,00	88,50	88,50
25	Skor EKPPD	Nilai	3,056	3,100	3,150	3,200	3,250	3,300	3,300
26	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	0	20	20	20	20	20	100
28	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	63,75	68,00	73,00	78,00	85,00	91,00	91,00
29	Indeks E Gov	Nilai	3,39	3,35	3,40	3,45	3,50	3,55	3,55

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	36,41	36,77	37,14	37,51	37,89	38,27	38,27
31	Penambahan Rasio RTH	Persen	0,18	0,0665	0,0351	0,0351	0,0351	0,0351	0,38
32	Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence)	Persen	0	4,30	4,185	4,099	3,985	3,870	3,870
33	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	RW	223	223	221	147	84	23	23
34	Jumlah inovasi yang layak diikuti sertakan dalam lomba berskala nasional	inovasi	-	1	2	2	2	2	9
35	Indeks Demokrasi	Nilai	70,85	73,35	73,85	74,35	74,85	75,35	75,35
36	Jumlah wisatawan	Orang	35.600.000	38.800.000	41.460.000	43.583.000	47.539.350	53.575.417	53.575.417
37	Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru / kreatif dan inovatif	Event	24	25	26	27	28	29	29
38	Jumlah cagar budaya yang dikonservasi	Objek	11	11	10	8	7	4	40

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
1.1	Pertumbuhan PDRB	Persen	6,29	6,3	6,6	6,7	6,9	7,0	7,0
1.2	Laju Inflasi	Persen	3,72	3,70	3,60	3,60	3,40	3,30	3,30
1.3	Indeks Gini	Nilai	0,409	0,407	0,405	0,403	0,401	0,399	0,399
1.4	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,78	3,58	3,38	3,18	2,98	2,78	2,78
1.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	79,60	80,00	80,40	80,80	81,20	81,60	81,60
1.6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	95,18	95,39	95,59	95,79	96,00	96,20	96,20
1.7	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.8	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	80,5	0	82	83	84	85	85
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Urusan Pemerintahan WajibPelayanan Dasar									
1.	PENDIDIKAN								
1.1	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	Lembaga	159	249	339	429	519	609	609
1.2	Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI	Persen	96,15	96,54	96,93	97,32	97,71	98,1	98,1
1.3	Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	Persen	84,79	86,73	88,67	90,62	92,59	94,5	94,5

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.4	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/ SMK/MA	Persen	71,87	74,65	77,42	80,2	82,95	85,75	85,75
1.5	Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)	Persen	83,07	86,35	89,63	92,91	96,19	99,5	99,5
1.6	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/ SMK/MA	Persen	71,87	74,65	77,42	80,2	82,95	85,75	85,75
1.7	Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI	Persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.8	Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs	Persen	0,11	0,09	0,07	0,05	0,03	0,01	0,01
1.9	Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/MA/SMK	Persen	0,36	0,29	0,22	0,15	0,08	0,01	0,01
1.10	Rata-rata lama sekolah penduduk jakarta	Tahun	10,88	11,1	11,32	11,55	11,77	12	12
1.11	Persentase penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bersekolah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.12	Persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus	Persen	49,04	61,8	74,54	87,28	100	100	100

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.13	Persentase kelulusan Jenjang SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.14	Persentase kelulusan Jenjang SMP/ MTs	Persen	99,98	100	100	100	100	100	100
1.15	Persentase kelulusan Jenjang SMA/ MA	Persen	99,99	100	100	100	100	100	100
1.16	Persentase kelulusan Jenjang SMK	Persen	99,98	100	100	100	100	100	100
1.17	Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI	Poin	70,11	72	74	76	78	80	80
1.18	Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMP/ MTs	Poin	62,32	66,85	67,63	68,41	69,19	70	70
1.19	Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMA/ MA	Poin	61,57	66,25	67	68	69	70	70
1.20	Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMK	poin	61,31	66,04	67	68	69	70	70

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.21	Persentase Sekolah terakreditasi A	Persen	-	70,03	77,52	85,02	92,51	100	100
1.22	Persentase guru yang kompeten	Persen	72,16	77,72	83,28	88,84	94,4	100	100
1.23	Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	81,3	85,04	88,78	92,52	96,26	100	100
2.	KESEHATAN								
2.1	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persen	81,82	0	100	100	100	100	100
2.2	Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini Penyakit Menular yang Direspon	Persen	86,27	-	85	85	85	85	85
2.3	Jumlah Kota/ Kabupaten yang Melaksanakan Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri	Kota/ Kabupaten	6	-	6	6	6	6	6

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
2.4	Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	Persen	73	-	95	95	95	95	95
2.5	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	Persen	11	-	40	53	65	72	72
2.6	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	Persen	100	-	100	100	100	100	100
2.7	Persentase Capaian Kinerja Program Kesehatan Sesuai Target	Persen	-	100	100	100	100	100	100
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)								
3.1	Presentase Penanganan Genangan Yang Kurang Dari 2 Jam	Persen	77	-	79	81	83	85	85
3.2	Persentase Pantai Di Kepulauan Seribu Yang Bebas Dari Abrasi	Persen	42,14	-	50,78	56,46	63,78	72,52	72,52

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
3.3	Presentase Cakupan Pelayanan Air Bersih	Persen	60	60,99	63,65	66,09	73,69	79,61	79,61
3.4	Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku	Persen	0	0	0,93	1,85	0	2,78	2,78
3.5	Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persen	15,93	0	17,04	20,49	23	26,44	26,44
3.7	Penambahan Road Ratio	Persen	7,1029	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	7,1189
3.8	Penambahan Luas jalur pejalan kaki	m2	1.815.875	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400	2.547.875
3.9	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Persen	96	0	96,5	97	97,5	98	98
3.10	Panjang Jalan yang Memiliki Prasarana Jaringan Utilitas (m)	m	79.125	0	30.000	30.000	30.000	30.000	199.125
3.11	Rasio kesesuaian rencana tata ruang	Persen	57	58	59	60	61	62	62
3.12	Persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani	Persen	90	90	90	90	90	90	90

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
3.13	Peningkatan Upaya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Persen	-	40	50	60	70	80	80
3.14	Peningkatan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Persen	-	5	10	15	20	25	25
3.15	Persentase pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar	Persen	50	52	54	56	58	60	60
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
4.1	Persentase Unit Perumahan Rakyat yang Terbangun	Persen	8,33	-	0,48	0,53	0,37	0,94	10,65
4.2	persentase perumahan rakyat yang lengkap sarana prasarana	Persen	17	-	35	57	78	100	100
4.3	persentase unit perumahan rakyat yang terpelihara/ terawat	Persen	13	-	18	39	66	87	87
4.4	Jumlah kawasan/ fasilitas permukiman yang ditata	RW Kumuh	-	10	40	56	46	48	200

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
4.5	Persentase kawasan/ fasilitas permukiman yang terpelihara	Persen	-	-	100	100	100	100	100
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
5.1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	0	55	55	70	80	90	90
5.2	Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21	Persen	1	5	10	15	20	25	25
5.3	Persentase penanggulangan kebakaran yang berhasil	Persen	82	82,5	83	83,5	84	84,5	84,5
5.4	Persentase Operasi Penyelamatan yang Berhasil	Persen	78	78,5	79	79,5	80	80,5	80,5
5.5	Persentase Peralatan / Perlengkapan Operasional Pemadaman dan Penyelamatan yang memenuhi standar mutu	Persen	0	0	38,05	57,91	78,48	100	100

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
5.6	Tingkat kerawanan kebakaran	Indeks	5,3	4,9	4,1	3,3	3	2,2	2,2
5.7	Persentase Mitigasi Risiko Bencana yang dilaksanakan	Persen	2,96	7,23	-	-	-	-	7,23
5.8	Persentase informasi kebencanaan yang disampaikan ke masyarakat	Persen	-	-	100	100	100	100	100
5.10	Persentase masyarakat dan aparaturnya yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen	0,38	-	0,54	0,62	0,7	0,78	0,78
5.11	Persentase Implementasi Fasilitas Publik Aman serta Ketahanan Masyarakat Jakarta terhadap Bencana	Persen	6,58	-	19,75	26,33	32,92	39,5	39,5
5.12	Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	Persen	11	-	100	100	100	100	100
5.13	Persentase kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1 kali 24 jam	Persen	100	-	100	100	100	100	100

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
5.14	Persentase petugas pemadam kebakaran yang kompeten	Persen	42,1	-	53,09	61,55	70,01	78,46	78,46
6.	SOSIAL								
6.1	Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya	Persen	4,8	14,9	38,7	64,5	75	85,4	85,4
6.2	Persentase (%) lokasi strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang bersih PMKS jalanan	Persen	87	89	92	94	97	100	100
6.3	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6.4	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Orang	2.714	2,744	3.194	3.644	4.094	4.545	4.545
6.5	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Lembaga	843	863	883	903	923	943	943

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
6.6	Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri	KPM	840	890	1475	2060	2645	3230	3230
6.7	Presentase prasarana dan sarana kesejahteraan sosial yang memenuhi standar pelayanan	Persen	40	51	64	77	87	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
1.	TENAGA KERJA								
1.1	Jumlah Pencari Kerja yang Berhasil Ditempatkan	Orang	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	105.000
1.2	Jumlah pencari kerja yang berwirausaha	Orang	962	0	3399	3399	3399	3399	13596

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.3	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	Persen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5
1.4	Jumlah kasus hubungan industrial yang masuk ke tingkat Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	55	100	100	100	100	100	500
1.5	Jumlah perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan	Perusahaan	3.540	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	18.500
1.6	Jumlah perusahaan yang menjalankan K3	Perusahaan	1.180	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	6.900
2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.1	Persentase korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	63,4	74,34	82,66	91	99,33	99,5	99,5
2.2	Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak	Orang	3.115	2.973	2.831	2.689	2.547	2.405	2.405
2.3	Jumlah Kota/ Kabupaten Layak Anak mendapatkan predikat Madya	Kota/ Kabupaten	-	-	1	1	2	2	2

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
2.4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Persen	-	12	24	36	48	60	60
3.	URUSAN PANGAN								
3.1	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.2	Persentase pangan yang bebas bahan berbahaya	Persen	95	95	95	95	96	96	96
4.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
4.1	Persentase pengurangan sampah di kota	Persen	14	-	17	20	23	26	26
4.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	36,77	-	37,14	37,51	37,89	38,27	38,27
5.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								
5.1	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	Persen	49,5	59,3	67,1	75,7	82,9	89,7	89,7
5.2	Persentase pemanfaatan data penduduk instansi/ lembaga pengguna data	Persen	22	-	40	60	80	100	100

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
6.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
6.1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	30	40	50	60	70	80	80
7.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
7.1	Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	Per 1000	25	24	23	22	21	20	20
7.2	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	Persen	56,9	57,34	57,78	58,22	58,66	59,1	59,1
7.3	Unmetneed (PUS yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani)	Persen	18	14,7	14,5	14,4	14,2	14	14
7.4	Persentase keluarga yang terdata	Persen	51	61	69	77	84	90	90
7.5	Persentase masyarakat yang mengetahui isu kependudukan	Persen	35	48,5	51	53	54,5	56	56
8.	URUSAN PERHUBUNGAN								
8.1	Kecepatan Rata-Rata di 41 Koridor Jalan Utama pada Jam Sibuk	Km/Jam	19,97	-	22	23	24	25	25

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
8.2	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari	Penumpang per hari	413.377	-	925.785	1.179.494	1.433.363	1.767.292	1.767.292
8.3	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi	Persen	8,2	20	50	80	100	100	100
8.4	Persentase armada angkutan perairan yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan	Persen	20	30	41	61	82	100	100
8.5	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Terminal Penumpang	-	-	-	-	1	3	4
8.6	Persentase Operator Angkutan Perairan yang Memenuhi Peraturan	Persen	-	5	15	35	65	100	100
8.7	Presentase kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan korban jiwa pertahun	Persen	0,33	0,26	0,17	0,11	0,08	0,02	0,02

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
9.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
9.1	Persentase Laporan Warga melalui Aplikasi Interaktif Jakarta Smart City	Persen	62	74	77	81	87	87	87
9.2	Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan perlu dilakukan klarifikasi	Persen	80	-	83	86	90	93	93
9.3	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
9.4	Jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/ saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta	Orang	3.043.614	-	4.400.000	5.100.000	5.800.000	6.600.000	6.600.000
9.5	Service Level Agreement Jaringan	Persen	90	-	98	99	99	99	99
9.7	Service Level Agreement Telekomunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persen	95	-	96	96	97	97	97

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
9.8	Service Level Agreement Data Center	Persen	98	-	99	99	99	99	99
9.9	Pemenuhan Standard LPSE dan SNI ISO/IEC 27001	Persen	65	-	100	100	100	100	100
9.10	Jumlah cakupan layanan e-gov	Sistem Informasi	28	38	48	58	68	78	78
10.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
10.1	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	UMKM	62.050	-	10.000	10.000	10.000	10.000	102.050
11.	URUSAN PENANAMAN MODAL								
11.1	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Triliun	55	93,1	100,2	107,8	115,9	124,5	124,5
11.2	Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks	81,5	85,5	87	88,5	90	91,5	91,5
11.3	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	Persen	74	100	100	100	100	100	100
12.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
12.1	Jumlah pemuda yang berhasil dibina	Orang	460.203	33.104	25.726	25.726	25.726	25.726	136.008

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
12.2	Jumlah masyarakat aktif berolahraga	Orang	8.420.367	8.608.714	8.772.937	8.942.091	9.117.418	9.299.504	44.740.664
12.3	Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh	Medali	3.172	1.808	1.989	2.188	2.088	1.898	1.898
12.4	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga	Persen	58,8	64,36	67,54	70,67	72,12	73,64	73,64
13.	URUSAN STATISTIK								
13.1	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	-	25	40	55	75	95	95
14.	URUSAN KEBUDAYAAN								
14.1	Jumlah Pelaku Seni Budaya yang dilatih	Orang	6.760	8.040	10.080	10.830	11.250	11.770	51.970
14.2	Jumlah Pelaku Seni Budaya yang tampil	Orang	13.520	16.080	20.160	21.660	22.500	23.450	103.850
14.3	Jumlah unsur seni budaya yang dilestarikan	Jenis	0	0	19	20	20	20	79
14.4	Persentase Cagar Budaya yang berhasil direvitalisasi	Persen	11	31	57	77	94	100	100
14.5	Persentase Kelengkapan Sarana Prasarana	Persen	35	22	28	8	5	2	65

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
15.	URUSAN PERPUSTAKAAN								
15.1	Rasio pengunjung perpustakaan	Persen	16,7	19,98	23,9	28,58	34,18	40,89	40,89
15.2	Persentase perpustakaan binaan yang memenuhi SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	Persen	12	20	35	55	75	100	100
16.	URUSAN KEARSIPAN								
16.1	Persentase Pengelolaan Kearsipan di SKPD/UKPD dan BUMD sesuai standar	Persen	7,41	25,93	44,44	62,96	81,48	100	100
16.2	Persentase Arsip yang Siap Layan (e-arsip)	Persen	2,94	14,44	35,56	56,67	77,78	100	100
FOKUS URUSAN PILIHAN									
1.	URUSAN PARIWISATA								
1.1	Persentase Industri Pariwisata yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)	Persen	87,5	92	95	97	99	100	100
1.2	Persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat	Persen	49,07	58	75	85	95	100	100
1.3	Jumlah E-Tourism	Pengunjung Halaman Website	-	-	1.500.000	2.250.000	3.000.000	3.375.000	10.125.000

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.4	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	2.600.000	2.800.000	2.940.000	3.087.000	3.241.350	3.403.417	15.471.767
1.5	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	33.000.000	36.000.000	38.520.000	40.496.000	44.298.000	50.172.000	209.486.000
1.7	Jumlah Objek Wisata Baru	Objek Wisata	-	2	3	3	3	2	13
2.	URUSAN PERTANIAN								
2.1	Jumlah produksi benih padi	Ton	44	-	45,6	47,2	47,2	48	188
2.2	Jumlah pelanggaran bidang pertanian dan peternakan	Kasus	10	10	8	8	7	7	7
2.3	Jumlah produksi Tanaman produktif	Bibit	36.000	-	36.700	36.700	37.000	37.000	147.400
2.4	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	Ton	25.000	-	33.063	38.022	43.725	50.284	165.094
2.5	Jumlah produksi dan pemasaran produk pertanian	Ton	98,99	-	109,4	114,68	120,04	125,27	469,39
2.6	Jumlah lokasi Agrowisata yang dikembangkan	Lokasi	3	-	8	10	12	14	44
2.7	Jumlah kasus pelanggaran bidang pertanian	Kasus	8	-	6	4	2	-	-
2.8	Jumlah produksi susu	Liter	4.994.597	-	5.196.379	5.300.306	5.406.312	5.514.439	21.417.436
2.9	Jumlah produksi daging	Kg	28.814.525	-	31.847.633	34.440.014	35.112.014	36.867.614	138.267.275

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
2.10	Jumlah produksi dan pemasaran produk peternakan	Ton	10.000	-	11.000	12.000	13.000	14.000	50.000
2.11	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Brucellosis, AI, SE dan anthrax)	Kasus	12	-	11	10	9	8	8
2.12	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	Ekor	8.500	-	9.000	9.500	10.000	21.000	21.000
2.13	Jumlah omzet pemasaran bunga dan tanaman hias	Rupiah	92.000.000.000	-	102.000.000.000	107.000.000.000	112.000.000.000	116.000.000.000	437.000.000.000
3.	URUSAN KEHUTANAN								
3.1	Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi	Fauna	2.132	2.142	2.152	2.162	2.172	2.182	2.182
3.2	Penambahan jumlah flora yang dikonservasi	Flora	52.733	52.753	52.773	52.793	52.813	52.833	52.833
3.3	Penambahan Rasio RTH Hutan	Persen	0,024	0,0085	0,0115	0,0115	0,0115	0,0115	0,0785
3.4	Penambahan Rasio RTH Taman	Persen	0,139	0,044	0,019	0,019	0,019	0,019	0,259
3.5	Penambahan Rasio RTH Makam	Persen	0,013	0,014	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0454
3.6	Persentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara	Persen	93	95	95	96	97	97	97
3.7	Persentase lokasi RTH Taman yang terpelihara	Persen	99	99	99	99	99	99	99

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
3.8	Persentase lokasi RTH Makam yang terpelihara	Persen	83	88	89	90	90	91	91
4.	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
4.1	Bauran energi baru terbarukan	Persen	-	-	0,03	0,07	0,09	0,11	0,11
4.2	Persentase bangunan/ gedung/sarana/ prasarana milik pemda yang memiliki SLO ketenagalistrikan	Persen	-	20	40	60	80	100	100
4.3	Persentase daya listrik terpasang di kepulauan seribu	Persen	67	67	67	73	87	100	100
4.4	Persentase cakupan pencahayaan kota	Persen	68,7	71,9	78,93	85,95	92,98	100	100
4.5	persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system	Persen	79,78	100	100	100	100	100	100
4.6	Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah	Persen	50	80	85	90	95	100	100

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
5.	URUSAN PERDAGANGAN								
5.1	Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrolagian yang diawasi	Pasar	14	-	18	20	22	24	24
5.2	Persentase Keluhan / Temuan Konsumen yang Ditinjaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang	Persen	95	96	97	98	99	100	100
5.4	Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	USD	4.043. 918.198	4.084. 357.380	4.125. 200.954	4.166. 452.963	4.208. 117.493	4.250. 198.668	4.250. 198.668
6.	URUSAN PERINDUSTRIAN								
6.1	Jumlah wirausaha industri baru	Wirausaha	1.630	2.000	5.560	5.560	5.560	5.560	25.870
6.2	Persentase jumlah IKM yang berkualitas	Persen	4,23	7,04	9,85	12,66	15,47	18,28	18,28
6.3	Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif	Persen	-	14,6	29,1	43,7	58,3	72,8	72,8

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
6.4	Persentase produk industri dengan standar SNI	Persen	70	72	74	76	78	80	80
6.5	Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya	Persen	1,29	15,03	28,77	42,52	56,26	70	70
7. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									
7.1	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	446.294,66	-	4.412,00	4.434,00	4.456,00	4.478,00	17.780,00
7.3	Jumlah Produksi Perikanan tangkap	Ton	212.166,76	-	150.552,00	152.430,00	153.701,00	155.386,00	612.069,00
7.4	Jumlah Produksi Ikan Hias	Ekor	19.3866.028	-	20.777.303	21.335.576	21.832.231	22.324.673	86.269.783
7.5	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	74.509.415	-	79.594.751	84.998.143	90.810.158	99.258.335	354.661.387
7.6	Jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan	Ton	5.198,50	-	5.959,15	6.379,07	6.827,57	7.310,23	26.476,02
7.7	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ Tahun	35,5		37	38,5	40	41,5	41,5
7.8	Jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pelanggaran	98	-	78	73	68	65	65
7.9	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	Ha	140,9	-	141,9	142,4	142,9	143,4	143,4

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
FOKUS FUNGSI PENUNJANG									
1.	PERENCANAAN								
1.1	Persentase capaian indikator kinerja program dalam RPJMD	Persen	-	85	85	85	85	85	85
1.2	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	Persen	65,6	-	85	85	85	85	85
1.3	Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang Pemerintahan	Persen	79,5	-	85	85	85	85	85
1.4	Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang Kesra	Persen	77,75	-	85	85	85	85	85
1.5	Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang SPKLH	Persen	69,3	-	85	85	85	85	85
1.6	Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang Perekonomian	Persen	78,2	-	85	85	85	85	85
1.7	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	Persen	100	-	100	100	100	100	100
1.8	Persentase keselarasan kegiatan dalam APBD dengan RKPD	Persen	100	-	100	100	100	100	100

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.9	Rata-rata capaian program OPD Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	91,63	-	91,8	91,8	92	92,1	92,1
2.	KEUANGAN								
2.1	Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset	Persen	99	-	100	100	100	100	100
2.2	Persentase Penyelesaian Aset Fasos Fasum dari pihak lain	Persen	95	99	99	99	99	99	99
2.3	Jumlah SKPD tertib pengelolaan aset daerah	SKPD/UKPD	720	720	720	720	720	720	720
2.5	Jumlah penerimaan hasil aset daerah yang dikerjasamakan	PKS	27	30	30	30	30	30	150
2.6	Jumlah piutang atas aset daerah yang dikerjasamakan	PKS	10	10	10	10	10	10	50
2.10	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Triliun Rupiah	35,359	39,77	46,155	50,48	55,43	61,63	61,63
2.11	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Miliar Rupiah	680,152	689,9	704,765	715,453	733,77	749,829	749,829

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
2.14	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP dan tepat waktu	Persen	-	100	100	100	100	100	100
2.15	Persentase penyelesaian tahapan penyusunan RAPBD	Persen	-	100	100	100	100	100	100



BAB IX

KEGIATAN STRATEGIS DAERAH



Panca Upaya Utama merupakan formulasi dalam rangka mewujudkan Jakarta yang “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”, yang memiliki 5 Upaya Utama, yakni : Pembangunan Manusia, Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, Peningkatan Integritas Aparatur, Pembangunan Kota Lestari, dan Pengembangan Jakarta Sebagai Simpul Kemajuan.

BAB KEGIATAN STRATEGIS DAERAH

IX

Pada Bab IX ini dijabarkan Kegiatan Strategis Daerah yang terangkum di dalam Panca Upaya Utama, baik yang merupakan bagian dari Kegiatan Strategis Nasional maupun kegiatan yang mendukung pencapaian Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2017-2022. Panca Upaya Utama merupakan formulasi dalam rangka mewujudkan Jakarta yang “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”, yang memiliki 5 Upaya Utama, yakni : Pembangunan Manusia, Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, Peningkatan Integritas Aparatur, Pembangunan Kota Lestari, dan Pengembangan Jakarta Sebagai Simpul Kemajuan. Selanjutnya Upaya Utama dimaksud diuraikan sebagai berikut.

Gambar 9.1

Panca Upaya Utama
Pembangunan Jakarta



9.1 Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia akan dilakukan melalui pengurangan kemiskinan sebesar 1 persen dari kondisi tahun 2017 sebesar 3,78 persen menjadi 2,78 persen pada tahun 2022, disertai dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, permuliaan perempuan, perlindungan anak dan peningkatan pelayanan kepada disabilitas, sebagaimana gambar 9.2 berikut :

Gambar 9.2

Panca Upaya Utama
Pembangunan Jakarta
Pembangunan Manusia



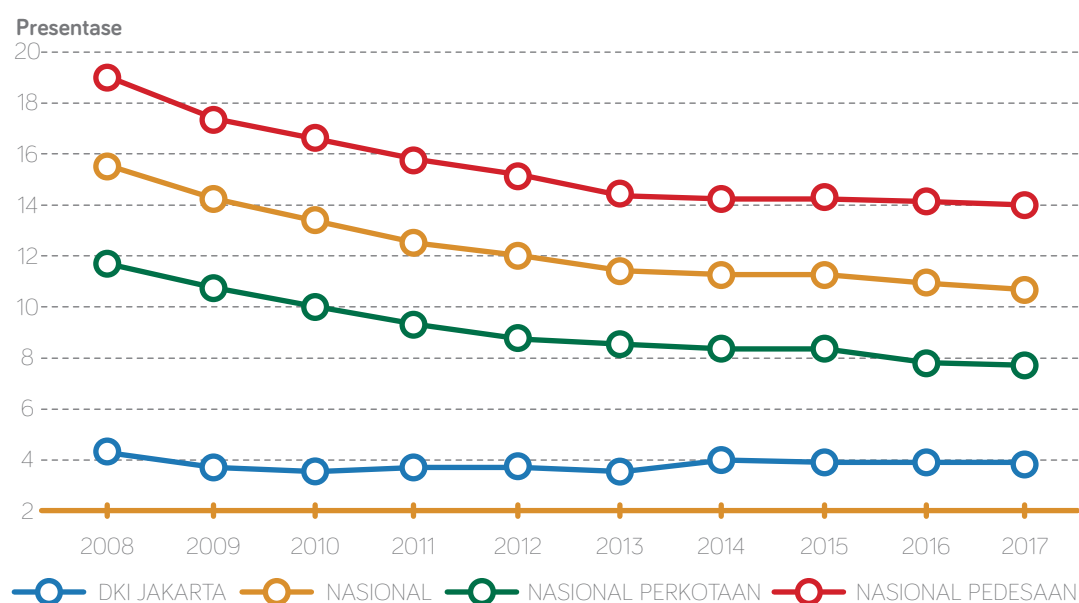
9.1.1 Pengentasan Kemiskinan

Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional sejak tahun 2007 hingga tahun 2017. Selama satu dekade terakhir, tingkat kemiskinan DKI Jakarta mencapai posisi paling rendah pada tahun 2010, yakni sebesar 3,48 persen. Berdasarkan data BPS per September 2017, tingkat kemiskinan DKI Jakarta tercatat sebesar 3,78 persen dengan total jumlah penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan, yakni sebanyak 393,13 ribu orang. Bila dibandingkan dengan data tahun 2007 (4,61 persen), tingkat kemiskinan di DKI Jakarta selama sepuluh tahun terakhir menurun sebesar 0,83 persentase poin.

Gambar 9.3

Tingkat Kemiskinan Tahun
2008 s.d. 2017

Sumber : Susenas, diakses
melalui *snapa.id*



Adapun upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemiskinan ditempuh melalui dua pendekatan, yakni :

1. Mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin: di antaranya berupa pemberian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Kelompok Masyarakat Miskin dan Rentan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang diperluas cakupannya untuk memastikan anak di luar sekolah dapat kembali mengenyam bangku pendidikan, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, program pengendalian harga komoditas pangan pokok, subsidi pangan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak murid PAUD dan Sekolah Dasar, akses terhadap hunian terjangkau, perluasan cakupan pelayanan air bersih, subsidi transportasi dengan program OK Otrip, dan sebagainya.

2. Meningkatkan produktivitas warga, khususnya produktivitas masyarakat miskin dan rentan: antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi, agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri; *One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship* (OK OCE) untuk melahirkan wirausahawan baru; penataan regulasi (perizinan, zonasi usaha, dsb) dan penguatan implementasinya untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; mendorong formalisasi usaha dari sektor-sektor usaha informal; pendampingan sekaligus perluasan akses terhadap modal dan pasar melalui kolaborasi dengan sektor swasta; hingga komitmen penggunaan produk lokal yang dihasilkan pelaku usaha binaan Pemerintah Daerah; pemberian pelatihan kerja pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD); serta peningkatan kapasitas berwirausaha bagi kelompok masyarakat termiskin.

Ada dua hal yang penting untuk menjamin efektivitas dari serangkaian program-program untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan tersebut yakni :

1. Memastikan ketepatan sasaran program dengan menggunakan Data Terpadu yang dikelola oleh Provinsi DKI Jakarta, yang bersumber salah satunya dari data nasional seperti BDT atau Basis Data Terpadu dalam rangka mempercepat peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.
2. Memastikan tata kelola yang baik atas mekanisme setiap program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasinya.

9.1.2 Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2017 pada jenjang pendidikan dasar mencapai angka di atas 90 persen, yakni untuk SD sebesar 103,37 persen dan SMP sebesar 93,88 persen. Namun untuk jenjang pendidikan menengah, yakni SMA dan SMK baru mencapai 79,51 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa masih tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah. Selain itu, bila dilihat Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia 16-18 tahun, menunjukkan angka yang masih rendah yaitu sebesar 70,83 persen. (Badan Pusat Statistik, 2017)

Masih terdapat ketimpangan antar wilayah dalam kualitas pendidikan di Jakarta, terutama jika kita melihat indikator APM pada jenjang sekolah menengah (SMU dan SMK sederajat). Walaupun APM SM DKI Jakarta pada tahun 2016 berada di angka 58,93 persen, namun jika dilihat per wilayah, Jakarta Utara hanya mencapai APM SM sebesar 51,8 persen. Capaian serupa juga terjadi di Jakarta Barat dengan capaian yang sedikit lebih baik, yakni 57,45 persen. Kondisi yang sangat jauh berbeda terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan capaian APM SM masing masing sebesar 75,7 persen dan 80,4 persen. Ketimpangan antar wilayah yang cukup besar ini mengindikasikan masih perlu adanya dorongan bagi wilayah - wilayah tertentu untuk mampu mengejar ketertinggalan dengan wilayah lainnya. (Neraca Pendidikan Daerah, 2016).

Pada periode 2017-2022 pembangunan pendidikan ditujukan untuk mendukung tercapainya Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan sebagai berikut: APM SD/MI dari 96,15 persen menjadi 98,1 persen, APM SMP/MTs dari 84,79 persen menjadi 94,5 persen, APM SMA/SMK/MA dari 71,87 persen menjadi 85,75 persen.

a. KJP PLUS

Dalam rangka menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan, dilakukan berbagai upaya diantaranya melalui pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan diprioritaskan bagi siswa miskin dan rentan pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta yang memenuhi kriteria yang ditentukan.

Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan dasar hingga menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau siswa yang tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan maka perlu dilakukan perluasan cakupan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar menjadi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Cakupan layanan KJP yang sebelumnya hanya menyasar anak usia sekolah yang sudah bersekolah, sedangkan pada KJP Plus diperluas cakupannya:

- Penjangkauan anak tidak sekolah.
- Pemanfaatan KJP Plus tidak hanya di pendidikan formal namun mencakup informal seperti PKBM dan Lembaga kursus keterampilan.
- Penyesuaian satuan biaya.
- Memperbaiki proses monitoring transaksi belanja.
- Pemberian bantuan tambahan sebagai persiapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pada tahun 2018-2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk mendistribusikan manfaat KJP Plus secara berkesinambungan.

b. Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi

Kondisi persaingan dan perkembangan yang begitu cepat, membutuhkan kontribusi pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Kebutuhan akan kompetensi terapan yang langsung dapat memenuhi kebutuhan industri dimungkinkan

melalui lulusan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi dalam prosesnya menekankan pada pengembangan praktek/ terapan dibandingkan dengan teoritis. Peserta didik diberikan kemampuan yang dapat memberikan solusi dan pengembangan kreativitas berbasis potensi individu, melalui Sekolah Menengah Kejuruan.

Strategi pengembangan pendidikan vokasi 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Relevansi Bidang Keahlian

Untuk mengatasi masalah kejenuhan jumlah lulusan bidang keahlian bisnis manajemen perlu dilakukan upaya moratorium bidang keahlian bisnis manajemen, dan mendorong sekolah untuk membuka kompetensi keahlian non bisnis manajemen seperti keahlian teknologi dan rekayasa teknologi, informasi dan komunikasi, kemaritiman, pariwisata dan industri kreatif.

2. Penguatan *Dual-system*

Penguatan *dual-system* pada kegiatan belajar mengajar di sekolah menengah kejuruan akan dilakukan dengan pendekatan:

- Meningkatkan akses mitra industri yang *relevan* melalui pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan Provinsi (MPKP) dan memperluas kerjasama aktif seluruh SMKN dan 90 persen SMKS dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).
- Melakukan sinkronisasi kurikulum berbasis SKKN dengan DUDI.
- Optimalisasi pelaksanaan program praktik kerja industri melalui skema *Plotting Dual system* dengan pola *day release/week release* dan standarisasi *dual system* dengan pola *block release*.
- Penerapan pembelajaran berbasis *Teaching Factory* (TeFa).

3. Sertifikasi kompetensi peserta didik

Untuk Penjaminan kualitas lulusan sekolah menengah kejuruan akan dilakukan melalui peningkatan jumlah SMK yang dibentuk menjadi lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) sebanyak 75 Lembaga, pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK), assesor dan sertifikasi kompetensi lulusan SMK dengan target pada tahun 2022 sebanyak 80 persen.

4. Perluasan akses

Untuk perluasan akses pada pendidikan kejuruan akan dilakukan dengan upaya pembangunan 42 Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMK negeri dan penambahan 75 unit Ruang Kelas Baru (RKB) pada gedung sekolah yang sudah ada.

5. Revitalisasi peralatan SMK

Masih banyak peralatan praktikum di SMK yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi yang digunakan di industri dan juga rasio peralatan yang tidak berimbang dengan jumlah siswa, maka perlu dilakukan revitalisasi dengan target pada tahun 2022 mencapai 90 persen SMKN memiliki peralatan praktik terstandar sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan industri.

c. Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan

Dalam rangka pencapaian elemen pertama Panca Upaya Utama mengenai Pembangunan Manusia untuk Urusan Pendidikan dalam rangka memastikan semua anak di DKI Jakarta mendapatkan pendidikan yang berkualitas di jalur manapun, melalui perlakuan yang setara terhadap sistem, peserta didik, tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memprioritaskan peningkatan kualitas prasarana pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan, berupa rehab/ bangun 318 gedung SD Negeri, 50 gedung SMP Negeri, 8 gedung SMA Negeri, serta 9 gedung SMK Negeri berkualitas. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan menjadikan Jakarta yang bebas gedung sekolah yang rusak dan seluruh gedung sekolah berfungsi dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dengan membangun satuan pendidikan khusus untuk peserta didik dengan berkecerdasan/bakat istimewa pada semua jenjang pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk melaksanakan Tahapan pendirian sekolah bagi peserta didik dengan berkecerdasan/bakat istimewa.

Selanjutnya diupayakan peningkatan jumlah siswa lulusan jenjang pendidikan Menengah (SMA/SMK) yang melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam/luar negeri melalui :

1. Pemberian KJMU bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan berlaku
2. Peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah
3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar untuk pelaksanaan *Try Out* tes masuk perguruan tinggi.
4. Meningkatkan kerjasama (MOU) dengan universitas di dalam negeri dan luar negeri.

Selain peningkatan jumlah siswa lulusan jenjang pendidikan Menengah (SMA/SMK) yang melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, upaya penjaminan mutu kualitas pendidikan juga dilakukan dengan mengidentifikasi capaian kualitas pembelajaran. Hal tersebut diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain : rata-rata nilai Ujian Nasional, prosentase kelulusan, dan prosentase sekolah terakreditasi A. Selain beberapa indikator tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berperan aktif mengikuti pula *Test Programme for*

International Student Assessment (PISA) untuk mengukur mutu pendidikan di DKI Jakarta. Hasil Tes PISA diharapkan dapat menggambarkan bagaimana sistem pendidikan diterapkan di Jakarta dan menjadi daya dorong untuk merubah pola pembelajaran kearah “*critical thinking and problem solving, creative, communication, and collaboration*”.

Study PISA dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu tiga tahun oleh negara-negara OECD. Studi sebelumnya pada tahun 2015, sekolah di Provinsi DKI Jakarta yang terlibat dalam survei hanya empat sekolah. Pada tahun 2018, Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terpilih sebagai wilayah *oversample*, dimana ada 60 sekolah di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi sample survei PISA 2018. Untuk meningkatkan jumlah sekolah yang dapat mengikuti tes PISA perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bimbingan teknis dan pendampingan pada sekolah survei PISA
2. Uji soal PISA pada seluruh sekolah
3. Evaluasi hasil survei dan uji soal PISA
4. *Workshop* model pembelajaran dan penilaian variatif dengan mengacu pada soal-soal dalam survei PISA

d. Pembentukan BLUD

- BLUD *Endowment fund* atau Dana abadi

BLUD *Endowment fund* atau Dana abadi adalah sebuah kumpulan dana yang dikelola oleh sebuah lembaga untuk tujuan-tujuan sosial yang ditetapkan oleh penyumbang dana (donor) dan pengurus lembaga. Ada beberapa sumber pendanaan untuk mengembangkan *Endowment fund* antara lain pemerintah, perorangan, swasta atau sumber publik lainnya.

Endowment fund atau dana abadi dapat menjadi alternatif pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*). Hal ini sudah dilakukan oleh Pemerintah pusat dengan membuat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan serta membentuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai sebuah lembaga non eselon yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan ditetapkan menjadi instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Pusat dalam mengembangkan *endowment fund* pendidikan, maka DKI Jakarta akan mengembangkan BLUD *endowment fund* pendidikan dimana dana inisiasinya berasal dari APBD. Pemanfaatan *endowment fund* ditujukan untuk keberlanjutan program pendidikan bagi generasi berikutnya di Provinsi DKI Jakarta. Pembentukan BLUD *endowment fund* di Provinsi DKI Jakarta mengacu pada peraturan yang berlaku.

- BLUD Pendidikan

Untuk mempromosikan peningkatan kualitas layanan pendidikan diperlukan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang dikelola secara profesional dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi, dan efektifitas. Sekolah menyediakan jasa layanan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan keuangan badan layanan daerah, bahwa pelayanan pendidikan merupakan jenis layanan umum yang dapat memenuhi persyaratan substantif penerapan BLUD.

Strategi pengembangan BLUD Pendidikan yang ditujukan untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan di Jakarta melalui :

- 1) Inisiasi penerapan pola keuangan BLUD pada pelayanan pendidikan sebagai berikut :
 - o BLUD SMK, dapat vertikal maupun horizontal.
 - o BLUD SMA, dapat vertikal maupun horizontal, dalam lima tahun terwujud model BLUD SMA yang dimulai dengan 50 SMA Negeri.
 - o BLUD SMP, dapat vertikal maupun horizontal dalam lima tahun terwujud model BLUD SMP yang dimulai dengan 100 SMP Negeri.
- 2) Bila BLUD sudah berjalan baik, maka cakupan sekolah bisa mengikutsertakan sekolah swasta.

e. Program Peningkatan Kualitas Madrasah dan Sekolah Swasta Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan semua anak di Jakarta mendapatkan pendidikan yang berkualitas di jalur manapun mereka menempuh pendidikan. Oleh karena itu, perhatian untuk peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya ditujukan kepada sekolah-sekolah yang selama ini berada dalam pembinaan pemerintah daerah, namun juga kepada semua satuan pendidikan baik Madrasah dan Sekolah Swasta yang telah memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Pada Tahun 2017 sebanyak 55 persen jumlah tenaga pendidik yang merupakan Guru Swasta dan mengajar di 4.787 Sekolah Swasta. Sekolah swasta memiliki peran yang besar dalam penyediaan layanan pendidikan di DKI Jakarta. Disisi lain, sebanyak hampir 200 ribu anak di Jakarta bersekolah di 804 madrasah negeri dan swasta. Dari segi tenaga pendidik, terdapat hampir 11 ribu guru yang mengajar baik di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berupaya untuk memastikan bahwa di satuan pendidikan manapun anak Jakarta belajar, sekolah atau madrasah, formal atau non formal, akan mendapatkan tenaga pendidik yang berkualitas, sarana prasarana yang baik serta kesempatan untuk berkembang tanpa adanya perbedaan dalam hak Pendidikan yang berkualitas.

f. Pengembangan dan Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta penunjangnya.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini untuk usia 0-6 tahun. Taman Penitipan Anak juga bisa dikatakan sebagai wahana asuhan kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk memberikan layanan kebutuhan anaknya, yang berupa kebutuhan kasih sayang, pendidikan, bersosialisasi dengan teman agar anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan orang tua. Sampai tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta terdapat 4590 lembaga PAUD yang terdaftar di Dapodik, dengan jenis layanan yang terdiri dari 18 TK Negeri, 2389 TK Swasta, 12 TPA, 501 KB, 10 TPA dan 1668 SPS.

Untuk mendekatkan layanan pendidikan anak usia dini dengan orang tua yang bekerja, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dan memfasilitasi TPA di gedung kantor dan pasar. Penyediaan TPA akan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional pendidikan dengan sasaran :

1. Meningkatkan akses TPA yang terintegrasi dengan ruang laktasi di gedung perkantoran dan pasar
2. Memperkuat manajemen TPA Negeri dengan pendampingan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

3. Menjadi acuan bagi penyelenggaraan TPA di Provinsi DKI Jakarta.
4. Menjadi wahana pembelajaran bagi para pendidik yang tengah magang baik secara mandiri maupun dari PAUD dan Dikmas.
5. Memberikan tempat tugas di TPA Negeri bagi guru DPK di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta yang selama ini bertugas di TK Swasta.

9.1.3 Kesehatan

a. KJS PLUS

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dalam Pasal 16a ayat (1) dijelaskan bahwa iuran jaminan kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan serta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan dibayar oleh Pemerintah Daerah. Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2016 Tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayarkan premi BPJS bagi masyarakat yang ber-KTP dan KK DKI Jakarta yang bersedia dirawat di ruang perawatan rumah sakit kelas III pada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Selain pembayaran premi ke BPJS untuk PBI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan anggaran untuk pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), antara lain membiayai klaim dari Ambulans Gawat Darurat, Palang Merah Indonesia (PMI) untuk pengelolaan darah, Kejadian Luar Biasa/ Bencana (yang telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur).

Untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta/ UHC bagi penduduk DKI Jakarta pada tahun 2019 sesuai dengan target program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pendataan di tingkat kelurahan bagi penduduk yang belum mempunyai JKN. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Cakupan 100 persen Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) di tahun 2019.

Dalam rangka peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat DKI Jakarta, pemerintah provinsi DKI Jakarta terus memperluas pelayanan jaminan kesehatan termasuk pemeriksaan visum bagi korban kekerasan. Selain itu juga akan diberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) kepada peserta PBI sebagai upaya deteksi dini penyakit tidak menular dan penyakit menular.

b. Fasilitas Kesehatan Masyarakat

Upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkesinambungan, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif, dengan tetap tidak mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan masyarakat yang terus dikembangkan adalah berupa layanan preventif promotif yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan masyarakat yang kompeten (sarjana kesehatan masyarakat, ahli gizi, epidemiolog, sanitarian dan tenaga kesehatan masyarakat lainnya) untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya upaya tersebut dikombinasikan secara komprehensif melalui pendekatan *Continuum of Care* pada semua tingkatan usia dalam kerangka besar program OK O-Care (One Kelurahan *with Outstanding Care*), yang diselenggarakan dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Pelaksanaan pola pelayanan kesehatan masyarakat inilah yang akan dikembangkan di setiap kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, dengan demikian akan terbentuk 267 fasilitas kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagai dasar peningkatan status kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 9.4

Skema OK O-Care

Sumber : Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta, 2017



9.1.4 Permuliaan Perempuan, Perlindungan Anak & Disabilitas

a. Permuliaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berbagai permasalahan masih dihadapi oleh perempuan dan anak, tidak hanya kekerasan fisik, psikis, seksual, isu gender, isu narkoba, *trafficking*, perlindungan tenaga kerja perempuan, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, isu lansia, disabilitas, tetapi juga persoalan perempuan dan anak yang terjadi pada saat konflik sosial maupun kondisi darurat bencana. Disamping itu kondisi perempuan dan anak dalam berbagai sektor pembangunan masih tertinggal, sehingga kesetaraan dan keadilan gender masih perlu ditingkatkan.

Melihat kondisi tersebut, permasalahan perempuan dan anak ini menjadi isu lintas sektor yang harus diselesaikan dengan melibatkan berbagai pelaku pembangunan, baik pemerintah tingkat pusat, daerah, akademisi, lembaga masyarakat maupun dunia usaha.

Sebagai upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemprov DKI Jakarta menegakkan aturan yang telah ditetapkan, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang berorientasi untuk mewujudkan pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak.

Upaya penanganan penurunan jumlah kekerasan perempuan dan anak dapat dioptimalkan melalui :

- 1) Meningkatkan pemahaman gender kepada para pemangku kepentingan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
- 2) Meningkatkan pelayanan komprehensif dan terintegrasi kepada korban kekerasan dan TPPO secara optimal dengan memberikan layanan rumah aman bagi masyarakat di wilayah Kota/Kabupaten serta layanan kesehatan dan pemeriksaan visum di Puskesmas dan RSUD Provinsi DKI Jakarta melibatkan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan.
- 3) Menggalakkan upaya preventif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diantaranya menambahkan materi pendidikan reproduksi dan kekerasan pada perempuan dan anak sejak usia dini.
- 4) Mengefektifkan Layanan Permuliaan Perempuan dan Perlindungan anak pada 44 Kecamatan dan pada pusat pelayanan terpadu.

b. Pemberdayaan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, dalam bentuk pelayanan sosial guna

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Untuk membantu meringankan biaya hidup mendasar bagi lansia yang tidak mampu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang diberikan dalam bentuk uang tunai melalui sistem kartu perbankan.

Provinsi DKI Jakarta berupaya melakukan inovasi dan menjalankan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat undang - undang dimana pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, disebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib untuk memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Adapun upaya yang akan dilakukan meliputi dan tidak terbatas pada : peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pelayanan dasar, pelayanan publik dan kesempatan kerja/berusaha.

9.1.5 Kepemudaan dan Olahraga

a. Stadion Olahraga Bertaraf Internasional

Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional direncanakan pada lokasi Taman BMW, sebagai pengganti stadion Sepak Bola Lebak Bulus yang sudah beralih fungsi menjadi depo MRT. Selain lapangan sepak bola, stadion ini dilengkapi pula dengan sarana olahraga atletik dan olahraga air.

Stadion ini memanfaatkan lahan seluas 66,6 ha yang terdiri dari 22 Ha daratan, 30,7 Ha berupa waduk, dan 7,2 Ha merupakan lahan di sekeliling waduk dan hutan kota. Rencana pembangunan stadion ini akan menggunakan skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah akan bekerjasama dengan konsultan dan tenaga ahli untuk melakukan pendampingan dan pengawasan melekat.

Adapun rancangan awal desain Stadion Olahraga Bertaraf Internasional dimaksud adalah sebagai berikut (dimana saat ini sedang dilakukan review atas rancangan awal dimaksud) :

Gambar 9.5

Desain Stadion Olahraga
Bertaraf Internasional

Sumber : Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi DKI Jakarta,
2017



b. Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun

Penyelenggaraan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun meliputi kegiatan Olahraga yang dapat diikuti masyarakat sebagai sarana interaksi sosial antar sesama masyarakat dan menjadi ajang silaturahmi serta diharapkan menjadikan kegiatan olahraga sebagai bagian dari kegiatan sehari – hari. Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun sebagai upaya untuk mendorong masyarakat melakukan interaksi antarwarga di samping sebagai upaya mencari bakat dan potensi olahraga dimasyarakat, juga untuk menunjang prestasi olahraga nasional dan internasional secara maksimal.

9.2 Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur disajikan menjadi dua bagian yakni Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur.

9.2.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi diupayakan melalui peningkatan ketahanan pangan, pengembangan industri kreatif, peningkatan kewirausahaan dan kesempatan kerja, serta peningkatan kemudahan dalam berusaha (ease of doing business), sebagaimana dapat dilihat pada gambar 9.6 berikut :

Gambar 9.6

Panca Upaya Utama
Pembangunan Jakarta
Ekonomi



a. *Ease of Doing Business*

Pada dasarnya, upaya peningkatan pelayanan publik dapat direalisasikan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, memanfaatkan/penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan membangun sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan dan manajemen pemerintahan, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik. Hal tersebut juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah tentang “*Ease of Doing Business*”, yang mengupayakan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Saat ini peringkat indeks *Ease Of Doing Business* Indonesia sudah cukup baik, yakni pada peringkat 91.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait “*ease of doing business*”, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengupayakan dengan memperbaiki komponen-komponen “*ease of doing business*” yang menjadi domain pemerintah provinsi, antara lain menyederhanakan tahap-tahap izin konstruksi, mempercepat waktu memulai usaha, dan menyederhanakan proses pendaftaran properti untuk usaha. Selain itu, juga akan dilakukan peningkatan kualitas pelayanan *on-line*, baik untuk perizinan maupun non perizinan, serta terus mengupayakan efektifitas daripada Mall Pelayanan Publik.

b. *Industri Kreatif*

Jakarta selain merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia, juga merupakan pusat jasa dan perdagangan. Meskipun memiliki potensi yang strategis, Jakarta dihadapkan pada kondisi keterbatasan lahan dan relatif tingginya biaya sumber daya manusia. Dengan kondisi yang demikian, maka pengembangan industri di Provinsi DKI Jakarta diarahkan pada aktifitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah (*value added*) yang tinggi, yakni melalui pengembangan industri kreatif.

Adapun potensi yang dapat dikembangkan antara lain : pengembangan komunitas kreatif, *urban heritage* yang bernilai seni tinggi, serta masyarakat yang toleran terhadap pengembangan kreativitas. Dari sisi infrastruktur, Jakarta juga memiliki keunggulan karena jaringan jalan raya dan jalan rel yang ada telah cukup memadai, serta dilengkapi dengan pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Belum lagi ditambah dengan jaringan listrik, air bersih, dan komunikasi yang telah menjangkau hampir seluruh Kota Jakarta, menjadikan Jakarta sebagai tempat yang tepat untuk pengembangan industri kreatif. Sampai dengan tahun 2016, jumlah industri kreatif yang berkembang di Jakarta tercatat sebanyak 28.479 unit usaha industri kreatif dan akan terus didorong pengembangannya sampai dengan masa lima tahun yang akan datang.

Dalam rangka pengembangan industri kreatif, strategi yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan regulasi yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif.
- b. Peningkatan akses transportasi umum yang melewati jalur workshop seni, area pameran, serta event-event yang akan dilaksanakan di DKI Jakarta.
- c. Pelibatan komunitas kreatif dalam perancangan kota sebagai upaya untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Jakarta.
- d. Penyediaan tempat kumpul kreatif di kecamatan-kecamatan sebagai wadah komunitas kreatif di level kecamatan, sekaligus perluasan fungsi Jakarta *Creative Hub*.

c. Peningkatan Kewirausahaan dan Kesempatan Kerja

Menurut data Sensus Ekonomi BPS DKI Jakarta tahun 2016, disebutkan bahwa dari 1.235.651 pelaku usaha secara keseluruhan, sebanyak 93,46 persen atau 1.154.792 merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Bila dibandingkan dengan sensus ekonomi tahun 2006, terdapat peningkatan sebesar 8,82 persen dari 1,14 juta usaha. Selebihnya merupakan pelaku Usaha Menengah Besar (UMB) sebanyak 80.859 (6,54 persen).

Pada tahun 2016, distribusi usaha di Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh perdagangan besar dan eceran, yaitu sebanyak 453.812 usaha atau 36,73 persen dari seluruh usaha yang ada di DKI Jakarta. Pada urutan kedua diikuti oleh penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 27,97 persen dan diurutan ketiga industri pengolahan sebesar 7,90 persen.

Adapun rencana pengembangan UMKM pada tahun 2018-2022 adalah dengan menerapkan Program Pembinaan dan Pengembangan UKM yang dimotori oleh pembinaan kewirausahaan yang kreatif dan produktif melalui gerakan kemasyarakatan yakni OK-OCE (One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship).

Program unggulan dimaksud diharapkan dapat melahirkan 200.000 pewirausaha baru, dengan membangun 44 Pos Pengembangan Kewirausahaan Warga di setiap kecamatan, sehingga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan menurunkan angka pengangguran serta kemiskinan berbasis kecamatan. Secara skematis penyelenggaraan OK OCE dapat dilihat pada gambar 9.7.

Dari gerakan dan program OK-OCE ini diharapkan dapat tercipta ekosistem kewirausahaan di daerah yang dapat memadukan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, penggerak dan komunitas kewirausahaan serta pemangku kepentingan lainnya melalui penyediaan fasilitas kewirausahaan, peningkatan kapasitas wirausaha dan penguatan kelembagaan. Dalam menopang ekosistem kewirausahaan dilakukan tujuh langkah sukses (7P) mencetak wirausaha tangguh dan kompetitif di daerah melalui pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan penyediaan permodalan.

Gambar 9.7

Penyelenggaraan OK OCE



Pengembangan OK-OCE dimaksudkan untuk menjadi daya ungkit terhadap upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, melengkapi upaya-upaya sebagai berikut :

- Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengintegrasikan dunia usaha kedalamnya, untuk menghasilkan lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja dan berwirausaha.
- Peningkatan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja di daerah melalui sertifikasi profesi sesuai tuntutan dunia usaha/ industry sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan pekerja.
- Optimalisasi kinerja dan kapasitas Pusat Pelatihan Kerja untuk melahirkan tenaga - tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
- Membuka kesempatan pembinaan kewirausahaan melalui sistem bapak angkat dan jejaring sosial ekonomi.
- Peningkatan kesejahteraan ketenagakerjaan seiring dengan peningkatan keahlian dan ketrampilan yang tersertifikasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dunia usaha/ industri.
- Mengembangkan pola kemitraan kemitraan bapak angkat dan jejaring sosial ekonomi dalam menopang pembinaan tenaga kerja dan kewirausahaan.
- Meningkatkan pembinaan iklim usaha dan hubungan industri dengan sumber daya ketenagakerjaan yang seimbang, harmonis dan berkelanjutan.

- Melakukan revitalisasi terhadap 104 Lokasi Sementara dan 5 Lokasi Binaan.
- Melaksanakan tujuh langkah pasti sukses (7P), yaitu :

1) Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan dengan cara membuat akun di www.okoce.me dan memilih tiga opsi yaitu Ingin bekerja, Ingin Memulai Usaha dan Ingin Meningkatkan Usaha. Anggota OK OCE akan diberikan Kartu Status 7PAS yang akan dipantau oleh para pendamping di kecamatan. Bila ingin bekerja maka anggota dapat memilih untuk mengikuti pelatihan kejuruan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta atau langsung mengikuti Bursa Kerja Kecamatan dan Job Fair OK OCE. Bila ingin memulai usaha dan ingin meningkatkan usaha maka akan diikutsertakan dalam pelatihan wirausaha.

2) Pelatihan

Pelatihan ingin memulai usaha dimulai dengan pelatihan metode *coaching* 5 S (Lima Langkah Menuju Sukses) perihal mental wirausaha dan diikuti oleh pelatihan mencari dan menguji ide usaha sebelum memutuskan pilihan usaha yang akan dijalankan. Kurikulum pelatihan ingin meningkatkan usaha akan disesuaikan dengan tingkatan usaha antara lain usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pelatihan dilaksanakan oleh SKPD/UKPD terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga oleh komunitas penggerak secara swadaya di kantor kecamatan dan lokasi lain. Pelatihan *Hard Skill* / Spesialisasi Usaha akan diberikan oleh SKPD / UKPD di luar Dinas Koperasi UMKM serta Perdagangan. Pelatihan *Soft Skill* / Manajemen Usaha akan diberikan oleh Dinas Koperasi UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Anggota OK OCE yang telah mengikuti pelatihan akan didampingi oleh pendamping kecamatan.

Tingkatan usaha:

- Kurikulum pelatihan akan disesuaikan dengan Usaha Mikro menuju Usaha Kecil: membuat merk dan logo, kartu nama dan brosur, dan strategi penjualan /reseller.
- Usaha Kecil menuju Usaha Menengah: membuat strategi operasional, rencana bisnis, dan strategi pemasaran.
- Usaha Menengah menuju Usaha Besar: strategi pengembangan usaha, mendapatkan permodalan, dan ekspor.

3) Pendampingan

Anggota OK OCE akan diikutsertakan dalam program pendampingan usaha melalui OK OCE CENTER di 44 Kecamatan setiap hari kerja di sertai oleh layanan *Coaching Clinic* setiap hari Sabtu jam 08.00 -11.00 dilakukan oleh para *Coach* Wirausaha. Kartu nama dan brosur produk/ jasa anggota akan dimasukkan kedalam Katalog OK OCE melalui proses kurasi, yang kemudian dikategorikan berdasarkan kecamatan dan komunitas penggerak. Komunitas penggerak akan membantu memasarkan produk dan jasa anggota Produk dan jasa yang ada di katalog kecamatan harus memiliki perijinan yang sesuai.

4) Perizinan

OK OCE CENTER akan membantu memfasilitasi perijinan dan legalitas anggota yang diarahkan ke program perijinan dan legalitas yang gratis. Selain itu, dalam upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) secara sistematis, mandiri, dan berkelanjutan melalui kebijakan dalam aspek perizinan usaha, telah diusulkan pada zona R.5 dan R.6 dapat diizinkan untuk memulai usaha kegiatan usaha mikro dan kecil di wilayah tempat tinggalnya (Zona Perumahan). Pada zona R.7 – R.11 diusulkan untuk dapat diizinkan kegiatan toko tanpa dibatasi jarak dengan kegiatan sejenis. Usulan tersebut adalah merupakan salah satu upaya untuk mendukung penciptaan wirausaha baru di Provinsi DKI Jakarta. Usulan persetujuan penambahan kegiatan serta penghapusan jarak minimal kegiatan sejenis pada Sub Zona dimaksud, akan diterbitkan Peraturan Gubernur tentang Penerbitan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

5) Pemasaran

Produk / Jasa anggota OK OCE akan dibantu pemasarannya melalui Retailer, Reseller, Waralaba, Lokbin / Loksem, Toko Online, Bazaar / Pameran, dan Ekspor yang tempat pemasarannya ditentukan berdasarkan proses kurasi produk. Dengan penciptaan pasar untuk para anggota OK OCE, di harapkan para wirausaha akan terus naik kelas ke Gerai Ruang Pojok level tertinggi.

6) Pelaporan keuangan

Anggota OK OCE akan dilatih menghitung omset, laba rugi dan mempersiapkan laporan keuangan sesuai standar. Laporan keuangan nantinya akan dipakai sebagai syarat pelengkap pengajuan permodalan ke bank dan institusi permodalan lainnya.

7) Permodalan

Anggota OK OCE yang sudah memiliki laporan keuangan akan dibantu mengajukan permodalan dengan tiga skema yaitu skema pinjaman, skema waralaba dan alternatif permodalan lainnya bekerjasama dengan pihak bank dan institusi permodalan lainnya yang sudah bekerjasama dengan OK OCE memakai sistem permodalan konvensional dan syariah. Dengan adanya persetujuan di muka / *pre-approval*, diharapkan anggota OK OCE bila membutuhkan dana bisa mencairkan dengan cepat dan tidak kehilangan potensi omset dan keuntungan yang bisa di dapatkan.

Target penumbuhan wirausaha baru dan terbukanya lapangan kerja baru yang ingin dicapai selama 5 tahun diemban oleh beberapa SKPD dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Tabel 9.1
Target Pewirausaha Baru

SKPD	Indikator	Kondisi Awal	Target (wirausaha)					Target 2018-2022
			2018	2019	2020	2021	2022	
Dinas Perindustrian dan Energi	Jumlah wirausaha industri baru	1.630	2.000	5.560	5.560	5.560	5.560	24.240
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah pencari kerja yang berwirausaha	962	1.037	3.399	3.399	3.399	3.399	14.633
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Jumlah wirausaha baru	4.062	5.277	6.179	6.179	6.179	6.179	29.993
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan	Jumlah wirausaha baru	62.050	10.000	27.799	27.799	27.799	27.797	121.194
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Jumlah wirausaha baru	3.909	100	2.460	2.460	2.460	2.460	9.940
Dinas Sosial	Jumlah wirausaha baru	840	890	1.157	1.157	1.157	1.157	5.518
TOTAL		73.453	19.304	46.554	46.554	46.554	46.552	205.518

Tabel 9.2
Target Lapangan Kerja Baru

SKPD	Indikator	Kondisi Awal	Target (Orang)					Target 2018-2022
			2018	2019	2020	2021	2022	
Dinas Perindustrian dan Energi	Jumlah wirausaha industri baru	1.630	2.000	5.560	5.560	5.560	5.560	24.240
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	105.000
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah pencari kerja yang berwirausaha	962	1.037	3.399	3.399	3.399	3.399	14.633
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Jumlah tenaga kerja dari wirausaha baru	4.062	5.277	6.179	6.179	6.179	6.179	29.993
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan	Jumlah tenaga kerja dari wirausaha baru	62.050	10.000	27.799	27.799	27.799	27.797	121.194
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Jumlah tenaga kerja dari wirausaha baru	3.909	100	2.460	2.460	2.460	2.460	9.940
Dinas Sosial	Jumlah wirausaha baru	840	890	1.157	1.157	1.157	1.157	5.518
Dinas Pendidikan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dari lulusan SMK	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	51.000
TOTAL		98.453	50.304	77.654	77.754	77.854	77.952	361.518

d. Peningkatan Ketahanan Pangan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa Ketahanan Pangan diartikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pada saat ini skor Pola Pangan Harapan (PPH) DKI Jakarta pada tahun 2016 sebesar 80.7 (AKE, 2150 kkal), sementara skor PPH Nasional yang harus dicapai sebesar 95. Belum tercapainya skor PPH tersebut mengindikasikan bahwa konsumsi pangan masyarakat DKI Jakarta belum cukup beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Disisi lain, masih ditemukannya 1.939 sampel dari 48.480 (3,96%) mengandung formalin dan pestisida pada produk pertanian, perikanan dan peternakan di 154 lokasi (lingkup PD Pasar Jaya, Swalayan dan Sentra Perikanan) pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 masih ditemukan 137 sampel dari 42.167 sampel (0,42%). Pemasalahan lainnya adalah keterbatasan lahan produksi pertanian baik budidaya, tanaman, ikan dan ternak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran untuk pasokan beras, pasokan daging, distribusi ikan, distribusi ayam, distribusi telur dan susu, distribusi sayur dan mayur, buah-buahan dan Skor Pola Pangan Harapan.

Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan pengawasan pangan. keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran, biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Dengan melakukan peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan, diyakini hasil tanaman pangan & hortikultura 90% baik/aman konsumsi, hasil perikanan diyakini 95% baik/aman konsumsi dan produk hewan (kesmavet) diyakini 95% baik aman konsumsi.

Adapun rencana pengembangan ketahanan pangan lima tahun kedepan ditujukan untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah dan mutu sesuai standar sepanjang waktu di setiap wilayah Provinsi DKI Jakarta; menjamin stabilitas harga pangan strategis supaya dapat diakses oleh setiap individu penduduk DKI Jakarta; menjamin akses pangan bagi setiap warga DKI Jakarta khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah dan kelompok khusus (lansia, jompo, bayi, ibu hamil); dan menjamin status kesehatan setiap penduduk DKI dari bahaya penyakit yang ditimbulkan oleh pangan yang tidak aman atau penyakit yang ditularkan lewat makanan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pengembangan potensi produksi pangan dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang unit usahanya bergerak dibidang pangan, selain untuk menjamin ketersediaan pangan juga untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BUMD dapat mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga pangan dengan melakukan usaha pengadaan pangan sendiri baik dengan membangun kawasan sentra produksi pangan di daerah lain, menyewa lahan, kontrak farming, pembelian

lahan dan/atau pengajuan hak pakai atau hak guna usaha atas tanah negara. Dalam hal pengadaan pangan, BUMD juga dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau lembaga dan/atau BUMN/Daerah dan/atau perusahaan swasta dan/atau perorangan berupa pembelian pangan dan/atau pengelolaan bersama yang mekanismenya dapat dilihat pada skema sebagai berikut :

Gambar 9.8
Kerjasama Pemenuhan
Pasokan Pangan Jakarta

Sumber : Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi DKI
Jakarta



Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan melanjutkan distribusi dan subsidi pangan untuk pemegang KJP dan masyarakat tertentu lainnya; pengembangan Kartu Pangan Jakarta; penambahan produk distribusi pangan murah; utilisasi Jak Grosir, Jak Mart, RPTRA, PKK Mart, UMKM untuk distribusi pangan; optimalisasi pengelolaan sistem pergudangan, antara lain *Distribution Centre System*, Sistem Resi Gudang (SRG) dan *Controlled Atmosphere Storage* (CAS); pengembangan trading antar pulau; perintisan kegiatan penggemukan dan pembibitan sapi; pengamanan ketersediaan stok bahan baku ternak dan daging dan pengembangan pusat perkulakan; serta revitalisasi terhadap 28 lokasi pasar tradisional; melakukan pemantauan atas kebutuhan dan suplai pangan.

1) Kerjasama BUMD untuk pengendalian harga

Sebagai gambaran, BUMD Pangan seperti PD Pasar Jaya telah melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dalam memenuhi kebutuhan pasokan bahan pangan untuk DKI Jakarta, antara lain dengan Brebes untuk pasokan bawang merah. Disamping itu, PD Pasar Jaya telah membeli mesin CAS (*Controlled Atmosphere Storage*) sebagai tempat menyimpan komoditi cabe dan bawang merah yang mampu bertahan hingga 3-6 bulan. PD Pasar Jaya juga telah membangun Jakgrosir di Pasar Induk Kramat Jati, mini DC rencana di 5 wilayah DKI, Jakmart dalam upaya mengendalikan harga pangan di Jakarta. Jakgrosir menjual bahan pangan dengan harga grosir yang ditujukan untuk para pedagang yang ada di Pasar Jaya.

Gambar 9.9

Peran Pemerintah dalam mengoptimalkan BUMD Pangan untuk pengendalian harga pangan

Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, 2018



PT Food Station Tjipinang Jaya bekerja sama dengan daerah produsen beras untuk memenuhi kebutuhan stok beras bagi DKI Jakarta dan menjaga *standby stock* beras, karena Food Station menjadi penyedia beras, telur dalam program subsidi pangan. PD Dharma Jaya bekerja sama dengan Kabupaten Kupang NTT untuk *breeding* sapi.

2) Optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jakarta

Dalam rangka upaya pemenuhan pasokan pangan dan peningkatan ketahanan pangan di DKI Jakarta, pengendalian inflasi di DKI Jakarta merupakan hal yang sangat penting. Sebagaimana diketahui, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jakarta berperan strategis

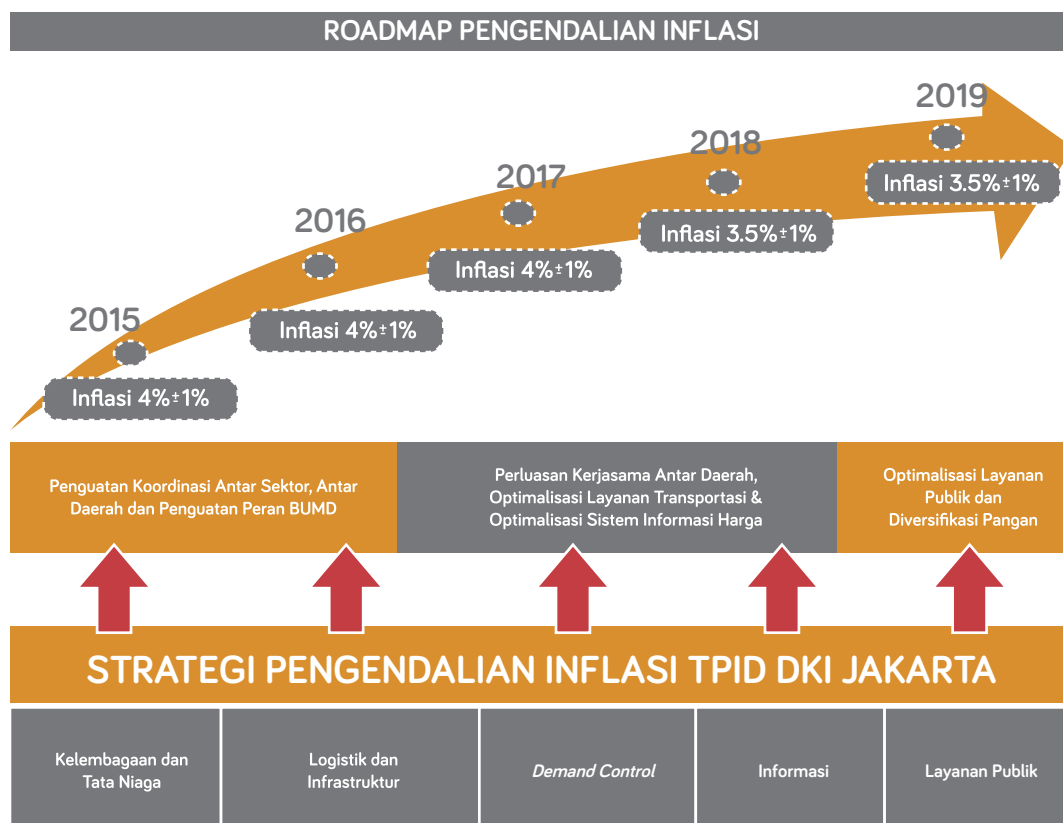
dalam mengoordinasikan dan mengomunikasikan berbagai kebijakan pengendalian harga pada lintas instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pencapaian tingkat inflasi yang rendah dan stabil, dan sejalan dengan target inflasi nasional, diharapkan mampu mengoptimalkan daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

TPID Provinsi DKI Jakarta saat ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 2183 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan merupakan penyesuaian atas Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang mengamanatkan agar dalam struktur susunan TPID Provinsi diketuai oleh Gubernur. Program prioritas TPID Jakarta tetap difokuskan pada pelaksanaan program yang merujuk pada 4K, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi dan keterjangkauan harga. *Roadmap* pengendalian inflasi yang telah ditandatangani pada pertengahan tahun 2016, memberikan arahan yang jelas mengenai langkah-langkah konkrit untuk menjaga laju inflasi di DKI Jakarta.

Gambar 9.10

Roadmap Pengendalian Inflasi
DKI Jakarta

Sumber : Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi DKI
Jakarta, 2017



Inflasi Jakarta dihadapkan pada sejumlah permasalahan baik *cyclical* maupun struktural di tengah kuatnya permintaan. Di sisi lain, perkembangan inflasi Jakarta akan sangat mempengaruhi perkembangan nasional serta menjadi *anchor* bagi penetapan harga komoditas di daerah.

Dalam pelaksanaan koordinasi TPID, upaya pengendalian harga pangan (*volatile food*) yang menyumbang inflasi cukup besar merupakan program utama, tetapi kelompok *administered prices* dan kelompok inti juga menjadi perhatian, sebab kebijakan Pemerintah Pusat terkait kebutuhan masyarakat menjadi faktor yang mampu mempengaruhi tingkat inflasi.

3) Pengaplikasian lelang *forward* produsen

Dalam rangka pembangunan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu penguatan hubungan ekonomi antar daerah. Mengingat kebutuhan bahan pokok masyarakat DKI Jakarta masih dipasok dari daerah produsen sebesar 95 persen seperti dari Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY dan Prov. Jawa Timur dan 5 persen impor, untuk itu dipandang perlu DKI Jakarta menjaga ketersediaan stok kebutuhan pokok dalam rangka kestabilan harga.

Salah satu upaya menghadapi permasalahan perdagangan antar daerah dimaksud adalah dengan sistem lelang, berperan sebagai media yang dapat mempertemukan berbagai kepentingan pembeli dan penjual petani terutama dalam pembentukan tingkat harga komoditas.

Pengembangan Pasar Lelang bertujuan antara lain untuk : mempersingkat mata rantai perdagangan dengan mempertemukan penjual (petani) dan pembeli (pedagang) secara langsung; meningkatkan posisi tawar petani sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani; mewujudkan harga yang transparan sehingga dapat dipakai sebagai acuan bagi pelaku pasar; meningkatkan mutu dan produktivitas sehingga meningkatkan daya saing; mewujudkan kepastian dan perluasan pemasaran; dan membantu petani membuat perencanaan/pola tanam secara sinergi.

Melalui Pasar Lelang *Forward* ini harga komoditi terbentuk dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, dengan adanya kepastian harga, kuantitas dan kualitas serta waktu dan tempat penyerahan, maka petani produsen dapat melakukan perencanaan pola tanam untuk memenuhi kontrak Lelang *Forward* tersebut sehingga biaya penyimpanan menjadi rendah karena petani dapat menyimpan komoditi di lahan pertanian.

Dalam penyelenggaraan Pasar Lelang dengan sistem *Forward* (penyerahan kemudian), para penjual cukup membawa contoh/*sample* yang dilengkapi dengan spesifikasi dari komoditas yang akan dijual, dan bertemu dengan pembeli yang membayarnya dikemudian hari saat penerimaan barang, pada harga yang disepakati dalam pasar lelang.

Untuk memperluas perdagangan antar daerah atau antar pulau, perlu dikembangkan pasar lelang jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan sistem ini para pelaku bisa melakukan transaksi lewat internet dari daerah masing-masing atau dimanapun berada tanpa harus datang ke lantai pasar lelang dan dapat memperoleh informasi terkini tentang harga dan volume komoditi yang diinginkan. Sistem ini pada perkembangannya

memungkinkan para pelaku dapat mengetahui informasi harga dan komoditi bukan hanya dari satu pasar lelang tetapi juga dari seluruh pasar lelang yang ada di Indonesia. Selanjutnya juga dapat dilengkapi dengan harga-harga acuan di bursa komoditi dunia, baik harga fisik maupun harga berjangka.

Dalam rangka mendukung terlaksananya Pasar Lelang dengan sistem *Forward* dan mengantisipasi kelebihan jumlah pasokan pangan yang masuk ke wilayah DKI Jakarta, maka dibutuhkan Gudang-gudang pangan yang dapat menampung komoditas pangan dalam jumlah yang besar.

Gudang-gudang pangan tersebut merupakan tempat ketersediaan/stok pangan yang dapat didistribusikan sewaktu-waktu dalam rangka mengatasi kelangkaan pangan serta berfungsi sebagai *buffer* stok disaat terjadi fluktuasi harga pangan.

e. Pengembangan Kawasan Pelabuhan Muara Angke

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/KEPMEN-KP/2017 tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Muara Angke sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, maka fungsi Pelabuhan Perikanan Muara Angke berubah dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke antara lain berupa banjir rob, sampah darat dan sampah laut, penyediaan air bersih yang belum memadai dan masih maraknya permukiman ilegal di kawasan tersebut.

Beberapa hal yang sudah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain:

1. Pemasangan *Sheet Pile* dan pengaturan sistem manajemen air sebagai upaya untuk mengatasi banjir yang bersumber dari rob maupun hujan serta luapan sungai.
2. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan peningkatan ritase pengangkutan sampah.
3. Pembangunan instalasi air tawar pada tahun 2018.
4. Pembangunan rusunawa oleh Dinas Perumahan sebagai upaya upaya untuk mengatasi masalah permukiman ilegal.

Adapun rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke sebagai pelabuhan perikanan modern yang berwawasan lingkungan dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan termasuk instalasi air bersih, PAM dan pengelolaan sampah basah.
2. Penataan permukiman.
3. Penataan lingkungan pelabuhan perikanan, termasuk di dalamnya penyusunan dokumen AMDAL.
4. Pembangunan pujasera/ pusat jajanan serba ikan.
5. Pengawasan mutu dan pembinaan para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dan nelayan.
6. Penataan kolam tambat labuh kapal perikanan dan *docking* kapal perikanan.
7. Penanggulangan banjir, baik yang bersumber dari rob maupun air hujan/ kiriman dengan membangun saluran air.

Sebagai upaya untuk merintis Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke menjadi Pelabuhan Perikanan International, pada tahun 2016 telah disiapkan Rancangan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP). Selain itu saat ini tengah berproses penetapan DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Raperda Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke.

Selain pengembangan Pelabuhan Perikanan International, di kawasan Muara Angke juga disiapkan rencana penataan pelabuhan penumpang bertaraf nasional yang telah dimulai pada tahun 2016, berupa pembuatan Rencana Induk Pelabuhan. Selanjutnya tahapan pengembangan pelabuhan tersebut adalah sebagai berikut :

1. pembuatan DED pengembangan pelabuhan penumpang Muara Angke dan Peningkatan Desain Struktur Dermaga Pelabuhan Muara Angke pada tahun 2018.
2. Pelaksanaan revitalisasi penataan Muara Angke akan dimulai pada tahun 2019, dengan harapan agar pelayanan pelabuhan penumpang menjadi lebih optimal dan teratur.

9.2.2 Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur difokuskan pada pembangunan transportasi, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sampah dan penyediaan perumahan yang terjangkau sebagaimana pada gambar 9.11 berikut:

Gambar 9.11

Panca Upaya Utama
Pembangunan Jakarta
Infrastruktur



a. Penyediaan Perumahan

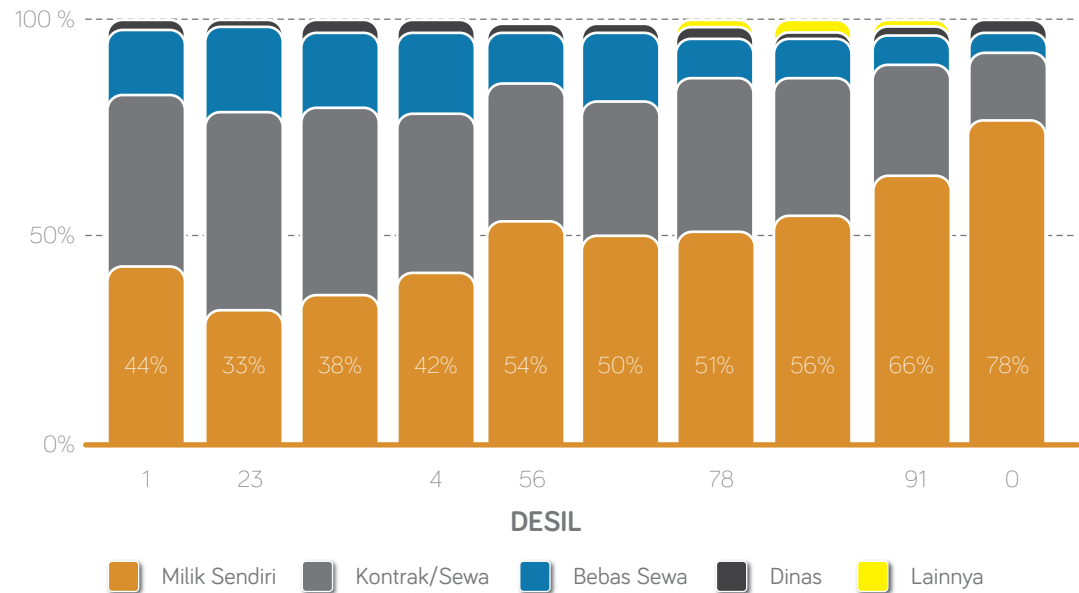
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada sisi lain, berdasarkan analisa data Susenas tahun 2015, baru setengah penduduk DKI Jakarta (51 persen) yang memiliki properti sendiri, dimana penduduk yang tidak memiliki rumah terkonsentrasi pada 40 persen masyarakat termiskin.

Gambar 9.12

Data kepemilikan Properti
Penduduk DKI Jakarta

Sumber : Susenas, 2015



Berdasarkan hasil kajian Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) pada tahun 2016, diperkirakan jumlah *backlog* hunian di DKI Jakarta sebanyak 302.319 unit.

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, secara umum pendistribusian stok perumahan di DKI Jakarta untuk kepemilikan dilaksanakan oleh pelaku pembangunan baik BUMN maupun masyarakat. Adapun target pembeli dari satuan rumah susun ditentukan langsung oleh pelaku pembangunan dengan mekanisme independen, tanpa keterlibatan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mengurangi *backlog* perumahan, terdapat beberapa potensi pemenuhan penyediaan perumahan rakyat 2018-2022 melalui skema pendanaan :

- 1) APBD, untuk pembangunan rumah susun dan penataan kawasan permukiman/kampung.
- 2) APBN, untuk pembangunan rumah susun milik (rusunami) dan skema pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta penataan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)
- 3) Skema Kewajiban Pengembang, untuk pembangunan rusun MBR.
- 4) Peran Serta Swasta, yakni untuk pembangunan rusun MBR dan hunian komersial.

Untuk memenuhi asas keadilan penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat perlu ditetapkan kebijakan yang proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan prioritas penyediaan rumah layak huni secara umum dapat dikategorikan berdasarkan besaran penghasilan sebagai berikut:

- a. Masyarakat berpenghasilan dibawah Rp 4.000.000 perbulan. Untuk kelompok masyarakat ini, prioritas penyediaan hunian berupa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
- b. Masyarakat berpenghasilan antara Rp 4.000.000 – Rp. 7.000.000 perbulan. Untuk kelompok masyarakat ini, prioritas penyediaan hunian berupa Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) melalui skema pendanaan uang muka nol rupiah (dp nol).
- c. Masyarakat berpenghasilan diatas Rp. 7.000.000 perbulan. Untuk kelompok masyarakat ini, penyediaan huniannya diserahkan pada mekanisme pasar.

a) Penyediaan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Adapun rencana penyediaan dan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) tahun 2018 – 2022 adalah :

- 1) Penyediaan perumahan rakyat sebanyak 14.564 unit rumah susun.
- 2) Peningkatan sarana prasarana perumahan rakyat yang lengkap sebanyak 23 lokasi; dan
- 3) Pemeliharaan/perawatan berkala rumah susun sebanyak 15.377 unit.

b) Penyediaan Rumah Susun Milik Melalui Skema DP Nol Rupiah

Penyediaan rumah susun milik melalui skema DP Nol Rupiah merupakan kredit murah berbasis tabungan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penyelenggaraan penyediaan rumah milik melalui skema dimaksud didasarkan pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - Pasal 1 Angka 24 :
Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
 - Pasal 54 :
 - (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
 - (2) Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

- (3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dapat berupa : a. subsidi perolehan rumah; b. stimulan rumah swadaya; c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; d. perizinan; e. asuransi dan penjaminan; f. penyediaan tanah; g. sertifikasi tanah; dan/atau h. prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Gambar 9.13

Dukungan Pemerintah
Dalam Memenuhi Kebutuhan
Perumahan

Sumber : Bank Indonesia,
2017



- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2015 :

Batas gaji pokok MBR bagi pengaju KPR FLPP untuk rumah tapak adalah sebesar Rp 4 juta, sedangkan untuk rumah susun sebesar Rp7 juta. Nilai tersebut berlaku sama secara nasional

- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/PMK.010/2015 :

Batas harga hunian vertikal bebas PPN 10 persen sebesar Rp 250 juta. Batasan penghasilan wajib pajak yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut, yakni sebesar Rp 7 juta.

- 4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016 tentang *Loan to Value* (LTV) atas KPR dan DP Kendaraan Bermotor, dimana dalam pasal Pasal 17 disebutkan bahwa :

“Kredit atau Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Program Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang didukung dengan dokumen yang menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan tersebut merupakan Program Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikecualikan dari ketentuan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku”.

Pemenuhan terhadap rasio *Loan to Value* dimaksud, tidak berlaku untuk Program Perumahan Pemerintahan Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Skema Pembiayaan Perumahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah melalui Dukungan Uang Muka. Sejalan dengan skema tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan program DP Nol Rupiah dalam rangka mewujudkan *affordable housing* (hunian yang terjangkau) dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR yang rencananya akan dibangun sebanyak 14.000 unit oleh BUMD dan 218.214 unit melalui mekanisme KPBU dan mekanisme Pasar.

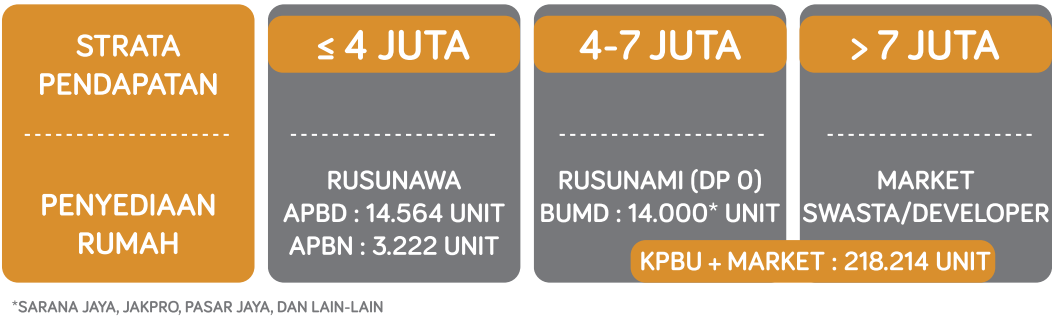
Adapun upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan program DP Nol Rupiah dapat berupa dan tidak terbatas pada:

- 1) Pengadaan tanah yang dapat dipenuhi dan tidak terbatas pada:
 - Pemenuhan kewajiban pihak ketiga yang dapat di inbrenkan kepada BUMD
 - Kerjasama *Business to Business*
 - Penyediaan lahan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, Swasta
- 2) Talangan Uang Muka
- 3) Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari APBD DKI Jakarta
- 4) Penyediaan unit rumah skema DP Nol Rupiah
- 5) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bertugas mengelola perumahan DP Nol Rupiah.

Adapun Penyelenggaran Rumah DP Nol Rupiah akan ditempuh antara lain melalui mekanisme *housing career*, penyerapan pendanaan dari Pemerintah Pusat, penugasan kepada BUMD, serta melibatkan pasar hunian, sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 9.14

Mekanisme *housing career* penyelenggaraan rumah DP Nol Rupiah



Dalam penyelenggaraan rumah DP nol rupiah, dilakukan melalui pendekatan peningkatan *costumer capacity to borrow*, melalui berbagai dukungan Pemerintah Daerah dengan hasil perhitungan indikatif per 50 ribu unit per tahun sebagaimana pada tabel 9.3:

Tabel 9.3

Rencana Dukungan Pendanaan DP Nol Rupiah Dalam 5 Tahun (dalam milyar rupiah)

	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
Tanah	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	6.250
Talangan Uang Muka	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	13.125
Operasional BLUD	10	9	8,5	8,5	8,5	44,5
Jumlah	3.885	3.884	3.883,5	3.883,5	3.883,5	19.419,5

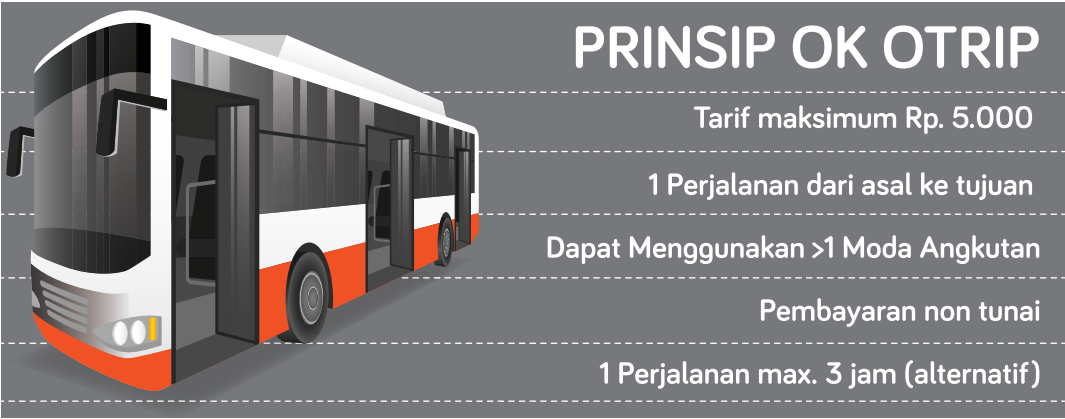
b. Pembangunan Transportasi

Pembangunan transportasi di DKI Jakarta, dalam beberapa tahun ke depan akan difokuskan pada pengembangan pemberian layanan transportasi terintegrasi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pelayanan transportasi terjangkau dilaksanakan dengan mengintegrasikan seluruh jenis moda yang ada di Jakarta antara lain angkutan umum perkotaan, angkutan lingkungan, bus kecil, bus sedang, angkutan perairan dan Transjakarta, dengan skala pelayanan dari lingkungan permukiman sampai ke tempat aktivitas masyarakat sehari-hari. Untuk mendukung hal tersebut, juga dilakukan pembatasan lalu lintas dan peningkatan kapasitas jaringan.

Gambar 9.15

Prinsip OK Otrip

Sumber : PT. Transportasi Jakarta, 2017



Gambar 9.16

Skema OK Otrip

Sumber : PT. Transportasi
Jakarta, 2017



Mekanisme pelayanan dilaksanakan secara elektronik (*cashless*) dengan menggunakan kartu tertentu yang terlebih dahulu di *top up* melalui lembaga Bank, ATM, maupun gerai swalayan yang telah bekerjasama dengan layanan transportasi OK Otrip dimaksud. Kerjasama antara operator layanan angkutan perkotaan dilakukan secara terintegrasi yang memungkinkan identifikasi jejak elektronik dari setiap kartu, sehingga dapat membatasi penarikan atau pendebitan uang secara otomatis maksimal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemberlakuan waktu layanan untuk setiap kali penggunaan layanan dibatasi hanya pada hari kerja, dengan batas maksimal selama 3 jam atau waktu lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembatasan waktu dimaksud untuk setiap kali perjalanan (*one way trip*) pada setiap harinya terhitung sejak kartu pertama kali digunakan atau ditempelkan pada mesin pembaca kartu elektronik yang terpasang di setiap armada atau kendaraan angkutan umum. Selama periode tersebut, masyarakat dimungkinkan berpindah dari satu moda ke moda lainnya sesuai kebutuhan perjalanan selama moda transportasi yang digunakan tersebut terintegrasi dengan sistem layanan ini.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan dimaksud, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengalokasikan secara berkala (setiap tahun) dana subsidi atau dana *public service obligation*

yang akan diberikan kepada entitas layanan yang ditunjuk atau ditentukan. Kebutuhan dana dimaksud dipersiapkan secara cermat oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perhubungan, bersama dengan lembaga atau mitra terkait lainnya. Cakupan layanan meliputi seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta yang pengembangannya dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan terus meningkatkan fasilitas pelayanan yang ramah bagi para penyandang disabilitas di seluruh terminal dan stasiun di DKI Jakarta selama lima tahun ke depan.

Dalam rangka mendukung pembangunan transportasi di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pengemudi angkutan umum di DKI Jakarta. Upaya tersebut diaplikasikan dalam bentuk pelaksanaan diklat dan sertifikasi terhadap para pengemudi angkutan umum, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan *Skill, Attitude*, dan *Behavior* para pengemudi dalam berkendara melayani para penumpang angkutan umum. Dengan adanya sertifikasi bagi pengemudi kedepannya, dapat melindungi mereka dalam menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dimana setiap orang dari negara di asia dapat bekerja dalam bidang apapun di negara manapun di asia. sehingga Dengan adanya persyaratan tersebut, para pengemudi lokal dapat bersaing. Direncanakan selama 5 tahun dari 2018-2022 akan didiklatkan dan disertifikasi sebanyak 6.620 pengemudi yang terdiri dari pengemudi angkutan umum untuk angkutan kota dan bus sedang.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melakukan pengembangan angkutan umum massal, termasuk di dalamnya pengembangan Kawasan Transit Terpadu (KTT)/ *Transit Oriented Development* (TOD) sebagai berikut :

a) Pembangunan MRT Jakarta

Pada tahun 2014 jumlah komuter Jabodetabek sebanyak 3.566.178 orang, terdiri dari 2.429.751 orang melakukan kegiatan bekerja dan sekolah/ kursus di DKI Jakarta, 1.067.762 orang di Bodetabek, dan 68.665 orang di luar Jabodetabek.

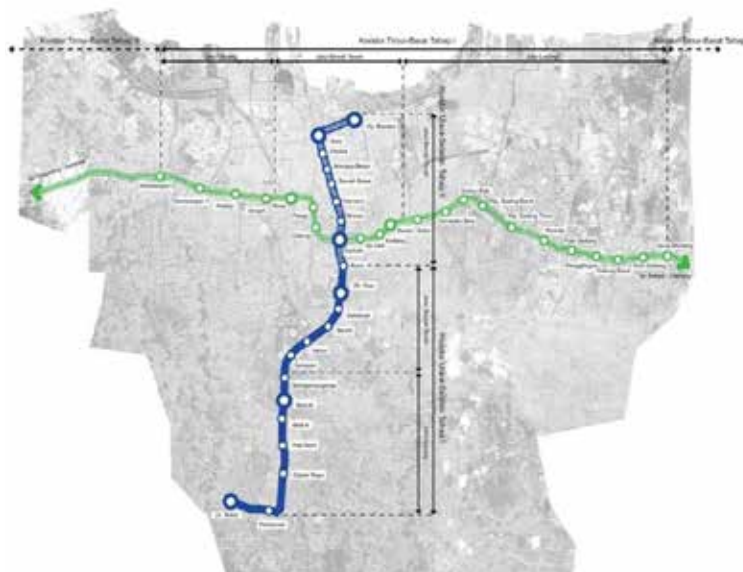
Dalam rangka meningkatkan mobilitas masyarakat dan untuk mengurangi kemacetan Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan hasil studi *Engineering Consulting Services for Jakarta MRT System Project* merencanakan pembangunan angkutan umum massal MRT yang dapat mengangkut penumpang sejumlah 173.400 orang per hari.

Pembangunan MRT Jakarta direncanakan pada dua jalur, yaitu Koridor *North – South* dan Koridor *East – West*. *Koridor North – South* dibangun sepanjang 24 km, yaitu Fase 1 dari Lebak Bulus – Bundaran HI dan Fase 2 Bundaran HI – Kampung Bandan.

Gambar 9.17

MRT Jakarta Koridor
North – South & East – West

Sumber : PT MRT Jakarta

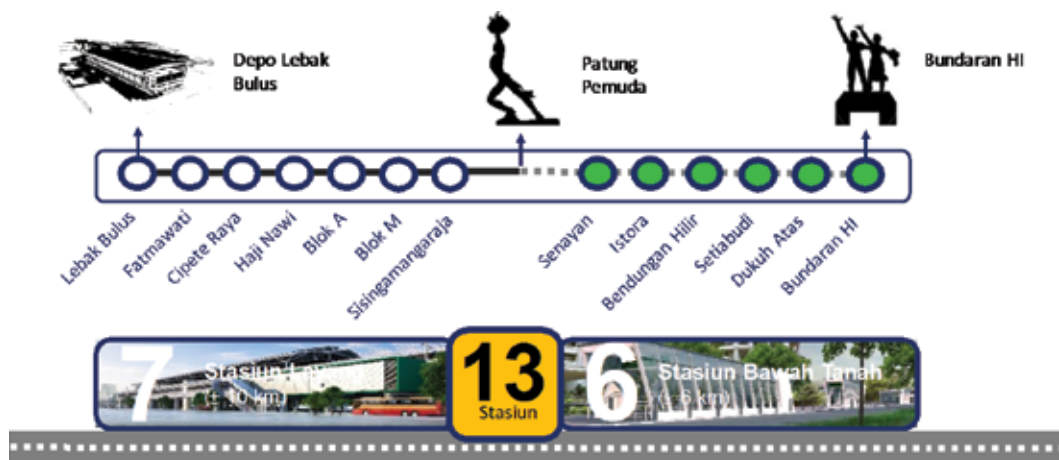


Pelaksanaan pembangunan MRT Jakarta Koridor *North – South* dilakukan per tahap. Fase 1 yaitu jalur Lebak Bulus – Bundaran HI sepanjang 15,7 km, dengan target penyelesaian pembangunan pada akhir tahun 2018. Biaya pembangunan untuk koridor ini adalah sebesar JPY 125.237.000.000,- yang pembebanannya terdiri dari Pemerintah Pusat, sebesar JPY 61.366.130.000 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebesar JPY 63.870.000. Salah satu tanggung jawab utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penyediaan tanah bagi proyek MRT.

Gambar 9.18

Koridor MRT *North – South*
Fase 1 (Lebak Bulus -
Bundaran HI)

Sumber : PT MRT Jakarta



MRT Jakarta Koridor *North – South* Fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI) memiliki 13 stasiun yang terdiri atas 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. Tujuh stasiun layang tersebut adalah Depo Lebak Bulus, Stasiun Fatmawati, Stasiun Cipete, Stasiun Haji Nawvi, Stasiun Blok A, Stasiun Blok M dan Stasiun Sisingamaraja. Penempatan stasiun layang mulai dari Lebak Bulus sampai dengan Sisingamaraja, seluruhnya berada pada median Jalan Fatmawati dan Jalan Sisingamaraja.

Gambar 9.19

Ilustrasi Gambar Stasiun
Layang MRT Jakarta

Sumber : PT MRT Jakarta



Adapun 6 stasiun bawah tanah pada koridor tersebut adalah Stasiun Senayan, Stasiun Istora, Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun Setiabudi, Stasiun Dukuh Atas, dan Stasiun Bundaran HI. Lokasi stasiun bawah tanah seluruhnya berada di bawah Jalan Jenderal Sudirman, yang terhubung langsung dengan TOD yang ada di sekitarnya.

Gambar 9.20

Ilustrasi Gambar Stasiun
Bawah Tanah MRT

Sumber : PT MRT Jakarta



Desain untuk seluruh stasiun menyesuaikan dengan fungsi stasiun, karakteristik kawasan berikut pengembangannya, serta memperhatikan *ridership* dan kemudahan para penumpang untuk melakukan pergantian antar moda.

Selain pembangunan Fase 1, telah direncanakan pula pembangunan Fase 2 pada tahun 2018, menghubungkan Bundaran HI – Kampung Bandan sepanjang 8,1 kilometer, yang memiliki 8 stasiun dan 1 depo, yakni Stasiun Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, Kota dan Kampung Bandan yang juga berfungsi sebagai depo. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk persiapan pembangunan Fase 2 yakni :

- 1) Proses penetapan trase MRT Jakarta Koridor *North – South* Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan), yang diawali dengan Persetujuan Kementerian Perhubungan RI sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
- 2) Penyelesaian *Basic Engineering Design* sebagai dasar proses lelang *Design and Build*.
- 3) Proses penyelesaian Dokumen LARAP, termasuk penyelenggaraan sosialisasi pada masyarakat dan pemilik lahan yang terdampak pembangunan MRT Jakarta Koridor *North – South* Fase 2.
- 4) Mengusulkan sumber pendanaan pinjaman luar negeri dari JICA, dengan mempertimbangkan pemanfaatan STEP (*Special Term for Economic Partnership Loan*) yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - *Time Slicing*
 - Biaya *front – end fee* sebesar 0,2 persen dari total pinjaman.
 - Masa tenggang (*Grace Period*) selama 12 Tahun
 - Masa pembayaran cicilan pokok selama 40 Tahun.
 - Bunga untuk kegiatan *civil works and equipments* sebesar 0,2 persen per tahun, yang selanjutnya diganti menjadi sebesar 0,1 persen per tahun.
 - Bunga untuk kegiatan konsultasi sebesar 0,01 persen per tahun

Proses Pendanaan (*Loan Agreement*) Pembangunan MRT Jakarta Koridor *North – South* Fase 2, telah tercatat dalam *Greenbook* yang diterbitkan oleh Bappenas, termasuk Surat Persetujuan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Surat Pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri. Skema pendanaan untuk koridor ini akan menggunakan skema yang sama seperti pembangunan MRT Jakarta Koridor *North – South* Fase 1, dengan komposisi pembebanan pinjaman Pemerintah Pusat sebesar 49 persen dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 51 persen, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta Jalur Utara Selatan.

Proyeksi besaran biaya total pembangunan MRT Jakarta Koridor *North – South* Fase 2 adalah sebesar JPY 217.950.000.000,- atau setara dengan USD 1.869.000.000,-, sebagaimana telah terdaftar dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRRPLN/ *Green Book*)

2017. Peruntukan proyeksi biaya dimaksud terdiri atas biaya konstruksi MRT Jakarta Koridor Bundaran Hotel Indonesia – Kampung Bandan (dengan depo di Kampung Bandan) sebesar USD 1.678.000.000 atau setara dengan Rp. 22.545.608.000.000,- dan tambahan biaya penyelesaian MRT Jakarta Koridor *North – South* Fase 1 sebesar USD 191.000.000,- atau setara dengan Rp. 2.560.000.000.000,-.

Selain biaya pembangunan tersebut, diperlukan juga adanya biaya dari APBD untuk pembebasan lahan bagi penyiapan prasarana MRT Jakarta Koridor *North – South* Fase 2.

Rencana penarikan selama lima tahun *on-lending* dan *on-granting* sebagai berikut :

Tabel 9.4

Rencana Penarikan Selama Lima Tahun *on-lending* dan *on-granting*

Sumber : PT. MRT Jakarta, diolah

No.	Penarikan Dana (Miliar Rupiah)	Tahun						Jumlah
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Penerus-hibahan (<i>on-granting</i>)	3.411	3.676	5.215				12.303
2	Penerus-pinjaman (<i>on-lending</i>)	2.022	98	862	6.261	4.443	1.554	15.242
Jumlah		5.433	3.774	6.078	6.261	4.443	1.554.	27.545

*Asumsi : JPY 1 = Rp 115,4

Selain Koridor *North – South*, akan dibangun pula Koridor *East – West* sepanjang 87 km, melintasi Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, yaitu dari Cikarang – Jakarta – Balaraja, yang pembangunannya akan dilakukan secara bertahap. Koridor *East – West* Fase 1 diusulkan hanya berlokasi di dalam Provinsi DKI Jakarta saja, yaitu Kembangan – Cempaka Baru, yang akan dilanjutkan dengan Cempaka Baru – Ujung Menteng.

b) Pembangunan LRT

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional telah menetapkan program pembangunan perkeretaapian umum - Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) Jakarta sebagai salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional.

Selain daripada itu, Rencana pembangunan Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* (LRT) DKI Jakarta dilaksanakan sebagai wujud implementasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pengembangan sistem transportasi massal berbasis rel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang transportasi dan dalam rangka mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Selain itu, pembangunan LRT Jakarta juga diharapkan menjadi prasarana dan sarana pendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 di Jakarta.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015, Pemerintah memberikan amanat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang transportasi berupa percepatan penyelenggaraan perkeretaapian umum perkotaan yaitu Kereta Api Ringan atau *Light Rail Transit*, dan ditegaskan kembali dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang selanjutnya diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dimana LRT Jakarta termasuk dalam salah satu daftar Proyek Strategis Nasional.

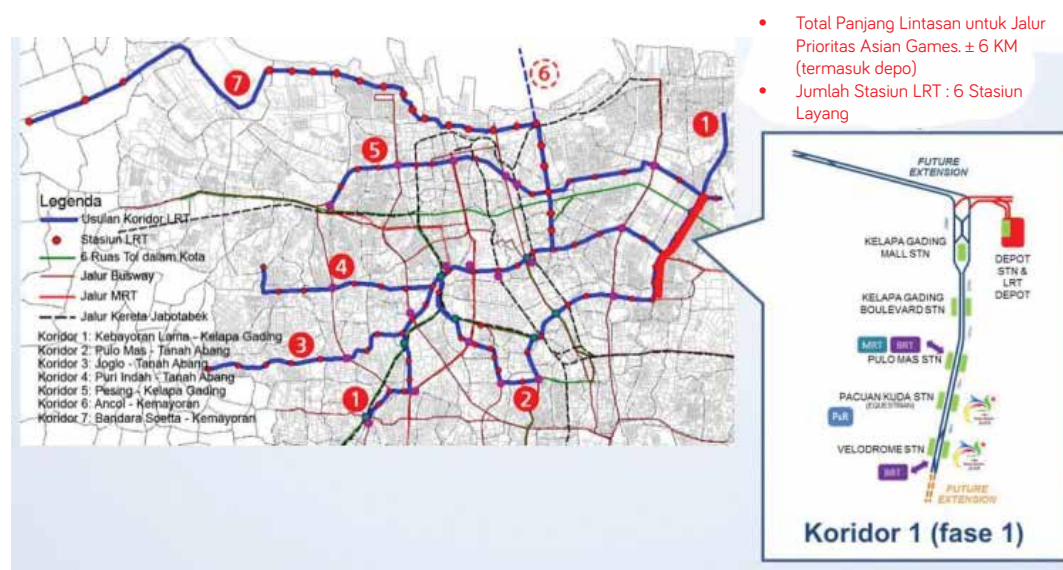
Konsep pengembangan LRT Jakarta direncanakan dibangun pada 7 (tujuh) koridor LRT DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Jalur Indikatif Koridor Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*. Ketujuh koridor LRT dimaksud yaitu :

- 1) Koridor 1 : Kebayoran Lama – Kelapa Gading, sepanjang 21,6 km
- 2) Koridor 2 : Tanah Abang – Pulo Mas, sepanjang 17,6 km
- 3) Koridor 3 : Joglo – Tanah Abang, sepanjang 11,5 km
- 4) Koridor 4 : Puri Kembangan – Tanah Abang, sepanjang 9,3 km
- 5) Koridor 5 : Pesing – Kelapa Gading, sepanjang 20,7 km
- 6) Koridor 6 : Kemayoran – Ancol, sepanjang 5 km
- 7) Koridor 7 : Bandara Soetta – PIK – Pluit – Ancol Kemayoran, sepanjang 30,5 km, dengan total panjang jalur keseluruhan koridor mencapai 116 km.

Gambar 9.21

Peta Rencana 7 Koridor LRT dan Koridor Prioritas

Sumber : Dinas Perhubungan
DKI Jakarta, 2017



Namun demikian, mengingat pembangunan LRT tahap awal direncanakan untuk mendukung transportasi kegiatan Asian Games XVIII tahun 2018, maka terhadap koridor yang ada dilakukan penyesuaian rute atau jalur supaya dapat memenuhi target pembangunan LRT

selesai tepat waktu dan beroperasi pada saat penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018. Koridor alternatif ditentukan berdasarkan kajian oleh PT Jakarta Propertindo selaku BUMD yang ditugaskan untuk menyelenggarakan LRT dan Koridor Prioritas Fase 1 menjadi Kelapa Gading (Depo) – Rawamangun, dengan panjang lintasan 5,8 km.

LRT Jakarta dibangun dan akan terintegrasi dengan moda transportasi massal lainnya antara LRT Jabodebek dan MRT. Terkait dengan pengintegrasian layanan dengan LRT Jabodebek, maka LRT Jakarta menggunakan spesifikasi lebar rel standar (*standard gauge*) dengan lebar rel 1.435 mm dan 3rd rail yang juga digunakan oleh LRT Jabodebek. Setiap satu set LRT Jakarta diharapkan mampu mengangkut 540 penumpang dalam sekali perjalanan atau sekitar 12.000 s.d. 18.000 penumpang setiap harinya.

Jumlah stasiun LRT Jakarta Fase 1 direncanakan sebanyak ada 6 stasiun yang seluruhnya merupakan stasiun layang. Stasiun dimaksud antara lain Depo Pegangsaan, Stasiun Mal Kelapa Gading, Stasiun Kelapa Gading Boulevard, Stasiun Pulo Mas, Stasiun Pacuan Kuda dan Stasiun Velodrome Rawamangun. Pada pengoperasian LRT Jakarta Fase 1, jumlah rangkaian kereta yang akan dioperasikan sebanyak 8 *articulated* LRVs atau 4 *train sets*, dengan *headway* 10-15 menit.

Dalam rangka mendukung peningkatan jumlah penumpang dan keberlanjutan pengoperasian LRT Jakarta, direncanakan pengembangan LRT lanjutan. Koridor pengembangan LRT lanjutan akan secara terus menerus dikaji untuk selanjutnya ditetapkan dan diintegrasikan dengan sistem moda angkutan umum massal lainnya yang telah terbangun atau direncanakan. Rencana pembangunan LRT Jakarta selanjutnya adalah LRT Fase II dari Velodrome-Dukuh Atas-Tanah Abang sepanjang 11,5 km dan koridor I Kelapa Gading-Kebayoran Lama sepanjang 21,6 km. Pengembangan LRT dapat bersumber dari berbagai bentuk pendanaan sebagaimana di atur pada pasal 6 dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat amanat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, salah satu isu strategis terkait rencana pengembangan LRT Jakarta ke depan adalah mengenai pola sinkronisasi yang akan dilakukan dengan LRT Jabodebek di lokasi Dukuh Atas. Pengembangan konsep *track sharing* dan *double-double track* telah direncanakan, sehingga nantinya layanan operasional LRT Jakarta akan terintegrasi secara teknis dan operasional pelayanan dengan LRT Jabodebek. Pembangunan di lokasi Dukuh Atas direncanakan akan mengoptimalkan pola *track sharing* di antara kedua moda dimaksud namun dengan tetap menyiapkan pola untuk pengembangan *double-double track*.

Pada tahun 2018 telah direncanakan dana PMD sebesar Rp. 2,232 miliar (Rp. 2,2 triliun) dan tidak membutuhkan dana *Public Service Obligation* (PSO) karena pada tahun 2018 PT. Jakarta Propertindo akan menggunakan modal kapital dari PMD. Akan tetapi mulai pada

tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, diproyeksikan akan membutuhkan dana PSO untuk operasional koridor.

Pada pelaksanaannya, LRT Jakarta memprioritaskan pembangunan LRT Jakarta dalam beberapa tahapan percepatan pembangunan. Hingga tahun 2022, diharapkan sudah ada sedikitnya 39 km jalur LRT Jakarta. Pengembangan awal akan dilakukan terhadap sebagian Koridor 1 dan 2 LRT Jakarta. Selain itu, dalam jangka waktu 5 tahun mendatang sampai dengan tahun 2022, dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, proses akuisisi lahan, serta proses perencanaan, manajemen menargetkan sebesar 60 persen atas seluruh koridor terbangun, atau sepanjang 60 km.

Pembangunan LRT Jakarta diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta pada khususnya, serta dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan dengan adanya integrasi LRT Jakarta secara menyeluruh akan mampu mencapai titik *economies of scale* bagi badan usaha yang menyelenggarakan, sehingga akan mengurangi beban biaya transportasi yang harus ditanggung oleh APBD setiap tahunnya.

c) **Pembangunan BRT**

Dalam rangka menyediakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan umum massal, maka dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (PT. Transportasi Jakarta) sebagai penyelenggara Sistem Bus *Rapid Transit*. Pembentukan BUMD PT. Transportasi Jakarta tersebut diatur dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta.

Dalam rangka pengembangan sistem Pola Transportasi Makro di Provinsi DKI Jakarta, telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus *Rapid Transit*, yang mengatur pengembangan jaringan angkutan umum yang saling terintegrasi dengan kualitas layanan yang baik dan tarif layanan yang terjangkau. Adapun layanan BRT dapat dilihat pada tabel 9.5 berikut :

Tabel 9.5

Layanan
PT. Transportasi Jakarta

No	Indikator	2015	2016	Sept-2017
1	Jumlah pelanggan dalam setahun	102.938.222	123.706.857	105.303.671
2	Jumlah Bus Beroperasi (Hari Kerja)	605	1.056	1.127
3	Jumlah Rute	39	80	97

Sumber : PT. Transportasi
Jakarta, 2017

Saat ini relatif masih tinggi tingkat gangguan kelancaran lalu lintas yang menimbulkan titik - titik kemacetan, rendahnya tingkat disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta semakin tingginya pengguna kendaraan pribadi yang mana hal ini berdampak kepada tidak efisien dan efektifnya mobilitas penduduk.

Rencana pembangunan, revitalisasi dan pengembangan BRT untuk tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut:

- Penambahan dan peremajaan armada
- Pelaksanaan program integrasi antarmoda (OK-OTRIP, fasilitas fisik)
- Pengembangan sistem pelayanan (*ticketing*, sistem informasi, dan lain – lain) transportasi Jakarta
- *Non-fare box income*
- Perluasan jangkauan dan efektifitas jaringan layanan, dengan meneruskan rencana pembangunan Koridor 14 dan Koridor 15, dan/atau pengembangan integrasi dengan jaringan transportasi lainnya (berbasis jalan raya dan rel).

d) Rencana Pengembangan Kereta *Elevated Loopline/ Circular Line*

Sebagai salah satu upaya dalam melakukan revitalisasi pengembangan kereta *commuterline* Jabodetabek guna memberikan peningkatan pelayanan moda transportasi berbasis rel di Provinsi DKI Jakarta serta untuk mengurai titik dan simpul kemacetan yang disebabkan oleh persimpangan sebidang, direncanakan akan dilakukan pengembangan Kereta Jalur Lingkar (*Circular Line*) yang akan melayani lintas Jakarta - Bogor - Depok Tangerang - Bekasi (Jabodetabek).

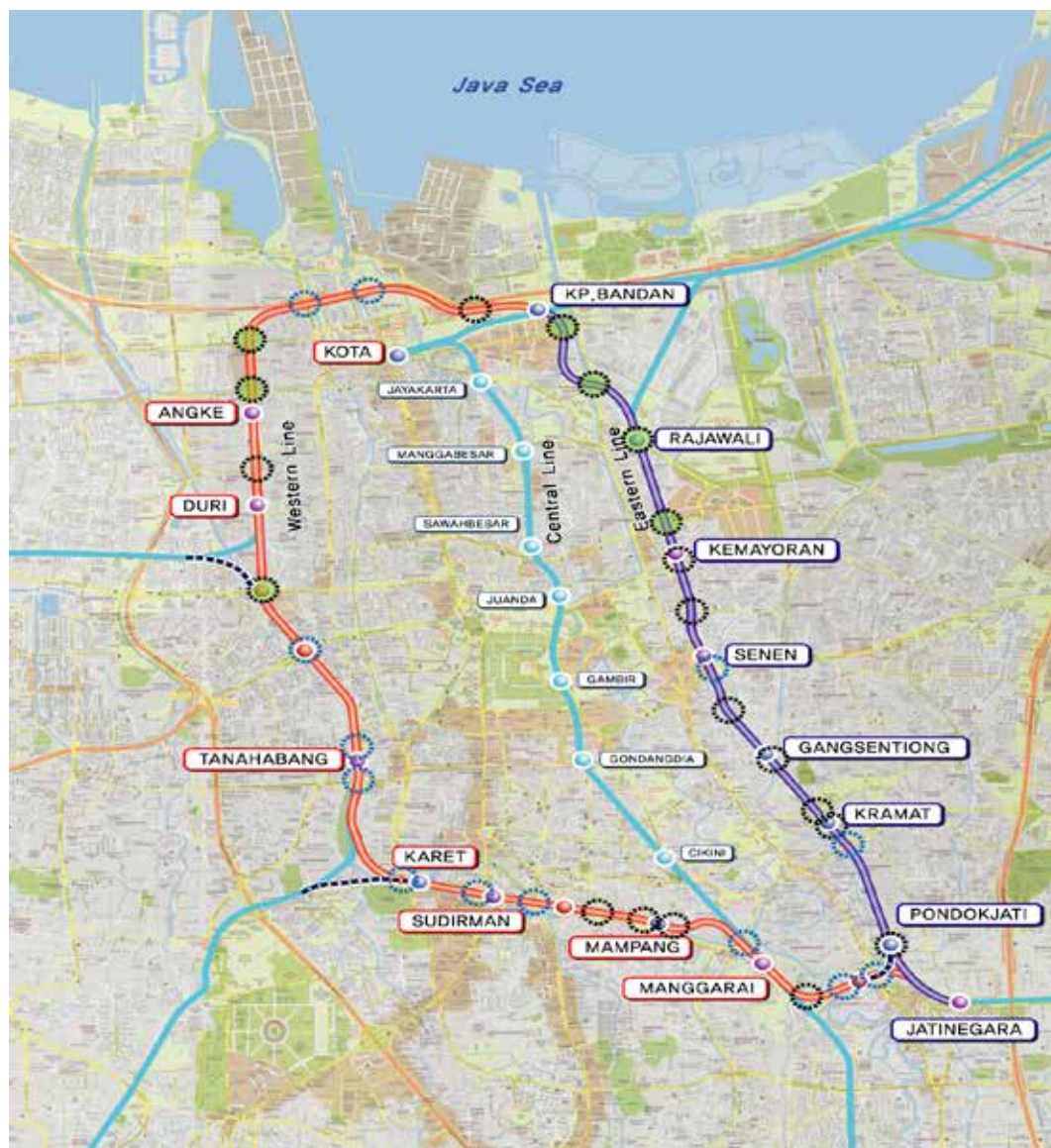
Rencana pengembangan *Elevated Loopline/ Circular Line* sebagai layanan angkutan perkotaan (*urban services*), dilakukan dengan cara membuat *shortcut* dari stasiun Pondok Jati ke arah Manggarai. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor Depok-Tangerang-Bekasi. Melalui Peraturan Presiden dimaksud, penyelenggaraan prasarana sarana perkeretaapian Jalur Lingkar (*Circular Line*) Jakarta - Bogor - Depok Tangerang - Bekasi (Jabodetabek) akan dilakukan melalui skema penugasan dari Pemerintah kepada PT. KAI (Persero), dimana dalam penyelenggaraannya PT KAI (Persero) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengusahaan aset properti PT. KAI (Persero) yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan menjadi *urban services* maka kewenangan penyelenggaraan kereta api *Elevated Loopline/ Circular Line* berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam mengintegrasikan pelayanan angkutan massal berbasis rel berikut pengembangan TOD di DKI Jakarta.

Gambar 9.22

Rute Kereta Api Lintas
Jabodetabek (*Elevated
Loopline/ Circular Line*)

Sumber: Bappenas dan
Kementerian Perhubungan,
2013



Rencana pengembangan Jalur Lingkar (*Circular Line*) Jakarta - Bogor - Depok Tangerang - Bekasi (Jabodetabek) akan terintegrasi dengan lintas pelayanan kereta *Commuterline* Jabodetabek melalui 2 (dua) jalur melingkar. Kedua jalur tersebut meliputi jalur timur dan jalur barat yang dapat dibangun secara melayang (*elevated*). Pembangunan jalur secara melayang dipertimbangkan mengingat pada rute yang direncanakan masih terdapat beberapa titik lokasi perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jalan raya.

Perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud perlu diminimalkan bahkan diiadakan. Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud, diperlukan upaya - upaya penyempurnaan infrastruktur perlintasan tidak sebidang antara lain melalui pembangunan jalan layang (*fly over*) dan/ atau jalan raya di bawah tanah (*underpass*), penataan area sekitar stasiun, koordinasi antar moda, penetapan pengaturan tata ruang dan tata guna lahan untuk pengembangan stasiun yang

telah ada dan baru, serta akses dan pengembangan lainnya. Sebagai langkah awal pelaksanaan dan implementasi rencana pengembangan Jalur Lingkar (*Circular Line*) Jakarta - Bogor - Depok Tangerang - Bekasi (Jabodetabek), Pemerintah melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan menyiapkan *detail engineering design* untuk sistem *Circular Line* lintas wilayah dimaksud.

Sekalipun menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011, penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab PT. KAI (Persero), namun dalam rangka mendukung percepatan pengurangan tingkat kemacetan di Ibukota perlu dipertimbangkan alternatif kebijakan dan/ atau pendanaan untuk dapat mewujudkan pembangunan kedua jalur kereta melingkar dimaksud. Alternatif kebijakan dan/ atau pendanaan dimaksud antara lain melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, *business to business*, atau kerjasama dengan mitra strategis lainnya sesuai dengan kaidah bisnis yang baik dan sebagainya.

e) Integrasi Antar Moda

Dalam rangka pengembangan angkutan umum massal, baik MRT, LRT, maupun BRT, semuanya akan diintegrasikan dengan pengembangan angkutan umum massal yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, swasta dan lainnya, yakni : kereta commuter line, LRT, *loop line*, kereta bandara, kereta cepat, layanan bis antar kota dan lain - lain.

Selanjutnya mengingat tingginya dinamika pembangunan Kota Jakarta termasuk kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi, maka dimungkinkan adanya moda, *alignment*, serta skema berbagai pendanaan alternatif lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan perundang - undangan.

Dalam proses integrasi manajemen moda angkutan jalan dengan PT Transportasi Jakarta, salah satu prinsip yang perlu dikedepankan adalah pelibatan operator angkutan jalan bus swasta secara berkeadilan, transparan, dan mendukung pelayanan maksimal bagi masyarakat. Prinsip-prinsip yang sama pula perlu dikedepankan dalam proses pengembangan integrasi moda angkutan perairan yang melibatkan para operator swasta.

f) Pembangunan Kawasan Transit Terpadu (KTT)/ *Transit Oriented Development* (TOD)

Pengembangan angkutan umum massal, baik yang berbasis rel maupun jalan raya, secara langsung akan berdampak pada perubahan struktur dan pola ruang kota. Secara tidak langsung, berbagai perubahan tersebut akan berdampak pula pada perubahan hidup masyarakat ibukota, menjadi masyarakat yang lebih ramah lingkungan dan lebih optimal dalam pergerakannya, baik untuk masyarakat pejalan kaki maupun pesepeda. Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukanlah pengembangan Kawasan Transit Terpadu (KTT) atau *Transit Oriented Development* (TOD).

Dalam perkembangannya, dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang *Transit Oriented Development*, rumusan *Transit Oriented Development* berkembang dalam konteks yang lebih luas menjadi pengembangan kawasan dengan bangunan berkepadatan tinggi yang berbasis dan berpusat pada stasiun angkutan umum massal. Pengembangan ini akan melahirkan suatu kawasan dengan pertumbuhan baru, berupa kawasan campuran permukiman dan komersil berjarak 350 m - 700 m dari pusat kawasan, yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya melalui pemanfaatan ruang permukaan tanah, ruang layang dan ruang bawah tanah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengembangkan regulasi yang mempromosikan tata kelola kawasan TOD secara komprehensif secara menyusun panduan rancang kota kawasan TOD yang berkelanjutan dan berkeadilan, baik dari aspek tata ruang maupun sosio-ekonomi.

Pembangunan KTT/ TOD dalam lima tahun kedepan, akan dilakukan pada lokasi-lokasi sebagai berikut:

- a. Pengembangan *Transit Oriented Development* pada Koridor *North - South* Fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI)

Sesuai dengan *timeline* pembangunan MRT Jakarta Koridor *North - South* Fase 1, operasional koridor ini direncanakan akan dimulai pada awal tahun 2019. Terkait dengan hal tersebut, PT. MRT Jakarta telah melakukan langkah-langkah persiapan dalam rangka operasional koridor tersebut, termasuk penyiapan *Transit Oriented Development* (TOD) pada beberapa kawasan stasiun MRT Jakarta Koridor *North - South* Fase 1 yakni Bundaran HI, Dukuh Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora, Senayan, Blok M, dan Lebak Bulus.

Gambar 9.23

Konsep Pengembangan TOD

Sumber : PT MRT Jakarta



Dalam pembangunan MRT Jakarta Koridor North - South Fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI), dikembangkan rencana induk kawasan TOD yang berlokasi di delapan stasiun, yaitu Stasiun Lebak Bulus, Stasiun Blok M, Stasiun Senayan, Stasiun Istora, Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun Setiabudi, Stasiun Dukuh Atas dan Stasiun Bundaran HI.

Dalam pengembangan masing-masing TOD tersebut, dilakukan penyesuaian dengan kawasan di sekitarnya, sehingga memunculkan tema-tema antara lain “*Central Business District*” pada kawasan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, “*Garden City*” pada kawasan cagar budaya Kebayoran, dan “*Gateway*” pada kawasan Lebak Bulus yang merupakan gerbang masuk dari wilayah yang berbatasan.

Gambar 9.24

TOD Lebak Bulus

Sumber : PT MRT Jakarta



Sedangkan kehadiran konsep transportasi terintegrasi di Stasiun Dukuh Atas, akan mengatur arus penumpang yang menggunakan lima moda transportasi berbeda di kawasan ini, yaitu MRT Jakarta, *Bus Rapid Transit* (BRT) Transjakarta, kereta bandara (*railink*), kereta komuter (*commuter line*), dan kereta *Light Rapid Transit* (LRT) yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah. Pergerakan manusia ini akan didukung oleh sistem pedestrianisasi kawasan, baik berupa infrastruktur pedestrian yang baru maupun *upgrade* dari infrastruktur pedestrian yang ada, serta ruang - ruang terbuka yang akan dibentuk.

Gambar 9.25

TOD Dukuh Atas

Sumber : PT MRT Jakarta



- b) Pengembangan *Transit Oriented Development* pada Koridor *North – South* Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan)

Melanjutkan pola pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) MRT Jakarta Koridor *North – South* Fase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI), maka sepanjang koridor MRT Jakarta Koridor *North – South* Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan), akan dikembangkan TOD sesuai dengan potensi serta daya dukung lingkungan yang tersedia sebagai satu kesatuan MRT Jakarta Koridor *North – South*. MRT Jakarta Koridor *North – South* Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan) memiliki total panjang jalur lintas pelayanan 8,3 km dengan jumlah stasiun sebanyak 8 stasiun yakni Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, Kota dan Kampung Bandan.

Pengembangan TOD MRT Jakarta Koridor *North – South* Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan) dilakukan dengan memperhatikan *draft* Panduan Rancang Kota yang saat ini sedang dalam tahap proses penyusunan. Visi pengembangan TOD pada koridor ini terdiri dari 5 (lima) konsep pengembangan yaitu :

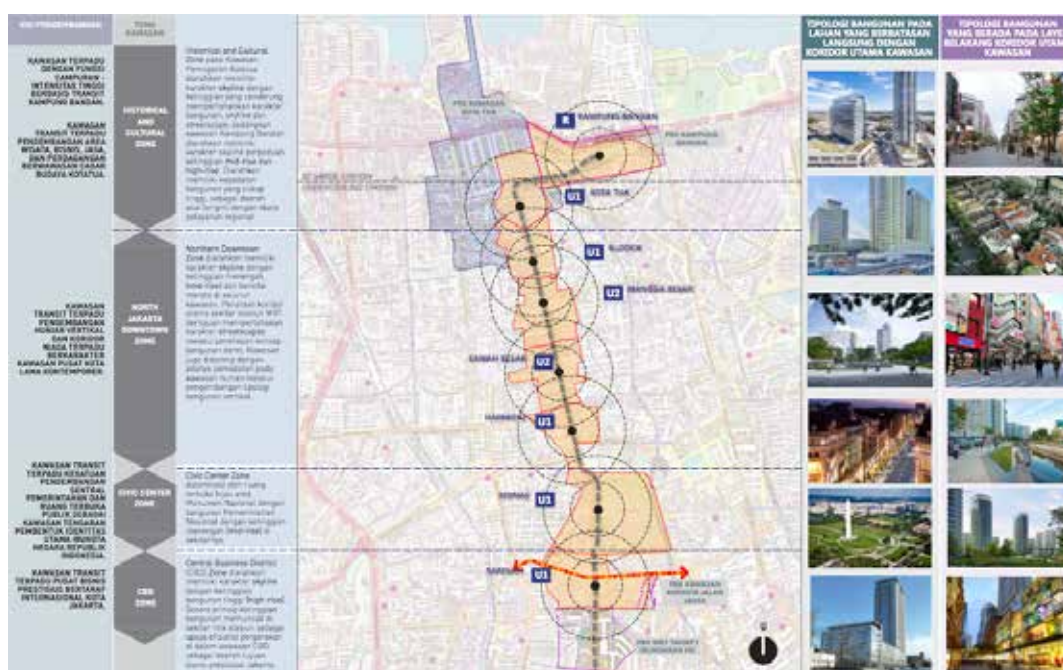
- a. Sarinah, sebagai Kawasan Transit Terpadu pusat bisnis prestisius bertaraf internasional, dengan tema kawasan *Central Business District* (CBD) Zone;
- b. Monas, sebagai Kawasan Transit Terpadu yang merupakan kesatuan pengembangan pusat pemerintahan dengan ruang terbuka publik sebagai kawasan pembentuk identitas utama Ibukota Negara Republik Indonesia, dengan tema kawasan *Civic Center Zone*;

- c. Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, dan Glodok sebagai Kawasan Transit Terpadu pengembangan hunian vertikal dan koridor niaga terpadu berkarakter kawasan pusat kota lama kontemporer, dengan tema kawasan *North Jakarta Downtown Zone*;
- d. Kota Tua, sebagai Kawasan Transit Terpadu pengembangan area wisata, bisnis, jasa dan perdagangan berwawasan cagar budaya Kota Tua dengan tema kawasan *Historical and Cultural Zone*;
- e. Kampung Bandan, sebagai Kawasan Transit Terpadu dengan fungsi campuran intensitas tinggi berbasis transit dengan tema kawasan *Historical and Cultural Zone*.

Gambar 9.26

Konsep Pengembangan TOD MRT Jakarta Koridor North – South Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan)

Sumber : PT MRT Jakarta, 2018



Konsep pengembangan MRT Jakarta Koridor *North – South* Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan) direncanakan menerapkan interkoneksi yang berkelanjutan dimana secara prinsip aksesibilitas dari dan menuju moda MRT, Transjakarta *Busway* serta bangunan dan fasilitas publik lainnya di koridor, dirancang untuk semudah dan menyenangkan mungkin bagi masyarakat pengguna. Prinsip pengembangan TOD dimaksud salah satunya dilakukan dengan rencana pengembangan pedestrianisasi di sepanjang koridor yang mendukung sistem dan aksesibilitas para pengguna sehingga dapat mendorong perubahan *life style* dan mendukung terjadinya peralihan dari kendaraan pribadi menuju angkutan umum massal.

Khusus di lokasi Kampung Bandan yang direncanakan sebagai salah satu lokasi depo MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara, akan dilakukan kerjasama pengembangan TOD

di kawasan tersebut dengan pemilik lahan PT. Kereta Api Indonesia (persero), dengan rencana pengembangan fungsi depo, area komersial, dan perumahan rakyat, yang tetap memperhatikan prinsip interkoneksi dengan KAI *Commuterline*.

Gambar 9.27

Ilustrasi Rencana
Pengembangan TOD
Kampung Bandan

Sumber : PT MRT Jakarta,
2017



- c) Pengembangan *Transit Oriented Development* pada Koridor LRT Jakarta Fase 1 (Kelapa Gading – Velodrome)

Selanjutnya terkait dengan pengembangan TOD, selain pada Koridor *North – South* (Lebak Bulus – Kampung Bandan), di DKI Jakarta juga akan dikembangkan TOD pada 6 stasiun yang berada di Koridor LRT Jakarta Fase 1 (Kelapa Gading – Velodrome), yaitu Velodrome, Pacuan Kuda, Pulomas, Kelapa Gading Boulevard, Kelapa Gading Mall, dan Depo Pegangsaan.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada PT. Jakarta Propertindo Untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*, disebutkan bahwa rencana pengembangan TOD di lokasi depo dilakukan melalui penyediaan struktur pendukung pembangunan pengembangan TOD, dan diutamakan untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, serta terintegrasi dengan bangunan serta fasilitas publik lainnya.

Gambar 9.28

Ilustrasi Rencana
Pengembangan TOD Depo
LRT Jakarta Fase 1

Sumber : PT. Jakarta
Propertindo, 2017



Lokasi Depo Pegangsaan direncanakan untuk dikembangkan sebagai TOD fasilitas publik dan komersial (*mix used*), berupa antara lain TOD hunian vertikal dan pasar perkulakan. Pada tahap awal, PT Jakarta Propertindo membangun pondasi dengan memperhitungkan tingkat optimalisasi lahan Depo LRT yang bisa digunakan. Hal tersebut juga mempertimbangkan aspek - aspek pengembangan properti antara lain yaitu Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB).

Selain Depo Pegangsaan, lokasi potensial lainnya sebagai pengembangan TOD adalah Koridor Pulo Mas dan Velodrome Rawamangun, dimana pada lokasi Pulo Mas terdapat properti milik PT Jakarta Propertindo melalui anak perusahaan PT Pulo Mas Jaya. Lokasi tersebut dapat dikembangkan menjadi hub integrasi antar moda transportasi yang didukung dan dilengkapi dengan pembangunan Equestrian untuk *venue* Asian Games XVIII 2018 dan area komersial yaitu Xventure Pulo Mas yang dapat menjadi *life style hub*. Begitu pula dengan Velodrome Rawamangun yang juga merupakan salah satu venue Asian Games XVIII 2018, memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan terpadu sebagai *park and ride* untuk titik perpindahan dan bentuk interkoneksi/ integrasi langsung dengan moda Transjakarta Busway Koridor 4 Pulogadung – Dukuh Atas, serta sebagai rencana pengembangan LRT tahap selanjutnya yaitu Velodrome – Dukuh Atas – Tanah Abang.

Sedangkan untuk rencana pembangunan LRT Jakarta Fase 2 yaitu rute Velodrome – Dukuh Atas – Tanah Abang sepanjang 11 km, terdapat 2 (dua) lokasi rencana

pengembangan TOD yaitu di Dukuh Atas dan Tanah Abang. Dukuh Atas merupakan *main hub* interkoneksi dan integrasi beberapa moda transportasi angkutan umum massal berbasis jalan dan berbasis rel. Lokasi ini direncanakan akan menjadi titik pusat bertemunya beberapa moda antara lain KRL *Commuterline*, Transjakarta *Busway* Koridor 1 (Blok M – Kota), Kereta Api Bandara Soekarno Hatta, MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara, LRT Jakarta dan LRT Jabodebek. LRT Jakarta dan LRT Jabodebek direncanakan akan diintegrasikan melalui penerapan Pola Operasi Layanan Menerus (*Through Service*) atau *Track Sharing*.

Lintas pelayanan LRT Jakarta Fase 2 direncanakan akan menjangkau Tanah Abang dengan lokasi berada tepat di sekitar area Blok G Pasar Tanah Abang. Hal ini memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan TOD, mengingat di area tersebut terdapat pula lahan milik BUMD PT Sarana Jaya yang dapat dikembangkan sebagai fasilitas publik dan komersial, yang mengintegrasikan Pasar Blok G dengan KRL *Commuterline* dan Transjakarta *Busway*.

Gambar 9.29

Rencana Alignment LRT
Jakarta Fase 2 Koridor
Rawamangun – Dukuh Atas –
Tanah Abang

Sumber : PT. Jakarta
Propertindo, 2018



Dalam rangka mengantisipasi dinamika pertumbuhan kota, pengembangan KTT/TOD tidak terbatas hanya pada Koridor *North – South* Fase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI), Koridor *North – South* Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan) dan Koridor LRT Jakarta Fase 1 (Kelapa Gading – Velodrome), namun dimungkinkan pengembangan pada lokasi lainnya sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g) Penjajakan Pengembangan Moda Angkutan Umum Alternatif

Selain moda angkutan umum massal berbasis jalan berupa *Bus Rapid Transit* (BRT) atau berbasis rel berupa *Mass Rapid Transit* (MRT) dan *Light Rail Transit* (LRT), Provinsi DKI Jakarta juga perlu mempertimbangkan pengembangan moda angkutan umum lainnya sebagai alternatif fasilitas transportasi. Mengingat hampir seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta telah terbangun, maka setidaknya moda alternatif antara lain seperti bus listrik (baik bus besar, sedang, atau kecil), *Automated Guideway Transit* (AGT), atau *Cable Car* merupakan jenis moda yang patut dipertimbangkan sebagai salah satu rencana pengembangan transportasi ke depan.

h) **Electronic Road Pricing (ERP)**

Berdasarkan hasil *Study on Integrated Transportation Master Plan* (SITRAMP) tahun 2004 yang dilakukan oleh Konsultan JICA, bahwa jika sampai dengan tahun 2020 tidak dilakukan perbaikan pada sistem transportasi Jabodetabek, maka estimasi kerugian ekonomi yang akan terjadi adalah sebesar Rp. 65 triliun, meliputi kerugian biaya operasional kendaraan sebesar Rp. 28,1 triliun dan kerugian nilai waktu perjalanan sebesar Rp. 36,9 triliun.

Pada saat ini jumlah jaringan jalan dan kebutuhan perjalanan serta kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel 9.6 berikut :

Tabel 9.6

Gambaran Umum
Transportasi Jakarta

Sumber : Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta dan
Dinas Bina Marga Provinsi
DKI Jakarta, diolah

SUPPLY	
Jaringan jalan	Panjang jalan 6.652 km = 46,426 km ²
	Road ratio = 7,10% (dari luas wilayah DKI Jakarta)
	Pertumbuhan panjang jalan ± 0,01% /tahun
DEMAND	
Kebutuhan perjalanan	25,7 juta perjalanan/hari (Jabodetabek)
	74,7% menggunakan kendaraan pribadi
	25,3% menggunakan angkutan umum
Kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta : ± 9,2 juta unit (2013) dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">• Kendaraan pribadi : 9,1 juta (98,9%)• Angkutan umum : 104 ribu (1,1%)

Berdasarkan data - data di atas, upaya mengatasi kemacetan di Provinsi DKI Jakarta ditujukan pula untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lalu lintas berbasis jalan raya sekaligus pengendaliannya, dengan penerapan program pengendalian lalu lintas *Transportation Demand Management* (TDM), yakni melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik/ *Electronic Road Pricing* (ERP), dengan kriteria penerapan pada koridor sebagai berikut :

1. Memiliki 2 jalur jalan yang setiap jalur memiliki paling sedikit 2 lajur.
2. Tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan) pada jam puncak; dan/atau;
4. Hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 km/jam (sepuluh kilometer per jam).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik, telah ditetapkan pada tahap awal Sistem Jalan Berbayar Elektronik akan diterapkan pada koridor sebagai berikut : Jalan Sisingamangaraja, Jalan Sudirman, Jalan MH. Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gatot Soebroto, dan Jalan Rasuna Said, yang merupakan 9 ruas jalan yang dapat diberlakukan Sistem Jalan Berbayar Elektronik. Ruas jalan dan/ atau kawasan selain itu dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berikutnya. Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik dapat dilakukan melalui investasi pihak ketiga atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

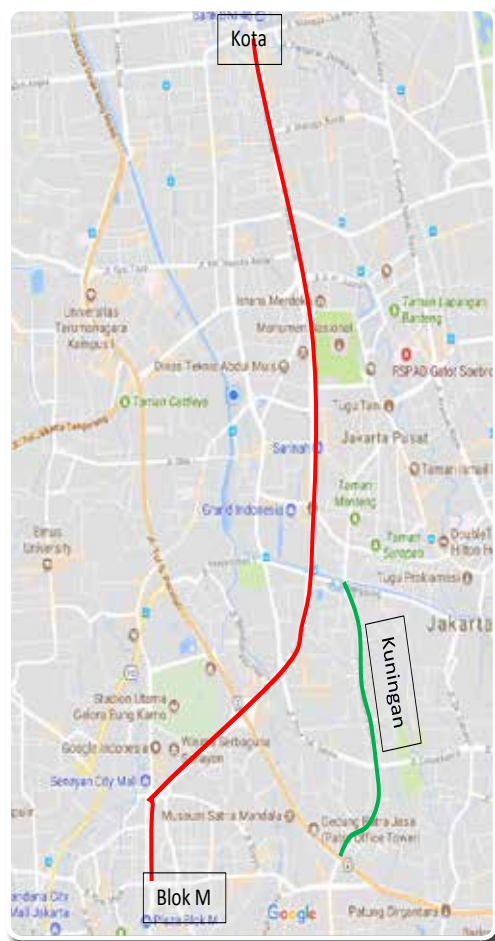
Pada tahun 2019 direncanakan pembangunan 2 (dua) koridor sebagai berikut :

1. Koridor Blok M – Kota, sepanjang 12,7 km, melalui : Jalan Sisingamangaraja – Jalan Sudirman – Jalan MH. Thamrin – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan Majapahit – Jalan Gajah Mada/Jalan Hayam Wuruk.
2. Koridor Kuningan – HOS Cokroaminoto, sepanjang 4,3 km, melalui : Jalan Rasuna Said.

Gambar 9.30

ERP Koridor Blok M – Kota
dan Koridor Kuningan – HOS
Cokroaminoto

*Sumber: Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta, 2017*



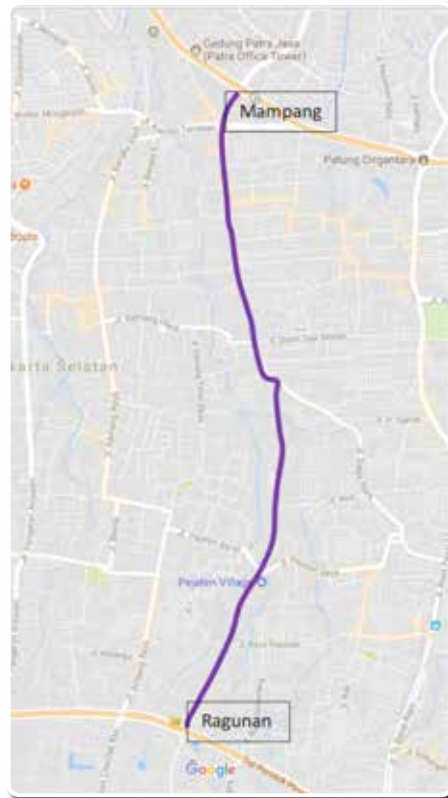
Sedangkan pada tahun 2021, direncanakan pembangunan 2 (dua) koridor lainnya, yakni :

- 1) Mampang – Ragunan, sepanjang 6,6 km.

Gambar 9.31

ERP Koridor Mampang –
Ragunan

*Sumber: Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta, 2017*

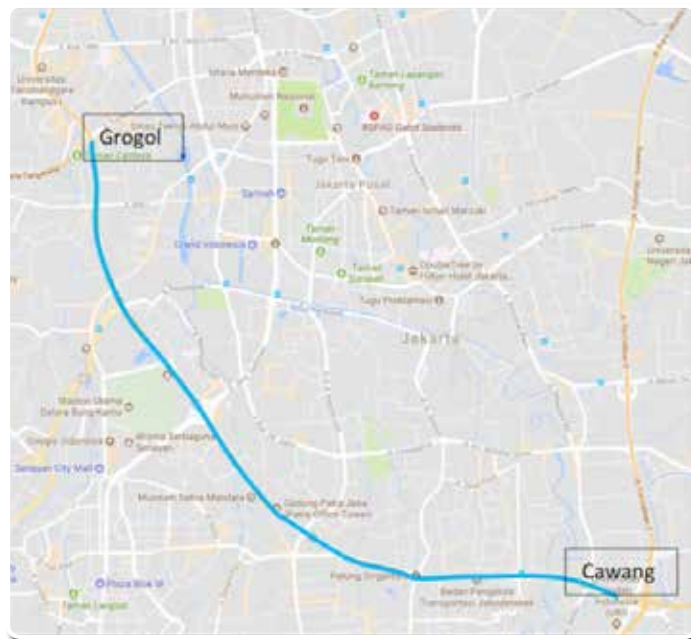


- 2) Cawang – Grogol, sepanjang 12,5 km.

Gambar 9.32

ERP Koridor Cawang – Grogol

*Sumber: Dinas Perhubungan
dan Transportasi dan Dinas
Bina Marga, diolah*



i) Pembatasan Parkir dan Fasilitas Park and Ride

Pembatasan parkir ditujukan pada lokasi sisi/ tepi/ badan jalan (*on-street parking*) dan mendorong peningkatan pemanfaatan parkir di luar sisi/ tepi/ badan jalan (*off-street parking*). Kebijakan pembatasan *on-street parking* pada beberapa ruas jalan yang telah jenuh dan sejajar koridor Busway, telah dilakukan pada beberapa ruas jalan berikut : Jl. Gajah Mada, Jl. Hayam Wuruk, Jl. HOS Cokroaminoto (Menteng), Jl. Gunung Sahari, Taman Suropati (Menteng), Jl. Jatinegara Barat, Jl. Matraman, Jl. Pramuka, Jl. Otista, Jl. KH. Mas Mansyur (Tanah Abang), Jl. Raya Pasar Minggu, Jl. Kramat Raya depan Polres, Jl. Nipah (Walikota Jakarta Selatan), Jl. Samanhudi, Jl. Sunda (depan Kedubes Perancis), Jl. Tali, Jl. Pemuda (Lab School), dan Jl. Basuki Rahmat (Pasar Gembrong).

Rencana pelaksanaan pembatasan parkir pada periode tahun 2017-2022, sebagai berikut:

- a. Pembangunan kantung - kantung parkir yang akan diupayakan melalui skema kerja sama dengan pihak swasta (investasi), antara lain : Kebon Kacang (Grand Indonesia), Kali Item (Cempaka Mas), dan Roxy. Untuk melengkapi *park and ride* yang telah terbangun, dalam lima tahun kedepan direncanakan pembangunan kantung-kantung parkir di beberapa lokasi sentral.

Gambar 9.33

Konsep Kantung Parkir

Sumber: Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta, 2017



- b. Pembinaan *Park and Ride* di wilayah DKI Jakarta

Prioritas pembangunan *park and ride* adalah di setiap titik TOD di 5 kotamadya DKI Jakarta. Hal ini untuk mendukung masyarakat beralih dari moda transportasi pribadi ke moda transportasi massal yang tersedia sehingga memprioritaskan pedestrian dalam radius TOD.

Untuk mendukung kebutuhan data potensi dan kelayakan perencanaan pembangunan *park and ride* secara vertikal maupun data keseluruhan potensi *park and ride* di setiap titik perpindahan moda di DKI Jakarta, maka akan dilakukan pendataan potensi sebagai dasar pertimbangan kelayakan perencanaan pembangunan *park and ride* tersebut. Pendataan potensi meliputi pendataan kantung-kantung parkir atau penitipan kendaraan yang dikelola oleh perorangan (penitipan kendaraan rumahan) dan angka tingkat kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas *park and ride*. Rencana selanjutnya adalah dengan menerbitkan regulasi terkait pembinaan dan penggunaan *park and ride* dan melakukan sosialisasi terhadap penerbitan regulasi dan penggunaan *park and ride* di seluruh DKI Jakarta. Skema pembiayaan dapat melalui APBD maupun non-APBD.

- c. Penerapan *online system* dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan, dari 36 titik menjadi 441 ruas jalan, atau sebesar 8,1 persen dari seluruh ruas jalan *on street parking*.

Dalam lima tahun ke depan direncanakan pembangunan *park and ride* secara vertikal pada lokasi Terminal Kampung Rambutan dan Terminal Kalideres. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan titik perpindahan moda bagi para pengguna kendaraan pribadi dari wilayah timur Jakarta dan Depok, ke moda angkutan umum yang terintegrasi dengan layanan Transjakarta *Busway* Koridor 7 (Kampung Rambutan – Kampung Melayu), Blok M serta Lebak Bulus. Untuk pembangunan fasilitas *park and ride* di Terminal Kalideres, diharapkan dapat menjadi titik perpindahan moda para pengguna kendaraan pribadi dari wilayah barat Jakarta dan Tangerang, yang terintegrasi dengan Transjakarta Koridor 3 (Kalideres – Pasar Baru). Pembangunan *park and ride* akan dirancang untuk menjadi nyaman mungkin baik dari segi tarif maupun prasarana parkir dan fasilitas pendukungnya bagi masyarakat pengguna sehingga mendukung terjadinya peralihan dari kendaraan pribadi menuju angkutan umum massal.

j) ***Intelligent Transportation System (ITS)/ Area Traffic Control System (ATCS)***

Sistem *Intelligent Transportation System* (ITS) menerapkan teknologi informasi dan komunikasi transportasi berbasis jalan meliputi infrastruktur, kendaraan dan pengguna, manajemen lalu lintas dan mobilitas untuk antarmuka dengan moda transportasi lainnya.

Pada saat ini telah terpasang ITS sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2013 terbangunnya Sistem *Area Traffic Control System* (ATCS) pada 37 simpang, dan terpasangnya kamera pemantau lalu lintas pada 39 unit CCTV di wilayah DKI Jakarta
- 2) Pada tahun 2014 terpasangnya kamera pemantau lalu lintas pada 69 unit CCTV di wilayah DKI Jakarta

- 3) Pada tahun 2016 terbangunnya Sistem *Area Traffic Control System* (ATCS) pada 3 simpang di wilayah DKI Jakarta
- 4) Pada tahun 2017 terbangunnya Sistem *Area Traffic Control System* (ATCS) pada 11 simpang di wilayah DKI Jakarta

Sistem yang telah terpasang tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 9.34

Area Traffic Control System
(ATCS)

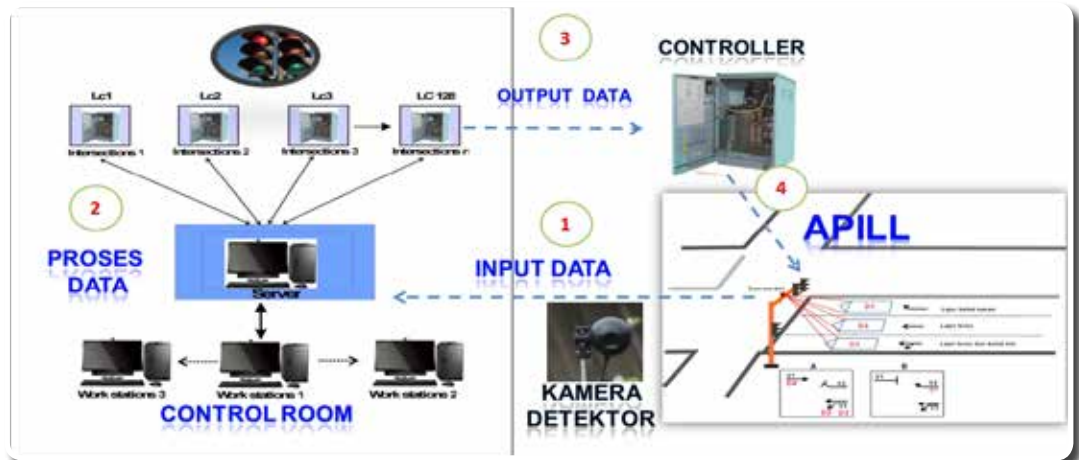
Sumber: Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta, 2017



*Peralatan Pendukung Dan Ruang
Operator CCTV Berspeaker*



Ruang NOC Pengontrol System ITS



Skema Kerja Area Traffic Control System (ATCS)

Rencana Pengembangan Sistem ITS Tahun 2018-2022, diarahkan pada terbangunnya Sistem Pemantau Lalu Lintas dan terbangunnya Sistem Pemantau Lalu Lintas CCTV Berspeaker pada 319 simpang di wilayah DKI Jakarta yang terintegrasi ruang control NOC (*Network Operation Center*). Sistem Pemantau Lalu Lintas tersebut diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan pemantauan dari ruang kontrol secara langsung terhadap situasi lalu lintas di simpang-simpang sehingga sistem dapat melakukan kontrol terhadap pelanggaran lalu lintas disamping dapat memberikan himbauan melalui CCTV berspeaker disertai hasil rekaman CCTV yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan antara lain Petugas

Dinas Perhubungan maupun pihak Kepolisian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sistem Pemantau Lalu Lintas akan dapat bekerja dengan efektif jika didukung dengan penerapan penegakan hukum secara elektronik (*Electronic Law Enforcement / ELE*). Masih terdapatnya kelemahan-kelemahan di dalam penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual atau konvensional, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk turut berperan di dalam membantu mewujudkan penegakan hukum secara elektronik (ELE).

ELE merupakan suatu sistem penegakan hukum di era digital dalam rangka pencegahan dan penurunan korban fatalitas kecelakaan, perbaikan dan peningkatan kualitas keselamatan serta membangun budaya tertib berlalu lintas serta pelayanan prima kepolisian di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Semua itu untuk mendukung terwujudnya dan terpeliharanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

Namun, pada hakekatnya penegakan hukum secara elektronik merupakan wewenang kepolisian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mendukung penerapannya, dengan menyediakan infrastruktur seperti kamera ANPR dan lain-lain di jalan yang dapat memberikan alat bukti elektronik yang akurat, untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Kemudian agar implementasi penegakan hukum secara elektronik dapat berjalan dengan efektif, para *stakeholder* terkait yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Korlantas POLRI, Pengadilan, Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak perlu duduk bersama dalam suatu *Memorandum of Understanding* (MoU) Penyelenggaraan Penegakan Hukum Secara Elektronik di Provinsi DKI Jakarta, sehingga penegakan hukum secara elektronik dapat terwujud di Provinsi DKI Jakarta.

k) Pengembangan Jaringan Jalan dan Pedestrianisasi

a) Pembangunan Jalan

Kondisi panjang jalan di Provinsi DKI Jakarta tercatat 6.652,7 km, yang terdiri dari 160,357 km Jalan Tol; 57,70 km Jalan Arteri Primer; 2,16 km Jalan Kolektor Primer; 694,46 km Jalan Arteri Sekuder; 788,62 km Jalan Kolektor Sekuder; dan 4.949,39 km Jalan Lokal, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9.7 sebagai berikut :

Tabel 9.7

Data Jalan di Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, 2017

No	Peran Jalan	Panjang (m)	Luas (m²)	Kewenangan
1	Toll	160.350	4.009.950	Nasional / Jasa Marga
2	Arteri Primer	57.696	956.896	Nasional / Kementrian
3	Kolektor Primer	2.160	31.540	PUPR
		59.856	988.436	-
4	Arteri Sekunder	694.460	11.180.145	Provinsi

No	Peran Jalan	Panjang (m)	Luas (m²)	Kewenangan
5	Kolektor Sekunder	788.618	6.701.165	DKI Jakarta
6	Lokal	4.949.394	23.546.835	-
		6.432.473	41.428.144	-
JUMLAH		6.652.679	46.426.530	-
Luas Wilayah (daratan)		-	653.630.000	5 Kota Administrasi
Road Ratio		-	7,10%	-

Rencana pembangunan, revitalisasi dan pengembangan infrastruktur jalan dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

- i. Peningkatan *Ridership* Angkutan Umum
 - Pembangunan Simpang Susun (Simpang Tak Sebidang/ *Flyover/ Underpass*) dimaksudkan untuk menanggulangi kemacetan jenuh pada persimpangan jalan serta memisahkan jalan dengan rel kereta dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu-lintas jalan raya. Pembangunan simpang susun pada persimpangan jalan dengan rel kereta diharapkan akan meningkatkan pelayanan KRL *Commuterline* yang digunakan sebagai salah satu moda transportasi umum massal masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

Adapun rencana pembangunan simpang susun pada tahun 2018 – 2022, terdiri dari 12 lokasi yang difokuskan pada persimpangan jalan raya yang masih sebidang pada persimpangan jalur rel kereta Jabodetabek.

Tabel 9.8

Rencana Waktu Pelaksanaan
Pembangunan Simpang
Susun Tahun 2018 – 2022

*Sumber : Dinas Bina Marga,
2017*

No	Tahap Pembangunan	Waktu Pelaksanaan					Jumlah Lokasi
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pembangunan Simpang Susun <i>Multiyears</i> 2018-2020	√	√	√			2 Lokasi
2	Pembangunan Simpang Susun <i>Multiyears</i> 2019-2021		√	√	√		4 Lokasi
3	Pembangunan Simpang Susun <i>Multiyears</i> 2020-2022			√	√	√	6 Lokasi

- Pembangunan Jalur Busway

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro, Jakarta memiliki rencana 15 koridor Jalur Eksklusif Khusus Busway. Saat ini masih ada 2 koridor busway yang belum terselesaikan, yaitu Koridor 14 (Blok M – Kalimalang) dan Koridor 15 (Pasar Minggu – Manggarai), dan hal ini menjadi amanah yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengingat peraturan tersebut telah cukup lama ditetapkan, maka cukup layak untuk dilakukan evaluasi, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk ditetapkan penyesuaian dan/ atau pengembangan integrasi dengan jaringan jalan lainnya disesuaikan perkembangan kondisi aktual Jakarta saat ini. Secara program, rencana ini juga merupakan bagian dari Program Peningkatan Konektivitas dan *Road Ratio*.

- Penataan Trotoar dan Penciptaan Ruang Publik Pada Koridor Jalan

Penataan trotoar di Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk mewujudkan jaringan jalur pejalan kaki di kawasan perkotaan yang aman, nyaman, dan manusiawi sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik, sehingga dapat mendukung terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Kaidah-kaidah teknis, diantaranya *rightsizing street* dan pengaturan konsistensi lajur, serta aksesibilitas pejalan kaki termasuk juga kebutuhan bagi kelompok difabel akan menjadi perhatian dalam penataan trotoar dan ruang jalan secara keseluruhan. *Rightsizing street* dan pengaturan konsistensi lajur diterapkan selain menata ulang lajur kendaraan dan trotoar, juga akan mempertimbangkan kebutuhan secara teknis diantaranya jalur khusus bus/*busway* serta *lay by* untuk *bus stop*, jalur sepeda, penyeberangan untuk pejalan kaki yang diharapkan akan meningkatkan efektivitas manfaat ruas jalan.

Jalur pejalan kaki pada prinsipnya harus disediakan secara terus menerus dan tidak boleh terputus, dengan menerapkan aksesibilitas yang meliputi tiga hal yaitu kemudahan, keamanan, dan kenyamanan termasuk bagi kelompok difabel. Penyediaan trotoar sebagai jalur pejalan kaki khususnya pada sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder menjadi sasaran utama untuk penataan trotoar yang layak di Provinsi DKI Jakarta untuk saat ini dan masa mendatang.

Gambar 9.35

Penataan Trotoar
Jl. Jatinegara Timur
Jakarta Timur (2017)

Sumber: Dinas Bina Marga,
2017



Seluruh jalan arteri/kolektor sekunder yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sepanjang 1.446 km, dengan asumsi dibangun di dua sisi jalan maka panjang trotoar adalah 2.892 km. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya penyedia dan anggaran daerah, diperkirakan hanya sekitar 10 persen dari panjang jalan arteri/ kolektor sekunder yang dapat dilaksanakan penataan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, maka ditentukan prioritas utama penataan trotoar, yaitu pada kawasan-kawasan pusat kegiatan dan lokasi simpul-simpul perpindahan antar moda transportasi publik.

Tabel 9.9

Proyeksi Target Pencapaian
Pembangunan Trotoar

Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
	2018	2019	2020	2021	2022	
1,815,875 m ²	146,400 m ²	146,400 m ²	146,400 m ²	146,400 m ²	146,400 m ²	2,547,875 m ²

Sumber : Dinas Bina Marga,
2017

Kawasan pusat kegiatan yang menjadi sasaran penataan trotoar mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), merupakan kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kegiatan pelayanan kota menurut hierarki, yang terdiri dari kawasan pusat kegiatan primer, kawasan pusat kegiatan sekunder, dan kawasan pusat kegiatan tersier.

Tabel 9.10

Rencana Waktu Pelaksanaan
Penataan Trotoar Tahun
2018 – 2022

Sumber : Dinas Bina Marga,
2017

No	Tahap Pembangunan	Waktu Pelaksanaan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	√	√	√	√	√
2	Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	√	√	√	√	√
3	Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	√	√	√	√	√
4	Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat	√	√	√	√	√
5	Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	√	√	√	√	√

Dalam rangka mendukung kebijakan penerapan TOD, penciptaan ruang publik kota (*urban transform*) dalam bentuk koridor jalan yang eksklusif untuk pejalan kaki juga menjadi bagian yang melekat dari program penataan trotoar ini. Koridor eksklusif pejalan kaki ini nantinya diharapkan dapat menjadi tempat interaksi para komuter dan kegiatan-kegiatan masyarakat.

Gambar 9.36

Rencana Penataan Trotoar Jl.
Sudirman – MH. Thamrin

Sumber : Dinas Bina Marga,
2018



- Pembangunan Jalan Orang Tak Sebidang (JPO/TPO/*Skywalk*)

Dalam rangka mengupayakan kelancaran perjalanan orang untuk berpindah dari satu moda angkutan ke moda lainnya dan/atau dapat berpindah dari suatu area ke area lainnya, serta untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu-lintas perlu dibangun prasarana untuk penyeberangan bagi pejalan kaki yang

tidak sebidang antara lain dalam bentuk Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Terowongan Penyeberangan Orang (TPO), atau pun *skywalk* sebagai prasarana yang juga sekaligus dapat menjadi ruang integrasi antar moda angkutan.

Adapun rencana pembangunan jalan orang tak sebidang (JPO/TPO/*skywalk*) pada tahun 2018 – 2022 adalah sebanyak 20 (dua puluh) unit JPO/ TPO/ *skywalk*.

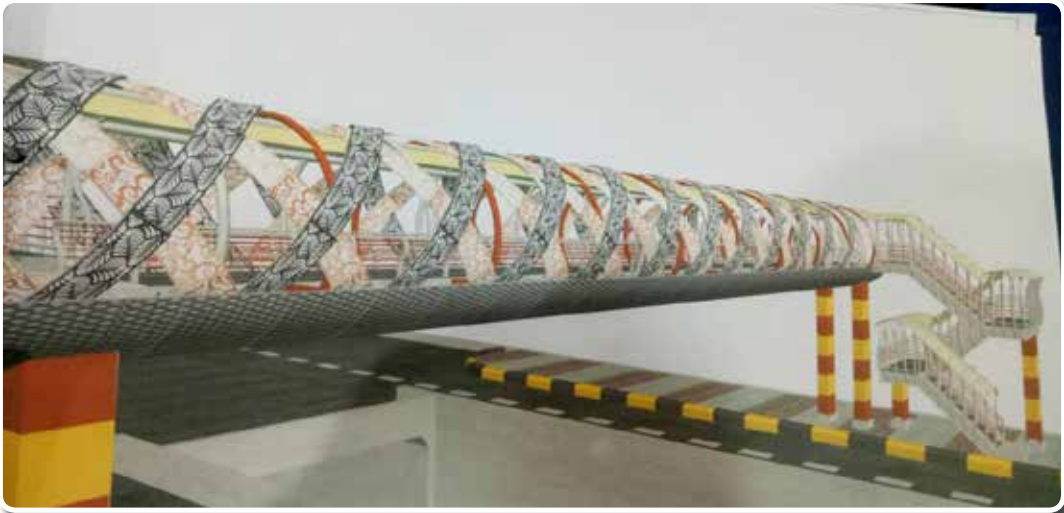
Tabel 9.11
Rencana Pelaksanaan
Pembangunan Jalan Orang
Tak Sebidang (JPO/TPO/
Skywalk) Tahun 2018 – 2022

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Keterangan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pembangunan JPO/TPO/ <i>skywalk</i>	√	√	√	√	√	

Sumber : Dinas Bina Marga,
2017

Gambar 9.37
Ilustrasi Desain JPO (2017)

Sumber : Dinas Bina Marga,
2017



ii. Peningkatan Konektivitas dan *Road Ratio*

Program Pengembangan Jaringan Jalan dalam 5 (lima) tahun kedepan secara umum merupakan program lanjutan atas rencana atau proses yang tengah dijalankan pada masa-masa sebelumnya. Sasaran pengembangan jalan tersebut ditujukan untuk meningkatkan konektivitas wilayah untuk mengakomodasi kebutuhan pergerakan transportasi masyarakat berupa pembangunan jalan sejajar kali / rel serta pembangunan jalan tembus (*missing link*).

Melengkapi Program Pengembangan Jaringan Jalan, peningkatan lebar jalan mengacu pada trase ideal yang merupakan rencana induk untuk peningkatan kapasitas pada jaringan jalan di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 9.12

Rencana Pelaksanaan
Pembangunan dan Pelebaran
Jalan Tahun 2018 – 2022

Sumber : Dinas Bina Marga,
2017

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Keterangan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pembangunan Jalan Baru	√	√	√	√	√	
2	Pembangunan Jalan Tembus (Missing Link)	√	√	√	√	√	
3	Pelebaran Jalan	√	√	√	√	√	

Pelaksanaan peningkatan konektivitas dan road ratio dilaksanakan secara bertahap dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran setiap tahunnya, dengan target peningkatan *road ratio* sebesar 0,015 persen dalam 5 tahun.

iii. Penanganan / Pemeliharaan Jalan, Menjaga Kondisi Jalan Mantap

Untuk menjaga kondisi jalan di Jakarta pada tingkat pelayanan terbaiknya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan melalui beberapa jenis penanganan yaitu : Pemeliharaan Rutin Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, dan Peningkatan Jalan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tahunnya terhadap seluruh jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan mempertimbangkan kondisi aktual dan aspirasi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan selalu berusaha menjaga kondisi jalan pada tingkat pelayanan terbaik, dengan target kondisi jalan mantap 98 persen sepanjang waktu, pada seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 9.38

Pemeliharaan Jalan (2017)

Sumber : Dinas Bina Marga,
2017



iv. Pengembangan dan Penataan Jaringan Utilitas Bawah Tanah

Pengembangan dan penataan jaringan utilitas merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan program kerja saat ini dan di masa mendatang. Dengan tertatanya jaringan utilitas galian-galian untuk instalasi jaringan utilitas pada bahu jalan dapat diminimalkan, sehingga tingkat kemantapan jalan dapat terjaga.

Penataan jaringan utilitas merupakan persoalan kompleks, untuk itu pelaksanaan pengaturan dan pengendalian jaringan utilitas ini perlu didukung kelembagaan tertentu. Yaitu lembaga yang akan bertugas mengelola, mengatur serta bila memungkinkan melakukan pengusahaannya.

Alternatif kebijakan dan/atau pendanaan/pengusahaannya selain melalui APBD, juga dimungkinkan opsi-opsi lain seperti KPBU atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Untuk mengakomodasi hal tersebut penyusunan dan penetapan peraturan pendukung juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pengembangan dan penataan jaringan utilitas di Provinsi DKI Jakarta.

l) Integrasi Sistem Pembayaran Moda Transportasi di Jabodetabek

Sebagian besar sistem pembayaran moda transportasi di Jabodetabek pada saat ini masih belum menerapkan sistem *e-ticketing* (tiket sekaligus menjadi alat pembayaran), hanya KCJ & TransJakarta yang telah menerapkan sistem *e-ticketing*, dan ini pun masih belum ada standarisasi proses *e-ticketing*nya serta belum terintegrasi satu sama lainnya. Hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan - permasalahan klasik akibat penggunaan uang tunai seperti kebocoran pendapatan, timbulnya antrian, permasalahan rekonsiliasi dan lain sebagainya.

Dalam rangka mendukung terwujudnya transaksi non – tunai di berbagai sektor di Ibukota, maka perlu dikembangkan sistem elektronik yang efisien. Salah satu bentuk elektronifikasi yang dimaksud adalah menyelenggarakan sistem tiket elektronik angkutan umum Ibukota (*e-ticketing*) yang terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat mendorong perubahan gaya hidup masyarakat dan meningkatkan penggunaan transportasi publik. Sistem *e-ticketing* dimaksud diharapkan mampu menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat dan dapat digunakan diberbagai moda transportasi berbasis rel, jalan, air/ laut, dan/ atau basis lainnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait *e-ticketing*, yang meliputi Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pola pengembangan *e-ticketing* dimaksud adalah : standarisasi sistem pembayaran moda transportasi yang meliputi platform uang elektronik, menetapkan standarisasi sistem pembayaran bagi operator transportasi, mengintegrasikan pengembangan infrastruktur transportasi untuk perluasan pembayaran secara non tunai.

Strategi integrasi sistem pembayaran moda transportasi Jabodetabek dijabarkan secara tahunan sebagai berikut :

Tabel 9.13

Rencana Pengembangan
Integrasi Sistem Pembayaran
Moda Transportasi
Jabodetabek

No.	Tahapan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persiapan meliputi penyusunan model bisnis dan studi kelayakan secara umum	√				
2.	Pengadaan dan Perizinan	√	√			
3.	Pengoperasian dan Perawatan Sistem		√	√	√	√

Sumber : Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta, diolah

c. Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan Sumber Daya Air akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program utama terkait untuk mendukung Program Prioritas Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 – 2022 yaitu:

- 1) Program Pengendali Banjir Dan Abrasi :
 - a) Pembangunan Tanggul Laut dan Muara Sungai
 - b) Pembangunan waduk/ naturalisasi dan normalisasi sungai
 - c) Perbaikan Tata Kelola Air
- 2) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Air Bersih
- 3) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Air Limbah
 - 1) Pengendalian Banjir dan Abrasi
 - a) Pembangunan Tanggul Laut dan Muara Sungai

Kawasan pesisir Jakarta merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap bahaya banjir, baik yang berasal dari hujan dengan intensitas tinggi, limpasan sungai, maupun air laut. Beberapa hal yang menjadi penyebab utama terjadinya hal tersebut adalah penurunan muka tanah yang semakin cepat, peningkatan debit sungai dari kawasan hulu maupun hujan lokal yang tidak terakomodasi oleh sistem drainase yang ada, serta terbatasnya lahan untuk tambahan kawasan retensi air. Dengan kondisi tersebut, apabila tidak dilakukan upaya mitigasi secara optimal, maka diperkirakan dalam rentang waktu 10 - 15 tahun sebagian besar kawasan Jakarta Utara akan tergenang oleh air laut.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1685 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rencana Trace Indikatif Tanggul Laut Terintegrasi Daratan Tahap A di Sepanjang Pesisir Pantai Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah ditetapkan trase indikatif tanggul laut dan tanggul muara sungai. Adapun panjang tanggul laut di lapangan sebagai berikut :

Tabel 9.14

Pemrakarsa dan Panjang
Tanggul

Sumber : Kementerian
PUPR RI, 2017

Pemrakarsa	Garis Pantai (m)	Muara Sungai (m)	Panjang Tanggul (m)
Pemerintah (BBWSCC dan DKI)	19.145	57.644	56.430
Wilayah DKI	11.906	50.869	62.775
Wilayah Bekasi	6.659	-	6.659
Wilayah Tangerang	580	6.775	7.355
Swasta, BUMN/BUMD	43.487	-	43.487
Wilayah DKI	35.526	-	35.526
Wilayah Bekasi	4.124	-	4.124
Wilayah Tangerang	3.837	-	3.837
Total	62.632	57.644	120.276

Pembangunan Tanggul Laut merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional, yang termuat baik di dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Secara total panjang tanggul laut yang akan dibangun melintasi wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi, adalah sepanjang 120.276 meter, terdiri atas tanggul pantai sepanjang 62.632 meter dan tanggul muara sungai sepanjang 57.644 meter. Dalam pembangunannya direncanakan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMN/ BUMD, serta sektor swasta.

Adapun rencana pembangunan tanggul laut sepanjang 3.338 meter oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

- Pembangunan tanggul Laut Aliran Barat (Kamal Muara)
 - Tahun 2018 direncanakan sepanjang 250 meter
 - Tahun 2019 direncanakan sepanjang 180 meter
 - Tahun 2020 direncanakan sepanjang 140 meter

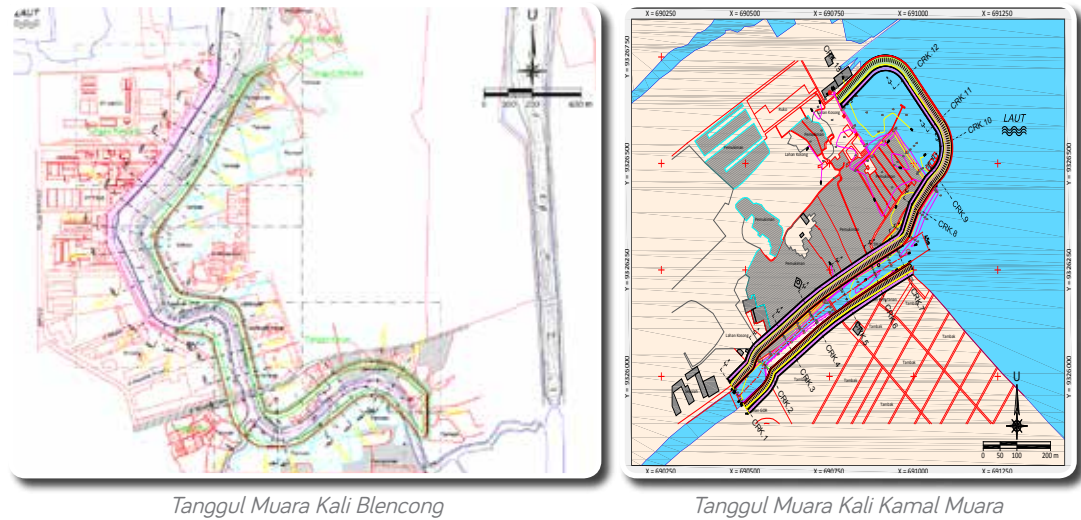
- Tahun 2021 direncanakan sepanjang 300 meter
- Tahun 2022 direncanakan sepanjang 300 meter
- Pembangunan tanggul Laut Aliran Timur
 - Tahun 2018 direncanakan sepanjang 1.000 meter
 - Tahun 2019 direncanakan sepanjang 1.168 meter

Sedangkan lokasi dan trase pembangunan tanggul muara dimaksud adalah sebagai berikut :

Gambar 9.39

lokasi dan trase pembangunan tanggul muara

Sumber : Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), 2016



b) Pembangunan Waduk/ Naturalisasi dan Normalisasi Sungai

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh kerugian banjir di Jakarta adalah dengan pembangunan waduk, normalisasi dan naturalisasi sungai. Ada 13 sungai yang melintasi Jakarta yang sedang, akan, dan telah dinormalisasi dan dinaturalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookevert, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Selain itu, aliran sungai buatan seperti Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur serta waduk - waduk di Jakarta juga dibenahi. Hal ini guna meningkatkan tampung air sehingga tidak meluap dan menggenangi wilayah di sekitar aliran air.

1. Pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya Sistem Aliran Tengah
2. Pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya Sistem Aliran Timur

3. Pembangunan prasarana kali/ sungai dan kelengkapannya Sistem Aliran Barat
4. Pembangunan waduk/ situ/ embung dan kelengkapannya Sistem Aliran Barat
5. Pembangunan waduk/ situ/ embung dan kelengkapannya Sistem Aliran Timur

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menerapkan konsep naturalisasi sungai. Naturalisasi adalah upaya pembenahan sungai dengan cara alamiah, dengan memperhatikan ekosistem dan lingkungan. Naturalisasi bertujuan untuk mengelola arus sungai agar air dapat meresap ke tanah di sepanjang perjalannya ke hilir, misalnya dengan mempertahankan kelokan sungai dan penetapan jalur hijau di sepanjang sungai.

Naturalisasi sungai dimaksudkan untuk mempertahankan ekosistem baik yang berada di dalam sungai, maupun yang ada di sekitarnya. Seperti misalnya kelok sungai, penanaman pohon, rumput dan juga tanaman air. Keberadaan pepohonan di sekitar sungai akan menjadi daerah serapan air jika permukaannya meninggi, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai ruang interaksi publik. Air tidak dibiarkan begitu saja mengalir, namun terserap ke dalam tanah menjadi cadangan yang bisa digunakan di musim kemarau. Selain itu, ekosistem hewan juga layak diperhatikan, sebab akan menimbulkan bencana ekologis jika terabaikan.

c) Perbaikan Tata Kelola Air

Salah satu strategi jangka panjang dalam memperbaiki tata kelola air sekaligus mengurangi potensi banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menangani penggunaan air tanah secara tidak berkelanjutan yang berkontribusi pada terjadinya *land subsidence* atau penurunan permukaan tanah yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan potensi terjadinya banjir.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk membatasi penggunaan air tanah yang kini sudah melewati batas aman (30 persen) hingga lebih dari 70 persen. Untuk mencapai hal tersebut, akan dilakukan *enforcement* secara lebih baik untuk memastikan cukupnya kapasitas resapan air hujan pada bangunan-bangunan dan mengelola kegiatan pembangunan infrastruktur besar di beberapa titik wilayah Jakarta yang mengalami penurunan permukaan tanah secara ekstrem. Selain itu, pemerintah akan juga mendorong optimalisasi adanya sumur-sumur resapan kolektif dan *giant biopori* dan alternatif-alternatif untuk memaksimalkan penyerapan air di ruang-ruang publik guna

membantu menghentikan penurunan muka tanah di sejumlah kawasan Implementasi dari seluruh strategi ini dilakukan dengan melibatkan penuh gerakan masyarakat.

d) Pembangunan *Integrated Tunnel atau Multipurpose Tunnel*

Rencana pembangunan *Integrated Tunnel atau Multipurpose Tunnel* mengemuka sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dan banjir secara terpadu di wilayah DKI Jakarta dengan upaya pembebasan lahan sesedikit mungkin. Mengingat keterbatasan dana dan sulitnya pembebasan tanah pada pembangunan infrastruktur kota, maka dapat dipertimbangkan pengembangan sistem jaringan bawah tanah yang sekaligus berfungsi sebagai pengendalian banjir dan solusi lalu lintas secara terpadu.

2) Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih

Pada saat ini berdasarkan data dari PD. PAM Jaya total kebutuhan air di DKI Jakarta mencapai 22.735 Liter/detik (2017) dan tahun 2022 diperkirakan mencapai 29.098 Liter/detik, dimana cakupan pelayanan air bersih pada tahun 2017 baru mencapai 60 persen atau baru sebesar 6,2 juta penduduk yang terlayani. Hal ini menjadi penting untuk segera ditangani mengingat tingkat pemanfaatan air tanah di Jakarta yang cukup tinggi dan diidentifikasi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penurunan muka tanah (*land subsidence*) di Jakarta.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk memperluas cakupan pelayanan melalui penambahan penyediaan air bersih baik dari pengembangan fasilitas pengolahan air bersih di wilayah Jakarta maupun pemenuhan pasokan air bersih dari luar Jakarta, penurunan tingkat kebocoran air serta memperbaiki kualitas layanan air bersih yang diprioritaskan pada wilayah - wilayah dengan kualitas air terburuk.

Secara garis besar peningkatan layanan air bersih ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat dan diprioritaskan untuk wilayah yang belum terlayani secara optimal khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kekurangan layanan air bersih di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah menginisiasi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur I untuk meningkatkan kapasitas layanan air bersih sebesar 2800 liter/detik pada tahun 2022 (dari total rencana kapasitas yang diperuntukkan bagi DKI Jakarta sebesar 4000 liter/detik),

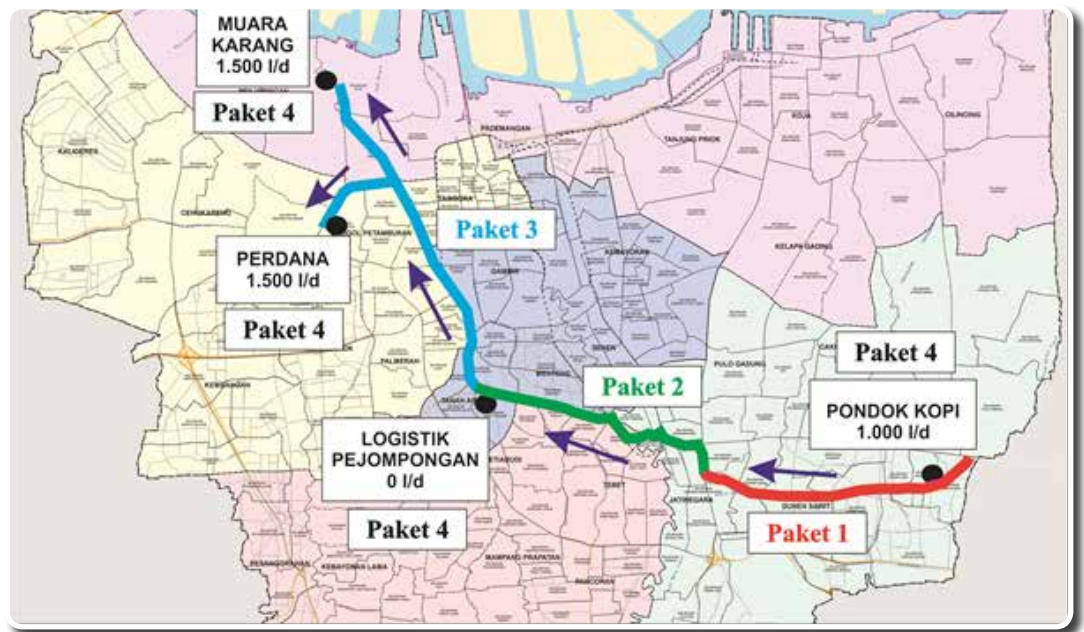
yang direncanakan mulai beroperasi mulai tahun 2021. Pembangunan *Water Treatment Plan* SPAM Jatiluhur I direncanakan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang akan melayani wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

Pada saat yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyiapkan rencana penyerapan air yang dialirkan dari hulu, dengan pengembangan jalur pipa transmisi mulai dari titik *off-take* (titik perbatasan Bekasi-Jakarta) hingga reservoir utama yang direncanakan di wilayah pelayanan DKI Jakarta. Penyaluran air curah ke setiap titik pengambilan atau *offtakes* dilakukan secara gravitasi dari Menara Air Sentra Timur yang terletak di Pondok Kopi. Mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan pipa distribusi di dalam Kota Jakarta bagi SPAM I, maka pembangunan pipa distribusi dimaksud direncanakan bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau melalui skema KPBU. Jalur indikatif pipa transmisi direncanakan sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 9.40

Jalur indikatif pipa transmisi di dalam Kota Jakarta bagi SPAM Jatiluhur I

Sumber : Kajian PD. PAM Jaya, 2014



Selain menambah pasokan dari Jatiluhur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengupayakan peningkatan pelayanan air bersih di wilayah DKI Jakarta, diantaranya melalui dimulainya inisiasi kerjasama pengembangan SPAM Karian bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengembangan IPA Buaran 3 serta opsi lain yang memungkinkan.

Pada sisi lain untuk memenuhi kebutuhan air di Kepulauan Seribu direncanakan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) dan *Brackish Water Reverse Osmosis* (BWRO). Upaya lain dapat dilakukan melalui pengolahan air hujan menjadi air bersih (*rain water harvesting*).

3) Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah

Berdasarkan *Review Master Plan* Pengembangan Pengelolaan Air Limbah di Provinsi DKI Jakarta, tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Tim Studi *Japan International Cooperation Agency* (JICA), pengembangan sistem perpipaan air limbah/ *sewerage* di DKI Jakarta dibagi menjadi 15 zona (termasuk zona 0). Target cakupan pelayanan adalah sebesar 80 persen pada tahun 2050. Dari 15 zona sistem sanitasi terpusat (*off-site Sanitation*), direncanakan dalam 5 tahun kedepan akan dibangun setidaknya namun tidak terbatas pada 3 (tiga) Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (SPALT) *Jakarta Sewerage System* (JSS), yang skema pendanaannya direncanakan melalui APBN, APBD dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Selain itu diupayakan pula pembangunan sistem sanitasi setempat (*on-site sanitation*) pada 50 lokasi.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akses air bersih dan air limbah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memastikan keterjangkauan biaya pemasangan pipa, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lebih lanjut, untuk mendukung rencana pembangunan *Jakarta Sewerage System* baik yang dilakukan melalui skema APBN, APBD dan atau KPBU, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam hal pengelolaan air limbah sebagai persiapan tahap konstruksi di masa mendatang serta sumber daya manusia untuk merencanakan, mengembangkan, mengoperasikan dan memelihara sistem pengelolaan air limbah di DKI Jakarta yang tidak hanya terbatas pada sistem IPAL, perpipaan, sambungan rumah serta sistem daur ulang air. Untuk itu diperlukan *capacity building* (bimbingan teknis atau pelatihan) bagi SDM yang mencakup para perencana, pengawas kegiatan maupun operator di lapangan. Pelatihan rutin perlu dijadwalkan secara kontinyu untuk terus memperbaharui pengetahuan dan kemampuan para SDM dimaksud agar proses pembangunan hingga pengoperasian sistem pengelolaan air limbah dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pembangunan SPALT *Jakarta*

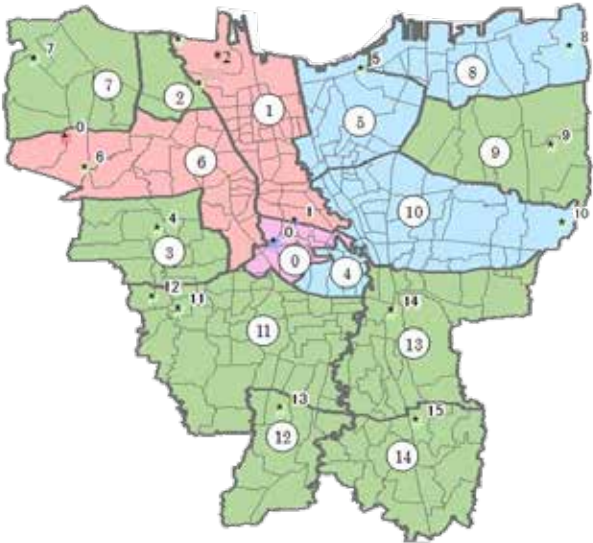
Sewerage System yang direncanakan namun tidak terbatas pada Zona 1, 2, 5, 6 dan 8, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memerlukan dukungan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam hal pengelolaan air limbah berupa bimbingan teknis atau pelatihan sebagai persiapan tahap konstruksi di masa mendatang serta untuk mengembangkan, mengoperasikan dan memelihara sistem pengelolaan air limbah di DKI Jakarta yang mencakup sistem perpipaan, sambungan rumah serta daur ulang air.

Gambar 9.41

Peta Lokasi Pembangunan
SPALT Jakarta Sewerage
System (JSS)

Sumber : Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 41
Tahun 2016 tentang Rencana
Induk Pengembangan
Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Air Limbah
Domestik

Zona No.	Site No	Lokasi IPAL (Alternatif	Area (ha)
0	0	Kali Krukut	Rencana
	1	Waduk Setiabudi	Eksisting
1	2	Waduk Pluit	4
2	3	Muara Angke	0.8
3	4	Hutan Kota Srengseng	4.0
4		Transfer ke IPAL Zona 10	1.6
5	5	Hutan Kota Waduk Sunter	4.6
6	6	Duri Kosambi	8.2
7	7	Kamal - Pegadungan	3.9
8	8	Rencana Waduk Marunda	6.0
9	9	Rencana Situ Rawa Rorotan	2.9
10	10	Pulo Gebang	8.7
11	11	Taman Bendi	3.0
	12	Rencana Waduk Ulujami	5.9
12	13	Kebun Binatang Ragunan	3.1
13	14	Rencana Waduk Kp. Dukuh	5.7
14	15	Rencana Waduk RW 05 Ceger	3.6
Total			65.10



- 4) Pengelolaan Sampah
- a) Pengurangan sampah di sumber

Masyarakat merupakan penghasil sampah karenanya masyarakat merupakan aktor utama dalam pengelolaan sampah yang perlu diberdayakan agar mampu melakukan berbagai upaya penanganan yang bermanfaat bagi pengelolaan secara umum. Mengingat upaya pengurangan timbulan sampah di sumber sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat, diperlukan suatu upaya penyadaran dan peningkatan pemahaman untuk mendorong perubahan perilaku yang dilakukan secara berjenjang. Perubahan perilaku ini dapat dilakukan baik melalui promosi yang dapat memberi gambaran mengenai “nilai” pengurangan sampah di sumber dan dampaknya bagi kualitas kesehatan dan lingkungan maupun kampanye yang terus menerus untuk membangun suatu komitmen sosial. Pengurangan sampah di sumber ini dilakukan melalui mekanisme 3 R, yaitu *reduce* (R1), *reuse* (R2) dan *recycle* (R3). R1 adalah upaya yang lebih menitikberatkan pada pengurangan pola hidup konsumtif serta senantiasa

menggunakan bahan "tidak sekali pakai" yang ramah lingkungan. R2 adalah upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan yang berulang agar tidak langsung menjadi sampah. R3 adalah setelah sampah harus keluar dari lingkungan rumah, perlu dilakukan pemilahan dan pemanfaatan/pengolahan secara setempat.

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan diantaranya:

- Komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan pengetahuan mengenai Program 3R.
- Pembangunan dan pembinaan TPS 3R.
- Fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.
- Pengembangan informasi peluang usaha di bidang persampahan
- Mendorong dan memfasilitasi berdirinya Bank Sampah.

b) Pembangunan *Intermediate Treatment Facility* (ITF)

Berdasarkan dokumen *Masterplan* dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 – 2032, selain melakukan optimasi pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, juga direncanakan untuk setidaknya 2 (dua) unit dari target 4 (empat) unit *Intermediate Treatment Facility* (ITF) di Provinsi DKI Jakarta dapat terbangun untuk menanggulangi timbulan sampah di Jakarta. Target 4 (empat) unit ITF dimaksud yakni ITF Zona Pusat, Zona Utara, Zona Barat dan Zona Timur. Pembangunan ITF dapat dilaksanakan melalui dua skema, yakni skema penugasan kepada BUMD atau melalui skema KPBU.

c) Optimalisasi Bantargebang

TPST Bantar Gebang telah beroperasi sejak tahun 1989 dan saat ini merupakan satu-satunya TPST yang dimiliki dan dioperasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Oleh karena itu, semua sampah yang dihasilkan di Jakarta diangkut ke lokasi ini. TPST Bantar Gebang merupakan lahan milik DKI Jakarta dan terletak 40 km di sebelah tenggara Jakarta. Lokasi ini memiliki luas lahan total 110,3 hektar yang dibagi menjadi lima zona pembuangan sampah. Tiga perempat dari luas lahan digunakan untuk

pembuangan sampah dan 25 persen sisanya menjadi lokasi infrastruktur TPST seperti pintu masuk, jalan, kantor dan pabrik pengolahan lindi. Lokasi ini menerima hampir 1.000-1.200 truk setiap hari dan truk-truk ini membawa sekitar 6.500-7.000 ton/hari sampah ke TPST.

Gambar 9.42

Pemulung di TPST Bantar Gebang dan Antrian di TPST Bantar Gebang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2018



Pemulung di TPST Bantar Gebang



Antrian di TPST Bantar Gebang

Truk sampah bisa tiba di lokasi setiap saat, meskipun mayoritas tiba pada siang hari. Setelah tiba, kendaraan ditimbang di jembatan timbang dan data secara otomatis tercatat dalam sistem komputer. Truk tersebut kemudian diinstruksikan ke area bongkar yang sesuai. Truk-truk biasanya membongkar sampah di tiga sampai lima titik, di lokasi berbeda-beda di TPST. Karena jumlah tempat bongkar terbatas, truk harus menunggu 2 - 4 jam pada siang hari sebelum dapat membongkar muatannya.

Titik bongkar umumnya dilengkapi dengan 2 (dua) Bulldozer dan 3 (tiga) hingga 5 (lima) Excavator. Berbeda dengan praktek TPST biasa yang mendorong sampah ke posisi akhir dengan Bulldozer, Excavator digunakan untuk mengangkat sampah ke puncak TPST. Ketika sel sampah mencapai ketinggian sampai 30 meter, 6 (enam) atau 7 (tujuh) Excavator diperlukan secara berurutan untuk menaikkan sampah ke atas. Di bagian atas sel, satu atau dua Bulldozer digunakan untuk mendorong sampah ke posisi yang serhausnya dan memadatkannya.

Gambar 9.43

Pembongkaran sampah dan penggunaan Excavator dan Peta TPST Bantar Gebang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2018



Pembongkaran sampah dan penggunaan Excavator



Peta TPST Bantar Gebang

TPST jarang menggunakan tanah penutup, sehingga beberapa area yang ditutup hanya ketika alokasi anggaran tahunan cair. Bagian lain dari TPST tidak ditutup sampai area ditutup selamanya. TPST ini memiliki peralatan yang baik dan alat-alat berat berikut:

- 33 Excavator standar
- 2 long arm Excavator
- 14 Bulldozer
- 6 Wheel Loader
- 5 Refuse Compactor

Menurut Rencana Induk 2012, TPST diperkirakan akan terus menerima sampah sampai tahun 2023. Dalam prakteknya, TPST tersebut sudah terisi penuh dan lebih banyak lagi sampah yang dipaksakan masuk ke lokasi setiap hari. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya lereng yang sangat curam di lokasi dan menimbulkan risiko tanah longsor. Di TPST ini merupakan tempat kerja bagi sekitar 6.000 pemulung yang beroperasi di seluruh TPST. Mereka bekerja menantang bahaya di dekat alat berat dan juga berisiko tertimbun longsor di lereng yang curam.

Rencana pengembangan TPST Bantargebang dalam lima tahun kedepan antara lain Pembangunan IPAS, jembatan timbang dan pos, jalan di atas Zona TPST Bantargebang, dinding penahan di TPST Bantargebang, posko dan truk pemadam kebakaran, jaringan hydrant, daur ulang plastik, laboratorium pemantau kualitas lingkungan, *sorting plant*, Gedung Pusat Studi Sampah Nasional, fasilitas *Refuse Derived Fuel* (RDF), fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi dan akan dikaji rencana pembangunan fasilitas *Waste to Energy* (WTE) di Bantargebang. Selain itu, rencana pengelolaan dan peningkatan TPST kedepannya mencakup *covering landfill*, *landfill mining*, *bioreactor landfill*, pemeliharaan jalan operasional, jembatan, drainase dan gorong-gorong di areal TPST Bantargebang, pemeliharaan *car washing*, jembatan timbang, pengolahan kompos TPST Bantargebang, penyediaan jasa pendampingan pengelolaan sampah serta pembayaran *tipping fee*.

Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan optimalisasi TPST Bantar Gebang untuk meningkatkan kapasitas maksimumnya dari yang ada pada saat ini. Hal ini dilakukan melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan pengelolaan sampah dan kegiatan lainnya yang dapat mendukung optimalisasi TPST tersebut.

9.3 Pengembangan Integritas Aparatur

Pengembangan integritas aparatur ditujukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme aparatur dalam rangka mencapai Opini Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA sebagaimana terlihat pada gambar 9.44 berikut :

Gambar 9.44
Panca Upaya Utama
Pembangunan Jakarta
Integritas Aparatur



9.3.1 Peningkatan Tata Kelola Bidang Regulasi/Hukum, Integritas Aparatur Dan Akuntabilitas Pemerintahan

a. Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas adalah salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), merupakan hal yang mutlak dikedepankan utamanya untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pemerintahan diharapkan fokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi 5 komponen, yakni : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Dalam upaya pencapaian Nilai/Predikat SAKIP AA, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun rencana aksi pada setiap unsur penilaian SAKIP sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja : diawali dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2017-2022 yang dibarengi dengan Penerapan SI-RPJMD (Sistem Informasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dilanjutkan dengan penyusunan RKPD, Renja dan RKA Tahun 2019 berdasarkan IKU Tahun 2017 -2022, serta Review Dokumen Perencanaan.
- b. Pengukuran Kinerja : dilakukan melalui penyusunan IKU dan Perjanjian Kinerja berpedoman pada RPJMD Tahun 2017 -2022, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi indikator kinerja melalui e-Monev dan SIRPJMD. Dalam pengukuran kinerja dilakukan pula pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam proses perencanaan, penganggaran, pengukuran, dan pelaporan, melalui integrasi *e-Budgeting* dengan SIRPJMD, termasuk penyusunan Perjanjian Kinerja untuk eselon I, II, III, dan IV, sampai JFT dan JFU (Sasaran Kerja Pegawai) dengan indikator kinerja terukur, relevan, dapat ditagih dan selaras dengan IKU. Selain itu juga dilakukan penyusunan rencana aksi Perjanjian Kinerja Kepala OPD sampai kepada level kegiatan, sub kegiatan, bahkan komponen yang paling berpengaruh capaian kinerja.
- c. Pelaporan Kinerja : dilakukan dengan upaya mengaitkan antara kinerja dengan *reward and punishment*, melalui integrasi *e-Monev* dan SIRPJMD dengan *e-Kinerja*. Dalam penyusunan LKIP dan LKPJ, akan digunakan satu data capaian kinerja. Sementara

dalam penyusunan LPPD dan LKPD, dilakukan dengan mengintegrasikan SIRPJMD dengan *e-Report*.

- d. Evaluasi Internal : merupakan upaya untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan. Dalam upaya peningkatan kualitas Evaluasi Internal, akan dikembangkan pula sistem E-SAKIP.
- e. Capaian Kinerja : dalam tahapan ini akan dilakukan penilaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan capaian kinerja terbaik di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota.

Selain pencapaian SAKIP AA, dalam rangka Peningkatan Integrasi Aparatur Dan Akuntabilitas Pemerintahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memprioritaskan untuk pencapaian Opini Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, pada periode 2018-2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berkesinambungan terus mengupayakan agar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ditindaklanjuti secara tuntas, melalui pembenahan terhadap pengelolaan keuangan dan barang daerah dan peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Untuk mencapai opini audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk *database* aset dalam Sistem Informasi Aset (SIA) sesuai dengan rekomendasi BPK dan melaksanakan sensus aset. Selain itu juga akan dilakukan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah dengan sistem informasi perencanaan, sistem informasi pendapatan daerah, sistem informasi belanja daerah, sistem informasi pengadaan barang jasa pemerintah, dan sistem informasi aset.

Sebagai salah satu inisiatif atas terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/ jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sistem pengadaan barang/ jasa yang optimal diharapkan mampu mempertajam belanja daerah baik itu belanja yang dilaksanakan secara langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah/ Badan Layanan Umum Daerah/ Unit Pelayanan Teknis/ unit lain di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau belanja yang dilaksanakan secara tidak langsung yang dilakukan oleh penerima bantuan sosial dan subsidi. Selain itu, sistem pengadaan barang/ jasa yang optimal juga diharapkan berdampak pada pembentukan ekosistem pasar barang/ jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terbuka untuk persaingan pelaku usaha yang pada akhirnya mendorong efisiensi belanja daerah.

Kapasitas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang strategis dalam upaya pencapaian SAKIP AA, Predikat WTP pada Opini Audit Laporan Keuangan Daerah, Tata kelola Pemerintahan yang akuntabel, peningkatan integritas aparatur maupun peningkatan kualitas Pelayanan Publik. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyusun dan mengimplementasikan master plan pengelolaan manajemen ASN secara bertahap yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Manajemen ASN dimaksud, antara lain meliputi proses perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pemberian gaji dan tunjangan, pembinaan disiplin, pemberhentian ASN serta penyediaan peningkatan sarana prasarana pengembangan kapasitas ASN.

b. *Jakarta Smart City*

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi kepada publik, *Jakarta Smart City* melaksanakan penyediaan informasi kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mengelola layanan pengaduan masyarakat seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Pengaduan masyarakat yang masuk kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui kanal-kanal pengaduan yang dikelola oleh *Jakarta Smart City*. Untuk memproses dan memantau pengaduan masyarakat tersebut agar ditindaklanjuti oleh SKPD terkait, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan aplikasi *Citizen Relation Management* (CRM). Penggunaan aplikasi ini diatur melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi *Citizen Relation Management*.

Jakarta Smart City bertujuan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami, dan mengontrol berbagai sumber daya di suatu kota dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pemanfaatan TIK pada proses penyelenggaraan pemerintahan secara nasional telah digariskan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, hal ini menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 265 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengimplementasikan *E-Government* yang

diterjemahkan melalui kebijakan satu data yang terintegrasi, *up to date*, dan valid untuk formulasi kebijakan (*data driven policy*), berorientasi pada problem prioritas.

Instrumen kebijakan tersebut, khususnya dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) secara sistemik dan sistematis adalah melalui sistem monitoring Jakarta Satu dengan konsep *one map, one data, one policy*, sekaligus juga menjadi instrumen untuk melakukan perubahan yang sistemik dan sistematis dalam melakukan pencegahan korupsi dan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan efisien.

Jakarta *Smart City* akan lebih ditingkatkan peran dan kemampuannya agar lebih berdampak pada peningkatan pelayanan publik bagi warga Jakarta dengan melaksanakan :

- Optimalisasi pemanfaatan *Big Data* untuk formulasi kebijakan (*data driven policy*) yang berorientasi pada problem prioritas dan penyediaan *executive dashboard* (*city indicator*) untuk memonitor kinerja pemerintahan dengan meningkatkan kapasitas infrastruktur *Big Data* beserta *Tools* Analisisnya dan keamanan datanya;
- Peningkatan kolaborasi, *co-creation* serta keterlibatan warga untuk berpartisipasi dan bersinergi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, baik dari sisi gagasan, dana, dan tenaga dengan menambah ruang kreasi dan kreativitas warga (*co working space, living lab, startup hub*);
- Perwujudan Jakarta *Safe City* sebagai Ibukota NKRI dengan menyediakan *road map* dan strategi pengembangan *safe, smart and sustainable city* yang berfokus pada penyiapan standar layanan publik Ibukota Negara, keamanan pelayanan kesehatan, keamanan pelayanan pendidikan, keamanan pelayanan transportasi, keamanan infrastruktur kota, keamanan digital dan keamanan masyarakat secara umum;
- Perwujudan Jakarta *Safe City* dengan menyediakan peta jalan dan strategi pengembangan *Safe City* Jakarta yang berfokus pada keamanan digital, keamanan pelayanan kesehatan, keamanan infrastruktur dan keamanan masyarakat;
- Pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur pendukung layanan *smart and safe city* yang berfokus dalam mengembangkan platform responsif bencana berbasis partisipasi masyarakat untuk sadar bencana, mulai dari menumbuhkan *awareness* masyarakat terhadap pentingnya mengantisipasi sumber bencana hingga penggerakan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui integrasi pembangunan infrastruktur jaringan dan/atau utilitas *smart and safe city* seperti pembangunan jaringan *fiber optic*, pembangunan *ducting* dan pembangunan utilitas lainnya dalam rangka *support data* administrasi warga untuk korban bencana, perluasan sistem layanan 112 untuk *public engagement*, pembentukan komunitas penggerak, sistem *collaborative community engagement on disaster management* serta optimalisasi *crisis center* sebagai pusat *responsive disaster management* dan *early warning system*.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik bagi warga Jakarta, *Smart City* berfokus pada 6 pilar sebagai berikut :

a. *Smart Government*

Mewujudkan pemerintahan yang transparan, informatif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Rencana pengembangannya antara lain meliputi :

- Mengembangkan satu data yang terintegrasi, *up to date* dan valid untuk formulasi kebijakan (*data driven policy*) yang berorientasi pada problem prioritas dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan *Big Data* dan penyediaan *executive dashboard (city indicator)* untuk memonitor kinerja pemerintahan melalui peningkatan kapasitas infrastruktur *Big Data* beserta *Tools Analisis* dan keamanan data.
- Meningkatkan sistem penanganan pengaduan warga dengan mengintegrasikan seluruh kanal pengaduan kedalam sistem CRM (*Citizen Relationship Management*).
- Membangun suatu sistem layanan administrasi warga yang terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga warga dapat menikmati pelayanan lebih cepat, mudah serta *data base* warga dapat terpelihara dan *terupdate* secara berkesinambungan.

b. *Smart Mobility*

Mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi. Rencana pengembangannya antara lain meliputi :

- Menerapkan sistem angkutan jalan terintegrasi, mulai dari integrasi rute dan layanan, manajemen, hingga pembayaran melalui program Ok-OTrip
- Menyediakan layanan *seamless transportation* dan solusi yang menyeluruh dari titik awal hingga akhir perjalanan dengan mengembangkan layanan *bike sharing* yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
- Meningkatkan pengelolaan transportasi yang lebih informatif, lancar, aman dan nyaman dengan mengembangkan *Intelligence Transportation System*.
- Optimalisasi pengelolaan perparkiran yang lebih akuntabel, efisien dan efektif dengan menerapkan parkir elektronik berbasis IoT.

c. *Smart Living*

Mewujudkan Jakarta sebagai kota yang sehat dan layak huni serta memfasilitasi akses ke informasi kesehatan, pariwisata, dan fasilitas keamanan. Rencana pengembangannya antara lain meliputi :

- Perwujudan Jakarta *Safe City* dengan menyediakan peta jalan dan strategi pengembangan *Safe City* Jakarta yang berfokus pada keamanan digital, keamanan pelayanan kesehatan, keamanan infrastruktur dan keamanan masyarakat
- Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, inovatif dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat (*Smart Health*)
- Optimalisasi pengelolaan pariwisata Jakarta yang terintegrasi, informatif, promotif, interaktif (*Smart Tourism*) dengan menerapkan *Ticketing Online, Virtual Reality, Augmented Reality*.

d. *Smart Environment*

Menciptakan kualitas lingkungan yang sehat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk membuat Jakarta menjadi kota layak huni yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Rencana pengembangannya antara lain meliputi :

- Mendorong terwujudnya gedung-gedung/bangunan di Jakarta yang menggunakan proses-proses yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien selama daur hidup bangunan sejak perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan, renovasi bahkan hingga pembongkaran (*Green Building*)
- Optimalisasi pengelolaan sampah yang terpadu, efektif, efisien, lebih bersih dan lebih hijau dengan mengoptimalkan pemungutan sampah, daur ulang serta pemanfaatan teknologi terbaru (*Smart Waste Management*)
- Pengurangan emisi karbon, antara lain dengan mendorong penggunaan *low carbon transport*, optimalisasi uji emisi dan efisiensi energi

e. *Smart Economy*

Membina kewirausahaan dan semangat inovasi kepada masyarakat untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Rencana pengembangannya antara lain meliputi :

- Pengembangan usaha kecil dan menengah dengan meningkatkan kemampuan daya saing dan inovasi serta pemanfaatan *e-commerce* untuk memperluas cakupan pasar.

- Memperluas lapangan kerja dengan meningkatkan keterampilan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar serta mendorong kewirausahaan (*job creation*)
- Mendorong transaksi keuangan non tunai (*less cash*) dengan mengintegrasikan pembayaran untuk berbagai sektor (transportasi, retail, wisata dan sebagainya) menggunakan *National Payment Gateway*.
- Memperkuat ketahanan pangan Jakarta, dengan menyediakan data dan informasi *stock* dan harga komoditas pangan secara *real time* dan dapat diakses dengan mudah.

f. *Smart People*

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan minimal 12 tahun, menyediakan fasilitas untuk kehidupan yang layak, meningkatkan indeks harapan hidup, meningkatkan akses ke informasi publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

- Mengembangkan pemerintahan yang mendorong warga untuk berperan serta dalam penyelesaian permasalahan kota, dimana pemerintah berperan sebagai penyedia *platform* dan warga sebagai *co-creator* (City 4.0), melalui peningkatan kolaborasi, *co-creation* serta keterlibatan warga untuk berpartisipasi dan bersinergi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, baik dari sisi gagasan, dana, dan tenaga dengan menambah ruang kreasi dan kreativitas warga (*co working space, living lab, startup hub*);
- Mendorong keterlibatan warga dalam proses menetapkan layanan masyarakat yang lebih efektif dan mendekatkan pemerintahan dengan warganya melalui : peningkatan kualitas dialog publik aparat, penguatan peran warga untuk terlibat dalam perbaikan layanan masyarakat, akuntabilitas pengelolaan kelembagaan warga melalui keterbukaan informasi, optimalisasi Balai Warga (RW) sebagai ruang interaksi publik (informasi dan administrasi warga) dan pemberdayaan partisipasi warga dalam layanan masyarakat (termasuk FKDM).
- Meningkatkan penyediaan informasi publik ke masyarakat yang mudah diakses publik melalui penyediaan Dashboard Publik.

SKPD/UKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta cenderung meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dalam menjalankan tata kelola dan *delivery* pelayanan publiknya, sehingga hal ini menjadi faktor kritis yang perlu dijamin keberlangsungannya. Seiring dengan meningkatnya transaksi informasi secara elektronik melalui sistem informasi, juga diikuti dengan peningkatan ancaman terhadap pengelolaan sistem informasi sehingga berdampak kepada pentingnya menjamin keamanan sistem informasi tersebut.

Terwujudnya data yang komprehensif dan valid, diharapkan tidak hanya memberikan pelayanan publik yang prima namun juga menjadi sumber informasi yang valid bagi proses analisis lebih lanjut dalam pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan Pimpinan. Kondisi tersebut mensyaratkan dilakukannya integrasi terhadap data-data yang ada pada SKPD/UKPD sekaligus pengamanan agar kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data tetap terjaga.

Saat ini keberlangsungan pelayanan dan kemanan informasi belum dapat dilakukan secara optimal karena sumber data Teknologi Informasi dan Komunikasi masih belum terpusat sepenuhnya pada pusat data yang dikelola oleh Diskominfo. Hal ini menyebabkan proses integrasi data menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Selain itu, Pemprov DKI juga belum memiliki sistem *Disaster Recovery Center* (DRC) sehingga berisiko terjadi kendala pada sistem informasi yang digunakan pada pelayanan publik maupun gangguan pada sistem informasi lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, baik secara fisik (kebakaran, banjir, gempa bumi) ataupun secara non fisik (virus, malware, sistem *crash*).

Diskominfo berencana untuk mempersiapkan kondisi ekosistem TIK di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang memungkinkan berlangsungnya proses integrasi data secara bertahap dan menyeluruh terhadap data-data yang saat ini masih tersebar pada SKPD/UKPD, didukung oleh pengembangan infrastruktur TIK yang memiliki tingkat kehandalan yang tinggi (*availability* dan *resiliency*), aman (*secure*), dapat berkembang dan beradaptasi (*adaptability*) dan menggunakan anggaran secara tepat guna (*cost effective*) sebagai fondasi utama dalam memberikan layanan publik.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, Diskominfo akan melaksanakan antara lain:

1. Kajian terhadap kondisi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini, agar dapat merencanakan integrasi sistem informasi SKPD/UKPD yang komprehensif dengan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang lebih baik yang dituangkan dalam Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK);
2. Pembuatan pedoman, standarisasi dan sosialisasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 mengenai Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
4. Melaksanakan kegiatan *Project Management Office* untuk melakukan pendampingan, supervisi dan pengendalian terhadap proyek IT yang berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pengembangan sistem

informasi sampai dengan tahap pengendaliannya untuk memastikan sinergi dan keberlangsungannya sesuai Rencana Induk TIK;

5. Mengembangkan *back up link* jaringan komunikasi WAN sehingga apabila terdapat gangguan pada *link* jaringan utama maka *link* jaringan *backup* akan langsung menggantikan peran *link* jaringan utama sehingga pelayanan tetap terus berjalan;
6. Mengembangkan *Disaster Recovery Center* (DRC) secara komprehensif untuk seluruh SKPD/UKPD untuk mendukung kontinuitas kegiatan operasional pengelolaan dan pengolahan data yang menggunakan teknologi Informasi;
7. Konsolidasi pusat data dan server di seluruh SKPD/UKPD dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti virtualisasi, *container* dan *software defined data center* agar dapat mendapatkan utilisasi lebih baik dari *hardware* yang akan disediakan dan lebih menjamin kehandalan dan keamanan sistem pelayanan publik, baik yang digunakan internal maupun eksternal.

c. Revitalisasi Tata Kelola Bidang Hukum dan Regulasi

Peningkatan urusan pemerintahan daerah dan kompleksitas permasalahan atas penyelenggaraan bidang hukum menjadi penting untuk diperhatikan. Bidang hukum tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan sengketa yang ada, tapi harus pula mencegah berbagai permasalahan hukum dalam upaya mewujudkan kepastian hukum di daerah.

Revitalisasi tata kelola bidang hukum memiliki peranan penting dalam memberi dukungan bagi peningkatan kualitas pembangunan di daerah. Tata kelola bidang hukum dilaksanakan dari tahap perencanaan, pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum hingga evaluasi perlu dilakukan secara berkesinambungan. Keseluruhan tahapan tersebut memberikan kontribusi pada kepastian hukum bagi kegiatan pemerintah, aktivitas masyarakat, dan mendorong peningkatan kualitas mutu layanan publik. Revitalisasi tata kelola bidang hukum juga diharapkan menciptakan harmonisasi regulasi baik tingkat vertikal dan horizontal demi terciptanya pembangunan hukum daerah yang lebih terstruktur.

Dalam hal mencapai hal tersebut, Pemerintah Daerah memiliki komitmen ke depan untuk:

- 1) Melakukan evaluasi, penataan, pemutakhiran dan harmonisasi produk hukum daerah secara sistematis, berkala dan terintegrasi dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah;
- 2) Melaksanakan proses pembentukan hukum dan kebijakan daerah yang lebih partisipatif, aspiratif dan konsultatif melalui tata kelola proses legislasi yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan media sosial dan menghasilkan produk hukum daerah yang responsif, berkepastian, berkeadilan, efektif dan bermanfaat;

- 3) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas SDM dan kelembagaan yang terlibat dalam penyelenggaraan bidang hukum melalui *capacity building*, sertifikasi profesi dan penerapan standarisasi organisasi (ISO);
- 4) Meningkatkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di daerah melalui sosialisasi yang teratur dalam membangun ketaatan hukum di daerah; dan
- 5) Memperkuat penegakan hukum daerah yang tegas, konsisten dan adil serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

d. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), terdapat empat sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2018-2022, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :

1) Pajak Daerah

Beberapa strategi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah, dilakukan melalui beberapa strategi yang terkait dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah.

Intensifikasi Pajak Daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

1. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System* terhadap empat jenis Pajak Daerah, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui :
 - a. Pendataan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Reklame
 - b. Melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap PKB, BPHTB dan PBB
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):
3. Melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment* dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran masa minimal, Wajib Pajak PBB-KB dan Wajib Pajak PPJ

4. Melakukan penagihan piutang pajak.

Sedangkan untuk ekstensifikasi Pajak Daerah dilakukan strategi sebagai berikut :

1. Melakukan revisi Peraturan Daerah terhadap Pajak Daerah:
 - a. Melakukan perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
 - b. Melakukan perubahan tarif melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
 - c. Melakukan perubahan tarif melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Parkir
 - d. Melakukan revisi Peraturan Daerah terhadap jenis pajak BPHTB
 - e. Melakukan penyesuaian tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor
 - f. Melakukan perubahan tarif Layanan Parkir *Off-Street*
 - g. Melakukan penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan Reklame
 - h. Melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, serta peningkatan koordinasi kelembagaan.

2) Retribusi Daerah

Selain Pajak Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui retribusi daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:

- a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
- b. Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- c. Menerapkan transaksi non tunai;
- d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan;

- e. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan Retribusi Daerah yang masih menggunakan karcis.

3) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD.
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management*;
- d. Mengoptimalkan pendapatan BLUD

4) Dana Perimbangan

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjangkau wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

5) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Koordinasi dengan Pemerintah,, Pihak Ketiga dan SKPD/ UKPD terkait MoU penarikan/pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

9.4 Kota Lestari

Pembangunan Kota Lestari diupayakan melalui mewujudkan penataan kawasan permukiman, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dapat dilihat pada gambar 9.45 berikut :

Gambar 9.45

Panca Upaya Utama
Pembangunan Jakarta
Kota Lestari



9.4.1 Penataan Kawasan Permukiman

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Terdapat 11 variabel yang menentukan tingkat kekumuhan di suatu wilayah, yaitu: kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, kondisi bangunan tempat tinggal, keadaan ventilasi dan pencahayaan bangunan tempat tinggal, tempat buang air besar, cara membuang sampah, pengangkutan sampah, keadaan drainase/ saluran air, keadaan jalan lingkungan, penerangan jalan umum dan tata letak bangunan. Hasil Kajian BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat 445 RW di DKI Jakarta yang masih masuk dalam kategori kumuh.

Tabel 9.15

Jumlah Kelurahan, Jumlah RW, RT dan RW Kumuh yang Didata menurut Kabupaten/ Kota di DKI Jakarta, 2017

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta dan BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018

Kab/Kota	Jumlah Kelurahan*)	Jumlah RW*)	Jumlah RT*)	RW yang didata		
				Kumuh	Tidak kumuh	Jumlah
Jakarta Pusat	44	389	4.572	98	21	119
Jakarta Utara	31	449	5.223	80	8	88
Jakarta Barat	56	586	6.481	92	13	105
Jakarta Selatan	65	576	6.088	90	20	110
Jakarta Timur	65	707	7.926	78	13	91
Kepulauan Seribu	6	24	127	7	0	7
Total	267	2.731	30.417	445	75	520

*) Jakarta Dalam Angka, 2017
**) Target awal 521 RW namun berkurang 1 RW menjadi 520 RW. Ada 1 RW di Jakarta Utara telah digusur, yaitu RW 13, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading.

Hasil kajian BPS Provinsi DKI Jakarta menunjukkan: 75 RW (14 persen) masuk dalam kategori tidak kumuh sedangkan 445 RW (86 persen) masuk dalam kategori kumuh, dengan perincian: 15 RW (3,37 persen) kumuh berat, 99 RW (22,25 persen) kumuh sedang, 205 RW (46,07 persen) kumuh ringan, dan 126 RW (28,31 persen) kumuh sangat ringan.

Dalam rangka meningkatkan kawasan kumuh menjadi kawasan yang layak dan sehat, diperlukan Program Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang memiliki tiga rangkaian utama kegiatan :

- 1) Community Action Plan (CAP)
- merupakan suatu program yang turut serta mendorong terciptanya koordinasi dan kolaborasi dari berbagai pihak di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta para *stakeholders*, yang selanjutnya menjadi acuan keberlanjutan Program Penataan Kawasan.

2) Collaborative Implementation Program (CIP)

Merupakan langkah lanjutan untuk merealisasikan konsep CAP yang telah disusun. Proses CIP dilakukan melalui pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, antara lain dengan *land consolidation*.

3) Program Monitoring dan Evaluasi

Merupakan upaya untuk menjaga keberlanjutan program penataan kawasan, yang hasil rekomendasinya diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program tersebut.

Ketiga program diatas diharapkan dapat menciptakan perubahan dari semula kawasan yang kumuh menjadi kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Tabel 9.16

Rencana Penataan Kawasan
Permukiman tahun
2018-2022

Target Capaian/Kebutuhan pendanaan					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah RW	10 RW	40 RW	56 RW	46 RW	48 RW

Sumber : Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, 2017

Dalam rangka mendukung penataan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, swasta dan partisipasi masyarakat.

9.4.2 Penyediaan RTH

Ruang terbuka hijau (*green open spaces*) merupakan suatu bagian dari kawasan ekosistem perkotaan yang berupa ruang terbuka, dimana terdapat banyak unsur hijau tanaman dan tumbuhan yang sengaja atau tidak sengaja ditanam, yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas *landscape* kota. Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman dapat dimanfaatkan oleh warga kota untuk bermain, berolahraga, berkreativitas, bersosialisasi dan media ekspresi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan Pemerintah Daerah harus menyediakan RTH. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sesuai peraturan perundangan di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2030, menargetkan rencana pengembangan RTH sebesar 30 persen yang terdiri dari 20 persen RTH Publik dan 10 persen RTH Privat. Target 20 persen RTH publik merupakan target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah, dalam bentuk antara lain penyediaan dan pengelolaan RTH taman, RTH makam dan RTH hutan.

Luas RTH Taman, RTH Makam dan RTH Hutan sampai pada tahun 2017 mencapai luas 3.076,4 Ha, dengan rincian untuk RTH Taman seluas 2.195,3 Ha, RTH Makam seluas 626,83 Ha dan RTH Hutan seluas 254,26 Ha.

Adapun rencana penyediaan dan pengelolaan RTH Taman tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau Taman.
- 2) Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Taman
- 3) Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau Taman.
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga RTH taman.

Adapun rencana Penyediaan dan Pengelolaan RTH oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lima tahun kedepan dengan target penambahan RTH sebesar 0.2 persen dari total luas daratan Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, target tersebut akan diupayakan untuk lebih ditingkatkan kembali melalui beberapa strategi yang akan dilakukan selain melalui pembebasan lahan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi untuk menambah proporsi RTH, antara lain::

1. Penegakkan insentif dan disinsentif pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk RTH yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
2. Pelibatan swasta untuk pemanfaatan lahan tidur milik sebagai RTH.
3. Pengembalian fungsi jalur hijau di pinggir sungai melalui program naturalisasi sungai
4. Pemanfaatan sudut negatif kota sebagai area hijau, seperti jalur pinggir rel, kolong jembatan, area di bawah sutet, dsb.

Selain itu, untuk mengakomodasi berbagai isu dan kebutuhan masyarakat maka pada tahun 2018-2022 untuk kegiatan pembangunan RTH Taman akan dikembangkan pembangunan RTH Taman dengan konsep Taman Pintar, Taman Maju Bersama dan penambahan fasilitas air mancur sebanyak 2 lokasi per tahun.

Gambar 9.46

Ilustrasi Rencana
Pengembangan Taman
dengan Konsep Taman Pintar
dan Taman Maju Bersama

*Sumber : Dinas Kehutanan,
2018*



Pada Taman Pintar akan dibangun berbagai macam fasilitas yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan nilai tambah yang bersifat rekreasi dan edukasi bagi pengunjung seperti perpustakaan, mading dan permainan tradisional. Adapun dalam Taman Maju Bersama, fasilitas yang akan dibangun selain berfungsi sebagai area rekreasi dan edukasi, juga dapat mengakomodir berbagai kegiatan masyarakat yang bernilai sosial, ekonomi dan budaya.

Penyediaan Taman Pintar dan Taman Maju Bersama selama 5 tahun direncanakan sebanyak 261 lokasi taman. Dalam penyediaan Taman Pintar dan Taman Maju Bersama dapat dilakukan melalui pembangunan taman baru maupun melalui penataan taman/penambahan fasilitas pada taman yang telah terbangun.

Pembangunan dan penataan Taman Maju Bersama selama 5 tahun direncanakan sebanyak 86 lokasi, dengan uraian 41 lokasi pembangunan dan 45 lokasi penataan (dari taman eksisting). Selanjutnya untuk pembangunan dan penataan Taman Pintar selama 5 tahun direncanakan 175 lokasi, dengan uraian 45 lokasi pembangunan dan 130 lokasi penataan. Adapun rencana pembangunan dan penataan Taman Maju Bersama dan Taman Pintar untuk Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9.17

Rencana Pembangunan dan Penataan Taman Maju Bersama dan Taman Pintar Tahun 2018-2022

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, 2017

Penambahan Jumlah Lokasi							
No.	Jenis Taman	Tahun					Target Akhir
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Taman Maju Bersama	6	20	20	20	20	86
2	Taman Pintar	15	40	40	40	40	175
Total		21	60	60	60	60	261

9.5 Simpul Kemajuan

Pengembangan simpul kemajuan diselenggarakan melalui pengembangan Kepulauan Seribu, pengembangan kepariwisataan, pengembangan keanekaragaman budaya sebagaimana terlihat pada gambar 9.47 berikut :

Gambar 9.47

Panca Upaya Utama
Pembangunan Jakarta
Simpul Kemajuan



9.5.1 Pengembangan Keanekaragaman Budaya

a. Taman Budaya Benyamin Sueb

Saat ini Jakarta telah memiliki pusat kebudayaan yakni Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) dan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Namun demikian Jakarta belum memiliki Museum Kebudayaan Betawi yang berisi sejarah perkembangan Budaya Betawi, termasuk untuk mengenal salah seorang legenda budaya dari Betawi yakni H.Benyamin Sueb, berikut karya-karyanya.

Tujuan membangun Taman Budaya Benyamin Sueb adalah selain untuk membangun destinasi wisata baru di Jakarta sebagai upaya pelestarian budaya Betawi, juga sekaligus untuk mengenang tokoh legendaris budayawan Betawi H.Benyamin Sueb. Selama hidupnya beliau sudah menghasilkan kurang lebih 75 album musik, 53 judul film serta memperoleh dua Piala Citra. Ia berjasa pula dalam mengembangkan seni tradisional Betawi, khususnya kesenian Gambang Kromong dan menjadikan budaya Betawi dikenal luas hingga ke mancanegara.

Pengertian “taman budaya” secara umum adalah gabungan antara ruang terbuka dengan fasilitas gedung pertunjukan, galeri seni, teater terbuka, ruang workshop, museum seni,

dan lain-lain yang sangat integratif. Dengan kata lain pengertian tersebut menunjukkan bahwa fungsi dari ruang pertunjukan adalah sebagai tempat bertemu dan berkumpul untuk menyaksikan suatu pertunjukan atau pagelaran seni, mempelajari dan sekaligus memahami perkembangan seni budaya.

Rencana pembangunan Taman Benyamin Sueb mencakup fasilitas untuk pelestarian dan pengembangan budaya Betawi, wahana pentas seni, pusat interaksi lintas komunitas dan museum. Lokasi strategis dan aksesibilitas yang memadai merupakan salah satu pertimbangan dalam memilih lokasi Taman Benyamin Sueb. Adapun rencana pembangunan Taman Budaya Benyamin Sueb dapat memanfaatkan bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun berada di lokasi yang baru.

b. Revitaliasasi Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin

PDS H.B. Jassin merupakan pusat dokumentasi sastra yang diawali oleh aktifitas H.B. Jassin sekitar tahun 1930-an, yang secara aktif terus melakukan pendokumentasian berbagai karya sastra.

Perpustakaan PDS HB Jassin yang didirikan sejak tanggal 28 Juni 1976, merupakan satu-satunya perpustakaan sastra di Indonesia, yang memiliki berbagai koleksi karya sastra terlengkap yang terdiri dari koleksi buku fiksi 33.125 judul, buku non fiksi 17.352 judul, buku referensi 575 judul, majalah 246 judul, buku drama termasuk naskahnya 797 judul, biografi pengarang 6.000 map, foto pengarang 4.000 map, foto peristiwa sastra 799 map, kliping sastra dan budaya 17.357 map, skripsi dan disertasi 1.789 judul, makalah 500 judul, rekaman suara 900 kaset, dan rekaman gambar 60 video. Mulai tahun 2018, PDS HB Jassin sudah dilimpahkan kepengelolaannya dari Yayasan H.B. Jassin kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memprioritaskan pengembangan PDS H.B. Jassin dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Digitalisasi koleksi untuk menjamin kelestarian koleksi, khususnya koleksi-koleksi tua yang rawan rusak.
2. Pelibatan para pekerja informasi profesional untuk pengelolaan karya sastra.
3. Peningkatan kapasitas pengelola dalam hal preservasi dan konservasi.
4. Publikasi laporan perkembangan kinerja PDS H.B. Jassin kepada masyarakat, terkait penyimpanan dan pelestarian koleksi sastra Indonesia.
5. Pembentukan wadah para tenaga ahli sastra dalam pengembangan PDS HB Jassin.

6. Penyediaan gedung yang memadai untuk penyimpanan berbagai karya sastra.
7. Peningkatan Promosi sebagai upaya untuk lebih memperkenalkan PDS HB Jassin kepada masyarakat.

9.5.2 Pengembangan Kepariwisataaan

Selain pembangunan Taman Benyamin Suaeb, dalam beberapa dekade terakhir ini, beberapa jenis wisata telah berkembang dengan baik di DKI Jakarta, antara lain wisata niaga, wisata religi, wisata kuliner, wisata seni, dan lain sebagainya. Untuk ke depan, selain jenis - jenis wisata tersebut akan dikembangkan pula jenis wisata yang tergolong baru, yakni penyelenggaraan pagelaran seni rakyat sepanjang tahun, menghidupkan kembali koridor dan bangunan wisata serta budaya peninggalan sejarah (*heritage*), dan wisata *Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions* (MICE). Alasan mengapa jenis wisata ini layak untuk diprioritaskan karena selain memiliki *multiplayer effect* yang besar, juga mampu meningkatkan waktu lama tinggal para wisatawan. Selain wisata MICE, pada periode 2018 -2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memprioritaskan pengembangan kepariwisataan di DKI Jakarta, antara lain melalui strategi pengembangan paket objek wisata tematik, pengembangan jaringan promosi pariwisata secara , dan revitalisasi museum.

9.5.3 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dengan fokus pembangunan pada percepatan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih.

Rencana pengembangan sektor transportasi tahun 2018-2022 dalam rangka mendukung Kepulauan Seribu sebagai KSPN diantaranya dilakukan dengan upaya berikut :

- a. penyusunan standarisasi pelayanan kapal, penyesuaian trayek & Tambahkan narasi penyusunan kontrak layanan PSO.

1) Standarisasi Kapal

Sesuai dengan pasal 124 ayat (2) dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 bahwa salah satu aspek kelaiklautan kapal adalah terkait pemenuhan persyaratan keselamatan kapal yang bersifat teknis meliputi material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, perlengkapan dan elektronika kapal. Mengingat realita kondisi sarana transportasi angkutan perairan dari dan ke Kepulauan Seribu saat ini umumnya dilayani oleh Kapal Swasta Tradisional dengan spesifikasi kapal yang dinilai belum memenuhi aspek kelaiklautan kapal serta keselamatan pelayaran, maka perlu dipenuhi persyaratan keselamatan kapal yang bersifat teknis yang dituangkan dalam gambar rancang bangun kapal yang memenuhi kualifikasi sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam rancang bangun kapal.

2) Penetapan Lintasan Angkutan Perairan

Lintasan yang saat ini dilayani oleh kapal dari dan ke Kepulauan Seribu belum dilakukan penataan dan optimalisasi lintasan kapal. Pelayaran kapal yang ada hanya berdasarkan atas permintaan (*charter*) secara perorangan maupun berkelompok dan rute-rute yang umum dilintasi oleh penduduk di sebagian pulau dan kunjungan wisatawan. Belum dilakukannya optimalisasi lintasan mengakibatkan masih banyak rute-rute lainnya yang belum terlayani, untuk itu perlu adanya kajian dan penetapan lintasan yang dapat dijadikan sebagai acuan pengoperasian kapal-kapal tersebut.

Penataan lintasan Angkutan Perairan ke depannya selain melayani kebutuhan penduduk juga melayani wisatawan ke Kepulauan Seribu. Dengan asal tujuan perjalanan dari Pesisir Jakarta menuju Kepulauan Seribu (pulau penduduk dan pulau wisata) dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung masing-masing pulau di Kepulauan Seribu.

Penataan lintasan angkutan perairan perlu dilakukan dengan menetapkan lintasan utama (*trunk line*) dan lintasan cabang (*feeder line*). Dimana lintasan utama merupakan pergerakan dari pesisir menuju pulau utama, sedangkan *feeder line* merupakan pergerakan antar pulau.

3) Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif

Perbedaan tarif angkutan perairan dari dan ke Kepulauan Seribu yang diberlakukan oleh operator dan pemilik kapal sangat bervariasi. Variasi tarif tersebut disebabkan oleh belum adanya penetapan tarif ekonomi yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat menimbulkan potensi antar operator dan pemilik kapal. Untuk dapat ditetapkan tarif ekonomi tersebut maka diperlukan formulasi perhitungan tarif.

4) Penyusunan Kontrak Layanan PSO

Penyusunan Kontrak Layanan PSO dapat dilakukan setelah penyusunan *Standard Operational Procedure* (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta pembentukan unit pengelola angkutan perairan yang akan menyelenggarakan kegiatan pelayanan angkutan pelayaran dalam bentuk kerjasama baik secara lelang maupun penugasan operator.

b. alternatif skema pengembangan sarana dan prasarana transportasi perairan ke Kepulauan Seribu

Saat ini telah tersedia pelayanan transportasi dari dan ke Kepulauan Seribu yang melayani rute dari Pelabuhan Muara Angke ke beberapa pulau di Kepulauan Seribu dan juga fasilitas pelabuhan di beberapa pulau yaitu Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Harapan, Pulau Payung, Pulau Panggang, Pulau Lancang, Pulau Kelapa dan Pulau Sebira. Kondisi 10 (sepuluh) pelabuhan tersebut memerlukan perbaikan dan peningkatan, mengingat adanya penambahan jumlah dan besar kapal yang bersandar pada pelabuhan tersebut, dimana pembangunan pelabuhan di Kepulauan Seribu saat ini tidak terintegrasi akibat tumpang tindihnya tupoksi yang berwenang di wilayah tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan pembentukan organisasi yang dapat melakukan perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan pelabuhan secara terpadu di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut bahwa Fungsi Pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan adalah penyelenggara pelabuhan:

- Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - Otoritas pelabuhan atau kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - Unit penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dapat membawahi satu atau beberapa pelabuhan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Pasal 9 bahwa:
 - Unit penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati/walikota untuk unit penyelenggara pelabuhan pemerintah daerah;

- Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - ✓ Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur pelayaran;
 - ✓ Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - ✓ Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - ✓ Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - ✓ Menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
 - ✓ Menjamin kelancaran arus barang; dan
 - ✓ Menyediakan fasilitas pelabuhan.

Kemudian itu Rencana pengembangan Kepulauan Seribu sebagai KSPN tahun 2018-2022 selain upaya percepatan pada pembangunan sektor transportasi, direncanakan pula rencana pengembangan sektor energi, lingkungan, pariwisata dan perdagangan diantaranya sebagaimana tercantum berikut :

a. pengembangan kapasitas kelistrikan di Kepulauan Seribu

Dalam Peningkatan kapasitas dan keandalan kelistrikan Kepulauan Seribu Kebutuhan listrik di Kepulauan Seribu sampai dengan tahun 2017 sebesar 10 *Mega Watt*, kemudian kebutuhan sampai dengan tahun 2022 perlu penambahan 5 *Mega Watt* lagi, sehingga total kebutuhan listrik di Kepulauan Seribu sampai dengan tahun 2022 sebesar 15 *Mega Watt*. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk mendukung kegiatan pariwisata dan ekonomi masyarakat di Kepulauan Seribu akan dilakukan peningkatan kapasitas dan keandalan saluran kabel listrik bawah laut.

Dalam mendukung pengembangan Pulau Sebir, untuk ketersediaan dan keandalan listriknya, tidak akan menggunakan kabel laut karena jarak pulau tersebut cukup jauh (dinilai tidak ekonomis), maka akan didukung dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dihibrid dengan pemanfaatan energi baru terbarukan (PLTS/PLTB) sehingga pelayanan listrik dapat beroperasi selama 24 jam baik untuk kebutuhan masyarakat dan kegiatan wisata/ekonomi termasuk untuk kebutuhan *cold storage*.

b. pengembangan pusat konservasi ekologi

Pengelolaan kelautan dan perikanan di Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan sebuah rangkaian kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan arahan undang-undang tersebut, maka program pengelolaan kelautan dan perikanan di Provinsi DKI Jakarta dijabarkan ke dalam tiga indikator yaitu perencanaan, pemanfaatan dan monitoring, dan pengawasan dan pengendalian.

1) Perencanaan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Penataan terhadap wilayah kelautan diperlukan dalam kaitannya pengaturan pemanfaatan laut secara optimal dengan mengakomodasi semua kepentingan sekaligus sebagai suatu upaya menghindari adanya konflik pemanfaatan ruang di laut dan pemanfaatan sumberdaya kelautan harus diberikan batas yang jelas antara zona pemanfaatan yang satu dengan zona yang lain.

2) Pemanfaatan dan Monitoring Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan tidak akan pernah terlepas dari fungsi konservasinya. Bahkan konservasi telah diyakini sebagai upaya penting yang mampu menyelamatkan potensi sumberdaya tetap tersedia dalam mewujudkan perikehidupan lestari yang menyejahterakan. Pengelolaan secara efektif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan akan mampu memberikan jaminan dalam efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam, sebagai sumber yang efektif menyokong pemanfaatan lain secara ramah lingkungan, serta dapat menumbuhkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi dengan kegiatan *fish shelter*, transplantasi karang, penanaman mangrove, pelatihan *diving*, penangkaran biota laut, sarana konservasi, kajian konservasi dan rehabilitasi serta pengelolaan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat.

Fish Shelter adalah susunan batangan beton bertulang yang ditenggelamkan di dasar laut yang berfungsi sebagai terumbu buatan. *Fish Shelter* bertujuan untuk memperbaiki kondisi terumbu karang yg rusak. Fungsi *Fish Shelter* ini antara

lain memberikan “rumah baru” bagi ikan yang kehilangan habitat aslinya. Selain itu terumbu buatan ini juga secara alami akan ditempati oleh organisme bentik (misalnya larva karang, *sponge*, dll). Diharapkan setelah bertahun-tahun dapat membentuk suatu habitat kompleks.

Transplantasi karang adalah salah satu teknik pelestarian (rehabilitasi) terumbu karang yang semakin terdegradasi dengan teknik pencangkakan. Teknologi transplantasi karang merupakan salah satu pendekatan baru untuk memperbaiki kondisi terumbu karang. Transplantasi karang berperan dalam mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak, juga dapat membangun daerah terumbu karang baru yang sebelumnya tidak ada. Transplantasi karang dengan tujuan meningkatkan produksi perikanan sering disebut “*Fish Aggregating Device*” (FAD), yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengubah suatu perairan yang sepi ikan menjadi perairan yang banyak ikan. Terumbu karang buatan di bangun disekitar terumbu karang, sehingga nelayan tidak lagi menangkap ikan di daerah terumbu karang, tetapi berpindah di daerah terumbu karang buatan.

Daerah Perlindungan Laut (DPL) adalah suatu kawasan laut yang terdiri dari berbagai habitat, yang dikelola dan dilindungi secara hukum dengan tujuan untuk melindungi keunikan, keindahan, dan produktivitas atau rehabilitasi suatu kawasan. Kawasan ini dilindungi secara tetap dari berbagai kegiatan pemanfaatan, kecuali kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata terbatas.

3) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengawasan SDKP di Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan, daratan, pengembangan kelompok masyarakat pengawas SDKP, peningkatan sarana prasarana pengawasan SDKP dan penanganan tindak pidana perikanan.

c. Pembinaan OK-OCE di Kepulauan Seribu

Dalam rangka mendukung penciptaan 200.000 wirausaha baru di Jakarta, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, menyusun program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM, dimana terdiri dari kegiatan Pembinaan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan, Pendampingan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan, Pembangunan Tempat Kumpul Kreatif & Betawi Store Tingkat Kota/Kabupaten serta Bazar UKM Tingkat Kota/Kab dan Kecamatan.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan salah satu lokasi sasaran pengembangan kewirausahaan. Saat ini akan dilakukan pembinaan kewirausahaan di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Kepulauan Seribu Utara di Pulau Kelapa dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan di Pulau Tidung. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kewirausahaan di Kepulauan Seribu adalah belum tersedianya angkutan reguler antar Pulau. Eksisting dengan menggunakan kapal dari Marina atau Muara Angke/Kali Adem jika di darat. Jika pelatihan itu dilakukan di Pulau maka masih harus menyewa kapal dengan biaya sewa sesuai dengan jarak lokasi pelatihan. Selain itu, untuk wilayah Kepulauan Seribu Selatan masih terkendala cuaca.

Solusi yang akan dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan di masing-masing kelurahan untuk lebih mempermudah dalam hal jarak dan kondisi cuaca. Diharapkan ke depannya perlu dilakukan koordinasi ataupun penganggaran di SKPD terkait.

Adapun karakteristik produk berbagai macam sesuai dengan minat dan kompetensi masing-masing peserta, antara lain : tata busana, kerajinan kerang, olahan daging/ikan (olahan sukun, kerupuk ikan, kerupuk rumput laut, steak cumi, olahan ikan asin) dan servis elektronik. Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat Kepulauan Seribu dapat meningkatkan perekonomiannya dan mendukung penciptaan 200.000 wirausaha baru.

d. Pengembangan Kepariwisata Kepulauan Seribu

Upaya pengembangan kepariwisataan di Kepulauan Seribu melalui peningkatan citra dan *awareness* Kepulauan Seribu melalui berbagai chanel promosi baik *above the line*, *below the line* dan sosial media, serta mengembangkan berbagai amenitas dan atraksi yang unik serta penambahan fasilitas resort apung dengan mempermudah proses perijinan meelalui koordinasi yang intens dengan instansi terkait. Jumlah wisatawan ke Kepulauan Seribu tahun 2017 berjumlah 879.360 wisatawan. Target 2022 adalah 1.122.311 wisatawan (target rendah 5 persen per tahun) dan 1.410.366 wisatawan (target tinggi 10 persen per tahun).

Berdasarkan hasil kajian Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata pada tahun 2014, direncanakan konsep pengembangan pada beberapa pulau, antara lain :

a. Pulau Sebira

Sebagai gerbang utara Kepulauan Seribu, posisi Pulau Sebira lebih dekat dengan wilayah Provinsi Lampung dibandingkan dengan daratan DKI Jakarta. Kondisi kawasan perairan dan pantai masih sangat terjaga, dimana hamparan pasir putih bersih terbentang di sepanjang bibir pantainya dan mercusuar *Noordwachter* yang terletak pada bagian pesisir pulau.

Pulau Sebira merupakan salah satu dari 11 pulau permukiman di Kepulauan Seribu dengan mayoritas penghuninya merupakan penduduk etnis Bugis yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Oleh karenanya, kegiatan jual beli ikan, pengolahan ikan hingga pembuatan kapal merupakan salah satu kegiatan yang kental di Pulau Sebira. Kondisi Pulau Sebira dapat dilihat pada gambar 9.48 berikut :

Gambar 9.48

Kondisi Pulau Sebira dan Penataan Dermaga Pulau Sebira

Sumber : Kementerian Pariwisata RI, 2014



Perancangan Gerbang Utara di Pulau Sebira ini didasarkan pada letak Pulau Sebira yang berada di ujung utara Kabupaten Kepulauan Seribu dan berdekatan dengan Provinsi Lampung, yang berfungsi sebagai penanda atau gerbang masuk kedalam KSPN Kepulauan Seribu. Segmen wisatawan yang dituju adalah wisatawan nusantara yang berasal dari wilayah Sumatera. Pulau Sebira merupakan pulau yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata, karena memiliki daya tarik wisata alam, budaya dan sejarah

b. Pulau Sebaru Kecil

Pulau Sebaru Kecil merupakan salah satu dari kumpulan pulau di Kepulauan Seribu yang terletak di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan memiliki keindahan bawah laut yang masih terjaga. Pulau Sebaru merupakan Pulau yang tidak berpenduduk. Pulau ini biasanya menjadi tujuan para penyelam untuk menikmati keindahan biota lautnya. Jika dibandingkan dengan Pulau Pramuka atau Pulau Tidung, Pulau Sebaru terletak lebih jauh dari Kota Jakarta. Masih jarang dikunjungi, kecuali para penyelam yang mencari spot yang bagus. Semakin banyak dan subur pertumbuhan terumbu karang, maka akan semakin banyak juga hewan laut yang hidup di laut Kepulauan Seribu salah satunya ikan badut atau dikenal dengan ikan Nemo. Kondisi Pulau Sebaru Kecil dapat dilihat pada gambar 9.49 berikut :

Gambar 9.49

Pulau Sebaru Kecil dan
Penataan Dermaga Pulau
Sebaru Kecil

Sumber : Kementerian
Pariwisata RI, 2014



Perancangan Pulau Sebaru Kecil ini didasarkan pada pusat pelayanan pariwisata Wilayah Persebaran Pariwisata Utara, rekreasi untuk umum dan sebagai obyek serta atraksi wisata pantai dan laut. Segmen wisatawan yang dituju adalah wisatawan nusantara yang berkunjung dalam kelompok, keluarga, atau individual yang berasal dari Pulau Jawa dan sekitarnya. Kunjungan wisatawan sebagian besar bersifat rekreasional dengan menginap pada fasilitas akomodasi yang ada atau berkemah (camping) pada akhir pekan dan hari libur.

c. Pulau Harapan

Pengembangan wisata bersepeda di Pulau Harapan didukung dengan aksesibilitas yang cukup baik dimana jalan-jalan lingkungan telah berupa *paving block* sehingga memungkinkan untuk dikembangkan sebagai jalur atau *track* sepeda wisata. Daya tarik wisata di bagian utara pulau berupa pemandangan gugusan pulau-pulau kecil dan taman bermain. Pada bagian barat pulau, daya tarik wisata yang dapat dinikmati adalah pemandangan jajaran pohon mangrove dan jembatan yang menghubungkan Pulau Harapan dengan Pulau Kelapa. Di bagian selatan pulau, daya tarik yang dapat dinikmati adalah pantai dengan hamparan pasir putih, pemandangan jajaran pohon mangrove dan wisata edukasi terkait pembibitan mangrove dan pembuatan kapal. Kegiatan ekowisata mangrove yang dikembangkan di Pulau Harapan dilakukan melalui prinsip ekowisata yang mengedepankan konservasi lahan mangrove.

Gambar 9.50

Perancangan Pengembangan
Pulau Harapan dan Penataan
Dermaga Pulau Harapan

Sumber : Kementerian
Pariwisata RI, 2014



Perancangan Pulau Harapan didasarkan pada perannya sebagai pusat distribusi dan pelayanan pariwisata Wilayah Persebaran Pariwisata Tengah, dengan fungsi sebagai pusat logistik barang dan jasa pariwisata, pusat pelayanan akomodasi pariwisata, pusat pelayanan prasarana dan sarana transportasi pariwisata, sebagai pusat rekreasi untuk umum, sebagai obyek dan atraksi wisata pantai maupun laut. Segmen wisatawan yang dituju adalah wisatawan nusantara yang berkunjung dalam kelompok, keluarga, atau individual yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa dan sekitarnya.

Sebagai pusat pelayanan transportasi, Pulau Harapan dilengkapi dermaga untuk kapal dan perahu barang dan penumpang. Sebagai pusat logistik, Pulau Harapan dilengkapi fasilitas pergudangan dan perdagangan. Sebagai pusat pelayanan dan fasilitas pariwisata, Pulau Harapan dilengkapi fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas penunjang atraksi wisata, dan utilitas umum dan pariwisata.

d. Pulau Bira Besar

Pulau Bira Besar merupakan pulau yang berada pada gugusan Kepulauan Seribu yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Lokasi Pulau Bira Besar, berdekatan dengan Pulau Matahari. Jaraknya Sekitar 100 km dari Pantai Marina Ancol dan dapat ditempuh dengan *speed boat* sekitar 1 jam 45 menit. Pulau dengan luas 291.300 m² merupakan pulau wisata paling besar diantara pulau lainnya. Pulau Bira Besar sampai saat ini masih dikelola sebagai pulau wisata dan terbuka untuk umum.

Gambar 9.51

Pulau Bira Besar dan
Masterplan Pulau Bira Besar

Sumber : Kementerian
Pariwisata RI, 2014



Perancangan Pulau Bira Besar didasarkan pada fungsi pulau sebagai kawasan rekreasi untuk umum, obyek dan atraksi wisata pantai dan laut. Segmen wisatawan yang dituju adalah wisatawan nusantara yang berkunjung dalam kelompok, keluarga, atau individual yang sebagian besar berasal Pulau Jawa dan sekitarnya.

e. Pulau Tidung

Pulau Tidung terletak di Kabupaten Administratif Kabupaten Kepulauan Seribu, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kelurahan Pulau Tidung. Pulau yang paling dekat dengan Pulau Tidung Kecil berada sekitar 500 meter sebelah timur, yaitu Pulau Tidung Besar. Sebagai salah satu pulau berpenghuni yang posisinya paling dekat dengan Pulau Tidung Kecil, maka dalam banyak hal Pulau Tidung Besar saat ini dapat menjadi daerah pendukung yang paling signifikan dalam pengembangan Pulau Tidung Kecil. Berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas, Pulau Tidung merupakan destinasi utama kunjungan wisata di Kepulauan Seribu, terutama bagi para pecinta laut yang tidak terlalu suka dengan keramaian.

Pulau Tidung berperan sebagai pusat distribusi dan pelayanan pariwisata Wilayah Persebaran Pariwisata Selatan, yang berfungsi sebagai pusat logistik barang dan jasa pariwisata, pusat pelayanan akomodasi pariwisata, pusat pelayanan prasarana dan sarana transportasi pariwisata, pusat rekreasi untuk umum, sebagai obyek dan atraksi wisata pantai dan laut. Segmen wisatawan yang dituju adalah wisatawan nusantara yang berkunjung dalam kelompok, keluarga, atau individual yang berasal dari Pulau Jawa dan sekitarnya.

Gambar 9.52

Pulau Tidung dan Penataan Dermaga Pulau Tidung

Sumber : Kementerian Pariwisata RI, 2014



Sebagai pusat pelayanan transportasi, Pulau Tidung dilengkapi pula dengan dermaga untuk kapal barang maupun penumpang. Sebagai pusat logistik, Pulau Tidung dilengkapi fasilitas pergudangan dan perdagangan. Sebagai pusat pelayanan dan fasilitas pariwisata, Pulau Tidung dilengkapi dengan fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas penunjang atraksi wisata, utilitas umum dan pariwisata.

e. Rencana Pembangunan Infrastruktur di Kepulauan Seribu sebagai KSPN

Adapun beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut ;

1. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengembangan SMK Pariwisata dan Kelautan, serta peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan;
 2. Layanan kesehatan termasuk penyediaan kapal ambulans;
 3. Penyediaan air bersih melalui *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) dan *Brackish Water Reverse Osmosis* (BWRO);
 4. Pembangunan pusat konservasi ekologi (restorasi pantai, transplantasi karang, dan pelibatan penduduk) di Kepulauan Seribu;
 5. Pengembangan pasar terpadu;
 6. Pengembangan kampung wisata tematik melalui penataan serta pembangunan kawasan dan hunian warga;
 7. Peningkatan/revitalisasi pelabuhan di 10 Pulau di Kepulauan Seribu;
 8. Mewujudkan objek ekowisata kepulauan yang terjangkau, berbudaya, dan berskala internasional melalui kemitraan dan investasi, termasuk pembangunan resort apung;
 9. Peningkatan daya listrik menjadi 15 MW;
 10. Pembangunan IPAL di setiap pulau permukiman;
 11. Pengembangan sumber energi terbarukan dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (Solar Panel).
- f. Pengembangan Pesisir

Dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan Manajemen Pengelolaan Pesisir yang ditujukan untuk menata pesisir Jakarta agar secara ekologis kualitasnya menjadi lebih baik sekaligus mampu sebagai lingkungan pengembangan kesejahteraan dan kemajuan warga.

Pengelolaan pesisir pantai utara Jakarta, termasuk di dalamnya soal reklamasi, diletakkan dalam kerangka pengembangan tata ruang dan zonasi pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah administratif Pemprov DKI Jakarta. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah tumbuh kembangnya kesejahteraan warga, kemajuan kota, kelestarian lingkungan hidup dan terjaminnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Konsep rencana pemanfaatan tata ruang pesisir dan zonasi laut akan disusun sesuai amanat Undang-Undang no 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Penyusunan

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K) akan melibatkan sektor usaha dan masyarakat seluas-luasnya. Pengelolaan tata kelola pesisir pantai utara Jakarta akan memperhitungkan wilayah pantai dan laut secara keseluruhan sebagai satu kesatuan utuh yang melibatkan masyarakat, dunia usaha serta pemerintah.

Pengelolaan tata ruang pesisir dan pulau-pulau di Jakarta juga harus mengedepankan tata kelola yang baik dan mengikuti segala regulasi yang ada. Tujuan dari hal ini selain mendorong akuntabilitas pemerintahan tetapi juga mendorong kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Tata kelola yang sesuai dengan peraturan yang berlaku akan memberikan kepastian hukum dan menghindari pelanggaran hukum dalam proses-proses pengelolaan pesisir utara Jakarta di antaranya adalah melanjutkan proses penyempurnaan dan penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan regulasi lain yang diamanatkan undang-undang.

Dalam perspektif lingkungan hidup, akan dilakukan upaya untuk mengetahui kondisi Teluk Jakarta setelah adanya kegiatan reklamasi, yang telah dilaksanakan pada Pulau C, D, G dan K, serta untuk menindaklanjuti surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.317/MENLH/PKTL/PLA.4/9/2017, tanggal 15 September 2017, perihal: Tindak Lanjut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2017. Untuk itu perlu dilakukan kajian pemetaan (atau audit) reklamasi berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan di lokasi reklamasi, meliputi : a) kualitas air laut dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan ekosistem mangrove; (b) kondisi dan pengaruh hidrodinamika laut dalam *flushing* limbah, sampah, maupun sedimen yang masuk ke teluk; (c) kondisi fisik, kimia dan biologi lapisan tanah di dasar Teluk Jakarta pada tiap-tiap kedalaman tertentu serta perkiraan resiko subsiden di Teluk Jakarta; (d) kondisi *fishing ground*, pola lintas nelayan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan; (e) tren penurunan muka air tanah; dan (f) tren penurunan muka tanah. Hasil pemetaan/audit lingkungan ini akan menjadi dasar dari perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang pulau reklamasi serta menjadi dasar penyusunan revisi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP Jakarta) dan penetapan Peraturan Daerahnya.



BAB X

PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsinya dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB

PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

X

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsinya dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga disebutkan tentang peran Gubernur dalam pembinaan perusahaan daerah. Pada Pasal 24 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah. Dengan dasar tersebut Gubernur mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dengan harapan agar BUMD dalam melakukan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan perundangan.

BUMD sebagai institusi mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Karakteristik BUMD meliputi:

- a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah
- b. Badan usaha dimiliki oleh :
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah
 - 2) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah
 - 3) 1 (satu) Pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
 - 4) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah daerah dengan bukan daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Selain itu, BUMD memiliki aktivitas operasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan aktivitas tersebut antara lain adalah:

- a. Aktivitasnya diprioritaskan dalam rangka kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

- b. Kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- c. BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dengan kepala daerah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan perseroan daerah dengan kepala daerah sebagai pemegang saham.
- d. Pengelolaan BUMD memedomani pada dua regulasi yaitu regulasi yang terkait dengan badan usaha sebagai sektor publik dan badan usaha yang berkaitan dengan sektor privat.

Berdasarkan karakteristik tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menjaga tugas dan fungsi BUMD sebagai agen pembangunan. Dengan demikian diharapkan agar dimasa mendatang BUMD mampu menjalankan perannya yang strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara profesional dan proporsional.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMD agar aktivitas BUMD sesuai dengan tujuan pendirian maka diperlukan pedoman yang komprehensif. Pedoman yang komprehensif ini dimaksudkan agar seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan tujuan pendirian dan visi misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022. Dengan demikian diharapkan BUMD dapat menyelenggarakan aksi korporasinya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembinaan BUMD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan secara terukur, sistematis, komprehensif dan holistik. Hal ini dimaksudkan agar BUMD dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG). BUMD telah cukup banyak berkontribusi dalam pembangunan DKI Jakarta. Kontribusi tersebut antara lain penyediaan air bersih, pengelolaan sanitasi, mendukung penyediaan sarana transportasi ibukota, penyediaan infrastruktur dasar. Selain itu BUMD juga telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan masyarakat non-tunai (cashless society), menyediakan sarana rekreasi yang terjangkau, menyediakan kawasan industri untuk melakukan usaha, mendukung aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah serta mendukung ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau. Di samping itu BUMD juga telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya kinerja hasil pelaksanaan aktivitas BUMD dan gambaran tentang keberadaan BUMD akan diuraikan sebagai berikut.

10.1 Kinerja BUMDDKI Jakarta

Dalam rangka simplifikasi evaluasi BUMD Jakarta, BUMD dikelompokkan menjadi sembilan klaster usaha. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan klaster usaha adalah dengan pendekatan aktivitasnya. Dengan dasar tersebut, kesembilan klaster usaha tersebut adalah sebagai berikut :

1. Klaster usaha transportasi
2. Klaster usaha Properti
3. Klaster usaha Keuangan
4. Klaster usaha Infrastruktur
5. Klaster usaha Pariwisata
6. Klaster usaha Kawasan Industri
7. Klaster usaha Pangan
8. Klaster usaha Utilitas
9. Klaster usaha Perpasaran dan Industri

Evaluasi BUMD pada prinsipnya adalah penilaian kinerja BUMD atas aktivitas yang telah dijalankan BUMD. Penilaian dimaksud salah satunya adalah yang berkaitan langsung dengan dukungan BUMD terhadap prioritas pembangunan daerah antara lain, yaitu pengembangan sistem transportasi, pengurangan ketimpangan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota, pemenuhan kebutuhan air bersih, ketahanan pangan serta pengelolaan sanitasi.

Lebih rinci, evaluasi atas kinerja BUMD berdasarkan klaster usahanya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Klaster Usaha Transportasi

Urusan perhubungan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan transportasi yang dialami DKI Jakarta relatif kompleks sehingga memerlukan solusi yang komprehensif. Beberapa permasalahan transportasi antara lain adalah kemacetan, ketidakcukupan jumlah armada, masih minimnya kualitas angkutan umum, belum tertatanya moda transportasi secara holistik. Kondisi yang demikian membutuhkan solusi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai dukungan pembangunan angkutan umum berbasis jalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD Klaster usaha transportasi hingga akhir tahun 2016 berupaya melakukan perbaikan pelayanan transportasi melalui pelayanan Sistem Bus Rapid Transit (BRT) 12 (duabelas) koridor dengan layanan 516 unit bus Siap Operasi, angkutan perbatasan Transjabodetabek untuk 11 (sebelas) rute dengan layanan 113 unit bus Siap Operasi, angkutan Integrasi untuk 21 (dua puluh satu) rute dengan layanan 245 unit bus Siap Operasi, layanan bagi warga Jakarta yang tinggal di rumah susun diantaranya Daan

Mogot, Flamboyan, Kapuk Muara, Tambora, Marunda, Cibesel, Rawa Bebek dan lainnya dengan layanan 15 unit Bus Siap Operasi serta layanan angkutan pariwisata dan bus gratis dengan layanan 19 unit Bus Siap Operasi.

Selain menambah wilayah layanan, pada tahun 2016 juga telah dilakukan penambahan armada secara bertahap. Sampai akhir tahun 2016 jumlah armada yang tersedia mencapai 519 armada. Hal ini untuk mendukung dan meremajakan armada yang telah beroperasi selama ini. Selain itu peningkatan pelayanan juga dilakukan melalui program penyediaan layanan angkutan bus bersubsidi dan gratis bagi masyarakat. Hal ini merupakan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 160 tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis bagi Masyarakat. Inti dari Peraturan Gubernur ini adalah memberi layanan gratis pada masyarakat yang memenuhi syarat tertentu.

Selanjutnya, peningkatan pelayanan transportasi umum juga telah dilakukan bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus melalui dijalankannya layanan Transjakarta Cares dalam rangka layanan antar jemput gratis bagi penyandang disabilitas secara gratis. Sampai akhir tahun 2016 telah tersedia 5 unit kendaraan untuk melayani penyandang disabilitas. Pada akhir tahun 2017 juga telah diluncurkan tambahan koridor yaitu koridor 13. Koridor tersebut merupakan koridor elevated yang melayani Ciledug–Mampang.

Selain peningkatan sistem layanan melalui BRT, dibutuhkan peningkatan kenyamanan sejumlah fasilitas untuk membuat warga, baik laki-laki, perempuan, anak, lansia dan disabilitas agar beralih menggunakan transportasi publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mempercepat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Sampai dengan triwulan III Tahun 2017 telah diselesaikan pembangunan konstruksi fisik (Fase I) Koridor Bundaran HI-Lebak Bulus sebesar 68 persen. Pemerintah Provinsi DKI juga melakukan pembangunan transportasi berbasis rel, yaitu pembangunan Light Rail Transit (LRT). Pembangunan LRT difokuskan pada pembangunan Prasarana dan Penyelenggaraan Sarana LRT Jakarta dalam rangka Asian Games 2018 dengan 6 stasiun layang dan 1 depo untuk pemeliharaan LRVs (Light Rail Vehicles). Pada tahap awal akan dioperasikan sebanyak 8 articulated LRVs atau 4 train sets (1 train set = 2 LRVs), dengan headway 10-15 menit. Pada saat ini progres pembangunan prasarana telah mencapai 43,14 persen sedangkan pembangunan sarana transportasi telah mencapai 41,11 persen.

b. Klaster Usaha Keuangan

Klaster usaha keuangan merupakan salah satu klaster usaha pendukung dalam pelayanan berbagai program prioritas yang dijalankan dalam lima tahun terakhir. Sampai dengan tahun 2016 kinerja BUMD klaster usaha keuangan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bank DKI sebagai salah satu BUMD yang bergerak

di klaster usaha keuangan telah mengalami peningkatan status BUKU (Bank Umum Kelompok Usaha) dari kategori BUKU 2 menjadi BUKU 3. Disamping itu, Bank DKI juga telah mengembangkan visi dan strategi baru di tahun 2016 dan beraspirasi untuk menjadi bank regional modern dan bernilai tinggi, yang menjaga keseimbangan antara keuntungan dan pembangunan Jakarta. Selain peningkatan posisi perusahaan, sampai dengan akhir tahun 2016, Bank DKI juga terus meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan Jakarta dan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui peluncuran kartu Jakarta One, implementasi Cash Management System, e-ticketing pada beberapa objek wisata Provinsi DKI Jakarta, distribusi KJP, terminal parkir elektronik, e-samsat, e-retribusi serta pemberian pembiayaan kepada segmen UMKM khususnya kepada pedagang di lingkungan PD Pasar Jaya.

Klaster usaha keuangan lainnya adalah peranan PT.Jamkrida Jakarta dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) melalui penjaminan kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Baik penjaminan kredit pembiayaan maupun penjaminan proyek konstruksi, non konstruksi maupun pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

c. Klaster Usaha Properti

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat Jakarta. Dengan pembangunan perumahan yang memadai dan mencukupi maka masyarakat DKI akan dapat lebih nyaman dan lebih sejahtera. Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan terdapat beberapa permasalahan antara lain keterbatasan ketersediaan lahan dan ketidakterjangkauan masyarakat dalam memperoleh perumahan yang layak. Menghadapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan solusi dengan cara pembangunan rumah hunian vertikal. Hal ini dimaksudkan memberikan kualitas hidup yang layak bagi warganya untuk tinggal dan bekerja. Dalam kaitannya dengan hal ini BUMD klaster usaha properti dan infrastruktur telah ikut berpartisipasi aktif guna mendukung penyediaan perumahan dan hunian bagi masyarakat.

Sampai dengan akhir tahun 2016 telah dibangun beberapa lokasi hunian antara lain perumahan Central Bussines District (CBD) Pulau Jahe di Jatinegara sejumlah 77 unit, perkantoran Gedung Sarana Jaya 3 di Rawamangun pembangunan apartemen melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga diantaranya, Apartemen Palma Citra, Apartemen Pondok Kelapa, Pejaten Park Residence sebanyak 2 tower (428 unit) dan apartemen Wang Residence sebanyak 2 tower (358 unit). Bangunan komersil antara lain Mall Pondok Kelapa Town Square, Hotel Veranda Pakubuwono, Hotel Mercure Cikini, dan untuk kedepannya land banking di Lebak Bulus akan dijadikan TOD MRT yang diperuntukkan sebagai bangunan hunian, perkantoran, park and ridedan bangunan komersil.

d. Klaster Usaha Utilitas

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi Jakarta. Pencemaran lingkungan yang dialami Jakarta meliputi pencemaran udara, air dan perairan laut. Hal ini antara lain disebabkan oleh pengelolaan limbah yang belum optimal. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD melakukan perbaikan pengelolaan utilitas yang dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Jakarta yaitu pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah secara sistematis dan terstandarisasi. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan air bersih dan air limbah dapat memenuhi standar yang akuntabel. Sampai dengan tahun 2016, BUMD Klaster usaha utilitas yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah telah melakukan berbagai upaya yang intinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar aspek lingkungan hidup di Jakarta dapat terkelola dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat secara optimal.

Pembangunan fisik yang dilakukan adalah pembangunan sarana prasarana pengelolaan limbah yang diantaranya percepatan pembangunan sistem perpipaan limbah terpusat zona O (off site). Progres pelaksanaan fisik dilakukan di wilayah Mega Kuningan, SCBD - Senopati, Jalan Asia Afrika. Selain itu, BUMD klaster usaha utilitas untuk air limbah juga mempersiapkan pembangunan pada lima lokasi strategis Jakarta. Sampai akhir tahun 2016 proses ini masih dalam tahapan lelang dan review design konstruksi. Sangat disadari bahwa klaster usaha utilitas juga melakukan beberapa persiapan pembangunan fisik dengan penyusunan Detailed Engineering Design (DED) pada enam zona dari total 15 zona pengelolaan air limbah di DKI Jakarta.

Dari segi aspek pelayanan, peningkatan pengelolaan air limbah juga dilakukan melalui program layanan penyedotan lumpur tinja berkala melalui mobil tinja (on site) bagi rumah tangga, niaga, industri, dan bangunan sosial. Sampai dengan akhir tahun 2016 telah terdaftar sejumlah 2.602 pelanggan yang dilayani, dengan total luas lantai 10.362.682 m² dengan rincian rumah tangga sejumlah 2.077 dengan luas 180.894 m², niaga kecil sejumlah 247 dengan luas 182.941 m², niaga besar sejumlah 237 dengan luas 9.671.914 m² serta bangunan sosial sejumlah 41 dengan luas 326.933 m². Saat ini pengelolaan IPAL berada pada dua lokasi yaitu IPAL Pulogebang dengan kapasitas 900 m³/hari dan IPAL Duri Kosambi dengan kapasitas 900 m³/hari. Selain peningkatan pengelolaan air limbah, juga terus dilakukan peningkatan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih/air minum bagi masyarakat di DKI Jakarta melalui BUMD Klaster usaha utilitas. Total air bersih yang didistribusikan sebesar 593.917.577 Meter Kubik (air produksi sebesar 506.636.700 Meter Kubik dan pembelian air curah sebanyak 87.280.877 Meter Kubik). Sampai dengan akhir tahun 2016 telah terdaftar sambungan sejumlah 839.391 pelanggan dengan cakupan pelayanan 59,20 persen dari seluruh DKI Jakarta. Selain pelanggan komersil dan rumah tangga, BUMD Klaster usaha utilitas juga

telah mendukung penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat yang tinggal di rumah susun diantaranya Rumah Susun Daan Mogot dan Rumah Susun Waduk Pluit.

e. Klaster Usaha Pangan dan Perpasaran

Usaha untuk mengimplementasikan program ketahanan pangan diperlukan usaha yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan yang meliputi dunia usaha, Pemerintah dan masyarakat. Adapun tujuan utama program ketahanan pangan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah memelihara dan menjaga ketahanan pangan. Arti dari ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal.

BUMD Klaster usaha pangan telah banyak dilakukan dukungan melalui ketersediaan cadangan pangan, akses pangan yang lebih baik serta stabilisasi harga pangan. Sepanjang tahun 2016 telah dilakukan upaya pemenuhan program ketahanan pangan melalui kegiatan usaha komersial dan sosial diantaranya penjualan produk ke pasar modern dan penyediaan pangan murah melalui kegiatan pasar yang dilaksanakan di 74 kelurahan dengan fokus pada penyediaan beras, daging dan minyak goreng bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) sejumlah kurang lebih 600.000 peserta.

Selain operasi pasar, juga telah dilakukan bazar atau pasar murah yang dilaksanakan setiap hari di sejumlah kelurahan untuk memperjualbelikan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dan berkualitas baik. Berdasarkan data BPS, dari kegiatan tersebut mampu meredam laju inflasi sepanjang tahun 2016. Selain itu BUMD klaster usaha pangan juga telah melakukan pembangunan pasar rakyat. Hal ini dimaksudkan agar pasar bisa menjadi lembaga yang menjembatani transaksi antara konsumen dan pedagang. Beberapa pasar yang telah diresmikan penggunaannya adalah Pasar Nangka Bungur, Pesanggrahan, Kebon Bawang dan Kampung Duri.

f. Klaster Usaha Pariwisata

Salah satu kebutuhan penting masyarakat kota adalah terpenuhinya usaha rekreasi. BUMD dalam hal ini telah melakukan upaya untuk menyediakan sarana rekreasi yang berkualitas dan terjangkau. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan yang bersifat rekreatif warga Jakarta dapat terpenuhi. Beberapa tempat rekreasi yang telah diusahakan oleh BUMD cukup bervariasi. Dalam mengusahakan tempat rekreasi BUMD selain mengemban misi bisnis juga mempertimbangkan misi pelayanan masyarakat. Artinya BUMD juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum beruntung

untuk bisa menikmati sarana wisata yang berkualitas dengan harga terjangkau. Usaha tempat rekreasi tersebut antara lain usaha wisata edukatif dan usaha wisata akomodasi.

Sampai dengan tahun 2016 BUMD Provinsi DKI Jakarta pada Klaster usaha pariwisata telah melakukan berbagai inovasi dengan menerapkan konsep baru diantaranya rekreasi edukatif dan wisata ramah lingkungan. Melalui BUMD Klaster usaha pariwisata telah terbangun wahana Ocean Ecopark yang merupakan konsep wisata lingkungan yang akan mengajarkan pengunjung banyak hal terkait kepedulian terhadap lingkungan. Selain Ocean Ecopark, BUMD Klaster usaha pariwisata juga terus melakukan penyempurnaan terhadap wahana rekreasi edukatif lainnya seperti Seaworld yang menampilkan wisata pertunjukan satwa air bagi pengunjung. Selain rekreasi edukatif, BUMD Klaster usaha pariwisata juga melakukan pengembangan bisnis dalam hal penyediaan hotel dan penginapan. Sampai dengan akhir 2016, telah dimiliki 7 unit alat produksi yang bergerak dalam bidang perhotelan di wilayah Jakarta dan Puncak dengan total kamar 827 unit. Disamping itu juga, sedang dikembangkan Outlet Food and Beverage

g. Klaster Usaha Infrastruktur

Klaster usaha infrastruktur dalam periode 2013-2017 fokus pada penyediaan prasarana dan sarana kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan infrastruktur kota dapat terpenuhi sehingga warga dapat menikmati sesuai dengan kemampuannya dan faktor lingkungan dapat terpelihara dengan baik. Beberapa proyek strategis antara lain adalah Velodrome pembangunan LRT, pembangunan Equestrian, pembangunan Intermediate Treatment Facilities (ITF).

Sampai dengan tahun 2017 BUMD Klaster usaha infrastruktur terus melakukan percepatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung Asian Games. Progress pembangunan LRT mencapai 43,14 persen, Velodrome mencapai 68,79 persen dan equestrian mencapai 87,86 persen. Selain pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang berjalan BUMD Klaster usaha infrastruktur juga telah berpartisipasi membangun beberapa proyek infrastruktur antara lain pembangunan jalan akses tol Priok (JATP) sepanjang 11,4 Kilometer, Water Treatment Plant Waduk Pluit, Jalan tol JORR W2N Kebon Jeruk – Ulujamu sepanjang 7,87 Kilometer dan pembangunan 11 SPBG dan SPBU.

10.1.1 Aspek Legal

Dasar hukum yang melandasi langkah kerja BUMD antara lain adalah Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Peraturan perundangan tersebut memberikan landasan bagi

pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan BUMD. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 24 ayat 4 tentang Keuangan Negara substansinya menyebutkan bahwa Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah.

Selanjutnya pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa tujuan pendirian BUMD adalah:

- a. BUMD dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa BUMD dibagi menjadi dua yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda). Perumda adalah perusahaan yang modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, kebijakan investasi daerah dapat dilakukan Pemerintah Provinsi melalui penyertaan modal daerah (PMD) baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal dan atau saham pada Badan Usaha Milik Daerah.

Dasar hukum pendirian BUMD dilingkungan Provinsi DKI Jakarta:

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan daerah Dharma Jaya DKI Jakarta
3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang perusahaan daerah pembangunan sarana jaya

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang perusahaan daerah pengelolaan air limbah DKI Jakarta
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pembentukan
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tantang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Dan Yayasan Wisma Jaya Raya Menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta

10.1.2 Aspek Kepemilikan

Berdasarkan peraturan-perundangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 13 BUMD. Secara definisi, BUMD adalah Perusahaan yang kepemilikan sahamnya mencapai mayoritas (lebih dari 51 persen). Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki 10 Perusahaan dengan kepemilikan saham minoritas. Hal ini sering disebut dengan PT Patungan. Secara lebih rinci proporsi kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas saham BUMD menurut klaster usaha sebagai berikut:

1. Klaster usaha Transportasi
 - a. PT. MRT Jakarta (99,97 persen)
 - b. PT. Transportasi Jakarta (99.35 persen)
 - c. PT. Ratax Armada (28 persen)
2. Klaster usaha Properti
 - a. PD. Pembangunan Sarana Jaya (100 persen)
 - b. PT. Jakarta Internasional Expo (13.13 persen)
3. Klaster usaha Keuangan
 - a. PT.Bank DKI (99.9 persen)
 - b. PT.Jamkrida Jakarta (98.3 persen)
 - c. PT.Asuransi Bangun Askrida (4.47 persen)
4. Klaster usaha Pariwisata
 - a. PT. Jakarta Tourisindo (99.34 persen)
 - b. PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (72 persen)
 - c. PT. Pakuan Internasional (2.65 persen)
 - d. PT. Grahasahari Surya Jaya (8.08 persen)
5. Klaster usaha Infrastruktur
 - a. PT. Jakarta Propertindo (99.99 persen)
 - b. PT. Pembangunan Jaya (38.8 persen)
6. Klaster usaha Kawasan Industri
 - a. PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50 persen)
 - b. PT. Kawasan Berikat Nusantara (26.86 persen)

7. Klaster usaha Utilitas
 - a. PD. AM Jaya (100 persen)
 - b. PD. PAL Jaya (100 persen)
8. Klaster usaha Pangan
 - a. PT. Food Station Tjipinang Jaya (99.8 persen)
 - b. PD. Dharma Jaya (100 persen)
9. Klaster usaha Perpasaran dan Industri lainnya
 - a. PD. Pasar Jaya (100 persen)
 - b. PT. Cemani Toka (27.42 persen)
 - c. PT. Delta Jakarta, Tbk. (26.5 persen)

Secara lebih jelas BUMD berdasarkan kepemilikan digambarkan dalam gambar 10.1

Gambar 10.1

Distribusi kepemilikan
saham Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta



10.1.3 Aspek Manfaat dan Produk

Berdasarkan kapasitas dan kinerjanya, BUMD telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan daerah Jakarta. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya sarana dan prasarana umum yang telah dibangun dan disediakan oleh BUMD sebagai entitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Secara umum, kontribusi tersebut dikelompokkan pada kontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah, kontribusi dalam penyediaan barang dan jasa, dan kontribusi memperoleh keuntungan. Berikut ini adalah kontribusi BUMD yang dikelompokkan ke dalam tiga hal tersebut, yaitu:

A. Kontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah.

1. BUMD secara proaktif turut serta dalam menjaga stabilitas stok pangan dalam rangka pengendalian harga dan ketersediaan pangan di wilayah DKI Jakarta;
2. BUMD berpartisipasi aktif secara proporsional dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan memfasilitasi mobilitas warga Jakarta serta mendorong perekonomian daerah;
3. BUMD berkontribusi dalam pengelolaan sarana transportasi umum untuk mengatasi kemacetan Jakarta dan pencegahan polusi udara untuk menjaga kelestarian lingkungan;
4. BUMD berkontribusi secara aktif dalam membangun sarana dan prasarana distribusi pangan berupa antara lain pasar rakyat yang sehat dan memadai serta sarana pendukung perdagangan lainnya;
5. BUMD telah berkontribusi aktif dalam rangka membuka lapangan pekerjaan dengan merealisasikan proyek infrastruktur dan proyek-proyek lainnya secara profesional dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

B. Kontribusi dalam penyediaan barang dan jasa

1. BUMD klaster usaha Transportasi secara aktif berkontribusi dalam menyediakan alat transportasi massal berbasis Bus guna memudahkan mobilitas warga Jakarta yaitu bus Transjakarta;
2. BUMD klaster usaha Keuangan berkontribusi dan membantu menyediakan fasilitas jasa Keuangan melalui penyaluran dan penjaminan kredit/pembiayaan;
3. BUMD klaster usaha Pangan berkontribusi secara aktif dalam menyediakan pangan yang berkualitas dan terdistribusi secara merata sehingga warga

masyarakat Jakarta dapat mengakses pangan secara mudah dengan harga yang terjangkau;

4. BUMD klaster usaha Utilitas berkontribusi dalam membangun sarana utilitas guna memproduksi layanan jasa pengelolaan air limbah dan memproduksi air bersih yang berkualitas untuk pemanfaatan umum guna mendukung proses pembangunan kota yang berorientasi lingkungan
 5. BUMD klaster usaha Pariwisata aktif dalam rangka penyediaan sarana rekreasi edukatif dan sarana komunikasi warga melalui pembangunan Ruang terbuka publik.
- C. Kontribusi dalam memperoleh keuntungan guna keberlangsungan pembangunan (*sustainability development*).

Sesuai dengan tujuan pendiriannya bahwa salah satu tujuan pendirian BUMD adalah memperoleh keuntungan. Untuk mengimplementasikan hal ini BUMD DKI Jakarta telah menunjukkan kinerja yang relative baik. Artinya bahwa BUMD DKI telah mampu memperoleh keuntungan dalam melakukan aktivitasnya.

Keuntungan yang dimaksud disini adalah keuntungan financial. Keuntungan financial telah mampu berkontribusi dalam PAD. Adanya keuntungan tersebut akan menopang keberlanjutan aktivitas operasi BUMD.

Pembagian urusan pemerintahan dalam kaitannya dengan operasional BUMD dapat didekati dengan urusan pemerintahan seperti yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dalam implementasinya khususnya yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan maka aktivitas BUMD dapat dirinci sebagai berikut.

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berhubungan dengan Pelayanan Dasar:
 - a. Urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang: PD. AM Jaya dan PD. PAL Jaya.
 - b. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Pembangunan Jaya.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berhubungan dengan Pelayanan Dasar:
 - a. Urusan Pangan: PD. Pasar Jaya, PD Dharma Jaya dan PT. Food Station Tjipinang Jaya.

- b. Urusan Perhubungan: PT. MRT Jakarta, PT. Transportasi Jakarta dan PT Ratax Armada.
 - c. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: PT. Bank DKI dan PT. Jamkrida Jakarta.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan
- a. Urusan Pariwisata: PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., PT. Jakarta Tourisindo, PT. Pakuan, PT. Garahasahari Suryajaya dan PT. Jakarta International Expo.
 - b. Urusan Perdagangan: PT. Cemani Toka dan PT. Delta Djakarta, Tbk..

Beberapa BUMD mempunyai fungsi sebagai penyelenggara layanan publik langsung kepada masyarakat sehingga prioritasnya adalah penyediaan layanan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan demikian dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maka BUMD sepatutnya mendapatkan subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan layanan publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi gubernur provinsi DKI Jakarta, BUMD tetap harus berpegang pada asas profesionalitas.

Beberapa pelayanan dasar yang dilakukan oleh BUMD untuk masyarakat Jakarta adalah :

1. Memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat DKI Jakarta secara menyeluruh dan berkualitas dengan harga yang memadai dan mudah dalam mengakses;
2. Memberikan jasa pengelolaan air limbah baik untuk air limbah rumah tangga maupun bangunan non rumah tangga seperti perkantoran, gedung-gedung bertingkat, hotel, rumah sakit, apartemen, industri, dan sebagainya;
3. Memberikan pelayanan transportasi massal berbasis rel yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana modern guna menjamin kenyamanan dan keamanan yaitu pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) dan *Light Rail Transit* (LRT);
4. Memberikan pelayanan transportasi masal berbasis bus atau *Bus Rapid Transit* (BRT) yang terus dilakukan inovasi dan kreativitas agar pelayanan menjadi lebih baik dan terjangkau;
5. Penyediaan sarana perumahan bagi seluruh warga Jakarta dengan harga terjangkau, memenuhi standar layak huni serta lokasi yang terakses dengan mudah;
6. Penyediaan sarana pengembangan property, tempat usaha bagi pedagang pasar khususnya pengusaha dalam skala mikro, kecil dan menengah berupa kios di pasar.

Selain itu juga telah dilakukan penyediaan kawasan industri yang memadai dan mudah diakses serta berwawasan lingkungan. Hal ini dimaksudkan guna mendukung usaha dan mendorong pertumbuhan bisnis serta yang memadai beserta fasilitasnya guna mendukung pertumbuhan industri.

10.1.4 Aspek Daya Saing BUMD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik yaitu badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, bukan merupakan organisasi perangkat daerah dan dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Karakteristik yang dimiliki oleh BUMD ini merupakan daya saing yang dimiliki oleh BUMD, baik sebagai korporasi maupun sebagai mitra SKPD. Karena dari sisi korporasi BUMD didukung penuh oleh Pemerintah Daerah baik dari aspek kepemilikan maupun aspek regulasi.

Selanjutnya daya saing BUMD Jakarta diuraikan secara rinci sebagai berikut.

- a) badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah

BUMD merupakan badan usaha yang pemilik modal dan pemegang sahamnya didominasi oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah akan mendukung penuh seluruh aktivitas BUMD. Oleh karena itu BUMD mempunyai keunggulan komparatif dibanding badan usaha lain. Hal ini menjadikan BUMD dipercaya oleh masyarakat dan dunia usaha.

- b) seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan *audited* BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan strategis tahun 2016 tercatat total aset yang dimiliki adalah sebesar Rp.92.358 Triliun (pencatatan aset dengan metode ekuitas). Total aset terbesar disumbang dari BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan yang bergerak dalam sektor keuangan, infrastruktur dan pariwisata. Dengan kekuatan aset yang besar BUMD dapat lebih dinamis dalam mengambil kesempatan peluang bisnis yang ada.

- c) bukan merupakan organisasi perangkat daerah;

Dari fleksibilitas operasional, BUMD dapat lebih fleksibel dibandingkan SKPD. Hal ini menjadikan BUMD dapat melakukan proyek penugasan secara lebih efisien dan efektif walaupun dalam pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku dan memedomani prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pada akhirnya daya saing BUMD ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah, pendukung pelayanan publik serta memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.

d) dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha

Salah satu tujuan didirikannya BUMD adalah memperoleh laba/keuntungan. Semakin besarnya keuntungan yang diperoleh BUMD dalam menjalankan aksi korporasinya maka semakin besar potensi kontribusi yang bisa diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku *shareholder*.

Berdasarkan laporan penerimaan PAD dari BUMD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 sampai dengan 2016, rata-rata pertumbuhan setoran PAD dari hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar 9,07 persen.

Berdasarkan rekapitulasi laporan keuangan *audited* BUMD Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2011 – 2016. Beberapa kinerja keuangan BUMD yang mendukung peningkatan kontribusi kepada pendapatan dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 10.1

Pendapatan Usaha dan Laba Bersih BUMD 2011-2016
(Dalam Triliun Rupiah)

No	Akun	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pendapatan	12,61	14,68	17,56	19,31	21,63	24,06
2.	Laba bersih	1,93	2,06	2,72	2,87	2,53	3,62

Sumber : Laporan Keuangan
Audited BUMD, 2011-2016

10.1.5 Aspek Peran BUMD

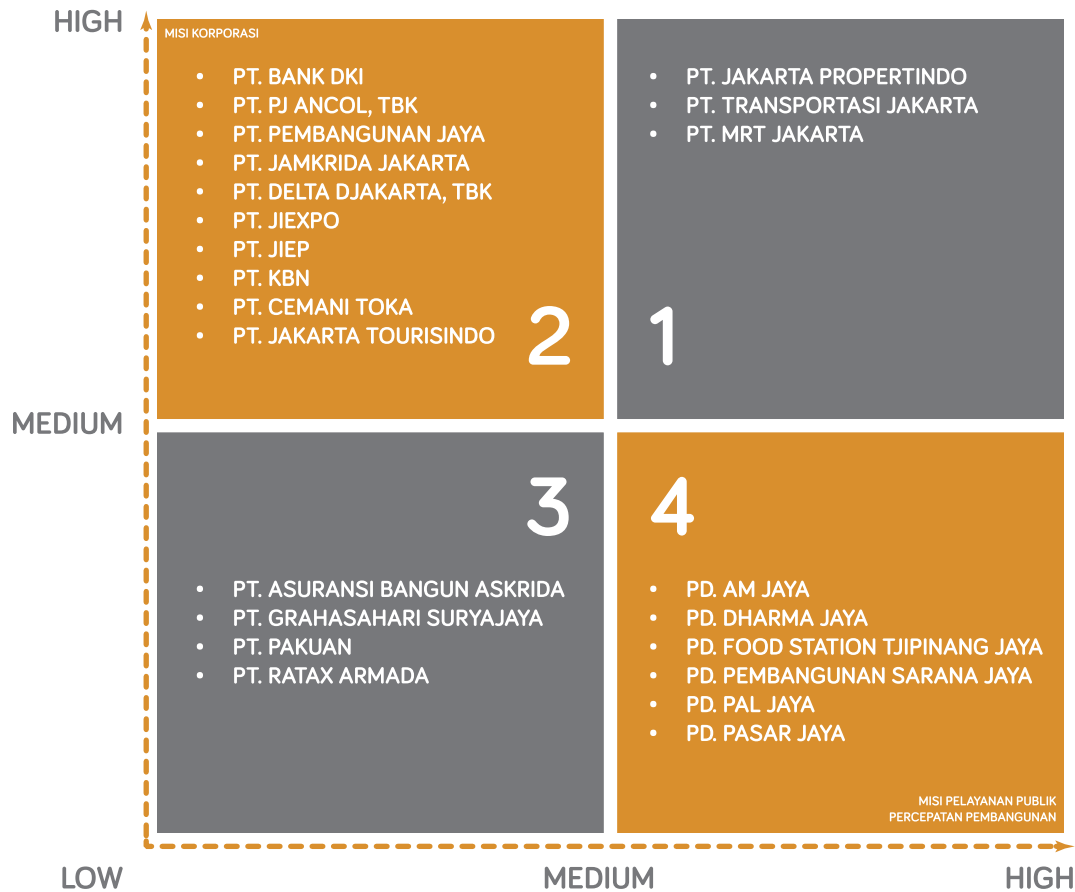
Sesuai dengan tujuan pendiriannya, BUMD memiliki misi ganda. Misi pertama BUMD sebagai Badan Usaha yang berorientasi korporasi sehingga tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Misi kedua BUMD sebagai badan usaha untuk misi pelayanan publik dan percepatan pembangunan.

Dalam hal menjalankan misi pertama, BUMD harus mampu mendapatkan laba atau keuntungan. Dengan demikian BUMD harus dikelola sebagai korporasi yang sehat dan menggunakan naluri bisnis yang beretika. Dalam hal menjalankan misi kedua BUMD harus mampu menjadi katalis pembangunan daerah guna menuju kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.

Dengan dasar peran ganda tersebut, perlu dilakukan pemetaan berdasarkan misi yang diemban dari masing-masing BUMD dan PT Patungan yang berada di Provinsi DKI Jakarta sebagai dasar penentuan arah kebijakan bagi masing-masing BUMD dan PT Patungan tersebut. Secara lebih rinci dapat digambarkan dalam skema kuadran sebagai berikut:

Gambar 10.2

Pembagian BUMD/PT
Patungan dalam kuadran
berdasarkan misi BUMD



Dalam gambar 10.2 tersebut dapat digambarkan bahwa BUMD/PT Patungan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dipisahkan melalui empat kuadran dan dua peran. Kuadran pertama (1) adalah BUMD yang membawa misi pelayanan publik/percepatan pembangunan dan misi korporasi. Kuadran kedua (2) adalah BUMD/PT Patungan yang membawa misi korporasi sebagai peran utama. BUMD/PT Patungan yang masuk dalam kuadran ini harus terus dikelola dan dikembangkan dengan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mendukung aksi korporasi sehingga akan mampu menghasilkan keuntungan yang optimal. Selanjutnya kuadran ketiga (3) adalah PT Patungan yang tidak berkaitan dengan misi pelayanan publik/percepatan pembangunan dan juga sulit bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan secara korporasi. Dan yang terakhir adalah Kuadran keempat (4) adalah BUMD yang secara penuh membawa misi pelayanan publik/percepatan pembangunan daerah. Pada kuadran ini Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat memberikan subsidi maupun penyertaan modal daerah demi terjaganya pelayanan publik kepada masyarakat.

10. 2 Kinerja Keuangan BUMD

a) Aspek kepemilikan Aset

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan tahun 2011-2016 perkembangan nilai aset meningkat dengan signifikan. Dari Rp.38.722 miliar di tahun 2011 meningkat menjadi Rp.92.358 miliar di akhir tahun 2016 atau meningkat sebesar 140 persen. Meningkatnya nilai aset ditopang oleh peningkatan yang signifikan pada BUMD yang bergerak pada Klaster usaha keuangan, Infrastruktur dan Transportasi. Pembangunan moda transportasi masal dan peningkatan layanan keuangan oleh beberapa BUMD memberikan pengaruh atas peningkatan nilai aset secara global.

b) Aspek Ekuitas

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan tahun 2011- 2016 perkembangan nilai ekuitas meningkat dengan signifikan. Dari Rp.8.910 Miliar di tahun 2011 meningkat menjadi Rp.39.518 Miliar di akhir tahun 2016 atau meningkat sebesar 343 persen. (pencatatan dengan menggunakan metode ekuitas). Sejalan dengan perkembangan nilai aset, peningkatan ekuitas juga didorong oleh beberapa BUMD yang bergerak pada Klaster usaha keuangan, infrastruktur dan transportasi.

c) Aspek Pendapatan

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan tahun 2011-2016 perkembangan nilai pendapatan meningkat dari Rp.12.609 miliar di tahun 2011 menjadi Rp.24.063 miliar di akhir tahun 2016 atau meningkat sebesar 90,80 persen. Meningkatnya pendapatan ditopang oleh beberapa BUMD yang bergerak di Klaster usaha Keuangan, Pariwisata, Transportasi, dan Infrastruktur.

d) Aspek Laba bersih

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan tahun 2011- 2016 perkembangan nilai laba bersih meningkat dari Rp.1.932 miliar di tahun 2011 meningkat menjadi Rp.3.622 miliar di akhir tahun 2016 atau meningkat 87,99 persen. Peningkatan total laba bersih ditopang oleh oleh BUMD yang bergerak dalam Klaster usaha keuangan, infrastruktur dan properti.

Secara umum, kinerja keuangan BUMD tahun 2011 – 2016 dapat dilihat dalam Tabel 10.2.

Tabel 10.2

Kinerja Keuangan BUMD DKI Jakarta Periode 2011 – 2016 (Triliun Rupiah)

Sumber : Laporan Keuangan BUMD Audited 2011 - 2016

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Total Aset	38,72	49,01	60,54	74,99	82,75	92,36
2.	Total Equitas	8,91	10,95	15,64	23,72	31,37	39,51
3.	Total Pendapatan Usaha	12,61	14,68	17,56	19,31	21,62	24,06
4.	Total Laba Bersih	1,93	2,06	2,72	2,87	2,53	3,62

e) Aspek Dividen

Atas investasi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke BUMD tentunya terdapat timbal balik atas nilai investasi yang telah disetorkan berupa bagi hasil laba atau dividen.

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan tahun 2011- 2016 pembagian dividen meningkat dari Rp.275,5 miliar di tahun 2011 meningkat menjadi Rp.325,6 miliar di akhir tahun 2016 atau meningkat 18,2 persen. Penerimaan dividen secara lebih lengkap disajikan dalam Tabel 10.3:

Tabel 10.3

Pembagian Dividen Berdasarkan Klaster Usaha BUMD tahun 2011-2016 (Juta Rupiah)

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diaudit 2011-2016

No	Klaster Usaha	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Keuangan	102.339,18	152.581,67	182.742,27	208.292,15	266.960,92	74.127,12
3.	Properti	5.385,91	6.327,79	12.536,83	14.937,76	17.431,39	32.782,96
4.	Infrastruktur	22.962,09	30.800,00	36.100,00	46.400,00	52.600,00	32.151,86
5.	Pariwisata	51.306,92	55.788,96	61.947,86	67.521,83	77.270,01	80.819,26
6.	Kawasan Industri	9.421,89	10.460,83	9.452,45	18.732,63	17.011,18	7.649,13
7.	Pangan	2.648,00	3.624,89	4.258,86	4.500,24	5.577,52	3.007,20
8.	Utilitas	12.838,59	16.697,24	17.572,47	24.998,24	34.299,79	36.476,13
9.	Perpasaran dan Industri	68.609,80	72.509,50	74.812,05	78.527,04	55.802,31	58.682,01
TOTAL		275.512,38	348.790,88	399.422,79	463.909,89	526.953,11	325.695,66

10.2.1 Kebijakan Kinerja Korporasi

a) Kebijakan Pendapatan

Pendapatan merupakan hal penting bagi kelanjutan perusahaan. Apabila pendapatan tidak tercapai pada tingkat tertentu maka dapat berdampak pada aspek likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Jika hal tersebut berlangsung secara terus menerus akan mengakibatkan target kinerja perusahaan tidak tercapai sehingga akan menurunkan kredibilitas korporasi.

Sejalan dengan hal tersebut maka BUMD harus melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan perusahaan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal secara komprehensif dan holistik. Faktor Internal terdiri dari ketersediaan modal perusahaan, SDM yang berkualitas, ketersediaan bahan baku serta pemanfaatan teknologi. Sedangkan faktor eksternal, menurut teori *Five Forces Porter's*, terdiri dari tingkat persaingan bisnis, tingkat pengaruh *supplier*, tingkat pengaruh pelanggan, ketersediaan barang substitusi dan kemudahan kompetitor baru untuk masuk ke dalam pasar.

Diharapkan dengan melakukan analisis tersebut diatas, BUMD dapat terus meningkatkan pendapatan demi keberlangsungan perusahaan. Mengingat pendapatan sangat sentral dalam pengelolaan korporasi maka diperlukan strategi tersendiri dalam pengelolaan pendapatan. Kebijakan pendapatan pada BUMD DKI Jakarta untuk periode 2017-2022 adalah: 1) diversifikasi vertikal dan diversifikasi horizontal dengan tetap memperhatikan *core competence* perusahaan. 2) meningkatkan *recurring income* perusahaan dengan tetap memperhatikan pelayanan publik, 3) peningkatan pangsa pasar melalui Inovasi dan kreativitas dengan tetap berorientasi pada pelayanan public dan pembangunan DKI Jakarta dan 4). Memperluas bisnis dengan orientasi pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak.

b) Kebijakan Beban

Beban memiliki peranan penting bagi perusahaan, karena beban dibutuhkan untuk menjalankan operasional perusahaan sehari-hari dalam usaha memperoleh pendapatan. Tetapi jika beban tidak dikendalikan maka akan berdampak negatif kepada kinerja perusahaan secara keseluruhan, oleh karena itu BUMD harus melakukan efisiensi yang tepat yaitu efisiensi yang dapat memberikan nilai bagi pelanggan (*customer value*) dengan maksimal tetapi dengan sumber daya (*resource*) yang sedikit.

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengefisienkan beban adalah: 1) meningkatkan efisiensi biaya produksi dengan cara meningkatkan keterampilan tenaga kerja termasuk peningkatan produk yang berorientasi craftsmanship sehingga dapat membantu orang yang termarginalkan, 2) meningkatkan efisiensi biaya dengan memfokuskan pada

penggunaan material bahan pokok yang berasal dari domestik untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, 3) efisiensi dalam skema pembiayaan sehingga diperoleh modal yang berkualitas dan memberikan dampak yang optimum, 4) pemanfaatan teknologi baik teknologi informasi dan teknologi lainnya yang ramah lingkungan serta tepat sasaran.

c) Kebijakan Dividen

BUMD diharapkan terus melakukan inovasi dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan agar perusahaan dapat berkompetisi dengan dunia usaha lain tetapi tetap memperoleh keuntungan. Memperoleh laba merupakan salah satu tujuan BUMD agar BUMD tetap dapat melakukan operasional perusahaan dan tetap dapat aktivitas korporasi secara keberlanjutan. Dengan usaha yang profesional, BUMD diharapkan dapat memperoleh laba yang terus meningkat. Dengan demikian diharapkan BUMD dapat memberikan dividen kepada pemegang saham. Namun dalam operasionalnya terutama untuk BUMD yang misi utamanya lebih didominasi oleh bisnis murni daripada pelayanan maka dalam memperoleh laba harus tetap memperhatikan aspek pemerataan, aspek kemitraan, aspek profesionalitas, dan aspek keekonomian.

10.2.2 Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Modal merupakan unsur utama untuk menjalankan perusahaan. Sumber Modal pada BUMD berasal dari berbagai asal, dapat berasal dari penyertaan modal maupun dari sumber lain. Dalam hal penyertaan modal yang berasal dari Pemerintah Daerah secara rinci diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pada Peraturan Pemerintah ini penyertaan modal dilakukan untuk: 1) pendirian BUMD dalam rangka memenuhi modal dasar dan modal disetor, 2) penambahan modal dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan pemerintah, serta 3) pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya Penyertaan Modal Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan modal daerah Provinsi DKI Jakarta per klaster usaha selama periode 2011-2017 dapat dirinci sebagaimana pada Tabel 10.4:

Tabel 10.4

BUMD DKI Jakarta yang menerima Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada periode 2011 – 2017 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber :

1. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2011 – 2016

2. Perda APBD Perubahan 2017

No	BUMD	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Transportasi	37	68	1.259	1.204	2.715	2.093	4.586
2.	Properti	-	-	130	743	-	-	125
3.	Keuangan	-	500	800	1.055	1.040	700	100
4.	Infrastruktur	100	50	750	910	1.500	1.000	4.662
5.	Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kawasan Industri	-	-	-	-	-	-	-
7.	Pangan	-	-	-	63	46	373	-
8.	Utilitas	-	-	50	268	70	140	300
9.	Perpasaran dan Industri	-	-	-	170	-	170	200
Total		137	618	2.989	4.413	5.371	4.476	9.973

Berdasarkan Tabel 10.4. bahwa total penyertaan modal pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 137 miliar dan pada tahun anggaran 2017 meningkat menjadi Rp. 9.973 miliar. Berdasarkan proyeksi kondisi perekonomian DKI Jakarta lima tahun mendatang dan kondisi objektif lapangan serta kondisi bisnis lokal, regional dan internasional maka arah kebijakan penyertaan modal daerah pada BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada periode 2018-2022 dilakukan secara selektif, efektif, efisien dan dengan fokus yang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara rinci arah kebijakan PMD dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Alokasi PMD diarahkan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta dengan fokus pada BUMD yang dapat melakukan pembukaan lapangan kerja baru.
2. Alokasi PMD diarahkan pada BUMD yang mampu berkontribusi dalam pengendalian harga-harga kebutuhan pokok melalui pengelolaan ketersediaan bahan baku dan penyederhanaan rantai distribusi.
3. Alokasi PMD diarahkan pada BUMD yang mampu memperbaiki kualitas layanan air bersih dengan prioritas pada wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk.
4. Alokasi PMD diarahkan pada BUMD yang berkontribusi secara signifikan dalam membangun sistem transportasi umum dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen layanan transportasi umum, perluasan daya jangkau transportasi hingga menjangkau seluruh warga, pengintegrasian sistem transportasi umum dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta transportasi umum kota guna mendukung mobilitas masyarakat Jakarta.

- Alokasi PMD diarahkan pada pendirian BUMD yang mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dan mampu menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.
- Alokasi PMD diarahkan pada BUMD yang melaksanakan penugasan proyek strategis Pemerintah Provinsi DKI dalam rangka mendukung pembangunan DKI Jakarta guna kesejahteraan masyarakat.

10.2.3Proyeksi Keuangan BUMD

Proyeksi penerimaan dividen dari BUMD pada periode 2017 - 2022 dapat dilihat pada Tabel 10.5:

Tabel 10.5

Proyeksi Dividen seluruh BUMD 2017 - 2022 dari seluruh sektor pembangunan daerah (dalam Miliar Rupiah)

Sumber : Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, 2016

No	Sektor	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Keuangan	198,72	240,24	286,22	349,32	419,62	495,06
2	Properti	42,56	55,65	69,56	86,89	105,93	125,43
3	Transportasi	0,00	22,00	24,00	27,00	30,00	36,92
4	Infrastruktur	77,97	92,12	110,04	131,22	147,86	159,68
5	Pariwisata	35,71	46,43	58,03	71,72	85,91	99,50
6	Kawasan Industri	18,44	22,61	27,65	34,07	40,89	44,96
7	Pangan	4,17	5,49	7,20	9,40	11,52	13,60
8	Utilitas	14,33	16,19	18,62	21,13	23,88	52,34
9	Perpasaran dan Industri	74,98	86,38	100,09	116,44	134,48	151,11
TOTAL		465,89	587,10	701,40	847,20	1.000,08	1.178,60

Proyeksi dividen didasarkan pada proyeksi kinerja keuangan pada periode 2017– 2022, yang mengukur lima indikator utama yaitu: jumlah aktiva, penjualan & pendapatan usaha, laba bersih, CAPEX dan OPEX.

Tabel 10.6

Proyeksi kinerja keuangan seluruh BUMD 2017 - 2022 (dalam Triliun Rupiah)

Sumber : Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, 2016

No	Uraian	Tahun Anggaran					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Aktiva	115,70	136,75	160,21	188,52	221,34	260,17
2.	Penjualan dan Pendapatan Usaha	29,26	34,14	40,07	46,88	54,94	64,34
3.	Laba bersih	3,7	3,9	4,2	4,5	4,9	5,3
4.	CAPEX	5,91	6,91	8,10	9,48	11,11	13,01
5.	OPEX	18,10	21,12	24,79	29,00	33,99	39,80

10.2.4Proyeksi Penanaman Modal Daerah (PMD)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada subbab kebijakan penyertaan modal daerah, untuk periode lima tahun mendatang pemberian PMD akan dilakukan secara lebih selektif dan terbatas. PMD hanya akan diberikan pada BUMD yang mengemban misi pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah. Adapun proyeksi PMD dari tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 10.7
Proyeksi Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah (PMD)
2017 – 2022 (Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penyertaan Modal Daerah	5.914	7.498	4.907	6.566	6.261

10.3 Analisa Isu Strategis BUMD

10.3.1 Permasalahan

Kinerja keuangan BUMD tahun 2011 sampai dengan 2016 menunjukkan tren yang terus membaik. Hal ini ditunjukan dengan semakin meningkat beberapa aspek diantaranya aset, pendapatan dan laba bersih. Dengan dasar ini maka perlu dilakukan pengelolaan yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Namun demikian, kondisi objektif di lapangan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi masing-masing BUMD. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi BUMD Provinsi DKI Jakarta meliputi aspek teknis dan aspek non-teknis. Secara umum permasalahan dan tantangan tersebut meliputi antara lain belum lengkapnya aspek regulasi, lemahnya kemampuan permodalan, terbatasnya kualitas SDM, meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan umum dan lain sebagainya. Secara lebih lengkap permasalahan BUMD dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber permodalan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dan semakin kompleks baik dari sisi pelayanan dasar maupun pelayanan umum lainnya;
2. Belum tersusunnya regulasi yang lengkap dan memadai berkaitan dengan pemberian pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan BUMD dalam melakukan aksinya guna pemenuhan tuntutan masyarakat;
3. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia terutama kualitas dalam rangka pengurusan BUMD sehingga pelayanan yang diberikan BUMD kepada masyarakat mengalami keterbatasan;
4. Daya saing BUMD masih relatif rendah jika dibandingkan dengan dunia bisnis swasta murni. Hal ini sebagai akibat dari kurang fleksibilitasnya aksi korporasi dalam menghadapi persaingan jika dibandingkan dengan bisnis swasta;

5. Aset perusahaan masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai akibat dari regulasi maupun dari kemampuan SDM BUMD itu sendiri. Hal ini mengakibatkan meningkatnya biaya pemeliharaan, sehingga mengurangi tingkat keuntungan.

10.3.2 Isu Strategis Utama

a) Penguatan struktur BUMD

Provinsi DKI Jakarta memiliki 13 BUMD dan 10 perusahaan Patungan yang tersebar pada Sembilan Klaster usaha yaitu transportasi, properti, keuangan, infrastruktur, pariwisata, kawasan industri, pangan, utilitas dan lainnya, serta perpasaran industri. Berkaitan dengan hal tersebut yang menjadi perhatian adalah bagaimana melakukan pengelompokkan BUMD Jakarta agar menjadi BUMD yang professional, kuat, tangguh dan efisien.

b) Ketergantungan Permodalan BUMD terhadap PMD

BUMD DKI Jakarta dalam menjalankan aksinya memerlukan permodalan yang memadai. Terdapat kecenderungan pada BUMD bahwa dalam memperoleh modal masih menggantungkan pada PMD.

c) Inovasi bisnis dan daya adaptasi

Untuk menjawab tuntutan masyarakat diperlukan inovasi dan daya adaptasi yang memadai. Hal ini dimaksudkan agar BUMD mampu merespon perubahan lingkungan bisnis dan tuntutan masyarakat atas pelayanan seperti *cashless society*, distribusi menggunakan *Cash Management System*. Dalam hal ini yang perlu mendapat perhatian antara lain adaptasi terhadap perkembangan teknologi terkini, regulasi-regulasi baru, kecenderungan peralihan (*shifting*) pada pola produksi dan konsumsi, dan lainnya. Selain itu perlu diperhatikan juga keterbatasan SDM dalam menjawab tuntutan perubahan lingkungan bisnis. Dalam hal ini kebutuhan sumber daya manusia terutama kualitas dalam rangka pengurusan BUMD menjadi suatu kebutuhan.

d) Pelaksanaan proyek penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Akibat perkembangan teknologi menyebabkan perubahan struktur ekonomi masyarakat. Hal ini mengakibatkan tuntutan masyarakat atas pelayanan umum menjadi lebih kompleks dan menuntut layanan yang lebih *sophisticated*. BUMD dalam hal ini dituntut untuk dapat menjawab tantangan tersebut melalui skema penugasan dari Pemerintah Daerah seperti layanan bus yang nyaman, pembangunan sarana transportasi yang memadai, pembentukan *cashless society*.

e) Realisasi Capex yang rendah

Masih rendahnya kemampuan BUMD dalam mengimplementasikan proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini akan mempengaruhi realisasi Capex BUMD yang bersangkutan. Sebagai akibatnya adalah realisasi capex-nya rendah menjadikan penyerapan tenaga kerja juga rendah.

f) Optimalisasi aset BUMD

Pemanfaatan aset oleh BUMD masih belum optimal jika dibandingkan dengan perusahaan swasta. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi regulasi maupun dari nilai strategis aset. Sebagai akibatnya aset bukan menjadi sumber pendapatan malah sebaliknya menjadi beban.

g) Kelengkapan regulasi pengurusan BUMD

Dalam rangka implementasi prinsip-prinsip GCG diperlukan pedoman yang memadai termasuk regulasi. Kondisi sampai saat ini regulasi yang mengatur tentang BUMD masih terbatas. Hal ini mengakibatkan masih terdapatnya keraguan pemangku kepentingan BUMD dalam menjalankan aksi korporasinya.

h) Isu klaster usaha Transportasi

Dalam hal pengembangan klaster usaha transportasi terdapat beberapa isu yang harus direspons secara tepat dan positif. Beberapa isu tersebut antara lain : 1) Masih tingginya kebutuhan alokasi anggaran dan belum jelasnya perhitungan dalam penyediaan dana layanan dan tatacara pembayaran *Public service obligation* (PSO) dalam penyediaan layanan transportasi publik, 2) Belum terintegrasinya moda dan antar moda transportasi, Kemacetan mengurangi daya saing kota, 3) Kendala pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur transportasi, 4) Keterbatasan kapasitas transportasi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk.

i) Isu klaster usaha Pangan

Dalam hal pengembangan klaster usaha pangan terdapat beberapa isu yang harus direspons secara profesional. Beberapa isu tersebut antara lain: 1) Masih adanya potensi kemungkinan terjadinya inflasi tinggi sehingga daya beli masyarakat tergerus, 2) Masih tingginya ketergantungan DKI Jakarta pada daerah produsen komoditas pangan, 3) Belum mantapnya sistem distribusi yang terpadu dan terintegrasi, 4) Masih terdapatnya fluktuatif harga pangan yang disparitasnya cukup tinggi, 5) Masih belum stabilnya konsep *resilience* pangan bagi masyarakat Jakarta. 6) Bentuk badan usaha masih Perusahaan Daerah, sehingga kapasitas dan fleksibilitasnya sangat terbatas.

j) Isu klaster usaha Properti

Dalam hal pengembangan klaster usaha properti ditemukan beberapa isu yang harus direspons secara sistematis. Beberapa isu tersebut antara lain: 1) masih terdapatnya *backlog* perumahan dan belum adanya insentif bagi pengembang perumahan untuk MBR, 2) Terbatasnya lahan untuk pembangunan perumahan bagi MBR, 3) Terbatasnya pembangunan pemukiman dan aktifitas ekonomi lainnya yang terintegrasi dengan jaringan transportasi kota.

k) Isu klaster usaha Keuangan

Berkaitan dengan pengembangan klaster usaha keuangan isu yang menonjol adalah antara lain sebagai berikut: 1) Rendahnya aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap kredit kepemilikan rumah murah dan layak huni, 2) Rendahnya aksesibilitas UMKM ke lembaga keuangan, 3) belum terbentuknya masyarakat keuangan yang optimal dalam skema *cashless society*.

l) Isu klaster usaha Infrastruktur

Selanjutnya berkaitan dengan klaster usaha infrastruktur terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian, yaitu antara lain: 1) belum terwujudnya pembangunan sarana prasarana kota yang memadai dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Jakarta, 2) belum tercapainya percepatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang mendukung agenda baik yang bersifat lokal, regional maupun internasional, 3), masih perlunya perhatian terhadap pembangunan sarana prasarana transportasi kota yang mendukung aktivitas warga Jakarta.

m) Isu klaster usaha Pariwisata

Sejalan dengan pengembangan klaster usaha pariwisata, terdapat beberapa isu yang harus mendapatkan perhatian yaitu antara lain: 1) Belum optimalnya promosi kepariwisataan, 2) Belum terintegrasinya pengembangan obyek dan kawasan wisata, 3) Belum optimalnya pariwisata yang bernuansa edukatif yang terjangkau dan memadai, dan 4) Belum terwujudnya perluasan pembangunan wahana wisata baru untuk memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat Jakarta.

n) Isu klaster usaha utilitas

Dalam hal pengembangan klaster usaha utilitas terdapat beberapa isu yang harus direspon secara arif dan bijaksana. Beberapa isu tersebut antara lain: 1) Semakin terbatasnya bahan baku untuk menghasilkan air bersih, 2) Belum meratanya distribusi air bersih yang adil dan merata kepada masyarakat Jakarta terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah, 3) Rendahnya kesadaran masyarakat atas sanitasi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah sehingga mengganggu kesehatan

lingkungan, dan 4) Belum terbangunnya sistem pengelolaan/tata kelola air limbah yang terintegrasi. 5) Bentuk badan usaha masih Perusahaan Daerah, sehingga kapasitas dan fleksibilitasnya sangat terbatas.

o) Isu klaster usaha perpasaran

Dalam hal pengembangan klaster usaha perpasaran terdapat beberapa isu yang harus direspons secara tepat dan terukur. Beberapa isu tersebut antara lain: 1) Terbatasnya akses pedagang Mikro Kecil terhadap tempat usaha, 2) Terbatasnya lokasi pelatihan terhadap pedagang kecil, 3) Lemahnya kemampuan bersaing pedagang kecil dan menengah dalam bersaing untuk memperoleh tempat usaha. 4) Bentuk badan usaha masih Perusahaan Daerah, sehingga kapasitas dan fleksibilitasnya sangat terbatas.

10.4 Strategi dan Rencana Pengembangan BUMD

Memperhatikan berbagai aspek ekonomi, bisnis, sosial dan teknis, berikut adalah strategi pengembangan BUMD yang dikelompokkan menjadi Strategi Umum dan Strategi Khusus, serta rencana pengembangan BUMD yang dijelaskan sebagai berikut:

10.4.1 Strategi Umum

1. Melakukan Restrukturisasi BUMD untuk menguatkan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis.

Perwujudan pengembangan BUMD yang mendukung visi misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dimulai dari proses konsolidasi yang efektif untuk memperkuat struktur permodalan, SDM, dan bisnis. Restrukturisasi tersebut diarahkan menuju klasterisasi bisnis BUMD, sejalan dengan visi pengembangan BUMD. Dengan dasar klasterisasi tersebut, maka secara kelembagaan diikuti oleh proses restrukturisasi BUMD.

Dengan demikian restrukturisasi BUMD perlu dilakukan melalui proses internal dan eksternal. Dilingkup internal proses restrukturisasi dilakukan melalui pembinaan aksi korporasi dengan melihat potensi BUMD itu sendiri yang meliputi kondisi keuangan, SDM dan manajemen. Di tingkat eksternal proses restrukturisasi perlu didukung dengan arah kebijakan serta regulasi yang jelas, sehingga dapat meminimalkan terjadinya benturan maupun komplikasi dalam pelaksanaan restrukturisasi tersebut.

Sejalan dengan rencana strategi ini, dalam 5 tahun kedepan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melakukan divestasi terhadap kepemilikan saham di badan usaha yang tidak relevan dengan arah pembangunan DKI Jakarta. Adapun BUMD yang bisnisnya masuk dalam kelompok yang rencananya akan didivestasi antara lain BUMD

yang bisnisnya tidak menyangkut pelayanan dasar, yang tidak memberikan kemanfaatan umum bagi masyarakat DKI Jakarta dan yang akan membebani keuangan daerah.

Khusus untuk BUMD yang alat produksinya tidak memenuhi unsur kemanfaatan umum diarahkan untuk dilakukan restrukturisasi bisnis. Restrukturisasi bisnis BUMD ini difokuskan pada pelayanan masyarakat yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi dengan tetap memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi dan kearifan lokal.

Dengan memperhatikan kondisi diatas maka pengembangan BUMD ke depan juga akan difokuskan pada aksi korporasi yang memenuhi standar GCG. Hal ini diimplementasikan dengan rencana penyusunan regulasi baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur yang dapat menjadi pedoman bagi aksi korporasi BUMD. Dengan demikian diharapkan semua aksi korporasi BUMD Jakarta menjadi lebih profesional, efisien dan efektif

2. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan BUMD

BUMD perlu memperkuat *customer-minded* dan *stakeholders-minded*. Dengan perluasan tersebut, sesungguhnya kesempatan bagi BUMD untuk berkiprah dan memperkuat bisnisnya menjadi lebih luas, apalagi saat ini kita berada di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi. Namun, disisi lain, BUMD juga menghadapi keterbatasan sumber daya dalam rangka memanfaatkan kesempatan tersebut. Dalam konteks ini sangat penting bagi BUMD untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan antar BUMD maupun antara BUMD dengan institusi-institusi lainnya. Dalam kemitraan, dapat dikembangkan berbagai bentuk kerjasama yang saling mengisi dan memperkuat semua pihak. Namun kemitraan dapat berjalan apabila dilandasi dengan kepercayaan diantara institusi. Untuk itu, perlu dikembangkan proses komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan dan merawat kepercayaan antar institusi tersebut. Hal ini dapat didukung melalui proses pembinaan dan pengembangan BUMD di lingkungan provinsi DKI Jakarta.

3. Melakukan Ekspansi dan Diversifikasi Usaha

Ekspansi merupakan suatu strategi memperbesar atau memperluas bisnis yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, dan rekrutmen sumber daya manusia. Dalam pengembangan BUMD lima tahun mendatang, ekspansi merupakan salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan bisnis. Selain untuk pencapaian tujuan bisnis, ekspansi juga dapat membantu mencapai sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Diversifikasi merupakan usaha penganejaragaman produk atau lokasi usaha yang dilakukan suatu perusahaan untuk memanfaatkan ruang-ruang baru dalam pasar, dan juga untuk mempertahankan keberlanjutan eksistensi produk di pasar. Diversifikasi sangat penting sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat *positioning* perusahaan

atau produk perusahaan di pasar. Ekspansi dan diversifikasi yang dilakukan perlu berlandaskan pada kompetensi yang kuat dalam *core business* nya. Oleh karena itu perlu dipastikan bahwa ekspansi dan diversifikasi yang dilakukan sejalan dengan peningkatan kompetensi dalam *core business* nya.

4. Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan perusahaan di tengah persaingan global. Penerapan GCG dalam suatu perusahaan sangat penting dan strategis untuk tujuan:

- a. Meningkatkan nilai perusahaan
- b. Mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien
- c. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organisasi perusahaan demi menjaga kepentingan shareholder dan stakeholder perusahaan
- d. Serta meningkatkan kontribusi kepada perekonomian daerah

Langkah yang akan dilakukan adalah: secara internal Pertama melakukan penguatan sumberdaya BUMD secara sistematis dan terstruktur; Kedua, melakukan evaluasi mendalam akan kekuatan, potensi, dan tantangan kelembagaan yang harus dihadapi BUMD sehingga bisa terukur modal organisasi yang dimiliki saat ini, terutama untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan; Ketiga, menyehatkan organisasi BUMD dari sisi keuangan, modal, sistem bisnis, dan sebagainya. Selanjutnya, secara eksternal, Pertama, penerapan prinsip-prinsip GCG dilakukan dengan beberapa cara seperti penerapan standar-standar yang berlaku dalam system dan kelembagaan bisnis nasional dan internasional; Kedua, melakukan *benchmarking* kelembagaan BUMD di dalam maupun luar negeri; Ketiga, kolaborasi dan berkolaborasi dengan lembaga atau institusi bisnis lain, baik sesama BUMD maupun non BUMD dengan berbagai modus dan desain.

5. Memperluas sumber-sumber permodalan/pembiayaan BUMD

Selama ini, sumber utama permodalan BUMD berasal dari APBD. Lima tahun ke depan, BUMD harus dapat mengurangi ketergantungan kepada APBD. Dengan demikian, diperlukan upaya memperluas sumber permodalan/ pembiayaan lain yang berasal dari luar APBD. Perluasan sumber permodalan atau pembiayaan dilakukan melalui pemupukan cadangan modal, maupun dengan mencari investor strategis. Untuk itu maka BUMD harus memiliki nilai atau daya jual tinggi di mata investor. Nilai atau daya jual tersebut dapat dicapai apabila BUMD memiliki struktur permodalan yang baik dan prospek usaha yang prospektif.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk merealisasikan hal di atas antara lain adalah:

- a. Melakukan konsolidasi BUMD, sehingga bisa memanfaatkan permodalan secara efektif, fokus, dan terarah;
- b. Evaluasi pengelolaan seluruh aset BUMD, sehingga bisa dilihat kekuatan permodalan yang ada;
- c. Meningkatkan kuantitas produk BUMD yang diminati pasar;
- d. Memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan efisiensi dan pemasaran produk;
- e. Meningkatkan kualitas kelembagaan BUMD sehingga bisa diminati investor.

Membentuk BUMD yang berperan dalam mendukung pembiayaan investasi dan pembangunan di DKI Jakarta.

6. Meningkatkan pemberdayaan BUMD.

Pemberdayaan BUMD dimaksud sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD melalui pembinaan pembiayaan, SDM, dan kelembagaan BUMD. Kualitas pengelolaan BUMD akan meningkat jika didukung oleh minimal dua sumber daya organisasi utama: SDM dan sistem. Adapun strateginya pemberdayaan BUMD adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan literasi manajemen resiko SDM BUMD secara berlapis, sistematis dan terukur;
- b. memperkuat sistem dan manajemen mutu internal BUMD;
- c. melakukan *benchmarking* BUMD;
- d. membangun sistem kompetisi yang sehat antar BUMD dengan *key performance indicator* (KPI) yang rasional, terukur, dan reliable;
- e. membina usaha-usaha baru yang difokuskan kepada pengembangan potensi bisnis di DKI;
- f. menyusun regulasi yang pro BUMD guna mendukung aksi korporasi BUMD dalam operasionalnya.

Pembuatan rencana pelaksanaan investasi BUMD, perbaikan menyeluruh aset BUMD secara dinamis berbasis teknologi informasi, dan pemantapan pola investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

7. Mengalokasikan PMD secara selektif dan/atau terbatas untuk hanya proyek penugasan tertentu.

Sebagai bagian dari upaya kontribusi nyata BUMD terhadap pembangunan Kota Jakarta, pemberian penugasan khusus kepada BUMD merupakan suatu keniscayaan. Namun di sisi lain, sebagai suatu perusahaan, BUMD tetap harus memastikan target labanya dapat tercapai meski tengah mendapatkan penugasan khusus. Oleh karena itu, pengalokasian PMD secara selektif dan/atau terbatas dapat dilakukan dalam upaya mewujudkan peran nyata BUMD bagi pembangunan-pembangunan strategis di Kota Jakarta.

8. Mendorong BUMD untuk *Go Public*.

Salah satu jalan dalam mendapatkan sumber pendanaan baru dalam rangka mewujudkan kemandirian BUMD dari sisi pemodalan adalah dengan menghimpun pembiayaan dari investor luar (non APBD). Dalam hal ini, menerapkan kebijakan *go public* bagi BUMD merupakan satu pilihan yang dapat ditempuh. Selain masalah sumber investasi, proses *go public* merupakan salah satu langkah strategis untuk mendorong kinerja BUMD menjadi lebih baik lagi, karena di dalamnya sudah melibatkan partisipasi masyarakat (publik) secara langsung. Untuk memastikan kesiapan dan kelayakan BUMD dalam proses *go public* tersebut, upaya-upaya penyehatan perusahaan harus terus diarahkan secara intensif, terencana, sistematis, dan terukur. Oleh karena itu, dalam 5 tahun ke depan, sebagian BUMD DKI harus sudah *go public*.

9. Memperjelas mekanisme hubungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BUMD dalam rangka penugasan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, khususnya terkait Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

10. Melakukan Transformasi bisnis BUMD

Transformasi bisnis merupakan seluruh proses perubahan yang diperlukan oleh suatu korporasi untuk memposisikan diri agar lebih baik dalam menyikapi dan menjawab tantangan-tantangan bisnis baru, lingkungan usaha yang berubah secara cepat, maupun keinginan-keinginan baru yang muncul dari dalam perusahaan. Transformasi bisnis BUMD perlu dilakukan dengan mengubah cara pandang dari yang berfokus pada *consumer minded*, ke *stakeholders minded* yang lebih luas.

Selain strategi umum yang telah dijabarkan, berikut diuraikan strategi secara sektoral.

10.4.2 Strategi Sektor

1. Klaster Transportasi

- a) Meningkatkan keterjangkauan layanan transportasi umum dengan tetap memperhatikan kemampuan sumber daya yang ada. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi rute/trayek menjaga optimalisasi subsidi dan *Public Service Obligation* (PSO).
- b) Memastikan beroperasinya sarana transportasi berbasis rel terutama MRT dan LRT secara tepat waktu dan memenuhi standar teknis administrasi yang berkualitas internasional dengan tetap memperhatikan kemampuan sumber daya yang ada.
- c) Menyelesaikan studi yang mendasari pembangunan MRT tahap 2 dengan memasukkan peluang bisnis dari konsesi / *right of way* (listrik, gas, telekomunikasi, air, dan utilitas lainnya)
- d) Menyelesaikan dan menuntaskan inbreng aset dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Transjakarta yang memenuhi prinsip GCG dan dapat dipertanggung jawabkan dari sisi administratif maupun keuangan.
- e) Melakukan inovasi dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan operasional pada BUMD klaster transportasi guna memperoleh sumber pendapatan *non farebox*. Sehingga akan mengurangi beban keuangan daerah.

2. Klaster Infrastruktur

- a) Menyelesaikan proyek penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tetap memperhatikan ketepatan waktu, biaya dan mutu.
- b) Menyelesaikan proyek-proyek strategis seperti sarana pengelolaan air, sarana pengelolaan sampah, sarana transportasi, sarana pengelolaan energy dan sarana prasarana kota lainnya untuk seluruh warga Jakarta terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
- c) Meningkatkan *recurring income* yang berkelanjutan untuk menuju BUMD yang *sustainable* dengan tetap memperhatikan kemampuan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

3. Klaster Properti

- a) Membantu pelaksanaan program Pemerintah Daerah dalam penyediaan perumahan yang terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

- b) Mengembangkan Kawasan Tanah Abang dengan basis kearifan lokal , keseimbangan sosial, dan tetap mengikuti ketentuan perundangan serta mengikutsertakan pihak-pihak yang berintegritas, kompeten, dan profesional.
- 4. Klaster perpasaran dan industri
 - a) Melakukan pembangunan pasar-pasar yang mempunyai nilai historis dan strategis bagi kota Jakarta serta membangun pasar-pasar tradisional yang merupakan tempat transaksi pedagang-pedagang kecil dan konsumennya.
 - b) Melakukan pengembangan aset yang strategis yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD) dengan bekerjasama secara kemitraan baik dengan BUMD lain ,BUMN maupun dunia usaha swasta.
- 5. Klaster Utilitas
 - a) Mengupayakan peningkatan cakupan layanan air bersih untuk warga Jakarta terutama masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain dengan menurunkan *Non-Revenue Water* (NRW) .
 - b) Mengupayakan percepatan penyelesaian konstruksi jaringan pengelolaan air limbah terutama lokasi-lokasi strategis yang memiliki keterbatasan akses terhadap sanitasi utamanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan tetap mempertimbangan sumber daya yang ada.
 - c) Meningkatkan pendapatanyang berkelanjutan untuk menuju BUMD yang *sustainable* dengan cara mengembangkan diversifikasi usaha serta tetap memperhatikan kemampuan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
- 6. Klaster pangan
 - a) Mengupayakan peningkatan ketersediaan pasokan pangan untuk warga Jakarta terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
 - b) Meningkatkan distribusi pangan melalui kemitraan dengan usaha kecil dan menengah guna mendukung pemerataan pendapatan bagi seluruh warga Jakarta terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
 - c) Melakukan pengelolaan *supply-demand* komoditas pangan strategis guna memperoleh informasi yang tepat dan akurat melalui sistem informasi pangan Jakarta, info stock beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan info stock pangan Pasar Induk Kramat Jati dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Jakarta.

- d) Mengefektifkan peran BUMD dalam forum Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta dan TPID Pusat sehingga informasi supply dan demand komoditas pangan strategis dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Hal ini akan memudahkan mewujudkan ketahanan pangan Jakarta.
- e) Mengupayakan peningkatan pangsa pasar dalam rangka pengamanan ketersediaan stok pangan bagi seluruh warga Jakarta terutama masyarakat berpenghasilan rendah untuk menuju BUMD yang *sustainable*.
- f) Mengupayakan terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya local bagi seluruh warga Jakarta terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

7. Klaster pariwisata

- a) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat rekreasi edukatif terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
- b) Melakukan *re-branding* usaha akomodasi yang memperhatikan kearifan lokal dengan tetap berpedoman pada usaha bisnis.
- c) Melakukan inovasi dan kreasi yang berbasikan kepada kearifan lokal untuk mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- d) Melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang kompeten baik dari kalangan Pemerintah maupun dunia usaha untuk mewujudkan kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) yang kreatif, inovatif dan informatif;
- e) Mewujudkan ekosistem kreatif di kawasan JIEP baik dari subsektor fashion, teknologi Informasi, kuliner, multimedia melalui pembinaan secara sistematis dan terstruktur bagi para pengusaha muda dengan penyediaan *coworking space*.
- f) Merencanakan revitalisasi kawasan JIEP melalui penataan ruang yang ramah lingkungan, ramah edukasi dan ramah bisnis yang dilakukan secara komprehensif, holistic dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

8. Klaster Keuangan

- a) Mendorong BUMD klaster usaha keuangan untuk memfokuskan kepada aksesibilitas usaha mikro kecil dan menengah terhadap sumber pembiayaan
- b) Mewujudkan masyarakat Jakarta sebagai masyarakat keuangan non tunai (*cashless society*) melalui produk-produk keuangan.

- c) Melakukan penjaminan kepada pelaku bisnis terutama usaha mikro kecil dan menengah sehingga mereka memperoleh perlindungan dalam melakukan bisnis.
- d) Mendorong BUMD klaster usaha keuangan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO) sesuai dengan ketentuan perundangan agar BUMD dapat menjadi lebih kompetitif dan kuat.

10.4.3 Rencana Pengembangan BUMD

1. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Pertama (2018)

Pengembangan BUMD tahun 2018 diarahkan untuk membentuk holding BUMD sesuai klaster nya masing-masing, merubah BUMD yang PD menjadi BUMD PT dan tersedianya kebijakan yang jelas tentang penugasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada BUMD serta memperjelas mekanisme perhitungan, penyediaan dana layanan dan pembayaran dana layanan PSO.

Pengembangan BUMD pada tahun 2018 diarahkan untuk pelaksanaan aksi korporasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pada tahap ini kegiatan pengembangan BUMD difokuskan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aksi korporasi BUMD. Aksi korporasi tersebut meliputi pengembangan bisnis, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD, pengembangan struktur kelembagaan, pengembangan teknologi informasi dan pengembangan struktur bisnis dan pengembangan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan BUMD.

2. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Kedua (2019)

Pengembangan BUMD pada tahun 2019 diarahkan untuk melakukan penguatan sinergi antar BUMD, BUMD dengan SKPD, BUMD dengan BUMN dan BUMD dengan dunia usaha swasta. Pada tahapan ini pengembangan BUMD difokuskan kepada pengembangan kerjasama yang saling menguntungkan baik keuntungan finansial maupun keuntungan ekonomi yang difokuskan kepada pole kemitraan yang bertanggung jawab. Dengan demikian diharapkan BUMD memperoleh keuntungan secara professional dan proporsional dengan tetap memperhatikan etika bisnis.

3. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Ketiga (2020)

Pengembangan BUMD pada tahun 2020 diarahkan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam rangka memperkuat BUMD untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh warga Jakarta. Pada tahapan ini setiap BUMD sudah mempunyai *platform* yang pro bisnis dan siap berkompetisi dengan badan usaha lain secara *fair* dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan BUMD dapat melakukan

aksi korporasinya secara lebih efisien dan efektif dan lebih kompetitif, sehingga BUMD dapat memenangi kompetisi dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun global.

4. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Keempat (2021)

Pengembangan BUMD pada tahun 2021 diarahkan untuk melakukan pemantapan dan penguatan dalam setiap aksi korporasi sehingga BUMD dapat berkelanjutan. Pada tahapan ini setiap BUMD difokuskan untuk memantapkan setiap langkah aksi korporasinya dengan berpedoman pada strategi bisnis yang beretika dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Selain itu BUMD dalam melaksanakan aksinya dilandasi dengan prinsip-prinsip GCG. Dengan demikian diharapkan BUMD pada tahapan ini mampu melakukan aksi korporasi dengan dukungan database yang akuntabel sehingga aksi korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

5. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Kelima (2022)

Pengembangan BUMD pada tahun 2022 diarahkan untuk menjadi BUMD yang berketahanan. Berketahanan dalam aspek keuangan, aspek kepengurusan, aspek Sumber Daya Manusia, aspek operasional. Pada tahapan ini BUMD diharapkan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Mampu berkompetisi secara *fair* dan beretika baik pada level lokal, regional, nasional dan global;
2. Mempunyai permodalan yang tidak tergantung pada sumber lain;
3. Mampu melaksanakan proyek penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara professional dan proporsional;
4. Komposisi kepengurusan didukung oleh para professional yang kompeten, berintegritas dan memiliki *track record* yang dipertanggungjawabkan;
5. Pengelolaan dan pengurusan BUMD dilakukan secara professional dan proporsional dengan memedomani prinsip-prinsip GCG;
6. BUMD mampu bersinergi dengan BUMD, BUMN, SKPD dan dunia usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai contributor pembangunan di DKI Jakarta.

Dengan mendasarkan pada analisis dan data sebagaimana pada uraian sebelumnya maka berikut diuraikan penjabaran rencana pengembangan BUMD periode 2017-2022. Secara rinci roadmap pengembangan BUMD dapat dideskripsikan sebagaimana Tabel 10.8 berikut.

Tabel 10.8

Roadmap Umum Pengembangan BUMD 2018-2022

Strategi	Tema Pengembangan BUMD				
	2018	2019	2020	2021	2022
	Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi	Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Eksansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan	Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan	BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yang warganya bahagia
A. Melakukan konsolidasi BUMD untuk menguatkan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis					
A1. Penataan dan penyajian SDM untuk restrukturisasi dalam rangka mendukung konsolidasi BUMD	Konsolidasi dalam rangka Pemetaan / assessment awal atas kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD dengan berpedoman pada prinsip GCG.	Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD melalui pelatihan terstruktur dan pemagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Penguatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD melalui pelatihan terstruktur, assessment, dan pemagangan dalam rangka ekspansi bisnis	Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD melalui pelatihan terstruktur, assessment, dan pemagangan	Terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD sesuai dengan formasi yang dibutuhkan untuk mendukung BUMD berketahanan guna memajukan Jakarta.
A2. Penyajian dan penataan kelembagaan BUMD	Evaluasi kinerja BUMD periode sebelumnya, dan identifikasi kelembagaan BUMD yang dibutuhkan dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi berlandaskan prinsip GCG.	Peningkatan sinergitas dalam kesiapan menuju format restrukturisasi kelembagaan BUMD yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Penguatan kesiapan menuju format restrukturisasi kelembagaan BUMD yang dibutuhkan dalam rangka ekspansi bisnis.	Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan melalui penyajian kelembagaan BUMD untuk dilakukan restrukturisasi	Restrukturisasi kelembagaan BUMD sesuai dengan struktur yang dibutuhkan dalam konsolidasi BUMD untuk mendukung BUMD berketahanan.
A3. Revitalisasi teknologi informasi yang mendukung kolaborasi BUMD	Desain sistem teknologi informasi antar BUMD yang akan dibutuhkan untuk mendukung GCG BUMD sebagai salah satu kontributor dalam mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi	Implementasi awal sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung sinergitas dan kolaborasi antar BUMD guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pengembangan sistem teknologi informasi antar BUMD dalam rangka mendukung ekspansi bisnis BUMD sebagai salah satu kontributor dalam mendukung ekonomi yang berkualitas diantaranya melalui kaasan JIEP sebagai kawasan kreatif	Pemantapan sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung kolaborasi antar BUMD diantaranya melanjutkan kawasan JIEP sebagai kawasan kreatif yang informatif	Integrasi sistem teknologi informasi yang handal untuk mendukung kolaborasi BUMD dalam mendukung BUMD berketahanan.
A4. Penataan aset dengan menggunakan sistem manajemen aset	Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset BUMD serta penataan secara profesional dengan menggunakan sistem manajemen aset yang handal, dan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.	Penyusunan pola pengelolaan aset BUMD dengan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan yang modern dan berlandaskan prinsip GCG melalui sinergi antar BUMD dan Non BUMD sebagai salah satu kontributor dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Perbaikan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan yang modern dan berlandaskan prinsip GCG serta dalam rangka ekspansi bisnis BUMD.	Pemantapan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan yang modern dan berlandaskan prinsip GCG dan sebagai salah satu kontributor dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.	Implementasi pola pengelolaan aset yang sustainable dan berketahanan terhadap perkembangan teknologi kekinian untuk mewujudkan aset BUMD lebih bermanfaat bagi kepentingan seluruh warga Jakarta.
A5. Penerapan pola investasi yang meningkatkan kinerja keuangan yang berbasis pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan	Evaluasi dan identifikasi pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD sebagai salah satu determinan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi	Penyusunan pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD sebagai salah satu determinan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.	Pengembangan pola investasi dan divestasi dalam rangka menciptakan kinerja keuangan BUMD sebagai salah satu determinan dalam mewujudkan pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan.	Pemantapan pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD sebagai salah satu determinan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan.	Implementasi pola investasi dan divestasi dalam rangka menciptakan keuangan BUMD yang berbasis pertumbuhan berkualitas dan berketahanan.

Strategi	Tema Pengembangan BUMD				
	2018	2019	2020	2021	2022
	Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi	Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Eksansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan	Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan	BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yang warganya bahagia
A6. Penerapan sistem manajemen resiko dalam rangka mendukung pencapaian kinerja keuangan yang lebih prudent	Evaluasi dan identifikasi sistem manajemen resiko yang berpedoman pada prinsip-prinsip GCG guna mendukung pemerataan pembangunan ekonomi bagi warga Jakarta	Pencapaian kinerja keuangan yang lebih prudent melalui evaluasi dan identifikasi sistem manajemen resiko melalui sinergi dan kolaborasi guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.	Pencapaian kinerja keuangan yang lebih prudent melalui evaluasi dan identifikasi dalam rangka ekspansi bisnis BUMD	Pemantapan sistem manajemen resiko (Risk Tolerance) dalam rangka mendukung pencapaian kinerja keuangan yang lebih prudent.	Implementasi sistem manajemen resiko yang lebih selektif (Risk Appetite) dalam rangka mendukung ketahanan kinerja keuangan yang lebih prudent.
B. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan BUMD					
B1. Membangun komunikasi yang efektif diantara sesama BUMD, maupun antara BUMD dengan institusi-institusi lainnya, dan menjalin kemitraan strategis	Aktifasi forum-forum komunikasi di berbagai media/sarana, diantara BUMD dan dengan institusi-institusi lainnya dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip GCG	Peningkatan sinergitas melalui aktivasi forum-forum komunikasi, FGD-FGD dalam setiap klaster bisnis yang secara khusus membahas kebijakan atau perkembangan lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Peningkatan intensitas forum-forum komunikasi dan FGD-FGD, serta memfasilitasi konsolidasi antar BUMD dalam rangka ekspansi bisnis BUMD	Pemantapan komunikasi diantara BUMD, maupun dengan calon mitra strategis dengan reputasi nasional / internasional untuk mendukung ketahanan BUMD	Memfasilitasi kemitraan strategis diantara BUMD, maupun antara BUMD dengan mitra bereputasi nasional / internasional untuk mendukung ketahanan BUMD
B2. Memastikan perjanjian kerjasama antara BUMD dengan pihak swasta maupun pihak lainnya agar memenuhi prinsip fairness, berkeadilan, dan mengutamakan kepentingan warga Jakarta	Evaluasi perjanjian kerjasama antara BUMD dengan pihak swasta dan revisi perjanjian kerjasama BUMD agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip GCG guna meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi warga Jakarta	Revitalisasi perjanjian kerjasama BUMD dengan pihak swasta dan BUMN dengan berlandaskan prinsip GCG guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Konsolidasi berkesinambungan dan ekspansi bisnis dengan fokus perjanjian kerjasama BUMD dengan pihak swasta untuk menjadikan kerjasama yang memenuhi prinsip-prinsip GCG dalam mendukung program Pemerintah DKI Jakarta	Pemantapan dan peningkatan perjanjian kerjasama BUMD dengan pihak swasta dan BUMN untuk menjadikan kerjasama yang memenuhi prinsip-prinsip GCG dalam mendukung program Pemerintah DKI Jakarta	Implementasi perjanjian kerjasama BUMD dengan pihak swasta dan BUMN secara profesional dan proporsional sehingga meningkatkan ketahanan BUMD dan kesejahteraan masyarakat Jakarta
B3. Mengembangkan bentuk-bentuk kerjasama/jaringan bisnis (business linkage) diantara BUMD maupun dengan yang lain, yang diarahkan untuk saling menguntungkan guna mewujudkan kesejahteraan warga Jakarta	Inventarisasi determinan bisnis dan skema bisnis antar BUMD melalui kolaborasi yang saling menguntungkan guna mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi bagi warga Jakarta	Peningkatan bisnis antar BUMD melalui penguatan sinergitas dan kolaborasi yang saling menguntungkan guna mewujudkan kesejahteraan warga Jakarta serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Eksansi bisnis BUMD melalui kolaborasi / business linkage, yang saling menguntungkan guna mewujudkan kesejahteraan warga Jakarta	Pemantapan bisnis antar BUMD melalui kolaborasi / business linkage, yang saling menguntungkan guna mewujudkan kesejahteraan warga Jakarta	Pengelolaan bisnis antar BUMD yang berkelanjutan dan saling menguntungkan guna mewujudkan BUMD yang berketahanan dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta.
C. Melakukan Ekspansi dan diversifikasi usaha					

Tema Pengembangan BUMD					
Strategi	2018	2019	2020	2021	2022
	Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi	Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Eksansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan	Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan	BUMD yang Berkegiatan guna menuju Jakarta kota maju yang warganya bahagia
C1. Memperluas Klaster usaha baru yang berorientasi pemanfaatan umum dalam memproduksi barang dan jasa untuk masyarakat DKI Jakarta guna mendukung tugas peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat DKI Jakarta	Pendirian usaha baru yang berorientasi pemanfaatan umum dalam memproduksi barang dan jasa untuk masyarakat DKI Jakarta dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG guna mendukung peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat DKI Jakarta.	Pendirian dan Pembinaan usaha baru yang sesuai dengan potensi DKI Jakarta guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pembinaan dan Penguatan usaha baru melalui ekspansi bisnis yang sesuai dengan potensi DKI Jakarta guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta	Pendirian dan Pemantapan usaha baru yang sesuai dengan potensi DKI Jakarta guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta	Pendirian dan Pengelolaan secara profesional usaha baru yang sesuai dengan potensi DKI Jakarta guna mendukung tugas peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta
C2. Mengembangkan sistem pelayanan langsung kepada masyarakat oleh BUMD yang lebih efektif dan efisien dibidang transportasi, penyediaan pangan, air minum, air limbah, akses keuangan dan pelayanan perumahan	Evaluasi hasil layanan dan penyusunan sistem pelayanan langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh BUMD antara lain transportasi, penyediaan pangan, air minum, air limbah, akses keuangan dan penyediaan perumahan agar lebih efektif dan efisien dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG guna terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi warga Jakarta.	Pengembangan pelayanan langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh BUMD maupun sinergi antar BUMD antara lain transportasi, penyediaan pangan, air minum, air limbah, akses keuangan dan penyediaan perumahan agar lebih efektif dan efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Peningkatan pelayanan langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh BUMD antara lain transportasi, penyediaan pangan, air minum, air limbah, akses keuangan dan penyediaan perumahan agar lebih efektif dan efisien dalam rangka ekspansi bisnis BUMD.	Pemantapan pelayanan langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh BUMD antara lain transportasi, penyediaan pangan, air minum, air limbah, akses keuangan dan penyediaan perumahan agar lebih efektif dan efisien.	Perwujudan kemapanan dan keberlanjutan sistem pelayanan yang handal kepada masyarakat oleh BUMD
C3. Mengembangkan bisnis pangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pengelolaan inflasi yang sistematis, serta penyerapan tenaga kerja yang proporsional.	Inventarisasi determinan yang mempengaruhi Bisnis Pangan BUMD dan penyusunan strategi bisnis usaha Pangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pengelolaan inflasi yang sistematis, penyerapan tenaga kerja yang proporsional dan pemerataan pembangunan ekonomi warga Jakarta.	Peningkatan strategi bisnis usaha Pangan yang handal dan profesional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan melalui sinergi dalam pengelolaan inflasi yang sistematis serta penyerapan tenaga kerja yang proporsional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pengembangan bisnis melalui ekspansi usaha Pangan yang handal dan profesional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pengelolaan inflasi yang sistematis serta penyerapan tenaga kerja yang proporsional.	Pemantapan strategi bisnis usaha Pangan yang handal dan profesional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pengelolaan inflasi yang sistematis serta penyerapan tenaga kerja yang proporsional.	Pengelolaan strategi bisnis usaha Pangan yang berkelanjutan dan berkegiatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pengelolaan inflasi yang sistematis serta penyerapan tenaga kerja yang proporsional.
C4. Membangun sistem distribusi bahan pokok strategis yang efektif dan efisien	Inventarisasi determinan yang mempengaruhi distribusi, aksesibilitas, keterjangkauan harga dan keamanan bahan pokok strategis serta penyusunan strategi sistem distribusi bahan pokok strategis antara lain melalui Jak grosir, mini distribut chanel dan lembaga usaha UMKM guna terciptanya pemerataan pembangunan ekonomi bagi warga Jakarta .	Peningkatan sinergitas dalam peningkatan sistem distribusi bahan pokok yang strategis dan efisien, efektif untuk mendukung masyarakat Jakarta dalam aksesibilitas terhadap bahan pangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.	Pengembangan sistem distribusi bahan pokok strategis yang efisien, efektif dan mendukung masyarakat Jakarta dalam aksesibilitas terhadap bahan pangan serta dalam rangka ekspansi bisnis BUMD.	Pemantapan sistem distribusi bahan pokok strategis yang efektif dan efisien untuk mendukung masyarakat Jakarta dalam aksesibilitas terhadap bahan pangan.	Pengelolaan sistem distribusi bahan pokok strategis yang berkelanjutan guna terciptanya ketahanan pangan masyarakat Jakarta.
C5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek-proyek penugasan	Inventarisasi determinan yang mempengaruhi kesuksesan proyek penugasan pada BUMD dan penyusunan strategi baru dalam hal pelaksanaan proyek penugasan dengan mempedomani prinsip-prinsip GCG.	Peningkatan sinergitas dalam pelaksanaan proyek penugasan secara profesional dan proporsional, efisien dan efektif sehingga output yang diperoleh yang diperoleh berkualitas dan bermanfaat bagi warga Jakarta serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.	Penguatan proyek penugasan secara profesional dan proporsional, efisien dan efektif sehingga output yang diperoleh berkualitas dan bermanfaat bagi warga Jakarta.	Pemantapan proyek penugasan secara profesional dan proporsional, efisien dan efektif sehingga output yang diperoleh berkualitas dan bermanfaat bagi warga Jakarta.	Pengelolaan proyek penugasan secara profesional dan proporsional, efisien dan efektif sehingga menghasilkan output yang diperoleh berkualitas dan bermanfaat bagi warga Jakarta.

Tema Pengembangan BUMD					
Strategi	2018	2019	2020	2021	2022
	Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi	Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Eksansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan	Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan	BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yang warganya bahagia
C6. Menjalankan peran aktif dalam program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga Jakarta melalui KJP Plus, DP O Rupiah, OK OTRIP	Pelaksanaan Program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip GCG dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan ekonomi warga Jakarta melalui KJP Plus, DP O Rupiah, OK OTRIP	Pengelolaan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkualitas dengan mengedepankan sinergitas untuk peningkatan kesejahteraan warga Jakarta dan tingkat kebahagiaan warga Jakarta melalui program KJP Plus, DP O Rupiah, OK OTRIP dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Eksansi bisnis dalam menjalankan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkualitas dengan mengedepankan kesejahteraan warga Jakarta dan tingkat kebahagiaan warga Jakarta melalui KJP Plus, DP O Rupiah, OK OTRIP	Pemantapan program unggulan yang berkualitas dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan warga Jakarta dan tingkat kebahagiaan warga Jakarta melalui KJP Plus, DP O Rupiah, OK OTRIP	Program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjalan secara berkesinambungan, berkelanjutan dan terintegrasi sesuai dengan tujuan mensejahterakan masyarakat melalui KJP Plus, DP O Rupiah dan OK OTRIP
C7. Menjalankan peran aktif dalam pembangunan infrastruktur, jaringan distribusi dan relokasi jaringan air bersih dan air limbah, dan pelaksanaan kelanjutan pembangunan infrastruktur sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi warga Jakarta agar tercipta pemerataan pembangunan ekonomi bagi seluruh warga Jakarta.	Inventarisasi hasil pembangunan infrastruktur, jaringan distribusi dan relokasi jaringan air bersih dan air limbah dan pelaksanaan kelanjutan pembangunan infrastruktur sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi warga Jakarta agar tercipta pemerataan pembangunan ekonomi bagi seluruh warga Jakarta.	Sinergi dalam penataan infrastruktur air bersih dan air limbah agar berkesinambungan guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi warga Jakarta	Eksansi bisnis dalam rangka Pengembangan infrastruktur air bersih dan air limbah yang berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi seluruh warga Jakarta.	Pemantapan infrastruktur air bersih dan air limbah yang berkelanjutan dan berkesinambungan guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi seluruh warga Jakarta	Pengelolaan infrastruktur air bersih dan air limbah yang berkelanjutan dan berkesinambungan guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi warga Jakarta
C8. Menjalankan peran aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan air bersih dan pengolahan air limbah	Inventarisasi determinan yang mempengaruhi kesuksesan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan air bersih dan pengolahan air limbah agar tercipta pemerataan dan keadilan bagi seluruh warga Jakarta	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan air bersih melalui pola sinergi yang efektif guna mensejahterakan warga Jakarta	Eksansi bisnis dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan air bersih dan pengolahan air limbah	Pemantapan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan air bersih dan pengolahan air limbah yang profesional, proporsional, efisien dan efektif serta berketahanan.	Pengelolaan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan air bersih dan pengolahan air limbah yang profesional, proporsional, efisien dan efektif serta berketahanan.
C9. Mengembangkan Bisnis Pariwisata BUMD untuk meningkatkan indeks kebahagiaan warga Jakarta	Inventarisasi determinan yang mempengaruhi Bisnis Pariwisata BUMD dan penyusunan strategi bisnis usaha pariwisata untuk meningkatkan indeks kebahagiaan warga Jakarta agar tercipta keadilan dan pemerataan ekonomi bagi seluruh warga Jakarta.	Peningkatan strategi bisnis melalui sinergi usaha pariwisata BUMD yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta dalam rangka peningkatan indeks kebahagiaan warga Jakarta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pengembangan strategi melalui ekspansi bisnis pariwisata BUMD yang berdasarkan pada potensi Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dalam rangka peningkatan indeks kebahagiaan warga Jakarta	Pemantapan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD yang berdasarkan pada potensi Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dalam rangka peningkatan indeks kebahagiaan warga Jakarta	Pengelolaan strategi bisnis usaha pariwisata BUMD yang berkualitas dan berkesinambungan serta berawasan lingkungan guna terciptanya ketahanan untuk meningkatkan indeks kebahagiaan warga Jakarta.

Tema Pengembangan BUMD					
Strategi	2018	2019	2020	2021	2022
	Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi	Sinergi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Eksansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan	Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan	BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yang warganya bahagia
C10. Menjalankan peran aktif dalam pengembangan teknologi informasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga Jakarta	Penataan dan konsolidasi bisnis teknologi, informasi dan telekomunikasi antara lain sistem JakOne untuk mendukung pengembangan teknologi informasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI guna mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi bagi seluruh warga Jakarta.	Sinergi dalam peningkatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan teknologi informasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga Jakarta	Pengembangan bisnis teknologi informasi dan telekomunikasi dalam rangka ekspansi bisnis untuk mendukung pengembangan teknologi informasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pembangunan kota Jakarta	Pemantapan bisnis teknologi, informasi dan telekomunikasi antara lain sistem JakOne untuk mendukung pengembangan teknologi informasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga Jakarta	Pengelolaan bisnis teknologi, informasi dan telekomunikasi antara lain sistem JakOne untuk mendukung pengembangan teknologi informasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga Jakarta
C11. Mengembangkan bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu sesuai yang berlandaskan prinsip GCG guna peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan ekonomi bagi warga Jakarta	Penataan dan konsolidasi bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu sesuai yang berlandaskan prinsip GCG guna peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan ekonomi bagi warga Jakarta	Sinergi dalam peningkatan bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu yang profesional, proporsional, efektif guna peningkatan kesejahteraan warga Jakarta serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Eksansi bisnis infrastruktur energy BUMD antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu yang profesional, proporsional, efektif dan efisien guna peningkatan kesejahteraan warga Jakarta	Pemantapan bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu yang profesional, proporsional, efektif dan efisien guna peningkatan kesejahteraan warga Jakarta	Pengelolaan bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu yang profesional, proporsional, efektif dan efisien guna peningkatan kesejahteraan warga Jakarta
D. Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)	Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan aksi korporasi yang diantaranya melalui: 1. Penataan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD untuk mencapai korporasi yang profesional, tangguh, berdaya saing serta memberi nilai tambah pada share holder; 2. Evaluasi regulasi secara sistematis dan terstruktur atas hasil kinerja BUMD; 3. Konsolidasi kelembagaan BUMD; 4. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset; dan 5. Evaluasi Pendapatan BUMD dan penyusunan metode pemerolehan penerimaan hasil operasional, guna meningkatkan pendapatan BUMD melalui inovasi dan kreasi; 6. Evaluasi perjanjian kerjasama antara BUMD dengan pihak swasta; 7. Penataan dan konsolidasi bisnis teknologi, informasi dan telekomunikasi Dengan demikian diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerataan pembangunan ekonomi bagi seluruh warga Jakarta.	Peningkatan sinergitas dalam menjalankan aksi korporasi dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG yang diantaranya melalui: 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD untuk mencapai korporasi yang profesional, tangguh, berdayasaing serta memberi nilai tambah pada share holder; 2. Penyusunan regulasi yang probisnis dan probirokrasi; 3. Perbaikan kelembagaan BUMD untuk menjadikan BUMD yang tangguh, adaptif; dan 4. Pengintegrasian sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung kolaborasi antar BUMD; 5. Penyusunan pola pengelolaan aset BUMD berbasis TI; dan 6. Pelaksanaan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkualitas; 7. Penyusunan pola investasi dalam rangka menciptakan keuangan yang berbasis pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan; dan 8. Pengembangan sistem manajemen resiko	Eksansi bisnis dengan tetap menerapkan prinsip GCG yang diantaranya melalui: 1. Penguatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD untuk mencapai korporasi yang profesional, tangguh, berdayasaing serta memberi nilai tambah pada share holder; 2. Penguatan regulasi yang probisnis dan probirokrasi; Penguatan kelembagaan BUMD untuk menjadikan BUMD yang tangguh, adaptif; 3. Pengembangan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD yang mendasarkan pada potensi Provinsi DKI Jakarta;	Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan dengan tetap memedomani prinsip GCG yang diantaranya melalui : 1. Pemantapan kualitas dan kapasitas SDM BUMD Pemantapan kualitas dan kapasitas SDM BUMD; 2. Pemantapan regulasi yang probisnis dan probirokrasi Pemantapan kelembagaan BUMD untuk menjadikan BUMD yang tangguh, adaptif; 3. Penguatan sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung kolaborasi antar BUMD 4. Pemantapan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi 5. Pemantapan dan peningkatan perjanjian kerjasama BUMD dengan pihak swasta; 6. Pemantapan pola investasi; Pemantapan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD yang mendasarkan pada potensi Provinsi DKI	1. Terwujudnya SDM BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan yang berkontribusi secara nyata kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 2. Pengelolaan regulasi agar aksi korporasi BUMD dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal; 3. Terwujudnya integrasi sistem yang handal, mantap dan mampu merujuk kinerja antar BUMD yang handal, adaptif, compatible, dan update berbasis Risk Management System

Tema Pengembangan BUMD					
Strategi	2018	2019	2020	2021	2022
	Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi	Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Eksansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan	Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan	BUMD yang Berkelanjutan guna menuju Jakarta kota maju yang warganya bahagia
E. Memperluas sumber-sumber modalan/ pembiayaan BUMD.	<p>Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam memperluas sumber modalan BUMD yang diantaranya melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. konsolidasi kelembagaan bumd melalui evaluasi yang sistematis dan terstruktur; 2. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset; 3. evaluasi kepemilikan saham pada BUMD dan pola investasi; 4. evaluasi perjanjian kerjasama antara BUMD dengan pihak swasta dan revisi perjanjian; dengan upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerataan pembangunan ekonomi bagi warga Jakarta 	<p>Peningkatan sinergitas dalam memperluas modalan BUMD yang diantaranya melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi perjanjian kerjasama BUMD dengan pihak swasta; 2. Penyusunan pola investasi dalam rangka menciptakan keuangan yang berbasis pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan; 3. Peningkatan strategi bisnis usaha pariwisata BUMD; 4. Pembinaan usaha baru yang sesuai dengan potensi DKI Jakarta; 	<p>Pelaksanaan ekspansi bisnis dengan memperluas sumber modalan yang diantaranya melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan BUMD untuk menjadikan BUMD yang tangguh, adaptif, mampu merespon perubahan 2. Perbaikan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi; 3. Penguatan usaha baru yang sesuai dengan potensi DKI pemertanian 4. Pengembangan penerimaan hasil operasional bisnis usaha Pangan; 5. Penguatan pola investasi Pengembangan bisnis antar BUMD yang kolaborasi 6. Pengembangan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD 	<p>Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan dengan memperluas sumber modalan/ pembiayaan BUMD yang diantaranya melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan kualitas dan kapasitas SDM BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan; 2. Pemantapan kelembagaan BUMD untuk menjadikan BUMD; 3. Penguatan sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung kolaborasi; 4. Pemantapan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi; 5. Pemantapan strategi bisnis usaha Pangan; 6. Pemantapan pola investasi Pemantapan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD; 7. Pemantapan bisnis infrastruktur energy 8. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian konstruksi prasarana sarana angkutan masal berbasis rel fase timur – barat; 2. Pengelolaan program subsidi pangan plus semakin mantap dan berkesinambunga 3. Perwujudan pemerolehan penerimaan hasil operasional 4. Program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjalan secara berkesinambungan 5. Pengelolaan bisnis teknologi, informasi dan telekomunikasi
F. Meningkatkan pemberdayaan BUMD.	<p>Peningkatan pemberdayaan BUMD yang berpegang pada prinsip GCG dengan tujuan mendorong pemerataan ekonomi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan 2. Evaluasi regulasi secara sistematis dan terstruktur 3. Konsolidasi kelembagaan BUMD melalui evaluasi yang sistematis dan terstruktur 4. Revitalisasi teknologi informasi yang mendukung aksi korporasi BUMD; 5. Pendirian usaha baru yang sesuai dengan potensi DKI Jakarta; 6. Penyusunan desain pembangunan Transit Oriented Development (TOD) 7. Evaluasi dan identifikasi sistem manajemen resiko 8. Penataan dan konsolidasi bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu 	<p>Peningkatan sinergitas dalam rangka pemberdayaan BUMD melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan; 2. Penyusunan regulasi yang probisnis dan probirokrasi; Perbaikan kelembagaan BUMD untuk menjadikan BUMD yang tangguh, adaptif; 3. Penguatan sistem teknologi informasi antar BUMD 4. Penyusunan pola pengelolaan aset BUMD dengan berbasis teknologi informasi 5. Pembinaan usaha baru yang sesuai dengan potensi DKI Jakarta; 6. Penyusunan Rencana dan pelaksanaan investasi BUMD dan pola pembiayaan pembangunan melalui kemitraan BUMD dengan swasta 7. Peningkatan bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu 	<p>Eksansi BUMD dengan meningkatkan pemberdayaan BUMD melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan melalui mentoring, assesment leader, pelatihan terstruktur serta penguatan regulasi yang probisnis dan probirokrasi 2. Penguatan regulasi yang probisnis dan probirokrasi 3. Penguatan kelembagaan BUMD untuk menjadikan BUMD yang tangguh, adaptif, 4. Pengembangan sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung kolaborasi antar BUMD 5. Perbaikan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi 6. Penguatan usaha baru yang sesuai dengan potensi DKI Jakarta 	<p>Peningkatan pemberdayaan BUMD dalam rangka pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan kualitas dan kapasitas SDM BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan melalui mentoring, assesment leader, pelatihan terstruktur serta penguatan regulasi yang probisnis dan probirokrasi 2. Pemantapan regulasi yang probisnis dan probirokrasi 3. Pemantapan sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung kolaborasi antar BUMD 4. Pemantapan sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung kolaborasi antar BUMD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya SDM BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan yang berkontribusi secara nyata kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 2. Perwujudan BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan yang berketahanan; 3. Pengelolaan bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan

Tema Pengembangan BUMD					
Strategi	2018	2019	2020	2021	2022
	Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi	Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Eksansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan	Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan	BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yang warganya bahagia
			<div>7. Penguatan pola investasi dalam rangka menciptakan keuangan yang berbasis pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan</div> <div>8. Penguatan sistem manajemen resiko (Risk Capacity)</div> <div>9. Pengembangan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD</div> <div>10. Pengembangan bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu</div>	<div>5. Pemantapan system pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi dan berkelanjutan</div> <div>6. Pemantapan pola investasi dalam rangka menciptakan keuangan yang berbasis pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan</div> <div>7. Pemantapan sistem manajemen resiko (Risk Capacity)</div> <div>8. Pemantapan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD</div> <div>9. Pemantapan bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu</div>	
G. Mengalokasikan PMD secara selektif dan/atau terbatas untuk hanya proyek penugasan tertentu.	<div>Pengalokasian PMD guna mendukung penugasan Pemerintah Daerah pada BUMD dengan mempedomani prinsip GCG yang bertujuan mendorong pemerataan ekonomi melalui:</div> <div>1. Inventarisasi determinan yang mempengaruhi kesuksesan proyek penugasan pada BUMD dan penyusunan strategi baru dalam hal pelaksanaan proyek penugasan</div> <div>2. Inventarisasi determinan yang mempengaruhi distribusi, aksesibilitas, keterjangkauan harga dan keamanan bahan pokok strategis serta penyusunan strategi sistem distribusi bahan pokok strategis antara lain melalui Jak grosir, mini distribusi chanel dan lembaga usaha UMKM.</div>	<div>Pengalokasian PMD guna mendukung penugasan pemerintah daerah pada BUMD dengan meningkatkan sinergitas BUMD yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui :</div> <div>1. Pelaksanaan proyek penugasan secara profesional dan proporsional, efisien dan efektif sehingga output yang diperoleh berkualitas dan bermanfaat bagi warga Jakarta</div> <div>2. Peningkatan sistem distribusi bahan pokok strategis yang efisien, efektif dan mendukung masyarakat Jakarta dalam aksesibilitas terhadap bahan pangan.</div> <div>3. Penataan infrastruktur air bersih dan air limbah yang berlanjut dan berkesinambungan guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi warga Jakarta</div> <div>4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyedotan dan pengolahan air limbah</div>	<div>Pengalokasikan PMD secara selektif dan/atau terbatas untuk mendukung penugasan Pemerintah serta ekspansi bisnis BUMD melalui</div> <div>1. Penguatan proyek penugasan secara profesional dan proporsional, efisien dan efektif sehingga output yang diperoleh berkualitas dan bermanfaat bagi warga Jakarta</div> <div>2. Pengembangan sistem distribusi bahan pokok strategis yang efisien, efektif dan mendukung masyarakat Jakarta dalam aksesibilitas terhadap bahan pangan.</div> <div>3. Pengembangan infrastruktur air bersih dan air limbah yang berlanjut dan berkesinambungan guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi warga Jakarta</div>	<div>Pengalokasian PMD secara selektif dan/atau terbatas dalam rangka pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan guna mendukung penugasan pemerintah daerah pada BUMD</div> <div>1. Pemantapan proyek penugasan secara profesional dan proporsional, efisien dan efektif sehingga output yang diperoleh berkualitas dan bermanfaat bagi warga Jakarta</div> <div>2. Pengelolaan sistem distribusi bahan pokok strategis yang efisien, efektif dan mendukung masyarakat Jakarta dalam aksesibilitas terhadap bahan pangan.</div> <div>3. Pengelolaan infrastruktur air bersih dan air limbah yang berlanjut dan berkesinambungan guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi warga Jakarta</div> <div>4. Pengelolaan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyedotan dan pengolahan air limbah yang proporsional, efisien dan efektif</div>	

Tema Pengembangan BUMD					
Strategi	2018	2019	2020	2021	2022
	Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi	Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Eksansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan	Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan	BUMD yang Berkelanjutan guna menuju Jakarta kota maju yang warganya bahagia
	<p>3. Inventarisasi hasil pembangunan infrastruktur, jaringan distribusi dan relokasi jaringan air bersih dan air limbah dan pelaksanaan kelanjutan pembangunan infrastruktur sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi warga Jakarta</p> <p>4. Inventarisasi determinan yang mempengaruhi kesuksesan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyediaan dan pengolahan air limbah</p> <p>5. Inventarisasi determinan yang mempengaruhi kesuksesan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyediaan dan pengolahan air limbah</p> <p>6. Inventarisasi determinan yang mempengaruhi kesuksesan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyediaan dan pengolahan air limbah</p> <p>7. Inventarisasi determinan yang mempengaruhi kesuksesan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyediaan dan pengolahan air limbah</p>	<p>5. Peningkatan strategi bisnis usaha pariwisata BUMD yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta dalam rangka peningkatan indeks kebahagiaan warga Jakarta</p> <p>6. Pengelolaan program unggulan BUMD yang mendasarkan pada potensi Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dalam rangka peningkatan indeks kebahagiaan warga Jakarta</p> <p>7. Menyusun desain prasarana sarana angkutan masal berbasis rel fase timur – barat</p>	<p>4. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyediaan dan pengolahan air limbah</p> <p>5. Pengembangan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD yang mendasarkan pada potensi Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dalam rangka peningkatan indeks kebahagiaan warga Jakarta</p> <p>6. Penguatan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkualitas dengan meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta dan tingkat kebahagiaan warga Jakarta secara menyeluruh antara lain KJP Plus, DP O Rupiah, OK OCE</p> <p>7. Dimulainya fase konstruksi prasarana sarana angkutan masal berbasis rel fase timur - barat</p>	<p>4. Pemantapan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyediaan dan pengolahan air limbah</p> <p>5. Pemantapan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD yang mendasarkan pada potensi Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dalam rangka peningkatan indeks kebahagiaan warga Jakarta</p> <p>6. Pemantapan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkualitas dengan meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta dan tingkat kebahagiaan warga Jakarta secara menyeluruh antara lain KJP Plus, DP O Rupiah, OK OCE</p> <p>7. Percepatan konstruksi prasarana sarana angkutan masal berbasis rel fase timur - barat</p>	<p>5. Pengelolaan strategi bisnis usaha pariwisata BUMD yang berkualitas dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan untuk meningkatkan indeks kebahagiaan warga Jakarta</p> <p>6. Program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi sesuai dengan tujuan mensejahterakan masyarakat melalui KJP Plus, DP O Rupiah dan OK OCE</p> <p>7. Penyelesaian konstruksi prasarana sarana angkutan masal berbasis rel fase timur - barat</p>
H. Mendorong BUMD untuk Go Public.	Evaluasi kepemilikan saham dan pola investasi BUMD serta menyusun prioritas BUMD yang akan ditetapkan sebagai perusahaan go public dengan berpedoman pada prinsip GCG guna mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi warga Jakarta.	Sinergi dalam persiapan dan pengajuan BUMD untuk diajukan sebagai perusahaan go public untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Melanjutkan tahapan persiapan dan tahapan-tahapan pengajuan BUMD untuk diajukan dan ditetapkan sebagai perusahaan go public dalam rangka ekspansi bisnis BUMD.	Melakukan evaluasi kinerja bisnis dan pelayanan BUMD yang sudah go public	Melakukan pemantapan dan penguatan kinerja bisnis dan pelayanan BUMD yang sudah go public.
I. Melakukan Transformasi bisnis BUMD.	inventarisasi terhadap tantangan-tantangan bisnis BUMD yang ada saat ini, sehingga dapat diidentifikasi bentuk penyediaan bisnis baru yang sesuai perkembangan lingkungan baru sehingga BUMD dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja bisnisnya serta mampu mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat DKI Jakarta.	Menjalankan bentuk bisnis baru hasil transformasi dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja bisnis BUMD serta mendukung tugas peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Penguatan bentuk bisnis baru hasil transformasi dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja bisnis BUMD serta mendukung tugas peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dan dalam rangka ekspansi bisnis BUMD	Pemantapan bentuk bisnis baru hasil transformasi dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja bisnis BUMD serta mendukung tugas peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta	Pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan bentuk bisnis baru hasil transformasi dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja bisnis BUMD serta mendukung tugas peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta

Pada masa yang akan datang, melalui pengelolaan BUMD yang profesional, proporsional, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan diharapkan akan terwujud BUMD DKI Jakarta yang tangguh, berdaya saing, kuat dan menguntungkan. Dengan demikian BUMD DKI Jakarta dapat menjadi sebagai benchmark bagi pengembangan pengelolaan BUMD di Indonesia.



BAB XI

PENUTUP



Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 merupakan penjabaran Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah di Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022.

BAB PENUTUP

XI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah di Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022. Oleh karena itu unsur Perangkat Daerah, masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.

Kemudian dalam merencanakan pembangunan daerah periode 2017-2022 sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen RPJMD, Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah untuk kemudian menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil RPJMD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin dari kualitas manusianya, kemajuan infrastruktur dan ekonomi, integritas birokrasinya, lestari lingkungannya serta maju kotanya.

Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Jakarta akan semakin dekat untuk mencapai visi jangka panjangnya, yaitu “Jakarta: Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”. Kota yang menjadi pusat Asia Tenggara, memegang peranan penting di Asia, serta kota modern yang sejajar dengan kota-kota besar di dunia.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Ttd.

ANIES BASWEDAN



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Gedung Balaikota Blok G Lt. 2 & 13, Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Jakarta 10110

Telp: (62-21) 382-2261, 384-2061, 384-2062 Fax: (62-21) 386-0521

Email: kontak@bapedadki.net, Website: www.bappeda.jakarta.go.id

